

## JADWAL

Tanggal Efektif	:	27 Juni 2023
Masa Penawaran Umum Obligasi	:	4 & 5 Juli 2023
Tanggal Penjatahan	:	7 Juli 2023
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	11 Juli 2023
Tanggal Distribusi Obligasi ("Tanggal Emisi")	:	11 Juli 2023
Tanggal Pencatatan Obligasi pada PT Bursa Efek Indonesia	:	12 Juli 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



## PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.

### KEGIATAN USAHA UTAMA

Penyedia Jasa Infrastruktur Telekomunikasi Terintegrasi melalui Perusahaan Anak

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

### KANTOR PUSAT

The Convergence Indonesia, lantai 11

Kawasan Rasuna Epicentrum

Jl. H.R. Rasuna Said

Jakarta Selatan 12940 - Indonesia

Telepon : (62 21) 2924 8900; Faksimili : (62 21) 2157 2015

Email: corporate.secretary@tower-bersama.com

www.tower-bersama.com

### KANTOR REGIONAL

18 kantor regional yang terletak di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, Padang, Lampung, Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Manado, Makassar dan Papua

### PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

#### OBLIGASI BERKELANJUTAN VI TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE

DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp20.000.000.000.000 (DUA PULUH TRILIUN RUPIAH)

("OBLIGASI BERKELANJUTAN VI")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan :

#### OBLIGASI BERKELANJUTAN VI TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP I TAHUN 2023

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.500.000.000.000 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 2 (dua) seri yaitu:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,90% (lima koma sembilan nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 11 Oktober 2023, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 21 Juli 2024 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 11 Juli 2026 untuk Obligasi Seri B.

OBLIGASI BERKELANJUTAN VI TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITETAPKAN KEMUDIAN.

### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN BUYBACK TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH PERSEROAN SEBAGAI PERUSAHAAN HOLDING BERGANTUNG PADA PEMBAYARAN DARI PERUSAHAAN ANAK. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI BERKELANJUTAN VI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA ("FITCH") DENGAN PERINGKAT :

AA+<sup>(idn)</sup> (Double A Plus)

KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

### OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini.

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

INDOPREMIER

PT Indo Premier  
Sekuritas

CIMB NIAGA  
SEKURITAS

PT CIMB Niaga  
Sekuritas

DBS

PT DBS Vickers Sekuritas  
Indonesia

trimegah

PT Trimegah Sekuritas  
Indonesia Tbk.

UOB KayHian

PT UOB Kay Hian  
Sekuritas

### WALI AMANAT

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2023.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan ini kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK di Jakarta dengan Surat No. 300/TB-TBI-00/FIN/05/III/2023 pada tanggal 12 April 2023 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan No. 3608, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan No. 6845 (selanjutnya disebut "**UUP2SK**").

Perseroan berencana untuk mencatatkan "Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023" pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. S-03478/BEI.PP1/05-2023 tanggal 8 Mei 2023, sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan obligasi yang ditetapkan oleh BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pemesanan Obligasi tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum ("**Peraturan No.IX.A.2**").

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut di dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XII dalam Prospektus ini.

**PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

**PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK ("POJK NO. 49/2020").**



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
ISTILAH DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA.....	xvii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN .....	xix
RINGKASAN.....	xxi
I. PENAWARAN UMUM .....	1
1. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan .....	1
2. Penawaran Umum Obligasi .....	1
3. Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan.....	16
4. Keterangan Mengenai Hasil Pemeringkatan Obligasi .....	16
5. Keterangan Mengenai Wali Amanat .....	19
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI .....	20
III. PERNYATAAN UTANG .....	22
1. Liabilitas Jangka Pendek .....	22
2. Liabilitas Jangka Panjang .....	25
3. Komitmen dan Kontinjensi.....	39
4. Perubahan Liabilitas Setelah 31 Desember 2022 sampai dengan Tanggal Prospektus ini Diterbitkan .....	40
5. Utang yang akan Jatuh Tempo dalam 3 (Tiga) Bulan .....	42
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....	44
1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.....	44
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian .....	45
3. Data Keuangan Lainnya.....	46
4. Rasio-Rasio Penting.....	46
5. Rasio-Rasio dalam Perjanjian Pinjaman.....	47
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN .....	48
1. Umum .....	48
2. Faktor yang Memengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasional Perseroan .....	49
3. Kebijakan Akuntansi Penting .....	52
4. Analisis Laba Rugi Komprehensif .....	53
5. Operasi per Segmen.....	57
6. Hasil Kegiatan Operasional.....	58
7. Aset, Liabilitas dan Ekuitas .....	61
8. Likuiditas dan Sumber Pendanaan.....	64
9. Belanja Modal .....	65
10. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing dan Risiko Tingkat Suku Bunga.....	66
11. Kewajiban dari Ikatan Perjanjian .....	67
VI. FAKTOR RISIKO .....	68
1. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan .....	68
2. Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung yang Dapat Memengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Grup Tower Bersama .....	68
3. Risiko Umum.....	78
4. Risiko Bagi Investor.....	80
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	81
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	82
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN .....	82
1. Riwayat Singkat Perseroan .....	82
2. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan .....	83
3. Dokumen Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak.....	84



4.	Perjanjian Penting .....	85
5.	Keterangan Tentang Aset Tetap .....	159
6.	Asuransi .....	160
7.	Ketentuan Hukum dan Kebijakan Pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup .....	160
8.	Struktur Kepemilikan Perseroan dan Perusahaan Anak .....	162
9.	Keterangan Tentang Pemegang Saham Utama Berbadan Hukum .....	164
10.	Pengurusan dan Pengawasan Perseroan .....	165
11.	Tata Kelola Perusahaan .....	169
12.	Sumber Daya Manusia .....	178
13.	Perkara yang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak .....	182
B.	KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK .....	182
C.	KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....	191
1.	Umum .....	191
2.	Keunggulan Kompetitif .....	192
3.	Strategi Bisnis Grup Tower Bersama .....	195
4.	Portofolio <i>Sites</i> Telekomunikasi Grup Tower Bersama .....	196
5.	Menara Telekomunikasi <i>Build-to-Suit</i> .....	198
6.	Akuisisi Portofolio <i>Sites</i> Telekomunikasi .....	198
7.	Kolokasi .....	199
8.	Kegiatan Usaha .....	199
9.	Pengendalian Mutu .....	201
10.	Kegiatan Pemasaran dan Penjualan .....	202
11.	Penyewa Utama <i>Sites</i> Telekomunikasi Grup Tower Bersama .....	202
12.	Persaingan Usaha .....	203
13.	Kekayaan Intelektual .....	203
14.	Kecenderungan Usaha .....	205
IX.	PERATURAN INDUSTRI MENARA TELEKOMUNIKASI INDONESIA .....	206
X.	PERPAJAKAN .....	213
XI.	PENJAMINAN EMISI OBLIGASI .....	214
XII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL .....	215
XIII.	KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT .....	218
XIV.	TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI .....	226
1.	Pendaftaran Obligasi ke Dalam Penitipan Kolektif .....	226
2.	Pemesan Yang Berhak .....	226
3.	Pemesanan Pembelian Obligasi .....	226
4.	Jumlah Minimum Pemesanan .....	227
5.	Masa Penawaran Umum Obligasi .....	227
6.	Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi .....	227
7.	Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi .....	227
8.	Penjatahan Obligasi .....	227
9.	Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi .....	228
10.	Distribusi Obligasi Secara Elektronik .....	228
11.	Penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau Pembatalan Penawaran Umum Obligasi .....	229
12.	Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi .....	229
XV.	AGEN PEMBAYARAN .....	231
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI .....	232
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	233
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN .....	259



## DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	<p>berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seseorang dengan :<ul style="list-style-type: none"><li>1) suami atau istri;</li><li>2) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;</li><li>3) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;</li><li>4) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau</li><li>5) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.</li></ul></li><li>(b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan :<ul style="list-style-type: none"><li>1) orang tua dan anak;</li><li>2) kakek dan nenek serta cucu; atau</li><li>3) saudara dari orang yang bersangkutan.</li></ul></li><li>(c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;</li><li>(d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;</li><li>(e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;</li><li>(f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau</li><li>(g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.</li></ul>
“Agen Pembayaran”	<p>berarti KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi termasuk Denda dan manfaat lain (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.</p>
“Akuntan Publik”	<p>berarti Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang &amp; Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.</p>
“Arus Kas Teranualisasi”	<p>berarti EBITDA Proforma, sebagaimana digunakan dalam surat utang jangka panjang dalam Dolar Amerika Serikat.</p>



“Aset Tetap”	berarti aset berwujud termasuk properti investasi yang digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, atau untuk tujuan administratif.
“BAE”	berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek, dalam hal ini PT Datindo Entrycom.
“Bank Kustodian”	berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“BEI” atau “Bursa Efek”	berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia.
“BNRI”	berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
“Bunga Obligasi”	berarti bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“CAGR”	berarti singkatan dari <i>Compounded Annual Growth Rate</i> , atau tingkat pertumbuhan majemuk per tahun.
“Daftar Pemegang Rekening”	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain : nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“Dampak Negatif yang Material”	berarti perubahan material yang merugikan atau perkembangan atau peristiwa yang melibatkan peluang terjadinya perubahan material yang merugikan terhadap keadaan keuangan, operasional, dan hukum Perseroan dan Perusahaan Anak secara konsolidasian yang dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
“Denda”	berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
“Dokumen Emisi”	berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Persetujuan Prinsip BEI, dan dokumen-dokumen Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi kepada OJK sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2, POJK No. 7/2017 dan POJK No. 36/2014, termasuk namun tidak terbatas pada Prospektus, Prospektus Awal, dan Prospektus Ringkas sebagaimana diadarkan kepada Masyarakat.





“EBITDA”	berarti laba dari operasi konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak ditambah penyusutan menara bergerak, penyusutan aset tetap, penyusutan aset hak guna serta amortisasi sewa lahan dan perizinan.
“EBITDA Proforma”	berarti <i>Modified</i> EBITDA, ditambah dengan (i) pendapatan yang diharapkan dari aset yang akan diakuisisi dikalikan <i>Modified</i> EBITDA Marjin Perseroan sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh dalam rangka akuisisi aset; dan/atau (ii) pendapatan perusahaan yang akan diakuisisi berdasarkan laporan keuangan perusahaan tersebut dikalikan <i>Modified</i> EBITDA Marjin Perseroan dikalikan 90% (sembilan puluh persen) sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh dalam rangka akuisisi perusahaan.
“EBITDA yang Disesuaikan”	berarti laba bersih bulan berjalan dari para debitur, <i>US\$375.000.000 Facility Agreement</i> atau <i>US\$275.000.000 Facility Agreement</i> atau <i>US\$325.000.000 Facility Agreement</i> (sebagaimana relevan), ditambah dengan : (a) beban bunga; (b) beban pajak penghasilan; (c) kerugian selisih nilai tukar mata uang asing yang berasal dari penjabaran akun-akun pada laporan posisi keuangan, dan penyesuaian nilai wajar dari pertukaran mata uang; (d) beban non-kas lainnya yang mengurangi laba usaha; (e) depresiasi dan amortisasi atau penurunan nilai wajar, termasuk <i>goodwill</i> ; (f) kerugian akibat pelepasan atau penilaian kembali nilai aset; (g) saldo akhir akun pendapatan yang diterima di muka; (h) saldo awal akun pendapatan yang masih harus diterima; dan (i) beban bunga pinjaman lainnya selain <i>US\$375.000.000 Facility Agreement</i> atau <i>US\$275.000.000 Facility Agreement</i> atau <i>US\$325.000.000 Facility Agreement</i> (sebagaimana relevan), kemudian dikurangi dengan : (a) keuntungan dari pelepasan atau penilaian kembali nilai aset; (b) keuntungan selisih nilai tukar mata uang asing yang berasal dari penjabaran akun-akun pada laporan posisi keuangan, dan penyesuaian nilai wajar dari pertukaran mata uang; (c) pendapatan non-kas lainnya yang menambah laba usaha; (d) saldo awal akun pendapatan yang diterima di muka; dan (e) saldo akhir akun pendapatan yang masih harus diterima.
“Efek”	berarti surat berharga (termasuk Obligasi ini) atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas efek, yang dapat dialihkan dan/ atau diperdagangkan di pasar modal, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“Emisi”	berarti Penawaran Umum Obligasi yang ditawarkan dan dijual oleh Perseroan kepada Masyarakat.
“Perusahaan Anak”	berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.



“Force Majeure”

berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti (i) banjir, gempa bumi, gunung meletus, bencana alam lainnya, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; (ii) perubahan dalam bidang ekonomi atau pasar uang di Indonesia atau perubahan peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang moneter di dalam negeri dan diberlakukannya peraturan di bidang valuta asing yang dapat mempunyai akibat negatif secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan; atau (iii) saat dan pada saat dampaknya dari perubahan peraturan perundang-undangan atau pemberlakuan atau penerbitan suatu keputusan atau pemberlakuan undang-undang peraturan, penetapan atau perintah dari pengadilan atau otoritas pemerintah yang memiliki dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

“Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi” atau “FPPO”

berarti formulir asli yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.

“Hari Bursa”

berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.

“Hari Kalender”

berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

“Hari Kerja”

berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

“Indenture Surat Utang 2025”

berarti perjanjian *indenture* tertanggal 21 Januari 2020 yang dibuat antara Perseroan dan The Bank of New York Mellon, London Branch untuk US\$350.000.000 Surat Utang Senior Yang Tidak Dijamin dengan bunga 4,25% dan jatuh tempo pada tahun 2025 (“**Surat Utang 2025**”).

“Indenture Surat Utang 2026”

berarti perjanjian *indenture* tertanggal 20 Januari 2021 yang dibuat antara Perseroan dan The Bank of New York Mellon, London Branch untuk US\$300.000.000 Surat Utang Senior Yang Tidak Dijamin dengan bunga 2,75% dan jatuh tempo pada tahun 2026 (“**Surat Utang 2026**”).

“Indenture Surat Utang 2027”

berarti perjanjian *indenture* tertanggal 2 November 2021 yang dibuat antara Perseroan dan The Bank of New York Mellon, London Branch untuk US\$400.000.000 Surat Utang Senior Yang Tidak Dijamin dengan bunga 2,80% dan jatuh tempo pada tahun 2027 (“**Surat Utang 2027**”).

“Jumlah Terutang”

berarti jumlah utang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.





“Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari”	berarti setiap kegiatan operasional, baik yang dilakukan langsung oleh Perseroan maupun melalui Perusahaan Anak, di bidang penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi terintegrasi melalui Perusahaan Anak, serta kegiatan lainnya yang terkait dengan atau kegiatan penunjang bidang-bidang tersebut.
“Konfirmasi Tertulis	berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
“Konfirmasi Tertulis untuk RUPO” atau “KTUR”	berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
“Konsultan Hukum”	berarti Indrawan Darsyah Santoso yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak dan keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
“Kustodian”	berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain termasuk menerima dividen, bunga dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUP2SK, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek, dan Bank Kustodian.
“Manajer Penjatahan”	berarti PT UOB Kay Hian Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
“Masa Penawaran Umum Obligasi”	berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Prospektus dan FPPO, yaitu 2 (dua) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum Obligasi untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.
“Menkumham”	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dan atau nama lainnya.
“Modified EBITDA”	berarti EBITDA konsolidasian yang dihitung dengan cara menambah laba bersih periode berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak, dengan : (a) beban keuangan - pinjaman dan surat utang; (b) beban keuangan - lainnya; (c) beban pajak penghasilan - bersih; (d) kerugian selisih nilai tukar; (e) depresiasi dan amortisasi, termasuk penurunan nilai wajar <i>goodwill</i> dan aset tidak berwujud; (f) kerugian penghapusan, pelepasan dan/atau penurunan nilai wajar properti investasi; (g) beban kerugian kredit ekspektasian - aset keuangan; (h) beban pajak final; (i) beban non kas lainnya, dikurangi dengan : (a) keuntungan penghapusan, pelepasan dan/atau kenaikan nilai wajar properti investasi; (b) manfaat pajak penghasilan - bersih; (c) keuntungan selisih nilai tukar; (d) pendapatan lainnya.



“Modified EBITDA Marjin”	berarti <i>Modified EBITDA</i> kuartal terakhir dibandingkan dengan pendapatan kuartal terakhir Perseroan dan Perusahaan Anak.
“Notaris”	berarti Kantor Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
“Obligasi”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan Perseroan untuk jangka waktu terlama 3 (tiga) tahun, dalam jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.
“Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2020, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp700.000.000.000 (tujuh ratus miliar Rupiah) dan 2 (dua) seri : (i) Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,30% (enam koma tiga nol persen) per tahun untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender (yang saat ini telah lunas); dan (ii) Seri B dengan tingkat bunga sebesar 8,00% (delapan persen) per tahun untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
“Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2020, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) dan 2 (dua) seri : (i) Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% (lima koma tujuh lima persen) per tahun untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender (yang saat ini telah lunas); dan (ii) Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar dan 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
“Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp2.915.000.000.000 (dua triliun sembilan ratus lima belas miliar Rupiah) dan 2 (dua) seri : (i) Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender (yang saat ini telah lunas); dan (ii) Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.



“Obligasi Berkelanjutan V Tahap III”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2022, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan V Tahap III, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp2.200.000.000.000 (dua triliun dua ratus miliar Rupiah) dan 2 (dua) seri : yaitu (i) Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 3,75% (tiga koma tujuh lima persen) per tahun dan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender (yang saat ini telah lunas); dan (ii) Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,90% (lima koma sembilan nol persen) per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
“Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2022, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp2.200.000.000.000 (dua triliun dua ratus miliar Rupiah) dalam 2 (dua) seri : yaitu (i) Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,10% (empat koma satu nol persen) per tahun dan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender; dan (ii) Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,35% (enam koma tiga lima persen) per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
“Obligasi Berkelanjutan V Tahap V”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2022, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan V Tahap V, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,25% (lima koma dua lima persen) per tahun dan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
“Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2023, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp2.486.000.000.000 (dua triliun empat ratus delapan puluh enam miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,125% (enam koma satu dua lima persen) per tahun dan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
“OJK”	berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
”Pemegang Obligasi”	berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam : (1) Rekening Efek pada KSEI; dan/atau (2) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemegang Rekening”	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.



“Pemerintah”	berarti Pemerintah Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada otoritas, lembaga, komisi, institusi, atau badan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah dalam seluruh tingkatannya.
“Penawaran Umum Perdana Saham”	berarti Penawaran Umum Saham Perdana yang dilakukan oleh Perseroan dalam rangka menerbitkan dan menawarkan saham sebesar 551.111.000 saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp2.025 setiap sahamnya, yang telah dinyatakan efektif pada tanggal 15 Oktober 2010 berdasarkan Surat Ketua Bapepam-LK No.S-9402/BL/2010 tanggal 15 Oktober 2010 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
“Penawaran Umum”	berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek untuk menjual Obligasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM.
“Penawaran Umum Berkelanjutan”	berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan VI yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan POJK No. 36/2014.
“Pengakuan Hutang”	berarti Akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023 No. 110 tanggal 26 Juni 2023, yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
“Penitipan Kolektif”	berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“Penjamin Emisi Obligasi”	berarti pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk menjamin Penawaran Umum Obligasi dengan kewajiban untuk membeli sisa Obligasi yang tidak terjual, yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., dan PT UOB Kay Hian Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi”	berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Penawaran Umum Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., dan PT UOB Kay Hian Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Peraturan KSEI”	berarti Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012.
“Peraturan No. IX.A.2”	berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.A.7”	berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.



“Perjanjian Agen Pembayaran”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 55 tanggal 12 April 2023, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023 No. 54 tanggal 12 April 2023, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023 No. 103 tanggal 19 Mei 2023, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan; dan (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023 No. 111 tanggal 26 Juni 2023, yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
“Perjanjian Perwaliamanatan”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023 No. 53 tanggal 12 April 2023, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023 No. 102 tanggal 19 Mei 2023, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan; dan (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023 No. 109 tanggal 26 Juni 2023, yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
“Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-059/OBL/KSEI/0323 tanggal 12 April 2023 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
“Pernyataan Pendaftaran”	berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI.
“Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif”	berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan UUP2SK, yaitu : <ol style="list-style-type: none"><li>pada hari kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau</li><li>dalam hal OJK meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Perseroan dalam jangka waktu 20 hari kerja tersebut di atas, maka penghitungan waktu untuk efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi dimaksud.</li></ol>



“Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI”

berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure No. 52 tanggal 12 April 2023, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure No. 101 tanggal 19 Mei 2023, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan; dan (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure No. 108 tanggal 26 Juni 2023, yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, serta perubahan perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh Perseroan di kemudian hari.

“Perseroan”

berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

“Persetujuan Prinsip”

berarti persetujuan yang telah diberikan oleh Bursa Efek atas permohonan pencatatan yang diajukan oleh Perseroan berdasarkan Surat No. S-03478/BEI.PP1/05-2023 tanggal 8 Mei 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang.

“Perusahaan Efek”

berarti pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.

“Perusahaan Pemeringkat Efek”

berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha pemeringkatan atas (i) suatu Efek; dan/atau (ii) pihak tertentu yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal, yang dalam hal ini PT Fitch Ratings Indonesia.

“Pinjaman”

berarti semua bentuk utang termasuk utang bank, utang sewa guna usaha, utang efek konversi, utang efek dan instrumen pinjaman lainnya, utang kredit investasi, utang Perseroan atau pihak lain yang dijamin dengan agunan atau gadai atas aset Perseroan dan Perusahaan Anak sesuai dengan nilai penjaminan, utang pihak lain di luar Perusahaan Anak yang dijamin (*guaranteed*) oleh Perseroan dan Perusahaan Anak, termasuk pinjaman yang berasal dari perusahaan lain yang diakuisisi dan menjadi Perusahaan Anak atau perusahaan lain yang melebur ke dalam Perseroan, kecuali utang dalam rangka Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada utang dagang, utang pajak, utang dividen, dan kewajiban tanpa syarat (*non contingent*) kepada bank sehubungan dengan pembayaran untuk *Letter of Credit (L/C)* atau instrumen sejenis.

“POJK No. 7/2017”

berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04.2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.

“POJK No. 9/2017”

berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.

“POJK No. 17/2020”

berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.





“POJK No. 19/2020”	berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
“POJK No. 20/2020”	berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 30/2015”	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“POJK No. 33/2014”	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 34/2014”	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 35/2014”	berarti Peraturan OJK NO. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 36/2014”	berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 42/2020”	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“POJK No. 49/2020”	berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 55/2015”	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
“POJK No. 56/2015”	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
“Pokok Obligasi”	berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan, berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) seri Obligasi dengan jangka waktu terlama 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi sesuai dengan seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“PSAK”	berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
“Rekening Efek”	berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi.
“Rp”	berarti singkatan dari Rupiah, mata uang yang berlaku sah di Negara Republik Indonesia.



“RUPO”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“RUPS”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu organ perseroan terbatas yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar perseroan terbatas.
“RUPSLB”	berarti singkatan dari RUPS Luar Biasa.
“Satuan Pemindahbukuan”	berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Satuan Perdagangan”	berarti satuan perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan BEI.
“Sertifikat Jumbo Obligasi”	berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
“Tanggal Distribusi”	berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjataan.
“Tanggal Emisi”	berarti Tanggal Distribusi Obligasi yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.
“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”	berarti tanggal dimana masing-masing seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran.
“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”	berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Tanggal Penjataan”	berarti tanggal dilakukannya penjataan Obligasi dalam hal jumlah permintaan Obligasi selama Masa Penawaran Umum melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, yang wajib diselesaikan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
“Total Pinjaman Konsolidasian Proforma”	berarti jumlah Pinjaman Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal pengujian, ditambah dengan Pinjaman baru yang akan diajukan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak kepada pihak ketiga. Untuk Pinjaman dalam mata uang asing (utang valuta asing) dan belum dilindungi nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing adalah hasil perkalian antara saldo utang valuta asing dan kurs pada tanggal pengujian. Untuk utang valuta asing yang telah dilindungi nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing tersebut adalah hasil perkalian antara saldo utang valuta asing dan kurs lindung nilai dari utang valuta asing tersebut.



“US\$”

berarti mata uang Amerika Serikat atau Dolar Amerika Serikat atau Dolar AS.

“US\$375.000.000 Facility Agreement”

berarti perjanjian pinjaman *revolving* sebesar US\$375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) yang ditandatangani pada tanggal 28 Juni 2019 oleh antara lain Perseroan (sebagai Perusahaan Induk) dengan Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT (sebagai *Original Borrowers* dan *Original Guarantors/Obligors*), dengan Australia and New Zealand Banking Group Limited, CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, DBS Bank Ltd., Mizuho Bank Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank DBS Indonesia, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank OCBC NISP Tbk., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Singapura dan United Overseas Bank Ltd. (sebagai *Arrangers*) dan United Overseas Bank Ltd. (sebagai *Agen/Agent*), dengan tanggal akhir pembayaran kembali pada tanggal 24 Januari 2025. Perjanjian pinjaman *revolving* ini sudah tidak berlaku lagi karena sejak tanggal 3 Mei 2023, total komitmen dalam perjanjian pinjaman *revolving* ini yang masih tersedia telah dibatalkan sepenuhnya. Perseroan juga telah mengumumkan pembatalan dimaksud di atas melalui situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan pada tanggal 28 April 2023, dan telah menyampaikannya kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan No. 326/TBG-TBI-00/FIN/05/IV/2023 tertanggal 28 April 2023.

“US\$275.000.000 Facility Agreement”

berarti perjanjian fasilitas untuk fasilitas *revolving* sebesar US\$275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) yang ditandatangani pada tanggal 20 Januari 2021 oleh antara lain Perseroan (sebagai Perusahaan Induk) dengan Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI, dan MBT (sebagai *Original Borrowers* dan *Original Guarantors/Obligors*), dengan PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, DBS Bank Ltd., PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank Mizuho Indonesia, Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., PT Bank OCBC NISP Tbk., Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura, dan United Overseas Bank Ltd. (sebagai *Arranger*) dan United Overseas Bank Ltd. (sebagai *Agen/Agent*), dengan tanggal akhir pembayaran kembali pada tanggal 30 Juni 2026. Sesuai dengan keterbukaan informasi pada tanggal 28 April 2023, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan pembatalan total komitmen atas *US\$275.000.000 Facility Agreement* pada tanggal 26 April 2023, yang berlaku secara penuh sejak tanggal 3 Mei 2023. Perjanjian fasilitas untuk fasilitas *revolving* ini sudah tidak berlaku lagi karena sejak tanggal 3 Mei 2023, total komitmen dalam perjanjian fasilitas untuk fasilitas *revolving* ini yang masih tersedia telah dibatalkan sepenuhnya serta Perseroan telah melakukan pembayaran kembali secara penuh atas semua pinjaman yang terutang. Perseroan juga telah mengumumkan pembatalan dimaksud di atas melalui situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan pada tanggal 28 April 2023, dan telah menyampaikannya kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan No. 326/TBG-TBI-00/FIN/05/IV/2023 tertanggal 28 April 2023.



“US\$325.000.000 Facility Agreement”

berarti perjanjian fasilitas untuk fasilitas *revolving* sebesar US\$325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) yang ditandatangani pada tanggal 18 April 2023 oleh antara lain Perseroan (sebagai Induk) dengan Triaka, TI, TB, BT, Balikom, Mitrayasa, MBT, MSI, UT, TO, PMS, SKP, dan SMI (sebagai *Original Borrowers* dan *Original Guarantors/Obligors*), dengan United Overseas Bank Ltd., DBS Bank Ltd., PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Cabang Singapura, Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., PT Bank OCBC NISP Tbk., PT Bank Mizuho Indonesia, dan BNP Paribas (sebagai *Original Lenders*), dengan tanggal akhir pembayaran kembali pada tanggal 17 Agustus 2026.

“UU Cipta Kerja”

berarti Perppu Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan No.6856, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

“UUP2SK”

berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan No. 6845.

“UUPM” atau “Undang-Undang Pasar Modal”

berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

“UUPT”

berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.

“Wali Amanat”

berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang dalam hal ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.



## ISTILAH DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA

“3G”	berarti standar dari <i>International Mobile Telecommunications-2000</i> (IMT-2000) termasuk UTMS, W-CDMA dan WiMax yang memungkinkan penggunaan layanan suara dan data secara bersamaan.
“4G”	berarti singkatan dari <i>fourth generation technology</i> , yang merupakan pengembangan dari teknologi 3G yang akan menyediakan solusi <i>Internet Protocol</i> yang komprehensif dimana suara, data dan arus multimedia dapat sampai kepada pengguna kapan saja dan dimana saja pada rata-rata data lebih tinggi dari generasi sebelumnya.
“5G”	berarti singkatan dari <i>fifth generation technology</i> , yang merupakan pengembangan dari teknologi 4G, yang memiliki kecepatan data lebih tinggi dibandingkan 4G.
“ <i>anchor tenant</i> ”	berarti pelanggan yang pertama kali menyewa menara telekomunikasi milik Grup Tower Bersama ( <i>initial customer</i> ).
“BAPS”	berarti singkatan dari Berita Acara Penggunaan <i>Site</i> .
“BAUK”	berarti singkatan dari Berita Acara Uji Kelayakan.
“BTS”	berarti singkatan dari <i>Base Transceiver Station</i> , yaitu perangkat transmisi pada jaringan telekomunikasi selular yang terdiri dari beberapa <i>transceivers</i> yang digunakan untuk mengirim dan menerima suara dan data dari dan ke telepon selular di suatu area tertentu.
“ <i>build-to-Suit</i> ”	berarti <i>sites</i> yang dibangun oleh Grup Tower Bersama sesuai pesanan dari operator telekomunikasi.
“CDMA”	berarti singkatan dari <i>Code Division Multiple Access</i> , yang merupakan suatu standar untuk komunikasi selular digital.
“CME”	berarti singkatan dari <i>Construction, Mechanical and Electrical</i> , yang merupakan fungsi dari kegiatan konstruksi <i>site</i> menara dan termasuk persiapan dari lokasi fisik untuk konstruksi, persiapan <i>design</i> dan gambar konstruksi, membangun pondasi, pendirian menara, pembangunan halaman dan pagar (untuk menara <i>ground-based</i> ), instalasi <i>shelter</i> , <i>air conditioning</i> dan peralatan pendukung lainnya (jika diminta oleh operator telekomunikasi), dan menghubungkan kabel dan sambungan listrik.
“DAS” atau “IBS”	berarti singkatan dari <i>Distributed Antenna System</i> atau <i>In-Building System</i> , yaitu sistem antena terdistribusi, yang merupakan jaringan antena yang didistribusikan ke seluruh gedung untuk menyediakan sinyal dalam area gedung.
“GSM”	berarti singkatan dari <i>Global System for Mobile Communication</i> yang merupakan suatu standar komunikasi digital.
“IMB”	berarti singkatan dari Izin Mendirikan Bangunan.
“IMBM”	berarti singkatan dari Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi.
“kolokasi”	berarti pelanggan kedua dan seterusnya yang menyewa menara telekomunikasi (setelah <i>anchor tenant</i> ).



“rasio kolokasi”	berarti perbandingan antara jumlah penyewa menara telekomunikasi ( <i>anchor tenant</i> dan kolokasi) dengan jumlah menara telekomunikasi.
“MLA”	berarti singkatan dari <i>Master Lease Agreement</i> , atau perjanjian induk sewa menyewa antara Grup Tower Bersama dengan operator telekomunikasi yang mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penyewaan <i>sites</i> telekomunikasi.
“penyewaan” atau “tenancy”	berarti jumlah penyewaan <i>sites</i> oleh <i>anchor tenant</i> ditambah dengan jumlah penyewaan kolokasi.
“RFI”	berarti singkatan dari <i>Ready for Installation</i> yaitu suatu pemberitahuan yang dikirimkan Perseroan kepada pelanggan setelah selesainya konstruksi <i>sites</i> .
“SDM”	berarti singkatan dari sumber daya manusia.
“SITAC”	berarti singkatan dari <i>site acquisition</i> atau perolehan lahan yang merupakan aktivitas untuk mengidentifikasi, memperoleh hak untuk menggunakan suatu lahan properti, dan mendapatkan seluruh perizinan dan sertifikat yang diperlukan untuk konstruksi dan operasi dari suatu <i>sites</i> di lahan properti tersebut.
“ <i>sites</i> menara”	berarti menara yang berada di atas tanah ( <i>ground-based</i> ) atau di atas atap bangunan ( <i>rooftop</i> ) yang dibangun dan dimiliki oleh Grup Tower Bersama atau pada lahan properti (termasuk <i>rooftop</i> ) yang umumnya dimiliki atau disewa oleh Grup Tower Bersama.
“ <i>sites</i> ” atau “ <i>sites</i> telekomunikasi”	berarti tiap-tiap dari (i) <i>site</i> menara; dan (ii) IBS.
“ <i>tower</i> ”	berarti menara telekomunikasi yang didesain sedemikian rupa sehingga memiliki kemampuan dan spesifikasi yang sesuai untuk penggunaan/penempatan alat-alat telekomunikasi serta mampu digunakan secara bersama-sama atau oleh lebih dari satu pengguna (operator).
“ <i>tower space</i> ”	berarti tempat dengan ketinggian tertentu pada menara telekomunikasi untuk menempatkan peralatan transmisi milik operator telekomunikasi.
“WiMax”	berarti singkatan dari <i>Worldwide Interoperability for Microwave Access</i> , yaitu suatu protokol telekomunikasi yang melayani akses internet secara tetap atau bergerak ( <i>mobile</i> ).





## SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

“Balikom”	berarti PT Bali Telekom.
“BDIA”	berarti Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd.
“Berca”	berarti PT Berca Hardayaperkasa.
“BT”	berarti PT Batavia Towerindo.
“GHON”	berarti PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk.
“GOLD”	berarti PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.
“GPS”	berarti PT Global Patra Sinertama
“Grup Tower Bersama”	berarti Perseroan dan Perusahaan Anak.
“Hutch”	berarti PT Hutchison 3 Indonesia (saat ini telah bergabung dengan Indosat berdasarkan Pengumuman Hasil Penggabungan Usaha PT Indosat Tbk. dan PT Hutchison 3 Indonesia tertanggal 3 Februari 2022).
“IOH”	berarti PT Indosat Tbk.
“JPI”	berarti PT Jaringan Pintar Indonesia.
“MBT”	berarti PT Menara Bersama Terpadu.
“MSI”	berarti PT Metric Solusi Integrasi.
“Mitrayasa”	berarti PT Mitrayasa Sarana Informasi.
“PKP”	berarti PT Permata Karya Perdana.
“Protelindo”	berarti PT Sarana Menara Nusantara Tbk.
“PMS”	berarti PT Prima Media Selaras.
“Sampoerna Telecom”	berarti PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia.
“SKP”	berarti PT Solu Sindo Kreasi Pratama.
“SMART”	berarti PT SMART Telecom.
“Smartfren”	berarti PT Smartfren Telecom Tbk., dahulu dikenal PT Mobile-8 Telecom Tbk. (“ <b>Mobile-8</b> ”).
“SMI”	berarti PT Solusi Menara Indonesia.
“STP”	berarti PT Solusi Tunas Pratama Tbk.
“TB”	berarti PT Tower Bersama.
“TBGG”	berarti TBG Global Pte. Ltd.
“Telkomsel”	berarti PT Telekomunikasi Selular.
“TI”	berarti PT Telenet Internusa.



“TK”	berarti PT Towerindo Konvergensi.
“TO”	berarti PT Tower One.
“Triaka”	berarti PT Triaka Bersama.
“UT”	berarti PT United Towerindo.
“Unicom”	berarti PT Unicom Muda Utama.
“WAS”	berarti PT Wahana Anugerah Sejahtera.
“XL Axiata”	berarti PT XL Axiata Tbk.



## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

### 1. UMUM

#### Riwayat singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Banyan Mas, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian No. 14, tanggal 8 November 2004, yang dibuat dihadapan Dewi Himijati Tandika, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) berdasarkan Surat Keputusan No. C-28415 HT.01.01.TH.2004 tanggal 12 November 2004, didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan dengan No. 2564/BH.09.03/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (“**BNRI**”) No. 5 tanggal 18 Januari 2005, Tambahan No. 616.

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Anggaran dasar terakhir Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 116 tanggal 23 Mei 2022, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0038668.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0106607.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022 (“**Akta No. 116/2022**”). Berdasarkan Akta No. 116/2022, Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) Perseroan telah menyetujui, antara lain, perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan seluruh kegiatan usaha sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan melakukan investasi atau penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 21 Perusahaan Anak, yang bergerak di bidang penyediaan jasa telekomunikasi, menara, jaringan fiber optik dan pekerjaan telekomunikasi dan investasi.

Perseroan berdomisili di The Convergence Indonesia, lantai 11, Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940.



## Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan DPS per 31 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		%( <sup>1</sup> )
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>72.100.600.000</b>	<b>1.442.012.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd.	16.986.255.323	339.725.106.460	75,02
PT Wahana Anugerah Sejahtera	2.098.321.840	41.966.436.800	9,27
Edwin Soeryadjaya	71.481.830	1.429.636.600	0,32
Hardi Wijaya Liong	68.359.905	1.367.198.100	0,30
Budianto Purwahjo	5.025.000	100.500.000	0,02
Herman Setya Budi	4.625.000	92.500.000	0,02
Helmy Yusman Santoso	3.125.000	62.500.000	0,01
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	3.405.427.847	68.108.556.940	15,04
	22.642.621.745	452.852.434.900	100,00
Saham treasury	14.377.700	287.554.000	-
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>22.656.999.445</b>	<b>453.139.988.900</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>49.443.600.555</b>	<b>988.872.011.100</b>	

Catatan :

(1) Perhitungan berdasarkan hak suara.

## Kegiatan Usaha Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup Tower Bersama berfokus pada penyewaan *tower space* pada *sites* telekomunikasi Grup Tower Bersama sebagai tempat pemasangan peralatan transmisi milik operator telekomunikasi, dengan total 21.870 sites telekomunikasi per 31 Desember 2022.

Grup Tower Bersama memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif sebagaimana berikut ini :

- Hubungan yang erat dengan operator telekomunikasi besar di Indonesia;
- Kontrak sewa jangka panjang Grup Tower Bersama dengan pelanggan memberikan kepastian atas jumlah pendapatan yang masih akan diterima di masa mendatang;
- Pengalaman yang ekstensif untuk melakukan *build-to-suit* dan menjalankan kegiatan operasional;
- Kemampuan untuk melakukan akuisisi kemudian mengintegrasikan dengan portofolio yang telah ada;
- Marjin keuntungan dan tingkat *leverage* operasional yang signifikan;
- Tim manajemen yang berpengalaman dan pemegang saham yang bereputasi baik.

Grup Tower Bersama memiliki strategi usaha sebagai berikut :

- Memaksimalkan pertambahan penyewaan kolokasi pada portofolio menara telekomunikasi Grup Tower Bersama yang telah ada;
- Terus mempererat hubungan dengan operator telekomunikasi;
- Memperbesar portofolio Grup Tower Bersama melalui proses konstruksi *build-to-suit* dan akuisisi yang selektif;
- Tetap fokus pada kecepatan dalam melakukan eksekusi dan terus meningkatkan kinerja operasional;
- Terus terlibat dalam pemenuhan kebutuhan pelanggan atas kapitalisasi perkembangan teknologi yang memerlukan infrastruktur telekomunikasi;
- Mengoptimalkan struktur permodalan untuk mencapai fleksibilitas pendanaan dan meminimalkan biaya pinjaman.

## Prospek Usaha Grup Tower Bersama

Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa industri penyewaan menara di Indonesia mempunyai peluang untuk berkembang pesat baik dalam pembangunan menara telekomunikasi baru ataupun penambahan jumlah kolokasi di menara telekomunikasi yang telah ada. Grup Tower Bersama membangun dan melakukan akuisisi site telekomunikasi baru hanya apabila memenuhi kriteria investasi Grup Tower Bersama. *Sites* telekomunikasi



dan kabel serat optik baru akan dibangun apabila telah mendapatkan komitmen kontrak penyewaan jangka panjang dengan perusahaan operator telekomunikasi. Grup Tower Bersama berupaya secara konsisten untuk terus meningkatkan jumlah kolokasi dari menara telekomunikasi yang ada mengingat penambahan kolokasi memberikan dampak positif pada arus kas Grup Tower Bersama karena biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan kolokasi relatif lebih rendah. Selain itu, Grup Tower Bersama akan terus membangun dan berinvestasi pada aset kabel serat optik dengan kontrak jangka panjang.

Seiring dengan upaya operator telekomunikasi untuk terus meningkatkan jangkauan jaringan mereka dan menambah kapasitas tambahan untuk mendukung permintaan yang terus meningkat pada jaringan mereka, Grup Tower Bersama memiliki posisi yang baik dengan portofolio *sites* telekomunikasi yang terdiversifikasi secara geografis. Pada akhir tahun 2022, sekitar 58% dari pendapatan Grup Tower Bersama berasal dari Jawa dan Bali, di mana Grup Tower Bersama mengharapkan investasi kapasitas yang berkelanjutan dari para operator.

Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa operator telekomunikasi di Indonesia akan terus mengendalikan belanja modal mereka dari kegiatan-kegiatan non-inti dan mengalihkan kegiatan pembangunan *sites* telekomunikasi dan kabel serta optik kepada perusahaan seperti Grup Tower Bersama. Grup Tower Bersama memiliki rekam jejak yang mapan untuk berhasil membangun *sites* menara di seluruh kepulauan Indonesia.

### Keterangan Tentang Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 21 Perusahaan Anak, sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha <sup>(1)</sup>	Domisili	Tahun Penyertaan Perseroan	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
							Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
1.	PT Telenet Internusa ("TI")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2004	1999	1999	99,50%	-
2.	PT United Towerindo ("UT")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2005	2004	2004	99,90%	0,10% melalui TB
3.	PT Batavia Towerindo ("BT")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2005	2005	2006	-	89,90% melalui UT dan 10,10% melalui TB
4.	PT Tower Bersama ("TB")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2006	2006	2006	99,99%	0,01% melalui TO
5.	PT Towerindo Konvergensi ("TK")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2009	2009	0,02%	99,98% melalui TB
6.	PT Prima Media Selaras ("PMS")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2003	2003	0,01%	99,99% melalui TB
7.	PT Mitrayasa Sarana Informasi ("Mitrayasa")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2004	2004	-	70,00% melalui TB dan 30,00% melalui SKP
8.	PT Metric Solusi Integrasi ("MSI")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2010	2010	2010	98,74%	1,26% melalui TB



No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha <sup>(1)</sup>	Domisili	Tahun Penyertaan Perseroan	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
							Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
9.	PT Solu Sindo Kreasi Pratama ("SKP")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta selatan	2010	1999	1999	-	99,71% melalui MSI
10.	PT Tower One ("TO")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2007	2006	2006	99,90%	-
11.	PT Bali Telekom ("Balikom")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2008	2003	2003	0,01%	99,99% melalui TO
12.	PT Triaka Bersama ("Triaka")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2009	2009	90,00%	10,00% melalui TB
13.	PT Solusi Menara Indonesia ("SMI")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2011	2012	70,03%	29,97% melalui SKP
14.	TBG Global Pte. Ltd. ("TBGG")	Perusahaan investasi	Singapura	2013	2013	2013	100,00%	-
15.	PT Menara Bersama Terpadu ("MBT")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2013	2013	belum beroperasi	99,99%	0,01% melalui TB
16.	PT Jaringan Pintar Indonesia ("JPI")	Jasa pemeliharaan peralatan telekomunikasi dan konsultasi bidang telekomunikasi	Jakarta Pusat	2016	2015	2016	0,08%	83,36% melalui TB
17.	PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk. ("GHON")	Jasa penunjang telekomunikasi	Jakarta Barat	2018	2001	2001	50,43%	-
18.	PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. ("GOLD")	Jasa penyediaan infrastruktur telekomunikasi, melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi, dan jasa penunjang telekomunikasi	Jakarta Selatan	2018	1995	1995	51,09%	-
19.	PT Permata Karya Perdana ("PKP")	Jasa penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2018	2013	2013	-	99,99% melalui GOLD
20.	PT Unicom Muda Utama ("Unicom")	Jasa penyewaan jaringan fiber optik	Jakarta Barat	2022	2020	2021	-	80,00% melalui UT
21.	PT Global Patra Sinertama ("GPS")	Jasa penyewaan jaringan fiber optik	Tangerang Selatan	2023	2018	2021	-	70% melalui GHON

Catatan :

(1) kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh masing-masing Perusahaan Anak.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perusahaan Anak yang signifikan adalah TB, SMI dan SKP yang memberikan kontribusi masing-masing sebesar 53,6%, 17,7%, dan 22,6% dari total pendapatan konsolidasian Perseroan pada tahun 2022.





## 2. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

Berikut merupakan ringkasan struktur Obligasi yang ditawarkan :

Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023.
Jumlah Pokok Obligasi	: Sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri, sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"><li>• Seri A dengan jumlah sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah); dan</li><li>• Seri B dengan jumlah sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah).</li></ul>
Jangka Waktu	: <ul style="list-style-type: none"><li>• Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan</li><li>• Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.</li></ul>
Tingkat Bunga Obligasi	: <ul style="list-style-type: none"><li>• Seri A sebesar 5,90% (lima koma sembilan nol persen) per tahun; dan</li><li>• Seri B sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun.</li></ul> <p>Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 11 Oktober 2023, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 21 Juli 2024 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 11 Juli 2026 untuk Obligasi Seri B.</p>
Harga Penawaran	: 100% dari nilai Pokok Obligasi.
Satuan Pemesanan	: Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1 (satu Rupiah).
Pembayaran Kupon Bunga	: Triwulanan.
Jaminan	: Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah <i>pari passu</i> tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Pembelian Kembali ( <i>Buyback</i> )	: 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali ( <i>buyback</i> ) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan <i>buyback</i> tersebut sebagai pelunasan Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
<i>Sinking fund</i>	: Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.



Pembatasan dan Kewajiban Perseroan : Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan (dengan memperhatikan adanya pengaturan beberapa pengecualian tertentu), antara lain : melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, merubah kegiatan usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, melepaskan aset tetap Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dalam satu atau rangkaian transaksi dalam tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% dari total aset Perseroan, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak.

Hasil Pemeringkatan : AA+<sub>(idn)</sub> (*Double A Plus*) dari Fitch.

Wali Amanat : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

### 3. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Efek bersifat utang yang belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Pokok (dalam jutaan)	Bunga Tetap Tahunan (%)	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Peringkat
<b>Surat Utang Dolar Amerika Serikat</b>					
Surat Utang 2025	US\$350	4,25%	5 tahun	21 Januari 2025	BBB- dari Fitch
Surat Utang 2026	US\$300	2,75%	5 tahun	20 Januari 2026	BBB- dari Fitch
Surat Utang 2027	US\$400	2,80%	5,5 tahun	2 Mei 2027	BBB- dari Fitch
<b>Total</b>	<b>US\$1.050</b>				
<b>Obligasi</b>					
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Seri B	Rp469.000	8,00%	3 tahun	8 September 2023	AA+ <sub>(idn)</sub> dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Seri B	Rp455.000	7,25%	3 tahun	2 Desember 2023	AA+ <sub>(idn)</sub> dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Seri B	Rp1.017.000	6,75%	3 tahun	17 Februari 2024	AA+ <sub>(idn)</sub> dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Seri B	Rp500.000	5,90%	3 tahun	2 Maret 2025	AA+ <sub>(idn)</sub> dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV					
Seri A	Rp1.478.610	4,10%	370 Hari Kalender	21 Agustus 2023	AA+ <sub>(idn)</sub> dari Fitch
Seri B	Rp721.390	6,35%	3 tahun	11 Agustus 2025	AA+ <sub>(idn)</sub> dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan V Tahap V	Rp1.000.000	5,25%	370 Hari Kalender	31 Oktober 2023	AA+ <sub>(idn)</sub> dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI	Rp2.486.000	6,125%	370 Hari Kalender	27 Februari 2024	AA+ <sub>(idn)</sub> dari Fitch
<b>Total</b>	<b>Rp8.127.000</b>				

### 4. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipinjamkan oleh Perseroan :

- (i) sebesar US\$99,8 juta atau setara dengan Rp1.488,5 miliar kepada TB untuk melakukan pembayaran seluruh pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan TB; dan
  - (ii) sisanya sampai dengan sebesar-besarnya US\$0,7 juta atau setara dengan Rp10,0 miliar kepada SKP untuk melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan SKP,
- yang keduanya terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$325.000.000 Facility Agreement* tertanggal 18 April 2023 yang akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.



## 5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan pada tabel di bawah ini diambil dari :

- (i) laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00531/2.1068/AU.1/06/0117-1/1/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 yang ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA (Registrasi Akuntan Publik No. 0117) dengan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut; dan
- (ii) laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00532/2.1068/AU.1/06/0007-3/1/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Sutomo, S.E., Ak., MM, CPA, CA, SAS (Registrasi Akuntan Publik No. 0007) dengan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik. Kecuali disebutkan lain, maka seluruh kata “Perseroan” dalam sub bab ini berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. dan Perusahaan Anak.

### Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

*(dalam jutaan Rupiah)*

	31 Desember	
	2022	2021
Jumlah Aset	43.139.968	41.870.435
Jumlah Liabilitas	32.219.585	32.081.197
Jumlah Ekuitas	10.920.383	9.789.238

### Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

*(dalam jutaan Rupiah)*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021
Pendapatan	6.524.369	6.179.584
Laba Kotor	4.741.044	4.706.804
Laba dari Operasi	4.282.471	4.305.915
Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan	2.405.199	2.220.471
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	1.911.766	1.935.964
Laba Bersih Tahun Berjalan	1.689.441	1.601.353
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	(551.194)	1.362.365
Laba bersih per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk (nilai penuh)	73,44	74,25



## Rasio Keuangan Penting

	31 Desember	
	2022	2021
<b>RASIO PERTUMBUHAN (%)</b>		
Pendapatan	5,6%	16,0%
Laba kotor	0,7%	11,2%
Laba dari operasi	(0,5%)	12,8%
Laba bersih tahun berjalan	5,5%	50,1%
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	(140,5%)	(69,0%)
EBITDA	4,3%	17,6%
Jumlah aset	3,0%	14,6%
Jumlah liabilitas	0,4%	17,9%
Jumlah ekuitas	11,6%	5,2%
<b>RASIO USAHA (%)</b>		
Laba kotor / Pendapatan	72,7%	76,2%
Laba dari operasi / Pendapatan	65,6%	69,7%
Laba bersih tahun berjalan / Pendapatan	25,9%	25,9%
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan / Pendapatan	(8,4%)	22,0%
EBITDA / Pendapatan	86,8%	87,9%
Laba bersih tahun berjalan / Jumlah ekuitas	15,5%	16,4%
Laba bersih tahun berjalan / Jumlah aset	3,9%	3,8%
<b>RASIO KEUANGAN (x)</b>		
Aset lancar / Liabilitas jangka pendek	0,4x	0,4x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	3,0x	3,3x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,7x	0,8x
<i>Interest coverage ratio</i> <sup>(1)</sup>	3,3x	2,8x
<i>Debt coverage service ratio</i> <sup>(2)</sup>	0,7x	0,7x

Catatan :

(1) dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan beban keuangan - bunga.

(2) dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan jumlah beban keuangan - bunga, surat utang bagian jangka pendek, dan pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

Ringkasan data keuangan penting Perseroan lebih lengkap dapat dilihat pada Bab IV dalam Prospektus ini.

## 6. RISIKO USAHA

Dalam menjalankan usahanya, Grup Tower Bersama menghadapi risiko yang dapat memengaruhi hasil usaha Grup Tower Bersama apabila tidak diantisipasi dengan baik. Beberapa risiko yang dapat mempengaruhi operasional Grup Tower Bersama dapat dipaparkan sebagai berikut :

### A. Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan

- Perseroan sebagai perusahaan *holding* bergantung pada pembayaran dari Perusahaan Anak.

### B. Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat memengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Grup Tower Bersama

- Pendapatan Grup Tower Bersama bergantung pada pendapatan sewa jangka panjang dari pelanggan.
- Sejumlah besar pendapatan Grup Tower Bersama berasal hanya dari beberapa operator telekomunikasi.
- Penggabungan usaha atau konsolidasi dapat terjadi di antara para pelanggan Grup Tower Bersama.
- Persaingan dalam industri penyewaan menara telekomunikasi dapat menyebabkan tekanan pada penentuan harga sewa.
- Grup Tower Bersama mungkin tidak berhasil menjalankan strategi pertumbuhan.
- Grup Tower Bersama memiliki utang dalam jumlah besar.
- Grup Tower Bersama mungkin mencatatkan tambahan utang.
- Beban keuangan yang tinggi dapat menekan margin Grup Tower Bersama.



- Kenaikan beban operasi dapat mengurangi margin operasi.
- Menara yang dioperasikan Grup Tower Bersama di beberapa lokasi tidak memiliki izin.
- Grup Tower Bersama mungkin mendapat penentangan dari masyarakat setempat di beberapa lokasi menara.
- Grup Tower Bersama mungkin tidak mampu memperpanjang atau memperbaharui sewa lahan, atau melindungi hak-hak Grup Tower Bersama atas tanah di tempat berdirinya menara telekomunikasi.
- Revaluasi atas aset tetap menara telekomunikasi Grup Tower Bersama dapat berubah-ubah.
- Teknologi baru dapat menyebabkan para calon pelanggan menjadi kurang tertarik untuk menyewa *tower space* dari Grup Tower Bersama.
- Grup Tower Bersama mungkin tidak dapat mendeteksi dan mencegah tindakan penyuapan atau penyalahgunaan lain yang dilakukan oleh karyawan Grup Tower Bersama, perwakilan, agen, pelanggan atau pihak ketiga lainnya.
- Grup Tower Bersama dapat memiliki tanggung jawab hukum dalam undang-undang lingkungan hidup.
- Menara-menara Grup Tower Bersama dapat terkena dampak bencana alam dan kerusakan yang tidak terduga.
- Keberhasilan Grup Tower Bersama bergantung pada kemampuan dalam menarik dan mempertahankan para personil penting.
- Persepsi mengenai risiko-risiko kesehatan yang ditimbulkan dari emisi radio dapat terus meningkat.

### **C. Risiko umum**

- Perubahan ekonomi domestik, regional, dan global yang material.
- Depresiasi atau volatilitas nilai Rupiah.
- Dari waktu ke waktu, Grup Tower Bersama mungkin terlibat dalam perselisihan hukum dan litigasi lainnya sehubungan dengan kegiatan usahanya.
- Bisnis Grup Tower Bersama tunduk pada berbagai peraturan yang diterbitkan Pemerintah dan perubahan-perubahannya di masa mendatang.
- Grup Tower Bersama tunduk pada ketentuan negara lain atau peraturan internasional sehubungan dengan penerbitan surat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat.

### **D. Risiko bagi investor**

- Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Obligasi ini antara lain dikarenakan tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
- Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi sebagai akibat dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Halaman ini sengaja dikosongkan





# I. PENAWARAN UMUM

## 1. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN

### 1.1. Nama Obligasi Berkelanjutan

Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure.

### 1.2. Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan

Target dana yang akan dihimpun sebesar Rp20.000.000.000.000 (dua puluh triliun Rupiah).

## 2. PENAWARAN UMUM OBLIGASI

### 2.1. Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023.

### 2.2. Mata Uang Obligasi

Mata uang Obligasi ini adalah Rupiah.

### 2.3. Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dengan Pemegang Rekening.

### 2.4. Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

### 2.5. Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, dan Jatuh Tempo Obligasi

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), yang terbagi dalam 2 (dua) seri, dengan ketentuan :

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,90% (lima koma sembilan nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pembelian kembali (*buyback*) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian



Perwalianamanatan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Sifat dan besarnya tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Tanggal-tanggal pembayaran masing-masing seri Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagai berikut :

Bunga ke-	Seri A	Seri B
1	11 Oktober 2023	11 Oktober 2023
2	11 Januari 2024	11 Januari 2024
3	11 April 2024	11 April 2024
4	21 Juli 2024	11 Juli 2024
5		11 Oktober 2024
6		11 Januari 2025
7		11 April 2025
8		11 Juli 2025
9		11 Oktober 2025
10		11 Januari 2026
11		11 April 2026
12		11 Juli 2026

## 2.6. Perhitungan Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dari Tanggal Emisi dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

## 2.7. Tata cara pembayaran Bunga Obligasi

- i. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012 ("Peraturan KSEI"). Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
- ii. Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening pukul 17.00 WIB;
- iii. Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- iv. Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.



## **2.8. Tata cara pembayaran Pokok Obligasi**

- i. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
- ii. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- iii. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening kepada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

## **2.9. Satuan Pemindahbukuan Obligasi**

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

## **2.10. Satuan Perdagangan**

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

## **2.11. Jaminan**

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

## **2.12. Pembelian Kembali Obligasi (*Buy back*)**

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- i. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- ii. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- iii. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- iv. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- v. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**");
- vi. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi, kecuali dari pihak ter-Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah;
- vii. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut;



- viii. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali tersebut dimulai, paling sedikit melalui: situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris, dan situs web Bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
- ix. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir vii di atas dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii di atas, paling sedikit memuat informasi tentang :
  - a. periode penawaran pembelian kembali;
  - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
  - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
  - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
  - e. tata cara penyelesaian transaksi;
  - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi mengajukan penawaran jual;
  - g. tata cara penyampaian penawaran oleh Pemegang Obligasi;
  - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
  - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.
- x. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- xi. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii di atas dengan ketentuan :
  - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
  - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
  - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- xiii. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain :
  - a. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
  - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
  - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
  - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
- xiv. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Efek bersifat utang dilakukan dengan mendahulukan Efek bersifat utang yang tidak dijamin;
- xv. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut;
- xvi. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut; dan



- xvii. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan :
- a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
  - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

#### **2.13. Dana Pelunasan Obligasi (*Sinking Fund*)**

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Prospektus ini.

#### **2.14. Pembayaran Manfaat Lain atas Obligasi**

Pembayaran manfaat lain atas Obligasi (jika ada) akan dilakukan melalui KSEI berdasarkan instruksi Perseroan dengan tetap memperhatikan hasil keputusan RUPO dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

#### **2.15. Hak-Hak Pemegang Obligasi**

- i. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- ii. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- iii. Apabila Perseroan lalai menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda. Denda tersebut dihitung secara harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- iv. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.



- v. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

## 2.16. Pembatasan dan Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa :

- i. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut :

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain yang akan menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang menurut penilaian Perseroan akan mempunyai Dampak Negatif yang Material, kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan suatu badan yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, kecuali untuk transaksi pembelian kembali saham Perseroan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau yang disetujui oleh para pemegang saham Perseroan pada RUPS;
- c. Menjaminkan dan atau membebani dengan cara apapun aset Perseroan dan Perusahaan Anak termasuk hak atas pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali :
  - 1) penjaminan atau pembebanan untuk menjamin pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan;
  - 2) penjaminan dan/atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan sebagian atau seluruh porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (*refinancing*) baik dalam satu transaksi maupun secara bertahap dimasa yang akan datang yang dijamin dengan aset dengan jenis yang sama;
  - 3) penjaminan/pembebanan yang telah diberikan sebelum dilaksanakannya penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan butir i huruf a di atas;
  - 4) penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari untuk memperoleh, antara lain, namun tidak terbatas pada bank garansi, *letter of credit*, belanja modal (*capital expenditure*) dan modal kerja (*working capital*) Perseroan;
  - 5) Penjaminan atau pembebanan untuk pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*), selama aset yang dijamin adalah aset yang diakuisisi.
- d. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga dan/atau Afiliasi, kecuali:
  - 1) pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan, termasuk namun tidak terbatas pada pinjaman atau jaminan perusahaan yang dibuat sehubungan dengan atau yang diperbolehkan berdasarkan *Indenture* Surat Utang 2025, *Indenture* Surat Utang 2026 dan *Indenture* Surat Utang 2027;
  - 2) pinjaman atau jaminan perusahaan kepada karyawan, koperasi karyawan dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) sesuai dengan program Pemerintah;
  - 3) pinjaman atau penjaminan kepada atau untuk kepentingan Perusahaan Anak;
  - 4) pinjaman atau jaminan perusahaan (yang bukan merupakan aset berwujud milik Perseroan), antara lain, namun tidak terbatas pada jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), pernyataan jaminan (*undertaking*), komitmen (*commitment*), yang dilakukan kepada perusahaan Afiliasi Perseroan, sepanjang dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar dan lazim (*arm's length basis*);
  - 5) uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari.



- e. Melakukan pengalihan atas Aset Tetap Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aset Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini yang telah diaudit oleh auditor independen, kecuali :
    - 1) pengalihan Aset Tetap yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-hari dan/atau pengalihan Aset Tetap yang tidak menghasilkan pendapatan, rusak, tidak lagi terpakai dan/atau sudah usang (non-produktif) dengan syarat penjualan Aset Tetap tersebut secara material tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak;
    - 2) pengalihan aset Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, dengan ketentuan aset Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Obligasi tidak akan melebihi nilai ekuitas Perseroan sesuai dengan laporan keuangan tahunan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak terkini yang telah diaudit oleh auditor independen;
    - 3) pengalihan aset yang dilakukan antar Perusahaan Anak Perseroan atau antara Perseroan dengan Perusahaan Anak (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang secara material tidak mengganggu jalannya usaha Perseroan;
    - 4) pengalihan aset dimana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan, dan/atau Perusahaan Anak atau dipakai untuk melunasi utang Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, sepanjang utang tersebut bukan utang subordinasi dan secara material tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang harus dilakukan dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut.
  - f. Mengadakan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan selain yang telah disebutkan dalam anggaran dasar Perseroan;
  - g. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Perseroan terhadap Perseroan dan/atau Perusahaan Anak selama Bunga Obligasi belum dibayar dan Pokok Obligasi belum dilunasi oleh Perseroan;
  - h. Mengeluarkan obligasi atau efek-efek lainnya melalui pasar modal yang dijamin secara lebih senior (khusus), kecuali jaminan tersebut diberikan juga kepada pemegang Obligasi ini secara pro-rata dan *pari passu*, dengan tetap memperhatikan ketentuan butir i huruf c angka 2) diatas.
- ii. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; dan
    - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak mendapat jawaban dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya.
  - iii. Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk :
    - a. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
    - b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening KSEI;
    - c. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan butir iii huruf b di atas, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut





- dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran;
- d. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin material untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya;
  - e. Menerapkan standar akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, dan mengadministrasikan pembukuan dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan dan hasil operasi Perseroan dan Perusahaan Anak dan yang diterapkan secara konsisten;
  - f. Segera mungkin memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, antara lain, terdapatnya penetapan pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemingkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau material yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya;
  - g. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas hal-hal sebagai berikut, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian berikut berlangsung :
    - 1) adanya perubahan anggaran dasar, perubahan susunan anggota Direksi, dan atau perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan, penggantian auditor Perseroan, dan keputusan-keputusan RUPS Tahunan dan keputusan RUPS Luar Biasa (“**RUPLSB**”) dari Perseroan serta menyerahkan akta-akta keputusan RUPS Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung;
    - 2) adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya dan mematuhi segala kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
  - h. Menyerahkan kepada Wali Amanat :
    - 1) salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (bila ada) selambat-lambatnya 10 Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;
    - 2) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK bersamaan dengan penyerahan laporan tersebut kepada OJK dan Bursa Efek selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (ke-3) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan;
    - 3) laporan keuangan untuk setiap periode yang berakhir pada 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK dan Bursa Efek;
    - 4) perhitungan perbandingan antara Total Pinjaman Konsolidasian dengan EBITDA dari kuartal terakhir dikalikan 4, bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan oleh Perseroan untuk setiap periode yang dimaksudkan dalam ketentuan butir iii huruf h angka 3) di atas.

Total Pinjaman Konsolidasian berarti jumlah Pinjaman Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal pelaporan. Untuk pinjaman dalam mata uang asing (utang valuta asing) dan belum dilindungi nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing tersebut adalah hasil perkalian antara saldo utang valuta asing dan kurs pada tanggal pelaporan. Untuk utang



valuta asing yang telah dilindungi nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing tersebut adalah hasil perkalian antara saldo utang valuta asing dan kurs lindung nilai dari utang valuta asing tersebut.

EBITDA berarti EBITDA konsolidasian yang dihitung dengan cara menambah laba bersih periode triwulan pelaporan Perseroan dan Perusahaan Anak, dengan : (a) beban keuangan - bunga; (b) beban keuangan - lainnya (c) beban pajak penghasilan - bersih; (d) kerugian selisih nilai tukar; (e) depresiasi dan amortisasi, termasuk penurunan nilai wajar goodwill dan aset tidak berwujud; (f) kerugian penghapusan, pelepasan dan/atau penurunan nilai wajar Aset Tetap dan Properti Investasi; (g) beban non-kas lainnya; dikurangi dengan : (a) keuntungan penghapusan, pelepasan dan/atau kenaikan nilai wajar Aset Tetap dan Properti Investasi; (b) manfaat pajak penghasilan - bersih; (c) keuntungan selisih nilai tukar; (d) pendapatan non-kas lainnya.

- i. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis;
- j. Memberi izin kepada Wali Amanat dan/atau orang yang diberi kuasa oleh Wali Amanat (termasuk namun tidak terbatas pada auditor/akuntan yang ditunjuk oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut) pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan untuk melakukan kunjungan langsung ke Perseroan, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, memeriksa catatan keuangan Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pasar modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurang-kurangnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan;
- k. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktek keuangan dan bisnis yang baik;
- l. Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya;
- m. Menyerahkan kepada Wali Amanat suatu surat pernyataan yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pelunasan Pokok Obligasi selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi;
- n. Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan pasar modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek;
- o. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan POJK No. 49/2020 berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.

## 2.17. Kelalaian Perseroan

- i. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :
  - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
  - b. Apabila Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, untuk sejumlah nilai melebihi 10% (sepuluh persen) dari total kewajiban Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini, oleh salah satu kreditornya (*cross default*) yang berupa pinjaman atau *letter of credit*, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau



- c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
  - d. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan secara material (selain butir i huruf a di atas, yaitu kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud dalam poin 2.16 butir iii di atas) atau fakta material mengenai keadaan atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan.
- ii. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu :

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam :

- a. butir i huruf a, b, dan c di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 10 Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
  - b. butir i huruf d di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
- maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

- iii. Apabila :

Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau membubarkan diri melalui keputusan RUPS atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

## 2.18. RUPO

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.



- i. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain :
  - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu, jumlah atau nilai Pokok Obligasi, tingkat suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“**POJK No. 20/2020**”);
  - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
  - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
  - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal Kelalaian Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam POJK No. 20/2020; dan
  - e. mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- ii. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan :
  - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
  - b. Perseroan;
  - c. Wali Amanat; atau
  - d. OJK.
- iii. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir ii huruf a, huruf b, dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- iv. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- v. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
  - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan;
  - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
  - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
  - d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain :
    - 1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
    - 2) agenda RUPO;
    - 3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
    - 4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
    - 5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
  - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.



- vi. Tata cara RUPO :
- a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
  - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI, sesuai dengan Peraturan KSEI;
  - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
  - d. seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
  - e. setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya;
  - f. suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
  - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
  - h. sebelum pelaksanaan RUPO :
    - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan Daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
    - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
    - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
  - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
  - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat;
  - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO;
  - l. dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut;
  - m. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- vii. Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir vi huruf g di atas, kuorum dan pengambilan keputusan :
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas diatur sebagai berikut :
    - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
      - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
      - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;



- (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
  - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
  - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
  - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
  - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
  - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
  - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka Wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
  - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
  - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
  - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
  - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
  - 2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;





- 3) RUPU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU;
  - 4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang ketiga;
  - 5) RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
  - 6) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPU yang keempat;
  - 7) RUPU keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat.
- viii. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPU menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat;
- ix. Penyelenggaraan RUPU wajib dibuatkan berita acara secara notarial oleh notaris;
- x. Keputusan RUPU mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPU. Keputusan RUPU mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/ atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi;
- xi. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPU dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPU tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan;
- xii. Apabila RUPU yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPU atau tanggal lain yang diputuskan RUPU (jika RUPU memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPU. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPU dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

## **2.19. Hak Keutamaan (Senioritas) Obligasi**

Tidak terdapat senioritas (hak keutamaan) dari Obligasi dan tidak ada utang lain yang memiliki senioritas lebih tinggi dari Obligasi. Obligasi bersifat *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.





## 2.20. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwalianamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

### **Perseroan :**

Nama : **PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.**  
Alamat : The Convergence Indonesia, lantai 11  
Kawasan Rasuna Epicentrum  
Jl. H.R. Rasuna Said  
Jakarta Selatan 12940  
Telepon : (62 21) 2924 8900  
Faksimili : (62 21) 2157 2015  
Email : corporate.secretary@tower-bersama.com  
Untuk perhatian : *Corporate Secretary*

### **Wali Amanat :**

Nama : **PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.**  
Alamat : Menara BTN, lantai 18  
Jl. Gajah Mada No. 1  
Jakarta Pusat 10130  
Telepon : (62 21) 633 6789  
Email : trustee.btn@gmail.com  
Untuk perhatian : *Wali Amanat – Financial Services Department  
Financial Institutional & Capital Market Division (FICD)*

## 2.21. Perubahan Perjanjian Perwalianamanatan

Perubahan Perjanjian Perwalianamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- i. Apabila perubahan Perjanjian Perwalianamanatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwalianamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- ii. Apabila perubahan Perjanjian Perwalianamanatan dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwalianamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap perjanjian perwalianamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwalianamanatan.

## 2.22. Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.



### 3. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“**POJK No. 36/2014**”), sebagai berikut :

- i. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.
- ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi perusahaan publik sejak tanggal 15 Oktober 2010 berdasarkan Surat Bapepam-LK No. S-9402/BL/2010 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- iii. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 12 April 2023 dan Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Sehubungan Dengan Pembayaran Liabilitas kepada Kreditur Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023 No. 081/7.T053/STM.1/12.22/AUP tanggal 12 April 2023, keduanya menyatakan Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar (i) selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan; dan (ii) sejak 2 (dua) tahun terakhir sebelum melunasi Efek yang bersifat utang sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Gagal Bayar berarti kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.
- iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan AA<sup>+</sup><sub>(idn)</sub> (*Double A Plus*) dari Fitch.

Penawaran Umum Obligasi dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

### 4. KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

#### 4.1. Hasil Pemeringkatan

Sesuai dengan POJK No. 7/2017, POJK No. 36/2014 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh peringkat nasional dari Fitch sesuai dengan Surat No. 109/DIR/RATLTR/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 perihal Peringkat PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., dengan peringkat :

**AA<sup>+</sup><sub>(idn)</sub>**  
**(Double A Plus)**

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Fitch, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.



#### 4.2. Skala Pemeringkatan Efek Utang Jangka Panjang

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat perusahaan atau efek utang jangka panjang untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi Perseroan :

AAA(idn)	Peringkat nasional “AAA” menandakan kualitas tertinggi yang diberikan pada skala peringkat nasional untuk negara tersebut. Peringkat ini diberikan kepada kualitas kredit terbaik dibanding perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama dan biasanya akan diberikan kepada semua kewajiban keuangan yang dikeluarkan atau dijamin oleh Pemerintah.
AA(idn)	Peringkat nasional “AA” menandakan suatu kualitas kredit yang sangat kuat dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Risiko kredit yang tidak dapat dipisahkan di dalam kewajiban-kewajiban keuangan ini hanya berbeda sedikit dari perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang yang mendapat peringkat tertinggi di suatu negara.
A(idn)	Peringkat nasional “A” menandakan suatu kualitas kredit yang kuat dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat dapat mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan secara tepat waktu akan lebih besar dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat lebih tinggi.
BBB(idn)	Peringkat nasional “BBB” menandakan suatu kualitas kredit yang dinilai cukup dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan secara tepat waktu akan lebih tinggi dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat lebih tinggi.
BB(idn)	Peringkat nasional “BB” menandakan suatu kualitas kredit yang dinilai cukup lemah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Dalam konteks suatu negara, pembayaran dari kewajiban-kewajiban keuangan ini tidak pasti dan kapasitas untuk pembayaran kembali secara tepat waktu akan lebih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan.
B(idn)	Peringkat nasional “B” menandakan suatu kualitas kredit yang secara signifikan lebih lemah dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lain pada negara yang sama. Kewajiban-kewajiban keuangan saat ini dapat dipenuhi meskipun dengan margin keamanan yang terbatas, dan kapasitas untuk menjalankan pembayaran secara tepat waktu bergantung pada kondisi usaha dan perekonomian yang menguntungkan dan berkelanjutan.
CCC(idn), CC(idn), C(idn)	Kategori-kategori peringkat nasional ini menandakan suatu kualitas kredit yang sangat lemah dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lain pada negara yang sama. Kapasitas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan bergantung sepenuhnya pada perkembangan usaha dan ekonomi yang menguntungkan.
DDD(idn), DD(idn), D(idn)	Kategori-kategori peringkat nasional ini diberikan kepada perusahaan atau kewajiban-kewajiban keuangan yang saat ini dalam keadaan gagal bayar.

Sebagai tambahan, tanda tambah (“+”) atau kurang (“-“) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari “AA” hingga “C” yang menandakan kedudukan relatif di dalam suatu kategori : tanda tambah (“+”) menunjukkan di atas rata-rata, tanda kurang (“-“) menunjukkan di bawah rata-rata dan tanpa tanda menunjukkan rata-rata.



**PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK No. 49/2020.**

#### 4.3. Faktor-Faktor Penggerak Peringkat

**Ruang Gerak Peringkat Stabil** : Fitch memperkirakan Perseroan akan menjaga EBITDA *net leverage* dibawah 5,3x. Perseroan berkomitmen pada peringkat *investment grade* dan akan mempertahankan rasio *net debt/ EBITDA* kuartal terakhir yang disetahunkan di bawah 5,3x selama jangka pendek sampai menengah. EBITDA *net leverage* telah membaik ke 4,7x pada 1Q23 dari 4,9x pada tahun 2022 didukung oleh pembayaran utang dan penghasilan EBITDA yang stabil.

**Pembaruan Kontrak Dapat Dikelola** : Fitch percaya Perseroan memiliki risiko pembaruan kontrak yang terbatas, mengingat sekitar 16% dari kontrak per 1Q23 akan jatuh tempo di tahun 2024. Fitch menilai permintaan sewa dari pemimpin pasar telekomunikasi, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (“**Telkom**”) (BBB/Stabil) dan PT XL Axiata Tbk. (“**XL Axiata**”) (BBB/AAA(idn)/Stabil) dapat mengimbangi sewa yang tidak diperpanjang oleh PT Indosat Tbk. (BBB-/AA+(idn)/Stabil) sampai tahun 2024. Kontribusi pendapatan dari tiga operator telekomunikasi terbesar sebesar 82% pada 1Q23, termasuk Indosat-Hutch yang baru-baru ini merger.

**Konsolidasi Industri Menara** : Industri menara Indonesia terkonsolidasi menjadi oligopoli dengan tiga perusahaan menara besar. Fitch mengestimasi Perseroan dan perusahaan menara independen terbesar, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo, BBB/AAA(idn)/Stabil), mengendalikan sekitar setengah dari industri menara di Indonesia. PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (“**Mitratel**”), perusahaan anak dari pemimpin pasar seluler Telkom, saat ini mengontrol sekitar 33% menara di industri setelah mengakuisisi 6.000 menara tambahan dari afiliasinya PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) pada bulan Agustus 2022.

Fitch memperkirakan bahwa Perseroan tidak akan melakukan akuisisi besar; akuisisi besar terakhir adalah 3.000 menara dari PT Inti Bangun Sejahtera Tbk., (“**IBST**”) pada tahun 2021. Pemain yang tersisa di industri tergolong terfragmentasi dan terdapat kesempatan yang terbatas untuk mengakuisisi portfolio menara yang besar. DigitalBridge Group Inc’s Edgepoint adalah operator menara terbesar keempat dengan 9.000 menara, dan industri ini memiliki beberapa perusahaan menara yang lebih kecil dengan jumlah menara 1.000 sampai 3.000, seperti PT Bali Towerindo Sentra Tbk. (A-(idn)/Stabil).

**Visibilitas Arus Kas Kuat** : Peringkat Perseroan mendapatkan manfaat dari perjanjian sewa jangka panjang yang memberikan visibilitas dan stabilitas arus kas. Total pendapatan terkunci adalah sekitar Rp31 triliun pada akhir Maret 2023, dan rata-rata sisa masa kontrak adalah 5,5 tahun. Fitch menilai risiko tidak diperbaruinya kontrak tergolong rendah, kecuali menara yang terpengaruh oleh integrasi jaringan Indosat. Menara adalah infrastruktur yang sangat penting bagi perusahaan telekomunikasi, yang berusaha menghindari relokasi peralatan untuk meminimalisir gangguan layanan.

**Pertumbuhan Pendapatan Melambat** : Fitch memperkirakan pertumbuhan pendapatan akan melambat ke *low-single digits* pada tahun 2023-2025 (2022: 5,6%, 3M23: -1,4%), dikarenakan konsolidasi portofolio menara Indosat-Hutch dengan cara mengeliminasi menara yang berulang, setelah kedua perusahaan melakukan merger. Namun, permintaan untuk menara dan sewa dari XL Axiata dan Telkom akan tetap tinggi, karena Fitch mengekspektasi perusahaan-perusahaan tersebut untuk menginvestasikan sekitar 25%-30% dari pendapatan sebagai belanja modal.

**EBITDA yang Kuat** : Fitch memperkirakan margin EBITDA Perseroan akan tetap kuat diatas 80% meskipun diperkirakan margin akan mengalami penurunan. Fitch memproyeksikan margin EBITDA Perseroan akan turun ke 84%-85% (2022 dan 3M23: 86%) pada 2023-2025 dikarenakan integrasi jaringan Indosat dan kontrak kadaluarsa yang memiliki biaya sewa yang lebih tinggi. Fitch menghitung EBITDA setelah menyesuaikan beban bunga dan depresiasi yang terkait *lease* di bawah standar akuntansi Indonesia PSAK 73.

**Arus Kas Bebas Memadai** : Fitch memperkirakan arus kas bebas Perseroan akan stabil pada 2023 dikarenakan oleh belanja modal yang lebih rendah. Fitch memproyeksikan arus kas dari operasional akan cukup untuk membiayai operasional sehari-hari, belanja modal pemeliharaan dan dividen. Fitch memperkirakan perusahaan



untuk mendistribusikan pengembalian pemegang saham secara hati-hati dan menjaga rasio *net debt*/EBITDA secara setahun penuh di bawah 5,3x dalam jangka pendek sampai menengah. Perseroan membayar dividen sebesar Rp843 miliar di 2022.

**Subordinasi Struktural Membaik** : Obligasi Perseroan diperingkat pada tingkat yang sama dengan Peringkat Nasional Jangka Panjangnya, meskipun terdapat subordinasi struktural terhadap utang yang dimiliki oleh perusahaan anak yang beroperasi yang menghasilkan pendapatan grup. Rasio utang *prior-ranking*/EBITDA yang disetahunkan membaik ke 0,6x pada 1Q23 (2022: 0,8x). Fitch percaya ini akan terus membaik karena Perseroan akan menggunakan dana dari obligasi untuk membayar beberapa utang pada level perusahaan operasionalnya. Pemulihan dari kreditur akan kuat dalam skenario gagal bayar, karena proporsi yang tinggi dari arus kas operasional terkunci secara kontraktual.

#### 5. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., ("**Bank BTN**") selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwalianamanatan.

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XIII dalam Prospektus ini.



## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipinjamkan oleh Perseroan :

- (i) sebesar US\$99,8 juta atau setara dengan Rp1.488,5 miliar kepada TB untuk melakukan pembayaran seluruh pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan TB; dan
  - (ii) sisanya sampai dengan sebesar-besarnya US\$0,7 juta atau setara dengan Rp10,0 miliar kepada SKP untuk melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan SKP,
- yang keduanya terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$325.000.000 Facility Agreement* tertanggal 18 April 2023 yang akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen.

Fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$325.000.000 Facility Agreement* dikenakan marjin bunga (i) sebesar 1,25% per tahun di atas *Compounded Reference Rate* untuk kreditur luar negeri dan 1,33% per tahun di atas *Compounded Reference Rate* untuk kreditur dalam negeri apabila *senior leverage ratio* kurang dari 1,0:1; atau (ii) sebesar 1,40% per tahun di atas *Compounded Reference Rate* untuk kreditur luar negeri dan 1,48% per tahun *Compounded Reference Rate* untuk kreditur dalam negeri apabila *senior leverage ratio* sama dengan atau lebih dari 1,0:1, dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Agustus 2026. Fasilitas ini digunakan oleh Perusahaan Anak untuk pendanaan yang bersifat umum, termasuk namun tidak terbatas pada pelunasan utang, belanja modal dan pembiayaan pengambilalihan yang diizinkan sesuai dengan perjanjian ini. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para kreditur. Penjelasan lebih lengkap mengenai fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$325.000.000 Facility Agreement* dapat dilihat pada Sub Bab Perjanjian Kredit dalam Bab Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

Per 23 Juni 2023, saldo kewajiban keuangan dalam fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$325.000.000 Facility Agreement* tercatat sebesar (i) US\$110,3 juta atau setara Rp1.645,1 miliar untuk TB; dan (ii) US\$54,8 juta atau setara Rp817,5 miliar untuk SKP. Dengan telah dilakukan pembayaran fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$325.000.000 Facility Agreement* kepada para kreditur melalui Agen, maka saldo kewajiban atas fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$325.000.000 Facility Agreement* akan menjadi sebesar (i) US\$10,5 juta atau setara Rp156,6 miliar untuk TB; dan (ii) US\$54,1 juta atau setara Rp807,5 miliar untuk SKP. Tidak ada penalti yang dikenakan atas pembayaran ini. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 23 Juni 2023 sebesar Rp14.918/US\$1.

Mengingat kewajiban keuangan yang akan dibayarkan dalam mata uang Dolar AS, maka dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran. Dalam hal nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS mengalami penguatan sehingga terdapat sisa dana hasil Penawaran Umum Obligasi setelah Perseroan melakukan pembayaran fasilitas pinjaman dalam *US\$325.000.000 Facility Agreement*, Perseroan akan meminjamkan dana tersebut kepada TB dan SKP, Perusahaan Anak, untuk digunakan sebagai modal kerja, antara lain untuk pembayaran beban keuangan.

Dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini akan disalurkan kepada masing-masing TB dan SKP dalam bentuk pinjaman yang akan jatuh tempo paling lambat 3 (tiga) tahun pada tingkat suku bunga minimal sebesar tingkat bunga Obligasi, serta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum, yang akan ditentukan kemudian pada kondisi *arms' length*. Apabila dana yang dipinjamkan oleh Perseroan kepada masing-masing TB dan SKP telah dikembalikan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk pembayaran utang Perseroan di masa mendatang.

SKP merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan secara tidak langsung melalui MSI dengan penyertaan saham sebesar 99,71% pada SKP (dimana Perseroan merupakan pemegang 98,74% saham secara langsung dalam MSI serta TB juga merupakan pemegang 1,26% saham secara langsung dalam MSI), dan TB merupakan perusahaan yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan dengan penyertaan saham sebesar 99,99% pada TB, sehingga penyaluran dana hasil Penawaran Umum Obligasi kepada masing-masing TB dan SKP dalam bentuk pinjaman merupakan suatu transaksi afiliasi antara Perseroan dan perusahaan terkendali dimana



transaksi afiliasi tersebut tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana didefinisikan dan diatur dalam POJK No. 42/2020 serta dikonfirmasi oleh Perseroan. Perseroan tidak diwajibkan untuk melakukan keterbukaan informasi dengan tata cara yang diatur pada umumnya dalam ketentuan terkait transaksi afiliasi dalam POJK No. 42/2020. Namun demikian, Perseroan wajib melaporkan transaksi afiliasi tersebut kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja kedua setelah tanggal transaksi afiliasi berdasarkan POJK No. 42/2020.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPO dan memperoleh persetujuan RUPO sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal laporan serta wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut untuk pertama kalinya dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah Tanggal Distribusi.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait, telah seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut, dan telah dilaporkan Perseroan kepada OJK berdasarkan Surat No. 368/TBG-TBI-00/FIN/05/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 perihal Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2023.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 0,653% (nol koma enam lima tiga persen) dari nilai Emisi Obligasi yang meliputi :

- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,025%;
- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 0,150%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,025%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,106%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,024%, biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,070%, dan biaya jasa Notaris sekitar 0,012%;
- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,079%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat 0,012% dan biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek sekitar 0,067%; dan
- Biaya lain-lain sekitar 0,268%, termasuk biaya pendaftaran atas Pernyataan Pendaftaran di OJK, biaya pencatatan pada BEI, biaya-biaya untuk KSEI, biaya jasa konsultasi keuangan, biaya penyelenggaraan Penawaran Awal dan Penawaran Umum, biaya pencetakan Prospektus, formulir, biaya iklan koran, dan biaya audit penjabatan.





### III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut berasal dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00531/2.1068/AU.1/06/0117-1/1/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 yang ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA (Registrasi Akuntan Publik No. 0117) dengan opini tanpa modifikasian dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Kecuali disebutkan lain, maka seluruh kata “Perseroan” dalam bab ini berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. dan Perusahaan Anak.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp32.219,6 miliar dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<u>Jumlah</u>
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>	
Utang usaha - pihak ketiga	255.607
Utang lain-lain	23.442
Utang pajak	123.066
Pendapatan yang diterima di muka	1.103.585
Beban masih harus dibayar	974.904
Liabilitas sewa - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	126.567
Surat utang bagian jangka pendek	5.914.573
Pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Pihak ketiga	206.438
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<u><b>8.728.182</b></u>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>	
Liabilitas sewa - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	533.136
Provisi jangka panjang	107.400
Surat utang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	18.678.155
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Pihak ketiga	4.160.396
Cadangan imbalan pasca-kerja	12.316
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<u><b>23.491.403</b></u>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<u><u><b>32.219.585</b></u></u>

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1. LIABILITAS JANGKA PENDEK

##### Utang usaha - pihak ketiga

Saldo utang usaha - pihak ketiga dalam Rupiah dan Dolar AS pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp255,6 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<u>Jumlah</u>
<b>Rupiah</b>	
PT ZTT Cable Indonesia	47.985
PT Sanggar Jaya Abadi	39.277
PT Wahana Infrastruktur Nusantara	18.627
PT Tunas Cahaya Mandiri Widyatama	7.190



(dalam jutaan Rupiah)

	<b>Jumlah</b>
PT Tritama Aji Laksana	6.462
PT Danusari Mitra Sejahtera	6.347
PT Berkat Bersama Teknik	6.297
PT Furukawa Optical Solution Indonesia	6.083
PT Mandiri Infra Triprakarti	5.576
PT Jaya Engineering Technology	5.364
PT Nayaka Pratama	4.721
PT Ciptadana Sekuritas Asia	4.643
PT Sinarmonas Industries	3.421
PT YOFC Internasional Indonesia	3.330
PT Kokoh Semesta	917
Lainnya (masing-masing di bawah Rp3 miliar)	89.367
<b>Jumlah</b>	<b>255.607</b>

Semua utang usaha - pihak ketiga disajikan dalam Rupiah.

Nilai tercatat utang usaha yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi mendekati nilai wajarnya.

#### Utang lain-lain

Saldo utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp23,4 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	<b>Jumlah</b>
Asuransi	474
Lainnya	22.968
<b>Jumlah</b>	<b>23.442</b>

Pos lainnya terutama merupakan penerimaan dari pihak ketiga yang belum terkonfirmasi dan utang kepada pihak lainnya.

Nilai tercatat utang lain-lain yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi mendekati nilai wajarnya.

#### Utang pajak

Saldo utang pajak pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp123,1 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	<b>Jumlah</b>
Pajak Penghasilan Pasal 4(2)	7.512
Pajak Penghasilan Pasal 21	3.072
Pajak Penghasilan Pasal 23	17.343
Pajak Penghasilan Pasal 25	7.833
Pajak Penghasilan Pasal 26	22.846
Pajak Penghasilan Pasal 29	25.580
Pajak Pertambahan Nilai - Keluaran	38.880
<b>Jumlah</b>	<b>123.066</b>

#### Pendapatan yang diterima di muka

Saldo pendapatan yang diterima di muka pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.103,6 miliar, dengan rincian sebagai berikut :



(dalam jutaan Rupiah)

	<u>Jumlah</u>
PT XL Axiata Tbk.	541.132
PT Indosat Tbk.	417.551
PT Telekomunikasi Selular	136.937
PT Smartfren Telecom Tbk.	965
PT Smart Telecom	20
Lainnya	6.980
<b>Jumlah</b>	<b><u>1.103.585</u></b>

Sesuai perjanjian sewa, Perusahaan Anak telah menerima pembayaran di muka dari pelanggan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) tahun. Liabilitas kontrak adalah kewajiban entitas untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan yang untuk entitasnya telah menerima imbalan (atau jumlah yang jatuh tempo) dari pelanggan.

### **Beban masih harus dibayar**

Saldo beban masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp974,9 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	<u>Jumlah</u>
Beban bunga	
Surat utang	382.834
Pinjaman jangka panjang	14.286
Estimasi biaya pembangunan menara telekomunikasi	343.011
Karyawan	114.112
Perbaikan dan pemeliharaan menara	54.473
Asuransi	25.267
Jasa konsultan	7.831
Retensi pembelian gedung	6.500
Beban kantor	3.708
Listrik	3.620
Keamanan	3.124
Lainnya	16.138
<b>Jumlah</b>	<b><u>974.904</u></b>

Pos lainnya terutama merupakan utang beban bagi hasil pendapatan dan pembelian aset tetap.

Estimasi biaya pembangunan menara telekomunikasi merupakan estimasi beban masih harus dikeluarkan atas menara telekomunikasi yang telah selesai pembangunannya namun belum ditagihkan seluruh biayanya oleh kontraktor.

Retensi pembelian menara adalah sebagian pembayaran yang ditunda oleh Perseroan hingga kondisi tertentu yang dituangkan di Perjanjian Jual beli Aset Bersyarat terpenuhi.

### **Liabilitas sewa - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun**

Saldo liabilitas sewa yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp126,6 miliar. Penjelasan lebih lengkap mengenai liabilitas sewa dapat dilihat pada Sub Bab Liabilitas Jangka Panjang dalam Bab ini.

### **Surat utang - bagian jangka pendek**

Saldo surat utang bagian jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.914,6 miliar, yang merupakan surat utang yang telah diterbitkan Perseroan dan akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun. Penjelasan lebih lengkap mengenai surat utang dapat dilihat pada Sub Bab Liabilitas Jangka Panjang dalam Bab ini.



## Pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Saldo pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp206,4 miliar, yang timbul dari pinjaman non-sindikasi. Penjelasan lebih lengkap mengenai pinjaman jangka panjang dapat dilihat pada Sub Bab Liabilitas Jangka Panjang dalam Bab ini.

## 2. LIABILITAS JANGKA PANJANG

### Liabilitas sewa - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun

Saldo liabilitas sewa setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun adalah sebesar Rp533,1 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<b>Jumlah</b>
a. Lahan	642.393
b. Kendaraan	17.310
<b>Jumlah</b>	<b>659.703</b>
<b>Bagian jangka pendek</b>	<b>126.567</b>
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>533.136</b>

#### **Lahan**

Sesuai dengan penerapan PSAK 73 "Sewa", Perseroan mulai melakukan penerapan awal dan mengakui liabilitas sewa aset hak guna dari estimasi nilai perpanjangan sewa lahan untuk mencakup jangka waktu kolokasi, dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<b>Jumlah</b>
Saldo awal	660.412
Ditambah :	
Penambahan sewa lahan	90.400
Beban keuangan	24.383
Dikurangi :	
Pembayaran sewa lahan	(132.802)
<b>Jumlah</b>	<b>642.393</b>
<b>Bagian jangka pendek</b>	<b>120.389</b>
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>522.004</b>

#### **Kendaraan**

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<b>Jumlah</b>
PT Mitra Pinasthika Mustika Finance	9.029
PT BCA Finance	8.281
<b>Jumlah</b>	<b>17.310</b>
<b>Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun</b>	<b>6.178</b>
<b>Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun</b>	<b>11.132</b>

Pembayaran sewa minimum di masa mendatang, serta nilai kini atas pembayaran sewa minimum pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :



(dalam jutaan Rupiah)

	<b>Jumlah</b>
Bagian jangka pendek	7.783
Bagian jangka panjang	12.289
	<b>20.072</b>
Dikurangi :	
Beban bunga yang belum jatuh tempo	(2.762)
Nilai kini pembayaran minimum utang sewa pembiayaan	17.310
Bagian jangka pendek	6.178
Bagian jangka panjang	11.132
Nilai kini pembayaran minimum utang sewa pembiayaan	17.310

Pada tanggal 31 Desember 2022, sewa pembiayaan ini dikenakan bunga berkisar antara 3,75% sampai dengan 15,22% per tahun dan akan jatuh tempo antara tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Sewa pembiayaan ini dijamin dengan aset kendaraan yang menjadi obyek pembiayaan.

### Provisi jangka panjang

Saldo provisi jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp107,4 miliar.

Akun ini merupakan biaya pembongkaran, pemindahan dan restorasi lokasi atas menara pada saat menara tersebut tidak dioperasikan lagi karena faktor-faktor tertentu seperti sewa lahan yang tidak diperpanjang, penyesuaian peraturan atau keadaan memaksa lainnya.

Asumsi signifikan pada tanggal 31 Desember 2022, terdiri dari tingkat diskonto dan sisa periode sebelum pembongkaran dilakukan, yaitu masing-masing adalah 7,42%-7,44% dan 19-40 tahun.

Provisi jangka panjang akan direalisasi ketika pembongkaran menara.

### Surat utang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun

Saldo surat utang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp18.678,2 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	<b>Jumlah</b>
<b>Dolar AS</b>	
a. 4,25% <i>Senior Unsecured Notes</i> (saldo pada 31 Desember 2022 sebesar US\$350 juta)	5.505.850
b. 2,75% <i>Senior Unsecured Notes</i> (saldo pada 31 Desember 2022 sebesar US\$300 juta)	4.719.300
c. 2,80% <i>Senior Unsecured Notes</i> (saldo pada 31 Desember 2022 sebesar US\$400 juta)	6.292.400
	<b>16.517.550</b>
<b>Rupiah</b>	
a. Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV	867.000
b. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I	469.000
c. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II	455.000
d. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III	1.017.000
e. Obligasi Berkelanjutan V Tahap III	2.200.000
f. Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV	2.200.000
g. Obligasi Berkelanjutan V Tahap V	1.000.000
Jumlah	8.208.000
Jumlah US Dolar dan Rupiah	24.725.550
Dikurangi :	
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(132.822)
<b>Saldo yang jatuh tempo dalam satu tahun</b>	<b>(5.914.573)</b>
<b>Saldo yang jatuh tempo lebih dari satu tahun</b>	<b>18.678.155</b>



#### 4.25% Unsecured Senior Notes sebesar US\$350 juta

Pada tanggal 21 Januari 2020, Perseroan menerbitkan 4,25% *Unsecured Senior Notes* (“**Surat Utang 2025**”) dengan nilai agregat sebesar US\$350.000.000. Surat Utang 2025 ini dikenakan bunga sebesar 4,25% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 21 Januari dan 21 Juli setiap tahun, dimulai pada tanggal 21 Juli 2020. Surat Utang 2025 ini akan jatuh tempo pada tanggal 21 Januari 2025. Surat Utang 2025 ini tidak dapat dibeli kembali sebelum 3 (tiga) tahun.

Dana dari penerbitan Surat Utang 2025 ini digunakan untuk membiayai kembali seluruh saldo pinjaman fasilitas pinjaman *revolving* Seri B dalam US\$1.000.000.000 *Facility Agreement* dan sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam US\$200.000.000 *Facility Agreement*.

Sesuai pembatasan-pembatasan yang mengatur tentang Surat Utang 2025, Perseroan dan Perusahaan Anak Yang Dibatasi, memiliki keterbatasan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain, sebagai berikut :

- i. Menambah pinjaman baru dan menerbitkan saham preferen, kecuali Rasio Utang/Arus Kas Teranualisasi tidak lebih dari 6,25x;
- ii. Melakukan pembayaran yang dibatasi, seperti :
  - a. menyatakan atau membayar dividen atau melakukan suatu pembayaran atau pembagian untuk kepentingan penerbit atau setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas Perusahaan Anak Yang Dibatasi atau kepada para pemilik langsung atau tidak langsung dari penerbit atau setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas dari Perusahaan Anak Yang Dibatasi;
  - b. membeli, menebus atau dengan cara lain mendapatkan atau membebaskan untuk nilai setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas dari penerbit atau setiap induk langsung atau tidak langsung dari penerbit;
  - c. melakukan pembayaran atas atau sehubungan dengan, melakukan penebusan dengan tidak dapat dicabut kembali, atau membeli, menebus, melakukan penjaminan efek atau dengan cara lain mendapatkan atau membebaskan untuk nilai dari setiap utang dari penerbit atau setiap Perusahaan Anak yang secara kontraktual disubordinasikan kepada Perusahaan Anak atau setiap Jaminan Surat Utang (tidak termasuk pinjaman antar perusahaan dan utang antar perusahaan), kecuali suatu pembayaran bunga atau pokok pada tanggal jatuh tempo; dan
  - d. membuat setiap Investasi Yang Dibatasi.

Perseroan dapat melakukan Pembayaran Yang Dibatasi tersebut di atas, jika :

- i. Tidak ada wanprestasi atau peristiwa wanprestasi telah terjadi dan berlanjut atau akan terjadi; dan
- ii. Rasio Arus Kas Teranualisasi tidak lebih dari 6,25x.

Catatan :

- (1) Perusahaan Anak Yang Dibatasi berarti semua Perusahaan Anak Perseroan per 31 Desember 2022.
- (2) Hak Kepemilikan Atas Ekuitas berarti saham modal dan seluruh waran, opsi atau hak lainnya untuk mendapatkan saham modal (namun tidak termasuk efek bersifat utang yang dapat dikonversi menjadi, atau dapat dipertukarkan dengan saham modal).
- (3) Investasi yang Dibatasi berarti investasi selain investasi yang diizinkan dalam Surat Utang.

Transaksi penerbitan Surat Utang 2025 ini telah memenuhi Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“**Peraturan No. IX.E.2**”), yang berlaku pada saat transaksi tersebut dilakukan, dan Perseroan telah melaporkan penerbitan Surat Utang 2020 tersebut kepada OJK pada tanggal 23 Januari 2020. Surat Utang 2025 ini didaftarkan pada Bursa Efek Singapura.

Per 31 Desember 2022, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam Surat Utang 2025.

#### 2.75% Unsecured Senior Notes sebesar US\$300 juta

Pada tanggal 20 Januari 2021, Perseroan menerbitkan 2,75% *Unsecured Senior Notes* (“**Surat Utang 2026**”) dengan nilai agregat sebesar US\$300.000.000. Surat Utang 2026 ini dikenakan bunga sebesar 2,75% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 20 Januari dan 20 Juli setiap tahun, dimulai pada tanggal 20 Juli 2021. Surat Utang 2026 ini akan jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2026.



Dana dari penerbitan Surat Utang 2026 ini digunakan untuk membiayai kembali sebagian fasilitas pinjaman *revolving* Seri B sebesar US\$100.000.000 dalam US\$1.000.000.000 *Facility Agreement* dan sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam US\$200.000.000 *Facility Agreement* dan sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam US\$375.000.000 *Facility Agreement*.

Transaksi ini telah memenuhi POJK No. 17/2020 dan Perseroan telah melaporkan penerbitan Surat Utang 2026 tersebut kepada OJK pada tanggal 22 Januari 2021. Surat Utang 2026 ini didaftarkan pada pasar Bursa Efek Singapura.

Per 31 Desember 2022, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam Surat Utang 2026.

#### 2,80% Unsecured Senior Notes sebesar US\$400 juta

Pada tanggal 2 November 2021, Perseroan menerbitkan 2,80% *Senior Unsecured Notes* (“**Surat Utang 2027**”) dengan nilai agregat sebesar US\$400.000.000. Surat Utang 2027 ini dikenakan bunga sebesar 2,80% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 2 Mei dan 2 November setiap tahun, dimulai pada tanggal 2 Mei 2022. Surat Utang 2027 ini akan jatuh tempo pada tanggal 2 Mei 2027.

Dana dari penerbitan Surat Utang 2027 ini digunakan untuk membiayai kembali sebagian fasilitas pinjaman *revolving* Seri B dalam US\$1.000.000.000 *Facility Agreement*, sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam US\$200.000.000 *Facility Agreement* dan sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam US\$375.000.000 *Facility Agreement*.

Transaksi ini telah memenuhi POJK No. 17/2020 dan Perseroan telah melaporkan penerbitan Surat Utang 2027 kepada OJK pada tanggal 12 November 2021. Surat Utang 2027 ini didaftarkan pada Bursa Efek Singapura.

Per 31 Desember 2022, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam Surat Utang 2027.

Jika bagian utang yang telah dilindungi nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, maka saldo surat utang jangka panjang pada 31 Desember 2022 setelah dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi adalah sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	<u>Kurs laporan posisi keuangan</u>	<u>Kurs lindung nilai</u>
Surat utang	24.725.550	23.251.298
Dikurangi :		
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(132.822)	(132.822)
<b>Jumlah - Bersih</b>	<b><u>24.592.728</u></b>	<b><u>23.118.476</u></b>

#### Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV

Pada tanggal 24 Maret 2020, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2020 dengan tingkat bunga tetap (“**Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV**”). Nominal Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV ini adalah sebesar Rp1.500,0 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 26 Maret 2020.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan Perusahaan Anak.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri, sebagai berikut :

- i. Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp633,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
- ii. Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp867,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun. Jangka waktu obligasi seri B adalah 3 (tiga) tahun.





Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 24 Juni 2020, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 4 April 2021 untuk obligasi seri A dan 24 Maret 2023 untuk obligasi seri B.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2020 No. 9 tanggal 5 Maret 2020, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2020 No. 71 tanggal 12 Juli 2022, yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Pada tanggal 12 Juli 2022, RUPO telah menyetujui dan memutuskan penggantian wali amanat bagi Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV dari semula PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., ("**BRI**") menjadi Bank BTN.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Perseroan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara Total Pinjaman Konsolidasian Proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25x. Per 31 Desember 2022, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Pada tanggal 7 November 2022, Fitch telah memberikan peringkat AA+<sub>(idn)</sub> (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV ini.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV seri A ini telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 4 April 2021 dan seri B ini telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 24 Maret 2023.

#### Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I

Pada tanggal 8 September 2020, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2020 dengan tingkat bunga tetap ("**Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I**"). Nominal Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I ini adalah sebesar Rp700,0 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 9 September 2020.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I telah digunakan seluruhnya untuk melunasi sebagian utang pokok Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2017.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri, sebagai berikut :

- i. Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp231,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,30% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
- ii. Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp469,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% per tahun. Jangka waktu obligasi seri B adalah 3 (tiga) tahun.

Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Desember 2020, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 18 September 2021 untuk obligasi seri A dan 8 September 2023 untuk obligasi seri B.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2020 No. 15 tanggal 5 Juni 2020, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2020 No. 129 tanggal 27 Agustus 2020, yang keduanya dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama



Infrastructure Tahap I Tahun 2020 No. 73 tanggal 12 Juli 2022, yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Pada tanggal 12 Juli 2022, RUPO telah menyetujui dan memutuskan penggantian wali amanat bagi Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I dari semula BRI menjadi Bank BTN.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Perseroan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara Total Pinjaman Konsolidasian Proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25x. Per 31 Desember 2022, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Pada tanggal 7 November 2022, Fitch telah memberikan peringkat AA+<sub>(idn)</sub> (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I ini.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I seri A ini telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 18 September 2021.

#### Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II

Pada tanggal 2 Desember 2020, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2020 dengan tingkat bunga tetap ("**Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II**"). Nominal Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II ini adalah sebesar Rp750,0 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 3 Desember 2020.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan Perusahaan Anak.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri, sebagai berikut :

- i. Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp295,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
- ii. Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp455,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun. Jangka waktu obligasi seri B adalah 3 (tiga) tahun.

Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 2 Maret 2021, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 12 Desember 2021 untuk obligasi seri A dan 2 Desember 2023 untuk obligasi seri B.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2020 No. 76 tanggal 13 November 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2020 No. 115 tanggal 24 November 2020, keduanya dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana, diubah terakhir kali dengan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2020 No. 75 tanggal 12 Juli 2022, yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Pada tanggal 12 Juli 2022, RUPO telah menyetujui dan memutuskan penggantian wali amanat bagi Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II dari semula BRI menjadi Bank BTN.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran,



dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Perseroan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara Total Pinjaman Konsolidasian Proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25x. Per 31 Desember 2022, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Pada tanggal 7 November 2022, Fitch telah memberikan peringkat AA+<sub>(idn)</sub> (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II ini.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II seri A telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 12 Desember 2021.

#### Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III

Pada tanggal 17 Februari 2021, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021 dengan tingkat bunga tetap ("**Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III**"). Nominal Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III ini adalah sebesar Rp2.915,0 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 18 Februari 2021.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan Perusahaan Anak.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri, sebagai berikut :

- i. Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp1.898,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
- ii. Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp1.017,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun. Jangka waktu obligasi seri B adalah 3 (tiga) tahun.

Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 17 Mei 2021, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 27 Februari 2022 untuk obligasi seri A dan tanggal 17 Februari 2024 untuk obligasi seri B.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021 No. 114 tanggal 28 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021 No. 77 tanggal 12 Juli 2022, yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Pada tanggal 12 Juli 2022, RUPO telah menyetujui dan memutuskan penggantian wali amanat bagi Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III dari semula BRI menjadi Bank BTN.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Perseroan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara Total Pinjaman Konsolidasian Proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25x. Per 31 Desember 2022, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Pada tanggal 7 November 2022, Fitch telah memberikan peringkat AA+<sub>(idn)</sub> (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III ini.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Seri A ini telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 27 Februari 2022.



### Obligasi Berkelanjutan V Tahap III

Pada tanggal 2 Maret 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2022 ("**Obligasi Berkelanjutan V Tahap III**"). Nominal Obligasi Berkelanjutan V Tahap III ini adalah sebesar Rp2.200,0 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 4 Maret 2022.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III telah digunakan seluruhnya untuk melunasi sebagian kewajiban keuangan Perusahaan Anak, terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$275.000.000 Facility Agreement*.

Obligasi Berkelanjutan V Tahap III ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri sebagai berikut :

- i. Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp1.700,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 3,75% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
- ii. Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp500,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,90% per tahun. Jangka waktu obligasi seri B adalah 3 (tiga) tahun.

Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 2 Juni 2022, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 12 Maret 2023 untuk obligasi seri A dan tanggal 2 Maret 2025 untuk obligasi seri B.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2022 No. 71 tanggal 14 Februari 2022 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2022 No. 92 tanggal 13 Juli 2022, yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Pada tanggal 13 Juli 2022, RUPO telah menyetujui dan memutuskan penggantian wali amanat bagi Obligasi Berkelanjutan V Tahap III dari semula BRI menjadi Bank BTN.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Per 31 Desember 2022, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Pada tanggal 7 November 2022, Fitch telah memberikan peringkat AA+(idn) (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan V Tahap III ini.

Obligasi Berkelanjutan V Tahap III seri A telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 12 Maret 2023.

### Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV

Pada tanggal 11 Agustus 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2022 ("**Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV**"). Nominal Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV ini adalah sebesar Rp2.200,0 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 12 Agustus 2022.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV telah digunakan seluruhnya untuk melunasi sebagian kewajiban keuangan Perusahaan Anak.

Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri sebagai berikut :

- i. Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp1.478,6 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,10% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.



- ii. Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp721,4 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,35% per tahun. Jangka waktu obligasi seri B adalah 3 (tiga) tahun.

Bunga obligasi dibayarkan setiap kuartal, dimana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 11 November 2022, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 21 Agustus 2023 untuk obligasi seri A dan tanggal 11 Agustus 2025 untuk obligasi seri B.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2022 No. 137 tanggal 22 Juli 2022, yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.KN., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Bertindak sebagai wali Amanat adalah Bank BTN.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Per 31 Desember 2022, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwalianamanatan tersebut.

Pada tanggal 7 November 2022, Fitch telah memberikan peringkat AA+(idn) (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV ini.

#### Obligasi Berkelanjutan V Tahap V

Pada tanggal 21 Oktober 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2022 ("**Obligasi Berkelanjutan V Tahap V**"). Nominal Obligasi Berkelanjutan V Tahap V ini adalah sebesar Rp1.000,0 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 24 Oktober 2022.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap V telah digunakan seluruhnya untuk melunasi sebagian kewajiban keuangan Perusahaan Anak.

Bunga obligasi dibayarkan setiap kuartal, dimana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 21 Januari 2023, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 31 Oktober 2023.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap V ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2022 No. 23 tanggal 5 Oktober 2022, yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.KN., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Bertindak sebagai wali Amanat adalah Bank BTN.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap V ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Per 31 Desember 2022, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwalianamanatan tersebut.

Pada tanggal 5 Oktober 2022, Fitch telah memberikan peringkat AA+(idn) (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan V Tahap V ini.

Pada 31 Desember 2022, beban bunga masih harus dibayar untuk surat utang adalah sebesar Rp382,8 miliar dan disajikan sebagai bagian dari akun "Beban Masih Harus Dibayar" pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Beban bunga disajikan sebagai bagian dari akun "Beban Keuangan" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.



## Pinjaman Jangka Panjang

Saldo pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.160,4 miliar, yang terdiri dari pinjaman sindikasi dan pinjaman non-sindikasi, dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<u>Jumlah</u>
<b>Pinjaman sindikasi</b>	
a. <i>US\$375.000.000 Facility Agreement</i> (saldo pada 31 Desember 2022 sebesar US\$95,0 juta)	1.494.445
b. <i>US\$275.000.000 Facility Agreement</i> (saldo pada 31 Desember 2022 sebesar US\$173,6 juta)	2.730.902
<b>Pinjaman non-sindikasi</b>	
a. PT Bank UOB Indonesia	183.900
b. PT Bank QNB Indonesia	72.708
Jumlah pinjaman	<u>4.481.955</u>
Dikurangi : Biaya pinjaman	<u>(115.121)</u>
Jumlah pinjaman - bersih	<u>4.366.834</u>
Saldo yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(206.438)</u>
<b>Saldo yang jatuh tempo lebih dari satu tahun</b>	<u><b>4.160.396</b></u>

### Pinjaman Sindikasi

#### a. *US\$375.000.000 Facility Agreement*

Pada tanggal 28 Juni 2019, Perusahaan Anak tertentu telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman *revolving* ("**US\$375.000.000 Facility Agreement**") sebesar US\$375 juta untuk melunasi Fasilitas A dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*.

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan, dan Perusahaan Anak yang menjadi peserta *US\$375.000.000 Facility Agreement* ini memberikan jaminan bersama (*cross guarantee*) atas *US\$375.000.000 Facility Agreement*.

Dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* tersebut, Perusahaan Anak diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi, diantaranya :

- i. Rasio *net senior debt* dari Perusahaan Anak/EBITDA yang disesuaikan dan disetahunkan maksimum sebesar 5x;
- ii. *Top tier revenue ratio* minimum sebesar 50,00%.

Kreditur yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah Australia and New Zealand Banking Group Limited, CIMB Bank Berhad, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, DBS Bank, Ltd., Mizuho Bank, Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank DBS Indonesia, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank OCBC NISP Tbk., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation dan United Overseas Bank Limited.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 1,85% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 1,75% per tahun untuk kreditur luar negeri. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Januari 2025. Perseroan telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh kreditur atas seluruh fasilitas pinjaman *revolving* yang diberikan.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar US\$95,0 juta.

#### b. *US\$275.000.000 Facility Agreement*

Pada tanggal 20 Januari 2021, Perusahaan Anak tertentu telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman *revolving* ("**US\$275.000.000 Facility Agreement**") sebesar US\$275 juta untuk menyediakan tambahan dana untuk modal kerja.





Pinjaman ini tidak memiliki jaminan, dan Perusahaan Anak yang menjadi peserta *US\$275.000.000 Facility Agreement* ini memberikan jaminan bersama (*cross guarantee*) atas *US\$275.000.000 Facility Agreement*.

Dalam *US\$275.000.000 Facility Agreement* tersebut, Perusahaan Anak diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi, diantaranya :

- i. Rasio *net senior debt* dari Perusahaan Anak/EBITDA yang disesuaikan dan disetahunkan maksimum sebesar 5x;
- ii. *Top tier revenue ratio* minimum sebesar 50,00%.

Kreditur yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah Credit Agricole Corporate and Investment Bank, DBS Bank, Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch, United Overseas Bank Limited, PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank Mizuho Indonesia, dan PT Bank OCBC NISP Tbk.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 1,85% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 1,75% per tahun untuk kreditur luar negeri. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Juni 2026. Perseroan telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh kreditur atas seluruh fasilitas pinjaman *revolving* yang diberikan.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar US\$173,6 juta.

#### Pinjaman Non-Sindikasi

##### a. PT Bank DBS Indonesia (“**DBSI**”)

Pada tanggal 29 Desember 2022, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 398/PFP-DBSI/XII/1-2/2022 (“**Fasilitas Perjanjian Revolving**”) yang bersifat tidak terikat (*uncommitted*) hingga jumlah pokok sebesar Rp500,0 miliar atau setaranya dalam mata uang Dolar Amerika Serikat untuk kebutuhan pendanaan umum Perseroan dan Perusahaan Anak termasuk namun tidak terbatas pada pelunasan utang yang ada, yaitu : (i) pinjaman jangka panjang; dan (ii) surat utang.

Tingkat suku bunga sebagaimana dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh DBSI dengan maksimum periode bunga 6 (enam) bulan dan wajib dibayarkan pada setiap akhir jangka waktu bunga yang bersangkutan yang akan diberitahukan oleh DBSI kepada Perseroan sebelum Perseroan menggunakan Fasilitas Pinjaman *Revolving*.

Sesuai pembatasan-pembatasan yang mengatur tentang Fasilitas Pinjaman *Revolving* ini, Perseroan memiliki keterbatasan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain, sebagai berikut :

- i. Menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aset Perseroan termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh dimasa yang akan datang, kecuali antara lain penjaminan atau pembebanan untuk menjamin pembayaran hutang serta penjaminan atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan sebagian atau seluruh porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang baik dalam satu transaksi maupun secara bertahap di masa yang akan datang yang dijamin dengan jenis aset yang sama;
- ii. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali antara lain pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah ada sebelum ditandatanganinya perjanjian ini dan pinjaman atau penjaminan kepada atau untuk kepentingan perusahaan anak atau uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan sehari-hari;
- iii. Mengubah jenis usaha Perseroan;





- iv. Memindahtangankan sebagian besar aset (*major asset*) dalam bentuk atau dengan nama apaun juga dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga;
- v. Mangajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan pembayaran utang.

Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 29 Desember 2023.

Tidak ada penarikan pada tahun 2022 sehingga saldo pada tanggal 31 Desember 2022 adalah nihil.

b. *PT Bank UOB Indonesia ("UOB")*

Pada tanggal 13 Juli 2022, GHON, Perusahaan Anak, telah menandatangani perubahan perjanjian kredit fasilitas *revolving* sehingga fasilitas pinjaman menjadi :

- i. Menaikkan Fasilitas *Revolving* Seri I dari Rp100,0 miliar menjadi Rp300,0 miliar;
- ii. Menghapus atau membatalkan Fasilitas *Revolving* Seri II.

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan tetapi GHON, Perusahaan Anak, harus menyerahkan perjanjian pemegang saham yang ditandatangani oleh Perseroan dan pemegang saham lainnya.

Dalam fasilitas pinjaman ini, GHON, Perusahaan Anak, diharuskan memenuhi beberapa kondisi, diantaranya :

- i. Rasio *debt to EBITDA* maksimum sebesar 3x; dan
- ii. Rasio *top tier revenue* minimum sebesar 50,00%.

Fasilitas pinjaman ini terdiri dari 2 (dua) fasilitas, yaitu :

- i. Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri I sebesar Rp300,0 miliar

Fasilitas ini bersifat *uncommitted*, dan dikenakan marjin bunga sebesar 1,20% per tahun di atas JIBOR untuk rasio *debt to EBITDA* kurang dari 3x dan 1,70% per tahun di atas JIBOR untuk rasio *debt to EBITDA* lebih atau sama dengan 3x.

Pada tanggal 31 Desember 2022, saldo Fasilitas *Revolving I* sebesar Rp183,9 miliar.

Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Maret 2023.

- ii. Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri II sebesar nihil

Fasilitas Fasilitas ini bersifat *committed* dan dikenakan marjin bunga sebesar 2,50% per tahun di atas JIBOR untuk rasio *debt to EBITDA* kurang dari 3x dan 3,00% per tahun diatas JIBOR untuk rasio *debt to EBITDA* lebih atau sama dengan 3x.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Fasilitas Pinjaman *Revolving II* telah dihapus atau dibatalkan.

GHON, Perusahaan Anak, telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh kreditur atas seluruh fasilitas pinjaman *revolving* yang diberikan.

Pada tanggal 9 November 2020, PKP, Perusahaan Anak, telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman. Perjanjian ini telah mengalami 2 (dua) kali perubahan sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan II Terhadap Perjanjian Kredit tanggal 17 November 2022 yang bersifat *uncommitted*, sebesar Rp 100,0 miliar untuk menyediakan tambahan dana modal kerja.

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan tetapi PKP, Perusahaan Anak, harus menyerahkan perjanjian pemegang saham yang ditandatangani oleh perusahaan dan pemegang saham lainnya dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan.



Dalam fasilitas pinjaman ini, PKP, Perusahaan Anak diharuskan memenuhi beberapa kondisi, diantaranya :

- i. Rasio *debt to EBITDA* yang disesuaikan dan dianualisasi maksimum sebesar 3,75x;
- ii. Rasio *top tier revenue* minimum sebesar 50,0%.

Fasilitas ini bersifat *uncommitted* dan dikenakan marjin bunga sebesar 2% per tahun di atas JIBOR. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2023.

Tidak ada penarikan pada tahun 2022 sehingga saldo pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar nihil.

c. *PT Bank QNB Indonesia (“QNB”)*

Fasilitas ini terdiri dari 2 (dua) fasilitas yaitu :

- i. Fasilitas *Term Loan 1* sebesar Rp50,0 miliar

Pada tanggal 22 Desember 2020, GHON, Perusahaan Anak telah menandatangani perjanjian Fasilitas *Term Loan 1* sebesar Rp50,0 miliar.

Fasilitas ini jatuh tempo pada Desember 2025. Fasilitas ini bersifat *committed*, dan dikenakan marjin bunga sebesar 2,75% di atas JIBOR untuk *Debt Service Coverage Ratio* (“**rasio DSCR**”) minimum sebesar 2x dan rasio *Debt/Ekuitas* maksimum sebesar 2x. Pinjaman ini tidak memiliki jaminan.

Pada tanggal 31 Desember 2022, saldo Fasilitas *Term Loan 1* sebesar Rp30,0 miliar.

- ii. Fasilitas *Term Loan 2* sebesar Rp50,0 miliar

Pada tanggal 31 Mei 2022, GHON, Perusahaan Anak, telah menandatangani perjanjian Fasilitas *Term Loan 2* sebesar Rp50,0 miliar.

Fasilitas ini jatuh tempo pada Mei 2026. Fasilitas ini bersifat *committed*, dan dikenakan marjin bunga sebesar 1,20% di atas JIBOR untuk rasio DSCR minimum sebesar 2x dan rasio *Debt/Ekuitas* maksimum sebesar 2x. Pinjaman ini tidak memiliki jaminan.

Pada tanggal 31 Desember 2022, saldo Fasilitas *Term Loan 2* sebesar Rp42,7 miliar.

GHON, Perusahaan Anak, telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh kreditur atas seluruh pinjaman berjangka yang diberikan.

Rincian fasilitas pinjaman jangka panjang - pihak ketiga yang belum dicairkan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

	Jumlah fasilitas	Fasilitas yang telah dicairkan	Fasilitas yang belum dicairkan
<b>Dolar AS - dalam nilai penuh</b>			
<b>Pinjaman sindikasi</b>			
<i>US\$375.000.000 Facility Agreement</i>	375.000.000	95.000.000	280.000.000
<i>US\$275.000.000 Facility Agreement</i>	275.000.000	173.600.000	101.400.000
<b>Jumlah</b>	<b>650.000.000</b>	<b>268.600.000</b>	<b>381.400.000</b>
<b>Rupiah - dalam jutaan Rupiah</b>			
<b>Pinjaman non-sindikasi</b>			
PT Bank UOB Indonesia			
<i>Uncommitted</i>	400.000	183.900	216.100
PT Bank QNB Indonesia Tbk.			
<i>Committed</i>	100.000	100.000	-
PT Bank DBS Indonesia			
<i>Uncommitted</i>	500.000	-	500.000
<b>Jumlah</b>	<b>1.000.000</b>	<b>283.900</b>	<b>716.100</b>



Jika bagian pinjaman dalam valuta asing yang telah dilindungi nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, maka saldo pinjaman jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2022 setelah dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi adalah sebagai berikut :

	(dalam jutaan Rupiah)	
	Kurs laporan posisi keuangan	Kurs lindung nilai
Pinjaman sindikasi	4.225.347	4.148.059
Pinjaman non-sindikasi	256.608	256.608
Dikurangi :		
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(115.121)	(115.121)
<b>Jumlah - Bersih</b>	<b>4.366.834</b>	<b>4.289.546</b>

### Cadangan imbalan pasca kerja

Saldo cadangan imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp12,3 miliar. Perseroan dan Perusahaan Anak menyiapkan pencadangan imbalan untuk karyawannya sesuai dengan UU Cipta Kerja. Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan pendanaan untuk program ini.

Perhitungan cadangan imbalan pasca-kerja pada 31 Desember 2022 adalah berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Riana & Rekan, aktuaris independen, sesuai laporannya tanggal 18 Januari 2023.

Asumsi signifikan yang digunakan :

Tingkat diskonto per tahun	:	7,20%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	:	9,07%
Tingkat kematian	:	100% TMI4
Tingkat cacat	:	5% TMI4
Tingkat pengunduran diri	:	8,00% per tahun sampai dengan usia 30 tahun, kemudian menurun secara linear hingga 0% pada usia pensiun normal
Usia pensiun normal	:	60 tahun untuk <i>Grade VII</i> 55 tahun untuk <i>Grade I-VI</i>
Metode	:	<i>Projected Unit Credit</i>

Rekonsiliasi untuk mutase cadangan imbalan pasca-kerja adalah sebagai berikut :

	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
<b>Saldo awal</b>	<b>12.948</b>
Biaya jasa kini	16.034
Biaya jasa lalu	1.747
Beban bunga bersih	3.669
Penyesuaian metode atribusi	(7.816)
Pengukuran kembali atas imbalan pasti	(1.564)
Diakui pada laba rugi	12.070
Pengukuran kembali atas imbal hasil atas aset program	5.393
Perubahan dampak batas aset	(2.313)
Keuntungan (kerugian) aktuarial	(3.728)
Diakui pada penghasilan komprehensif lain	(648)
luran perusahaan ke aset program	(8.836)
Pembayaran imbalan (di luar aset program)	(4.008)
Penyesuaian	790
<b>Saldo akhir</b>	<b>12.316</b>



### **Program imbalan pasca-kerja**

Perseroan dan Perusahaan Anak tertentu juga melakukan pendanaan untuk program ini. Dana tersebut dikelola dalam kontrak asuransi dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2022, pembayaran berikut merupakan kontribusi yang diharapkan atas nilai kini dari kewajiban imbalan di tahun-tahun mendatang :

(dalam jutaan Rupiah)

	<b>Jumlah</b>
Kurang dari 1 tahun	17.139
Antara tahun ke-1 sampai tahun ke-2	3.940
Antara tahun ke-2 sampai tahun ke-5	32.977
Antara tahun ke-5 sampai tahun ke-10	96.809
Setelah tahun ke-10	418.159

### **Analisis sensitivitas pada asumsi-asumsi aktuarial utama**

(dalam jutaan Rupiah)

	<b>Saldo akhir <i>Present Value of Defined Benefit Obligation</i> (PVBDO)</b>		
	<b>Perubahan</b>	<b>Kenaikan</b>	<b>Penurunan</b>
Tingkat diskonto	(+/- 1%)	113.676	132.789
Tingkat kenaikan gaji	(+/- 1%)	132.928	113.379

### **Program imbalan jangka panjang lainnya**

Perseroan dan Perusahaan Anak tertentu memberikan imbalan jangka panjang lainnya dalam bentuk cuti besar selama 22 hari kerja dan tunjangan cuti besar sejumlah satu bulan gaji pokok kepada karyawan staf permanen yang mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan kelipatannya.

## **3. KOMITMEN DAN KONTINJENSI**

### **3.1. KOMITMEN**

#### **Perjanjian Sewa Menara *Base Transceiver Station* (BTS) dan Sistem Telekomunikasi Dalam Gedung**

Perusahaan Anak (TB, TI, GHON, PKP, UT, BT, Balikom, PMS, SMI, SKP, MSI, TK, dan Triaka) memiliki perjanjian sewa dengan para operator sebagai berikut :

- a. PT Hutchison 3 Indonesia (“**Hutch**”)
 

Pada berbagai tanggal antara tahun 2007 sampai dengan 31 Desember 2022, Perusahaan Anak dan Hutch menandatangani Perjanjian Sewa Induk (“**MLA**”), mengenai sewa pemanfaatan lokasi yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan komunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 12 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- b. XL Axiata
 

Pada berbagai tanggal antara tahun 2007 sampai dengan 31 Desember 2022, Perusahaan Anak dan XL Axiata menandatangani MLA, sebagaimana telah diubah beberapa kali dalam bentuk amendemen, mengenai sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun, dan dapat diperpanjang dengan menginformasikan secara tertulis kepada Perusahaan Anak. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal sertifikat siap instalasi (“**RFI**”) di masing-masing lokasi.
- c. PT Indosat Tbk. (“**IOH**”)
 

Pada berbagai tanggal antara tahun 2008 sampai dengan 31 Desember 2022, Perusahaan Anak dan Indosat telah menandatangani beberapa MLA, mengenai sewa pemanfaatan lokasi yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun, dan dapat



diperpanjang untuk jangka waktu 10 tahun, kecuali apabila Indosat tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada Perusahaan Anak. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal sertifikat RFI di masing-masing lokasi.

d. PT Telekomunikasi Selular (“**Telkomsel**”)

Pada berbagai tanggal di tahun 2004 sampai dengan 31 Desember 2022, Perusahaan Anak telah menandatangani sejumlah MLA dengan Telkomsel mengenai pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian adalah 10 tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Penggunaan *Site* (“**BAPS**”) untuk masing-masing lokasi menara.

e. PT Smartfren Telecom Tbk. (“**Smartfren**”)

Pada berbagai tanggal di tahun 2005 sampai dengan 31 Desember 2022, Perusahaan Anak dan Smartfren, telah menandatangani beberapa MLA, sebagaimana telah beberapa kali diubah dalam bentuk amendemen, mengenai pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu awal sewa adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dari masing-masing pihak.

Jumlah estimasi pembayaran sewa minimum di masa depan untuk perjanjian-perjanjian sewa induk di atas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<b>Jumlah</b>
Kurang dari satu tahun	5.575.230
Dari satu tahun sampai dengan lima tahun	16.394.733
Lebih dari lima tahun	9.252.573
<b>Jumlah</b>	<b>31.222.536</b>

### 3.2 KONTINJENSI

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, salah satu Perusahaan Anak sedang menghadapi beberapa gugatan perkara hukum terkait pemilikan lahan, sewa lahan dan izin warga di beberapa lokasi menara telekomunikasi milik Perusahaan Anak tersebut.

Setelah berkonsultasi dengan penasihat hukum yang menjadi kuasa hukum Perusahaan Anak dalam menangani perkara-perkara tersebut, manajemen berkeyakinan akan dapat memenangkan seluruh perkara tersebut. Namun demikian, jika Perusahaan Anak tidak memenangkan perkara tersebut, kompensasi tersebut akan dibayarkan oleh Perusahaan Anak, kompensasi yang harus dibayarkan seharusnya tidak melebihi Rp80 juta. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perkara-perkara tersebut masih dalam proses persidangan tingkat pertama. Manajemen berpendapat, perkara hukum tersebut tidak berdampak material dan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kedudukan, peranan dan kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, sehingga manajemen berpendapat tidak perlu membentuk provisi atas perkara-perkara tersebut.

## 4. PERUBAHAN LIABILITAS SETELAH 31 DESEMBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN

### a. Pencairan pinjaman

- *Fasilitas pinjaman revolving UOB*

Pada berbagai tanggal di bulan Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023, GHON, Perusahaan Anak telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dari UOB sebesar Rp884,9 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving dalam US\$375.000.000 Facility Agreement*

Pada tanggal 17 Januari 2023, Perusahaan Anak telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* sebesar US\$48,5 juta.



- *Fasilitas pinjaman revolving dalam US\$275.000.000 Facility Agreement*

Pada tanggal 5 Januari, 6 Maret, dan 15 Maret 2023, Perusahaan Anak telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$275.000.000 Facility Agreement* masing-masing sebesar US\$15,0 juta, US\$107,8 juta, dan US\$63,8 juta.

- *Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI*

Pada tanggal 17 Februari 2023, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI dengan tingkat bunga tetap ("**Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI**") sebesar 6,125% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI ini adalah sebesar Rp2.486,0 miliar. Obligasi ini dicatatkan di BEI pada tanggal 20 Februari 2023.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan Perusahaan Anak.

Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 17 Mei 2023 dan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 27 Februari 2024.

- *Fasilitas pinjaman revolving DBSI*

Pada tanggal 19 Januari 2023, 24 Januari 2023, 21 Maret 2023, 18 April 2023, 27 April 2023, dan 19 Juni 2023, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dari DBSI masing-masing sebesar Rp200,0 miliar setara dengan US\$13,2 juta, Rp250,0 miliar setara dengan US\$16,8 juta, Rp250,0 miliar, Rp200,0 miliar, Rp300,0 miliar, dan Rp80,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving dalam US\$325.000.000 Facility Agreement*

Pada tanggal 3 Mei 2023, Perusahaan Anak telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$325.000.000 Facility Agreement* sebesar US\$165,1 juta.

- *Fasilitas pinjaman revolving PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("BNI")*

Pada tanggal 26 Mei 2023, 16 Juni 2023, dan 19 Juni 2023, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dari BNI masing-masing sebesar Rp200,0 miliar, Rp350,0 miliar, dan Rp180,0 miliar.

## **b. Pembayaran pinjaman**

- *Fasilitas pinjaman revolving UOB*

Pada berbagai tanggal di bulan Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023, GHON, Perusahaan Anak, telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dari UOB sebesar Rp834,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving QNB*

Pada tanggal 18 Januari, 27 Januari, 18 Februari, 28 Februari, 17 Maret, 28 Maret, 18 April, 28 April, 17 Mei 2023, 26 Mei 2023, dan 16 Juni 2023, GHON, Perusahaan Anak, telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dari QNB sebesar Rp10,4 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving dalam US\$375.000.000 Facility Agreement*

Pada tanggal 28 Februari dan 7 Maret 2023, Perusahaan Anak telah melunasi seluruh fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* sebesar masing-masing US\$128,0 juta dan US\$15,5 juta.



- *Fasilitas pinjaman revolving dalam US\$275.000.000 Facility Agreement*

Pada tanggal 30 Januari, 6 Februari, 28 Februari, 7 Maret, 27 Maret, dan 3 Mei 2023, Perusahaan Anak telah melunasi seluruh fasilitas pinjaman *US\$275.000.000 Facility Agreement* masing-masing sebesar US\$40,0 juta, US\$16,7 juta, US\$88,0 juta, US\$43,9 juta, US\$9,0 juta dan US\$162,6 juta.

- *Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Seri A*

Pada tanggal 12 Maret 2023, Perseroan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan V Tahap III seri A dengan nilai nominal Rp1.700,0 miliar.

- *Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Seri B*

Pada tanggal 24 Maret 2023, Perseroan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV seri B dengan nilai nominal Rp867,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving DBSI*

Pada berbagai tanggal 18 April 2023, 27 April 2023, 29 Mei 2023, dan 19 Juni 2023 Perseroan telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dari DBSI masing-masing sebesar Rp200,0 miliar setara dengan US\$13,2 juta, Rp250,0 miliar setara dengan US\$16,8 juta, Rp200,0 miliar, dan Rp450,0 miliar.

## 5. UTANG YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM 3 (TIGA) BULAN

Utang yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Prospektus ini adalah sebesar Rp2.414,2 miliar, yang terdiri dari fasilitas pinjaman *revolving* dari DBSI sebesar Rp180,0 miliar, Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV seri A sebesar Rp1.478,6 miliar, fasilitas pinjaman *revolving* dari BNI sebesar Rp650,0 miliar, fasilitas pinjaman *revolving* dari UOB sebesar Rp100,0 miliar dan fasilitas pinjaman *revolving* dari QNB sebesar Rp5,6 miliar.

**SELURUH KEWAJIBAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.**

**TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF, SELAIN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.**

**DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.**

**PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.**





**DARI TANGGAL 31 DESEMBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.**



## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan pada tabel di bawah ini diambil dari :

- (i) laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00531/2.1068/AU.1/06/0117-1/1/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 yang ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA (Registrasi Akuntan Publik No. 0117) dengan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut; dan
- (ii) laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00532/2.1068/AU.1/06/0007-3/1/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Sutomo, S.E., Ak., MM, CPA, CA, SAS (Registrasi Akuntan Publik No. 0007) dengan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik. Kecuali disebutkan lain, maka seluruh kata “Perseroan” dalam bab ini berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. dan Perusahaan Anak.

### 1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2022	2021
<b>ASET</b>		
<b>Aset Lancar</b>		
Kas dan setara kas	966.386	629.125
Piutang usaha - pihak ketiga	270.041	538.715
Piutang lain-lain	38.993	75.506
Pendapatan yang masih harus diterima	721.057	500.283
Persediaan	621.652	226.408
Uang muka dan beban dibayar di muka	108.365	81.336
Pajak dibayar dimuka	839.310	969.880
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>3.565.804</b>	<b>3.021.253</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>		
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	34.427.639	33.637.904
Properti investasi - nilai wajar	465.478	447.045
Aset hak guna - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	3.667.843	3.463.007
Uang jaminan	1.023	1.605
Aset keuangan derivatif	563.351	900.363
Goodwill	390.368	381.189
Aset tidak lancar lainnya	58.462	18.069
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>39.574.164</b>	<b>38.849.182</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>43.139.968</b>	<b>41.870.435</b>



(dalam jutaan Rupiah)

	<b>31 Desember</b>	
	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>		
Utang usaha - pihak ketiga	255.607	37.435
Utang lain-lain	23.442	12.227
Utang pajak	123.066	169.374
Pendapatan yang diterima di muka	1.103.585	1.316.692
Beban masih harus dibayar	974.904	1.107.497
Liabilitas sewa - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	126.567	174.858
Surat utang bagian jangka pendek	5.914.573	5.465.457
Pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		
Pihak ketiga	206.438	148.885
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>8.728.182</b>	<b>8.432.425</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>		
Liabilitas sewa - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	533.136	503.822
Provisi jangka panjang	107.400	-
Surat utang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	18.678.155	17.676.845
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		
Pihak ketiga	4.160.396	5.455.157
Cadangan imbalan pasca-kerja	12.316	12.948
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>23.491.403</b>	<b>23.648.772</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>32.219.585</b>	<b>32.081.197</b>
<b>EKUITAS</b>		
Modal saham ditempatkan dan disetor penuh	453.140	453.140
Saham treasuri	(766.238)	(1.028.268)
Tambahan modal disetor - bersih	1.594.466	(641.456)
Penghasilan komprehensif lain	4.465.195	7.062.417
Saldo laba		
Cadangan wajib	63.100	62.600
Belum ditentukan penggunaannya	4.519.772	3.364.348
<b>Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>	<b>10.329.435</b>	<b>9.272.781</b>
<b>Kepentingan non-pengendali</b>	<b>590.948</b>	<b>516.457</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>10.920.383</b>	<b>9.789.238</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>43.139.968</b>	<b>41.870.435</b>

## 2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	<b>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember</b>	
	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>PENDAPATAN</b>	<b>6.524.369</b>	<b>6.179.584</b>
Beban pokok pendapatan	1.783.325	1.472.780
<b>LABA KOTOR</b>	<b>4.741.044</b>	<b>4.706.804</b>
Beban usaha	458.573	400.889
<b>LABA DARI OPERASI</b>	<b>4.282.471</b>	<b>4.305.915</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>		
Kenaikan nilai wajar atas properti investasi	15.656	57.638
Pendapatan bunga	13.785	12.156
Laba selisih kurs - Bersih	1.779	1.382
Beban kerugian kredit ekspektasian - aset keuangan	(24.997)	(2.271)
Beban keuangan - Pinjaman dan surat utang	(1.699.072)	(1.925.209)
Beban keuangan - Lainnya	(129.780)	(210.836)
Lainnya - Bersih	(54.643)	(18.304)
<b>Beban lain-lain - Bersih</b>	<b>(1.877.272)</b>	<b>(2.085.444)</b>



(dalam jutaan Rupiah)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

	2022	2021
<b>LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>2.405.199</b>	<b>2.220.471</b>
Beban pajak final	(493.433)	(284.507)
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>1.911.766</b>	<b>1.935.964</b>
Kini	(222.325)	(285.346)
Tangguhan	-	(49.265)
<b>Beban pajak penghasilan - Bersih</b>	<b>(222.325)</b>	<b>(334.611)</b>
<b>LABA BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>1.689.441</b>	<b>1.601.353</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>		
Defisit revaluasi	(1.407.805)	(151.875)
Keuntungan (kerugian) aktuarial	(722)	(19.662)
<b>Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>		
Selisih translasi mata uang asing	72.043	(86)
Perubahan lindung nilai arus kas	(904.151)	(67.365)
<b>JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>(551.194)</b>	<b>1.362.365</b>
<b>Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada :</b>		
Pemilik entitas induk	1.637.579	1.548.975
Kepentingan non-pengendali	51.862	52.378
<b>Jumlah</b>	<b>1.689.441</b>	<b>1.601.353</b>
<b>Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada :</b>		
Pemilik entitas induk	(625.646)	1.311.014
Kepentingan non-pengendali	74.452	51.351
<b>Jumlah</b>	<b>(551.194)</b>	<b>1.362.365</b>
Laba bersih per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk (nilai penuh)	73,44	74,25

### 3. DATA KEUANGAN LAINNYA

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember

	2022	2021
EBITDA <sup>(1)</sup>	5.661.915	5.428.813
Belanja modal	3.903.082	7.176.244
Pinjaman bersih <sup>(2)</sup>	28.258.429	28.418.165

Catatan :

- (1) EBITDA = Laba dari operasi + Amortisasi perizinan + Penyusutan menara dan menara bergerak + Penyusutan aset hak guna + Penyusutan aset tetap.
- (2) Pinjaman bersih = Pinjaman - Kas dan setara kas.

Pada tanggal 23 Mei 2022, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan yang hasilnya, antara lain menetapkan Rp815.652 juta atau 52,7% dari laba bersih tahun 2021, setara dengan Rp36 per saham, sebagai dividen tunai tahun buku 2021. Perseroan telah membayar dividen tersebut pada tanggal 22 Juni 2022.

### 4. RASIO-RASIO PENTING

31 Desember

	2022	2021
<b>RASIO PERTUMBUHAN (%)</b>		
Pendapatan	5,6%	16,0%
Laba kotor	0,7%	11,2%
Laba dari operasi	(0,5%)	12,8%
Laba bersih tahun berjalan	5,5%	50,1%



	<b>31 Desember</b>	
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	(140,5%)	(69,0%)
EBITDA	4,3%	17,6%
Jumlah aset	3,0%	14,6%
Jumlah liabilitas	0,4%	17,9%
Jumlah ekuitas	11,6%	5,2%
<b>RASIO USAHA (%)</b>		
Laba kotor / Pendapatan	72,7%	76,2%
Laba dari operasi / Pendapatan	65,6%	69,7%
Laba bersih tahun berjalan / Pendapatan	25,9%	25,9%
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan / Pendapatan	(8,4%)	22,0%
EBITDA / Pendapatan	86,8%	87,9%
Laba bersih tahun berjalan / Jumlah ekuitas	15,5%	16,4%
Laba bersih tahun berjalan / Jumlah aset	3,9%	3,8%
<b>RASIO KEUANGAN (x)</b>		
Aset lancar / Liabilitas jangka pendek	0,4x	0,4x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	3,0x	3,3x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,7x	0,8x
<i>Interest coverage ratio</i> <sup>(1)</sup>	3,3x	2,8x
<i>Debt coverage service ratio</i> <sup>(2)</sup>	0,7x	0,7x
Catatan :		
(1) dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan beban keuangan - bunga.		
(2) dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan jumlah beban keuangan - bunga, surat utang bagian jangka pendek, dan pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun.		

## 5. RASIO-RASIO DALAM PERJANJIAN PINJAMAN

	<b>Persyaratan Keuangan</b>	<b>31 Desember 2022</b>
Surat Utang		
Rasio utang terhadap Arus Kas Terannualisasi	maksimum 6,25x	5,0x
Pinjaman Sindikasi		
<i>Net Senior Debt</i> / EBITDA yang disesuaikan dan dianualisasi	maksimum 5,0x	0,6x
<i>Top tier revenue</i>	minimum 50%	85,1%
Pinjaman Non-Sindikasi		
<b><u>GHON</u></b>		
<i>Debt to EBITDA</i> yang disesuaikan dan dianualisasi	maksimum 3,75x	1,7x
<i>Top tier revenue</i>	minimum 50%	89,8%
<i>Debt to Equity</i>	maksimum 2,00x	0,3x
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	minimum 2,00x	7,4x



## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

*Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini. Informasi keuangan yang disajikan berikut bersumber dari laporan keuangan konsolidasian, yang terdiri dari laporan keuangan Perseroan, disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan pada tabel di bawah ini diambil dari :

- (i) laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00531/2.1068/AU.1/06/0117-1/1/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 yang ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA (Registrasi Akuntan Publik No. 0117) dengan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut; dan
- (ii) laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00532/2.1068/AU.1/06/0007-3/1/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Sutomo, S.E., Ak., MM, CPA, CA, SAS (Registrasi Akuntan Publik No. 0007) dengan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (*forward looking statement*) dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan pada Bab VI mengenai Faktor Risiko.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika. Kecuali disebutkan lain, maka seluruh kata “Perseroan” dalam bab ini berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. dan Perusahaan Anak.

### 1. UMUM

Perseroan, didirikan pada tahun 2004, merupakan perusahaan *holding* yang melakukan investasi atau penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada perusahaan-perusahaan, yang bergerak di bidang penyediaan jasa telekomunikasi, menara, jaringan fiber optik, dan pekerjaan telekomunikasi dan investasi, dan saat ini merupakan salah satu perusahaan menara terbesar di Indonesia yang dikenal dengan Grup Tower Bersama. Kegiatan usaha utama Perseroan adalah menyewakan ruangan pada *sites* sebagai tempat pemasangan perangkat telekomunikasi untuk transmisi sinyal berdasarkan skema perjanjian sewa jangka panjang dengan operator telekomunikasi. Perseroan juga menyediakan akses untuk operator telekomunikasi ke jaringan IBS milik Perseroan di gedung-gedung perkantoran dan pusat-pusat perbelanjaan yang terletak pada wilayah perkotaan. Per 31 Desember 2022, Perseroan mengoperasikan sekitar 21.870 *sites* telekomunikasi, yang terdiri dari 21.758 *sites* menara telekomunikasi dan 112 jaringan IBS, dan Perseroan memiliki 40.884 penyewaan pada *sites* telekomunikasi dengan 4 (empat) operator telekomunikasi berbeda. Sekitar 85,1% dan 72,9% dari pendapatan Perseroan masing-masing pada tahun 2022 dan 2021 berasal dari Telkomsel, IOH dan XL Axiata. Perseroan menyewakan *tower space* melalui perjanjian sewa jangka panjang umumnya sampai dengan jangka waktu 10 tahun dan menyewakan akses terhadap IBS milik Perseroan melalui perjanjian sewa jangka panjang umumnya dengan jangka waktu 5 (lima) sampai 8 (delapan) tahun. Per 31 Desember 2022, rata-rata sisa periode perjanjian sewa seluruh penyewaan



Perseroan adalah sekitar 5,6 tahun dan Perseroan memiliki pendapatan kontrak yang akan diterima dari penyewa untuk semua jenis penyewaan sebesar Rp31.222,5 miliar. Pendapatan Perseroan dari penyewaan *tower space*, penyewaan IBS, dan fiber optik masing-masing memberikan kontribusi sebesar 98,5%, 0,6%, dan 0,8% dari pendapatan Perseroan pada tahun 2022.

Perseroan berkeyakinan bahwa industri penyewaan menara di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk terus bertumbuh baik melalui pembangunan menara baru maupun penambahan jumlah kolokasi dari menara telekomunikasi yang ada. Perseroan hanya membangun *sites* telekomunikasi baru dan mengakuisisi portofolio menara telekomunikasi hanya apabila telah memenuhi kriteria investasi Perseroan yang mencakup, antara lain, tingkat pengembalian investasi, potensi kolokasi masa yang akan datang, kemudahan untuk membeli atau menyewa lahan, kemudahan mendapatkan perizinan warga dari masyarakat sekitar dan kualitas kredit calon penyewa. Perseroan memiliki suatu kebijakan hanya akan membangun *sites* telekomunikasi baru ketika Perseroan telah mendapatkan komitmen penyewaan dari pelanggan. Meskipun Perseroan telah membangun *site* menara di hampir seluruh provinsi di Indonesia, sebagian besar *site* menara Perseroan berada di wilayah padat penduduk dengan 82,6% *site* menara di Jawa, Bali dan Sumatra dan 17,4% *site* di wilayah lain di Indonesia per 31 Desember 2022.

Perseroan berupaya secara konsisten untuk terus meningkatkan jumlah kolokasi dari menara telekomunikasi yang ada untuk mendukung peningkatan arus kas dan margin laba operasi. Hal ini terjadi karena biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan kolokasi relatif rendah dibandingkan dengan tambahan pendapatan atas kolokasi tersebut. Perseroan berkeyakinan bahwa operator telekomunikasi Indonesia telah dan akan terus mencari untuk memenuhi kebutuhan peningkatan cakupan dan kapasitas jaringan, sementara di saat yang sama mengendalikan belanja modal mereka dari kegiatan-kegiatan non-inti, seperti dengan pengalihan kegiatan pembangunan *sites* dan penyewaan *tower space* kepada perusahaan penyewaan menara independen. Per 31 Desember 2022, Perseroan memiliki rasio kolokasi 1,87x.

Pendapatan Perseroan pada tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp6.524,4 miliar dan Rp6.179,6 miliar. EBITDA dan margin EBITDA Perseroan untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp5.661,9 miliar atau mencapai 86,8%, dan EBITDA dan margin EBITDA Perseroan untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp5.428,8 miliar atau mencapai 87,9%.

## **2. FAKTOR YANG MEMENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASIONAL PERSEROAN**

Kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan telah dan akan terus dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, termasuk berikut ini :

### ***Kualitas kredit dari pelanggan Perseroan***

Pendapatan Perseroan secara signifikan diperoleh berdasarkan kontrak di muka dengan pelanggan dalam skema jangka panjang (biasanya 10 tahun untuk *sites* menara telekomunikasi). Per 31 Desember 2022, pendapatan kontrak dengan pelanggan Perseroan untuk semua jenis penyewaan adalah sebesar Rp31.222,5 miliar dan rata-rata sisa periode perjanjian penyewaan seluruh *sites* telekomunikasi adalah sekitar 5,6 tahun. Karenanya, Perseroan bergantung pada kualitas kredit dan kondisi keuangan dari para pelanggan Perseroan. Pelanggan utama Perseroan terdiri dari operator-operator telekomunikasi di Indonesia dimana sekitar 85,1% dan 72,9% dari pendapatan Perseroan masing-masing pada tahun 2022 dan 2021 berasal dari Telkomsel, IOH dan XL Axiata (yang masing-masing memiliki peringkat investasi dari setidaknya satu perusahaan pemeringkat kredit). Bilamana pelanggan Perseroan mengalami kesulitan keuangan, hal ini akan menyebabkan keterlambatan atau tidak dapat tertagihnya dalam pembayaran piutang usaha dari pelanggan Perseroan, yang mengharuskan Perseroan untuk melakukan penghapusan atau mencatatkan penurunan nilai dari piutang usaha.

### ***Perubahan dalam jumlah penyewaan dan rasio kolokasi***

*Pembangunan menara build-to-suit.* Perseroan tidak melakukan spekulasi dalam pembangunan *site* menara dan pembangunan *site* menara baru pada umumnya baru dilakukan apabila telah mendapatkan komitmen kontrak penyewaan *tower space* jangka panjang (yang umumnya berjangka waktu 10 tahun) dari pelanggan Perseroan. Selama tahun 2022, Perseroan secara organik menambah 1.398 *sites* menara telekomunikasi *build-to-suit*.





**Rasio Kolokasi.** Perseroan berupaya secara konsisten untuk terus meningkatkan jumlah kolokasi dari menara telekomunikasi yang ada untuk mendukung peningkatan arus kas dan margin laba operasi. Hal ini terjadi karena biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan kolokasi relatif rendah dibandingkan dengan tambahan pendapatan atas kolokasi tersebut. Menara telekomunikasi Perseroan yang kapasitasnya telah atau hampir penuh berdasarkan kekuatan struktur menara, dapat diperkuat agar bertambah kapasitasnya sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan atas penyewaan tambahan dengan belanja modal yang relatif kecil. Meskipun Perseroan telah meningkatkan jumlah penyewaan pada menara telekomunikasi dari 39.088 penyewaan per 31 Desember 2021 menjadi 40.884 penyewaan per 31 Desember 2022, rasio kolokasi Perseroan masih belum stabil dari waktu ke waktu dikarenakan akuisisi portofolio *sites* atau pembangunan menara *build-to-suit*. Rasio kolokasi turun dari 1,90x per 31 Desember 2021 menjadi 1,87x per tanggal 31 Desember 2022.

Dengan demikian, seiring dengan penambahan jumlah penyewaan melalui konstruksi *sites* menara *build-to-suit* dan penambahan jumlah kolokasi, Perseroan umumnya mengalami peningkatan pendapatan.

**Akuisisi portofolio sites.** Dari waktu ke waktu, Perseroan berupaya memperbesar jumlah portofolio *sites* melalui proses akuisisi yang selektif. Portofolio *sites* yang diakuisisi Perseroan umumnya telah memiliki pelanggan, sehingga Perseroan langsung mengalami peningkatan pendapatan setelah transaksi akuisisi diselesaikan. Namun demikian, besarnya peningkatan pendapatan yang dicapai Perseroan dan kemampuan untuk meningkatkan rasio kolokasi dari *sites* yang diakuisisi tersebut berbeda dengan *sites build-to-suit* karena tarif sewa dan rasio kolokasi yang ada dari tiap *sites* yang diakuisisi berbeda. Perseroan hanya akan melakukan akuisisi apabila telah memenuhi kriteria investasi Perseroan, yang termasuk antara lain, tingkat pengembalian investasi, potensi kolokasi di masa mendatang, kemudahan untuk memperpanjang sewa atau membeli lahan, kemudahan mendapatkan izin warga dari masyarakat sekitar dan kualitas kredit calon pelanggan. Perseroan mengambil alih 2 (dua) perusahaan menara yang tercatat di BEI, GHON dan GOLD, pada tahun 2018, yang memberikan tambahan 1.120 penyewaan dan 859 sites menara telekomunikasi ke dalam portofolio Perseroan. Perseroan juga telah menyelesaikan transaksi jual beli dan pengalihan atas 3.000 menara telekomunikasi milik IBST pada 7 April 2021 yang memberikan tambahan sekitar 4.400 penyewaan.

### **Beban bunga**

Utang Perseroan dalam Dolar AS dan Rupiah merupakan sumber pendanaan yang signifikan untuk pembangunan menara *build-to-suit*, maupun akuisisi portofolio perusahaan penyewaan menara atau portofolio *sites* yang dimilikinya. Oleh sebab itu, beban bunga merupakan komponen yang signifikan pada beban lain-lain pada tahun 2022 dan 2021. Porsi utang Perseroan dalam jumlah signifikan memiliki bunga mengambang, yang telah menyebabkan dan diperkirakan akan terus menyebabkan beban bunga Perseroan berfluktuasi sejalan dengan perubahan suku bunga. Perseroan dari waktu ke waktu berupaya untuk melakukan lindung nilai (*hedging*) atas sebagian atau seluruh risiko yang diakibatkan perubahan suku bunga dan/atau nilai tukar dengan kontrak swap.

### **Belanja modal**

Kegiatan usaha Perseroan merupakan kegiatan usaha padat modal (*capital intensive*). Biaya konstruksi menara umumnya terdiri dari pembelian material besi untuk menara, beban sewa atas lahan, aktivitas konstruksi menara termasuk transportasi, tenaga kerja, dan juga biaya untuk perizinan, termasuk izin warga dari masyarakat sekitar, dan konstruksi *shelter*. Perseroan juga mencatatkan penambahan aset tetap, penambahan properti investasi, pembelian saham serta pembayaran sewa atas lahan sebagai belanja modal. Belanja modal Perseroan pada tahun 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp3.903,1 miliar dan Rp7.176,2 miliar.

### **Perpajakan**

Tarif pajak perusahaan maksimum di Indonesia saat ini adalah 22%. Selisih antara tarif pajak perusahaan efektif dan tarif pajak perusahaan terutama dikarenakan beda tetap dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Untuk keperluan perpajakan, semua sewa yang ditandatangani sebelum 2 Januari 2018, Perseroan menyusutkan aset tetap dan properti investasi berdasarkan masa manfaat masing-masing aset. Untuk keperluan laporan keuangan, Perseroan hanya melakukan penyusutan terhadap aset tetap dan mengukur aset tetap dan properti investasi Perseroan pada nilai wajar. Perubahan nilai properti investasi dicatatkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan. Sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia, rugi fiskal



dapat dibawa hingga 5 (lima) tahun dihitung sejak rugi pajak tersebut terjadi. Perseroan juga mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan beda temporer antara akuntansi dan perlakuan pajak untuk biaya-biaya tertentu. Beda temporer ini utamanya terkait dengan rugi fiskal, cadangan imbalan pasca kerja dan depresiasi.

Pada 6 September 2017, otoritas pajak Indonesia menerbitkan peraturan pajak baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2017 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan” (“**PP No. 34/2017**”). Menurut PP No. 34/2017 ini, maka pendapatan dari sewa menara telekomunikasi yang dimulai sejak 2 Januari 2018 akan dipotong pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10% dari nilai bruto sewa sedangkan pendapatan dari sewa menara telekomunikasi yang dimulai sebelum 2 Januari 2018 akan tetap dipotong pajak perusahaan yang bersifat tidak final sebesar 22%.

Tarif pajak penghasilan efektif Perseroan sebagai persentase terhadap laba sebelum pajak penghasilan adalah 11,6% dan 17,3% masing-masing pada tahun 2022 dan 2021. Beban pajak penghasilan Perseroan pada tahun 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp222,3 miliar dan Rp285,3 miliar.

Perseroan juga diwajibkan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (“**PPN**”) sebesar 11% dari pelanggan Perseroan. Namun, Perseroan dapat mengkreditkan PPN yang dibayar kepada pemasok untuk pembayaran barang dan jasa terhadap PPN yang dibayarkan oleh pelanggan Perseroan. PPN tidak dimasukkan sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan langsung disetorkan ke Pemerintah.

### **Regulasi Pemerintah**

Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pembangunan dan pengoperasian *sites* menara. Sebagian besar kegiatan akuisisi lahan untuk konstruksi menara meliputi kegiatan untuk mendapatkan izin warga dari masyarakat setempat, Izin Mendirikan Bangunan (“**IMB**”)/ Persetujuan Bangunan Gedung (“**PBG**”) atau Izin Mendirikan Bangunan Menara (“**IMBM**”) serta kepatuhan terhadap berbagai Peraturan Pemerintah. Meskipun Perseroan umumnya memperoleh izin warga sebelum dimulainya pembangunan menara, yang merupakan praktek yang berlaku umum di Indonesia dan karena panjangnya waktu yang diperlukan untuk memproses persetujuan dan perizinan (termasuk IMB/PBG atau IMBM), Perseroan terkadang memulai dan menyelesaikan konstruksi menara dan memasang BTS milik pelanggan Perseroan sebelum persetujuan dan perizinan diperoleh secara lengkap dari pejabat yang berwenang. Jika persetujuan dan perizinan tersebut pada akhirnya tidak diperoleh, pejabat daerah yang berwenang dapat mengeluarkan perintah untuk membongkar dan memindahkan menara Perseroan. Peningkatan regulasi Pemerintah terkait bisnis penyewaan menara telekomunikasi dapat meningkatkan waktu dan biaya dalam membangun menara *build-to-suit*, dan juga biaya dalam mematuhi keseluruhan peraturan untuk portofolio *sites*.

### **Perubahan keadaan ekonomi Indonesia dan teknologi baru**

Seluruh kegiatan usaha Perseroan melalui Perusahaan Anak dijalankan di Indonesia dan tingkat permintaan pelanggan terhadap tambahan penyewaan *sites* telekomunikasi utamanya bergantung pada kondisi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh sebesar 5,31% pada tahun 2022 dengan tingkat inflasi mencapai 5,51%. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 optimis dapat mencapai rentang 4,5% sampai 5,3% yang didorong oleh peningkatan permintaan domestik baik konsumsi rumah tangga maupun investasi. Prakiraan tersebut sejalan dengan naiknya mobilitas masyarakat pasca penghapusan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), membaiknya prospek bisnis, meningkatnya aliran masuk Penanaman Modal Asing (PMA), serta berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).

### **Dampak dari pandemi COVID-19**

Pandemi COVID-19 tidak berdampak signifikan terhadap hasil kegiatan usaha Perseroan pada tahun 2021 dan 2022 dikarenakan pendapatan Perseroan didasarkan pada perjanjian penyewaan jangka panjang dengan perusahaan telekomunikasi yang memiliki ketentuan pengakhiran secara terbatas. Pandemi COVID-19 juga tidak mengakibatkan kenaikan risiko kredit yang signifikan karena pelanggan Perseroan masih dapat melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Perseroan sesuai perjanjian penyewaan, dan Grup Tower Bersama tetap dapat memenuhi kewajibannya kepada para krediturnya. Pada tanggal 31 Desember 2022, Pemerintah Indonesia secara



resmi mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia yang semakin terkendali dan cakupan imunitas penduduk di Indonesia yang dinilai tinggi. Sejalan dengan hal tersebut, kegiatan usaha Perseroan dan pelanggan Perseroan telah kembali normal.

Selain pandemi COVID-19, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat memengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus ini, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

### **3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan telah disiapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian mengharuskan manajemen Perseroan untuk membuat beberapa penilaian, estimasi dan asumsi yang dapat memengaruhi jumlah yang dilaporkan dari aset, liabilitas, pendapatan dan beban, serta pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada akhir periode pelaporan. Perseroan mendasarkan estimasi dan asumsi pada pengalaman historis dan faktor lainnya yang diyakini bersifat wajar pada keadaan tertentu. Perseroan secara berkelanjutan mengevaluasi penilaian dan estimasi tersebut, meskipun keadaan saat ini dan asumsi mengenai perkembangan pada masa mendatang dapat berubah dikarenakan perubahan di pasar atau kondisi di luar kendali Perseroan. Hal ini menyebabkan hasil sebenarnya mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi yang telah dibuat. Penjelasan lebih detail mengenai hal ini dapat dilihat pada catatan 2 dan 3 pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang dilampirkan dalam Prospektus ini.

#### ***Perubahan kebijakan akuntansi penting selama 2 (dua) tahun terakhir***

Pada tahun 2022, Perseroan melakukan perubahan kebijakan akuntansi sehubungan dengan aset tetap, di mana Perseroan menyesuaikan masa manfaat menara telekomunikasi dan mengakui estimasi biaya pembongkaran menara, dengan penjelasan sebagai berikut :

##### *Masa manfaat*

Pada tanggal 1 Oktober 2022, berdasarkan suatu kajian teknis, Perseroan melakukan penyesuaian estimasi masa manfaat menara telekomunikasi dari 30 tahun menjadi 40 tahun. Perubahan tersebut berdampak pada jumlah penyusutan tahunan dan nilai buku aset menara sebesar Rp202,8 miliar.

Manajemen berpendapat bahwa penyesuaian masa manfaat ini perlu dilakukan agar sejalan dengan masa manfaat yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perseroan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat memengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset tersebut, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin akan disesuaikan kembali.

##### *Estimasi biaya pembongkaran menara*

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan menetapkan estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan menara, dan untuk restorasi lokasi atas menara pada saat menara tersebut tidak dioperasikan lagi karena faktor-faktor tertentu seperti sewa lahan yang tidak diperpanjang, penyesuaian peraturan dan keadaan memaksa lainnya. Liabilitas tersebut dicatat sebagai estimasi biaya pembongkaran menara dalam akun provisi jangka panjang sebesar Rp107,4 miliar. Provisi jangka panjang akan direalisasi ketika pembongkaran menara.

Manajemen berpendapat bahwa pengakuan provisi jangka panjang perlu dilakukan sejalan dengan jumlah menara telekomunikasi semakin signifikan dan tersebar di berbagai lokasi di Indonesia. Dalam menentukan jumlah estimasi biaya tersebut diperlukan estimasi dan asumsi yang signifikan karena terdapat faktor-faktor yang memengaruhi nilai liabilitas tersebut. Faktor-faktor tersebut mencakup estimasi untuk waktu dan jumlah biaya untuk aktivitas pembongkaran, perubahan teknologi, perubahan peraturan, peningkatan biaya karena tingkat inflasi dan perubahan tingkat bunga diskonto. Ketidakpastian tersebut dapat mengakibatkan jumlah pengeluaran aktual di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah yang dicadangkan saat ini. Jumlah estimasi biaya tersebut pada akhir periode pelaporan merupakan perkiraan terbaik dari manajemen atas nilai kini dari biaya pembongkaran yang diperlukan pada masa mendatang.



#### 4. ANALISIS LABA RUGI KOMPREHENSIF

##### Pendapatan

Pendapatan Perseroan terutama berasal dari pendapatan sewa dan pemeliharaan yang dibayar oleh penyewa *sites* telekomunikasi. Tabel di bawah ini menyajikan rincian jumlah pendapatan berdasarkan pelanggan dan persentasenya terhadap jumlah pendapatan untuk periode-periode sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2022		2021	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
PT Telekomunikasi Selular	2.283.511	35,0	2.201.074	35,6
PT Indosat Tbk.	2.197.771	33,7	1.327.481	21,5
PT XL Axiata Tbk.	1.061.633	16,3	975.935	15,8
PT Smartfren Telecom Tbk.	521.267	8,0	434.566	7,0
PT Smart Telecom	381.451	5,9	270.490	4,4
PT Hutchison 3 Indonesia	7.525	0,1	914.788	14,8
Lainnya	13.974	0,2	40.106	0,7
<b>Jumlah</b>	<b>6.467.132</b>	<b>99,1</b>	<b>6.164.440</b>	<b>99,8</b>
Serat optik	48.848	0,8	6.635	0,1
Properti investasi	8.389	0,1	8.509	0,1
<b>Jumlah</b>	<b>6.524.369</b>	<b>100,0</b>	<b>6.179.854</b>	<b>100,0</b>

Tabel di bawah ini menyajikan rincian pendapatan Perseroan berdasarkan penyebaran geografis dan persentasenya terhadap jumlah pendapatan untuk periode-periode sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2022		2021	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Jawa dan Bali	3.785.398	58,0	3.648.715	59,0
Sumatera	1.709.268	26,2	1.587.749	25,7
Kalimantan	447.941	6,9	412.089	6,7
Sulawesi	580.746	8,9	531.031	8,6
Maluku dan Papua	1.016	0,0 <sup>nm</sup>	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>6.524.369</b>	<b>100,0</b>	<b>6.179.584</b>	<b>100,0</b>

nm: menjadi nol karena pembulatan.

##### Beban pokok pendapatan

Beban pokok pendapatan Perseroan masing-masing adalah 27,3% dan 23,8% dari total pendapatan Perseroan pada tahun 2022 dan 2021. Tabel di bawah ini menyajikan rincian beban pokok pendapatan dan persentasenya terhadap jumlah beban pokok pendapatan untuk periode-periode sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2022		2021	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Penyusutan menara	840.418	47,1	628.174	42,7
Penyusutan aset hak guna	418.829	23,5	389.449	26,4
Perbaikan dan pemeliharaan	296.954	16,7	259.153	17,6
Amortisasi perizinan	66.971	3,8	53.934	3,7
Keamanan	53.244	3,0	50.768	3,4
Asuransi	34.958	1,9	30.534	2,1
Listrik	28.410	1,6	27.557	1,9
Penyusutan menara bergerak	13.594	0,8	13.129	0,9
Lainnya	29.947	1,6	20.082	1,3
<b>Jumlah</b>	<b>1.783.325</b>	<b>100,0</b>	<b>1.472.780</b>	<b>100,0</b>



*Penyusutan menara.* Penyusutan menara merupakan biaya penyusutan untuk menara telekomunikasi (yang tercatat di dalam aset tetap).

*Penyusutan aset hak guna.* Implementasi PSAK 73, efektif sejak 1 Januari 2020, mengakibatkan reklasifikasi amortisasi sewa lahan sebagai penyusutan aset hak guna. Penyusutan aset hak guna terdiri dari biaya penyusutan sewa lahan untuk menara telekomunikasi, sewa pembiayaan dan sewa kantor.

*Perbaikan dan pemeliharaan.* Beban perbaikan dan pemeliharaan terutama terdiri dari pembayaran kepada kontraktor pihak ketiga yang melakukan perbaikan dan pemeliharaan *sites* telekomunikasi.

*Keamanan.* Beban keamanan terdiri dari pembayaran kepada kontraktor pihak ketiga untuk jasa keamanan di *sites* menara.

*Amortisasi perizinan.* Amortisasi perizinan terdiri dari biaya yang dibayarkan kepada pemilik gedung berdasarkan perjanjian sewa *sites* untuk IBS dan biaya perizinan yang dibayar di muka. Biaya perizinan diamortisasi selama masa manfaat dari perizinan tersebut.

*Listrik.* Beban listrik terdiri dari biaya untuk listrik pada sebagian besar *sites* telekomunikasi dan juga bahan bakar untuk generator yang digunakan pada beberapa *sites* menara tertentu. Biaya listrik yang dikeluarkan untuk pengoperasian peralatan yang dimiliki penyewa pada *sites* telekomunikasi dibayarkan oleh penyewa sendiri, kecuali untuk penyewa IBS. Untuk penyewa tersebut, Perseroan membebankan biaya listrik sebagai komponen biaya pemeliharaan dan membayar biaya listrik aktual yang timbul dari pengoperasian peralatan antena pada *sites* telekomunikasi Perseroan.

*Asuransi.* Beban asuransi terdiri dari premi yang dibayarkan untuk mendapatkan penutupan asuransi pada *sites* telekomunikasi Perseroan.

*Penyusutan menara bergerak.* Penyusutan menara bergerak merupakan biaya penyusutan untuk menara bergerak (yang tercatat di dalam aset tetap).

*Lainnya.* Beban lainnya terutama terdiri dari beban untuk perjalanan dinas dan kunjungan ke *sites* untuk karyawan operasional, kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dan beban terkait dengan upaya untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar *sites* serta pajak bumi dan bangunan.

### **Laba kotor**

Laba kotor Perseroan merupakan jumlah pendapatan setelah dikurangi beban pokok pendapatan. Tabel di bawah ini menyajikan laba kotor Perseroan dan persentasenya terhadap jumlah pendapatan untuk periode-periode sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2022		2021	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Laba kotor	4.741.044	72,7	4.706.804	76,2

### **Beban usaha**

Beban usaha Perseroan masing-masing adalah 7,0% dan 6,5% dari jumlah pendapatan Perseroan pada tahun 2022 dan 2021. Tabel berikut menyajikan rincian beban usaha Perseroan dan persentasenya terhadap jumlah beban usaha untuk periode-periode sebagai berikut :



(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2022		2021	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Gaji dan tunjangan	290.198	63,3	264.281	65,9
Penyusutan	34.242	7,5	32.671	8,1
Beban kantor	26.531	5,8	22.924	5,7
Jasa profesional	23.066	5,0	16.537	4,1
Sponsor dan representasi	15.782	3,4	13.477	3,4
Beban manfaat karyawan	12.070	2,6	-	-
Sewa kantor	11.403	2,5	13.198	3,3
Donasi dan tanggung jawab sosial	10.224	2,2	11.498	2,9
Perjalanan dinas	6.554	1,4	2.809	0,7
Transportasi	5.850	1,3	5.514	1,4
Penyusutan aset hak guna	5.390	1,2	5.541	1,4
Telekomunikasi	491	0,1	478	0,1
Lainnya	16.772	3,7	11.961	3,0
<b>Jumlah</b>	<b>458.573</b>	<b>100,0</b>	<b>400.889</b>	<b>100,0</b>

*Gaji dan tunjangan.* Beban gaji dan tunjangan terdiri dari gaji, bonus dan tunjangan untuk karyawan.

*Penyusutan.* Beban penyusutan terkait dengan penyusutan untuk aset tetap menggunakan metode penyusutan garis lurus sepanjang estimasi masa manfaat aset tetap tersebut.

*Beban manfaat karyawan.* Beban manfaat karyawan adalah penyisihan untuk imbalan pasca-kerja untuk karyawan (sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan).

*Beban kantor.* Biaya kantor terdiri dari berbagai beban kantor termasuk pencetakan dan alat tulis, pos dan kurir, beban langganan dan listrik di kantor pusat dan cabang.

*Jasa profesional.* Beban jasa profesional terdiri dari biaya untuk penasihat hukum, akuntan dan konsultan lainnya.

*Donasi dan tanggung jawab sosial.* Donasi dan tanggung jawab sosial merupakan kontribusi Perseroan untuk membantu masyarakat dan Pemerintah dalam menghadapi kondisi pandemi virus COVID-19, penanggulangan bencana, serta meningkatkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah operasional Perseroan.

*Sewa kantor.* Beban sewa kantor terdiri dari biaya sewa untuk ruang kantor di kantor pusat Perseroan di Jakarta dan kantor cabang di beberapa daerah.

*Sponsor dan representasi.* Beban sponsor dan representasi terutama terdiri dari beban untuk kegiatan *public relation* dan *sponsorship* bagi penyewa Perseroan.

*Penyusutan aset hak guna.* Perseroan mulai mencatatkan penyusutan aset hak guna sebagai akibat dari implementasi PSAK 73. Penyusutan aset hak guna menggunakan metode penyusutan garis lurus sepanjang estimasi masa manfaat aset hak guna tersebut.

*Transportasi.* Beban transportasi terdiri dari biaya untuk sewa kendaraan bagi karyawan kantor pusat dan di kantor cabang termasuk biaya bensin dan parkir serta biaya pemeliharaan kendaraan.

*Perjalanan dinas.* Beban perjalanan dinas terdiri dari biaya untuk perjalanan bisnis dan kunjungan lapangan yang dilakukan karyawan non-operasional.

*Telekomunikasi.* Beban telekomunikasi terdiri dari beban untuk telepon selular bagi karyawan dan komunikasi telepon tetap, termasuk komunikasi suara dan data, pada kantor pusat dan kantor cabang.

*Lainnya.* Beban lainnya terutama terdiri dari berbagai biaya lain-lain yang jumlahnya secara individu tidak signifikan, termasuk pelatihan karyawan, iklan dan acara perusahaan.





### Laba dari operasi

Laba dari operasi Perseroan merupakan pendapatan setelah dikurangi beban operasi. Tabel di bawah ini menyajikan laba dari operasi Perseroan dan persentasenya terhadap jumlah pendapatan untuk periode-periode sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2022		2021	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Laba dari operasi	4.282.471	65,6	4.305.915	69,7

### Pendapatan (beban) lain-lain

Tabel di bawah ini menyajikan rincian pendapatan (beban) lain-lain Perseroan dan persentasenya terhadap jumlah pendapatan untuk periode-periode sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2022		2021	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Kenaikan nilai wajar atas properti investasi	15.656	0,2	57.638	0,9
Pendapatan bunga	13.785	0,2	12.156	0,2
Laba selisih kurs - bersih	1.779	0,0	1.382	0,0 <sup>nm</sup>
Beban kerugian kredit ekspektasian – aset keuangan	(24.997)	0,4	(2.271)	(0,0) <sup>nm</sup>
Penurunan nilai wajar atas menara telekomunikasi	-	-	(3.572)	(0,1)
Beban keuangan - Pinjaman dan surat utang	(1.699.072)	(26,0)	(1.925.209)	(31,2)
Beban keuangan - Lainnya	(129.780)	(2,0)	(210.836)	(3,4)
Lainnya - Bersih	(54.643)	(0,8)	(18.304)	(0,2)
<b>Jumlah</b>	<b>(1.877.272)</b>	<b>(28,0)</b>	<b>(2.085.444)</b>	<b>(33,8)</b>

nm: menjadi nol karena pembulatan.

*Laba selisih kurs - Bersih.* Laba selisih kurs - Bersih terutama terdiri dari dari laba translasi atas aset dan liabilitas keuangan dalam Dolar AS termasuk pinjaman dari pihak ketiga dan surat utang tanpa jaminan dalam Dolar AS.

*Kenaikan nilai wajar atas properti investasi.* Kenaikan nilai wajar atas properti investasi terdiri dari selisih antara biaya tercatat dan nilai wajar dari properti investasi pada akhir periode akuntansi.

*Pendapatan bunga.* Pendapatan bunga terdiri dari dari bunga yang diperoleh dari kas dan setara kas yang disimpan dalam rekening operasional.

*Penurunan nilai goodwill.* Efektif sejak tanggal 1 Januari 2011, Perseroan melaksanakan uji penurunan nilai atas goodwill dari penggabungan usaha yang telah dilakukan sebelumnya.

*Penurunan nilai wajar atas menara telekomunikasi.* Penurunan nilai wajar atas aset tetap terdiri dari selisih antara biaya tercatat dan nilai wajar dari menara telekomunikasi pada akhir periode akuntansi.

*Beban kerugian kredit ekspektasian aset keuangan.* Dalam hal Perseroan memiliki informasi bahwa pelanggan tertentu tidak dapat melaksanakan kewajibannya, Perseroan akan melakukan evaluasi terhadap akun tersebut dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga, serta faktor pasar yang telah diketahui. Kerugian kredit ekspektasian merupakan aset keuangan yang menggambarkan provisi spesifik untuk pelanggan yang dicatatkan atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perseroan.

*Pajak penghasilan final.* Pajak penghasilan final terdiri dari pajak final sebesar 10% atas penghasilan yang diperoleh Perseroan dari pendapatan sewa menara telekomunikasi.





*Beban keuangan - Pinjaman dan surat utang.* Beban keuangan - Pinjaman dan surat utang terdiri dari bunga yang dibayarkan untuk utang yang belum dilunasi dari utang bank dalam Dolar AS dan Rupiah dan surat utang jangka panjang Dolar AS, dan juga pinjaman dari pihak ketiga tanpa jaminan.

*Beban keuangan - Lainnya.* Beban keuangan - Lainnya terdiri dari beban bunga atas liabilitas sewa, dan amortisasi atas biaya fasilitas pinjaman jangka panjang dari pihak ketiga dan amortisasi biaya penerbitan surat utang jangka panjang dalam Dolar AS dan obligasi.

*Lainnya - Bersih.* Lainnya - Bersih terutama terdiri dari berbagai biaya non-operasi yang jumlahnya secara individu tidak signifikan.

### **Penghasilan komprehensif lain**

*Surplus revaluasi.* Revaluasi aset tetap Perseroan pada nilai wajar dilakukan pada setiap tahun pelaporan. Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui dalam laba rugi. Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Penurunan nilai tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain, untuk mengurangi jumlah akumulasi dari surplus revaluasi, sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi dari aset tersebut.

Surplus revaluasi aset tetap dapat dialihkan ke saldo laba ketika terjadi penghentian atau pelepasan aset tersebut. Sebagian surplus revaluasi juga dapat dialihkan sejalan dengan penggunaan aset. Dalam hal tersebut, maka surplus revaluasi yang dialihkan ke saldo laba adalah sebesar perbedaan antara jumlah penyusutan berdasarkan nilai revaluasi dan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan awalnya. Pengalihan tersebut tidak dilakukan melalui laba rugi.

*Cadangan lindung nilai arus kas.* Perseroan melakukan kontrak lindung nilai dalam rangka memitigasi fluktuasi tingkat bunga dan nilai tukar mata uang asing atas pinjaman dalam mata uang asing.

*Selisih translasi atas mata uang asing.* Transaksi ini merupakan selisih translasi atas mata uang asing TBGG, Perusahaan Anak.

*Kerugian aktuarial yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain.* Transaksi ini merupakan pengukuran kembali atas aset (liabilitas) imbalan pasti neto yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada tahun terjadinya.

### **Kepentingan non-pengendali**

Kepentingan non-pengendali merupakan hak dan bagian dari pemegang saham minoritas atas ekuitas dan laba bersih Perusahaan Anak berdasarkan persentase kepemilikan dari pemegang saham minoritas di dalam Perusahaan Anak.

## **5. OPERASI PER SEGMENT**

Tabel berikut ini menunjukkan nilai pendapatan dan persentase kontribusi masing-masing jasa yang dihasilkan Perseroan untuk periode-periode sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir 31 Desember			
	2022		2021	
	Rp	%	Rp	%
Pendapatan penyewaan menara	6.428.838	98,5	6.125.669	99,2
Pendapatan penyewaan <i>In building system/ repeater</i>	38.295	0,6	38.771	0,6
Pendapatan penyewaan gedung	8.389	0,1	8.509	0,1
Pendapatan serat optik	48.847	0,8	6.635	0,1
<b>Jumlah</b>	<b>6.524.369</b>	<b>100,0</b>	<b>6.179.584</b>	<b>100,0</b>



Pendapatan meningkat sebesar 5,5% menjadi Rp6.524,4 miliar pada tahun 2022 dari sebelumnya Rp6.179,6 miliar pada tahun 2021 terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari penyewaan menara selama tahun 2022, sejalan dengan keberhasilan Perseroan bertumbuh secara organik. Pendapatan penyewaan menara memberikan kontribusi terbesar masing-masing sebesar 98,5% dan 99,1% pada tahun 2022 dan 2021.

Tabel di bawah ini menyajikan rincian pendapatan Perseroan berdasarkan penyebaran geografis dan persentasenya terhadap jumlah pendapatan untuk periode-periode sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2022		2021	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Jawa dan Bali	3.785.398	58,0	3.648.715	59,0
Sumatera	1.709.268	26,2	1.587.749	25,7
Kalimantan	447.941	6,9	412.089	6,7
Sulawesi	580.746	8,9	531.031	8,6
Maluku dan Papua	1.016	0,0 <sup>nm</sup>	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>6.524.369</b>	<b>100,0</b>	<b>6.179.584</b>	<b>100,0</b>

nm: menjadi nol karena pembulatan.

Sebagian besar pendapatan Perseroan, masing-masing sebesar 84,2% dan 84,7% dari jumlah pendapatan Perseroan pada tahun 2022 dan 2021, berasal dari Pulau Jawa, Bali dan Sumatera. Hal ini dikarenakan sebagian besar *sites* telekomunikasi dan penyewaan menara Perseroan terkonsentrasi pada propinsi-propinsi padat penduduk di pulau Jawa, Bali dan Sumatera. Namun demikian, pendapatan Perseroan dari Pulau Sulawesi mencatatkan pertumbuhan yang lebih cepat sebesar 9,4%, sejalan dengan rencana perluasan jaringan yang dilakukan oleh para operator telekomunikasi yang menjadi pelanggan Perseroan.

## 6. HASIL KEGIATAN OPERASIONAL

*Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021*

*Pendapatan.* Pendapatan meningkat sebesar 5,6% menjadi Rp6.524,4 miliar pada tahun 2022 dari sebelumnya Rp6.179,6 miliar pada tahun 2021 terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah penyewaan organik. Jumlah *sites* telekomunikasi Perseroan meningkat menjadi 21.870 per 31 Desember 2022 dari 20.578 per 31 Desember 2021, dan jumlah penyewaan meningkat menjadi 40.884 per 31 Desember 2022 dari 39.088 per 31 Desember 2021. Selain itu, rasio kolokasi turun menjadi 1,87x per 31 Desember 2022 dari 1,90x per 31 Desember 2021, sejalan dengan kenaikan utilisasi menara melalui penambahan kolokasi. Perseroan memandang bahwa kenaikan ini di antaranya didorong oleh peningkatan permintaan data seluler karena kegiatan bekerja dari rumah dan pembelajaran jarak jauh untuk mencegah penyebaran virus sehingga operator telekomunikasi terus memadatkan jaringan mereka yang ada di Pulau Jawa dan melakukan investasi tambahan yang signifikan untuk meningkatkan jaringan 3G/4G mereka di wilayah utama di luar Pulau Jawa.

*Beban pokok pendapatan.* Beban pokok pendapatan meningkat sebesar 21,1% menjadi Rp1.783,3 miliar pada tahun 2022 dari sebelumnya Rp1.472,8 miliar pada tahun 2021, terutama dikarenakan kenaikan penyusutan menara, penyusutan aset hak guna, dan beban perbaikan dan pemeliharaan. Kenaikan beban pokok pendapatan sejalan dengan peningkatan pendapatan.

*Penyusutan menara.* Beban penyusutan naik sebesar 33,8% menjadi Rp840,4 miliar pada tahun 2022 dari sebelumnya Rp628,2 miliar pada tahun 2021, terutama dikarenakan oleh peningkatan jumlah *sites* menara telekomunikasi.

*Penyusutan aset hak guna.* Perseroan mencatatkan beban penyusutan aset hak guna sebesar Rp418,8 miliar pada tahun 2022, sebagai dampak dari penerapan PSAK 73.



*Perbaikan dan pemeliharaan.* Beban perbaikan dan pemeliharaan naik sebesar 14,6% menjadi Rp297,0 miliar pada tahun 2022 dari sebelumnya Rp259,2 miliar pada tahun 2021, terutama dikarenakan pertumbuhan jumlah penyewaan.

*Keamanan.* Beban keamanan naik sebesar 4,9% menjadi Rp53,2 miliar pada tahun 2022 dari sebelumnya Rp50,8 miliar pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah *sites* menara telekomunikasi.

*Amortisasi perizinan.* Beban amortisasi perizinan naik sebesar 24,2% menjadi Rp67,0 pada tahun 2022 dari sebelumnya Rp53,9 miliar pada tahun 2021, terutama dikarenakan peningkatan jumlah *sites* menara telekomunikasi.

*Listrik.* Beban listrik naik sebesar 3,1% menjadi Rp28,4 miliar pada tahun 2022 dari sebelumnya Rp27,6 miliar pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh meningkatnya pemakaian listrik yang menjadi beban Perseroan.

*Asuransi.* Beban asuransi naik sebesar 14,5% menjadi Rp35,0 miliar pada tahun 2022 dari sebelumnya Rp30,5 miliar pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah penyewaan yang harus diasuransikan oleh Perseroan.

*Penyusutan menara bergerak.* Beban penyusutan menara bergerak naik sebesar 3,5% menjadi Rp13,6 miliar pada tahun 2022 dari sebelumnya Rp13,1 miliar pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh penambahan menara bergerak selama tahun 2022.

*Lainnya.* Beban lainnya naik sebesar 49,1% menjadi Rp29,9 miliar pada tahun 2022 dari sebelumnya Rp20,1 miliar pada tahun 2021, terutama dikarenakan kenaikan biaya perjalanan dinas untuk mengunjungi *site* sebesar 36,2% menjadi Rp11,7 miliar dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp8,6 miliar dikarenakan pembatasan aktivitas terkait dengan persebaran virus COVID-19 telah dicabut, kenaikan biaya pajak bumi dan bangunan atas *site* menara telekomunikasi sebesar 30,5% menjadi Rp5,2 miliar dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp4,0 miliar serta kenaikan biaya penyediaan *bandwidth* sebesar 914,4% menjadi Rp2,3 miliar dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp0,2 miliar.

*Laba kotor.* Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba kotor Perseroan meningkat sebesar 0,7% menjadi Rp4.741,0 miliar pada tahun 2022 dari sebelumnya Rp4.706,8 miliar pada tahun 2021.

*Beban usaha.* Beban usaha naik sebesar 14,4% menjadi Rp458,6 miliar pada tahun 2022 dari sebelumnya Rp400,9 miliar pada tahun 2021, yang secara umum dikarenakan kenaikan beban gaji dan tunjangan, beban manfaat karyawan, jasa profesional, dan perjalanan dinas. Beban gaji dan tunjangan naik sebesar 9,8% menjadi Rp290,2 miliar dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp264,3 miliar terutama dikarenakan kenaikan gaji pokok tahunan, beban manfaat karyawan naik menjadi Rp12,0 miliar dibandingkan tahun 2021 sebesar nihil terutama dikarenakan pada tahun 2021, Perseroan melakukan penerapan awal UU Cipta Kerja, beban jasa profesional naik sebesar 39,5% menjadi Rp23,1 miliar dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp16,5 miliar terutama karena aktivitas terkait jasa konsultasi manajemen, teknologi informasi, dan komunikasi publik, dan biaya perjalanan dinas naik sebesar 133,3% menjadi Rp6,6 miliar dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp2,8 miliar dikarenakan pelanggaran aturan pembatasan aktivitas terkait COVID-19 dan kegiatan operasional dan/atau aktivitas Perseroan sedang dalam masa transisi menuju normal.

*Laba dari operasi.* Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba dari operasi Perseroan turun sebesar 0,5% menjadi Rp4.282,5 miliar pada tahun 2022 dari sebelumnya Rp4.305,9 miliar pada tahun 2021.

*Beban lain-lain - Bersih.* Beban lain-lain - Bersih turun sebesar 10,0% menjadi Rp1.877,3 miliar pada tahun 2022 dari sebelumnya Rp2.085,4 miliar pada tahun 2021.

*Laba selisih kurs - Bersih.* Laba selisih kurs - bersih meningkat sebesar 28,7% menjadi Rp1,8 miliar pada tahun 2022 dari sebelumnya Rp1,4 miliar pada tahun 2021. Hal tersebut terutama dikarenakan dampak dari nilai tukar Rupiah menjadi Rp15.731 per 1 Dolar AS pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan Rp14.269 per 1 Dolar AS pada tanggal 31 Desember 2021 terutama terhadap transaksi bank harian dalam Dolar AS selama tahun 2022.



*Kenaikan nilai wajar atas properti investasi.* Nilai wajar atas properti investasi turun sebesar 72,8% menjadi Rp15,6 miliar pada tahun 2022 dari sebelumnya Rp57,6 miliar pada tahun 2021, sesuai dengan perhitungan nilai wajar ini dilakukan oleh konsultan independen pada setiap periode audit.

*Pendapatan bunga.* Pendapatan bunga naik sebesar 13,4% menjadi Rp13,8 miliar pada tahun 2022 dari sebelumnya Rp12,2 miliar pada tahun 2021, terutama sebagai akibat saldo kas dan bank rata-rata yang lebih tinggi selama tahun 2022.

*Penurunan nilai wajar atas menara telekomunikasi.* Perseroan tidak mencatatkan penurunan nilai wajar atas menara telekomunikasi selama tahun 2022, dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp3,6 miliar dikarenakan penurunan nilai wajar pada tanggal revaluasi yang dihitung oleh penilai independen tidak melebihi saldo surplus revaluasi yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada akhir periode akuntansi.

*Beban keuangan - Pinjaman dan surat utang.* Beban keuangan - Pinjaman dan surat utang turun sebesar 11,7% menjadi Rp1.699,1 miliar pada tahun 2022 dari sebelumnya Rp1.925,2 miliar pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh penurunan rata-rata tingkat bunga surat utang selama tahun 2022 dibandingkan rata-rata tingkat bunga surat utang pada tahun 2021.

*Beban keuangan - Lainnya.* Beban keuangan - lainnya turun sebesar 38,4% menjadi Rp129,8 miliar pada tahun 2022 dari sebelumnya Rp210,8 miliar pada tahun 2021, terutama dikarenakan penurunan amortisasi biaya pinjaman jangka panjang - pihak ketiga dan beban bunga liabilitas sewa aset hak guna.

*Lainnya - Bersih.* Beban lainnya - bersih naik sebesar 271,4% menjadi Rp54,6 miliar pada tahun 2022 dari sebelumnya Rp18,3 miliar pada tahun 2021, terutama dikarenakan pembebanan piutang pajak penghasilan pasal 23 yang tidak dapat dikreditkan dan biaya non-operasional lainnya.

*Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan.* Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan naik sebesar 8,3% menjadi Rp2.405,2 miliar dari sebelumnya Rp2.220,5 miliar pada tahun 2021.

*Beban pajak final.* Beban pajak final naik sebesar 73,4% menjadi Rp493,4 miliar pada tahun 2022 dari sebelumnya Rp284,5 miliar pada tahun 2021.

*Laba sebelum pajak penghasilan.* Laba sebelum pajak penghasilan turun sebesar 1,2% menjadi Rp1.911,8 miliar pada tahun 2022 dari sebelumnya Rp1.936,0 miliar pada tahun 2021.

*Beban pajak penghasilan - bersih.* Beban pajak penghasilan - bersih turun sebesar 33,6% menjadi Rp222,3 miliar pada tahun 2022 dari sebelumnya Rp334,6 miliar pada tahun 2021.

*Pajak kini.* Beban pajak kini turun sebesar 22,1% menjadi Rp222,3 miliar pada tahun 2022 dari sebelumnya Rp285,4 miliar pada tahun 2021, terutama disebabkan penurunan laba fiskal Perusahaan Anak.

*Pajak tangguhan.* Beban pajak tangguhan pada tahun 2022 tercatat nihil dibandingkan dengan pada tahun 2021 sebesar Rp49,3 miliar dikarenakan Perseroan tidak mencatatkan beban pajak tangguhan pada tahun 2022.

*Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.* Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan diatas, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk meningkat sebesar 5,7% menjadi Rp1.637,6 miliar pada tahun 2022 dari sebelumnya Rp1.549,0 miliar pada tahun 2021.

*Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali.* Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali turun sebesar 1,0% menjadi Rp51,9 miliar pada tahun 2022 dari sebelumnya Rp52,4 miliar pada tahun 2021.

*Laba bersih tahun berjalan.* Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba bersih tahun berjalan Perseroan meningkat sebesar 5,5% menjadi Rp1.689,4 miliar pada tahun 2022 dari sebelumnya Rp1.601,4 miliar pada tahun 2021.



*Penghasilan komprehensif lain.* Penghasilan komprehensif lain turun sebesar 140,5% menjadi Rp(551,2) miliar pada tahun 2022 dari sebelumnya Rp1.362,4 miliar. Penurunan ini terutama dikarenakan turunnya surplus revaluasi dan perubahan lindung nilai arus kas.

*Defisit revaluasi.* Defisit revaluasi naik sebesar 826,9% menjadi Rp1.407,8 miliar pada tahun 2022 dari sebelumnya Rp151,9 miliar pada tahun 2021, berdasarkan perhitungan nilai wajar yang telah dilakukan oleh konsultan independen pada setiap periode audit.

*Perubahan lindung nilai arus kas.* Perubahan lindung nilai arus kas turun sebesar 1.242,2% menjadi negatif Rp904,2 miliar pada tahun 2022 dari sebelumnya negatif Rp67,4 miliar pada tahun 2021, terutama dikarenakan penyelesaian kontrak lindung nilai selama tahun 2022.

*Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.* Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, jumlah penghasilan komprehensif lain turun sebesar 140,5% menjadi Rp551,2 miliar pada tahun 2022 dari sebelumnya Rp1.362,4 miliar pada tahun 2021.

## 7. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

### Aset

Tabel di bawah ini menyajikan rincian aset Perseroan pada tanggal-tanggal sebagai berikut :

*(dalam jutaan Rupiah)*

	31 Desember	
	2022	2021
<b>Aset Lancar</b>		
Kas dan setara kas	966.386	629.125
Piutang usaha - pihak ketiga	270.041	538.715
Piutang lain-lain	38.993	75.506
Pendapatan yang masih harus diterima	721.057	500.283
Persediaan dan perlengkapan	621.652	226.408
Uang muka dan beban dibayar di muka	108.365	81.336
Pajak dibayar dimuka	839.310	969.880
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>3.565.804</b>	<b>3.021.253</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>		
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	34.427.639	33.637.904
Properti investasi - nilai wajar	465.478	447.045
Aset hak guna - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	3.667.843	3.463.007
Uang jaminan	1.023	1.605
Aset keuangan derivatif	563.351	900.363
<i>Goodwill</i>	390.368	381.189
Aset tidak lancar lainnya	58.462	18.069
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>39.574.164</b>	<b>38.849.182</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>43.139.968</b>	<b>41.870.435</b>

### ***Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021***

Jumlah aset Perseroan pada 31 Desember 2022 meningkat sebesar 3,0% menjadi sebesar Rp43.139,9 miliar dibandingkan jumlah aset pada 31 Desember 2021 sebesar Rp41.870,4 miliar. Peningkatan tersebut terutama berasal dari peningkatan aset tetap dan persediaan dan perlengkapan, serta kas dan setara kas.

Jumlah aset lancar Perseroan pada 31 Desember 2022 meningkat sebesar 18,0% menjadi Rp3.565,8 miliar dibandingkan jumlah aset lancar pada 31 Desember 2021 sebesar Rp3.021,3 miliar, terutama disebabkan oleh kenaikan persediaan dan perlengkapan sebesar 174,6% menjadi Rp621,7 miliar pada 31 Desember 2022 dari Rp226,4 miliar pada 31 Desember 2021 yang timbul karena kenaikan material menara yang digunakan dalam



pembangunan menara *build-to-suit* serta kenaikan kas dan setara kas sebesar 53,6% menjadi Rp966,4 miliar dari sebelumnya Rp629,1 miliar yang timbul karena penerimaan lebih bayar pajak yang diterima Perseroan. Kenaikan tersebut sebagian di-*offset* dengan penurunan piutang usaha pihak ketiga sebesar 49,9% menjadi Rp270,0 miliar pada 31 Desember 2022 dari sebelumnya Rp538,7 miliar pada 31 Desember 2021, terutama disebabkan oleh proses pengujian fisik menara dan verifikasi dokumen yang belum selesai pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada 31 Desember 2022 meningkat sebesar 1,9% menjadi Rp39.574,2 miliar dibandingkan jumlah aset tidak lancar pada 31 Desember 2021 sebesar Rp38.849,2 miliar, terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 2,3% menjadi Rp34.427,6 miliar pada 31 Desember 2022 dari Rp33.637,9 miliar pada 31 Desember 2021, sejalan dengan penambahan penyewaan menara organik. Peningkatan aset hak guna sebesar 5,9% menjadi Rp3.667,8 miliar pada 31 Desember 2022 dari sebelumnya Rp3.463,0 miliar pada 31 Desember 2021 sejalan dengan pertumbuhan menara telekomunikasi. Kenaikan tersebut sebagian di-*offset* dengan penurunan aset keuangan derivatif sebesar 37,4% menjadi Rp563,5 miliar pada 31 Desember 2022 dari sebelumnya Rp900,4 miliar pada 31 Desember 2021 sebagai akibat penyelesaian kontrak lindung nilai selama tahun 2022.

### Liabilitas

Tabel di bawah ini menyajikan rincian liabilitas Perseroan pada tanggal-tanggal sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2022	2021
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>		
Utang usaha - pihak ketiga	255.607	37.435
Utang lain-lain	23.442	12.227
Utang pajak	123.066	169.374
Pendapatan yang diterima di muka	1.103.585	1.316.692
Beban masih harus dibayar	974.904	1.107.497
Liabilitas sewa - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	126.567	174.858
Surat utang bagian jangka pendek	5.914.573	5.465.457
Pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		
Pihak ketiga	206.438	148.885
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>8.728.182</b>	<b>8.432.425</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>		
Liabilitas sewa - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	533.136	503.822
Provisi jangka panjang	107.400	-
Surat utang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	18.678.155	17.676.845
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		
Pihak ketiga	4.160.396	5.455.157
Cadangan imbalan pasca-kerja	12.316	12.948
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>23.491.403</b>	<b>23.648.772</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>32.219.585</b>	<b>32.081.197</b>

### Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas Perseroan pada 31 Desember 2022 meningkat sebesar 0,4% menjadi Rp32.219,6 miliar dibandingkan jumlah liabilitas pada 31 Desember 2021 sebesar Rp32.081,2 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan surat utang, utang usaha, dan provisi jangka panjang yang sebagian di-*offset* dengan penurunan pinjaman jangka panjang dan pendapatan diterima dimuka.

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada 31 Desember 2022 meningkat sebesar 3,5% menjadi Rp8.728,2 miliar dibandingkan jumlah liabilitas jangka pendek pada 31 Desember 2021 sebesar Rp8.432,4 miliar, terutama disebabkan oleh kenaikan utang bagian jangka pendek sebesar 8,2% menjadi Rp5.914,6 miliar pada 31 Desember 2022 dari sebelumnya Rp5.465,5 miliar pada 31 Desember 2021 terutama karena penambahan surat utang yang





akan jatuh tempo dalam satu tahun dan kenaikan utang usaha pihak ketiga sebesar 582,8% menjadi Rp255,6 miliar pada 31 Desember 2022 dari Rp37,4 miliar pada 31 Desember 2021, terutama disebabkan kenaikan transaksi dengan pihak ketiga selama tahun 2022. Kenaikan tersebut sebagian di-offset dengan penurunan pendapatan diterima dimuka sebesar 16,2% menjadi Rp1.103,6 miliar pada 31 Desember 2022 dari sebelumnya Rp1.316,7 miliar pada 31 Desember 2021, terutama karena amortisasi pendapatan dan beban masih harus dibayar sebesar 12,0% menjadi Rp974,9 miliar pada 31 Desember 2022 dari sebelumnya Rp1.107,5 miliar pada 31 Desember 2021 terutama karena penurunan estimasi biaya pembangunan menara telekomunikasi.

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada 31 Desember 2022 turun sebesar 0,7% menjadi Rp23.491,4 miliar dibandingkan jumlah liabilitas jangka panjang pada 31 Desember 2021 sebesar Rp23.648,8 miliar, terutama disebabkan oleh penurunan porsi pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar 23,7% menjadi Rp4.160,4 miliar pada 31 Desember 2022 dari Rp5.455,2 miliar pada 31 Desember 2021 terutama karena pembayaran sebagian pinjaman jangka panjang oleh Perusahaan Anak. Penurunan tersebut sebagian di-offset oleh kenaikan surat utang jangka panjang sebesar 5,7% menjadi Rp18.678,2 miliar pada 31 Desember 2022 dari Rp17.676,8 miliar pada 31 Desember 2021 dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV, dan Obligasi Berkelanjutan V Tahap V setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun. Perseroan juga mencatatkan provisi jangka panjang atas estimasi biaya pembongkaran menara pada 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp107,4 miliar.

Per 31 Desember 2022, Perseroan mampu menjaga posisi keuangan yang kuat agar mampu memenuhi seluruh kewajiban pinjaman. Rasio pinjaman senior bersih dengan menggunakan kurs lindung nilainya (*net senior debt at hedged rate*) terhadap EBITDA tahun 2022 yang disetahunkan adalah 0,6x, yang berada jauh di bawah batas yang ditetapkan untuk fasilitas kredit Perseroan yaitu rasio pinjaman senior bersih dengan menggunakan kurs lindung nilainya terhadap EBITDA bulan terakhir yang disesuaikan dan disetahunkan untuk di bawah 5,0x. Rasio total pinjaman dengan menggunakan kurs lindung nilainya (*total debt at hedged rate*) terhadap EBITDA triwulan keempat yang disetahunkan adalah 5,0x, jauh di bawah pembatasan dari surat utang Perseroan yaitu rasio total pinjaman dengan menggunakan kurs lindung nilainya terhadap EBITDA triwulan terakhir yang disetahunkan untuk tidak lebih dari 6,25x. Perseroan masih memiliki ruang untuk penambahan pinjaman berdasarkan *covenant* yang disyaratkan oleh fasilitas bank dan surat utang Perseroan.

## Ekuitas

Tabel di bawah ini menyajikan rincian ekuitas Perseroan pada tanggal-tanggal sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2022	2021
Modal saham ditempatkan dan disetor penuh	453.140	453.140
Saham treasuri	(766.238)	(1.028.268)
Tambahan modal disetor - bersih	1.594.466	(641.456)
Penghasilan komprehensif lain	4.465.195	7.062.417
Saldo laba		
Cadangan wajib	63.100	62.600
Belum ditentukan penggunaannya	4.519.772	3.364.348
<b>Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>	<b>10.329.435</b>	<b>9.272.781</b>
<b>Kepentingan non-pengendali</b>	<b>590.948</b>	<b>516.457</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>10.920.383</b>	<b>9.789.238</b>

*Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021*

Jumlah ekuitas Perseroan pada 31 Desember 2022 meningkat sebesar 11,6% menjadi Rp10.920,4 miliar dibandingkan jumlah ekuitas pada 31 Desember 2021 sebesar Rp9.789,2 miliar. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh tambahan modal disetor - bersih dan kenaikan saldo laba pada tahun 2022. Kenaikan tersebut sebagian di-offset dengan penurunan penghasilan komprehensif lain.





## 8. LIKUIDITAS DAN SUMBER PENDANAAN

### Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Penggunaan utama dari kas Perseroan adalah untuk ekspansi portofolio *sites* dengan membangun *sites* baru, akuisisi perusahaan penyewaan menara dan portofolio *sites* mereka, dan penambahan kolokasi. Perseroan saat ini mengandalkan sumber likuiditas internal dari arus kas yang diperoleh dari kegiatan operasi dan sumber likuiditas eksternal dari pinjaman bank untuk mendanai kegiatan operasi, konstruksi *sites* baru dan akuisisi perusahaan penyewaan menara dan portofolio *sites* mereka. Perseroan juga dari waktu ke waktu melakukan penerbitan surat utang dan obligasi untuk pembayaran kembali pinjaman bank.

Perseroan berkeyakinan bahwa dengan memperhitungkan kas yang diharapkan akan dihasilkan dari kegiatan operasi dan sumber keuangan yang saat ini tersedia untuk Perseroan, Perseroan memiliki likuiditas yang cukup untuk kebutuhan modal kerja, kewajiban pembayaran utang dan kebutuhan akan kas lainnya untuk saat ini dan 12 bulan setelah Obligasi ini diterbitkan. Dalam hal sumber likuiditas internal Perseroan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, Perseroan memiliki fasilitas pinjaman yang belum ditarik sebesar US\$159,9 juta dan Rp3.675,2 miliar per 7 Juni 2023 dan dapat menerbitkan obligasi dari waktu ke waktu untuk memperoleh pembiayaan tambahan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

### Ikhtisar Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember

	2022	2021
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
Penerimaan kas dari pelanggan	6.364.547	6.554.602
Penerimaan jasa giro dan bunga deposito	13.785	12.156
Penerimaan lebih bayar pajak	559.217	-
Pembayaran kas ke karyawan	(298.164)	(280.723)
Pembayaran pajak penghasilan	(991.496)	(925.252)
Pembayaran kas ke pemasok	(838.550)	(895.501)
<b>Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi</b>	<b>4.809.339</b>	<b>4.465.282</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>		
Pembelian saham	-	(170.525)
Penambahan properti investasi	(2.777)	(4.683)
Penambahan aset hak guna	(562.796)	(1.051.509)
Penambahan aset tetap	(3.337.509)	(5.949.527)
<b>Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi</b>	<b>(3.903.082)</b>	<b>(7.176.244)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>		
Penerimaan pinjaman jangka panjang	10.829.630	19.368.698
Penerbitan surat utang	5.400.000	16.432.400
Penjualan saham treasuri	3.283.026	-
Penerimaan derivatif	1.212.797	343.283
Penerimaan dari pihak ketiga	6.000	237.141
Pembayaran liabilitas sewa - kendaraan	(10.811)	(8.113)
Pembayaran biaya penjualan saham treasuri	(19.852)	-
Saham treasuri	(766.238)	-
Pembayaran dividen - Perusahaan Anak	(27.266)	(14.246)
Pembayaran liabilitas sewa - aset hak guna	(132.802)	(59.238)
Pembayaran dividen	(815.652)	(692.194)
Pembayaran bunga dan biaya pinjaman jangka panjang dan surat utang	(1.679.940)	(2.170.670)
Pembayaran pinjaman jangka panjang dan surat utang	(17.871.446)	(31.048.672)



(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2022	2021
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(592.554)	2.388.389
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing pada kas dan setara kas	23.558	4.357
(Penurunan) Kenaikan bersih kas dan setara kas	337.261	(318.216)
Kas dan setara kas pada awal tahun	629.125	947.341
Kas dan setara kas pada akhir tahun	966.386	629.125

### Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi terdiri dari kas yang diterima dari pelanggan, pembayaran ke pemasok, pembayaran kepada karyawan, dan arus kas masuk dan keluar yang berasal dari penerimaan jasa giro dan bunga deposito, pembayaran pajak penghasilan, dan penerimaan lebih bayar pajak.

Pada tahun 2022, arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan mengalami kenaikan sebesar 7,7% menjadi Rp4.809,3 miliar pada tahun 2022 dari sebelumnya Rp4.465,3 miliar pada tahun 2021, terutama dikarenakan kenaikan penerimaan lebih bayar pajak sebesar 100,0% dibandingkan tahun 2021 sebesar nihil. Kenaikan tersebut sebagian di-offset dengan kenaikan pembayaran pajak penghasilan dan pembayaran kas ke pemasok.

### Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama terdiri dari penambahan aset tetap termasuk akuisisi *sites* telekomunikasi, penambahan properti investasi, pembelian saham dan dan penambahan aset hak guna.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp3.903,1 miliar pada tahun 2022 dan Rp7.176,2 miliar pada tahun 2021, yang terutama terdiri dari penambahan aset tetap, penambahan aset hak guna, pembelian saham, dan penambahan properti investasi.

### Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan

Pada tahun 2022, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan mengalami penurunan sebesar 124,8% menjadi Rp592,6 miliar dari sebelumnya diperoleh Rp2.388,4 miliar pada tahun 2021 terutama digunakan untuk pembayaran pinjaman jangka panjang dan surat utang sebesar Rp19.551,4 miliar dan pembayaran bunga dan biaya pinjaman jangka panjang dan surat utang sebesar Rp1.679,9 miliar. Pembayaran tersebut terutama diperoleh dari pencairan pinjaman jangka panjang sebesar Rp10.829,6 miliar dan penerbitan surat utang sebesar Rp5.400,0 miliar, penjualan dan pembelian saham treasury sebesar Rp2.496,9 miliar setelah dikurangi biaya penjualannya dan penerimaan derivatif sebesar Rp1.212,8 miliar. Perseroan juga melakukan pembayaran dividen sebesar Rp815,6 miliar dan Rp692,2 miliar masing-masing pada tahun 2022 dan 2021.

## 9. BELANJA MODAL

Secara historis Perseroan membiayai belanja modal melalui kombinasi antara arus kas operasi dan pinjaman jangka panjang dan jangka pendek. Belanja modal Perseroan meliputi antara lain penambahan aset tetap, terutama menara telekomunikasi, aset hak guna, properti investasi, dan pembelian saham. Perseroan mencatatkan biaya belanja modal ini dalam posisi keuangan Perseroan pada saat diselesaikannya pembangunan. Tabel di bawah ini menyajikan belanja modal historis terkait dengan aset tetap dan pembelian dan sewa atas lahan, untuk periode-periode sebagai berikut :



(dalam jutaan Rupiah)

	<b>Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember</b>	
	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Pembelian saham	-	170.525
Penambahan properti investasi	2.777	4.683
Penambahan aset hak guna	562.796	1.051.509
Penambahan aset tetap	3.337.509	5.949.527
<b>Total belanja modal</b>	<b>3.903.082</b>	<b>7.176.244</b>

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material. Perseroan juga tidak memiliki kewajiban untuk melakukan investasi barang modal dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan lingkungan hidup.

#### 10. RISIKO NILAI TUKAR MATA UANG ASING DAN RISIKO TINGKAT SUKU BUNGA

Perseroan menyadari adanya risiko pasar yang terjadi akibat fluktuasi mata uang Rupiah terhadap US Dolar, serta fluktuasi suku bunga pinjaman, sehingga Perseroan melakukan kontrak lindung nilai dengan tujuan melakukan aktivitas lindung nilai atas ketidakpastian fluktuasi suku bunga dan fluktuasi mata uang asing yang timbul dari arus kas pokok dan bunga pinjaman dari Perseroan.

##### **Risiko nilai tukar mata uang asing**

Perubahan nilai tukar telah, dan diperkirakan akan terus, memberikan pengaruh terhadap hasil usaha dan arus kas Perseroan. Beberapa pinjaman dan belanja modal Perseroan adalah, dan diperkirakan akan terus, didenominasi dengan mata uang Dolar Amerika Serikat. Sebagian besar pendapatan Perseroan adalah dalam mata uang Rupiah.

Pada saat ini, Perseroan melakukan aktivitas lindung nilai terhadap sebagian besar dari eksposur atas mata uang asing dikarenakan penerimaan dari pendapatan usaha tahunan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pembayaran belanja modal, pinjaman dan bunga dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Perseroan melakukan kontrak berjangka dan kontrak swap valuta asing dengan lembaga-lembaga keuangan internasional. Untuk kontrak berjangka, pada umumnya Perseroan membayar sejumlah premi dengan jumlah yang tetap.

Sebagai hasil dari kontrak tersebut, Perseroan yakin bahwa Perseroan telah mengurangi beberapa risiko nilai tukar mata uang asing, meskipun aktivitas lindung nilai yang dilakukan oleh Perseroan tidak mencakup seluruh eksposur mata uang asing dan terdapat kemungkinan bahwa perjanjian pengganti atas aktivitas lindung nilai tersebut tidak tersedia pada saat kontrak lindung nilai tersebut telah selesai.

Pada tanggal 31 Desember 2022, jika Rupiah menguat 1% terhadap Dolar Amerika Serikat namun seluruh variabel lainnya tetap, maka laba tahun berjalan lebih rendah sebesar Rp18,3 miliar terutama yang timbul sebagai akibat keuntungan selisih kurs atas penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

Jika bagian utang berbunga dalam valuta asing yang telah dilindung nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, maka saldo utang berbunga pada 31 Desember 2022 setelah dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	<b>Kurs laporan posisi keuangan</b>	<b>Kurs lindung nilai</b>
Pinjaman sindikasi	4.225.347	4.148.059
Pinjaman non-sindikasi	256.608	256.608
Surat utang	24.725.550	23.251.298
Liabilitas sewa - kendaraan	17.310	17.310
Dikurangi :		
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(247.943)	(247.943)
<b>Jumlah - bersih</b>	<b>28.976.872</b>	<b>27.425.332</b>



### **Risiko tingkat suku bunga**

Perseroan menghadapi risiko tingkat suku bunga yang disebabkan oleh perubahan tingkat suku bunga pinjaman yang dikenakan bunga. Suku bunga atas pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dapat berfluktuasi sepanjang periode pinjaman. Kebijakan keuangan memberikan panduan bahwa eksposur tingkat bunga harus diidentifikasi dan diminimalisasi/dinetralisasi secara tepat waktu.

Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga, Perseroan melakukan analisa margin dan pergerakan suku bunga, dan melakukan transaksi kontrak swap tingkat bunga untuk melindungi suku bunga pinjaman dalam mata uang asing terhadap risiko ketidakpastian tingkat suku bunga.

Pinjaman jangka panjang Perseroan kepada pihak ketiga setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp4.160,4 miliar.

### **11. KEWAJIBAN DARI IKATAN PERJANJIAN**

Tabel berikut di bawah ini menyajikan analisis mengenai liabilitas yang timbul dari ikatan perjanjian material yang dibuat oleh Perseroan per 31 Desember 2022 :

*(dalam jutaan Rupiah)*

	<b>Jumlah tercatat</b>	<b>Arus kas kontraktual</b>	<b>Kurang dari setahun</b>	<b>1-3 tahun</b>	<b>Lebih dari 3 tahun</b>
Utang usaha - pihak ketiga dan utang lain-lain	269.019	269.019	269.019	-	-
Beban masih harus dibayar	974.904	974.904	974.904	-	-
Liabilitas sewa	659.703	659.702	136.726	186.623	336.353
Pinjaman jangka panjang	4.366.834	4.481.955	206.400	1.544.653	2.730.902
Surat utang	24.592.728	24.725.550	5.969.610	7.744.240	11.011.700
<b>Jumlah</b>	<b>30.863.188</b>	<b>31.111.130</b>	<b>7.556.659</b>	<b>9.475.516</b>	<b>14.078.955</b>



## VI. FAKTOR RISIKO

*Investasi pada Obligasi Perseroan memiliki risiko. Investor harus memperhatikan informasi yang ada di dalam penjelasan mengenai risiko usaha ini dengan seksama, khususnya informasi mengenai risiko-risiko usaha berikut, sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada Obligasi Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga memengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Harga pasar atas Obligasi Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya. Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan (“forward looking statements”) yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur risiko dan ketidakpastian. Risiko-risiko yang diungkapkan berikut bukanlah satu-satunya yang memengaruhi Grup Tower Bersama.*

Berikut adalah risiko material yang disusun berdasarkan bobot risiko dan dimulai dari risiko utama yang dihadapi Grup Tower Bersama dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dapat memengaruhi kinerja maupun harga Obligasi baik secara langsung maupun tidak langsung :

### 1. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

#### ***Perseroan sebagai perusahaan holding bergantung pada pembayaran dari Perusahaan Anak***

Perseroan adalah perusahaan *holding* yang melakukan investasi atau penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada Perusahaan Anak, yang bergerak di bidang penyediaan jasa telekomunikasi, menara, jaringan fiber optik, dan pekerjaan telekomunikasi dan investasi. Oleh karena itu, ketersediaan dana bagi Perseroan untuk membayar dividen kepada para pemegang saham dan untuk membayar kembali utang bergantung pada dividen atau pembayaran kembali atas pinjaman yang diterima dari Perusahaan Anak. Apabila Perusahaan Anak menanggung utang atau kerugian, hal tersebut dapat mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan pembayaran dividen atau pembayaran lainnya kepada Perseroan. Selain itu, persyaratan pembatasan dalam fasilitas kredit bank atau perjanjian lain yang ditandatangani oleh Perseroan atau Perusahaan Anak di masa mendatang juga dapat membatasi kemampuan Perusahaan Anak untuk melakukan pembayaran kembali utang atau mengumumkan dividen kepada Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk menerima pembayaran tersebut. Sebagai akibatnya, kemampuan Perseroan untuk membayar dividen dan membayar kembali utang akan menjadi terbatas. Lebih lanjut, undang-undang di Indonesia mewajibkan bahwa suatu perusahaan baru dapat mengumumkan dividen dalam tahun manapun jika telah menyisihkan sebagian keuntungannya untuk dana cadangan wajib dan memiliki laba ditahan yang positif. Terjadinya salah satu kejadian tersebut di atas dapat berdampak terhadap kemampuan Perseroan sebagai perusahaan *holding* untuk membayar dividen kepada pemegang saham dan membayar kembali utang Perseroan, termasuk kemampuan Perseroan membayar Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi.

### 2. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN GRUP TOWER BERSAMA

#### ***Pendapatan Grup Tower Bersama bergantung pada pendapatan sewa jangka panjang dari pelanggan***

Dikarenakan oleh panjangnya jangka waktu perjanjian sewa dengan para pelanggan (biasanya 10 tahun), maka Grup Tower Bersama, seperti halnya semua perusahaan menara lainnya dalam industri ini, sangat bergantung pada kekuatan finansial para pelanggan. Meskipun industri telekomunikasi Indonesia sangat kompetitif, dengan 4 (empat) operator telekomunikasi yang ada saat ini, Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa hanya sebagian kecil dari para operator telekomunikasi tersebut yang berhasil mencatatkan keuntungan (*profitable*). Banyak operator telekomunikasi memiliki tingkat utang yang tinggi serta bergantung pada kegiatan penggalangan dana untuk membiayai kegiatan operasional dan kebutuhan belanja modal mereka. Pelemahan ekonomi dan/atau gangguan di pasar utang dan finansial dapat menyebabkan pendanaan menjadi lebih sulit dan mahal. Apabila



pelanggan atau calon pelanggan menara telekomunikasi Grup Tower Bersama tidak mampu menggalang dana yang memadai untuk mendanai rencana bisnis mereka, maka mereka akan mengurangi belanja modalnya. Hal ini akan berdampak secara material dan merugikan terhadap permintaan *sites* telekomunikasi milik Grup Tower Bersama. Apabila satu atau lebih pelanggan signifikan menara Grup Tower Bersama mengalami kesulitan keuangan sebagai akibat pelemahan ekonomi berkepanjangan atau yang lainnya, maka hal itu dapat menyebabkan adanya piutang usaha yang tidak dapat ditagih dari pelanggan tersebut dan hal tersebut berdampak secara material dan merugikan pada bisnis pelanggan Grup Tower Bersama dalam jangka panjang, yang pada akhirnya pada kualitas pembayaran pelanggan.

### ***Sejumlah besar pendapatan Grup Tower Bersama berasal hanya dari beberapa operator telekomunikasi***

Sebagian besar pendapatan operasional Grup Tower Bersama berasal hanya dari beberapa operator telekomunikasi. Sekitar 85,1% dan 72,9% dari total pendapatan Grup Tower Bersama masing-masing pada tahun 2022 dan 2021 berasal dari Telkomsel, IOH dan XL Axiata. Apabila salah satu pelanggan ini tidak bersedia atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian sewa menara telekomunikasi, maka hal tersebut dapat berdampak secara material bahkan merugikan terhadap pendapatan, kinerja operasi, kondisi keuangan dan likuiditas Grup Tower Bersama. Grup Tower Bersama mungkin saja mengalami perselisihan dengan para pelanggan yang dapat mengarah kepada pengakhiran perjanjian sewa antara Grup Tower Bersama dengan para pelanggan atau perubahan yang material atas ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut. Terjadinya salah satu hal-hal tersebut dapat berdampak secara material bahkan merugikan bisnis, kinerja operasi, kondisi keuangan dan likuiditas Grup Tower Bersama. Apabila Grup Tower Bersama terpaksa menyelesaikan perselisihan tersebut melalui proses pengadilan, maka hubungan Grup Tower Bersama dengan para pelanggan dapat berakhir atau rusak, yang mana hal tersebut dapat mengarah pada penurunan pendapatan atau kenaikan biaya dan mungkin menyebabkan kerugian terhadap bisnis, kondisi keuangan dan likuiditas, serta hasil operasi Grup Tower Bersama. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa pelanggan Grup Tower Bersama akan memperpanjang perjanjian sewa menara telekomunikasi pada saat perjanjian-perjanjian tersebut berakhir. Tidak ada jaminan bahwa Grup Tower Bersama dapat dengan sukses memperoleh ketentuan yang menguntungkan ketika bernegosiasi dengan para pelanggan atas pembaruan perjanjian sewa menara telekomunikasi. Ketidakmampuan memperoleh perpanjangan atas perjanjian sewa menara telekomunikasi yang telah ada atau ketidakmampuan memperoleh ketentuan yang menguntungkan dalam negosiasi perpanjangan perjanjian dapat menyebabkan turunnya pendapatan Grup Tower Bersama dan pada akhirnya berpengaruh terhadap kemampuan Perseroan membayar Obligasi.

### ***Penggabungan usaha atau konsolidasi dapat terjadi di antara para pelanggan Grup Tower Bersama***

Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa persaingan harga di antara para operator telekomunikasi terbesar Indonesia akan terus berlanjut. Hal ini akan meningkatkan jumlah pelanggan, menit pemakaian dari pelanggan dan kebutuhan akan kapasitas jaringan. Grup Tower Bersama juga percaya bahwa dengan tingkat harga saat ini dan juga kebutuhan belanja modal yang besar di kalangan operator telekomunikasi seluler, hanya operator telekomunikasi dengan skala operasi yang besar dalam hal kapasitas jaringan maupun total jumlah pelanggan yang akan tetap bertahan. Grup Tower Bersama percaya bahwa, menimbang banyaknya jumlah operator telekomunikasi di Indonesia, dan juga keunggulan skala ekonomis yang dinikmati oleh operator-operator besar, konsolidasi dapat terjadi di antara operator-operator telekomunikasi yang lebih kecil (beberapa di antaranya merupakan pelanggan Grup Tower Bersama) guna meraih skala yang diperlukan bagi pertumbuhan yang menguntungkan dalam jangka panjang di pasar persaingan industri ini.

Konsolidasi secara signifikan di antara pelanggan-pelanggan Grup Tower Bersama dapat menyebabkan pengurangan BTS dan/atau kebutuhan kolokasi bagi perusahaan-perusahaan yang berkonsolidasi, karena jumlah BTS pada lokasi tertentu dapat menjadi berlebih atau *tower space* tambahan dapat diperoleh dari hasil konsolidasi tersebut. Selain itu, konsolidasi dapat menyebabkan pengurangan belanja modal di masa depan secara keseluruhan, apabila perusahaan-perusahaan yang melakukan konsolidasi memiliki rencana ekspansi yang sama. Sebagai akibatnya, para pelanggan Grup Tower Bersama dapat memutuskan untuk tidak memperbaharui sewa mereka dengan Grup Tower Bersama dikarenakan terjadinya konsolidasi tersebut. Apabila jumlah pengakhiran yang signifikan terjadi akibat konsolidasi industri, maka hal tersebut dapat berdampak material terhadap pendapatan dan arus kas Grup Tower Bersama, yang selanjutnya membawa efek yang merugikan bisnis, kondisi keuangan, kinerja operasional dan likuiditas Grup Tower Bersama.



### **Persaingan dalam industri penyewaan menara telekomunikasi dapat menyebabkan tekanan pada penentuan harga sewa**

Persaingan dalam industri penyewaan menara telekomunikasi sangat tinggi dan pelanggan Grup Tower Bersama memiliki alternatif-alternatif lain dalam menyewa *tower space* termasuk diantaranya :

- operator telekomunikasi seperti Telkomsel, XL Axiata dan IOH memiliki portofolio *sites* telekomunikasi sendiri dan juga menyewakan *tower space* kepada pihak ketiga;
- perusahaan menara telekomunikasi yang mengoperasikan portofolio *sites* telekomunikasi yang besar, utamanya PT Solusi Tunas Pratama Tbk. dan PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (“**Protelindo**”) dan Mitratel;
- sejumlah perusahaan menara telekomunikasi lainnya dalam jumlah yang signifikan yang mengoperasikan portofolio *sites* dalam skala lebih kecil; dan
- pada kondisi tertentu, pemilik lokasi alternatif seperti lantai teratas bangunan, jaringan IBS baik di dalam atau luar ruangan, papan iklan dan menara transmisi listrik.

Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa persaingan usaha dalam industri penyewaan menara telekomunikasi di Indonesia sangat bergantung pada lokasi menara, hubungan dengan operator telekomunikasi serta kualitas dan tinggi menara. Di samping itu, persaingan usaha juga dipengaruhi oleh besarnya portofolio menara, *pricing*, manajemen operasional serta jasa layanan tambahan bagi pelanggan. Beberapa pesaing Grup Tower Bersama, seperti operator telekomunikasi selular nasional yang melakukan kolokasi pada menaranya merupakan pesaing dengan kemampuan keuangan yang lebih kuat dibandingkan Grup Tower Bersama. Sebagai tambahan, beberapa pesaing Grup Tower Bersama juga menerapkan kriteria imbal hasil investasi yang lebih rendah dibanding Grup Tower Bersama.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, masing-masing sekitar 85,1% dan 72,9% dari total pendapatan Grup Tower Bersama berasal dari Telkomsel, IOH, dan XL Axiata. Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa operator telekomunikasi besar cenderung untuk tidak menyewakan menara telekomunikasi secara ekstensif kepada pesaing langsung. Perubahan dalam kebijakan ini atau kejadian lain, termasuk perubahan peraturan, untuk meningkatkan penambahan kolokasi di antara para operator telekomunikasi besar Indonesia, dapat berakibat pada meningkatnya persaingan untuk kolokasi.

Kondisi persaingan yang semakin tinggi dapat secara negatif memengaruhi harga sewa menara dan pendapatan Grup Tower Bersama serta menyebabkan pelanggan yang telah ada tidak memperpanjang masa sewa menara ataupun pelanggan baru akan menyewa menara dari kompetitor. Grup Tower Bersama juga menghadapi persaingan dalam hal mengidentifikasi dan melaksanakan akuisisi aset berupa menara khususnya aset menara dengan kualitas yang bagus dan portofolio *sites* yang besar, yang dapat mengakibatkan akuisisi menara menjadi lebih mahal. Setiap faktor-faktor risiko tersebut dapat berdampak secara material bahkan merugikan bisnis, kondisi keuangan dan likuiditas serta kinerja operasional Grup Tower Bersama.

### **Grup Tower Bersama mungkin tidak berhasil menjalankan strategi pertumbuhan**

Strategi Grup Tower Bersama untuk mencapai pertumbuhan usaha terbagi atas tiga hal, yaitu pertumbuhan organik melalui ekspansi dari peningkatan rasio kolokasi, pembangunan menara tambahan berdasarkan pesanan khusus (*build-to-suit*) dari operator telekomunikasi Indonesia serta pertumbuhan melalui akuisisi portofolio *sites* dari perusahaan penyewaan menara telekomunikasi dan dari operator telekomunikasi. Sebagai contoh, Grup Tower Bersama melalui TB telah menyelesaikan transaksi jual beli dan pengalihan 3.000 menara telekomunikasi milik IBST pada bulan April 2021.

Kemampuan Grup Tower Bersama untuk menjalankan strategi pertumbuhan organik akan bergantung pada berbagai macam faktor, termasuk kemampuan Grup Tower Bersama untuk mendapatkan pesanan *sites build-to-suit* dan kolokasi, kemudian menyelesaikannya secara tepat waktu dan dengan cara yang efektif dalam hal biaya, kemampuan Grup Tower Bersama untuk menjaga hubungan dengan regulator yang berwenang dan kemampuan Grup Tower Bersama untuk mendapatkan perizinan dari pihak berwenang. Tidak ada jaminan bahwa Grup Tower Bersama akan dapat terus melanjutkan ekspansi portofolio *sites* secara organik pada basis yang layak secara komersial dalam waktu yang tepat. Kegagalan untuk mencapai hal tersebut dapat berdampak buruk secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional serta likuiditas Grup Tower Bersama.





Kemampuan Grup Tower Bersama untuk melanjutkan pertumbuhan melalui akuisisi akan bergantung pada sejumlah faktor. Grup Tower Bersama harus dapat mengidentifikasi kandidat akuisisi yang cocok dan tersedia pada harga yang sesuai, mencapai kesepakatan dengan kandidat akuisisi dan pemegang sahamnya pada syarat dan ketentuan komersial yang wajar dan juga mendapatkan pendanaan untuk menyelesaikan akuisisi atau investasi yang lebih besar. Grup Tower Bersama terus menerus melakukan penelaahan atas kualitas, risiko dan kelayakan dari transaksi yang berpotensi dan mencari peluang akuisisi. Upaya-upaya untuk mencari dan melakukan penelaahan tersebut, dan diskusi terkait hal tersebut dengan pihak ketiga, dapat menghasilkan suatu akuisisi di masa mendatang atau mungkin tidak sama sekali.

Kemampuan Grup Tower Bersama untuk tumbuh melalui akuisisi lebih lanjut juga bergantung pada sejumlah faktor, termasuk kesediaan operator-operator telekomunikasi besar Indonesia (beberapa di antaranya merupakan pelanggan utama Grup Tower Bersama) untuk terlibat dengan Grup Tower Bersama dalam transaksi penjualan dan sewa kembali (*sale and leaseback*) portofolio *sites* mereka, dengan ketentuan yang memenuhi kriteria pengembalian investasi Grup Tower Bersama. Manfaat atau hasil yang diinginkan dari akuisisi bisa memerlukan waktu yang cukup lama dan tidak ada jaminan bahwa akuisisi tertentu akan membawa manfaat atau hasil yang diinginkan. Selain itu, transaksi akuisisi atau investasi dapat menghadapkan Grup Tower Bersama pada kewajiban atau risiko yang tidak diketahui, tanpa adanya ganti rugi yang memadai ataupun perlindungan hukum yang memadai. Tidak ada jaminan bahwa Grup Tower Bersama mampu terus memperbanyak portofolio *sites* atas dasar yang layak secara komersial ataupun dalam waktu yang tepat, atau mungkin tidak sama sekali.

Strategi akuisisi Grup Tower Bersama juga akan membutuhkan waktu dan perhatian manajemen Grup Tower Bersama secara signifikan. Selain mengintegrasikan, melatih dan mengelola tenaga kerja, Grup Tower Bersama perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kontrol manajemen dan keuangan, sistem informasi dan prosedur-prosedur pelaporan, termasuk untuk bisnis yang diakuisisi. Risiko-risiko tambahan terkait akuisisi termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut :

- proses integrasi yang sulit atas kegiatan operasional dari bisnis yang diakuisisi ke dalam organisasi Grup Tower Bersama;
- manajemen, informasi, dan sistem akuntansi dari perusahaan yang diakuisisi bisa saja berbeda dari, serta tidak sesuai dengan, sistem yang dimiliki oleh Grup Tower Bersama dan maka dari itu perlu waktu dan usaha lebih untuk proses integrasi tersebut;
- manajemen Perseroan harus mendedikasikan perhatiannya untuk menyatukan bisnis yang diakuisisi, yang dapat mengalihkan perhatiannya dari bisnis yang telah berjalan;
- kegagalan dalam mematuhi peraturan yang ada setelah dilakukannya akuisisi terhadap suatu bisnis dapat berdampak pada keharusan untuk membongkar portofolio *sites* telekomunikasi dari bisnis yang diakuisisi; dan
- Grup Tower Bersama dapat kehilangan pegawai penting Grup Tower Bersama sendiri atau pegawai penting dari bisnis yang diakuisisi.

Penyelesaian hal-hal tersebut di atas dapat memakan waktu dan biaya.

Akuisisi juga dapat menimbulkan pembayaran imbalan kontinjensi, yang mungkin lebih besar daripada dampak yang dihasilkan dari akuisisi tersebut terhadap pendapatan Grup Tower Bersama di masa mendatang. Sebagai contoh, sesuai dengan *Asset Purchase Agreement* yang ditandatangani oleh Perseroan dengan Indosat pada bulan Februari 2012 sehubungan dengan pembelian 2.500 menara dari Indosat, apabila pendapatan kolokasi Perusahaan Anak melebihi target tertentu untuk setiap tahun yang berakhir pada atau sebelum 31 Desember 2022, Perusahaan Anak diwajibkan membayarkan sejumlah kompensasi kepada Indosat. Nilai kompensasi agregat maksimum adalah US\$112,5 juta.

Selain itu, strategi akuisisi Grup Tower Bersama juga dapat mengharuskan Grup Tower Bersama membelanjakan cadangan dana Grup Tower Bersama dalam jumlah yang besar, mendatangkan utang yang besar dan/atau mengeluarkan sejumlah besar ekuitas baru, yang dapat merugikan kondisi keuangan dan likuiditas Grup Tower Bersama, serta menyebabkan dilusi yang signifikan atas kepemilikan para pemegang saham yang ada saat ini. Dampak dilusi ini juga dapat membatasi kemampuan Grup Tower Bersama untuk menyempurnakan proses akuisisi lebih lanjut. Grup Tower Bersama juga mungkin mengalami kerugian terkait dengan penurunan nilai *goodwill* dan aset tak berwujud lainnya pada atau setelah akuisisi. Tidak ada jaminan bahwa Grup Tower Bersama mampu



secara efisien dan efektif mengelola penggabungan atau pertumbuhan operasional Grup Tower Bersama pasca akuisisi, dan kegagalan Grup Tower Bersama melakukan hal itu dapat berdampak material bahkan merugikan bisnis, kondisi keuangan, kinerja operasional Grup Tower Bersama.

### **Grup Tower Bersama memiliki utang dalam jumlah besar**

Grup Tower Bersama memiliki utang dalam jumlah besar. Sampai dengan 31 Desember 2022, pinjaman bersih Grup Tower Bersama, di mana bagian pinjaman dalam Dolar AS yang telah dilindungi nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, tercatat sebesar Rp27.673,3 miliar. Kemampuan Grup Tower Bersama dalam menjalankan rencana bisnis terutama strategi akuisisi Grup Tower Bersama bergantung pada kemampuan mendapatkan pendanaan eksternal, termasuk pembiayaan utang dan ekuitas. Kemampuan Grup Tower Bersama memperoleh pembiayaan ekuitas tambahan akan tergantung pada risiko pasar yang berlaku saat itu. Kemampuan Grup Tower Bersama mengakses pembiayaan utang untuk kepentingan akuisisi dan pembiayaan kembali utang yang jatuh tempo bergantung pada banyak faktor, yang beberapa di antaranya berada di luar kendali Grup Tower Bersama. Sebagai contoh, ketidakstabilan politik, penurunan ekonomi, kesulitan likuiditas Rupiah dan Dolar AS di perbankan ataupun pasar utang, kerusuhan sosial atau perubahan di lingkup peraturan, hal ini dapat menaikkan biaya pinjaman Grup Tower Bersama atau membatasi kemampuan Grup Tower Bersama untuk mendapatkan pembiayaan utang. Grup Tower Bersama tidak dapat menjamin bahwa Grup Tower Bersama akan selalu mampu memperoleh pembiayaan dengan persyaratan yang layak, jika memang ada. Ketidakmampuan Grup Tower Bersama mendapatkan pembiayaan utang dari bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan serta pasar modal dapat berdampak negatif pada kemampuan Grup Tower Bersama untuk menjalankan strategi-strategi pertumbuhan atau membiayai kembali utang yang telah jatuh tempo.

Apabila Grup Tower Bersama tidak dapat membiayai kembali atau melakukan negosiasi utangnya, tidak ada jaminan bahwa Grup Tower Bersama akan dapat menghasilkan arus kas yang cukup dari kegiatan operasional atau memperoleh modal yang cukup untuk membayar utang atau mendanai rencana belanja modal. Dalam kondisi tersebut, Grup Tower Bersama mungkin menghadapi masalah likuiditas yang substansial dan hal tersebut dapat mewajibkan Grup Tower Bersama untuk menerbitkan efek bersifat ekuitas atau efek yang dapat dikonversi menjadi ekuitas atau menjual sebagian asetnya guna memenuhi kewajiban pembayaran utang. Kegagalan untuk mendapatkan pembiayaan kembali atas utang pada saat diperlukan dapat mengakibatkan Grup Tower Bersama dianggap gagal bayar atas utang-utang tersebut dan membatasi kemampuan Perseroan secara material untuk melakukan pelunasan atas bagian dari Obligasi yang jatuh tempo. Dengan asumsi Grup Tower Bersama dapat memenuhi rasio keuangan tertentu, Grup Tower Bersama memiliki kemampuan untuk menarik tambahan utang dari fasilitas utang yang ada, dan setiap tambahan utang dapat memperburuk risiko yang telah diuraikan di atas.

Selain itu, sebagai akibat dari utang Grup Tower Bersama yang besar :

- Grup Tower Bersama dapat menjadi lebih rentan terhadap kondisi ekonomi dan industri yang buruk;
- Grup Tower Bersama dapat menghadapi kesulitan dalam memperoleh pendanaan tambahan untuk membiayai investasi dan kebutuhan umum perusahaan lainnya atau membiayai kembali utang Grup Tower Bersama yang telah ada;
- Perseroan dapat mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya terkait dengan Obligasi;
- Grup Tower Bersama telah atau akan diwajibkan untuk menyisihkan sebagian besar arus kas dari operasi untuk pembayaran pokok dan bunga utang sehingga mengurangi ketersediaan arus kas untuk mendanai proyek lain-lain, termasuk investasi;
- Grup Tower Bersama akan memiliki fleksibilitas terbatas dalam merencanakan atau merespon perubahan dalam bisnis dan industri sewa menara telekomunikasi;
- Grup Tower Bersama akan memiliki keunggulan kompetitif yang lebih rendah dibandingkan pesaing dengan tingkat utang yang lebih rendah;
- Grup Tower Bersama dapat diharuskan untuk menerbitkan efek bersifat ekuitas atau efek yang dapat dikonversi menjadi ekuitas atau menjual sebagian asetnya, dengan ketentuan yang tidak menguntungkan, guna memenuhi kewajiban pembayaran; dan
- Grup Tower Bersama akan memiliki kemampuan terbatas untuk mengambil keuntungan dari peluang bisnis yang strategis, termasuk pengembangan infrastruktur *wireless* serta penggabungan usaha dan akuisisi.



Saat ini, Perseroan telah menerbitkan surat utang yang membatasi kemampuan Perseroan untuk memperoleh tambahan utang, membayar dividen, memberikan jaminan, menjual aset maupun terlibat dalam penggabungan usaha dan akuisisi. Perusahaan Anak, sesuai dengan ketentuan instrumen utangnya, juga diwajibkan untuk menjaga rasio keuangan tertentu. Kemampuan Grup Tower Bersama dalam memenuhi pembatasan rasio keuangan berdasarkan instrumen ini dan memenuhi kewajiban utangnya akan tergantung pada kinerja operasional Grup Tower Bersama di masa depan. Apabila Grup Tower Bersama gagal untuk memenuhi pembatasan-pembatasan yang telah ada, Grup Tower Bersama akan dinyatakan gagal bayar berdasarkan instrumen tersebut, yang dalam kondisi tertentu dapat mengakibatkan sebagian besar pinjaman jangka panjang Grup Tower Bersama, termasuk surat utang dan Obligasi, menjadi jatuh tempo. Apabila Perusahaan Anak dalam Grup Tower Bersama yang telah beroperasi mengalami gagal bayar atas utang-utangnya, agen jaminan dalam fasilitas pinjaman dan fasilitas pinjaman *revolving* akan berusaha untuk menyita jaminan atas utang tersebut, dan hal tersebut dapat mengakibatkan Grup Tower Bersama kehilangan pengendalian atas aset yang dijamin dan pendapatan terkait dengan aset tersebut yang dapat menimbulkan dampak negatif yang merugikan bagi Grup Tower Bersama.

### ***Grup Tower Bersama mungkin mencatatkan tambahan utang***

Grup Tower Bersama mungkin mencatatkan tambahan utang yang dapat meningkatkan risiko atas utang yang ada saat ini. Apabila Grup Tower Bersama mendapatkan utang dengan jaminan, kreditur yang relevan secara efektif berada pada posisi senior terhadap Obligasi sehubungan dengan aset yang dijamin terhadap utang tersebut. Apabila Grup Tower Bersama mendapatkan tambahan utang pada posisi setara dengan Obligasi, kreditur yang relevan akan memiliki hak *pari passu* terhadap kekayaan Grup Tower Bersama yang akan dibagikan dalam hal Grup Tower Bersama mengalami keadaan bangkrut, likuidasi, reorganisasi, pembubaran atau lainnya. Hal ini dapat mengurangi nilai kekayaan yang dapat dibagikan kepada Pemegang Obligasi. Pembatasan dalam perjanjian yang mengatur mengenai pinjaman Grup Tower Bersama di masa mendatang dapat membatasi kegiatan usaha Grup Tower Bersama secara material, termasuk kemampuan Grup Tower Bersama untuk memperoleh utang, membayar dividen, melakukan investasi dan pembayaran tertentu, dan menjaminkan atau menjual aset. Selain itu, Grup Tower Bersama dapat gagal memenuhi pembatasan keuangan yang terdapat dalam perjanjian terkait utang yang diperoleh di masa mendatang dalam hal hasil kegiatan usaha tidak memenuhi syarat dan kondisi yang dipersyaratkan, termasuk rasio keuangan. Kelalaian yang terjadi pada salah satu instrumen utang dapat juga memicu *cross default* instrumen utang lainnya. Terjadinya salah satu kejadian kelalaian terhadap salah satu instrumen utang, apabila tidak diperbaiki atau dikesampingkan, dapat berdampak merugikan terhadap Grup Tower Bersama.

### ***Beban keuangan yang tinggi dapat menekan margin Grup Tower Bersama***

Sebagian pendanaan utang Grup Tower Bersama dipengaruhi oleh suku bunga mengambang (*floating*), yang telah dan akan terus menyebabkan beban keuangan - bunga Grup Tower Bersama berfluktuasi seiring dengan perubahan tingkat suku bunga. Sebagai tambahan, pendanaan utang Grup Tower Bersama yang dipengaruhi oleh suku bunga mengambang memiliki jangka waktu yang lebih pendek daripada perjanjian sewa dengan pelanggan sehingga mengakibatkan Grup Tower Bersama terkena risiko pembiayaan kembali dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. Porsi beban keuangan terhadap pendapatan (meliputi beban keuangan – pinjaman dan surat utang jangka panjang dan beban keuangan - lainnya) tercatat sebesar 28,0% dan 34,6% masing-masing pada tahun 2022 dan 2021. Grup Tower Bersama tidak dapat menjamin bahwa suku bunga mengambang dari utang Grup Tower Bersama tidak akan meningkat di masa depan sehingga tidak akan meningkatkan beban bunga, yang dapat menurunkan margin dan berdampak merugikan secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan dan likuiditas Grup Tower Bersama.

### ***Kenaikan beban operasi dapat mengurangi margin operasi***

Margin EBITDA Grup Tower Bersama adalah sebesar 86,8% dan 87,9% masing-masing pada tahun 2022 dan 2021. Grup Tower Bersama tidak dapat menjamin bahwa beban operasi tidak akan meningkat di masa depan atau Grup Tower Bersama akan dapat meneruskan kenaikan pada beban operasi tersebut kepada pelanggan-pelanggan Grup Tower Bersama. Kenaikan beban operasi akan mengurangi margin operasi Grup Tower Bersama serta berdampak merugikan secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan dan likuiditas, serta kinerja operasional Grup Tower Bersama.



### **Menara yang dioperasikan Grup Tower Bersama di beberapa lokasi tidak memiliki izin**

Sebelum dilakukan pembangunan menara telekomunikasi, Grup Tower Bersama membutuhkan persetujuan dari setiap rumah tangga di lingkungan masyarakat sekitar yang seluruhnya maupun sebagian berada dalam radius yang sama dengan ketinggian menara dari lokasi menara. Setelah memperoleh seluruh persetujuan rumah tangga yang diperlukan, permohonan diajukan kepada pejabat daerah setempat untuk mendapatkan izin dan persetujuan terpisah untuk pembangunan menara. Meskipun Grup Tower Bersama secara umum mengusahakan untuk mendapatkan persetujuan rumah tangga dan masyarakat setempat yang diperlukan sebelum memulai pembangunan menara, namun sesuai dengan apa yang Grup Tower Bersama percayai sebagai praktek lazim di Indonesia dan menimbang lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memproses permohonan persetujuan-persetujuan dan izin-izin dari pejabat daerah setempat, termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau izin untuk mendirikan dan mengoperasikan menara telekomunikasi (Izin Mendirikan Bangunan Menara atau IMBM), dan izin lainnya, terkadang Grup Tower Bersama melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan menara serta pemasangan BTS bagi para pelanggan Grup Tower Bersama sebelum seluruh persetujuan-persetujuan dan izin-izin yang diperlukan diperoleh dari otoritas-otoritas lokal.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, sebanyak 1.828 *sites* menara telekomunikasi belum memiliki IMB atau IMBM. Dari jumlah tersebut, Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa sebanyak 291 *sites* menara telekomunikasi tidak membutuhkan IMB atau IMBM dikarenakan menara telekomunikasi tersebut berjenis menara *rooftop* dengan ketinggian enam meter atau kurang. Sisanya, Grup Tower Bersama telah menyampaikan (i) permohonan IMB atau IMBM yang saat ini sedang dalam proses peninjauan oleh pejabat berwenang dan (ii) aplikasi untuk memperoleh izin yang dipersyaratkan sebelum permohonan IMB atau IMBM, seluruhnya sebanyak 1.528 *sites* menara telekomunikasi; dan (iii) Grup Tower Bersama belum menyampaikan permohonan untuk sejumlah 9 (sembilan) *sites* telekomunikasi, mewakili sekitar 0,04% dari jumlah *sites* menara telekomunikasi.

Tidak ada jaminan bahwa pejabat berwenang akan menerbitkan izin atau persetujuan yang diperlukan atau izin tersebut akan diterbitkan pada waktunya atau seperti yang diharapkan. Apabila persetujuan-persetujuan dan izin-izin tersebut tidak diperoleh, pejabat daerah setempat dapat mengeluarkan perintah agar menara-menara Grup Tower Bersama dibongkar atau dipindahkan, dan Grup Tower Bersama dapat dilarang untuk mendirikan menara telekomunikasi di wilayah tersebut dalam waktu sampai dengan satu tahun. Pada tahun 2009, salah satu Perusahaan Anak diperintahkan oleh pejabat daerah setempat di Badung, Bali untuk membongkar lima menara yang didirikan dan disewakan sebelum diterbitkannya IMB atau IMBM. Perusahaan Anak tersebut berhasil mengajukan keberatan atas keputusan tersebut yang akhirnya dimenangkan oleh pejabat daerah Badung di Pengadilan Tata Usaha Negara di Denpasar, Bali. Perusahaan Anak kemudian berhasil melakukan proses naik banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Surabaya, yang membatalkan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Denpasar, Bali. Namun, keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Surabaya kemudian dibatalkan oleh keputusan Mahkamah Agung dan Perusahaan Anak diperintahkan untuk membongkar 5 (lima) menara telekomunikasi. Peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri memperbolehkan Grup Tower Bersama menyampaikan permohonan IMB baru untuk *sites* menara telekomunikasi yang belum memiliki IMB atau IMBM. Grup Tower Bersama tidak dapat menjamin bahwa pejabat berwenang setempat tidak akan mengharuskan Grup Tower Bersama untuk membongkar menara telekomunikasi atau membebankan penalti lain pada Grup Tower Bersama, seperti teguran tertulis, peringatan keras dan denda, untuk ketidakpatuhan dalam memenuhi persyaratan izin dan persetujuan.

Selain IMB atau IMBM, beberapa kotamadya dan kabupaten tertentu mewajibkan menara telekomunikasi untuk memiliki Izin Operasional Menara ("IOM"). Peraturan daerah tersebut menetapkan berbagai sanksi untuk pemanfaatan menara tanpa IOM yang sebagian besar bersifat administratif, meskipun beberapa peraturan daerah yang diterbitkan oleh kotamadya dan kabupaten tertentu memberlakukan sanksi pembongkaran menara dan/atau sanksi pidana dalam hal terjadi pelanggaran. Dikarenakan peraturan daerah tidak dipublikasi secara rutin dan akurat di tingkat nasional kepada masyarakat tepat pada waktunya, terdapat kesulitan untuk mengikuti pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut. Meskipun jumlah kotamadya dan kabupaten yang telah melaksanakan peraturan tersebut cukup terbatas, tidak ada jaminan bahwa pemerintah daerah lainnya di masa mendatang tidak akan memberlakukan kewajiban yang sama untuk bisnis pengoperasian menara dalam wilayah yurisdiksi mereka. Sejauh pengetahuan Grup Tower Bersama, peraturan daerah yang mewajibkan IOM tersebut belum diberlakukan oleh kotamadya dan kabupaten terkait, tidak ada menara yang dibongkar, tidak ada penalti yang diberikan pada operator menara yang beroperasi di bawah peraturan daerah tersebut, dan tidak ada kotamadya atau kabupaten yang mewajibkan operator menara untuk memiliki IOM tersebut. Meskipun Grup Tower Bersama



memiliki IOM untuk beberapa menara telekomunikasi dan dalam proses melakukan permohonan IOM untuk menara-menara telekomunikasi lainnya, Grup Tower Bersama tidak dapat menjamin bahwa kotamadya atau kabupaten yang relevan tidak akan secara tegas memberlakukan peraturan daerah tersebut terhadap *sites* menara telekomunikasi Perusahaan Anak yang membutuhkan IOM, mengharuskan Grup Tower Bersama untuk membongkar dan/atau memberikan penalti lain di masa mendatang untuk menara yang tidak memiliki IOM atau memberlakukan atau menerapkan peraturan baru dengan ketentuan-ketentuan yang lebih ketat atau konsekuensi yang lebih berat untuk pelanggaran.

Ketidakmampuan Grup Tower Bersama untuk memperoleh dan/atau mempertahankan seluruh persetujuan dan perizinan tersebut dapat dianggap pelanggaran kewajiban Grup Tower Bersama berdasarkan perjanjian sewa sehingga pelanggan berhak untuk mengakhiri perjanjian jika pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam kurun waktu tertentu. Apabila Grup Tower Bersama diharuskan untuk merelokasi menara-menara dalam jumlah yang material dan tidak dapat menemukan lokasi-lokasi pengganti yang dapat diterima oleh para pelanggan dalam jumlah yang material, atau salah satu dari perjanjian sewa yang material tersebut diakhiri, maka hal tersebut dapat berdampak secara material bahkan merugikan pendapatan dan arus kas Grup Tower Bersama, yang pada akhirnya dapat berdampak secara material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional serta likuiditas Grup Tower Bersama.

#### ***Grup Tower Bersama mungkin mendapat penentangan dari masyarakat setempat di beberapa lokasi menara***

Grup Tower Bersama telah, dan mungkin di masa depan, mengalami penentangan dari masyarakat setempat terhadap bangunan milik Grup Tower Bersama di beberapa lokasi karena berbagai alasan, termasuk kekhawatiran mengenai dugaan risiko kesehatan. Akibat penentangan dari masyarakat setempat tersebut, Grup Tower Bersama dapat diperintahkan oleh pejabat daerah setempat untuk membongkar dan merelokasi menara dalam jumlah yang material. Apabila Grup Tower Bersama diharuskan untuk merelokasi sejumlah besar menara dan tidak bisa menemukan lokasi-lokasi pengganti yang dapat diterima oleh para pelanggan, hal ini dapat menimbulkan dampak secara material bahkan merugikan bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Grup Tower Bersama.

#### ***Grup Tower Bersama mungkin tidak mampu memperpanjang atau memperbaharui sewa lahan, atau melindungi hak-hak Grup Tower Bersama atas tanah di tempat berdirinya menara telekomunikasi***

Portofolio *sites* telekomunikasi Grup Tower Bersama terutama terdiri dari menara *ground-based* yang dibangun di atas tanah berdasarkan perjanjian sewa lahan jangka panjang. Sekitar 98% dari *sites* telekomunikasi dalam portofolio Grup Tower Bersama per 31 Desember 2022 dioperasikan berdasarkan perjanjian sewa atas lahan yang tidak dimiliki oleh Grup Tower Bersama. Untuk *sites* telekomunikasi di atas lahan sewa, sekitar 24% dari perjanjian sewa lahan untuk *sites* ini akan berakhir pada tahun 2026 atau lebih lama dan per 31 Desember 2022, rata-rata sisa periode perjanjian sewa lahan adalah 7 (tujuh) tahun.

Karena berbagai alasan, para pemilik tanah mungkin tidak bersedia untuk memperbaharui sewa lahan mereka kepada Grup Tower Bersama, mereka mungkin kehilangan hak atas tanah tersebut atau mereka mungkin memindahkan kepemilikan tanah mereka kepada pihak-pihak ketiga, dimana hal-hal ini memengaruhi kemampuan Grup Tower Bersama untuk memperbaharui sewa lahan dengan persyaratan yang layak secara komersial. Selain itu, Grup Tower Bersama mungkin tidak memiliki ketersediaan modal yang memadai untuk memperpanjang sewa lahan pada menara-menara Grup Tower Bersama saat berakhirnya masa sewa. Apabila Grup Tower Bersama tidak dapat memperpanjang sewa-sewa lahan ini, Grup Tower Bersama akan diharuskan untuk membongkar atau merelokasi menara-menara ini dan mungkin akan kehilangan arus kas yang diterima dari menara-menara tersebut, yang dapat berdampak secara material bahkan merugikan bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Grup Tower Bersama.

Sebagian besar properti Grup Tower Bersama didirikan pada lahan sewa. Karena berbagai alasan, Grup Tower Bersama mungkin tidak selalu memiliki kemampuan untuk mengakses, menganalisa dan memverifikasi seluruh informasi terkait hak milik dan persoalan-persoalan lain sebelum menjalin perjanjian sewa lahan untuk sebuah lokasi menara, yang mana hal tersebut dapat memengaruhi hak-hak Grup Tower Bersama untuk mengakses dan mengoperasikan lokasi tersebut. Dari waktu ke waktu, Grup Tower Bersama juga mengalami perselisihan dengan para pihak yang menyewakan terkait persyaratan sewa lahan, yang dapat memengaruhi kemampuan Grup Tower Bersama untuk mengakses dan mengoperasikan sebuah lokasi menara. Penghentian sewa lahan





untuk lokasi menara tertentu dapat mengganggu kemampuan Grup Tower Bersama untuk mengoperasikan menara dan menghasilkan pendapatan dari sewa menara di lokasi tersebut. Apabila hal ini terjadi pada lokasi menara dalam jumlah material, hal ini dapat berdampak negatif secara material pada bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Grup Tower Bersama.

#### ***Revaluasi atas aset tetap menara telekomunikasi Grup Tower Bersama dapat berubah-ubah***

Peningkatan nilai wajar dari aset tetap (menara telekomunikasi) terdiri dari selisih dari biaya tercatat dan nilai wajar dari aset Grup Tower Bersama di akhir tahun/periode buku yang bersangkutan. Revaluasi dari aset tetap Grup Tower Bersama dipengaruhi faktor-faktor antara lain jumlah menara, jumlah penyewaan, rasio kolokasi serta rata-rata sisa masa sewa. Walaupun revaluasi dari aset tetap tidak berdampak merugikan terhadap arus kas operasi Grup Tower Bersama, berkurangnya jumlah menara, jumlah penyewaan, dan rasio kolokasi dapat secara potensial mengurangi nilai wajar aset tetap Grup Tower Bersama dan berdampak negatif pada laba bersih Grup Tower Bersama, dan pada akhirnya berdampak negatif secara material pada bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Grup Tower Bersama.

#### ***Teknologi baru dapat menyebabkan para calon pelanggan menjadi kurang tertarik untuk menyewa tower space dari Grup Tower Bersama***

Pengembangan dan penerapan teknologi-teknologi baru yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi jaringan nirkabel dapat mengurangi penggunaan dan kebutuhan transmisi serta penerimaan layanan nirkabel berbasis menara sehingga berakibat pada menurunnya permintaan akan *tower space* yang dibutuhkan. Contoh teknologi semacam ini adalah teknologi yang lebih efisien secara spektral yang dapat berpotensi mengatasi beberapa persoalan kapasitas jaringan, sehingga mengurangi kebutuhan *tower space* antena berbasis menara atau teknologi akses VoIP pelengkap yang dapat mengurangi sebagian lalu-lintas jaringan dari jaringan berbasis menara tradisional, sehingga dapat mengurangi kebutuhan para operator untuk menambah lebih banyak peralatan antena berbasis menara di beberapa lokasi menara. Selanjutnya, munculnya berbagai teknologi alternatif dapat mengurangi kebutuhan transmisi dan penerimaan layanan nirkabel berbasis menara. Sebagai contoh, pertumbuhan pengiriman layanan radio, video, dan komunikasi nirkabel oleh satelit penyiaran langsung dapat berdampak material dan merugikan pada permintaan *tower space* antena Grup Tower Bersama. Terdapat juga beberapa teknologi alternatif tertentu dapat menyebabkan gangguan radio pada transmisi dan penerimaan layanan nirkabel berbasis menara generasi lama. Alhasil, pengembangan dan penerapan berbagai teknologi alternatif pada tingkatan yang signifikan dapat berdampak negatif secara material pada bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Grup Tower Bersama.

#### ***Grup Tower Bersama mungkin tidak dapat mendeteksi dan mencegah tindakan penyuapan atau penyalahgunaan lain yang dilakukan oleh karyawan Grup Tower Bersama, perwakilan, agen, pelanggan atau pihak ketiga lainnya***

Grup Tower Bersama terpapar risiko-risiko terkait tindakan penyuapan dan penyalahgunaan lain yang dilakukan oleh karyawan Grup Tower Bersama, perwakilan, agen atau pihak ketiga lainnya. Tindakan penyalahgunaan tersebut, yang mungkin sulit untuk dideteksi dan dicegah, dapat meliputi tetapi tidak terbatas pada keterlibatan dalam misrepresentasi atau penipuan atau aktivitas yang tidak pantas lainnya, seperti menerima atau menawarkan suap, atau tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan dan prosedur internal.

Meskipun Grup Tower Bersama telah memiliki kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk mencegah, mendeteksi dan menanggapi perilaku tersebut dan memastikan kepatuhan secara keseluruhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal-hal tersebut mungkin tidak selalu efektif dalam mendeteksi atau mencegah seluruh insiden ketidakpatuhan atau transaksi mencurigakan. Sebagai contoh, pada bulan April 2019, salah satu mantan karyawan Perusahaan Anak yang juga merupakan kontraktor yang digunakan oleh Perusahaan Anak divonis bersalah oleh pengadilan di Indonesia untuk tuduhan suap terkait penerbitan izin penggunaan lahan dan bangunan. Sebagai tindak lanjut, Grup Tower Bersama telah merevisi dan memperkuat kebijakan dan prosedur internal Grup Tower Bersama, termasuk memperbaharui prosedur pembayaran, mewajibkan seluruh karyawan dan kontraktor untuk menandatangani pakta integritas, dan Grup Tower Bersama juga bekerja sama dengan pihak pembuat peraturan di Indonesia dan anggota-anggota lain dalam asosiasi menara untuk menerapkan praktek-praktek terbaik dalam rangka mencegah perbuatan melawan hukum.



Setiap pelanggaran terhadap undang-undang anti korupsi dapat mengakibatkan investasi atau litigasi yang dapat mewajibkan Grup Tower Bersama untuk menghabiskan waktu yang signifikan, menanggung biaya substansial dan mengalihkan perhatian manajemen dari kegiatan operasional sehari-hari, serta mengakibatkan Grup Tower Bersama dikenakan penalti, keuangan atau lainnya, yang dapat berdampak negatif secara material pada bisnis, kondisi keuangan dan reputasi Grup Tower Bersama.

#### ***Grup Tower Bersama dapat memiliki tanggung jawab hukum dalam undang-undang lingkungan hidup***

Kegiatan usaha Grup Tower Bersama, sama halnya dengan perusahaan-perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha sejenis, tunduk pada berbagai persyaratan lingkungan dan keselamatan kerja serta undang-undang dan peraturan kesehatan, termasuk hal-hal terkait dengan pengelolaan, pemakaian, penyimpanan, pembuangan, emisi dan remediasi, dan pemaparan terhadap bahan, material dan limbah berbahaya maupun tidak berbahaya sebagaimana diatur pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja. Sebagai pemilik atau penyewa lahan dan juga operator ribuan *sites*, Grup Tower Bersama dapat dikenakan tanggung jawab hukum dengan biaya yang besar guna memperbaiki tanah dan air tanah yang terkontaminasi materi berbahaya tanpa memedulikan apakah Grup Tower Bersama sebagai pemilik, penyewa lahan dan juga operator yang hanya mengetahui atau bertanggung jawab terhadap kontaminasi tersebut. Banyak peraturan lingkungan hidup yang mensyaratkan kewajiban pelaporan informasi dan penyimpanan berkas terkait hal ini. Tidak ada jaminan bahwa Grup Tower Bersama dapat mematuhi seluruh persyaratan lingkungan hidup. Grup Tower Bersama dapat dikenakan denda dalam jumlah signifikan apabila Grup Tower Bersama gagal mematuhi salah satu dari persyaratan tersebut. Persyaratan dalam undang-undang dan peraturan tersebut umumnya rumit dan sering kali berubah, dan dapat menjadi semakin ketat di masa mendatang. Terdapat kemungkinan bahwa persyaratan tersebut akan berubah atau tanggung jawab hukum akan timbul di masa depan yang dapat berdampak negatif secara material bahkan merugikan kegiatan usaha, hasil operasi atau kondisi keuangan Grup Tower Bersama.

#### ***Menara-menara Grup Tower Bersama dapat terkena dampak bencana alam dan kerusakan yang tidak terduga***

Menara-menara Grup Tower Bersama terletak di pulau-pulau utama di Indonesia dan terpapar risiko yang berhubungan dengan bencana alam, seperti badai, banjir, topan dan gempa bumi, serta kerusakan yang tidak terduga lainnya. Setiap kerusakan atau kehancuran pada menara-menara Grup Tower Bersama akibat risiko-risiko ini dapat memengaruhi kemampuan Grup Tower Bersama dalam menyediakan layanan kepada para pelanggan. Meskipun Grup Tower Bersama memiliki pertanggungan asuransi atas terjadinya bencana-bencana alam, pertanggungan asuransi tersebut mungkin saja tidak cukup. Meskipun Grup Tower Bersama memiliki asuransi gangguan usaha, asuransi tersebut mungkin saja tidak cukup untuk menanggung seluruh kehilangan pendapatan yang ditimbulkan, termasuk potensi pendapatan dari para pelanggan baru yang seharusnya dapat ditambahkan pada menara-menara Grup Tower Bersama jika tidak terjadi kerusakan. Apabila Grup Tower Bersama tidak mampu menyediakan layanan kepada para pelanggan akibat kerusakan pada menara-menara, maka hal itu dapat berakibat pada kerugian pelanggan, yang menyebabkan dampak negatif secara material pada bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Grup Tower Bersama.

#### ***Keberhasilan Grup Tower Bersama bergantung pada kemampuan dalam menarik dan mempertahankan para personil penting***

Grup Tower Bersama percaya bahwa tim manajemen saat ini berkontribusi pengalaman dan keahlian yang signifikan pada pengelolaan dan pertumbuhan bisnis Grup Tower Bersama. Kelanjutan keberhasilan bisnis Grup Tower Bersama dan kemampuan Grup Tower Bersama dalam menjalankan strategi bisnis Perseroan saat ini maupun di masa depan sebagian besar akan tergantung pada usaha para personil penting Grup Tower Bersama. Selain itu, terdapat kekurangan personil terampil di industri telekomunikasi Indonesia dan kekurangan ini sepertinya akan terus berlanjut. Alhasil, Grup Tower Bersama mungkin menghadapi persaingan yang semakin meningkat dengan perusahaan-perusahaan menara lainnya dalam mendapatkan karyawan terampil di berbagai tingkat maupun kategori pekerjaan dan persaingan ini diperkirakan terus meningkat. Meskipun Grup Tower Bersama percaya bahwa gaji dan paket tunjangan karyawan Grup Tower Bersama pada umumnya lebih kompetitif dibanding dengan apa yang ditawarkan oleh para kompetitor, jika jumlah para kompetitor di industri menara Indonesia semakin meningkat, Grup Tower Bersama serta para pesaing akan semakin kesulitan mempertahankan karyawan terampilnya. Selain itu, pada saat Grup Tower Bersama mengembangkan bisnisnya melalui akuisisi, Grup Tower





Bersama perlu mempertahankan dan mengintegrasikan karyawan terampil dari perusahaan-perusahaan yang diakuisisi. Ketidakmampuan Grup Tower Bersama untuk mengintegrasikan, merekrut, melatih, mempertahankan dan memotivasi karyawan kunci dengan baik dapat berdampak secara material dan merugikan pada bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Grup Tower Bersama.

### ***Persepsi mengenai risiko-risiko kesehatan yang ditimbulkan dari emisi radio dapat terus meningkat***

Persepsi publik mengenai kemungkinan risiko kesehatan yang ditimbulkan teknologi komunikasi nirkabel seluler dan teknologi komunikasi nirkabel lainnya, dapat memperlambat pertumbuhan perusahaan nirkabel, yang selanjutnya berakibat pada perlambatan pertumbuhan Grup Tower Bersama. Secara khusus, persepsi negatif publik dan peraturan terkait risiko kesehatan yang dirasakan ini, dapat memperlambat penerimaan pasar terhadap layanan komunikasi nirkabel serta meningkatkan penentangan terhadap pengembangan dan ekspansi Grup Tower Bersama. Potensi dampak negatif emisi frekuensi radio terhadap kesehatan telah menjadi obyek penelitian banyak komunitas ilmiah dalam beberapa tahun terakhir dan berbagai tuntutan hukum di berbagai lokasi di dunia terkait kesehatan telah diajukan terhadap pabrikan peralatan nirkabel dan operator nirkabel. Apabila penelitian ilmiah atau keputusan pengadilan menghasilkan sebuah temuan yang menunjukkan bahwa emisi frekuensi radio menimbulkan risiko kesehatan terhadap para konsumen, maka hal itu dapat berdampak merugikan pada pasar layanan nirkabel, serta para pelanggan operator nirkabel Grup Tower Bersama, yang dapat berdampak negatif secara material bahkan merugikan bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Grup Tower Bersama. Grup Tower Bersama tidak memiliki asuransi yang signifikan terkait permasalahan ini.

## **3. RISIKO UMUM**

Seluruh kegiatan bisnis dan aset Grup Tower Bersama berada di Indonesia. Sebagai akibatnya, kondisi politik, sosial dan ekonomi di Indonesia di masa mendatang, serta tindakan dan kebijakan yang diambil atau diterapkan atau dihapus oleh Pemerintah dapat berdampak secara material dan merugikan pada bisnis, kondisi keuangan, kinerja operasional dan prospek Grup Tower Bersama serta kemampuan Perseroan membayar Obligasi.

### ***Perubahan ekonomi domestik, regional, dan global yang material***

Kegiatan usaha Grup Tower Bersama tunduk pada fluktuasi pasar global, regional, dan kondisi perekonomian umum di Indonesia. Adanya ketidakstabilan pada berbagai pasar di seluruh dunia atau di tingkat regional dapat memberikan dampak merugikan terhadap Indonesia dan hal tersebut dapat berdampak pada kegiatan usaha dan kinerja keuangan Grup Tower Bersama.

Ketidakstabilan ekonomi yang terjadi selama 15 tahun terakhir, seperti krisis ekonomi global pada tahun 2008 dan merebaknya pandemi COVID-19 di awal tahun 2020 telah menimbulkan reaksi pasar keuangan global yang juga memengaruhi kinerja pasar keuangan Indonesia, di antaranya: penurunan penanaman modal asing, penurunan pasar saham global, keterlambatan pertumbuhan ekonomi, kurangnya ketersediaan kredit, dan melemahnya permintaan untuk beberapa komoditas tertentu. Berdasarkan International Monetary Fund (“IMF”), krisis ekonomi global telah memengaruhi kinerja ekonomi yang mengalami penurunan pertumbuhan PDB dari 3,7% pada tahun 2021 menjadi 5,3% pada tahun 2022. Pada bulan Oktober 2022, IMF memproyeksi pertumbuhan perekonomian Indonesia pada tahun 2023 akan mencapai 4,9%.

Kehilangan kepercayaan investor terhadap sistem keuangan pasar negara berkembang dan pasar lainnya, atau faktor-faktor lain, termasuk situasi perekonomian global yang bertambah buruk, dapat menyebabkan meningkatnya volatilitas pasar keuangan Indonesia dan laju pertumbuhan ekonomi yang melambat atau laju pertumbuhan negatif di Indonesia. Terjadinya salah satu hal tersebut dapat berdampak secara material dan merugikan pada bisnis, kondisi keuangan, kinerja operasional dan prospek Grup Tower Bersama, dan kemampuan Perseroan untuk membayar Obligasi.

### ***Depresiasi atau volatilitas nilai Rupiah***

Salah satu faktor terpenting yang secara langsung menyebabkan krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 dan 2008 adalah depresiasi dan volatilitas nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lain, seperti Dolar AS. Sebagai akibat dari merebaknya pandemi COVID-19, tidak hanya volatilitas nilai mata uang Rupiah yang kembali menghadapi



depresiasi tetapi juga beberapa negara lain. Tidak ada jaminan bahwa volatilitas Rupiah yang signifikan tidak akan berulang di masa mendatang. Selama periode antara 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022, kurs tengah Rupiah terhadap Dolar AS berkisar dari yang terendah Rp14.084 per Dolar AS dan tertinggi Rp15.737 per Dolar AS. Sebagai akibatnya, Grup Tower Bersama Anak mencatatkan selisih laba kurs sebesar Rp1,4 miliar pada tahun 2021 dan Rp1,8 miliar pada tahun 2022. Per 31 Desember 2022, kurs tengah nilai Rupiah terhadap Dolar AS tercatat sebesar Rp15.731. Tidak ada jaminan bahwa depresiasi nilai Rupiah lebih lanjut terhadap mata uang lain, termasuk Dolar AS, tidak akan terjadi. Utang Grup Tower Bersama dalam porsi besar berdenominasi mata uang Dolar AS, sedangkan hampir seluruh pendapatan Grup Tower Bersama dalam mata uang Rupiah, sehingga kewajiban dari utang usaha dan utang dalam mata uang asing akan meningkat dalam Rupiah apabila nilai tukar Rupiah mengalami depresiasi lebih jauh dari kurs per 31 Desember 2022, dan Grup Tower Bersama akan mencatatkan rugi dari selisih kurs akibat depresiasi Rupiah tersebut yang dapat berdampak signifikan terhadap pendapatan dan laba bersih Grup Tower Bersama.

***Dari waktu ke waktu, Grup Tower Bersama mungkin terlibat dalam perselisihan hukum dan litigasi lain sehubungan dengan kegiatan usahanya***

Dari waktu ke waktu, Grup Tower Bersama dapat terlibat pada suatu perselisihan yang dapat menimbulkan proses litigasi atau tuntutan hukum lain sehubungan dengan kegiatan usahanya. Grup Tower Bersama mungkin dapat diminta untuk menjawab atau melakukan perlawanan atas tuntutan tersebut yang dapat mengalihkan asetnya dari tempat usahanya. Tidak ada jaminan bahwa perlawanan Grup Tower Bersama akan berhasil dan Grup Tower Bersama dapat diminta untuk membuat penyelesaian yang material. Hal ini dapat berdampak negatif secara material terhadap kondisi ekonomi, arus kas, hasil operasional dan reputasi Grup Tower Bersama.

***Bisnis Grup Tower Bersama tunduk pada berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah beserta perubahan-perubahannya di masa mendatang***

Bisnis Grup Tower Bersama, dan bisnis para pelanggan Grup Tower Bersama, tunduk pada peraturan propinsi dan daerah setempat yang mengatur mengenai telekomunikasi dan juga pendirian dan pengoperasian menara. Peraturan dan penentangan dari pejabat pengatur tata ruang setempat dan organisasi masyarakat terhadap pembangunan di lingkungan mereka dapat meningkatkan biaya konstruksi, biaya modifikasi, biaya penambahan antenna baru pada *sites*, atau biaya perkuatan menara, sehingga membatasi kemampuan Grup Tower Bersama dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Selain itu, beberapa izin operasional menara mungkin diwajibkan untuk tunduk pada syarat dan kondisi tambahan yang tidak dapat dipenuhi oleh Grup Tower Bersama. Seiring dengan meningkatnya kekhawatiran publik atas menara telekomunikasi dalam beberapa tahun terakhir, beberapa komunitas saat ini mencoba untuk membatasi pembangunan menara telekomunikasi atau menunda pemberian izin. Kebijakan pengaturan yang ada dan perubahan pada peraturan tersebut dapat berdampak negatif secara material bahkan merugikan, serta adanya peraturan tambahan yang diadopsi dapat memperpanjang penundaan, atau menimbulkan biaya tambahan bagi Grup Tower Bersama, atau mencegah penyelesaian proyek-proyek Grup Tower Bersama di lokasi-lokasi tertentu. Kegagalan untuk menyelesaikan pembangunan menara telekomunikasi baru, melakukan modifikasi, penambahan antenna baru pada *sites*, atau perbaikan *sites* dapat memengaruhi kemampuan Grup Tower Bersama untuk menyediakan *tower space* tambahan pada *sites* dan mempertahankan perjanjian sewa yang telah ada, sehingga dapat berdampak negatif secara material bahkan merugikan bagi Grup Tower Bersama dan, selanjutnya, kemampuan Perseroan untuk melakukan pembayaran atas Obligasi.

***Grup Tower Bersama tunduk pada ketentuan negara lain atau peraturan internasional sehubungan dengan penerbitan surat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat***

Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Perusahaan Anak dari waktu ke waktu telah menerbitkan surat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat yang terdaftar di Bursa Efek Singapura. Sebagai akibatnya, Grup Tower Bersama tunduk pada peraturan yang berlaku di negara Singapura, termasuk peraturan pasar modal di Singapura. Ketentuan-ketentuan dan peraturan di negara tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan yang berlaku di Indonesia, antara lain termasuk ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pembatasan dan kewajiban penerbit, kelalaian penerbit dan pelaporan. Apabila Grup Tower Bersama kemudian tidak mampu untuk memperoleh dan/atau mempertahankan seluruh persetujuan, hal tersebut dapat dianggap pelanggaran kewajiban Grup Tower Bersama berdasarkan surat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat dan dapat berdampak secara material dan merugikan pada bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Grup Tower Bersama.



#### 4. RISIKO BAGI INVESTOR

- Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Obligasi ini antara lain dikarenakan tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
- Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi sebagai akibat dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH GRUP TOWER BERSAMA DAN PERUSAHAAN ANAK DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS, DAN RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN GRUP TOWER BERSAMA.**



## VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 7 Juni 2023 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sampai dengan Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, selain hal-hal sebagai berikut :

### a. Pencairan pinjaman

- *Fasilitas pinjaman revolving UOB*

Pada berbagai tanggal di bulan Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023, GHON, Perusahaan Anak telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dari UOB sebesar Rp157,3 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving DBSI*

Pada tanggal 19 Juni 2023, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dari DBSI sebesar Rp80,0 miliar.

### b. Pembayaran pinjaman

- *Fasilitas pinjaman revolving UOB*

Pada berbagai tanggal di bulan Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023, GHON, Perusahaan Anak, telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dari UOB sebesar Rp97,3 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving QNB*

Pada tanggal 16 Juni 2023, GHON, Perusahaan Anak, telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dari QNB sebesar Rp1,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving DBSI*

Pada berbagai tanggal 19 Juni 2023, Perseroan telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dari DBSI sebesar Rp450,0 miliar.



## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

#### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT Banyan Mas, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 14, tanggal 8 November 2004, yang dibuat dihadapan Dewi Himijati Tandika, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-28415 HT.01.01.TH.2004 tanggal 12 November 2004, didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan dengan No. 2564/BH.09.03/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004 serta diumumkan dalam BNRI No. 5 tanggal 18 Januari 2005, Tambahan No. 616 (“**Akta Pendirian**”).

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>100</b>	<b>100.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Jenny Marlina The	1	1.000.000	4,00
Eddy Yanto Hendra	24	24.000.000	96,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>25</b>	<b>25.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>75</b>	<b>75.000.000</b>	

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 116/2022. Berdasarkan Akta No. 116/2022, para pemegang saham dalam RUPS Perseroan telah menyetujui diantaranya : perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utama yaitu aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang, yaitu konstruksi sentral telekomunikasi, instalasi telekomunikasi dan aktivitas telekomunikasi dengan kabel.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan seluruh kegiatan usaha sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan dengan melakukan investasi atau penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 21 Perusahaan Anak, yang bergerak di bidang penyediaan jasa telekomunikasi, menara, jaringan fiber optik, dan pekerjaan telekomunikasi dan investasi.

Beberapa kejadian penting yang terjadi selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran adalah sebagai berikut :



Tanggal	Keterangan
April 2021	Perseroan melalui TB telah menyelesaikan transaksi jual beli dan pengalihan atas 3.000 menara telekomunikasi milik IBST dengan nilai keseluruhan sebesar Rp3.975 miliar atau setara US\$280,0 juta.
Juni 2021	Perseroan secara langsung maupun melalui TO telah membeli saham TB milik PT Provident Capital Indonesia masing-masing sebanyak 2.780 saham dan 1 saham, seluruhnya mewakili 2,0% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam TB. Pembelian saham ini meningkatkan kepemilikan efektif Perseroan atas TB menjadi sebesar 99,99%.
Mei 2022	Pemegang saham utama Perseroan, PT Provident Capital Indonesia dan PT Wahana Anugerah Sejahtera, melakukan restrukturisasi kepemilikan saham mereka pada Perseroan dengan mengalihkan sebanyak 13.106.772.548 saham kepada Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd. ("BDIA"). BDIA juga membeli saham treasury Perseroan sebanyak 1.025.945.500 saham. Sebagai akibat dari restrukturisasi ini, BDIA menjadi pemegang saham utama dan pengendali Perseroan, namun hal ini tidak merubah pihak pengendali akhir Perseroan maupun pihak penerima manfaat akhir Perseroan.
Juli 2022	Perseroan telah mengadakan RUPO untuk mengganti wali amanat untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV, Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I, Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II, Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III, Obligasi Berkelanjutan V Tahap I, Obligasi Berkelanjutan V Tahap II dan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III, yang semula PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menjadi Bank BTN.
Juli 2022	Perseroan mengumumkan rencana untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan sampai dengan sebanyak-banyaknya 679.709.000 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu) saham atau sebesar-besarnya 3% (tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yang akan dilakukan secara bertahap untuk periode 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan 24 Oktober 2022. Pada tanggal 12 Oktober 2022, Perseroan melakukan pengumuman untuk memperpanjang periode pembelian kembali saham dimaksud di atas sampai dengan tanggal 12 Januari 2023. Pelaksanaan pembelian kembali saham akan mengacu pada Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan ("POJK No. 2/2013").
Maret 2023	Perseroan mengalihkan saham treasury sebanyak 368.740.400 saham kepada BDIA sesuai dengan ketentuan POJK No. 2/2013. Sebagai akibat dari penjualan ini, kepemilikan BDIA di Perseroan meningkat 74,97%, dan hal ini tidak merubah pihak pengendali akhir Perseroan maupun pihak penerima manfaat akhir Perseroan.

## 2. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran adalah sebagai berikut :

### Tahun 2021

Berdasarkan DPS per 31 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		%( <sup>1</sup> )
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>72.100.600.000</b>	<b>1.442.012.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Wahana Anugerah Sejahtera	7.755.471.093	155.109.421.860	35,85
PT Provident Capital Indonesia	5.036.352.510	100.727.050.200	23,28
Winato Kartono	490.159.500	9.803.190.000	2,27
Edwin Soeryadjaya	71.481.830	1.429.636.600	0,33
Hardi Wijaya Liong	287.803.863	5.756.077.260	1,33
Budianto Purwahjo	5.025.000	100.500.000	0,02
Herman Setya Budi	4.625.000	92.500.000	0,02
Helmy Yusman Santoso	3.125.000	62.500.000	0,02
Gusandi Sjamsudin	1.950.000	39.000.000	0,01
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	7.975.060.149	159.501.202.980	36,87
	<b>21.631.053.945</b>	<b>432.621.078.900</b>	<b>100,00</b>
Saham yang dibeli kembali (saham treasury)	1.025.945.500	20.518.910.000	
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>22.656.999.445</b>	<b>453.139.989.900</b>	
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>49.443.600.555</b>	<b>988.872.011.100</b>	

Catatan :

(1) Perhitungan berdasarkan hak suara.



## Tahun 2022

Berdasarkan DPS per 31 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		%( <sup>1</sup> )
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>72.100.600.000</b>	<b>1.442.012.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd.	16.617.514.923	332.350.298.460	74,38
Edwin Soeryadjaya	71.481.830	1.429.636.600	0,32
Hardi Wijaya Liong	68.359.905	1.367.198.100	0,31
Budianto Purwahjo	5.025.000	100.500.000	0,02
Herman Setya Budi	4.625.000	92.500.000	0,02
Helmy Yusman Santoso	3.125.000	62.500.000	0,01
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	5.572.144.287	111.442.885.740	24,94
	22.342.275.945	446.845.518.900	100,00
Saham treasuri	314.723.500	6.294.470.000	-
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>22.656.999.445</b>	<b>453.139.988.900</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>49.443.600.555</b>	<b>988.872.011.100</b>	

Catatan :

(1) Perhitungan berdasarkan hak suara.

## Tahun 2023

Berdasarkan DPS per 31 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		%( <sup>1</sup> )
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>72.100.600.000</b>	<b>1.442.012.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd.	16.986.255.323	339.725.106.460	75,02
PT Wahana Anugerah Sejahtera	2.098.321.840	41.966.436.800	9,27
Edwin Soeryadjaya	71.481.830	1.429.636.600	0,32
Hardi Wijaya Liong	68.359.905	1.367.198.100	0,30
Budianto Purwahjo	5.025.000	100.500.000	0,02
Herman Setya Budi	4.625.000	92.500.000	0,02
Helmy Yusman Santoso	3.125.000	62.500.000	0,01
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	3.405.427.847	68.108.556.940	15,04
	22.642.621.745	452.852.434.900	100,00
Saham treasuri	14.377.700	287.654.000	-
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>22.656.999.445</b>	<b>453.139.011.100</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>49.443.600.555</b>	<b>988.872.011.100</b>	

Catatan :

(1) Perhitungan berdasarkan hak suara.

### 3. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memiliki izin-izin penting antara lain Nomor Induk Berusaha (“NIB”) yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan seluruhnya masih berlaku. NIB Perseroan dengan No. 0220202120963 berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya. Sehubungan dengan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh Perseroan melalui Perusahaan Anak, Perusahaan Anak terkait telah mendapatkan sebagian besar perizinan sehubungan dengan menara telekomunikasi tersebut,





antara lain IMB /Persetujuan Bangunan Gedung (“**PBG**”) dan IMBM yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang di setiap daerah. Izin-izin yang dimiliki oleh Perusahaan Anak tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 27 Juni 2023 untuk IMB/PBG atau IMBM dan paling lama keberlakuan izin tersebut adalah sampai dengan tanggal 20 Maret 2041 untuk IMB/PBG atau IMBM. Apabila jangka waktu berakhir, baik Perseroan melalui Perusahaan Anak akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dari keseluruhan jumlah 21.758 *sites* menara telekomunikasi sebanyak 1.828 *sites* menara telekomunikasi belum memiliki IMB/PBG atau IMBM. Dari jumlah tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa sebanyak 291 *sites* menara telekomunikasi tidak membutuhkan IMB/PBG atau IMBM dikarenakan menara telekomunikasi tersebut berjenis menara *rooftop* dengan ketinggian enam meter atau kurang. Sisanya, (i) Perusahaan Anak telah menyampaikan aplikasi untuk memperoleh izin yang dipersyaratkan sebelum permohonan IMB/PBG atau IMBM sebanyak 1.528 *sites* menara telekomunikasi; dan (ii) Perusahaan Anak belum menyampaikan permohonan untuk sejumlah 9 (sembilan) *sites* menara telekomunikasi.

#### **4. PERJANJIAN PENTING**

##### **4.1. Perjanjian penting dengan pihak afiliasi**

Perseroan dan Perusahaan Anak dalam kegiatan usaha yang normal melakukan transaksi keuangan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan Afiliasi guna mendukung kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak dalam bentuk pemberian pinjaman maupun pemberian jaminan perusahaan. Seluruh transaksi pemberian pinjaman dengan pihak Afiliasi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar (*arms' length*). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi adalah sebagai berikut :

##### **4.1.1 Surat Utang**

###### **a. Surat Utang 2025**

Dana yang diterima Perseroan dari hasil penerbitan Surat Utang 2025 berdasarkan *Indenture* Surat Utang 2025 telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

###### **- Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 21 Januari 2020 antara Perseroan dan SKP**

###### Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Kreditur; dan
- (ii) SKP, sebagai Debitur.

###### Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp959.253.823.058.

###### Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 21 Januari 2025.

###### Tujuan

Pembayaran kewajiban keuangan Debitur yang terkait dengan (i) seluruh jumlah saldo terutang Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B berdasarkan *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*, dan (ii) sebagian jumlah saldo terutang Fasilitas Pinjaman *Revolving* berdasarkan *US\$200.000.000 Facility Agreement*.

###### Suku bunga

10,53% per tahun.

###### Hak dan kewajiban

- (i) Debitur wajib melakukan pembayaran bunga setiap tanggal 19 Januari dan 19 Juli setiap tahun, terhitung sejak tanggal 19 Juli 2020; dan



- (ii) Kreditur berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Debitur berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan pemerintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 23 Juni 2023

Rp959,3 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 21 Januari 2020 antara Perseroan dan TB**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Kreditur; dan
- (ii) TB, sebagai Debitur.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp3.145.370.898.443.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 21 Januari 2025.

Tujuan

Pembayaran kewajiban keuangan Debitur yang terkait dengan (i) seluruh jumlah saldo terutang Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B berdasarkan *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*; dan (ii) sebagian jumlah saldo terutang Fasilitas Pinjaman *Revolving* berdasarkan *US\$200.000.000 Facility Agreement*.

Suku bunga

10,53% per tahun.

Hak dan kewajiban

- (i) Debitur wajib melakukan pembayaran bunga pada setiap tanggal 19 Januari dan 19 Juli setiap tahun, terhitung sejak tanggal 19 Juli 2020; dan
- (ii) Kreditur berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Debitur berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan pemerintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.



Hukum yang berlaku  
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan  
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 23 Juni 2023  
Rp3.145,4 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 21 Januari 2020 antara Perseroan dan SMI**

Para pihak  
(i) Perseroan, sebagai Kreditur; dan  
(ii) SMI, sebagai Debitur.

Pinjaman  
Jumlah pokok pinjaman Rp617.896.228.500.

Jangka waktu  
Jatuh tempo pada tanggal 21 Januari 2025.

Tujuan  
Pembayaran kewajiban keuangan Debitur yang terkait dengan sebagian jumlah saldo terutang Fasilitas Pinjaman *Revolving* berdasarkan *US\$200.000.000 Facility Agreement*.

Suku bunga  
10,53% per tahun.

Hak dan kewajiban  
(i) Debitur wajib melakukan pembayaran bunga pada setiap tanggal 19 Januari dan 19 Juli setiap tahun, dihitung sejak tanggal 19 Juli 2020; dan  
(ii) Kreditur berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)  
Tidak ada pembatasan bagi Debitur berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran  
Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku  
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan  
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 23 Juni 2023  
Rp617,9 miliar.

**b. Surat Utang 2026**

Dana yang diterima Perseroan dari hasil penerbitan Surat Utang 2026 berdasarkan *Indenture* Surat Utang 2026 telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :



- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 20 Januari 2021**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Kreditur; dan
- (ii) SKP, sebagai Debitur.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman berjangka Rp2.617.182.588.065.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2026.

Tujuan

Pembayaran kewajiban keuangan Debitur yang terkait dengan (i) jumlah saldo terutang Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B berdasarkan *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*; (ii) sebagian jumlah saldo terutang fasilitas pinjaman *revolving* berdasarkan *US\$375.000.000 Facility Agreement*; dan (iii) untuk tujuan korporasi secara umum.

Suku bunga

8,30% per tahun.

Hak dan kewajiban

- (i) Debitur wajib melakukan pembayaran bunga setiap tanggal 20 Januari dan 20 Juli setiap tahunnya, terhitung sejak tanggal 20 Juli 2021; dan
- (ii) Kreditur berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Debitur berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian ini tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan pemerintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 23 Juni 2023

Rp2.617,2 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 20 Januari 2021**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Kreditur; dan
- (ii) TB, sebagai Debitur.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman berjangka Rp1.531.451.817.748.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2026.



#### Tujuan

Pembayaran kewajiban keuangan Debitur yang terkait dengan (i) jumlah saldo terutang Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B berdasarkan *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*; (ii) sebagian jumlah saldo terutang fasilitas pinjaman *revolving* berdasarkan *US\$375.000.000 Facility Agreement*; dan (iii) untuk tujuan korporasi secara umum.

#### Suku bunga

8,30% per tahun.

#### Hak dan kewajiban

- (i) Debitur wajib melakukan pembayaran bunga setiap tanggal 20 Januari dan 20 Juli setiap tahunnya, terhitung sejak tanggal 20 Juli 2021; dan
- (ii) Kreditur berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

#### Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Debitur berdasarkan perjanjian ini.

#### Pengakhiran

Perjanjian ini tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

#### Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

#### Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

#### Saldo pada tanggal 23 Juni 2023

Rp1.531,5 miliar.

### - **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 20 Januari 2021**

#### Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Kreditur; dan
- (ii) SMI, sebagai Debitur.

#### Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman berjangka Rp85.715.594.188.

#### Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2026.

#### Tujuan

Pembayaran kewajiban keuangan Debitur yang terkait dengan (i) sebagian jumlah saldo terutang fasilitas pinjaman *revolving* berdasarkan *US\$200.000.000 Facility Agreement*; dan (ii) untuk tujuan korporasi secara umum.

#### Suku bunga

8,30% per tahun.

#### Hak dan kewajiban

- (i) Debitur wajib melakukan pembayaran bunga setiap tanggal 20 Januari dan 20 Juli setiap tahunnya, terhitung sejak tanggal 20 Juli 2021; dan
- (ii) Kreditur berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.



Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Debitur berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian ini tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan pemerintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 23 Juni 2023

Rp85,7 miliar.

**c. Surat Utang 2027**

Dana yang diterima Perseroan dari hasil penerbitan Surat Utang 2027 berdasarkan *Indenture* Surat Utang 2027 telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

**- Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 2 November 2021 antara Perseroan dan SKP**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Kreditur; dan
- (ii) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Debitur.

Pinjaman

Pinjaman berjangka dalam jumlah sebanyak-banyaknya Rp1.274.542.929.293.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 2 Mei 2027.

Tujuan

Pembayaran kewajiban keuangan Debitur yang terkait dengan (i) jumlah saldo terutang berdasarkan Fasilitas B dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*; (ii) sebagian jumlah saldo terutang berdasarkan *US\$375.000.000 Facility Agreement*; (iii) sebagian jumlah saldo terutang berdasarkan *US\$200.000.000 Facility Agreement*; dan (iv) untuk tujuan korporasi secara umum.

Suku bunga

7,31% per tahun.

Hak dan kewajiban

- (i) Debitur wajib melakukan pembayaran bunga setiap tanggal 2 Mei dan 2 November setiap tahunnya, terhitung sejak tanggal 2 Mei 2022; dan
- (ii) Kreditur berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Debitur berdasarkan perjanjian ini.



#### Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terhutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

#### Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

#### Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

#### Saldo pada tanggal 23 Juni 2023

Rp1.274,5 miliar.

### - **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 2 November 2021 antara Perseroan dan TB**

#### Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Kreditur; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Debitur.

#### Pinjaman

Pinjaman berjangka dalam jumlah sebanyak-banyaknya Rp2.905.671.464.646.

#### Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 2 Mei 2027.

#### Tujuan

Pembayaran kewajiban keuangan Debitur yang terkait dengan (i) jumlah saldo terutang berdasarkan Fasilitas B dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*; (ii) sebagian jumlah saldo terutang berdasarkan *US\$375.000.000 Facility Agreement*; dan (iii) untuk tujuan korporasi secara umum.

#### Suku bunga

7,31% per tahun.

#### Hak dan kewajiban

- (i) Debitur wajib melakukan pembayaran bunga setiap tanggal 2 Mei dan 2 November setiap tahunnya, terhitung sejak tanggal 2 Mei 2022; dan
- (ii) Kreditur berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

#### Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Debitur berdasarkan perjanjian ini.

#### Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terhutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

#### Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

#### Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).





Saldo pada tanggal 23 Juni 2023

Rp2.905,7 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 2 November 2021 antara Perseroan dan SMI**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Kreditur; dan
- (ii) SMI, Perusahaan Anak, sebagai Debitur.

Pinjaman

Pinjaman berjangka dalam jumlah sebanyak-banyaknya Rp1.048.275.757.576.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 2 Mei 2027.

Tujuan

Pembayaran kewajiban keuangan Debitur yang terkait dengan (i) sebagian jumlah saldo terutang berdasarkan *US\$200.000.000 Facility Agreement*; (ii) sebagian jumlah saldo terutang berdasarkan *US\$375.000.000 Facility Agreement*; dan (iii) untuk tujuan korporasi secara umum.

Suku bunga

7,31% per tahun.

Hak dan kewajiban

- (i) Debitur wajib melakukan pembayaran bunga setiap tanggal 2 Mei dan 2 November setiap tahunnya, terhitung sejak tanggal 2 Mei 2022; dan
- (ii) Kreditur berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Debitur berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terhutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan pemerintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 23 Juni 2023

Rp1.048,3 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 2 November 2021 antara Perseroan dan Mitrayasa**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Kreditur; dan
- (ii) Mitrayasa, Perusahaan Anak, sebagai Debitur.

Pinjaman

Pinjaman berjangka dalam jumlah sebanyak-banyaknya Rp442.509.848.485.



Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 2 Mei 2027.

Tujuan

Pembayaran kewajiban keuangan Debitur yang terkait dengan (i) sebagian jumlah saldo terutang berdasarkan *US\$375.000.000 Facility Agreement*; dan (ii) untuk tujuan korporasi secara umum.

Suku bunga

7,31% per tahun.

Hak dan kewajiban

- (i) Debitur wajib melakukan pembayaran bunga setiap tanggal 2 Mei dan 2 November setiap tahunnya, terhitung sejak tanggal 2 Mei 2022; dan
- (ii) Kreditur berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Debitur berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 23 Juni 2023

Rp442,5 miliar.

#### 4.1.2 Obligasi

##### a. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I

Dana yang diterima Perseroan dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 19 September 2017 sebagaimana diubah dengan Amendemen Terhadap Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 8 September 2020 antara Perseroan dan SKP**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Kreditur; dan
- (ii) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Debitur.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp700 miliar, terdiri dari pinjaman Seri A sebesar Rp231 miliar dan pinjaman Seri B sebesar Rp469 miliar.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 18 September 2021 untuk pinjaman Seri A dan tanggal 8 September 2023 untuk pinjaman Seri B. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pinjaman Seri A telah dilunasi, sehingga fasilitas pinjaman yang masih tersedia dalam perjanjian ini adalah pinjaman Seri B.



#### Tujuan

Pembayaran sebagian kewajiban keuangan SKP, Perusahaan Anak Perseroan, yang terkait dengan Fasilitas Pinjaman Revolving Seri B dalam *US\$1.000.000.000 Facilities Agreement*.

#### Suku bunga

6,8% per tahun untuk pinjaman Seri A dan 8,5% per tahun untuk pinjaman Seri B.

#### Hak dan kewajiban

- (i) Debitur wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Kreditur berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

#### Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi SKP berdasarkan perjanjian ini.

#### Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian.

#### Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

#### Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

#### Saldo pada tanggal 23 Juni 2023

Rp469,0 miliar untuk pinjaman Seri B.

### **b. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II**

Dana yang diterima Perseroan dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

#### **- Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 2 Desember 2020 antara Perseroan dan SKP**

##### Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

##### Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp750 miliar, terdiri dari pinjaman Seri A sebesar Rp295 miliar dan pinjaman Seri B sebesar Rp455 miliar.

##### Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 12 Desember 2021 untuk pinjaman Seri A dan tanggal 2 Desember 2023 untuk pinjaman Seri B. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pinjaman Seri A telah dilunasi, sehingga fasilitas pinjaman yang tersedia dalam perjanjian ini adalah pinjaman Seri B.

##### Tujuan

Pembayaran sebagian kewajiban keuangan Peminjam yang terkait dengan fasilitas pinjaman revolving dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement*.



Suku bunga

6,25% per tahun untuk pinjaman Seri A dan 7,75% per tahun untuk pinjaman Seri B.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan pemerintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 23 Juni 2023

Rp455,0 miliar untuk pinjaman Seri B.

**c. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III**

Dana yang diterima Perseroan dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

**- Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 17 Februari 2021 antara Perseroan dan SKP**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp1.462.494.000.000, terdiri dari pinjaman Seri A sebesar Rp952.252.000.000 dan pinjaman Seri B sebesar Rp510.242.000.000.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 27 Februari 2022 untuk pinjaman Seri A dan tanggal 17 Februari 2024 untuk pinjaman Seri B. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pinjaman Seri A telah dilunasi, sehingga fasilitas pinjaman yang tersedia dalam perjanjian ini adalah pinjaman Seri B.

Tujuan

Pembayaran seluruh utang Peminjam yang telah ada terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$275.000.000 Facility Agreement*.

Suku bunga

6% per tahun untuk pinjaman Seri A dan 7,25% per tahun untuk pinjaman Seri B.



#### Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

#### Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

#### Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian.

#### Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

#### Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

#### Saldo pada tanggal 23 Juni 2023

Rp510,2 miliar untuk pinjaman Seri B.

Pemberian pinjaman oleh Perseroan kepada SKP telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 berdasarkan Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan oleh Perseroan melalui website Bursa Efek dan website Perseroan pada tanggal 19 Februari 2021. Transaksi ini merupakan suatu transaksi afiliasi serta memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 yang tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

### - **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 17 Februari 2021 antara Perseroan dan TB**

#### Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

#### Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp1.452.506.000.000, terdiri dari pinjaman Seri A sebesar Rp945.748.000.000 dan pinjaman Seri B sebesar Rp506.758.000.000.

#### Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 27 Februari 2022 untuk pinjaman Seri A dan tanggal 17 Februari 2024 untuk pinjaman Seri B. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pinjaman Seri A telah dilunasi, sehingga fasilitas pinjaman yang tersedia dalam perjanjian ini adalah pinjaman Seri B.

#### Tujuan

Pembayaran sebagian kewajiban keuangan Peminjam yang terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$275.000.000 Facility Agreement*.

#### Suku bunga

6% per tahun untuk pinjaman Seri A dan 7,25% per tahun untuk pinjaman Seri B.

#### Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan



- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh pemerintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 23 Juni 2023

Rp506,8 miliar untuk pinjaman Seri B.

Pemberian pinjaman oleh Perseroan kepada TB telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 berdasarkan Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan oleh Perseroan melalui website Bursa Efek dan website Perseroan pada tanggal 19 Februari 2021. Transaksi ini merupakan suatu transaksi afiliasi serta memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 yang tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

**d. Obligasi Berkelanjutan V Tahap III**

Dana yang diterima Perseroan dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

**- Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 2 Maret 2022 antara Perseroan dan TB**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan  
(ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Pinjaman dalam jumlah sebanyak-banyaknya Rp2.200.000.000.000, yang terdiri dari pinjaman Seri A sebesar Rp1.700.000.000.000 dan pinjaman Seri B sebesar Rp500.000.000.000.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 12 Maret 2023 untuk pinjaman Seri A dan 2 Maret 2025 untuk pinjaman Seri B. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pinjaman Seri A telah dilunasi, sehingga fasilitas pinjaman yang tersedia dalam perjanjian ini adalah pinjaman Seri B.

Tujuan

Pembayaran sebagian kewajiban keuangan Peminjam terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$275.000.000 Facility Agreement*.

Suku bunga

5,00% per tahun untuk pinjaman Seri A dan 7,14% per tahun untuk pinjaman Seri B.



#### Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

#### Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

#### Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan pemerintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

#### Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

#### Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

#### Saldo pada tanggal 23 Juni 2023

Rp500,0 miliar untuk pinjaman Seri B.

### **e. Obligasi Berkelanjutan V Tahap III**

Dana yang diterima Perseroan dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

#### **- Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 11 Agustus 2022 antara Perseroan dan SKP**

##### Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

##### Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp859.959.211.000, terdiri dari pinjaman Seri A sebesar Rp577.974.677.000 dan pinjaman Seri B sebesar Rp281.984.534.000.

##### Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 21 Agustus 2023 untuk pinjaman Seri A dan tanggal 11 Agustus 2025 untuk pinjaman Seri B.

##### Tujuan

Pembayaran kembali utang Peminjam yang telah ada yaitu sejumlah US\$57.500.000 atau setara dengan Rp.855.891.525.000 terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* berdasarkan US\$275.000.000 *Facility Agreement*.

##### Suku bunga

5,39% per tahun untuk pinjaman Seri A dan 7,66% per tahun untuk pinjaman Seri B.

##### Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.





Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 23 Juni 2023

Rp860,0 miliar.

**f. Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV**

Dana yang diterima Perseroan dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

**- Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 11 Agustus 2022 antara Perseroan dan TB**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp1.340.040.789.000, terdiri dari pinjaman Seri A sebesar Rp900.635.323.000 dan pinjaman Seri B sebesar Rp439.405.466.000.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 21 Agustus 2023 untuk pinjaman Seri A dan tanggal 11 Agustus 2025 untuk pinjaman Seri B.

Tujuan

Pembayaran kembali utang Peminjam yang telah ada yaitu sejumlah US\$89.600.000 atau setara dengan Rp.1.333.702.272.000 terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* berdasarkan US\$275.000.000 *Facility Agreement*.

Suku bunga

5,39% per tahun untuk pinjaman Seri A dan 7,66% per tahun untuk pinjaman Seri B.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.



#### Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkannya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

#### Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

#### Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

#### Saldo pada tanggal 23 Juni 2023

Rp1.340,0 miliar.

### **g. Obligasi Berkelanjutan V Tahap V**

Dana yang diterima Perseroan dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap V telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

#### **- Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 21 Oktober 2022 antara Perseroan dan SKP**

##### Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

##### Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp694.656.489.000.

##### Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2023.

##### Tujuan

Untuk membayar kembali utang Peminjam yang telah ada yaitu sejumlah US\$45.500.000 atau setara dengan Rp691.418.000.000 terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* berdasarkan *US\$375.000.000 Facility Agreement* dan untuk kegiatan operasional, antara lain namun tidak terbatas pada belanja modal, biaya operasional, biaya umum dan administrasi, penyelesaian utang antar perusahaan serta pemberian pinjaman antar perusahaan.

##### Suku bunga

6,72% per tahun.

##### Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

##### Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

##### Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan Perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkannya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.



Hukum yang berlaku  
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan  
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 23 Juni 2023  
Rp694,7 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 21 Oktober 2022 antara Perseroan dan TB**

Para pihak  
(i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan  
(ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman  
Jumlah pokok pinjaman Rp305.343.511.000.

Jangka waktu  
Jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2023.

Tujuan  
Untuk membayar kembali utang Peminjam yang telah ada yaitu sejumlah US\$20.000.000 atau setara dengan Rp303.920.000.000 terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* berdasarkan *US\$375,000,000 Facility Agreement* dan untuk kegiatan operasional, antara lain namun tidak terbatas pada belanja modal, biaya operasional, biaya umum dan administrasi, penyelesaian utang antar perusahaan serta pemberian pinjaman antar perusahaan.

Suku bunga  
6,72% per tahun.

Hak dan kewajiban  
(i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan  
(ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)  
Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran  
Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan Perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku  
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan  
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 23 Juni 2023  
Rp305,3 miliar.



#### **h. Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI**

Dana yang diterima Perseroan dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 17 Februari 2023 antara Perseroan dan TB**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp2.237.400.000.000.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 27 Februari 2024.

Tujuan

- (i) Untuk membayar kembali utang Peminjam yang telah ada yaitu sejumlah US\$86.400.000 atau setara dengan Rp1.291.075.200.000 terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* berdasarkan *US\$375.000.000 Facility Agreement*;
- (ii) Untuk membayar kembali utang Peminjam yang telah ada yaitu sejumlah US\$63.000.000 atau setara dengan Rp941.409.000.000 terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* berdasarkan *US\$275.000.000 Facility Agreement*; dan
- (iii) Untuk kegiatan operasional, antara lain namun tidak terbatas pada belanja modal, biaya operasional, biaya umum dan administrasi, penyelesaian utang antar perusahaan serta pemberian pinjaman antar perusahaan.

Suku bunga

7,46% per tahun.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan Perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 23 Juni 2023

Rp2.237,4 miliar.



- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 17 Februari 2023 antara Perseroan dan SKP**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp248.600.000.000.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 27 Februari 2024.

Tujuan

- (i) Untuk membayar kembali utang Peminjam yang telah ada yaitu sejumlah US\$16.600.000 atau setara dengan Rp248.053.800.000 terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* berdasarkan *US\$375.000.000 Facility Agreement*; dan
- (ii) Untuk kegiatan operasional, antara lain namun tidak terbatas pada belanja modal, biaya operasional, biaya umum dan administrasi, penyelesaian utang antar perusahaan serta pemberian pinjaman antar perusahaan.

Suku bunga

7,46% per tahun.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan Perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 23 Juni 2023

Rp248,6 miliar.

#### 4.1.3 Perjanjian kredit

##### a. Fasilitas pinjaman *revolving* DBSI

Dana yang diterima oleh Perseroan dari *uncommitted revolving credit facility* (sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 398/PFP-DBSI/XII/1-2/2022 tanggal 29 Desember 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan dan Penegasan Kembali atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 131/PFPA-DBSI/VI/1-2/2023 tanggal 22 Mei 2023 antara Perseroan, Unicom dan DBSI) telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :



- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 26 Januari 2023 sebagaimana diubah dengan Amandemen Terhadap Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 27 April 2023 antara Perseroan dan TB**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp250.000.000.000.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 27 April 2023 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Maret 2024.

Tujuan

Untuk membayar kembali utang Peminjam yang telah ada yaitu sejumlah US\$16.750.419 atau setara dengan Rp250.000.000.000 terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* berdasarkan *US\$275,000,000 Facility Agreement*.

Suku bunga

Ditentukan oleh Pemberi Pinjaman dan Peminjam secara tertulis 2 hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan Perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 23 Juni 2023

Rp50,0 miliar.

**b. Fasilitas pinjaman *revolving* BNI**

Dana yang diterima Perseroan dari fasilitas tanpa komitmen (sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Fasilitas tertanggal 15 Mei 2023 antara Perseroan dan BNI telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :



- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 29 Mei 2023 antara Perseroan dan TB**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pinjaman Rp200.000.000.000.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 26 Juni 2023 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 15 Mei 2024.

Tujuan

Untuk membayar sebagian fasilitas pinjaman berdasarkan *uncommitted revolving credit facility* (sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 398/PFP-DBSI/XII/1-2/2022 tanggal 29 Desember 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan dan Penegasan Kembali atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 131/PFPA-DBSI/V/1-2/2023 tanggal 22 Mei 2023 antara Perseroan, Unicom dan PT Bank DBS Indonesia).

Suku bunga

8,01% per tahun.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan Perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 23 Juni 2023

Rp200,0 miliar.

#### 4.1.4 Perjanjian sewa menyewa

Dalam rangka menyediakan obyek sewa kepada para penyewa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi, GHON telah menandatangani 11 perjanjian sewa menyewa dengan Rudolf Parningotan Nainggolan, yang merupakan pemegang saham utama dan Direktur Utama GHON, untuk pemakaian sejumlah lahan sebagai lokasi pemasangan dan penempatan menara telekomunikasi milik GHON. Berdasarkan perjanjian sewa menyewa lahan tersebut, (i) pemberi sewa wajib menjamin tersedianya lahan untuk penempatan peralatan telekomunikasi, antenna dan alat-alat penunjang lainnya milik penyewa; dan (ii) penyewa wajib membayar harga sewa sesuai perjanjian. Penyewa





tidak dapat menggunakan lahan untuk keperluan lain selain yang diatur dalam perjanjian. Perjanjian tidak dapat diakhiri oleh salah satu pihak kecuali terdapat kesalahan, kelalaian dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan pemerintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini. Saldo sewa lahan jangka panjang per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1,4 miliar.

Berikut rincian mengenai perjanjian sewa menyewa lahan tersebut :

No.	No. Perjanjian	Lokasi	Jangka Waktu
1.	001/PKS/TAG3/2015 tanggal 1 Januari 2015	Kelurahan Cangkudu, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten	1 Januari 2015 - 1 Januari 2025
2.	008/PKS/BINPAS/2015 tanggal 1 Januari 2015	Kelurahan Binuang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang	1 Januari 2015 - 1 Januari 2025
3.	004/PKS/CKMPK-54/2015 tanggal 1 Januari 2015	Kelurahan Rumambe II, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang	1 Januari 2015 - 1 Januari 2025
4.	002/PKS/WNYS/2015 tanggal 1 Januari 2015	Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten	1 Januari 2015 - 1 Januari 2025
5.	007/PKS/JOMBRT/2015 tanggal 1 Januari 2015	Kelurahan Jomin Barat, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang	1 Januari 2015 - 1 Januari 2025
6.	005/PKS/SSKPJG/2015 tanggal 1 Januari 2015	Kelurahan Sasak Panjang, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor	1 Januari 2015 - 1 Januari 2025
7.	003/PKS/KLSUREN/2015 tanggal 1 Januari 2015	Kelurahan Tajur Halang, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat	1 Januari 2015 - 1 Januari 2025
8.	143/PKS/GTI-TAMAN TEKNO GTI/ XII/2019 tanggal 30 Desember 2019	Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan	1 Januari 2020 - 31 Desember 2025
9.	141/PKS/GTI-BANGO6REGENCYTANGERANG/ II/2020 tanggal 5 Februari 2020	Villa Tangerang Jl. Garuda Raya Rt.001 Rw. 011 No. KBI. 22 Kel. Gebang Raya Kec. Pembantu Priuk Kota Tangerang	1 Januari 2020 - 31 Desember 2025
10.	140/PKS/GTI-LEMPUYANG/II/2020 tanggal 13 Februari 2020	Desa Lempuyang, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang	15 Februari 2020 - 15 Februari 2027
11.	031/PKS/GTI-TEKNO WIDYA/VI/2012 tanggal 4 Mei 2012 sebagaimana diubah dengan 031.AMD/PKS/GTI-LGL/TEKNO WIDYA/IV/2022 tanggal 12 April 2022	Desa Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan	4 Mei 2012 - 1 Januari 2025

#### 4.2. Perjanjian penting dengan pihak ketiga

Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga untuk mendukung kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan Anak sebagaimana diuraikan berikut ini :

##### 4.2.1. Surat utang

- a. **Indenture tertanggal 21 Januari 2020 sehubungan dengan US\$350.000.000 Surat Utang Senior Yang Tidak Dijamin dengan bunga 4,25% dan jatuh tempo 2025 ("Surat Utang 2025")**

###### Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Penerbit; dan
- (ii) The Bank of New York Mellon, London Branch, sebagai *Trustee*.

###### Harga penerbitan surat utang

100% dari nilai pokok, yaitu US\$350.000.000.

###### Tujuan penggunaan dana

Untuk membayar (i) seluruh jumlah saldo terutang Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B berdasarkan US\$1.000.000.000 *Facility Agreement*; dan (ii) sebagian jumlah saldo terutang Fasilitas Pinjaman *Revolving* berdasarkan US\$200.000.000 *Facility Agreement*.



Perseroan menyalurkan dana hasil penerbitan Surat Utang 2020 kepada SKP, TB dan SMI masing-masing berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 21 Januari 2020.

Tanggal jatuh tempo

21 Januari 2025.

Suku bunga

4,25% per tahun.

Tanggal pembayaran bunga

Bunga dibayarkan pada tanggal 21 Januari dan 21 Juli setiap tahunnya, dimulai sejak tanggal 21 Juli 2020.

Peringkat surat utang

- (i) Kewajiban umum yang tidak dijamin dari Perseroan;
- (ii) Pari passu, dalam hak pembayaran dengan seluruh utang tanpa jaminan yang didahulukan milik Perseroan yang ada dikemudian hari;
- (iii) Didahulukan dari segi hak pembayaran atas seluruh utang Perseroan dikemudian hari yang disubordinasikan; dan
- (iv) Disubordinasikan terhadap utang Perseroan, yang dijamin sampai dengan jumlah aset yang menjadi jaminan dari utang tersebut, dan terhadap seluruh kewajiban (termasuk utang dagang) dari masing-masing Perusahaan Anak Perseroan yang tidak memberikan jaminan terhadap Surat Utang 2025.

Jaminan

Setiap Perusahaan Anak dari Perseroan (yang selanjutnya disebut sebagai "**Perusahaan Anak Yang Dibatasi**") akan menjamin pembayaran secara tepat waktu atas nilai pokok, premium (apabila ada) dan bunga serta seluruh biaya yang timbul berdasarkan Surat Utang 2025. Untuk pemberian jaminan tersebut, Perusahaan Anak Yang Dibatasi yang didirikan Indonesia nantinya akan menandatangani secara terpisah suatu akta jaminan perusahaan berdasarkan hukum Indonesia.

Pembatasan (*negative covenant*)

Terdapat beberapa pembatasan antara lain Perseroan dan Perusahaan Anak Yang Dibatasi dibatasi untuk melakukan penambahan pinjaman baru dan Perusahaan Anak Yang Dibatasi dibatasi untuk menerbitkan saham preferen, kecuali apabila Rasio Utang terhadap Arus Kas Teranualisasi (pada tanggal terjadinya pinjaman baru atau penerbitan saham preferen tersebut) tidak lebih besar dari 6,25x.

Perseroan dan Perusahaan Anak Yang Dibatasi juga dibatasi untuk melakukan pembayaran yang dibatasi, seperti antara lain membayar dividen atau membuat setiap investasi yang dibatasi, kecuali :

- (i) Tidak ada wanprestasi atau peristiwa wanprestasi telah terjadi dan berlanjut atau akan terjadi; dan
- (ii) Rasio Utang terhadap Arus Kas Teranualisasi tidak lebih besar dari 6,25x.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Bagian New York.

Pencatatan

Bursa Efek Singapura (*Singapore Exchange Securities Trading Limited*).

Saldo pada tanggal 23 Juni 2023

US\$350,0 juta.

Penerbitan Surat Utang 2025 telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2, yang berlaku pada saat transaksi tersebut dilakukan, berdasarkan Keterbukaan Informasi yang telah dilakukan pada tanggal 23 Januari 2020.



b. **Indenture tertanggal 20 Januari 2021 sehubungan dengan Surat Utang Senior Yang Tidak Dijamin dengan bunga 2,75% dan jatuh tempo pada tahun 2026 (“Surat Utang 2026”)**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Penerbit; dan
- (ii) The Bank of New York Mellon, London Branch, sebagai *Trustee*.

Harga penerbitan surat utang

100% dari nilai pokok, yaitu US\$300.000.000.

Tujuan penggunaan dana

Perseroan telah menggunakan dana bersih yang diperoleh dari penerbitan Surat Utang 2025 untuk: (i) membayar sebagian saldo terutang dari fasilitas pinjaman *revolving* sebesar US\$375,0 juta (“**Fasilitas RLF tahun 2019**”) berdasarkan *US\$375.000.000 Facility Agreement*; (ii) membayar sebagian saldo terutang dari Fasilitas Pinjaman *Revolving* seri B sebesar US\$100,0 juta berdasarkan *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* (“**Fasilitas B**”); dan (iii) membayar sebagian saldo terutang dari fasilitas pinjaman *revolving* sebesar US\$200,0 juta (“**Fasilitas RLF tahun 2017**”) berdasarkan *US\$200.000.000 Facility Agreement*. Jumlah pembiayaan kembali untuk Fasilitas RLF tahun 2019, Fasilitas B dan Fasilitas RLF tahun 2017 akan tetap tersedia dan dapat dipinjam kembali.

Perseroan menyalurkan dana hasil penerbitan Surat Utang 2025 kepada SKP, TB dan SMI masing-masing berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 20 Januari 2021.

Tanggal jatuh tempo

20 Januari 2026.

Suku bunga

2,75% per tahun.

Tanggal pembayaran bunga

Bunga dibayarkan pada tanggal 20 Januari dan 20 Juli setiap tahunnya, dimulai sejak tanggal 20 Juli 2021.

Peringkat surat utang

- (i) Kewajiban umum yang tidak dijamin dari Perseroan;
- (ii) *Pari passu*, dalam hak pembayaran dengan seluruh utang tanpa jaminan yang didahulukan milik Perseroan yang ada di kemudian hari;
- (iii) Didahulukan dari segi hak pembayaran atas seluruh utang Perseroan di kemudian hari yang disubordinasikan; dan
- (iv) Disubordinasikan terhadap utang Perseroan, yang dijamin sampai dengan jumlah aset yang menjadi jaminan dari utang tersebut, dan terhadap seluruh kewajiban (termasuk utang dagang) dari masing-masing Perusahaan Anak Perseroan.

Jaminan

Tanpa jaminan.

Pembatasan

Dengan memperhatikan adanya pengecualian yang relevan sebagaimana diatur dalam *Indenture*, Perseroan dan seluruh Perusahaan Anak signifikan dari Perseroan dibatasi untuk melakukan pembebanan atas sebagian atau seluruh aset dan propertinya untuk menjamin pembayaran suatu surat utang atau efek lainnya yang sejenis yang jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitannya, atau pembayaran atas kewajiban-kewajiban lainnya atas suatu surat utang. Perseroan juga dibatasi untuk secara langsung maupun tidak langsung melakukan penggabungan atau peleburan dengan pihak lain, dan menjual atau mengalihkan sebagian secara substantial atau seluruh properti dan aset milik Perseroan dan Perusahaan Anak.



Hukum yang berlaku  
Hukum Negara Bagian New York.

Pencatatan  
Bursa Efek Singapura (*Singapore Exchange Securities Trading Limited*).

Saldo pada tanggal 23 Juni 2023  
US\$300,0 juta.

Penerbitan Surat Utang 2025 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 berdasarkan Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan oleh Perseroan melalui website Bursa Efek dan website Perseroan pada tanggal 22 Januari 2021.

c. **Indenture tertanggal 2 November 2021 sehubungan dengan Surat Utang Senior Yang Tidak Dijamin dengan bunga 2,80% dan jatuh tempo 2027 (“Surat Utang 2027”)**

Para pihak  
(i) Perseroan, sebagai Penerbit; dan  
(ii) The Bank of New York Mellon, London Branch, sebagai *Trustee*.

Harga penerbitan surat utang  
100% dari nilai pokok, yaitu US\$400.000.000.

Tujuan penggunaan dana  
Perseroan telah menggunakan dana bersih yang diperoleh dari Surat Utang 2027 untuk (i) membayar sebagian saldo terutang dari fasilitas pinjaman *revolving* seri B sebesar US\$100.000.000 dalam US\$1.000.000.000 *Facility Agreement* (“**Fasilitas B**”); (ii) membayar sebagian saldo terutang dari fasilitas pinjaman *revolving* dalam US\$200.000.000 *Facility Agreement* (“**Fasilitas RLF tahun 2017**”); dan (iii) membayar sebagian saldo terutang dari fasilitas pinjaman *revolving* dalam US\$375.000.000 *Facility Agreement* (“**Fasilitas RLF tahun 2019**”). Jumlah pembiayaan kembali untuk Fasilitas B, Fasilitas RLF tahun 2017 dan Fasilitas RLF tahun 2019 akan tetap tersedia dan dapat dipinjam kembali.

Perseroan menyalurkan dana hasil penerbitan Surat Utang 2027 kepada Perusahaan Anak, yaitu TB, SKP, SMI, dan Mitrayasa berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 2 November 2021.

Tanggal jatuh tempo  
2 Mei 2027.

Suku bunga  
2,80% per tahun.

Tanggal pembayaran bunga  
Bunga dibayarkan pada tanggal 2 November dan 2 Mei setiap tahunnya, dimulai sejak tanggal 2 Mei 2022.

Peringkat surat utang  
(i) Kewajiban umum yang tidak dijamin dari Perseroan;  
(ii) *Parri passu* dalam hak pembayaran dengan seluruh utang tanpa jaminan yang didahulukan milik Perseroan yang ada dikemudian hari;  
(iii) Didahulukan dari segi hak pembayaran atas seluruh utang Perseroan di kemudian hari yang disubordinasikan; dan  
(iv) Disubordinasikan terhadap utang Perseroan, yang dijamin sampai dengan jumlah aset yang menjadi jaminan dari utang tersebut, dan terhadap seluruh kewajiban (termasuk utang dagang) dari masing-masing Perusahaan Anak Perseroan.

Jaminan  
Tanpa jaminan.



#### Pembatasan

Dengan memperhatikan adanya pengecualian yang relevan sebagaimana diatur dalam *Indenture*, Perseroan dan seluruh Perusahaan Anak signifikan dari Perseroan dibatasi untuk melakukan pembebanan atas sebagian atau seluruh aset dan propertinya, yang ada pada saat ini atau dikemudian hari, untuk menjamin pembayaran suatu surat utang atau efek lainnya yang sejenis yang jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitannya, atau pembayaran atas kewajiban-kewajiban lainnya atas suatu surat utang. Perseroan juga dibatasi untuk secara langsung maupun tidak langsung melakukan penggabungan atau peleburan dengan pihak lain, dan menjual atau mengalihkan sebagian secara substantial atau seluruh properti dan aset milik Perseroan dan Perusahaan Anak.

#### Hukum yang berlaku

Hukum Negara Bagian New York.

#### Pencatatan

Bursa Efek Singapura (*Singapore Exchange Securities Trading Limited*).

#### Saldo pada tanggal 23 Juni 2023

US\$400,0 juta.

Penerbitan Surat Utang 2027 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 berdasarkan Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan oleh Perseroan melalui website Bursa Efek dan website Perseroan pada tanggal 4 November 2021.

### 4.4.2. Perjanjian kredit

- a. **Akta Perjanjian Kredit No. 18 tertanggal 9 November 2020 dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan II Terhadap Perjanjian Kredit No. 441/04/2023 tertanggal 17 April 2023**

#### Para pihak

- (i) PKP, sebagai Debitur; dan
- (ii) PT Bank UOB Indonesia, sebagai Bank.

#### Nilai pokok

*Revolving Credit Facility* bersifat *uncommitted* hingga jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000.

#### Tujuan

Bank menyediakan *Revolving Credit Facility* tersebut kepada Debitur untuk tujuan korporasi secara umum termasuk kebutuhan modal kerja dan *bridging loan* untuk mendanai kebutuhan modal kerja.

#### Jangka waktu

Fasilitas kredit diperpanjang sampai dengan tanggal 30 April 2024 dan atas kesepakatan para pihak jangka waktu fasilitas kredit dapat diperpanjang kembali.

#### Bunga

Bunga atas *Revolving Credit Facility* adalah JIBOR ditambah 2,00% (*floating*) per tahun.

#### Pembatasan

Debitur setuju bahwa sejak penandatanganan perjanjian kredit dan selama jumlah terutang belum dibayar penuh, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Debitur tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain: (i) menjual, menghibahkan, melepaskan hak kepada pihak ketiga manapun juga atas harta kekayaan Debitur; (ii) menggadaikan, membebanai dengan jaminan, memberikan garansi, atau dengan cara apapun melakukan tindakan pengikatan jaminan atas harta kekayaan Debitur untuk kepentingan pihak ketiga manapun; (iii) melakukan atau menyetujui untuk dilakukannya penggabungan usaha (*merger*), akuisisi, peleburan usaha (konsolidasi) atau pemisahan usaha (*spin-off*); dan (iv) menerima pinjaman atau memberikan pinjaman kepada pihak lain kecuali pemberian pinjaman kepada atau penerimaan pinjaman dari pemegang saham, perusahaan anak dan perusahaan afiliasinya.



Hukum yang berlaku  
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Saldo pada tanggal 23 Juni 2023  
Nihil.

- b. **Akta Perjanjian Kredit No. 55 tanggal 22 Desember 2020, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali (*Amended and Restated*) Perjanjian Kredit No. 02 tanggal 13 Mei 2022, yang seluruhnya dibuat dihadapan Veronica Nataatmadja, S.H., M.Corp., Admin., M.Com (Business Law), Notaris di Jakarta**

Para pihak

- (i) GHON, sebagai Debitur; dan
- (ii) PT Bank QNB Indonesia Tbk., sebagai Bank.

Nilai pokok

- (i) Fasilitas *Term Loan* 1 sampai jumlah setinggi-tingginya Rp50.000.000.000; dan
  - (ii) Fasilitas *Term Loan* 2 sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp50.000.000.000.
- Fasilitas tersebut diatas diberikan (baik secara sendiri-sendiri maupun seluruhnya) atas dasar dengan komitmen (*committed*).

Tujuan

Bank menyediakan Fasilitas *Term Loan Facility* tersebut kepada Debitur untuk pembiayaan kembali belanja modal (*capital expenditure*) yang sebelumnya dibiayai oleh UOB.

Jangka waktu

- (i) Fasilitas *Term Loan* 1 selama 5 (lima) tahun sejak atau sampai dengan tanggal 22 Desember 2025; dan
- (ii) Fasilitas *Term Loan* 2 selama 4 (empat) tahun dihitung sejak penandatanganan perjanjian kredit (yaitu sejak tanggal 22 Desember 2020).

Bunga

- (i) Bunga atas Fasilitas *Term Loan* 1 adalah JIBOR satu bulan ditambah 2,75% per tahun; dan
- (ii) Bunga atas Fasilitas *Term Loan* 2 adalah JIBOR satu bulan ditambah 1,20% per tahun.

Pembatasan

Debitur, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut: (i) melakukan investasi untuk meningkatkan kapasitas atau investasi lainnya yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan dan/atau berdampak kepada kapasitas pembayaran pinjaman kepada Bank; (ii) memberikan pinjaman kepada pihak lain (termasuk pemegang saham); (iii) memberikan suatu penjaminan kepada pihak lain; (iv) melakukan *merger*, akuisisi, konsolidasi, *spin-off* atau aksi korporasi lainnya yang dapat mengakibatkan pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit pada Bank; (v) *negative pledge*; dan (vi) mengajukan pinjaman baru diatas Rp200.000.000.000.

Hukum yang berlaku  
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan  
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (kecuali apabila Debitur dan Bank kemudian sepakat untuk memilih Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan).

Saldo pada tanggal 23 Juni 2023  
Rp62,3 miliar.



- c. **Akta Perjanjian Kredit No. 128 tertanggal 31 Oktober 2018 dibuat dihadapan Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Jakarta Barat, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 358/03/2023 tanggal 27 Maret 2023**

Para pihak

- (i) GHON, sebagai Debitur; dan
- (ii) PT Bank UOB Indonesia, sebagai UOB.

Nilai pokok

Fasilitas *Revolving Credit Facility* 1 bersifat *uncommitted* hingga jumlah pokok sebesar Rp250.000.000.000 ("RCF 1").

Tujuan

RCF 1 diberikan untuk modal kerja Debitur dan/atau pendanaan sebelumnya atas belanja modal.

Jangka waktu

RCF 1 disediakan oleh UOB untuk dicairkan/ditarik oleh Debitur sampai dengan tanggal 31 Maret 2024.

Bunga

- (i) Rasio *debt to EBITDA* kurang dari 3x dikenakan margin JIBOR ditambah 1,20% per tahun;
- (ii) Rasio *debt to EBITDA* lebih atau sama dengan 3x dikenakan margin JIBOR ditambah 1,70% per tahun.

Pembatasan

Debitur setuju bahwa sejak penandatanganan perjanjian kredit dan selama jumlah terutang belum dibayar penuh, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari UOB, Debitur tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain: (i) menjual, menghibahkan, melepaskan hak, mewakafkan, menggadaikan, membebani atau dengan cara apapun melakukan tindakan pengalihan hak atau kepentingan, membebani dengan Jaminan Fidusia, membebani dengan Hak Tanggungan atau dengan cara apapun melakukan tindakan pengikatan jaminan, atau menyewakan kepada pihak ketiga manapun juga, harta kekayaan Debitur, kecuali dalam rangka kegiatan operasional usaha Debitur sehari-hari; (ii) mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, membubarkan atau melakukan atau menyetujui untuk dilakukannya penggabungan usaha (*merger*), akuisisi, peleburan usaha (konsolidasi) atau pemisahan usaha (*spin off*); (iii) memberikan pinjaman kepada pihak lain (termasuk pemberian pinjaman kepada pemegang saham, perusahaan anak dan perusahaan afiliasinya), kecuali pinjaman kepada karyawan, pengusaha kecil dan koperasi yang ditentukan oleh pemerintah, atau pinjaman yang memang biasa dan wajib dilakukan dalam rangka kegiatan operasional usaha Debitur sehari-hari yang wajar; (iv) melakukan penyertaan modal, pengambilalihan saham (termasuk melakukan akuisisi), investasi baru di dalam perusahaan lain, atau mendirikan anak perusahaan; (v) mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian kredit kepada pihak manapun; (vi) melakukan perubahan atas anggaran dasar, susunan pengurus dan/atau pemegang saham Debitur yang mengakibatkan kepemilikan saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung pada Debitur menjadi berkurang dari 50,425%; dan (vii) mengikatkan diri sebagai penjamin/penanggung *corporate guarantee* kepada pihak lain manapun.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Saldo pada tanggal 23 Juni 2023

Rp234,8 miliar.





**d. Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 398/PFP-DBSI/XII/1-2/2022 tanggal 29 Desember 2022, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan dan Penegasan Kembali atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 131/PFPA-DBSI/V/1-2/2023 tanggal 22 Mei 2023**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Nasabah 1;
- (ii) Unicom, sebagai Nasabah 2; dan
- (iii) DBSI, sebagai Bank.

Nasabah 1 dan Nasabah 2 disebut secara bersama-sama sebagai Nasabah.

Nilai pokok

Bank setuju untuk menyediakan kepada Nasabah fasilitas perbankan dalam bentuk *Uncommitted Revolving Credit Facility* ("Fasilitas RCF") dengan jumlah pokok fasilitas tersedia maksimum hingga sebesar Rp1.050.000.000.000 atau ekuivalennya dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, dengan jangka waktu untuk setiap penarikan maksimum satu tahun ("Pokok Fasilitas"), yang dapat digunakan secara bersama-sama oleh Nasabah namun tidak melebihi Pokok Fasilitas dengan rincian sebagai berikut :

- (i) Nasabah 1 maksimum hingga sebesar Rp1.050.000.000.000;
- (ii) Nasabah 2 maksimum hingga sebesar Rp800.000.000.000.

Tujuan

Bank memberikan Fasilitas RCF tersebut kepada Nasabah untuk kebutuhan pendanaan umum grup termasuk namun tidak terbatas pada pelunasan utang yang telah ada.

Jangka waktu

Sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini yaitu tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 29 Desember 2023, dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh tempo dengan pemberitahuan kepada Nasabah, kecuali jika diakhiri lebih awal oleh Bank.

Bunga

Tingkat suku bunga sebagaimana dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Bank dengan maksimum periode bunga 6 (enam) bulan dan wajib dibayarkan pada setiap akhir jangka waktu bunga yang bersangkutan yang akan diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah sebelum Nasabah menggunakan Fasilitas RCF.

Pembatasan

Nasabah setuju bahwa tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Nasabah tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain: (i) menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aset Nasabah termasuk hak atas pendapatan Nasabah, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh dimasa yang akan datang, kecuali antara lain penjaminan atau pembebanan untuk menjamin pembayaran hutang serta penjaminan atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan sebagian atau seluruh porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang baik dalam satu transaksi maupun secara bertahap di masa yang akan datang yang dijamin dengan jenis aset yang sama; (ii) memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali antara lain pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah ada sebelum ditandatanganinya perjanjian ini dan pinjaman atau penjaminan kepada atau untuk kepentingan anak perusahaan atau uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha Nasabah sehari-hari; (iii) mengubah jenis usaha Nasabah; (iv) memindahtangankan sebagian besar aset (*major asset*) dalam bentuk atau dengan nama apapun juga dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga; dan (v) mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penunandaan pembayaran utang.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.



Penyelesaian perselisihan  
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Saldo pada tanggal 23 Juni 2023  
Rp180,0 miliar.

**e. US\$325.000.000 Facility Agreement tertanggal 18 April 2023**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Induk;
- (ii) Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT, sebagai Para Peminjam Awal (*Original Borrower*) dan Para Penjamin Awal (*Original Guarantor*);
- (iii) (a) BNP Paribas; (b) Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Singapore Branch; (c) DBS Bank Ltd.; (d) Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.; (e) United Overseas Bank Ltd; (f) PT Bank CIMB Niaga Tbk., (g) PT Bank HSBC Indonesia; (h) PT Bank Mizuho Indonesia; dan (i) PT Bank OCBC NISP Tbk. sebagai Pengatur (*Arranger*);
- (iv) United Overseas Bank Ltd., sebagai Agen; dan
- (v) (a) BNP Paribas; (b) Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Singapore Branch; (c) DBS Bank Ltd.; (d) Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.; (e) United Overseas Bank Ltd; (f) PT Bank CIMB Niaga Tbk.; (g) PT Bank HSBC Indonesia; (h) PT Bank Mizuho Indonesia; dan (i) PT Bank OCBC NISP Tbk., sebagai Pemberi Pinjaman Awal (*Original Lender*).

Nilai pokok

Fasilitas pinjaman revolving (*revolving loan facility*) dengan total komitmen sebesar US\$325.000.000.

Tujuan

Setiap Peminjam Awal dapat menggunakan seluruh jumlah uang yang dipinjam berdasarkan fasilitas pinjaman *revolving* berdasarkan perjanjian ini untuk pendanaan yang bersifat umum dari Para Peminjam Awal, yang termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran kembali utang, belanja modal dan pembiayaan pengambilalihan yang diizinkan sesuai dengan perjanjian ini.

Jangka Waktu

Setiap Peminjam Awal yang telah melakukan penarikan akhir fasilitas pinjaman ini harus membayar kembali fasilitas pinjaman tersebut pada hari terakhir dari periode bunga. Seluruh jumlah terutang berdasarkan perjanjian ini harus dilunasi pada tanggal akhir pembayaran kembali, yaitu tanggal 17 Agustus 2026.

Pembatasan finansial

- (i) *Senior leverage ratio* kurang dari atau setara dengan 5,0:1; dan
- (ii) *Top tier revenue ratio* tidak kurang dari 0,5:1.

Bunga

Bunga untuk setiap fasilitas pinjaman untuk setiap periode bunga adalah persentase per tahun yang merupakan penjumlahan total dari :

- (i) Marjin yang berlaku, yang terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :
  - (a) Jika *senior leverage ratio* kurang dari 1,0:1 :
    - (1) Untuk kreditur luar negeri, sebesar 1,25% per tahun; dan
    - (2) Untuk kreditur dalam negeri, sebesar 1,33% per tahun;
  - (b) Jika *senior leverage ratio* sama dengan atau lebih dari 1,0:1 :
    - (1) Untuk kreditur luar negeri, sebesar 1,40% per tahun; dan
    - (2) Untuk kreditur dalam negeri, sebesar 1,48% per tahun;
- (ii) *Compounded Reference Rate*.

Pembayaran bunga atas pinjaman dilakukan pada hari terakhir setiap periode bunga.

Hukum yang berlaku

Hukum Inggris.



Penyelesaian perselisihan  
Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

Saldo pada tanggal 23 Juni 2023  
US\$165,1 juta.

**f. Akta Subordinasi (*Deed of Subordination*) tanggal 18 April 2023**

Para pihak

- (i) Perseroan, Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT, sebagai Kreditur Yang Tersedordinasi Awal (*Original Subordinated Creditor*);
- (ii) Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT, sebagai Peminjam Awal (*Original Debtor*); dan
- (iii) United Overseas Bank Ltd., sebagai Agen.

Ketentuan

Kreditur Yang Tersedordinasi (termasuk Kreditur Yang Tersedordinasi Awal) dapat menerima atau meminta suatu pembayaran, tanpa persetujuan tertulis dari Agen terlebih dahulu, atas kewajiban-kewajiban yang terutang dari Peminjam (termasuk Peminjam Awal) kepada Kreditur Yang Tersedordinasi, sebagaimana diatur dalam suatu perjanjian yang mengatur pemenuhan kewajiban-kewajiban dari Peminjam kepada Kreditur Yang Tersedordinasi, sepanjang tidak berlanjutnya keadaan cidera janji menurut *US\$325.000.000 Facility Agreement*.

Jangka waktu

Sampai dengan pelunasan seluruh kewajiban dalam *US\$325.000.000 Facility Agreement* dan dokumen lainnya terkait fasilitas pinjaman dalam *US\$325.000.000 Facility Agreement*.

Hukum yang berlaku

Hukum Inggris.

Penyelesaian perselisihan

Arbitrase Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

**g. Perjanjian Penanggungan Perusahaan dan Ganti Rugi (“Penanggungan Perusahaan”) No. 36 tanggal 16 Mei 2023, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta**

Para pihak

- (i) Triaka, TB, TI, MBT, MSI, Mitrayasa, PMS, SKP, TO, SMI, UT, BT, dan Balikom, sebagai Para Penanggung; dan
- (ii) United Overseas Bank Limited, sebagai Agen.

Ketentuan

Para Penanggung tersebut merupakan Para Obligor dalam *US\$325.000.000 Facility Agreement*. Para Penanggung secara bersama-sama dan masing-masing secara tidak bersyarat dan tidak dapat ditarik kembali, menanggung, sebagai kewajiban berkelanjutan, pembayaran pada saat jatuh tempo dan tepat waktu atas Kewajiban Yang Dijamin (yaitu seluruh kewajiban yang sekarang dan dikemudian hari termasuk tapi tidak terbatas pada jumlah apapun (baik pokok, bunga, imbal jasa atau lainnya) yang atau setiap saat jatuh tempo, terutang atau ditimbulkan oleh masing-masing Obligor terhadap pihak pembiayaan berdasarkan dokumen pembiayaan yang diatur dalam *US\$325.000.000 Facility Agreement* (termasuk antara lain dokumen *US\$325.000.000 Facility Agreement* dan dan setiap dokumen lain yang ditunjuk sebagai dokumen pembiayaan oleh Agen dan agen dari Para Obligor) atau dari jasa-jasa yang dilakukan atau biaya-biaya yang ditimbulkan oleh Agen berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini) dalam mata uang atau mata uang masing-masing yang harus dibayar berdasarkan ketentuan dokumen pembiayaan yang terkait. Para Penanggung juga secara tanggung renteng dengan tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat setuju sebagai kewajiban utama Para Penanggung untuk



secara penuh mengganti rugi Agen dan para pihak pembiayaan lainnya pada saat permintaan pertama atas dan terhadap jumlah apapun yang dari waktu ke waktu yang ditimbulkan oleh Agen dan para pihak pembiayaan lain sebagai akibat Para Obligor gagal untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan dokumen pembiayaan.

Jangka waktu

Penanggungan Perusahaan ini berlaku sampai Kewajiban Yang Dijamin sebagaimana tersebut diatas telah dibayar secara penuh.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

**h. Perjanjian Fasilitas tanggal 11 Mei 2023**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Peminjam; dan
- (ii) PT Bank HSBC Indonesia, sebagai Kreditur.

Nilai pokok

Rp500.000.000.000 atau yang setara dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

Tujuan

Peminjam akan menggunakan semua jumlah yang dipinjam untuk kebutuhan pendanaan umum Perseroan dan Perusahaan anak, termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran kembali utang yang ada.

Jangka waktu

12 bulan terhitung setelah tanggal penandatanganan perjanjian ini yaitu tanggal 11 Mei 2023.

Bunga

Suku bunga atas masing-masing pinjaman untuk masing-masing periode bunga adalah :

- (a) sehubungan dengan pinjaman dalam Rupiah, suku bunga tetap selama jangka waktu pinjaman sebesar 7,23% per tahun di bawah dari IDR *term lending rate* Kreditur; dan
- (b) Sehubungan dengan pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat, suku bunga tetap selama jangka waktu pinjaman sebesar 8,89% per tahun di bawah dari USD *term lending rate* Kreditur.

Pembatasan

Dengan memperhatikan adanya ketentuan pengecualian yang relevan, Perseroan berjanji untuk tidak, antara lain: (i) melakukan perubahan substansial apapun terhadap sifat umum usaha, struktur absah atau status korporasinya; (ii) mengalihkan atau memindahkan aset selain pelepasan yang diizinkan; (iii) memberikan jaminan atau ganti rugi kepada pihak lain kecuali terkait utang yang diizinkan atau pelepasan yang diizinkan; dan (iv) menimbulkan atau menanggung utang keuangan apapun kecuali utang yang diizinkan. Utang yang diizinkan berarti, antara lain, utang keuangan apa pun jika tidak ada cedera janji berlanjut pada saat utang keuangan tersebut ditimbulkan atau utang keuangan mana pun yang ditimbulkan dengan cara pinjaman antar-perusahaan atau pinjaman pemegang saham antara Peminjam dan salah satu dari anggota grup yang disubordinasi terhadap dokumen pembiayaan.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Saldo pada tanggal 23 Juni 2023

Nihil.



**i. Perjanjian Fasilitas tanggal 15 Mei 2023**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Peminjam; dan
- (ii) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., sebagai Kreditur.

Nilai pokok

Fasilitas pinjaman tanpa komitmen sebesar Rp1.000.000.000.000.

Tujuan

Peminjam akan menggunakan semua jumlah yang dipinjam untuk kebutuhan pendanaan umum, termasuk namun tidak terbatas pada belanja modal, modal kerja dan pembiayaan untuk pengembangan usaha serta pembayaran kembali utang yang ada sesuai rencana bisnis Peminjam.

Jangka waktu

12 bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan dokumen pembiayaan.

Bunga

Suku bunga atas masing-masing pinjaman untuk masing-masing periode bunga adalah suku persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari: (i) marjin yang diterapkan; (ii) JIBOR; atau (iii) suku bunga yang disepakati antara Peminjam dan Kreditur yang akan diberitahukan melalui surat pemberitahuan suku bunga.

Pembatasan

Dengan memperhatikan adanya ketentuan pengecualian yang relevan, Peminjam berjanji untuk tidak, antara lain: (i) melakukan perubahan substansial apapun terhadap sifat umum usaha, struktur hukumnya atau status korporasinya; (ii) mengalihkan atau memindahkan aset selain pelepasan yang diizinkan; (iii) memberikan jaminan atau ganti rugi kepada pihak lain kecuali terkait utang yang diizinkan atau pelepasan yang diizinkan; dan (iv) menimbulkan atau menanggung utang keuangan apapun kecuali utang yang diizinkan. Utang yang diizinkan berarti, antara lain, utang keuangan apa pun jika tidak ada cedera janji berlanjut pada saat utang keuangan tersebut ditimbulkan atau utang keuangan mana pun yang ditimbulkan dengan cara pinjaman antar-perusahaan atau pinjaman pemegang saham antara Peminjam dan salah satu dari anggota grup yang disubordinasi terhadap dokumen pembiayaan.

Pembatasan finansial

Peminjam wajib memenuhi janji keuangan yakni rasio *Debt to EBITDA* kuartal terakhir dikalikan 4 (LQA) maksimum sebesar 6,25x selama terikat dengan perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Saldo pada tanggal 23 Juni 2023

Rp650,0 miliar.

**j. Perjanjian Fasilitas tanggal 23 Mei 2023**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Peminjam; dan
- (ii) PT Bank BNP Paribas Indonesia, sebagai Kreditur.

Nilai pokok

Fasilitas kredit bergulir tanpa komitmen hingga sebesar Rp500.000.000.000.



#### Tujuan

Peminjam akan menggunakan semua jumlah yang dipinjam untuk kebutuhan pendanaan umum dari Peminjam dan Perusahaan Anak, termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran utang yang ada.

#### Jangka waktu

Semua jumlah yang terutang harus dibayar pada tanggal 29 Februari 2024.

#### Bunga

Suku bunga atas masing-masing pinjaman untuk masing-masing periode bunga adalah persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari: (i) margin yang berlaku; ditambah (ii) JIBOR. Margin berarti 1% per tahun.

#### Pembatasan

Dengan memperhatikan adanya ketentuan pengecualian yang relevan, Peminjam berjanji untuk tidak, antara lain: (i) melakukan perubahan substansial apapun terhadap sifat umum usaha, struktur hukum atau status korporasinya; (ii) menjual atau memindahkan aset selain pelepasan yang diizinkan; (iii) menciptakan atau memperbolehkan adanya jaminan atas asetnya yang manapun selain terhadap jaminan yang diizinkan; dan (iv) menimbulkan, menanggung atau menjadi atau tetap berkewajiban secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan utang keuangan apa pun kecuali utang yang diizinkan. Utang yang diizinkan berarti, antara lain, utang keuangan apa pun jika tidak ada cidera janji berlanjut pada saat utang keuangan tersebut ditimbulkan atau utang keuangan mana pun yang ditimbulkan dengan cara pinjaman antar-perusahaan atau pinjaman pemegang saham antara Peminjam dan salah satu dari anggota grup yang disubordinasi terhadap dokumen pembiayaan.

#### Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

#### Penyelesaian perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

#### Saldo pada tanggal 23 Juni 2023

Nihil.

### **k. Perjanjian Fasilitas tanggal 24 Mei 2023**

#### Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Peminjam; dan
- (ii) PT Bank Maybank Indonesia Tbk., sebagai Kreditur.

#### Nilai pokok

Fasilitas pinjaman jangka pendek tanpa komitmen sebesar Rp500.000.000.000.

#### Tujuan

Peminjam akan menggunakan semua jumlah yang dipinjam untuk kebutuhan pendanaan umum.

#### Jangka waktu

Semua jumlah yang terutang berdasarkan fasilitas harus dibayar kembali pada setiap periode akhir jangka waktu fasilitas atau Peminjam dapat menyampaikan permohonan perpanjangan masing-masing pinjaman sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja sebelum hari terakhir periode bunga. Atas permohonan tersebut dan atas pertimbangan dari Kreditur, masing-masing pinjaman dapat dilakukan perpanjangan (*roll over*). Jangka waktu fasilitas berarti jangka waktu dari masing-masing pinjaman, yaitu maksimum selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak masing-masing tanggal penggunaan dan tidak lebih dari tanggal pengakhiran. Tanggal penggunaan berarti tanggal saat pinjaman yang terkait akan dibuat sedangkan tanggal pengakhiran berarti 12 bulan sejak tanggal Perjanjian ini (jika tanggal pengakhiran jatuh bukan pada hari kerja, maka sebagai gantinya akan jatuh pada hari kerja segera sebelumnya).



#### Bunga

Suku bunga atas masing-masing pinjaman untuk masing-masing periode bunga adalah 0,25% per tahun di atas *cost of fund* yang akan dikutip pada tanggal penggunaan.

#### Pembatasan

Dengan memperhatikan adanya ketentuan pengecualian yang relevan, Peminjam berjanji untuk tidak, antara lain: (i) melakukan perubahan substansial apapun terhadap sifat umum usaha, struktur hukum atau status korporasinya; (ii) menjual atau memindahkan aset selain pelepasan yang diizinkan; (iii) menciptakan atau memperbolehkan adanya jaminan atas asetnya yang manapun selain terhadap jaminan yang diizinkan; dan (iv) menimbulkan, menanggung atau menjadi atau tetap berkewajiban secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan utang keuangan apa pun kecuali utang yang diizinkan. Utang yang diizinkan berarti, antara lain, utang keuangan apa pun jika tidak ada cidera janji berlanjut pada saat utang keuangan tersebut ditimbulkan atau utang keuangan mana pun yang ditimbulkan dengan cara pinjaman antar-perusahaan atau pinjaman pemegang saham antara Peminjam dan salah satu dari anggota grup yang disubordinasi terhadap dokumen pembiayaan.

#### Pembatasan finansial

Peminjam harus memastikan bahwa setiap saat rasio utang konsolidasi terhadap EBITDA untuk periode terkait tidak melebihi dari 6,25:1.

#### Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

#### Penyelesaian perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

#### Saldo pada tanggal 23 Juni 2023

Nihil.

### **I. Perjanjian Fasilitas tanggal 29 Mei 2023**

#### Para pihak

- (i) Perseroan sebagai Peminjam; dan
- (ii) PT Bank UOB Indonesia sebagai Kreditur.

#### Nilai pokok

Fasilitas pinjaman tanpa komitmen yang berupa *Revolving Credit Facility* yang diberikan dalam Rupiah hingga jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000 atau US\$65.000.000, yang mana yang lebih rendah, dengan ketentuan keseluruhan jumlah terutang fasilitas, fasilitas-fasilitas LC/BG dan fasilitas *Accounts Receivable Purchase* (ARP) secara bersama-sama dari waktu ke waktu tidak boleh melebihi US\$80.000.000, sebagaimana ditentukan oleh Kreditur.

#### Tujuan

Peminjam akan menggunakan semua jumlah yang dipinjam untuk kebutuhan pendanaan umum dari Peminjam dan Perusahaan Anak, termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran kembali utang yang ada.

#### Jangka waktu

Peminjam harus membayar kembali setiap pinjaman kepada Kreditur pada tanggal pembayaran kembali yaitu tanggal yang jatuh 3 (tiga) bulan setelah tanggal penggunaan. Untuk menghindari keraguan, semua jumlah yang terutang berdasarkan fasilitas harus dibayar kembali pada tanggal pembayaran kembali akhir (yang berarti tanggal yang jatuh 12 bulan setelah tanggal Perjanjian ini)) dalam mata uang pinjaman.

#### Bunga

Suku bunga atas masing-masing pinjaman untuk masing-masing periode bunga adalah persentase per tahun yang akan disepakati oleh Kreditur dan Peminjam dan yang dikutip pada tanggal penggunaan pinjaman tersebut.





#### Pembatasan

Dengan memperhatikan adanya ketentuan pengecualian yang relevan, Peminjam berjanji untuk tidak, antara lain: (i) melakukan perubahan substansial apapun terhadap sifat umum usaha, struktur hukum atau status korporasinya; (ii) menjual atau memindahkan aset selain pelepasan yang diizinkan; (iii) menciptakan atau memperbolehkan adanya jaminan atas asetnya yang manapun selain terhadap jaminan yang diizinkan; dan (iv) menimbulkan, menanggung atau menjadi atau tetap berkewajiban secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan utang keuangan apa pun kecuali utang yang diizinkan. Utang yang diizinkan berarti, antara lain, utang keuangan apa pun jika tidak ada cedera janji berlanjut pada saat utang keuangan tersebut ditimbulkan atau utang keuangan mana pun yang ditimbulkan dengan cara pinjaman antar-perusahaan atau pinjaman pemegang saham antara Peminjam dan salah satu dari anggota grup yang disubordinasi terhadap dokumen pembiayaan.

#### Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

#### Penyelesaian perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

#### Saldo pada tanggal 23 Juni 2023

Rp100,0 miliar.

#### **m. Akta Perjanjian Fasilitas No. 2 tanggal 5 Juni 2023, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta**

#### Para pihak

- (i) Perseroan sebagai Peminjam; dan
- (ii) Bank of China (Hong Kong) Limited, cabang Jakarta sebagai Bank.

#### Nilai pokok

Fasilitas pinjaman bergulir (*revolving*) tanpa komitmen sebesar Rp500.000.000.000.

#### Tujuan

Peminjam akan menggunakan semua jumlah yang dipinjam untuk persyaratan pendanaan umum dari Peminjam dan anak perusahaannya termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran kembali utang yang ada.

#### Jangka waktu

Peminjam harus membayar seluruh jumlah yang terutang (termasuk bunga, biaya-biaya, denda-denda (jika ada)) yang wajib dibayarkan kepada Bank pada tanggal pembayaran kembali akhir, yaitu 12 bulan dari tanggal Perjanjian ini.

#### Bunga

Suku bunga atas masing-masing pinjaman untuk masing-masing periode bunga adalah persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari:

- (i) marjin yang berlaku; dan
- (ii) JIBOR.

Marjin berarti -0,60% (minus nol koma enam nol persen) per tahun atau suku bunga lainnya yang disetujui Peminjam dan Bank.

#### Pembatasan

Dengan memperhatikan adanya ketentuan pengecualian yang relevan, Peminjam berjanji untuk tidak, antara lain: (i) melakukan perubahan substansial apapun terhadap sifat umum usaha, struktur hukum atau status korporasinya; (ii) menjual atau memindahkan aset selain pelepasan yang diizinkan; (iii) menciptakan atau memperbolehkan adanya jaminan atas asetnya yang manapun selain terhadap jaminan yang diizinkan; dan (iv) menimbulkan, menanggung atau menjadi atau tetap berkewajiban



secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan utang keuangan apa pun kecuali utang yang diizinkan. Utang yang diizinkan berarti, antara lain, utang keuangan apa pun jika tidak ada cedera janji berlanjut pada saat utang keuangan tersebut ditimbulkan atau utang keuangan mana pun yang ditimbulkan dengan cara pinjaman antar-perusahaan atau pinjaman pemegang saham antara Peminjam dan salah satu dari anggota grup yang disubordinasi terhadap dokumen pembiayaan.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Saldo pada tanggal 23 Juni 2023

Nihil.

#### 4.2.3. Perjanjian sewa menara telekomunikasi antara Perseroan dan Perusahaan Anak dengan pelanggan

##### a. Perjanjian sewa menara telekomunikasi

Group Tower Bersama mengadakan perjanjian induk sewa-menyewa menara telekomunikasi (“*Master Lease Agreement*” atau “**Perjanjian Induk Sewa Menara Telekomunikasi**”) dengan perusahaan-perusahaan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia, antara lain Telkomsel, XL Axiata, IOH, Smartfren, PT Smart Telecom (“**SMART**”), PT Aplikanusa Lintasarta (“**Lintasarta**”), PT Berca Hardayaperkasa (“**Berca**”), PT Innovate Mas Indonesia, PT Mora Telematika Indonesia Tbk., dan Mitratel (perusahaan-perusahaan penyedia jasa telekomunikasi tersebut untuk selanjutnya disebut “**Penyewa**”). Dalam Perjanjian Induk Sewa Menara Telekomunikasi, Penyewa sepakat untuk menyewa menara telekomunikasi dan infrastruktur telekomunikasi milik Perseroan melalui Perusahaan Anak (“**Obyek Sewa**”), dimana Penyewa akan menempatkan perangkat telekomunikasi milik Penyewa, yaitu antara lain *antenna seluler*, *antenna microwave*, BTS, dan perangkat telekomunikasi lainnya dan Perseroan melalui Perusahaan Anak sepakat untuk menyediakan Obyek Sewa tersebut kepada Penyewa. Para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian sewa atas masing-masing menara dan infrastruktur telekomunikasi (*tower lease agreement*) yang sudah ada atau yang akan dibangun di lokasi-lokasi yang telah disetujui atau akan disetujui oleh para pihak.

Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi antara Perseroan melalui Perusahaan Anak dengan Penyewa pada umumnya memiliki jangka waktu antara 5 (lima) tahun sampai dengan 20 tahun. Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi hanya dapat diputuskan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Selama jangka waktu perjanjian Perseroan melalui Perusahaan Anak memiliki kewajiban untuk, antara lain :

- (i) membebaskan lokasi dimana Obyek Sewa akan ditempatkan;
- (ii) mengurus segala kelengkapan perizinan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kebiasaan setempat;
- (iii) bertanggung jawab atas kerusakan Obyek Sewa serta kelengkapannya yang disebabkan kurang baiknya mutu bangunan Obyek Sewa;
- (iv) melakukan perbaikan-perbaikan yang akan ditentukan secara khusus dalam masing-masing perjanjian; dan
- (v) memberi izin kepada Penyewa untuk memasuki lokasi dan melaksanakan pekerjaan atas Obyek Sewa.

Setiap tahunnya Penyewa membayar harga sewa kepada Perseroan melalui Perusahaan Anak selama jangka waktu sewa masih berlangsung.



Di bawah ini adalah daftar Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi antara Perseroan, Perusahaan Anak dengan Penyewa yang saat ini masih sepenuhnya berlaku dan mengikat para pihak :

• **TI**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
<b>Telkomsel</b>		
1.	Perjanjian Payung Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> dan Jasa Pemeliharannya dengan No. 061/BC/PROC-01/LOG/2010; No. 082/TBG-TI-001/FAL/04/IV/10 tanggal 30 April 2010, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama terhadap Perjanjian Payung Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> tanggal 6 April 2015.	10 tahun dan dimulai dihitung pada (i) hari ke 14 sejak tanggal RFI; atau (ii) tanggal <i>on air</i> lokasi, mana yang terlebih dahulu terjadi dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 (lima) tahun.
<b>IOH</b>		
2.	Perjanjian Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> dan <i>Site Acquisition</i> untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi dengan No. SRM: 3100000502 tanggal 2 Juli 2009, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Kedua terhadap Perjanjian Induk Kerjasama Sewa Menyewa Infrastruktur Telekomunikasi Serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> dan <i>Site Acquisition</i> untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi dengan Nomor SRM: 5100004759 tanggal 5 Agustus 2019.	10 tahun terhitung sejak tanggal 2 Juli 2009 hingga 1 Juli 2019 dan diperpanjang hingga tanggal 1 Juli 2029, kecuali diakhiri terlebih dahulu oleh para pihak berdasarkan syarat dan ketentuan dalam perjanjian. Jangka waktu perjanjian dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan para pihak.
3.	Perjanjian Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi Terpadu No. 287/LGL-MLA-TowerCo/Co/PT.Telenet Internusa/HSBH/Tech/VII/09 tanggal 14 Juli 2009, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga Terhadap Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara No. 422/LGL-AMD3/PT Telenet Internusa/CTO/Tech/VII/20 tanggal 29 Juli 2020.	Perjanjian induk ini berlaku terus menerus terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian induk ini oleh para pihak sampai dengan diakhiri dengan persetujuan terlebih dahulu oleh para pihak.
4.	Perjanjian Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi Terpadu No. 419/LGL-MLA-TowerCo/PT.Lintas Persada Manunggal/HS-BH/Tech/X/09, yang telah dialihkan dari PT Lintas Persada Manunggal (" <b>LSM</b> ") kepada TI dengan Akta Jual Beli No. 10 tanggal 2 Desember 2010, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta dan Surat No. 11/LPM-SEKPRO/IX/11 tanggal 10 Agustus 2011 tentang Pengalihan <i>Site</i> dan Fasilitas LSM kepada TI.	Perjanjian induk ini berlaku terus menerus terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian induk ini oleh para pihak sampai dengan diakhiri dengan persetujuan terlebih dahulu oleh para pihak.
<b>XL Axiata</b>		
5.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0176-08-F07-120156 tanggal 28 Juli 2008, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A10-0176-08-F07-120156 tanggal 7 April 2022.	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS.
<b>Smartfren</b>		
6.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Infrastruktur <i>Tower Existing</i> dengan Pola Sewa No. 022.M8/022.TB-T1.07/TEK/II/07 tanggal 24 Januari 2007.	Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian sampai dengan berakhirnya masa sewa atas seluruh infrastruktur <i>tower</i> yang disewa. Perpanjangan dituangkan dalam BAPS.

• **UT**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
<b>Telkomsel</b>		
<b>IOH</b>		
1.	Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> dan <i>Site Acquisition</i> untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi SRM No. 3100000500 tanggal 2 Juli 2009, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Kedua No. 5100004751 tanggal 3 September 2019.	10 tahun terhitung sejak tanggal 26 Juni 2009 hingga 25 Juni 2019 dan diperpanjang hingga tanggal 25 Juni 2029, kecuali diakhiri terlebih dahulu oleh para pihak berdasarkan syarat dan ketentuan dalam perjanjian.
2.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Terpadu No. 288/LGL-MLA-TowerCo/PT.United Towerindo/HS-BH/Tech/VII/09 tanggal 14 Juli 2009, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga Terhadap Perjanjian Sewa Induk No. 426/LGL-AMD3/PT United Towerindo/CTO/Tech/VII/20 tanggal 29 Juli 2020.	12 tahun terhitung dari tanggal eksekusi dari masing-masing <i>site</i> , kecuali diakhiri terlebih dahulu sesuai dengan perjanjian.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
<b>XL Axiata</b>		
3.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0213-07-DNOT-39034 tanggal 17 September 2007, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen No. 9 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A9-0213-07-DNOT-39034 tanggal 29 Maret 2022.	10 tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan BAPS.
<b>Smartfren</b>		
4.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Infrastruktur <i>Tower Existing</i> dengan Pola Sewa No. 034.M8/034.TB-UT.07/TEK/II/07 tanggal 8 Februari 2007.	Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian sampai dengan berakhirnya masa sewa dan perpanjangan dituangkan dalam BAPS dan ditandatangani wakil-wakil para pihak.

• **BT**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
<b>Telkomsel</b>		
1.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Menara Infrastruktur <i>Tower</i> dengan No. 078/TBG-BAT-001/FAL/04/IV/10; No. 064/BC/PROC-01/LOG/2010 tertanggal 30 April 2010, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Pertama terhadap Kontrak Payung Sewa Menyewa Menara Infrastruktur <i>Tower</i> No. 064/BC/PROC-01/LOG/2010; No. 078/TBG-BAT-001/FAL/04/IV/10 tertanggal 6 April 2015.	10 tahun dan dimulai dihitung pada (i) hari ke 14 sejak tanggal RFI; atau (ii) tanggal <i>on air</i> lokasi, mana yang terlebih dahulu terjadi dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 (lima) tahun kemudian sesuai kesepakatan dan persetujuan para pihak.
2.	Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur Mini Macro di Regional Jabotabek Sejumlah 1 Site No. TBG-TBE-238/PDI/04/X/22 tanggal 4 Oktober 2022.	Sejak tanggal efektif kontrak ini atau mengikuti tanggal sewa yang tertera pada lampiran III kontrak (mana yang lebih dahulu). Kontrak dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam kontrak.
<b>IOH</b>		
3.	Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> dan <i>Site Acquisition</i> untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi SRM No. 3100000501 tanggal 2 Juli 2009, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Kedua No. 5100004739 tanggal 3 September 2019.	10 tahun dihitung sejak tanggal 2 Juli 2009 hingga 1 Juli 2019 dan diperpanjang hingga tanggal 1 Juli 2029, kecuali diakhiri terlebih dahulu oleh para pihak dalam perjanjian.
4.	<i>Master Lease Agreement</i> No. 0181/LGL-MLA-TowerCo/PT.Batavia Towerindo/HS-BH/Tech/II/10 tanggal 11 Januari 2010, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga Terhadap Perjanjian Sewa Induk No. 417/LGL-AMD3/PT United Towerindo/CTO/Tech/VII/20 tanggal 29 Juli 2020.	Perjanjian berlaku pada saat tanggal efektif berlaku, kecuali diakhiri sebelumnya sesuai dengan perjanjian, berlaku seterusnya sampai habisnya jangka waktu sewa yang paling lama, izin, atau hak untuk mengakses, menempati dan memakai.
<b>XL Axiata</b>		
5.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0201-07-DNOT-39035 tanggal 29 Agustus 2007, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen No. 10 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A10-0201-07-DNOT-39035 tanggal 29 Maret 2022.	10 tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan BAPS.
<b>Smartfren</b>		
6.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 065d/Procurement/Smartfren/MLA-Batavia/X/15 tanggal 7 Oktober 2015.	Perjanjian berlaku secara terus-menerus dihitung sejak ditandatanganinya sampai dengan diakhiri oleh para pihak.

• **TB**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
<b>Telkomsel</b>		
1.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> No. PKS.314/LG.05/AR.003/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014.	9 (sembilan) tahun dihitung sejak tanggal 27 Oktober 2014 atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS.
2.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> No. Telkomsel: PKS.316/LG.05/AR.003/X/2014 dan No. Rekanan: 003/PKPSM/HOC131115/IBST.Tsel/XII/2014 tanggal 27 Oktober 2014.	9 (sembilan) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
3.	Perjanjian Kerjasama Sewa Sarana Infrastruktur Telekomunikasi Selular No. AR02140989 tanggal 19 Desember 2014.	9 (sembilan) tahun dihitung sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023 dan dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis oleh para pihak.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
4.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dan Jasa Pemeliharaannya dengan No. 060/BC/PROC-01/LOG/2010; No. 081/TB-TB-001/FAL/04/IV/10 tanggal 30 April 2010, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Pertama tanggal 6 April 2015.	10 tahun dan mulai dihitung 14 Hari Kalender sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 (lima) tahun.
5.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower 3 Lokasi di Jawa Timur No. Telkomsel: PKS.344/LG.05/AR.003/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015.	9 (sembilan) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
6.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower 3 Lokasi di Jawa Timur No. Telkomsel: PKS.345/LG.05/AR.003/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015.	9 (sembilan) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
7.	Perjanjian Kerjasama Sewa Sarana Infrastruktur Telekomunikasi Selular No. AR021501246 tanggal 7 September 2015.	9 (sembilan) tahun sesuai daftar lokasi site dan dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis oleh para pihak.
8.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur Tower di Wilayah Jawa Tengah No. 181/LG.05/RG-360/VIII/2015 tanggal 14 September 2015.	Sejak tanggal efektif hingga 9 (sembilan) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS.
9.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower 2 Lokasi di Jawa Timur No. Telkomsel: PKS.547/LG.05/AR.003/IX/2015 tanggal 29 September 2015.	9 (sembilan) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
10.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower No. PKS.548/LG.05/AR.003/IX/2015 tanggal 29 September 2015.	9 (sembilan) tahun dihitung sejak tanggal 29 September 2015 atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS.
11.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower 2 Lokasi di Jawa Timur No. Telkomsel: PKS.569/LG.05/AR.003/X/2015 dan No. Rekanan: 001/IBST-TSEL/PKPSM-HOC140032/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015.	9 (sembilan) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
12.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower 2 Lokasi di Jawa Timur No. Telkomsel: PKS.571/LG.05/AR.003/X/2015 dan No. Rekanan: 002/IBST-TSEL/PKPSM-HOC140032/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015.	9 (sembilan) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
13.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower 2 Lokasi di Jawa Timur No. Telkomsel: PKS.572/LG.05/AR.003/X/2015 dan No. Rekanan: 003/IBST-TSEL/PKPSM-HOC131113/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015.	9 (sembilan) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
14.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower 3 Lokasi di Jawa Timur No. Telkomsel: PKS.570/LG.05/AR.003/X/2015 dan No. Rekanan: 004/IBST-TSEL/PKPSM-HOC131115/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015.	9 (sembilan) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
15.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower 3 (tiga) Lokasi di Jawa Timur No. Telkomsel: PKS.672/LG.05/AR.003/XII/2015 dan No. Rekanan: 002/IBST-TSEL/PKPSM-HOC131115/II/2016 tanggal 8 Desember 2015.	9 (sembilan) tahun dihitung sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
16.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower 1 (satu) Lokasi di Jawa Timur No. Telkomsel: PKS.673/LG.05/AR.003/XII/2015 dan No. Rekanan: 003/IBST-TSEL/PKPSM-HOC140032/II/2016 tanggal 8 Desember 2015.	9 (sembilan) tahun dihitung sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024 atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
17.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower 1 (satu) Lokasi di Jawa Timur No. Telkomsel: PKS.674/LG.05/AR.003/XII/2015 dan No. Rekanan: 004/IBST-TSEL/PKPSM-HOC13113/II/2016 tanggal 8 Desember 2015.	9 (sembilan) tahun dihitung sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024 atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
18.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower 1 (satu) Lokasi di Jawa Timur No. Telkomsel: PKS.676/LG.05/AR.003/XII/2015 dan No. Rekanan: 006/IBST-TSEL/PKPSM-HOC140032/II/2016 tanggal 8 Desember 2015.	9 (sembilan) tahun dihitung sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024 atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
19.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower 1 (satu) Lokasi di Jawa Timur No. Telkomsel: PKS.677/LG.05/AR.003/XII/2015 dan No. Rekanan: 007/IBST-TSEL/PKPSM-HOC140032/II/2016 tanggal 8 Desember 2015.	9 (sembilan) tahun dihitung sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
20.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower 1 (satu) Lokasi di Jawa Timur No. Telkomsel: PKS.678/LG.05/AR.003/XII/2015 dan No. Rekanan: 008/IBST-TSEL/PKPSM-HOC140032/II/2016 tanggal 8 Desember 2015.	9 (sembilan) tahun dihitung sejak tanggal 4 Maret 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024 atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.





No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
21.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower 1 (satu) Lokasi di Jawa Timur No. Telkomsel: PKS.702/LG.05/AR.003/XII/2015 dan No. Rekanan: 003/IBST-TSEL/PKPSM-HOC150077/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015.	9 (sembilan) tahun terhitung sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2024 atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
22.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower No. PKS.186/LG.05/AR.003/IV/2016 tanggal 8 April 2016.	9 (sembilan) tahun terhitung sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan 24 Maret 2024 atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS.
23.	Perjanjian Kerjasama Sewa Sarana Infrastruktur Telekomunikasi Selular No. AR02160566 tanggal 2 Mei 2016.	9 (sembilan) tahun sesuai daftar lokasi site dan dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis oleh para pihak.
24.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower 2 Lokasi di Jawa Timur No. Telkomsel: PKS.317/LG.05/AR.003/VII/2016 dan No. Rekanan: 013/IBST-TSEL/PKPSM-HOC150077/VII/2015 tanggal 21 Juli 2016.	9 (sembilan) tahun terhitung sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
25.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower 3 Lokasi di Jawa Timur No. Telkomsel: PKS.335/LG.05/AR.003/VIII/2016 dan No. Rekanan: 011/IBST-TSEL/PKPSM-HOC140032/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016.	9 (sembilan) tahun terhitung sejak tanggal 4 April 2015 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024 atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
26.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower 3 Lokasi di Jawa Timur No. Telkomsel: PKS.337/LG.05/AR.003/VIII/2016 dan No. Rekanan: 014/IBST-TSEL/PKPSM-HOC151063/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016.	9 (sembilan) tahun terhitung sejak tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025 atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
27.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower 3 Lokasi di Jawa Timur No. Telkomsel: PKS.338/LG.05/AR.003/VIII/2015 dan No. Rekanan: 020/IBST-TSEL/PKPSM-HOC140032-HOC151063/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016.	10 tahun terhitung sejak tanggal 6 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025 atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
28.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower 3 Lokasi di Jawa Timur No. Telkomsel: PKS.339/LG.05/AR.003/VIII/2016 dan No. Rekanan: 016/IBST-TSEL/PKPSM-HOC151063/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016.	9 (sembilan) tahun terhitung sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024 atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
29.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower 2 Lokasi di Jawa Timur No. Telkomsel: PKS.388/LG.05/AR.003/IX/2016 dan No. Rekanan: 016/IBST-TSEL/PKPSM-HOC150627 tanggal 6 September 2016.	9 (sembilan) tahun terhitung sejak tanggal 9 April 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2025 atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
30.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower No. PKS.389/LG.05/AR.003/IX/2016 tanggal 6 September 2016.	9 (sembilan) tahun terhitung sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan 29 September 2025 atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS.
31.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower 2 Lokasi di Jawa Timur No. Telkomsel: PKS.409/LG.05/AR.003/IX/2016 dan No. Rekanan: 018/IBST-TSEL/PKPSM-HOC140032-HOC151063/IX/2016 tanggal 16 September 2016.	9 (sembilan) tahun terhitung sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2025 atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
32.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower 2 Lokasi di Jawa Timur No. Telkomsel: PKS.443/LG.05/AR.003/X/2016 dan No. Rekanan: 019/IBST-TSEL/PKPSM-HOC150077/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016.	9 (sembilan) tahun terhitung sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025 atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
33.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Macro Cell Pole Area Sumbagut No. 018/BC/PROC-01/LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016.	10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
34.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Macro Cell Pole Area Sumbagteng No. 019/BC/PROC-01/LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016.	10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
35.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Macro Cell Pole Area Jabotabek North No. 020/BC/PROC-01/LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016.	10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
36.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Macro Cell Pole Area Jabotabek South No. 021/BC/PROC-01/LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016.	10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
37.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Macro Cell Pole Area Jawa Barat No. 022/BC/PROC-01/LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016.	10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
38.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Macro Cell Pole Area Jawa Tengah No. 023/BC/PROC-01/LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016.	10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
39.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Macro Cell Pole</i> Area Jawa Timur No. 024/BC/PROC-01/LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016.	10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
40.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Macro Cell Pole</i> Area Bali North No.025/BC/PROC-01/LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016.	10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
41.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Macro Cell Pole</i> Area Bali South No.026/BC/PROC-01/LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016.	10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
42.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Macro Cell Pole</i> Area Kalimantan North No.027/BC/PROC-01/LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016.	10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
43.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Macro Cell Pole</i> Area Kalimantan South No.028/BC/PROC-01/LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016.	10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
44.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Macro Cell Pole</i> Area Sulawesi North No.029/BC/PROC-01/LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016.	10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
45.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Macro Cell Pole</i> Area Sulawesi South No.030/BC/PROC-01/LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016.	10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
46.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Macro Cell Pole</i> Area Papua Maluku No.031/BC/PROC-01/LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016.	10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
47.	Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur <i>Tower</i> No. PKS. 0099/AR02/RW-01/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017.	9 (sembilan) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam perjanjian.
48.	Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur <i>Tower</i> 3 Lokasi di Wilayah Jawa Tengah dan DIY No. 124/HK.05/RH-01/VII/2017 tanggal 22 November 2017.	9 (sembilan) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
49.	Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur <i>Tower</i> 3 Lokasi di Wilayah Jawa Tengah No. 126/HK.05/RH-01/VII/2017 tanggal 22 November 2017.	9 (sembilan) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS.
50.	Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur <i>Tower</i> 5 Lokasi di Wilayah Jawa Tengah No. 127/HK.05/RH-01/VII/2017 tanggal 22 November 2017.	6 (enam) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS.
51.	Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur <i>Tower</i> 1 Lokasi di Wilayah Jawa Tengah dan DIY No. 130/HK.05/RH-01/VII/2017 tanggal 22 November 2017.	9 (sembilan) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
52.	Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur <i>Tower</i> 3 Lokasi di Wilayah Jawa Tengah No. 131/HK.05/RH-01/VII/2017 tanggal 22 November 2017.	9 (sembilan) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS.
53.	Kontrak Induk Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> Program Blue Ocean Tahun 2017 di Area 1 dan Jasa Pemeliharaannya No. 001/IBST-TSEL/PKPSM-MPA001-1711-4440 tanggal 29 November 2017.	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif atau mengikuti tanggal sewa yang tertera pada baps yang ditandatangani para pihak.
54.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur BTS Hotel <i>Batch</i> -1 Tahun 2017 di Jabotabek untuk 20 Lokasi No. MPA001-1711-4482 tanggal 5 Desember 2017.	9 (sembilan) tahun sejak tanggal efektif kontrak ini atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS masing-masing lokasi infrastruktur BTS hotel terakhir.
55.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur BTS Hotel <i>Batch</i> -2 Tahun 2017 di Jabotabek untuk 20 Lokasi No. MPA001-1711-4483 tanggal 5 Desember 2017.	9 (sembilan) tahun sejak tanggal efektif kontrak ini atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS masing-masing lokasi infrastruktur BTS hotel terakhir.
56.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur BTS Hotel <i>Batch</i> -3 Tahun 2017 di Jabotabek untuk 20 Lokasi No. MPA001-1711-4484 tanggal 5 Desember 2017.	9 (sembilan) tahun sejak tanggal efektif kontrak ini atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS masing-masing lokasi infrastruktur BTS hotel terakhir.
57.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur BTS Hotel <i>Batch</i> -4 Tahun 2017 di Jabotabek untuk 25 Lokasi No. MPA001-1711-4485 tanggal 5 Desember 2017.	9 (sembilan) tahun sejak tanggal efektif kontrak ini atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS masing-masing lokasi infrastruktur BTS hotel terakhir.
58.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur BTS Hotel Tahun 2017 di Balinusra untuk 11 Lokasi No. MPA001-1711-4487 tanggal 5 Desember 2017.	9 (sembilan) tahun sejak tanggal efektif kontrak ini atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS masing-masing lokasi infrastruktur BTS hotel terakhir.
59.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur BTS Hotel Tahun 2017 di Area Papua Maluku untuk 20 Lokasi No. MPA001-1711-4582 tanggal 5 Desember 2017.	9 (sembilan) tahun sejak tanggal efektif kontrak ini atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS masing-masing lokasi infrastruktur BTS hotel terakhir.
60.	Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur Telekomunikasi BDS608 Cibereumpermai No. PKS. 0023/AR02/RQ-01/II/2018 tanggal 31 Januari 2018.	9 (sembilan) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam perjanjian.





No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
61.	Pembaharuan Kontrak Induk Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> No. 003/PKS/FIN-STI/III/2018 tanggal 12 Maret 2018.	Berlaku sejak tanggal efektif hingga terhitung sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan 27 April 2026 atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS.
62.	Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur <i>Tower</i> 6 Lokasi di Wilayah Jawa Tengah dan DIY No. 59/HK.05/RH-01/IV/2018 tanggal 17 Mei 2018.	5 (lima) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS.
63.	Kontrak Induk Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> beserta Jasa Pemeliharaannya Program <i>Untapped</i> Tahun 2018 No. MPA001-1807-7034 tanggal 20 Juli 2018.	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif atau mengikuti tanggal sewa yang tertera pada BAPS yang ditandatangani para pihak.
64.	Perjanjian Kerjasama Sewa Sarana Infrastruktur Telekomunikasi Selular No. AR02161179 tanggal 1 Agustus 2018.	8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024 dan dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis oleh para pihak.
65.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> dan Jasa Pemeliharaannya Program <i>Untapped</i> Tahun 2018 Area Sumbagut Bagian Utara No. MPA001-1810-7762 tanggal 22 November 2018.	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS <i>site</i> terakhir.
66.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> dan Jasa Pemeliharaannya Program <i>Untapped</i> Tahun 2018 Area Sumbagut Bagian Selatan No. MPA001-1810-7763 tanggal 22 November 2018.	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS <i>site</i> terakhir.
67.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> dan Jasa Pemeliharaannya Program <i>Untapped</i> Tahun 2018 Area Sumbagsel Bagian Utara No. MPA001-1810-7764 tanggal 22 November 2018.	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS <i>site</i> terakhir.
68.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> dan Jasa Pemeliharaannya Program <i>Untapped</i> Tahun 2018 Area Sumbagsel Bagian Timur No. MPA001-1810-7765 tanggal 22 November 2018.	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS <i>site</i> terakhir.
69.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> dan Jasa Pemeliharaannya Program <i>Untapped</i> Tahun 2018 Area Sumbagsel Bagian Barat No. MPA001-1810-7766 tanggal 22 November 2018.	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS <i>site</i> terakhir.
70.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> dan Jasa Pemeliharaannya Program <i>Untapped</i> Tahun 2018 Area Sumbagteng Bagian Utara No. MPA001-1810-7767 tanggal 22 November 2018.	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS <i>site</i> terakhir.
71.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> dan Jasa Pemeliharaannya Program <i>Untapped</i> Tahun 2018 Area Sumbagteng Bagian Selatan No. MPA001-1810-7768 tanggal 22 November 2018.	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS <i>site</i> terakhir.
72.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> dan Jasa Pemeliharaannya Program <i>Untapped</i> Tahun 2018 Area Jabotabek No. MPA001-1810-7769 tanggal 22 November 2018.	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS <i>site</i> terakhir.
73.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> dan Jasa Pemeliharaannya Program <i>Untapped</i> Tahun 2018 Area Jawa Barat No. MPA001-1810-7770 tanggal 22 November 2018.	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS <i>site</i> terakhir.
74.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> dan Jasa Pemeliharaannya Program <i>Untapped</i> Tahun 2018 Area Jawa Tengah No. MPA001-1810-7791 tanggal 22 November 2018.	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS <i>site</i> terakhir.
75.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> dan Jasa Pemeliharaannya Program <i>Untapped</i> Tahun 2018 Area Jawa Timur No. MPA001-1810-7793 tanggal 22 November 2018.	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS <i>site</i> terakhir.
76.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> dan Jasa Pemeliharaannya Program <i>Untapped</i> Tahun 2018 Area Bali Nusra No. MPA001-1810-7794 tanggal 22 November 2018.	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS <i>site</i> terakhir.
77.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> dan Jasa Pemeliharaannya Program <i>Untapped</i> Tahun 2018 Area Kalimantan & Sulawesi No. MPA001-1810-7795 tanggal 22 November 2018.	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS <i>site</i> terakhir.
78.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> dan Jasa Pemeliharaannya Program <i>Untapped</i> Tahun 2018 Area Papua Maluku Bagian Barat No. MPA001-1810-7796 tanggal 22 November 2018.	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS <i>site</i> terakhir.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
79.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> dan Jasa Pemeliharaannya Program <i>Untapped</i> Tahun 2018 Area Papua Maluku Bagian Timur No. MPA001-1810-7797 tanggal 22 November 2018.	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS <i>site</i> terakhir.
80.	Kontrak Induk Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> No. 017.F/IBS-TSEL/PKS/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019.	Sejak tanggal efektif hingga masa sewa mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS.
81.	Kontrak Induk Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> No. 017.H/IBS-TSEL/PKS/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019.	Sejak tanggal efektif hingga masa sewa mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS.
82.	Kontrak Induk Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> No. 017.G/IBS-TSEL/PKS/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019.	Sejak tanggal efektif hingga masa sewa mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS.
83.	Kontrak Induk Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> No. 017.B/IBS-TSEL/PKS/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019.	Sejak tanggal efektif hingga masa sewa mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS.
84.	Kontrak Induk Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> No. 017.C/IBS-TSEL/PKS/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019.	Sejak tanggal efektif hingga masa sewa mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS.
85.	Kontrak Induk Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> No. 017.E/IBS-TSEL/PKS/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019.	Sejak tanggal efektif hingga masa sewa mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS.
86.	Kontrak Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower 7 Site</i> Regional Sumbangsel No. hCO0110N19-STO0319 tanggal 30 Desember 2019.	Jangka waktu penggunaan layanan utama pada masing-masing <i>site</i> akan diatur pada lampiran III kontrak, meskipun kontrak ditandatangani oleh para pihak sebelum atau sesudah tanggal dimulainya sewa.
87.	Kontrak Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower 6 Site</i> Regional Sumbangsel No. hCO0110N19-STO0320 tanggal 30 Desember 2019.	Jangka waktu penggunaan layanan utama pada masing-masing <i>site</i> akan diatur pada lampiran III kontrak, meskipun kontrak ditandatangani oleh para pihak sebelum atau sesudah tanggal dimulainya sewa.
88.	Kontrak Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower 6 Site</i> Regional Sumbangsel No. hCO0110N19-STO0318 tanggal 30 Desember 2019.	Jangka waktu penggunaan layanan utama pada masing-masing <i>site</i> akan diatur pada lampiran III kontrak, meskipun kontrak ditandatangani oleh para pihak sebelum atau sesudah tanggal dimulainya sewa.
89.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Macro Cell Pole Area I, II, III dan IV</i> Sejumlah 50 <i>Site</i> No. M100100570 tanggal 16 Maret 2020.	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak ini atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAST masing-masing lokasi <i>macro cell pole</i> terakhir. Kontrak ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur di dalam kontrak ini.
90.	Perjanjian Pekerjaan Sewa Sarana Infrastruktur <i>Tower</i> MCP di 8 Lokasi antara PT Telekomunikasi Selular dan PT Sky Telekomunikasi Indonesia No. MPA211-1908-9551 tanggal 2 November 2020, sebagaimana telah dialihkan kepada TB berdasarkan Perjanjian Pengalihan Kerjasama atas Kontrak Sewa <i>Tower</i> Sejumlah 13 <i>Site</i> No. TBG-TBE-00243/PDI/04/VII/2021 tanggal 10 Agustus 2021.	5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam perjanjian.
91.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur BTS Hotel Regional Sumbangsel, Jabotabek & Balinusra untuk 110 Lokasi No. TBG-TBE-00089/PDI/04/III/2021 tanggal 24 Februari 2021.	10 tahun sejak tanggal efektif perjanjian atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAST masing-masing lokasi infrastruktur BTS Hotel.
92.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur BTS Hotel Regional Jawa Barat Untuk 7 Lokasi No: M100003283 tanggal: 27 Agustus 2021.	5 (lima) tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAST masing-masing lokasi.
93.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Macro Cell Pole</i> Regional No: M100003197 tanggal: 14 September 2021.	Sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal sewa yang tertera pada lampiran III kontrak (mana yang lebih dulu).
94.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower Blue Ocean</i> dan Jasa Pemeliharaannya di Regional Sumbangsel, Regional Jawa Timur dan Regional Bali Nusra (8 <i>Site</i> ) No. M100003534 tanggal 22 November 2021.	9 (sembilan) tahun sejak tanggal penandatanganan kontrak.
95.	Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur <i>Mini Macro</i> di Regional Balinusra, Jabar, Jateng, Jatim, Kalimantan, Puma, Sulawesi, Sumbangsel, Sumbangsel Sejumlah 66 <i>Site</i> No. M100003567 tanggal 3 Desember 2021.	Sejak tanggal penandatanganan kontrak atau mengikuti tanggal sewa yang tertera pada BAST masing-masing lokasi (mana yang lebih dahulu) dan berlaku untuk jangka waktu maksimal 9 (sembilan) tahun.
96.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Macro Cell Pole</i> dan Jasa Pemeliharaannya Regional Jateng, Jatim, Balinusra, Kalimantan, Puma dan Sulawesi (253 <i>Site</i> ) No. M100003767 tanggal 21 Desember 2021.	Sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal sewa yang tertera pada lampiran kontrak (mana yang lebih dahulu).
97.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Macro Cell Pole</i> (MCP) dan Jasa Pemeliharaannya Area 1, Area 3, Area 5 (56 <i>Site</i> ) No. TBG-TBE-218A/PDI/04/IX/22 tanggal 29 September 2021.	Sejak tanggal efektif kontrak ini atau mengikuti tanggal sewa yang tertera pada lampiran III kontrak (mana yang lebih dahulu). Kontrak dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam kontrak.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
98.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Macro Cell Pole</i> (MCP) dan Jasa Pemeliharaannya Area 22 (38 <i>site</i> ) No. TBG-TBE-218B/PDI/04/IX/2022 tanggal 29 September 2022.	Sejak tanggal efektif kontrak ini atau mengikuti tanggal sewa yang tertera pada lampiran III kontrak (mana yang lebih dahulu). Kontrak dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam kontrak.
99.	Kontrak Induk Sewa Menyewa Infrastruktur Mini Macro di Regional Jabotabek, Jabar, Jateng, Balinusra Sejumlah 19 <i>Site</i> No. TBG-TBE-218C/PDI/04/IX/22 tanggal 29 September 2022.	Sejak tanggal efektif kontrak ini atau mengikuti tanggal sewa yang tertera pada lampiran III kontrak (mana yang lebih dahulu). Kontrak dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam kontrak.
<b>IOH</b>		
100.	Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> dan <i>Site Acquisition</i> untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi SRM No. 3100000307 tanggal 25 Mei 2009, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama Terhadap Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Infrastruktur Telekomunikasi Serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> , dan <i>Site Acquisition</i> untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi tanggal 25 Maret 2014.	10 tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
101.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa <i>Small Cell</i> No. 5100001542 tanggal 5 Mei 2015.	Perjanjian ini berlaku selama 10 tahun sejak tanggal 5 Mei 2015 dan/atau sampai dengan tanggal berakhirnya masa sewa suatu obyek sewa terakhir yang masih berlaku, tanggal mana yang paling terakhir.
102.	Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> dan <i>Site Acquisition</i> untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 3100001136 tanggal 25 Juli 2011, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Kedua terhadap Perjanjian Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi Serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> dan <i>Site Acquisition</i> untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 5100004817 tanggal 1 Desember 2019.	10 tahun kecuali diakhiri lebih awal.
103.	Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta <i>Civil Mechanical, Electrical</i> dan <i>Site Acquisition</i> untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi pada Menara yang Dialihkan No. CTR0002528 dan 011/IBS-Indosat/PKS/III/2021 tanggal 31 Maret 2021.	10 tahun sejak tanggal efektif perjanjian, kecuali diakhiri lebih awal sebagaimana diatur dalam perjanjian.
104.	Kontrak Induk Untuk Sewa Jaringan Fiber Optik No. CTR009565 tanggal 14 April 2022.	10 tahun dihitung sejak tanggal efektif kontrak yaitu tanggal 7 April 2022.
105.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa HCPT No. 261/LGL-MLA-TB/PT Tower Bersama/HS-BH/Tech/VI/09 tanggal 26 Juni 2009, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga Terhadap Perjanjian Sewa Induk No. 423/LGL-AMD3/PT Tower Bersama/CTO/Tech/VII/20 tanggal 29 Juli 2020.	Perjanjian berlaku pada saat tanggal efektif berlaku, kecuali diakhiri terlebih dahulu sesuai dengan perjanjian.
106.	<i>Lease Agreement</i> (Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa) of RNC Sampit No. 327/LGL-AGR-TowerCo/PT Tower Bersama/MNH-CKT/Tech/VII/19 tanggal 15 Juli 2019.	Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal efektif dan akan berlanjut untuk jangka waktu 10 tahun kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian ini.
107.	Perjanjian Sewa Induk No. 063/LGL-MLA-TowerCo/PT. Inti Bangun Sejahtera/HS-MM/Tech/II/12 tanggal 24 Januari 2012, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Keempat Terhadap Perjanjian Sewa Induk Operator Ref. No. 282/LGL-AMD4-TowerCo/PT Inti Bangun Sejahtera Tbk/CTO/Tech/VI/20 tanggal 17 Juni 2020.	Jangka waktu setiap lisensi <i>site</i> adalah : (i) 12 tahun terkait <i>site</i> sejak tanggal penandatanganan lisensi <i>site</i> yang relevan, kecuali <i>site build-to-suit</i> baru; dan (ii) 10 tahun terkait <i>site build-to-suit</i> baru sejak tanggal perizinan <i>site (site license)</i> yang relevan.
108.	MCP <i>Master Lease Agreement</i> No. 700/LGL-AGR/PT Tower Bersama/MNH-CKT/Tech/XI/20 tanggal 23 November 2020.	10 tahun dari tanggal eksekusi dari lisensi <i>site</i> tersebut kecuali diakhiri terlebih dahulu sesuai dengan perjanjian ini.
109.	BTS Hotel <i>Lease Agreement</i> No. 761/LGL-AGR/PT Tower Bersama/GW/Tech/XII/20 tanggal 14 Desember 2020.	10 tahun dari tanggal eksekusi dari lisensi <i>site</i> tersebut kecuali diakhiri terlebih dahulu sesuai dengan perjanjian ini.
<b>XL Axiata</b>		
110.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0212-027-DNOT-39033 tanggal 17 September 2007, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen No. 12 atas Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A12-0212-07-DNOT-39033 tanggal 2 Oktober 2020.	Jangka waktu perjanjian akan dimulai sejak tanggal efektif perjanjian, kecuali diakhiri lebih dulu sesuai ketentuan perjanjian, akan tetap berlaku terkait dengan masing-masing BAK selama setiap BAK masih berlaku, dan perjanjian ini akan berakhir pada tanggal pertama dimana tidak ada BAK dengan XL Axiata yang masih berlaku.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
111.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0042-10-F07-29723 tanggal 15 Januari 2010, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Sehubungan dengan Site yang Dialihkan No. 137/XL/III/2021 tanggal 30 Maret 2021.	5 (lima) tahun untuk <i>site co-location</i> dan 10 tahun untuk <i>site</i> lainnya dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu untuk <i>site</i> lainnya dan dapat diperpanjang selama 5 (lima) tahun untuk <i>site co-location</i> .
112.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur untuk <i>Semi Macro/Mini Macro</i> No. 0253-11-DNOT-39033 tanggal 9 Agustus 2011, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen No. 1 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur untuk <i>Semi Macro/Mini Macro</i> No. A1-0253-11-DNOT-39033 tanggal 18 Maret 2013.	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
113.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Semi BTS Hotel</i> No. 0010-14-F07-39033 tanggal 28 April 2014, sebagaimana telah diubah dengan Amendemen No. 1 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Semi BTS Hotel</i> No. A1-0010-14-F07-39033 tanggal 30 September 2015.	10 tahun terhitung dan mulai berlaku efektif sejak ditandatanganinya BAPS dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
<b>Smartfren</b>		
114.	Perjanjian Sewa Menyewa Menara tanggal 16 Agustus 2006, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen No. 2 Perjanjian Sewa Menyewa Menara tanggal 18 Januari 2010.	12 tahun dari tanggal tersebut dan dapat diperbaharui untuk 10 tahun ke depan dengan persetujuan kedua belah pihak.
115.	Perubahan dan Penegasan Kembali atas Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi No. 019/IBS-SF/PKS/II/2016 tanggal 8 Januari 2016, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi (Khusus Obyek Sewa Yang Dialihkan) No. 002/NOV/IBS-SF/III/2021 tanggal 1 Maret 2021.	10 tahun dan selanjutnya akan diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.
116.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Infrastruktur Telekomunikasi Proyek MRT FASE-1 Jakarta No. TBG-TBE-00472/PDI/05/IV/2020 tanggal 1 April 2020.	10 tahun terhitung dan mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 September 2019 kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian.
<b>SMART</b>		
117.	Perjanjian Sewa Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi No. 433/Networks/SMART/PSM-TBG/IX/09 tanggal 17 September 2009.	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
118.	Perjanjian Sewa Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi No. 199b/Procurement/SMART/PKS-Tower/XI/11 tanggal 1 November 2011, sebagaimana telah dialihkan oleh PT Tower Capital Indonesia kepada TB berdasarkan Surat No. 06/TCI-SMART/II/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Pengalihan <i>Site</i> dan <i>Tower</i> PT Tower Capital Indonesia kepada TB.	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
119.	Perubahan dan Penegasan Kembali atas Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi No. 002a/Procurement/SMART/PKS-IBS/II/16 tanggal 8 Januari 2016, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi (Khusus Obyek Sewa Yang Dialihkan) No. 003/NOV/IBS-SF/III/2021 tanggal 1 Maret 2021.	10 tahun dan selanjutnya akan diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.
<b>PT Innovate Mas Indonesia</b>		
120.	Perjanjian Pemanfaatan <i>Shelter</i> No. 011/IMI-IBS/PKS-Project/III/2017 tanggal 7 Maret 2017, sebagaimana diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Pemanfaatan <i>Shelter</i> Sehubungan Dengan Obyek Sewa Yang Dialihkan tanggal 3 Februari 2021.	Sejak tanggal 14 Agustus 2014 dan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu pemanfaatan atas <i>shelter</i> , dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian.
<b>PT Mora Telematika Indonesia Tbk.</b>		
121.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang pada Menara Telekomunikasi Untuk Penempatan IP Radio Antenna No. IBS: 12/IBS-MTI/PKS/XI/2020 dan No. Moratel: 306/PKS/MTI-IBST/XI/2020 tanggal 3 November 2020, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Sewa Menyewa Ruang pada Menara Telekomunikasi untuk Penempatan IP Radio Antenna No. 046/PKS/MTI-IBS/III/2021 tanggal 15 Februari 2021.	5 (lima) tahun dimulai sejak tanggal ditandatanganinya BAPS akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian yang paling akhir sebagaimana tertera dalam BAPS.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
<b>PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (Mitratel)</b>		
122.	Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa No. 006/IBSDMT/PKS/IV/2016 tanggal 1 April 2016, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali terhadap Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Sehubungan dengan Site yang Dialihkan No. 005/IBSDMT/PKS/III/2021 tanggal 1 Maret 2021.	3 (tiga) tahun terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang untuk 3 (tiga) tahun berikutnya dengan persetujuan kedua belah pihak.

• **TK**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
<b>XL Axiata</b>		
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0021-110-F07-120568 tanggal 4 Maret 2010, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen No. 9 atas Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A9-0021-10-F07-120568 tanggal 10 November 2020.	Jangka waktu penggunaan obyek sewa per <i>site</i> berlaku untuk selama 10 tahun, terhitung dan mulai berlaku sejak ditandatanganinya berita acara penyerahan <i>site</i> .
<b>IOH</b>		
2.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi No. 027/LGL-MLA-TowerCo/PT. Towerindo Konvergensi/RSS-MM/Tech/II/12 tanggal 25 Januari 2012, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga Terhadap Perjanjian Sewa Induk No. 424/LGL-AMD3/PT Towerindo Konvergensi/ CTO/Tech/VII/20 tanggal 29 Juli 2020.	Jangka waktu setiap <i>site license</i> adalah 12 tahun dari tanggal eksekusi dari <i>site license</i> tersebut kecuali diakhiri terlebih dahulu sesuai dengan perjanjian ini.
<b>Smarfren</b>		
3.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 065c/ <i>Procurement/Smartfren/MLA-Towerindo/X/15</i> tanggal 7 Oktober 2015.	Perjanjian berlaku secara terus-menerus terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak sampai dengan diakhiri sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian perjanjian.

• **PMS**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
<b>Telkomsel</b>		
1.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> No. Telkomsel: 063/BC/PROC-01/LOG/2010; No. TBG: 080/TBG-PMS-001/FAL/04/IV/10 tanggal 30 April 2010, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama Terhadap Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> tanggal 6 April 2015.	10 tahun dan mulai dihitung pada (i) hari ke-14 sejak tanggal RFI; atau (ii) tanggal <i>on air lokasi</i> , mana yang terlebih dahulu dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 (lima) tahun kemudian sesuai kesepakatan dan persetujuan para pihak.
2.	Kontrak Pengadaan Layanan <i>In Building Coverage 3 Site</i> (IBC) No. : M100004793 tanggal 30 Desember 2022.	Kontrak ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak ini oleh Telkomsel dan PMS atau apabila terdapat Kesepakatan Awal (sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan terkait dari Bagian I dari Kontrak ini) yang ditandatangani oleh Telkomsel dan PMS, berlaku surut terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Awal tersebut oleh Telkomsel dan PMS, yang mana tanggal tersebut adalah tanggal 28 Februari 2019 (" <b>Tanggal Efektif</b> "), dan berlaku untuk mana yang lebih lama antara (i) jangka waktu 84 bulan terhitung sejak Tanggal Efektif atau tanggal mulai pekerjaan; dan (ii) jangka waktu telah diselesaikannya seluruh kewajiban para pihak berdasarkan Kontrak ini.
<b>IOH</b>		
3.	Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> dan <i>Site Acquisition</i> untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi SRM No. 3100000504 tanggal 2 Juli 2009, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Kedua terhadap Perjanjian Induk Kerjasama Sewa Menyewa Infrastruktur Telekomunikasi serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> dan <i>Site Acquisition</i> untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi dengan No. SRM: 5100004750 tanggal 5 Agustus 2019.	10 tahun terhitung sejak tanggal 2 Juli 2009 hingga 1 Juli 2019 dan diperpanjang hingga tanggal 1 Juli 2029, kecuali diakhiri terlebih dahulu oleh para pihak berdasarkan syarat dan ketentuan dalam perjanjian. Jangka waktu perjanjian dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan para pihak.





No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
4.	<i>Master Lease Agreement</i> (Perjanjian Induk Sewa) No. 017/LGL-MLA-TowerCo/PT.Prima Media Selaras/HS-BH/Tech/II/10 tanggal 11 Januari 2010, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga Terhadap Perjanjian Induk Sewa Menyewa Hutch No. 419/LGL-AMD3/PT Prima Media Selaras/CTO/Tech/VII/20 tanggal 29 Juli 2020.	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal Perjanjian ini yaitu 11 Januari 2010 sampai dengan tanggal berakhirnya sewa menyewa, izin, atau hak untuk akses lainnya, penempatan, dan penggunaan yang dimiliki Hutch sehubungan dengan fasilitas pada <i>site</i> yang merupakan perizinan <i>site</i> ( <i>site license</i> ), yang terlama dan terakhir, kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan ketentuan dalam perjanjian ini.
5.	<i>Master Lease Agreement</i> No. 203/LGL-MLA-IBC Provider/PT Dhanadhika Karya Adhika/Hs-BH/Tech/III/2010 tanggal 19 Maret 2010, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen No. 1 <i>to the Master Lease Agreement</i> No. 674/LGL-AMD1-IBC Provider/PT Dhanadhika Karya Adhika/UPMM/Tech/XII/12 tanggal 14 Desember 2012 antara Hutch dan PT Dhanadhika Karya Adhika, yang telah dialihkan kepada PMS berdasarkan Perjanjian Pengalihan tanggal 15 Mei 2015 antara PT Dhanadhika Karya Adhika, PMS, dan Hutch.	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya Formulir Permohonan Operator yang pertama, kecuali diakhiri lebih awal sesuai ketentuan perjanjian, dan akan terus berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya atau tanggal diakhirinya sewa, izin atau hak akses lainnya, okupasi, dan penggunaan yang dimiliki oleh Hutch sehubungan dengan fasilitas pada <i>site</i> .
<b>XL Axiata</b>		
6.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0178-08-F07 tanggal 15 Agustus 2008, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen No.9 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A9-0178-08-F07 tanggal 28 Juli 2021.	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS <i>site</i> yang bersangkutan dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis.
7.	<i>Master Lease Agreement</i> No. 0093-08-F04 tanggal 28 Mei 2008 antara XL dan PT Dhanadhika Karya Adhika, sebagaimana telah dialihkan kepada PMS berdasarkan Perjanjian Pengalihan antara XL, PT Dhanadhika Karya Adhika, dan PMS tanggal 21 September 2015.	Jangka waktu perjanjian ini dimulai sejak tanggal 5 Juni 2008 dan, kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan perjanjian ini, akan terus berlaku, sehubungan dengan masing-masing penyewaan <i>site</i> , selama setiap penyewaan <i>site</i> tersebut masih berlaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan sisanya pada perjanjian ini, dan perjanjian ini akan berakhir pada tanggal pertama pada saat mana tidak ada lagi penyewaan <i>site</i> dengan PMS yang masih berlaku.
<b>Smartfren</b>		
8.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 065a/ <i>Procurement</i> /Smartfren/MLA-PMS/X/15 tanggal 7 Oktober 2015.	Perjanjian ini berlaku secara terus menerus terhitung sejak tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal perjanjian ini oleh para pihak sampai dengan diakhiri sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian ini.  Masa sewa atas objek sewa per <i>site</i> efektif terhitung sejak tanggal efektif mulai sewa sampai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini yang akan dinyatakan pada masing-masing BAPS.

- **Mitrayasa**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
<b>Telkomsel</b>		
1.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> dengan No. Telkomsel: 119/BC/PROC-04/LOG/2010 tanggal 12 Oktober 2010, sebagaimana diubah dengan Amendemen No. 119/BC/PROC-04/LOG/2010 tanggal 6 April 2015.	10 tahun dan mulai dihitung 14 hari sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan 5 (lima) tahun kemudian sesuai kesepakatan dan persetujuan para pihak.
<b>IOH</b>		
2.	Perjanjian Induk Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> ("CME") dan <i>Site Acquisition</i> ("SITAC") untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 310000623 tanggal 13 November 2009, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Pertama Perjanjian Induk Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> ("CME") dan <i>Site Acquisition</i> ("SITAC") untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 5100004738 tanggal 27 Agustus 2018.	10 tahun terhitung sejak tanggal dimulainya masa sewa sebagaimana tercantum dalam BAPS.
3.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi Terpadu No. 293/LGL-MLA-TowerCo/PT Mitrayasa Sarana Informasi/HS-BH/Tech/X/09, sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Induk Sewa Menyewa Hutch No. 390/LGL-AMD2/PT Mitrayasa Sarana Informasi/BW-CKT/Tech/VIII/19 tanggal 14 Agustus 2019.	12 tahun dari tanggal eksekusi dari <i>site license</i> tersebut kecuali diakhiri terlebih dahulu sesuai dengan perjanjian ini.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
4.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi Terpadu No. 393/LGL-MLA-TowerCo/PT.Mitrayasa Sarana Informasi/HS-BH/Tech/X/09 tanggal 1 Oktober 2009, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga Terhadap Perjanjian Sewa Induk No. 418/LGL-AMD3/PT Mitrayasa Sarana Informasi/CTO/Tech/VII/20 tanggal 29 Juli 2020.	12 tahun dari tanggal eksekusi dari <i>site license</i> tersebut kecuali diakhiri terlebih dahulu sesuai dengan perjanjian ini.
<b>XL Axiata</b>		
5.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0014-08-F07 tanggal 21 Januari 2008, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen No. 14 atas Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A14-0014-08-F07 tanggal 10 November 2020.	10 tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani BAPS <i>site</i> yang bersangkutan dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis.
6.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0014-08-F07 tanggal 21 Januari 2008, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen No. 15 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A15-0014-08-F07 tanggal 29 Maret 2022.	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS.

- **SKP**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
<b>Telkomsel</b>		
1.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> Jasa Pemeliharaannya No. 107/BC/PROC-01/LOG/2010 tanggal 2 September 2010, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> tanggal 6 April 2015.	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
2.	Kontrak Penyediaan Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>In Building Coverage</i> No. 1219/LG.05/AR.004/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama Terhadap Kontrak Penyediaan Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>In Building Coverage</i> No. M100003998 tanggal 18 April 2022.	5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang tercantum dalam BAPS yang disepakati oleh para pihak dan dapat diperpanjang atau diakhiri oleh para pihak berdasarkan suatu persetujuan tertulis terlebih dahulu.
3.	Kontrak Induk Sewa Menyewa Infrastruktur Telekomunikasi Proyek MRT FASE-1 Jakarta MPA001-1905-8871 tanggal 24 Mei 2019.	10 tahun terhitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam PO dan/atau BAPS.
4.	Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Infrastruktur <i>In Building Coverage</i> Lokasi Transmart Solo Pabelan No. 05/HK.05/RH-01/IV/2019 tanggal 13 Juni 2019.	5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Juli 2023 dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
5.	Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Infrastruktur <i>In Building Solution</i> Lokasi Icon Mall Gresik No. 089/PROC.01/RH-01/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019.	5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan 27 Desember 2024.
6.	Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur IBC Multi Site Trans Studio Mall Bali (DPR526) No. 233/GA.01/AR-003/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019.	5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan 15 Desember 2024.
7.	Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Infrastruktur <i>In Building Solution</i> No. 004/PROC.01/RH-01/II/2020 tanggal 27 Januari 2020.	3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan 28 Desember 2023 dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
8.	Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur <i>In Building Coverage</i> di Millenium Centennial Centre No. M00002127 tanggal 12 November 2020.	5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan 30 Mei 2025 dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
9.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Tower Pole dan Jasa Pemeliharaannya Area Jabotabek- 2 <i>Site</i> (Mall of Indonesia) No. TBG-TBG-298/P01/04/XII/22 tanggal 22 Desember 2022.	Selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak atau mengikuti tanggal sewa.
10.	Kontrak Pengadaan Layanan <i>In Building Coverage</i> 6 Site di Area Jabotabek, Jatim dan Bali Nusra No. M100004797 tanggal 30 Desember 2022.	Berlaku untuk, mana yang lebih lama antara, (i) jangka waktu 146 bulan terhitung sejak 1 Agustus 2014; atau (ii) jangka waktu diselesaikannya seluruh kewajiban para pihak.
<b>IOH</b>		
11.	Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> dan <i>Site Acquisition</i> untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 448/FKTR/B00-BBB/08 tanggal 23 Juli 2008, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Keempat tanggal 20 November 2012.	3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.





No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
12.	Perjanjian Induk Sewa Infrastruktur Indoor No. CTR001625 tanggal 26 April 2021.	5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal efektif perjanjian yaitu tanggal 29 Mei 2019, kecuali diakhiri lebih awal dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak.
13.	<i>Master Lease Agreement</i> No. 621/LGL-MLA-TowerCo/PT. Solu Sindo Kreasi Pratama/BH-MM/Tech/IX/10 tanggal 17 September 2010, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga Terhadap Perjanjian Sewa Induk No. 420/LGL-AMD3/PT Solu Sindo Kreasi Pratama/CTO/Tech/VII/20 tanggal 29 Juli 2020.	Perjanjian ini berlaku terus menerus terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian induk ini oleh para pihak sampai dengan diakhiri dengan persetujuan terlebih dahulu oleh para pihak.
14.	<i>Master Lease Agreement</i> No. 448/LGL-MLA-IBC Provider/PT. Solu Sindo Kreasi Pratama/RS-MM/Tech/IX/11 tanggal 6 Oktober 2011, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga terhadap Perjanjian Sewa Induk No. 315/LGL-AMD3-IBC Provider/PT Solu Sindo Kreasi Pratama/CTO/Tech/VI/21 tanggal 17 Juni 2021.	Berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian hingga tanggal habisnya jangka waktu sewa yang terakhir.
<b>XL Axiata</b>		
15.	<i>Master Lease Agreement</i> No. 0137-08-F04-38190 tanggal 6 Agustus 2008.	Berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian selama penyewaan <i>sites</i> masih berlaku.
16.	Perjanjian Sewa Menyewa Penyediaan Infrastruktur <i>Tower</i> untuk Penempatan BTS No. 0335-05-DNO-38190 tanggal 27 September 2005, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen 13 Atas Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A13-0335-05-DNO-38190 tanggal 10 November 2020.	10 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS <i>site</i> yang bersangkutan dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis.
<b>Smartfren</b>		
17.	Perjanjian Sewa Menyewa Sistem Distribusi Antena (" <b>SDA</b> ") untuk Cakupan Sinyal Dalam Gedung No. 47.M8/48. SKP-SDA.08/TEK/II/2008 tanggal 2 April 2008.	Berlaku sampai dengan berakhirnya masa sewa atas seluruh SDA yang disewa oleh Smartfren dari mitra dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak.
<b>SMART</b>		
18.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi No. 074/Network/SMART/PSM-SKP/III/08 tanggal 4 Maret 2008.	Berlaku terus menerus sejak ditandatanganinya perjanjian sampai dengan diakhiri dengan persetujuan terlebih dahulu oleh para pihak.
<b>Berca</b>		
19.	Perjanjian Induk Sewa Menara dengan No. SKP: 014/TBG-SKP-00/LEG/04/XII/2016 dan No. BHP: 084/HiNet-PKS/0201/2017 tanggal 20 Desember 2016.	Berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan berakhir secara efektif pada hari berakhirnya jangka waktu sewa untuk objek sewa yang terakhir, kecuali diakhiri lebih awal sesuai ketentuan perjanjian.

- **Balikom**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
<b>Telkomsel</b>		
1.	Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Bangunan <i>Tower</i> dengan Pola Sewa Lokasi Tridaya Flexi No. HOC080187 tanggal 25 September 2008, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Pertama tanggal 27 Desember 2011.	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
2.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> dengan No. Telkomsel: 062/BC/PROC-01/LOG/2010; dan No. TBG: 079/TBG-BT-001/FAL/04/IV/10 tanggal 30 April 2010, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama tanggal 6 April 2015.	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
3.	Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang BTS Makrosel dengan Sistem Sewa di Area Kalimantan (4 Lokasi) No. HOC040328 tanggal 11 Januari 2005 antara Telkomsel dengan PT Kwartadaya Karyapratama (" <b>Kwartadaya</b> "), sebagaimana telah diubah dengan Amendemen Pertama tanggal 13 September 2006, sebagaimana telah dialihkan kepada Balikom berdasarkan Perjanjian Novasi terhadap Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Bangunan <i>Tower</i> dengan Sistem Sewa antara Telkomsel dengan Kwartadaya dan Balikom No. 171/LO.01/LO-01/V/2011 tanggal 10 Juni 2011.	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
<b>IOH</b>		
4.	Perjanjian Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> dan <i>Site Acquisition</i> untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi dengan No. SRM : 310000503 tanggal 2 Juli 2009, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Kedua Terhadap Perjanjian Induk Kerjasama Sewa Menyewa Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi Serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> dan <i>Site Acquisition</i> untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. SRM 5100004658 tanggal 5 Agustus 2019.	Masa berlaku perjanjian ini adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak atau tanggal diterbitkannya surat pesanan/ <i>purchase order</i> yang pertama oleh IOH, mana yang lebih dulu, dan dapat diperpanjang dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh para pihak atau dapat diakhiri berdasarkan ketentuan dan syarat yang berlaku dalam perjanjian ini.
5.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Hutch No. 019/LGL-MLA-TowerCo/PT. Bali Telekom/HS-BH/Tech/II/10 tanggal 11 Januari 2010, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga Terhadap Perjanjian Sewa Induk No. 416/LGL-AMD3/PT Bali Telekom/CTO/Tech/ VII/20 tanggal 29 Juli 2020.	Perjanjian ini berlaku seterusnya sampai habisnya jangka waktu sewa yang paling lama, izin, atau hak untuk mengakses, menempati dan memakai.
<b>XL Axiata</b>		
6.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0126-08-F07-39211 tanggal 8 Juni 2008, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen No. 8 atas Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A8-0126-08-F07-39211 tanggal 10 November 2020.	10 tahun terhitung dan mulai berlaku efektif sejak ditandatanganinya BAPS, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
<b>Smartfren</b>		
7.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi ( <i>Co-Location</i> ) untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 005.M8/Balikom/AZ/XII/ 2006 tanggal 26 Desember 2006.	i. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan sampai berakhirnya jangka waktu sewa <i>site</i> yang tercantum dalam BAS terakhir; ii. Jangka waktu sewa setiap <i>site</i> adalah 10 tahun jika lahan adalah milik Balikom dan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun bila lahan bukan milik Balikom.

• **Triaka**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
<b>Telkomsel</b>		
1.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> dengan No. Telkomsel: 073/BC/PRC-01/LOG/2010 dan No. TBG: 083/TBG-TI-001/FAL/04/IV/10 tanggal 27 Mei 2010, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama tanggal 6 April 2015.	10 tahun dan mulai dihitung pada (i) hari ke 14 sejak tanggal RFI; atau (ii) tanggal <i>on air site</i> , mana yang terlebih dahulu dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan 5 (lima) tahun kemudian sesuai kesepakatan dan persetujuan para pihak.
<b>XL Axiata</b>		
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0257-11-F07-121108 tanggal 14 Oktober 2011, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A7-0257-11-F07-121108 tanggal 29 Maret 2022.	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS.
<b>IOH</b>		
3.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi Terpadu No. 043/LGL/MLA-TowerCo/Co/PT Triaka Bersama/RS/MM/Tech/11/12 tanggal 2 Februari 2012, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga Terhadap Perjanjian Induk Sewa Menyewa Hutch No. 425/LGL-AMD3/PT Triaka Bersama/CTO/Tech/VII/20 tanggal 29 Juli 2020.	12 tahun sejak dilaksanakannya BAPS, kecuali diakhiri dengan persetujuan terlebih dahulu oleh para pihak.
<b>Smartfren</b>		
4.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 065b/Procurement/Smartfren/MLA-Triaka/X/15 tanggal 7 Oktober 2015.	Perjanjian ini berlaku secara terus-menerus sampai dengan diakhiri sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian ini. Masa sewa atas obyek sewa per lokasi baik berupa tanah atau bangunan permanen dimana obyek sewa berada dan peralatan telekomunikasi ditempatkan oleh Smartfren berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau suatu masa sewa tertentu sampai dengan berakhirnya sewa, mana yang terjadi terlebih dahulu.



• **SMI**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
<b>Telkomsel</b>		
1.	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Sarana Penunjang untuk Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi No. 007/C00-CC0/LGL/09 dan No. 347/LG.05/PL000/IV/2009 tanggal 1 April 2009 antara Indosat dengan Telkomsel, sebagaimana telah dialihkan kepada SMI berdasarkan Perjanjian Pengalihan tanggal 4 Juni 2012 antara Indosat, Telkomsel, dan SMI.	5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.
<b>IOH</b>		
2.	Perjanjian Kerjasama Penyewaan Menara Telekomunikasi No. 002/PKS-PAB/VII/2011 dan No. 835/COO-CODA/LGL/11 tanggal 18 Juli 2011 antara Indosat dan PT Putra Arga Binangun, sebagaimana telah dialihkan kepada SMI berdasarkan Perjanjian Pengalihan tanggal 30 Mei 2012 antara Indosat, PT Putra Arga Binangun, dan SMI.	10 tahun dimulai sejak hari ke 60 setelah tanggal diterbitkannya Surat Izin Instalasi.
3.	Perjanjian Induk Sewa Menara No. 042/LGL-AGR-Tower/PT.Indosat,Tbk./BH-MM/Tech/II/10 tanggal 29 Januari 2010, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Pertama No. 404/LGL-AMD1-Tower/PT.Indosat,Tbk./RS-MM/Tech/VIII/11 tanggal 18 Agustus 2011 antara Indosat dan Hutch, sebagaimana telah dialihkan kepada SMI berdasarkan Perjanjian Pengalihan tanggal 12 Juni 2012 antara Indosat, Hutch, dan SMI.	12 tahun dihitung sejak tanggal komersial kecuali diakhiri lebih awal.
4.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi Terpadu No. 543/LGL-MLA-TowerCo/PT Solusi Menara Indonesia/RS-MM/Tech/VII/13 tanggal 4 Oktober 2013, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga Terhadap Perjanjian Sewa Induk No. 421/LGL-AMD3/PT Solusi Menara Indonesia/ CTO/Tech/VII/20 tanggal 29 Juli 2020.	12 tahun dari tanggal eksekusi dari <i>site license</i> kecuali diakhiri terlebih dahulu sesuai dengan perjanjian ini.
<b>XL Axiata</b>		
5.	Perjanjian Induk Sewa Menara No. 2078.A/XXVII.A.6169/XL/V/2010 dan No. 226/C00-C0D/LGL/10 tanggal 24 Mei 2010 antara Indosat dan XL, sebagaimana telah dialihkan kepada SMI berdasarkan Perjanjian Pengalihan tanggal 4 Juni 2012 antara Indosat, XL, dan SMI.	10 tahun yang dimulai sejak hari ke 61 sejak dikeluarkan.
6.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0372-12-F07-121409 tanggal 21 Desember 2012, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen No. 6 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A6-0372-12-F07-121409 tanggal 29 Maret 2022.	10 tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan BAPS.
<b>Smartfren</b>		
7.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 068/Procurement/Smartfren/PKS-SMI/IX/13 tanggal 25 September 2013.	Masa sewa atas obyek sewa per lokasi baik berupa tanah atau bangunan permanen di mana obyek sewa berada dan peralatan telekomunikasi ditempatkan oleh Smartfren ( <i>sites</i> ) berlaku untuk dan selama: (i) jangka waktu 10 tahun; atau (ii) suatu masa sewa tertentu sampai dengan berakhirnya sewa lahan; mana yang terjadi terlebih dahulu.
<b>Lintasarta</b>		
8.	Perjanjian Kerjasama Penggunaan Sarana Telekomunikasi dan <i>Facility Management Service</i> (FMS) Indosat oleh Lintasarta No. 435/NHP/HK.720/2002 tanggal 21 Agustus 2002, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Pertama tanggal 3 September 2003 antara Indosat dengan Lintasarta, sebagaimana telah dialihkan kepada SMI berdasarkan Perjanjian Pengalihan tanggal 25 Mei 2012 antara Indosat, Lintasarta, dan SMI.	1 (satu) tahun dan diperpanjang secara otomatis, kecuali apabila salah satu pihak menyatakan secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini.

• **GHON**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
<b>Telkomsel</b>		
1.	Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Infrastruktur <i>Tower</i> No. AR02140160 tanggal 18 Februari 2014, sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Pekerjaan Sewa Sarana Infrastruktur <i>Tower</i> di 2 Lokasi No. PKS.020/AR02/RQ.01/II/2017 tanggal 26 Januari 2017.	5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur didalam perjanjian.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
2.	<i>Master Purchase Agreement</i> Sewa Sarana Infrastruktur <i>Tower</i> di 16 Lokasi Wilayah Jabotabek No. AR02140508 tanggal 10 Juni 2014, sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Pekerjaan Sewa Sarana Infrastruktur <i>Tower</i> di 16 Lokasi No. PKS.0141/AR02/RA-02/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018.	4 (empat) tahun sejak tanggal efektif atau mengikuti tanggal sewa yang tertera pada BAK yang ditandatangani para pihak berdasarkan jangka waktu.
3.	Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur <i>Tower</i> 12 Lokasi <i>Site</i> Jabotabek No. MPA211-1901-8211 tanggal 15 Januari 2019.	10 Juni 2019 - 12 November 2023.
4.	Kontrak Induk Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> beserta Jasa Pemeliharaannya Tahun 2018 No. MPA001-1806-7013 tanggal 20 Juli 2018.	10 tahun sejak tanggal efektif atau mengikuti tanggal sewa yang tertera pada BAPS yang ditandatangani para pihak berdasarkan jangka waktu.
5.	Perjanjian Sewa Infrastruktur <i>Tower</i> Kolokasi <i>Batch</i> #1 2020 di Regional Jabotabek Sejumlah 2 <i>Site</i> No. M100001381 tanggal 12 Mei 2020.	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa pada BAPS. Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur di dalam perjanjian.
6.	Perjanjian Sewa Infrastruktur <i>Tower Collo Batch</i> #2 2020 di Regional Jawa Tengah Sejumlah 1 <i>Site</i> No. M100002088 tanggal 17 November 2020.	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa pada BAPS. Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur di dalam perjanjian.
7.	Perjanjian Sewa Infrastruktur <i>Tower New Site Collo</i> Program Relokasi <i>Site</i> – 2021 di Regional Jabodetabek sejumlah 1 <i>Site</i> No. M100003098 tanggal 6 Agustus 2021.	Jangka waktu perjanjian ini adalah berlaku sejak tanggal efektif hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS. Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur di dalam perjanjian ini.
8.	Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur <i>Tower</i> di 12 Lokasi <i>Site</i> No. M100002768 tanggal 24 Agustus 2021.	Jangka waktu kontrak ini berlaku dalam kurun waktu yang tercantum pada lampiran II - risalah rapat. Kontrak ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur didalam kontrak ini.
9.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> Makro dan Jasa Pemeliharaannya Regional Jabar, Jabodetabek, Jateng, dan Kalimantan (35 <i>Site</i> ) No. M100003407 tanggal 15 Oktober 2021.	Berlaku selama 120 bulan 1 hari dimulai sejak tanggal penandatanganan kontrak atau mengikuti tanggal sewa dengan periode terpanjang dari tanggal mulai sewa sampai dengan tanggal akhir sewa dari keseluruhan <i>Site</i> .
10.	Perjanjian Uplifting New Collo 2021 sejumlah 7 <i>Site</i> di Regional Jawa Timur, Kalimantan, Jawa Barat, Jabotabek, dan Sumbagsel No. M100003630 tanggal 10 Desember 2021.	Berlaku sejak 10 Desember 2021 hingga 1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS.
11.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> Makro dan Jasa Pemeliharaannya Regional Sumbagsel, Jabotabek dan Jateng (9 <i>Site</i> ) No. M100004099 (Induk), M100004100 (Reg. Sumbagsel), dan M100004101 (Reg. Jateng) tanggal 18 Juli 2022.	Berlaku sejak tanggal 18 Juli 2022 hingga 110 bulan 9 (sembilan) hari atau mengikuti tanggal sewa dengan periode terpanjang dari tanggal mulai sewa dengan tanggal akhir sewa dari keseluruhan <i>Site</i> .
12.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> MCP dan Jasa Pemeliharaannya Regional Jabodetabek <i>Site</i> JTX281 No. M100004321 tanggal 12 September 2022	Berlaku selama 60 bulan dimulai sejak tanggal akhir sewa, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur di dalam kontrak.
13.	Kontrak Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> Makro dan Jasa Pemeliharaannya di Regional Kalimantan (1 <i>Site</i> ) No. M100004293 tanggal 17 September 2022.	5 (lima) tahun dimulai sejak tanggal penandatanganan kontrak (tanggal efektif) atau mengikuti tanggal sewa dengan periode terpanjang dari tanggal mulai sewa sampai dengan tanggal akhir sewa dari keseluruhan <i>Site</i> yang tertera pada kontrak. Kontrak dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam kontrak.
14.	Kontrak Sewa Menyewa Infrastruktur Regional Kalimantan No. M100001758 tanggal 29 April 2021.	Berlaku sejak Tanggal Efektif hingga, mana yang lebih lama antara, (i) 28 Desember 2021; dan (ii) jangka waktu telah diselesaikannya kewajiban para pihak berdasarkan suatu PO yang diterbitkan secara sah berdasarkan perjanjian ini.
15.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> dan Jasa Pemeliharaannya Program Recovery & Tourism 20 <i>Site</i> Area 1, 2, & 3 Tahun 2020 No. M100002408 tanggal 29 Desember 2020.	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif atau mengikuti tanggal sewa yang tertera pada BAST tahun pertama yang ditandatangani para pihak dalam periode jangka waktu kontrak ini, meskipun kontrak ini ditandatangani sebelum tanggal efektif.
16.	Perjanjian Sewa Infrastruktur <i>Tower Collo Batch</i> #1 2021 di Regional Jabodetabek dan Jawa Barat sejumlah 2 <i>Sites</i> No. M100002915 tanggal 12 Juni 2021.	Berlaku Berlaku sejak tanggal efektif hingga 1 tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS.
17.	Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur <i>Tower</i> di 1 Lokasi <i>Site</i> No. M100002666 tanggal 30 April 2021.	Berlaku 12 bulan dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam kontrak ini.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
<b>IOH</b>		
18.	Kontrak Untuk Sewa Infrastruktur <i>Tower</i> Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> dan <i>Site Acquisition</i> untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. SRM: 3100000290 tanggal 16 Januari 2009, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Keempat Terhadap Perjanjian Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> dan <i>Site Acquisition</i> untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 3100000290/5100001364 tanggal 27 Agustus 2015.	10 tahun terhitung sejak tanggal mulai berlaku efektif perjanjian, yaitu sejak tanggal ditandatangani perjanjian atau sejak tanggal diterbitkannya <i>purchase order</i> (PO) yang pertama atau surat pesanan sewa oleh IOH, yang mana yang lebih dahulu, dalam hal adalah sejak tanggal 16 Januari 2009 sampai dengan 15 Januari 2019, kecuali diakhiri lebih awal sebagaimana diatur dalam perjanjian.
19.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Indoor</i> untuk Penempatan <i>Base Transceiver Station</i> No. 3100001171 tanggal 22 Agustus 2011, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama Terhadap Perjanjian Induk Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Indoor</i> untuk Penempatan <i>Base Transceiver Station</i> No. 5100002299 tanggal 1 November 2015.	Perjanjian ini berlaku untuk masa waktu 10 sejak tanggal pada BAST/BAPS, kecuali diakhiri sebelumnya oleh para pihak berdasarkan ketentuan dalam perjanjian.
20.	Perjanjian Induk Kerjasama Sewa Menyewa Infrastruktur Telekomunikasi Serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> dan <i>Site Acquisition</i> Untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 51000004649 tanggal 21 Mei 2018, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Telekomunikasi No. 5100005766 tanggal 8 Oktober 2019.	Perjanjian berlaku selama 10 tahun dari tanggal efektif.
21.	<i>Master Lease Agreement</i> tanggal 5 Agustus 2008 No. 389/LGL-AGR-MLA/PT.Gihon Telekomunikasi Indonesia/ AYP-BH/Tech/VIII/08, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen No. 709/LGL-AMD6-TowerCo/PT.Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk/CTO/Tech/XII/21 tanggal 27 Desember 2021.	Untuk setiap <i>Site</i> berlaku 12 tahun sejak tanggal penandatanganan lisensi <i>Site</i> terkait, atau 10 tahun untuk <i>Site</i> pilihan baru, kecuali diakhiri terlebih dahulu berdasarkan perjanjian ini, dan berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya sewa yang terlama.
<b>XL Axiata</b>		
22.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0164-08-F07-37919 tanggal 22 Agustus 2011, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Keempatbelas Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A14-0164-08-F07-37919 tanggal 17 Juni 2022.	10 tahun sejak tanggal penandatanganan BAPS kecuali diakhiri lebih dulu sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian, akan tetap berlaku terkait dengan masing-masing BAK selama setiap BAK masih berlaku, dan perjanjian akan berakhir pada tanggal pertama dimana tidak ada BAK dengan XL yang masih berlaku.
<b>Smartfren</b>		
23.	Perjanjian Sewa Infrastruktur <i>Tower</i> No. 201.M8/202.GT.07/TEK/IV/07 tanggal 19 April 2007, sebagaimana terakhir diubah dengan <i>Term Sheet</i> tanggal 20 Januari 2022.	10 tahun untuk jangka waktu awal dan Smartfren berhak untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian sampai dengan 5 (lima) tahun.

- **PKP**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
<b>Telkomsel</b>		
1.	Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur Telekomunikasi <i>Site</i> BDK422 JLBOJONGLOA No. PKS.0036/AR02/RQ-01/II/2018 tanggal 5 Februari 2018.	5 (lima) tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS.
2.	Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur Telekomunikasi BDK731 Bojongsulon No. PKS.0202/AR02/RQ-01/IX/2018 tanggal 26 September 2018.	7 (tujuh) tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS.
3.	Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur <i>Tower</i> BDK547 Jl. Riungmas No. MPA221-1905-11 tanggal 16 Mei 2019.	7 (tujuh) tahun, terhitung sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan 25 Mei 2025.
4.	Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur <i>Tower</i> di 2 Lokasi <i>Site</i> No. M100002727 tanggal 20 September 2021.	Sesuai dengan periode <i>site</i> yaitu: (i) <i>site</i> Kosar Cijambe sewa berlaku sampai dengan 22 Januari 2026; dan (ii) <i>site</i> Jupiter Tengah sewa berlaku sampai dengan 28 April 2025 dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur di dalam perjanjian.
5.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Macro Cell Pole</i> (MCP) dan Jasa Pemeliharaannya Regional Balinusra dan Jabar (12 <i>Site</i> ) No. M100003603 tanggal 23 November 2022.	65 bulan 27 hari terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian atau mengikuti tanggal sewa dengan periode terpanjang dari tanggal mulai sewa sampai dengan tanggal akhir sewa dari keseluruhan <i>site</i> .



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
<b>IOH</b>		
6.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Telekomunikasi No. 5100005795 tanggal 6 Agustus 2019.	10 tahun kecuali diakhiri lebih awal sebagaimana diatur dalam perjanjian.
7.	<i>Master Lease Agreement</i> No. 239/LGL-MLA-TowerCo/PT. Alita Praya Mitra/RS-MM/TECH/IV/13 tanggal 23 April 2013, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Kedua Terhadap Perjanjian Sewa Induk No. 625/LGL-AMD2-TowerCo/PT Permata Karya Perdana/BW-CKT/Tech/XII/19 tanggal 12 Desember 2019.	Perjanjian ini berlaku terus menerus dihitung sejak ditandatanganinya perjanjian induk ini oleh para pihak sampai dengan diakhiri dengan persetujuan terlebih dahulu oleh para pihak.
8.	<i>Master Lease Agreement</i> MCP No. 157/LGL-AGR/PT. Permata Karya Perdana/NW-RSS/Tech/II/14 tanggal 14 Februari 2014, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen No. 1 MCP <i>Master Agreement</i> H31 Ref. No.367/LGL-AMD1/PT Permata Karya Perdana/AMCKT/ Tech/VI/16 tanggal 17 Juni 2016.	5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian kecuali diakhiri lebih awal sebagaimana diatur dalam perjanjian dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 (lima) tahun dengan syarat dan ketentuan yang sama.
9.	<i>Nano Site Master Lease Agreement</i> No. 593/LGL-AGR/PT. Permata Karya Perdana/NR-CKT/Tech/XI/16 tanggal 9 November 2016.	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal perjanjian ini sampai dengan tanggal berakhirnya sewa menyewa; izin; atau hak untuk akses lainnya; penempatan; dan penggunaan alat yang dimiliki Hutch sehubungan dengan fasilitas pada <i>site</i> yang merupakan perizinan <i>site (site licence)</i> , yang telama dan terakhir, kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan ketentuan dalam perjanjian ini.
<b>XL Axiata</b>		
10.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur untuk <i>Semi Macro/Mini Macro</i> No. 0031-14-F07-121782 tanggal 24 Maret 2014, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama No. A1-0031-14-F07-121782 tanggal 25 Oktober 2016.	10 tahun untuk <i>site</i> baru, dihitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS yang bersangkutan dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis.  5 (lima) tahun untuk kolokasi, dihitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS <i>site</i> baru yang bersangkutan dan dapat diperpanjang selama 5 (lima) tahun dengan kesepakatan tertulis.
11.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur untuk <i>Macro</i> No. 95/LGL-LIN/III/2017-121782 tanggal 27 Maret 2017, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama Perjanjian Sewa Menyewa Macro No. A1-95/LGL-LIN/III/2017-121782 tanggal 9 Juni 2017.	10 tahun untuk <i>site</i> baru, dihitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS yang bersangkutan dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis.  5 (lima) tahun untuk kolokasi, dihitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS <i>site</i> baru yang bersangkutan dan dapat diperpanjang selama 5 (lima) tahun dengan kesepakatan tertulis.
<b>Smartfren</b>		
12.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa untuk Menara Telekomunikasi No: 037/Procurement/Smartfren/PKS-Permata Karya/V/17 tanggal 26 Mei 2017.	Berlaku dihitung sejak tanggal 12 April 2016 dan akan berlaku terus-menerus sampai dengan berakhir/diakhirinya sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian ini.

Perseroan berkeyakinan bahwa sebagian besar BAPS tersebut di atas saat ini masih berlaku. Atas BAPS yang akan berakhir jangka waktunya, Perseroan berkomitmen akan mendapatkan perpanjangan dan/atau pembaharuan BAPS sesuai dengan kesepakatan tertulis oleh para pihak.

**b. Saldo perjanjian sewa menara telekomunikasi dengan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia**

Berikut adalah saldo pendapatan yang masih harus diterima oleh Grup Tower Bersama dari penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia per tanggal 31 Desember 2022 :

	(dalam jutaan Rupiah)
	<u>Jumlah</u>
XL Axiata	541.132
IOH	417.551
Telkomsel	136.937
Smartfren	965
SMART	20
Lainnya (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	6.980
<b>Total</b>	<b><u>1.103.585</u></b>





#### 4.2.4. Perjanjian dengan kontraktor

##### a. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pengadaan dan Pembuatan *Software* dan/atau *Mobile Application*

Grup Tower Bersama telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa tentang pengadaan dan pembuatan *software* dan/atau *mobile application*. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan (i) pengadaan, pembuatan dan pengembangan perangkat lunak (*software*) dan/atau *mobile application*, teknologi IoT (*internet of things*), dan solusi digital lainnya; (ii) penyediaan manual aplikasi, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*; (iii) instalasi dan penyerahan *source code*; dan (iv) pemberian pelatihan penggunaan *software* dan/atau *mobile application*, teknologi IoT (*Internet of Things*), dan solusi digital lainnya.

Pekerjaan jasa tentang pengadaan dan pembuatan *software* dan/atau *mobile application* dibayarkan, antara lain, dalam 3 (tiga) termin, masing-masing sebesar 30%, 50%, dan 20% dari total nilai perintah kerja setelah dipenuhinya dokumen tagihan lengkap, penandatanganan berita acara serah terima dan periode 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan berita acara serah terima.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pengadaan dan Pembuatan *Software* dan/atau *Mobile Application* yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikpapan, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, TO dan JPI. Perjanjian ini dibuat antara Grup Tower Bersama dan PT Inovasi Layanan Digital dengan No. 0005/TBG-TBG-00/VEM-OTHER/04/VIII/2019 tanggal 24 Juli 2019, yang berlaku sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan 23 Juli 2024.

##### b. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Akuisisi Lahan (*Site Acquisition/SITAC*) dan Konstruksi Sipil, Mekanikal, dan Elektrikal (*CME*), Sarana Penunjang *Base Transceiver Station* (*BTS*), *Microcell Pole* (*MCP*) & *BTS Hotel*

Dalam rangka menyediakan obyek sewa kepada para penyewa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi, Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan pengadaan dan jasa tentang Jasa Akuisisi Lahan ("**SITAC**") dan Konstruksi Sipil, Mekanikal dan Elektrikal ("**CME**") sarana penunjang *Base Transceiver Station* ("**BTS**"), *Microcell Pole* ("**MCP**") & *BTS Hotel*. Dalam Perjanjian Pengadaan Lahan ini, kontraktor wajib untuk melakukan (i) pekerjaan SITAC untuk *new site*, termasuk namun tidak terbatas pada *Site Investigation Survey* ("**SIS**") atau Full SIS, mendapatkan data legalitas kepemilikan lahan/gedung, mengadakan sosialisasi dan pengurusan izin warga, pembayaran kompensasi kepada warga (apabila ada), pembuatan Berita Acara Negosiasi (BAN) dan Berita Acara Kesepakatan (BAK) untuk lahan sewa atau lahan beli, melakukan pembuatan perjanjian antara pemilik lahan (Perjanjian Kerja Sama/PKS) dengan salah satu perusahaan Grup Tower Bersama dihadapan notaris dan melakukan pengurusan sampai dengan diterbitkannya izin-izin atas menara yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (ii) pekerjaan SITAC untuk MCP & *BTS Hotel* pada lahan milik Pemerintah Daerah maupun lahan milik umum, termasuk namun tidak terbatas pada SIS, izin warga, pembayaran kompensasi kepada warga (apabila ada), pembuatan BAN dan BAK untuk lahan sewa atau beli, melakukan pembuatan perjanjian antara pemilik lahan (Perjanjian Kerja Sama/PKS) dengan salah satu perusahaan Grup Tower Bersama dihadapan notaris dan melakukan pengurusan sampai dengan diterbitkannya izin-izin atas menara yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (iii) pekerjaan CME untuk pembangunan *new site* dan/atau *colocation*, termasuk namun tidak terbatas pada pekerjaan persiapan, pembuatan konstruksi pondasi menara termasuk pondasi *BTS*, transportasi material menara, *erection* dan *painting* menara, instalasi mekanikal dan elektrikal serta *grounding* pada *site*, pembuatan pagar dan halaman serta akses jalan masuk *site*, *finishing*, penyambungan catu daya (*power supply*) listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("**PLN**") atau sumber listrik alternatif lainnya, pengujian teknis sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan; dan (iv) pekerjaan CME MCP yang menggunakan transmisi melalui *Fiber Optic* ("**FO**") dan yang *Non-FO*, termasuk namun tidak terbatas pada pekerjaan persiapan, pembuatan konstruksi pondasi *microcell pole* (menara), transportasi material





menara, *erection* menara, pengadaan dan instalasi jalur kabel, pengadaan dan instalasi rak, mekanikal dan elektrikal serta *grounding*, *finishing*, penyambungan catu daya listrik dari PLN atau sumber listrik alternatif lainnya, pengujian teknis sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan.

Untuk pekerjaan SITAC *new site* dan SITAC MCP, pembayaran akan dilakukan sejumlah 100% dari total nilai *purchase order*. Untuk pekerjaan CME *new site* pembayaran akan dilakukan dalam 3 (tiga) termin sejumlah 30%, 50% dan 20% dan pekerjaan CME *colocation* pembayaran akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sejumlah 30% dan 70% atau sejumlah 100% (seratus persen) dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait. Sedangkan untuk pekerjaan CME MCP & BTS Hotel pembayaran akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sejumlah 30% dan 70% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Akuisisi Lahan (SITAC) dan Konstruksi Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (CME) Sarana Penunjang *Base Transceiver Station* (BTS), *Microcell Pole* (MCP) & BTS Hotel yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikpapan, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Akuisisi Lahan (SITAC) dan Konstruksi Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (CME) Sarana Penunjang *Base Transceiver Station* (BTS), *Microcell Pole* (MCP) & BTS Hotel antara Tower Bersama Grup dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Multi Bmitra Sejahtera	0011/TBG-TBG-00/VEM-SACME/04/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022	1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Juli 2023
2.	PT Wira Inter Nusa	0084/TBG-TBG-00/VEM-SACME/04/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022	1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Juli 2023

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Grup Tower Bersama memiliki 70 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut berakhir paling cepat pada tanggal 31 Juli 2023 dan paling lama pada tanggal 31 Juli 2026.

### c. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa Instalasi Perangkat Pendukung Infrastruktur Telekomunikasi

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan pengadaan barang dan jasa instalasi perangkat pendukung infrastruktur telekomunikasi. Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan berupa pengadaan, barang dan jasa instalasi perangkat pendukung infrastruktur telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam perintah kerja yang diberikan oleh Grup Tower Bersama dan wajib memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.

Pekerjaan pengadaan barang dan jasa instalasi perangkat pendukung infrastruktur telekomunikasi dibayarkan sesuai dengan pilihan, yaitu (i) termin I sebesar 30% dari nilai perintah kerja setelah diterbitkannya jaminan uang muka dan termin II sebesar 70% ditandatanganinya berita acara *material on site* dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait; atau (ii) dalam 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai perintah kerja setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk terkait.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa Instalasi Perangkat Pendukung Infrastruktur Telekomunikasi yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikpapan, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa Instalasi Perangkat Pendukung Infrastruktur Telekomunikasi antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :



No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Advancednet Indonesia	0002/TBG-TBG-00/VEM-EQUIP/04/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022	1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Juli 2023
2.	PT Indomitra Global	0005/TBG-TBG-00/VEM-EQUIP/04/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2022	1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Juli 2023

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Grup Tower Bersama memiliki 10 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2023.

**d. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle* untuk Sarana Penunjang *Removable Tower* (RETO)**

Grup Tower Bersama telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait pengadaan, pengiriman, instalasi dan *dismantle* untuk sarana penunjang *removable tower* (“RETO”). Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan berupa pengadaan, pengiriman, instalasi dan *dismantle* RETO sesuai desain yang diberikan oleh Grup Tower Bersama dan memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.

Pembayaran atas pekerjaan pengadaan dan instalasi RETO dilakukan dalam 2 (dua) termin yaitu masing-masing sebesar 40% dan 60% dari nilai *purchase order*. Untuk pekerjaan *dismantle tower*, pembayaran dilakukan dalam 1 (satu) termin yaitu sebesar 100% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle* untuk Sarana Penunjang RETO yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle* untuk Sarana Penunjang RETO antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Rizqallah Boer Makmur	0002/TBG-TBG-00/VEM-RETO/04/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022	1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Juli 2023
2.	PT Duta Esa Adiperkasa	0003/TBG-TBG-00/VEM-RETO/04/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022	1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Juli 2023

**e. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Desain, Pengadaan, dan Instalasi Sarana Penunjang Distribusi Sistem Antena (DAS) dan Sipil, Mekanikal, dan Elektrikal (CME) Untuk *In-Building System Multioperator* (IBS)**

Grup Tower Bersama telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Desain, Pengadaan dan Instalasi Sarana Penunjang Distribusi Sistem Antena (“DAS”) dan Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (“CME”) Untuk *In-Building System Multioperator* (“IBS”). Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jaringan infrastruktur telekomunikasi pada gedung berupa *in-building system* yang antara lain meliputi pekerjaan pengadaan material, desain dan instalasi DAS dan CME, pengujian teknis sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan.

Untuk pekerjaan desain IBS, pembayaran akan dilakukan sejumlah 100% (seratus persen) dari total nilai *purchase order*. Sedangkan untuk pekerjaan CME *new site/collocation*, pembayaran akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sejumlah 30% dan 70% dari total nilai *purchase order*. Untuk pekerjaan pengadaan material dan pekerjaan instalasi DAS, pembayaran akan dilakukan dalam 3 (tiga) termin sejumlah 40%, 50% dan 10% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.



Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Desain, Pengadaan dan Instalasi Sarana Penunjang DAS dan CME Untuk IBS Multioperator yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Desain, Pengadaan dan Instalasi Sarana Penunjang DAS dan CME Untuk IBS Multioperator antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Bentala Sakti Globalindo	0005/TBG-TBG-00/VEM-IBS/04/II/2023 tanggal 1 Februari 2023	1 Februari 2023 sampai dengan 31 Januari 2026
2.	PT Ciptajaya Sejahtera Abadi	0003/TBG-TBG-00/VEM-IBS/04/II/2023 tanggal 1 Februari 2023	1 Februari 2023 sampai dengan 31 Januari 2026

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Grup Tower Bersama memiliki 1 (satu) perjanjian dengan kontraktor lainnya, yang mana perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2026.

#### f. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa Transportasi Pengiriman Barang

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor sehubungan dengan pekerjaan jasa transportasi pengiriman barang. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan yang antara lain meliputi pekerjaan sesuai permintaan Grup Tower Bersama berdasarkan perintah kerja dan/atau pekerjaan lain yang terkait namun menurut ruang lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor, yaitu (i) pekerjaan survei transportasi; dan (ii) pekerjaan pemeriksaan atas barang, loading dan unloading. Kontraktor wajib melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada Grup Tower Bersama, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Grup Tower Bersama, secara tertulis dari waktu ke waktu menyangkut perkembangan pekerjaan untuk keperluan pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan perjanjian.

Pembayaran dilakukan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% (seratus persen) dari nilai purchase order setelah ditandatangani Berita Acara Selesai Pengiriman Barang ("**BASPB**"), kemudian diterimanya dokumen pekerjaan oleh Grup Tower Bersama dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai checklist *invoice* terkait atau dalam 2 (dua) termin, masing-masing sebesar 30% dan 70% dari nilai perintah kerja setelah, antara lain, diterimanya asuransi material, ditandatanganinya BASPB, dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa Transportasi Pengiriman Barang yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO, dan JPI. Perjanjian ini diadakan antara Grup Tower Bersama dan PT Total Mandiri Selaras dengan No. 0001/TBG-TBG-00/VEM-JT/04/II/2023 tanggal 1 Februari 2023, yang berlaku sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 31 Januari 2026.

#### g. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa Instalasi tentang Material Core – Fiber Optik

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor sehubungan dengan pekerjaan pengadaan dan jasa instalasi tentang *material core* - fiber optik. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan yang antara lain meliputi pekerjaan sesuai permintaan Grup Tower Bersama berdasarkan perintah kerja dan/atau pekerjaan lain yang terkait namun menurut ruang lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor, yaitu Pekerjaan Instalasi *Material Core* Fiber Optik Reguler, Pekerjaan Instalasi *Material Core Fiber To The Cell Site* (FTTCS), dan Pengadaan Material Fiber Optik beserta aksesorisnya yang antara lain terdiri dari : persiapan, survei dan desain, perizinan, penggalan dan pemulihan, pengeboran, *bridge*, pengadaan dan instalasi HDPE.

Untuk pekerjaan survei dan desain dan pekerjaan perijinan, pembayaran dilakukan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% (seratus persen) dari nilai perintah kerja setelah dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait untuk perintah kerja terkait. Sedangkan untuk pekerjaan



pengadaan material dan instalasi fiber optik, pembayaran dilakukan dalam 3 (tiga) termin, masing-masing sebesar 40%, 50%, dan 10%, atau dalam 1 (satu) termin, sebesar 100% (seratus persen) dari nilai perintah kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait. Untuk pekerjaan instalasi *fiber to the cell site*, pembayaran dilakukan dalam 2 (dua) termin, masing-masing sebesar 30% dan 70% , atau dalam 1 (satu) termin, sebesar 100% (seratus persen) dari nilai perintah kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa Transportasi Pengiriman Barang yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO, dan JPI. Perjanjian ini diadakan antara Grup Tower Bersama dan PT Nayaka Pratama dengan No. 0048/TBG-TBG-00/VEM-JIFO/04/II/2023 tanggal 1 Februari 2023, yang berlaku sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 31 Januari 2026.

#### **h. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pemeliharaan Perangkat Penunjang Infrastruktur Telekomunikasi**

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa tentang pemeliharaan perangkat penunjang infrastruktur telekomunikasi. Dalam perjanjian ini, para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan (i) *preventive maintenance* (pemeliharaan rutin) yang terdiri dari antara lain pembersihan dan pengecekan reguler *site*; (ii) *corrective maintenance* (pemeliharaan perbaikan) berdasarkan nomor *log trouble ticket* dari *Contact Center* yang terdiri dari antara lain melakukan penanganan atau perbaikan *trouble shooting* dan melakukan perbaikan *temporary grounding system*, catu daya listrik, dan lain-lain; dan (iii) penyediaan *back up genset*.

Pembayaran dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam 1 (satu) termin pembayaran sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Perintah Kerja dan dipenuhinya Dokumen Tagihan Lengkap secara benar.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa Transportasi Pengiriman Barang yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO, dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pemeliharaan Perangkat Penunjang Infrastruktur Telekomunikasi antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	CV Rigen Timur Raya	0027/TBG-TBG-00/VEM-MAINT/04/II/2023 tanggal 2 Januari 2023	1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2025
2.	PT Andre Teknik Mandiri	0025/TBG-TBG-00/VEM-MAINT/04/II/2023 tanggal 2 Januari 2023	1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2025

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Grup Tower Bersama memiliki 22 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

#### **i. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Tentang Material dan Aksesoris *Guyed Mast***

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan pengadaan material dan aksesoris *guyed mast*. Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan pengadaan material dan aksesoris *guyed mast*. Grup Tower Bersama membayar untuk pekerjaan tersebut dalam 2 (dua) termin sebesar 30% dan 70% dari total nilai perintah kerja setelah, antara lain, diterimanya seluruh dokumen *binder* oleh Grup Tower Bersama dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait atau dalam 1 (satu) termin sebesar



100% (seratus persen) dari total nilai perintah kerja setelah ditandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST), diterimanya seluruh dokumen binder oleh Grup Tower Bersama dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan tentang Material dan Aksesoris Guyed Mast yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan tentang Material dan Aksesoris *Guyed Mast* antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Mitra Pelangi	0003/TBG-TBG-00/VEM-OTHER/04/XII/2022 tanggal 2 Januari 2023	1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023
2.	PT Bhatara Guizhou Wire Indonesia	0002/TBG-TBG-00/VEM-OTHER/04/XII/2022 tanggal 2 Januari 2023	1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023

**j. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Tentang Jasa Audit dan *Maintenance Transportable Base Transceiver Station* (BTS)**

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan tentang jasa audit dan *maintenance transportable base transceiver station* (BTS). Dalam perjanjian ini, para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan, antara lain: audit perangkat *transportable* BTS, pekerjaan *preventive maintenance transportable* BTS, dan pekerjaan *corrective maintenance transportable* BTS. Grup Tower Bersama membayar untuk pekerjaan tersebut dalam 1 (satu) termin pembayaran sebesar 100% dari nilai Perintah Kerja dan dipenuhinya Dokumen Tagihan Lengkap secara benar.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Tentang Jasa Audit dan *Maintenance Transportable Base Transceiver Station* (BTS) yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Tentang Jasa Audit dan *Maintenance Transportable Base Transceiver Station* (BTS) antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Rizqallah Boer Makmur	0031/TBG-TBG-00/VEM-MAINT/04/II/2023 tanggal 2 Januari 2023	1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023
2.	PT Duta Esa Adiperkasa	0030/TBG-TBG-00/VEM-MAIN/04/II/2023 tanggal 2 Januari 2023	1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023

**k. Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jaringan Akses Untuk Penyelenggaraan Layanan Telepon Tetap**

TB mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait penggunaan jaringan akses untuk penyelenggaraan layanan telepon tetap. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan penyelenggaraan layanan telepon tetap melalui infrastruktur telekomunikasi pada tiap-tiap lokasi kerja sama serta bertanggung-jawab untuk melakukan pengaktifan, integrasi, pemeliharaan dan hal-hal lain sehubungan dengan perangkat.

Pekerjaan terkait penggunaan jaringan akses untuk penyelenggaraan layanan telepon tetap, dibayarkan dengan cara melakukan rekonsiliasi per bulan untuk menghitung biaya penggunaan yang ditagihkan.

TB telah mengadakan perjanjian dengan PT Batam Bintang Telekomunikasi dengan No. 0013/TBG-TBG-00/VEM-OTHER/04/XI/2019 tanggal 30 Oktober 2019, yang berlaku sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan 28 Oktober 2028.



#### **I. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Storage HPE MSA**

TB mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang dan jasa instalasi *storage* HPE MSA sebagaimana tercantum dalam perintah kerja yang diberikan oleh TB dan memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada TB dari waktu ke waktu terkait perkembangan pekerjaan sebagai pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pekerjaan.

TB akan melakukan pembayaran untuk pekerjaan ini dalam 3 (tiga) termin, masing-masing sebesar 20%, 50%, dan 30% dari total harga pekerjaan setelah diterimanya berkas tagihan secara lengkap dan benar dari kontraktor.

TB telah mengadakan perjanjian dengan PT Digital Seucom Indonesia dengan No. 0015/TBG-TBG-00/VEM-OTHER/04/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021, yang berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2021 dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun.

#### **m. Perjanjian *Project Turnkey***

TB mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan *Project Turnkey*. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib untuk melakukan (i) *site investigation survey* (SIS) untuk lahan/*site* pemda dan non-pemda antara lain meliputi *pre-survey*, *engineering survey* dan *site survey report* (SSR)/*technical site survey report* (TSSR), SITAC, pengurusan perizinan; (ii) melakukan pekerjaan CME berikut pengadaan material terkait termasuk pengadaan *microcell pole* dengan desain kamufase dan antena kamufase; dan (iii) penyambungan listrik dari PLN yang terdiri dari 2 (dua) sambungan (untuk dua *tenant*) masing-masing dengan daya 1,3 KVA 1 Phase dan pengadaan material sesuai kebutuhan di lapangan.

TB akan melakukan pembayaran untuk pekerjaan ini dalam 3 (tiga) termin, masing-masing sebesar 20%, 40%, dan 40% dari total nilai *purchase order* setelah diterbitkannya *purchase order*, setelah diselesaikannya pekerjaan konstruksi sampai dengan angkur terpasang dan setelah pekerjaan CME dinyatakan selesai 100%.

TB telah mengadakan perjanjian dengan PT Karya Lintas Sejahtera dengan No. 0001/TBG-TBG-00/VEM-SACMEMCP/04/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022, yang berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Juli 2023.

#### **n. Perjanjian Induk Kerjasama Pemborongan Pekerjaan Terkait Manajemen Proyek dan Pengadaan Peralatan Pembangunan serta Perawatan Infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi**

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor sehubungan dengan seluruh pekerjaan dan tindakan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian dalam rangka akuisisi lahan/*site* yang telah disepakati dengan pengaturan perjanjian sewa/beli lahan yang diperlukan termasuk perolehan perizinan pekerjaan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi. Termasuk rekayasa *engineering*, pengadaan peralatan pembangunan dan konstruksi serta manajemen proyek termasuk perawatan menara dan sarana penunjang dengan spesifikasi teknis, yang meliputi namun tidak terbatas pada survei, desain, pembangunan, perhitungan material, pengemasan, transportasi, instalasi, integrasi, *testing* dan *commissioning*, konstruksi, jaminan konstruksi termasuk pemeliharaan rutin, pemasangan, pembangunan shelter atau bangunan permanen serta pagar sekeliling lahan dan penyediaan dokumentasi.

Kerjasama pemborongan pekerjaan ini dibayarkan berdasarkan ketentuan cara pembayaran yang tertera dalam setiap *purchase order*. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan *purchase order* atau dokumen lainnya dan/atau PKP menolak alasan keterlambatan, maka kontraktor akan dikenakan denda sebesar 0,1% (satu permil) dari total nilai pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan batas maksimum sebesar 10% dari total nilai pekerjaan. Bilamana jumlah denda sudah mencapai 10% dari total nilai pekerjaan maka PKP berhak memutuskan perjanjian secara sepihak tanpa tuntutan apapun dari kontraktor.





PKP telah mengadakan Perjanjian Induk Kerjasama Pemborongan Pekerjaan Terkait Manajemen Proyek dan Pengadaan Peralatan Pembangunan Serta Perawatan Infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi dengan CV Nirwana Makmur dengan No. 006/PKS/PEKAPE-NW/V/2020 tanggal 9 Juni 2020, yang berlaku sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan 9 Juni 2023.

**o. Perjanjian Induk Kerjasama Pengurusan Perizinan**

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait pengurusan semua perizinan yang diperlukan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi, termasuk pengurusan kerja sama dengan pemerintah daerah serta aspek-aspek lainnya sesuai dengan ketentuan serta syarat-syarat dalam perjanjian.

Pekerjaan pengurusan perizinan ini dibayarkan berdasarkan ketentuan cara pembayaran yang tertera dalam setiap *purchase order*. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan *purchase order* atau dokumen lainnya dan/atau PKP menolak alasan keterlambatan, maka kontraktor akan dikenakan denda sebesar 0,1% (satu permil) dari total nilai pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan batas maksimum sebesar 10% dari total nilai pekerjaan. Bilamana jumlah denda sudah mencapai 10% dari total nilai pekerjaan maka PKP berhak memutuskan perjanjian secara sepihak tanpa tuntutan apapun dari kontraktor.

PKP telah mengadakan Perjanjian Induk Kerjasama Pengurusan Perizinan dengan PT Prima Sakti Nugraha Pratama dengan No. 020/PKS-ADD/PEKAPE-PSNP/V/2020 tanggal 31 Juli 2020, yang berlaku sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan 31 Juli 2023.

**p. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa *Engineering Survey Reports* (ESR) dan *Site Coverage Survey Reports* (SCSR)**

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa tentang jasa *Engineering Survey Reports* (“**ESR**”) dan *Site Coverage Survey Reports* (“**SCSR**”). Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan (i) pekerjaan ESR meliputi pendataan perangkat dan tenant di area *site* yang telah ditentukan untuk dituangkan ke dalam dokumen *report* dengan format yang sudah ditentukan oleh PKP, serta pembuatan *sketch* atau *layout drawing* beserta jarak dan dimensi denah terakhir dari lahan *site* (dengan format *autocad*) sesuai dengan standar; dan (ii) pekerjaan SCSR meliputi: mencari atau menentukan titik *point of interest* (POI) untuk dituangkan ke dalam dokumen laporan dengan format yang sudah ditentukan oleh PKP. Untuk pelaporan pekerjaan serta pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak dapat dirinci satu-persatu, namun menurut lingkungannya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor dengan spesifikasi teknis dan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh PKP. Pembayaran dilakukan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai perintah kerja setelah ditandatangani BAST, diterimanya dokumen pekerjaan oleh PKP dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

PKP telah mengadakan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Jasa *Engineering Survey Reports* (ESR) dan *Site Coverage Survey Reports* (SCSR) dengan PT Quadra Indonesia Utama dengan 0006/ PKP-QIU/ESR/II/2023 tanggal 1 Januari 2023, yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

**q. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Survei, Desain dan Analisa Konstruksi (Tower dan Bangunan)**

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa survei, desain dan analisa konstruksi (*tower* dan bangunan). Dalam perjanjian ini, para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan (i) pembuatan desain dan analisa tower; (ii) survei dan analisa konstruksi yang diperlukan dan terkait pada suatu *site*; (iii) survei, perencanaan dan pembuatan desain konstruksi yang diperlukan dan terkait pada suatu *site*; (iv) survei, perencanaan dan pembuatan desain konstruksi perkuatan yang diperlukan dan terkait pada suatu *site*; dan (v) survei, *soil test*, *concrete test*, analisa, desain, *plan drawing* dan *final bill of quantity* pada pekerjaan *new site*.





PKP akan melakukan pembayaran kepada para kontraktor dalam 2 (dua) termin, yaitu pembayaran dimuka sebesar 30% dan pembayaran akhir sebesar 70%, atau dalam 1 (satu) termin dari nilai perintah kerja setelah ditandatangani BAST, seluruh dokumentasi oleh PKP kemudian penyerahan kepada kontraktor berupa asuransi jaminan pemeliharaan dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Survei, Desain dan Analisa Konstruksi (*Tower* dan Bangunan) dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Whidia Bharaya	0027/PKP-WBH/DAK/II/2023 tanggal 1 Januari 2023	1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023
2.	PT Kaizen Enjiniring Nusantara	0003/PKP-KEN/DAK/II/2023 tanggal 1 Januari 2023	1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023

Selain perjanjian-perjanjian di atas, PKP memiliki 1 (satu) perjanjian dengan kontraktor lainnya, yang mana perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 29 Januari 2024.

**r. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pemeliharaan Perangkat Penunjang Infrastruktur Telekomunikasi**

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa tentang pemeliharaan perangkat penunjang infrastruktur telekomunikasi. Dalam perjanjian ini, para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan (i) *preventive maintenance* (pemeliharaan rutin) yang terdiri dari antara lain pembersihan dan pengecekan reguler *site*; (ii) *corrective maintenance* (pemeliharaan perbaikan) berdasarkan nomor *log trouble ticket* dari *Contact Center* yang terdiri dari antara lain melakukan penanganan atau perbaikan *trouble shooting* dan melakukan perbaikan *temporary grounding system*, catu daya listrik, dan lain-lain; dan (iii) penyediaan *back up genset*.

PKP akan melakukan pembayaran kepada para kontraktor setelah diterbitkannya perintah kerja untuk masing-masing jenis pekerjaan yang diatur dalam perjanjian ini.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pemeliharaan Perangkat Penunjang Infrastruktur Telekomunikasi antara PKP dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	CV Rigen Timur Raya	0008/PKP-RTW/MAINTENANCE/II/2023 tanggal 1 Januari 2023	1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023
2.	PT Andre Teknik Mandiri	0009/PKP-RTW/MAINTENANCE/II/2023 tanggal 1 Januari 2023	1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023

Selain perjanjian-perjanjian di atas, PKP memiliki 16 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

**s. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa Tentang Jasa Akuisisi Lahan (SITAC) dan Konstruksi Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (CME) Sarana Penunjang Base Transceiver Station (BTS) dan Microcell Pole (MCP)**

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan pengadaan dan jasa tentang Jasa Akuisisi Lahan ("**SITAC**") dan Konstruksi Sipil, Mekanikal dan Elektrikal ("**CME**") sarana penunjang *Base Transceiver Station* ("**BTS**"), dan *Microcell Pole*. Dalam Perjanjian ini, kontraktor wajib untuk melakukan (i) pekerjaan SITAC untuk *new site*, termasuk namun tidak terbatas pada *Site Investigation Survey* (SIS) atau *Full SIS*, mendapatkan data legalitas kepemilikan lahan/gedung, mengadakan sosialisasi dan pengurusan izin warga, pembayaran kompensasi kepada warga, pembuatan Berita Acara Negosiasi (BAN) dan Berita Acara Kesepakatan (BAK) untuk lahan sewa atau lahan beli, melakukan pembuatan perjanjian antara pemilik lahan (Perjanjian Kerja Sama/PKS) dengan PKP dihadapan notaris dan melakukan pengurusan perizinan yang diperlukan; (ii) pekerjaan SITAC



untuk MCP baik pada lahan milik Pemerintah Daerah maupun lahan milik umum, termasuk namun tidak terbatas pada SIS, izin warga, pembayaran kompensasi kepada warga, pembuatan BAN dan BAK untuk lahan sewa atau beli, melakukan pembuatan perjanjian antara pemilik lahan (Perjanjian Kerja Sama/PKS) dengan PKP dihadapan notaris dan melakukan pengurusan perizinan yang diperlukan; (iii) pekerjaan CME untuk pembangunan *new site* dan/atau *colocation*, termasuk namun tidak terbatas pada pekerjaan persiapan, pembuatan konstruksi pondasi menara termasuk pondasi BTS, transportasi material menara, *erection* dan *painting* menara, instalasi mekanikal dan elektrik serta *grounding* pada *site*, pembuatan pagar dan halaman serta akses jalan masuk *site*, *finishing*, penyambungan catu daya (*power supply*) listrik dari PLN atau sumber listrik alternatif lainnya, pengujian teknis sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan; dan (iv) pekerjaan CME yang menggunakan transmisi melalui *Fiber Optic* ("FO") dan yang *Non-FO*, termasuk namun tidak terbatas pada pekerjaan persiapan, pembuatan konstruksi pondasi *microcell pole* (menara), transportasi material menara, *erection* menara, pengadaan dan instalasi jalur kabel, pengadaan dan instalasi rak, mekanikal dan elektrik serta *grounding*, *finishing*, penyambungan catu daya listrik dari PLN atau sumber listrik alternatif lainnya, pengujian teknis sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan.

Untuk pekerjaan SITAC *new site* dan SITAC MCP, pembayaran akan dilakukan sejumlah 100% dari total nilai *purchase order*. Untuk pekerjaan CME *new site* pembayaran akan dilakukan dalam 3 (tiga) termin sejumlah 30%, 50% dan 20% dan pekerjaan CME *colocation* pembayaran akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sejumlah 30% dan 70% atau sejumlah 100% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait. Sedangkan untuk pekerjaan CME MCP pembayaran akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sejumlah 30% dan 70% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Akuisisi Lahan (SITAC) dan Konstruksi Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (CME) Sarana Penunjang *Base Transceiver Station* (BTS), *Microcell Pole* (MCP) antara PKP dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Dwi Pari Abadi	0024/PKP-DPA/SACME/II/2023 tanggal 1 Januari 2023	1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023
2.	PT Banjarpasir Nusa Pratama	0030/PKP-BNP/SACME/II/2023 tanggal 1 Januari 2023	1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023

Selain perjanjian-perjanjian di atas, PKP memiliki 24 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut akan berakhir paling cepat pada tanggal 31 Juli 2023 dan paling lama pada tanggal 31 Desember 2023.

**t. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Konstruksi Perkuatan Tower dan Perkuatan Pondasi Tower untuk Sarana Penunjang *Base Transceiver Station* (BTS)**

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan pengadaan dan jasa tentang jasa konstruksi perkuatan *tower* dan perkuatan pondasi *tower* untuk sarana penunjang BTS. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib untuk melaksanakan pekerjaan yang antara lain meliputi pekerjaan perkuatan *tower* dan/atau perkuatan pondasi *tower*, pekerjaan perkuatan *base frame* dan/atau perkuatan gedung, pekerjaan perbaikan kemiringan/puntir *tower*, pengujian teknis serta pekerjaan lainnya yang tidak dapat dirinci satu-persatu, namun menurut ruang lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor, dengan spesifikasi teknis dan standar yang disetujui oleh operator dan PKP.

Untuk pekerjaan perkuatan, pembayaran akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sejumlah 30% dan 70% dari nilai *purchase order* atau dalam 1 (satu) termin sebesar 100% (seratus persen) dari nilai *purchase order* setelah ditandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) diterimanya dokumen *binder* oleh PKP kemudian penyerahan kepada kontraktor berupa *certificate erection all risks policy insurance* dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.



PKP telah mengadakan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Konstruksi Perkuatan *Tower* dan Perkuatan Pondasi *Tower* untuk Sarana Penunjang *Base Transceiver Station* (BTS) dengan CV Karya Dua Duta dengan No. 0078/PEKAPE-KDD/PERKUATAN/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022, yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Juli 2023.

**u. Perjanjian Kerjasama Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan Dismantle Tower Untuk Sarana Penunjang *Base Transceiver Station* (BTS)**

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait pengadaan, pengiriman, instalasi dan *dismantle tower* untuk sarana penunjang BTS. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan (i) pekerjaan berupa pengadaan material *tower* dan material aksesoris yang meliputi namun tidak terbatas pada pembuatan desain, pengujian teknis, pembuatan daftar material, pembuatan *erection drawing* dan proses *fabrication inspection test*; (ii) pekerjaan pengiriman dan instalasi material *tower*, termasuk material aksesoris, serta pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak dapat dirinci satu-persatu, namun menurut lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor; dan (iii) pekerjaan berupa *dismantle* perangkat BTS dan *material tower* sesuai desain/instruksi yang diberikan oleh PKP; dan (iv) memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.

Pada umumnya, dalam Perjanjian Kerjasama Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle Tower* untuk Sarana Penunjang BTS, PKP akan melakukan pembayaran 1 (satu) termin sebesar 100% setelah ditandatanganinya berita acara serah terima dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle Tower* untuk Sarana Penunjang BTS antara PKP dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	CV Karya Dua Duta	0073/PKS/PEKAPE-KDD/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022	1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Juli 2023
2.	PT Duta Esa Adiperkasa	0089/PKP-DEA/SIDT/X/2022 tanggal 9 Oktober 2022	9 Oktober 2022 sampai dengan 31 Desember 2023

**v. Perjanjian Project *Turnkey***

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan Project *Turnkey*. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib untuk melakukan (i) *site investigation survey* (SIS) untuk lahan/*site* pemda dan non-pemda antara lain meliputi *pre-survey*, mencari (*hunting*) minimal 3 (tiga) kandidat *site*, *engineering survey* dan *site survey report* (SSR)/*technical site survey report* (TSSR), SITAC, memproses pengurusan sampai dengan diterbitkannya izin-izin atas *microcell pole* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan detail *site design*; (ii) melakukan pekerjaan CME berikut pengadaan material terkait termasuk pengadaan *microcell pole* dengan desain kamufase dan antena kamufase; (iii) penyambungan listrik dari PLN yang terdiri dari 2 (dua) sambungan (untuk dua *tenant*) masing-masing dengan daya 1,3 KVA 1 Phase dan pengadaan material sesuai kebutuhan dilapangan.

PKP akan melakukan pembayaran untuk pekerjaan ini dalam 3 (tiga) termin, masing-masing sebesar 20%, 40%, dan 40% dari total nilai *purchase order* setelah diterbitkannya *purchase order*, setelah diselesaikannya pekerjaan konstruksi sampai dengan angkur terpasang dan setelah pekerjaan CME dinyatakan selesai 100%.

PKP telah mengadakan Perjanjian *Project Turnkey* dengan PT Karya Lintas Sejahtera dengan No. 0059/PKS/PEKAPE-KLS-TURNKEY/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022, yang berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Juli 2023.



**w. Perjanjian Kerjasama Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle* untuk Sarana Penunjang *Removable Tower* (RETO)**

PKP telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait pengadaan, pengiriman, instalasi dan *dismantle* untuk sarana penunjang *removable tower* (“RETO”). Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan berupa pengadaan, pengiriman, instalasi dan *dismantle* RETO sesuai desain yang diberikan oleh PKP dan memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.

Pembayaran atas pekerjaan pengadaan dan instalasi RETO dilakukan dalam 2 (dua) termin yaitu masing-masing sebesar 40% dan 60% dari nilai *purchase order*. Untuk pekerjaan *dismantle tower*, pembayaran dilakukan dalam 1 (satu) termin yaitu sebesar 100% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

PKP telah mengadakan Perjanjian Kerjasama Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle* Untuk Sarana Penunjang *Removable Tower* (RETO) dengan PT Rizqallah Boer Makmur dengan No. 0007/ PKP-RBM/RETO/II/2023 tanggal 1 Januari 2023, yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

**x. Perjanjian Kerjasama tentang Pengadaan Jasa Tenaga Kerja**

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja, GHON mengadakan perjanjian dengan kontraktor yang siap pakai untuk membantu GHON dalam melakukan kegiatan usahanya. Pekerjaan dari tenaga kerja yang dibutuhkan antara lain meliputi *security*, *office services* dan *project & operation maintenance*. Setiap tenaga kerja wajib memenuhi standar persyaratan (kualifikasi) yang ditentukan oleh GHON.

Pekerjaan penyediaan tenaga kerja dibayarkan setiap bulan setelah adanya *invoice* yang diajukan atas biaya jasa pelaksanaan pekerjaan dengan melampirkan kwitansi asli bermaterai, faktur pajak dan dokumen pendukung lainnya.

GHON telah mengadakan kerja sama dengan PT Wahana Infrastruktur Nusantara terkait pengadaan jasa tenaga kerja berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 001/PK-GTI/IV/2018 tanggal 2 April 2018, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum II No. 078/PKS-LGL-GTI/III/2022 tanggal 25 Februari 2022, yang berlaku sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan 28 Maret 2025.

**y. Perjanjian Induk Untuk Jasa Investigasi Lokasi, Akuisisi Lokasi, Pekerjaan Sipil Mekanikal dan Elektrikal Serta Jasa-Jasa Terkait Menara Lainnya**

Dalam rangka menyediakan obyek sewa kepada para penyewa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi, GHON mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk menyediakan jasa investigasi lokasi, akuisisi lokasi, pekerjaan sipil mekanikal dan elektrikal serta jasa-jasa terkait menara lainnya kepada GHON. Berdasarkan perjanjian, para kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan yang meliputi (i) jasa akuisisi lokasi, investigasi lokasi dan konsultasi pengurusan perizinan IMB; (ii) pekerjaan sipil, mekanikal dan elektrikal; dan (iii) pekerjaan-pekerjaan terkait menara lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada audit lokasi, jasa konsultasi teknik, jasa pekerjaan kolokasi, jasa penguatan menara, pekerjaan yang berhubungan dengan kelistrikan, jasa pengurusan perijinan serta pekerjaan-pekerjaan lainnya yang merupakan subyek dari *purchase order*.

Pekerjaan penyediaan tenaga kerja dibayarkan setiap bulan setelah adanya *invoice* yang diajukan atas biaya jasa pelaksanaan pekerjaan dengan melampirkan kwitansi asli bermaterai, faktur pajak dan dokumen pendukung lainnya.

GHON telah mengadakan kerja sama dengan PT Wahana Infrastruktur Nusantara terkait jasa investigasi lokasi, akuisisi lokasi, pekerjaan sipil mekanikal dan elektrikal serta jasa-jasa terkait menara lainnya berdasarkan Perjanjian Induk Untuk Jasa Investigasi Lokasi, Akuisisi Lokasi, Pekerjaan Sipil Mekanikal dan Elektrikal Serta Jasa-Jasa Terkait Menara Lainnya No. 001/PK-GHON/II/2016 tanggal 4 Januari 2016, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum II No. 135/PKS-LGL-GTI/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022, yang berlaku sampai dengan 29 Desember 2023.



**z. Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Catu Daya Sunray Pro BTS**

GHON mengadakan perjanjian dengan kontraktor dalam rangka melaksanakan pekerjaan pengadaan Catu Daya Sunray Pro BTS, yang hanya berkaitan dengan pengadaan, supervisi, instalasi, serta pemeliharaan. Dalam perjanjian ini, kontraktor sepakat untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Catu Daya Sunray Pro BTS dengan merk Sundaia sesuai dengan surat pesanan yang diterbitkan oleh GHON.

GHON akan melakukan pembayaran untuk pekerjaan ini dalam 2 (dua) termin, yaitu sebesar 30% uang muka pada saat surat pesanan terbit dengan cara transfer atau setoran dan 70% pelunasan dibayarkan paling lambat 14 hari kalender setelah pengambilan perangkat di gudang Sundaia terbit dengan cara penyerahan cek.

GHON mengadakan Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Catu Daya Sunray Pro BTS Merk Sundaia dengan PT Aprillia Telekomunikasi Teknologi dengan No. 002/PKS-LGL-GTI/IV/2021 tanggal 26 April 2021, sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Kerjasama Pengadaan Catu Daya Sunray Pro BTS Merk Sundaia No. 013/ADDPKS-LGL-GTI/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021, yang berlaku sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan 25 April 2031.

**aa. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Pemeliharaan Perangkat Penunjang Infrastruktur Telekomunikasi**

Dalam rangka pemeliharaan rutin sarana penunjang infrastruktur telekomunikasi pada setiap *site*, GHON mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk menyediakan jasa pemeliharaan perangkat penunjang infrastruktur telekomunikasi yang meliputi antara lain meliputi pekerjaan berupa pemeliharaan rutin (*preventive maintenance*), perbaikan (*corrective maintenance*), dan *back up generator set* (genset). Pelaksanaan pekerjaan wajib dilakukan oleh kontraktor dengan detail mekanisme dan teknis pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang diatur di dalam perjanjian. Pekerjaan kerjasama pekerjaan jasa pemeliharaan perangkat penunjang infrastruktur telekomunikasi dibayarkan setiap bulan oleh GHON setelah adanya *invoice* yang diajukan atas biaya jasa pelaksanaan pekerjaan dengan melampirkan kwitansi asli bermaterai, faktur pajak dan dokumen pendukung lainnya.

GHON telah mengadakan kerja sama dengan PT Wahana Infrastruktur Nusantara terkait jasa pemeliharaan perangkat penunjang infrastruktur telekomunikasi berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Pemeliharaan Perangkat Penunjang Infrastruktur Telekomunikasi No. 005/ PKS-LGL-GTI/IV/2018 tanggal 9 April 2018, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum III No. 089/PKS-LGL-GTI/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022, yang berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023.

**bb. Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Fiberisasi**

Unicom mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan pembangunan fiberisasi. Dalam perjanjian ini, kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan pembangunan fiberisasi pada lokasi dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Unicom. Pekerjaan pembangunan fiberisasi ini dibayarkan oleh Unicom setelah selesainya pekerjaan pembangunan fiberisasi (100%) dan diterimanya surat permohonan permintaan pembayaran (*invoice*) dari kontraktor. Pembayaran akan dilakukan Unicom dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak dokumen kelengkapan *invoice* dinyatakan sah, lengkap dan benar oleh Unicom.

Unicom telah mengadakan kerja sama dengan PT Sumber Cemerlang Kencana Permai terkait pekerjaan pembangunan fiberisasi berdasarkan Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Fiberisasi No. 002/SK/ Unicom-SCKP/II/2022 tanggal 3 Januari 2022, yang berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2032.

**cc. Saldo utang usaha atas perjanjian dengan kontraktor**

Berikut adalah saldo utang usaha Grup Tower Bersama dengan kontraktor-kontraktor per tanggal 31 Desember 2022 :



(dalam jutaan Rupiah)

	<u>Jumlah</u>
PT ZTT Cable Indonesia	47.985
PT Sanggar Jaya Abadi	39.277
PT Wahana Infrastruktur Nusantara	18.627
PT Tunas Cahaya Mandiri Widyatama	7.190
PT Tritama Aji Laksana	6.462
PT Danusari Mitra Sejahtera	6.347
PT Berkat Bersama Teknik	6.297
PT Furukawa Optical Solution Indonesia	6.083
PT Mandira Infra Tripakarti	5.576
PT Jaya Engineering Technology	5.364
PT Nayaka Pratama	4.721
PT Ciptadana Sekuritas Asia	4.643
PT Sinarmonas Industries	3.421
PT YOFC Internasional Indonesia	3.330
Lainnya (masing-masing di bawah Rp3 miliar)	90.284
<b>Jumlah</b>	<b>255.607</b>

#### 4.2.5. Perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah sehubungan dengan menara telekomunikasi bersama (“*Tower Sharing*”)

Dalam rangka mengembangkan kegiatan usahanya Perseroan melalui Perusahaan Anak telah mengadakan perjanjian *Tower Sharing* dengan 11 pemerintah daerah untuk membangun menara telekomunikasi dan infrastruktur telekomunikasi untuk memastikan menara telekomunikasi tersebut dibangun sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah dari masing-masing pemerintah daerah.

Berdasarkan perjanjian *Tower Sharing*, pemerintah daerah akan berusaha untuk menyediakan lahan-lahan di daerah yang dilakukan oleh Perseroan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama dan Grup Tower Bersama harus menyelesaikan pembangunan masing-masing menara telekomunikasi bersama. Selanjutnya, Perseroan wajib untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan seluruh menara telekomunikasi bersama berikut seluruh fasilitas-fasilitas penunjang lainnya selama jangka waktu perjanjian kerjasama agar seluruh menara telekomunikasi bersama dapat berfungsi dan beroperasi secara optimal.

Perjanjian kerjasama dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya.

Di bawah ini perjanjian dengan pemerintah daerah yang dimiliki oleh Perseroan melalui TB yaitu 18 perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah yang tersebar di Sumatera Utara, DIY, Jawa Barat, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua, Jawa Timur dan Kalimantan Barat dimana masa berlaku perjanjian akan berakhir paling dekat pada tanggal 15 Oktober 2023 dan paling lama pada tanggal 28 Desember 2027.

#### 4.2.6. Perjanjian sewa tanah

Dalam rangka menyediakan obyek sewa kepada para penyewa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi, Perusahaan Anak mengadakan Perjanjian Sewa Tanah dengan para pemilik tanah. Dalam perjanjian tersebut, para pemilik tanah sepakat untuk menyewakan tanahnya yang akan dipakai sebagai lokasi pembangunan menara telekomunikasi milik Perusahaan Anak (“**Perjanjian Sewa Tanah**”).

Dalam Perjanjian Sewa Tanah tersebut diatur hak dan kewajiban Perusahaan Anak selaku Penyewa dan pemilik tanah, yaitu antara lain: (i) penyewa wajib membayar uang sewa tahunan atau total uang sewa kepada pemilik tanah; (ii) segala sesuatu yang didirikan atau dibangun diatas tanah sewa milik pemilik tanah adalah merupakan milik penyewa atau pihak lain yang ditunjuk oleh penyewa; (iii) dalam hal pemilik tanah tidak berhak atas tanah sewa atau sewa dikemudian hari dibebani dengan jaminan





dan/atau disita oleh pengadilan, menjadi objek sengketa dengan pihak lain atau timbul gangguan lainnya yang menyebabkan penyewa tidak dapat menggunakan tanah sewa dengan mudah dan leluasa, maka penyewa berhak untuk mengakhiri perjanjian dengan seketika; dan (iv) pemilik tanah tidak boleh menjaminkan atau mengikatkan diri untuk menjaminkan tanah sewa pada pihak manapun juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penyewa.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perusahaan Anak telah menandatangani 21.418 Perjanjian Sewa Tanah dengan rata-rata masa keberlakuan sewa adalah selama 7 (tujuh) tahun sejak tanggal Perjanjian Sewa Tanah. Saldo aset hak guna Perseroan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.667,8 miliar.

#### **4.2.7. Perjanjian lainnya**

##### **a. Perjanjian Pemegang Saham tertanggal 1 Oktober 2018 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Para Pemegang Saham tertanggal 30 November 2018**

Pada tanggal 1 Oktober 2018, Perseroan, dan Rudolf Parningotan Nainggolan, Hotma Linda Ebigail Sirait dan PT Gihon Nusantara Tujuh ("**Para Pihak**") sebagai pemegang saham GHON menandatangani perjanjian ini untuk mengatur hubungan kepemilikan saham, pengelolaan perusahaan, pengalihan saham, persetujuan dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan GHON. Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal penandatanganannya dan tetap seterusnya berlaku kecuali diakhiri oleh Para Pihak sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, GHON membutuhkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Perseroan untuk tindakan-tindakan sebagai berikut: (i) transaksi pihak terkait; (ii) perubahan ruang lingkup kegiatan; (iii) pendirian badan usaha baru oleh GHON; (iv) peningkatan atau penerbitan saham baru GHON; (v) pengurangan atau pengembalian (termasuk pembelian kembali dan dividen) GHON; (vi) likuidasi atau penutupan GHON; (vii) perubahan anggaran dasar GHON; (viii) penggabungan atau amalgamasi GHON; (ix) akuisisi aset atau saham oleh GHON di perusahaan lain; (x) pelepasan aset material dengan nilai lebih dari Rp5.000.000.000 per transaksi atau untuk serangkaian transaksi per tahun; dan (xi) penghentian atau penyelesaian litigasi material dari GHON, termasuk arbitrase. Selain hal tersebut di atas, Perseroan berhak dan berwenang untuk menunjuk Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Komisaris Utama GHON. Rudolf Parningotan Nainggolan, Hotma Linda Ebigail Sirait dan PT Gihon Nusantara Tujuh berkomitmen untuk mendukung secara penuh usulan yang disampaikan Perseroan dengan menggunakan hak suara mereka dalam pengambilan suara RUPS GHON sesuai dengan arahan dari Perseroan.

Dalam hal pengalihan saham, jika salah satu dari Rudolf Parningotan Nainggolan, Hotma Linda Ebigail Sirait dan PT Gihon Nusantara Tujuh mengusulkan untuk menjual atau dengan cara lain mengalihkan saham GHON sehingga jumlah kumulatif saham yang akan dijual dari seluruh pemegang saham penjual melebihi 1% dari saham GHON dalam 1 (satu) Hari Kalender, atau melebihi 4% saham GHON dalam satu tahun kalendar, kepada pembeli manapun, maka Perseroan memiliki hak penolakan pertama terlebih dahulu untuk membeli saham tersebut dengan harga yang sama dan ketentuan yang sama. Rudolf Parningotan Nainggolan, Hotma Linda Ebigail Sirait dan PT Gihon Nusantara Tujuh tidak dapat menjual, secara langsung atau tidak langsung, atau mengalihkan saham GHON mereka kepada semua perusahaan penyedia infrastruktur telekomunikasi yang beroperasi di Indonesia dan pemegang saham signifikan-nya tanpa persetujuan sebelumnya dari Perseroan.

##### **b. Perjanjian Pemegang Saham yang diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 14 Desember 2018**

Pada tanggal 14 Desember 2018, Perseroan, dan PT Amanda Cipta Persada, PT Mulia Sukses Mandiri, Scavino Ventures Ltd., PT Lancar Distrindo dan PT Sukses Prima Sakti ("**Para Pihak**") sebagai pemegang saham GOLD menandatangani perjanjian ini untuk mengatur hubungan diantara Para Pihak sebagai pemegang saham GOLD, dan tata kelola bisnis dan pengurusan GOLD.





Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, Para Pihak menyetujui untuk mengatur tindakan-tindakan GOLD sebagai berikut: (i) syarat-syarat pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris GOLD, (ii) rapat Direksi dan Dewan Komisaris; dan (iii) pengalihan saham dalam GOLD. Perseroan berhak dan berwenang untuk menominasikan Direktur Utama, Direktur Keuangan, Komisaris Utama dan Komisaris Independen GOLD. Perseroan harus mengupayakan GOLD untuk menerbitkan saham dengan HMETD tidak lebih dari 6 (enam) bulan setelah penyelesaian penawaran tender wajib atas saham-saham GOLD yang dilakukan oleh Perseroan.

Dalam hal pengalihan saham, PT Amanda Cipta Persada, PT Mulia Sukses Mandiri, Scavino Ventures Ltd., PT Lancar Distrindo dan PT Sukses Prima Sakti hanya dapat menjual, mengalihkan, atau melepaskan saham awal miliknya, yang merupakan suatu jumlah saham yang diperoleh setelah penawaran umum terbatas (*rights issue*) GOLD, dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan, dengan menyebutkan jumlah sahamnya yang akan dialihkan, harga per saham, dan seluruh syarat terkait pelepasan yang diusulkan. Penyampaian pemberitahuan tersebut dianggap merupakan penawaran untuk menjual saham kepada Perseroan.

**c. Akta Perjanjian Pemegang Saham PT Unicom Muda Utama No. 27 tanggal 10 November 2022, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta**

Pada tanggal 10 November 2022, Dennis, Tommi, Jessy Nathalie, Tania Bianca, William, Wahyu Antonius, Widya Mary, Lydia Merry, Mulyono, Richard Hendrawan, Michael Rivandry, Olivia Novita, Liana (secara bersama-sama disebut sebagai "**Pemegang Saham Saat ini**"), UT, dan Unicom (secara bersama-sama Pemegang Saham Saat ini, UT, dan Unicom disebut sebagai "**Para Pihak**") menandatangani perjanjian ini untuk mengatur pengelolaan perusahaan, pengalihan saham, persetujuan dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Unicom. Perjanjian berlaku efektif sejak UT memperoleh 320.000 saham Unicom yang mewakili 80% dari seluruh modal ditempatkan Unicom dan tetap seterusnya berlaku kecuali diakhiri oleh Para Pihak sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, Unicom membutuhkan persetujuan tertulis sebelumnya dari UT sebagai pemegang saham untuk tindakan-tindakan sebagai berikut: (i) transaksi pihak terkait; (ii) perubahan ruang lingkup kegiatan usaha Unicom; (iii) pendirian badan usaha baru oleh Unicom; (iv) peningkatan atau penerbitan saham baru Unicom; (v) pengurangan atau pengembalian modal (termasuk pembelian kembali dan dividen) Unicom; (vi) likuidasi atau penutupan Unicom; (vii) perubahan anggaran dasar Unicom; (viii) penggabungan atau amalgamasi Unicom; (ix) akuisisi aset atau saham oleh Unicom di perusahaan lain; (x) pelepasan aset material Unicom yang memiliki nilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 per transaksi atau untuk serangkaian transaksi per tahun; dan (xi) pembuatan, penghentian, atau penyelesaian litigasi material dari Unicom termasuk arbitrase. Selain hal tersebut di atas, UT berhak dan berwenang untuk menunjuk Direktur Utama, Direktur Keuangan, dan Komisaris Utama.

Dalam hal pengalihan saham, Pemegang Saham Saat ini dan UT tidak boleh menjual, mengalihkan, menjaminkan, menggadaikan, atau dengan cara lain membebaskan sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya dalam Unicom (kecuali untuk jaminan yang sudah ada atas saham, yang penggadaianya telah diungkapkan terlebih dahulu secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya) tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak yang lainnya. Jika salah satu pihak dalam perjanjian ingin menjual sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya di Unicom, maka pihak lainnya akan memiliki hak untuk membeli saham tersebut sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

**d. Perjanjian sewa menyewa kantor tanggal 28 September 2018**

Pada tanggal 28 September 2018, GHON dengan PT Dwidaya Amadeo Gemintang menandatangani perjanjian sewa menyewa kantor untuk pemakaian lahan dan bangunan di Taman Tekno Blok J-2 No. 2, Bumi Serpong Damai, Serpong, Tangerang Selatan, Banten sebagai tempat usaha GHON. Perjanjian ini berlaku 10 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2029. Harga sewa per 3 (tiga) bulan yang harus dibayarkan GHON sesuai perjanjian adalah Rp250 juta.



e. **Perjanjian Kerjasama Telekomunikasi Berkenaan dengan Penyediaan Konektivitas Seluler dan Wifi pada Area Operasional MRT Jakarta – Fase I No. 024/TBG-TB-00/IBP/05/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017**

Para pihak

- (i) PT MRT Jakarta ("**Pemilik Proyek**"); dan
- (ii) TB.

Ruang lingkup

Pemilik Proyek dan TB sepakat untuk melakukan kerjasama, dimana Pemilik Proyek memberikan hak secara eksklusif kepada TB untuk menyediakan dan mengelola infrastruktur telekomunikasi yang akan melayani jaringan sinyal seluler dan konektivitas *wifi* di area operasional MRT Jakarta, baik bawah tanah maupun layang yang dimiliki oleh Pemilik Proyek.

Hak dan kewajiban, antara lain

- Pemilik Proyek memberikan hak penggunaan atas ruang pada area instalasi kepada TB untuk tujuan penempatan dan pengoperasian infrastruktur telekomunikasi.
- TB wajib melakukan pengadaan, pembuatan, instalasi dan pemasangan atas seluruh infrastruktur telekomunikasi pada area instalasi sesuai dengan berita acara penentuan lokasi dan aset yang telah disetujui oleh Pemilik Proyek.
- TB memiliki hak untuk menerima dan menentukan biaya koneksi yang dibebankan kepada masing-masing operator seluler atas layanan telekomunikasi yang telah dinikmati oleh, dan menagihkannya secara langsung kepada masing-masing operator seluler tersebut.
- Pemilik Proyek berhak meminta jaminan kinerja dari TB, yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan non-perbankan yang disetujui oleh Pemilik Proyek, dalam kaitannya dengan penyediaan layanan telekomunikasi selama jangka waktu kerja sama.
- TB wajib mengoperasikan, mengelola, dan memelihara seluruh area instalasi beserta seluruh infrastruktur telekomunikasi yang dipasang pada area instalasi tersebut untuk memastikan bahwa pengoperasian infrastruktur telekomunikasi tersebut tidak akan menyebabkan gangguan terhadap kegiatan usaha Pemilik Proyek.
- Atas kerjasama layanan telekomunikasi antara TB dan Pemilik Proyek, TB wajib melakukan bagi hasil dengan Pemilik Proyek berupa sejumlah persentase dari pendapatan kotor yang diterima TB dari kegiatan penyediaan dan pengoperasian infrastruktur telekomunikasi di area operasional MRT Jakarta.

Jangka waktu kerja sama

10 (sepuluh) tahun sejak tanggal operasi pendapatan (yaitu tanggal dimulainya untuk pertama kali : (i) pemberian hak penggunaan atas ruang di area instalasi oleh Pemilik Proyek kepada TB; dan (ii) pemberian layanan telekomunikasi oleh TB kepada pengguna, yang ditandai dengan penandatanganan berita acara operasi pendapatan oleh TB dan Pemilik Proyek, tanggal mana jatuh pada tanggal mulai operasi MRT Jakarta yang dijadwalkan atau tanggal aktual dimulainya pengoperasian MRT Jakarta secara komersial, yang mana yang lebih akhir).

Pengakhiran

Perjanjian ini akan berakhir pada akhir jangka waktu kerja sama.

Perjanjian ini dapat diakhiri lebih awal oleh Pemilik Proyek sebelum akhir jangka waktu kerja sama (dalam hal mana Pemilik Proyek wajib melakukan pemberitahuan tertulis kepada TB mengenai pengakhiran tersebut dalam waktu paling kurang 30 (tiga puluh) hari kalender) apabila terjadi salah satu peristiwa yang disebutkan dalam perjanjian ini, antara lain : (i) TB gagal menambah besaran jaminan kinerja ketika diminta oleh Pemilik Proyek sebagaimana diatur dalam perjanjian; (ii) TB gagal melaksanakan kewajiban material yang diatur di dalam perjanjian dan tidak memperbaiki kegagalan tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah menerima pemberitahuan tertulis dari Pemilik Proyek mengenai kegagalan tersebut; atau (iii) salah satu atau lebih dari pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh TB dalam perjanjian tidak benar dan tidak akurat.



#### Pembatasan

TB tidak diperkenankan mengalihkan hak-hak, kepentingan-kepentingan atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemilik Proyek.

#### Hukum Yang Berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

#### Penyelesaian Sengketa

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

- f. **Perjanjian Kerjasama Pengadaan Infrastruktur Sarana Telekomunikasi untuk Layanan Komunikasi Data dan Penunjang Kegiatan Usaha di Gerai-Gerai Alfamidi, Alfamidi Super dan Midi Fresh di Seluruh Indonesia antara PT Midi Utama Indonesia Tbk. dengan PT Permata Karya Perdana No. 022/PKS/PKP-SAT/IX/2014 tanggal 19 September 2014, sebagaimana diubah dengan Addendum I No. 0085/Legal-PKP/14/07-2020 tanggal 17 Juli 2020**

#### Para pihak

- (i) PT Midi Utama Indonesia Tbk. ("MIDI"); dan
- (ii) PKP.

#### Ruang lingkup

- MIDI sepakat untuk menunjuk PKP untuk mendirikan, memasang dan/atau menempatkan sebanyak 1 (satu) infrastruktur sarana penunjang telekomunikasi di masing-masing Gerai (sebagaimana didefinisikan dibawah ini) yang disepakati termasuk melakukan pemeliharaan atas infrastruktur sarana penunjang telekomunikasi tersebut ("**Infrastruktur Sarana Penunjang Telekomunikasi**").
- MIDI dengan ini memberikan wewenang kepada PKP untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan ruang (*space*) yang masih ada pada Infrastruktur Sarana Penunjang Telekomunikasi yang telah tersedia dan/atau *Pole*, baik untuk keperluan PKP sendiri maupun pihak ketiga (yang akan menyewa sebagian Infrastruktur Sarana Penunjang Telekomunikasi dari PKP).

#### Hak dan kewajiban, antara lain

- MIDI berhak menerima komisi dari PKP atas penggunaan fasilitas Infrastruktur Sarana Penunjang Telekomunikasi dan/atau *Pole* yang telah terpasang di setiap gerai milik MIDI dan atau yang dikelola bersama pihak lain yang dikenal dengan nama Alfamidi, Alfamidi Super dan Midi Fresh ("**Gerai**").
- PKP berhak mendapatkan tempat (*space*) di Gerai untuk mendirikan, memasang dan/atau menempatkan Infrastruktur Sarana Penunjang Telekomunikasi.
- PKP berhak mendapatkan jaminan bahwa area yang akan dipergunakan oleh PKP tidak bermasalah dan/atau aman dari gangguan dari pihak lain.
- PKP berkewajiban membayar biaya pemakaian listrik untuk setiap Infrastruktur Sarana Penunjang Telekomunikasi yang ada di Gerai secara tepat waktu.

#### Jangka waktu

5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2024 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan MIDI dan PKP.

#### Pengakhiran

Perjanjian ini dapat diakhiri lebih awal oleh PKP dan MIDI berdasarkan kesepakatan bersama dan dalam bentuk tertulis. Apabila Perjanjian ini berakhir dan tidak diperpanjang atau diakhiri terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan perjanjian ini, PKP wajib mengosongkan seluruh area dan mengambil Infrastruktur Sarana Penunjang Telekomunikasi yang terdapat di seluruh Gerai dalam waktu 30 hari kalender setelah tanggal efektif berakhirnya atau diakhirinya perjanjian.

#### Pembatasan

Para pihak tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.



#### Hukum Yang Berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

#### Penyelesaian Sengketa

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

- g. **Perjanjian Kerjasama Pengadaan Infrastruktur Sarana Penunjang Telekomunikasi untuk Layanan Komunikasi Data Gerai-Gerai Alfamart di Seluruh Indonesia antara PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. dengan PT Permata Karya Perdana No PKP. 016/PKS/PKP/II/2014, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum II Perjanjian Kerjasama Pengadaan Infrastruktur Sarana Penunjang Telekomunikasi untuk Layanan Komunikasi Data Gerai-Gerai Alfamart di Seluruh Indonesia No PKP. 0061/Project-PKP/10/03-2022 tanggal 14 Maret 2022**

#### Para pihak

- (i) PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. ("SAT"); dan
- (ii) PKP.

#### Ruang lingkup

- SAT sepakat untuk menunjuk PKP untuk mendirikan, memasang dan/atau menempatkan infrastruktur sarana penunjang telekomunikasi di masing-masing Gerai (sebagaimana didefinisikan dibawah ini) yang disepakati termasuk melakukan pemeliharaan atas perangkat atau infrastruktur sarana penunjang telekomunikasi milik atau yang dikuasai PKP, yang akan ditempatkan disebagian Gerai berikut fasilitas daya listrik yang berasal dari PLN yang ada di Gerai ("**Infrastruktur Sarana Penunjang Telekomunikasi**").
- SAT dengan ini memberikan wewenang kepada PKP untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan ruang (*space*) yang masih ada pada Infrastruktur Sarana Penunjang Telekomunikasi yang telah tersedia dan/atau Pole, baik untuk keperluan PKP sendiri maupun pihak ketiga (yang akan menyewa sebagian Infrastruktur Sarana Penunjang Telekomunikasi yang terpasang di sebagian Gerai) yang menandatangani perjanjian dengan PKP.

#### Hak dan kewajiban, antara lain

- SAT berhak menerima komisi dari PKP atas penggunaan fasilitas Infrastruktur Sarana Penunjang Telekomunikasi dan/atau Pole yang telah terpasang di setiap minimarket milik SAT atau dan atau yang dikelola Bersama pihak lain yang dikenal dengan nama Alfamart ("**Gerai**").
- PKP berhak mendapatkan tempat (*space*) di Gerai untuk mendirikan, memasang dan menempatkan Infrastruktur Sarana Penunjang Telekomunikasi.
- PKP berhak mendapatkan Gerai yang telah memiliki IMB.
- PKP berkewajiban membayar biaya pemakaian listrik untuk setiap Infrastruktur Sarana Penunjang Telekomunikasi yang ada di Gerai secara tepat waktu.

#### Jangka waktu

Berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 14 Februari 2024.

#### Pengakhiran

Perjanjian ini dapat diakhiri lebih awal oleh PKP dan SAT berdasarkan kesepakatan bersama dan dalam bentuk tertulis. Apabila perjanjian ini berakhir dan tidak diperpanjang atau diakhiri terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan perjanjian ini, PKP wajib mengosongkan seluruh area, mengembalikan area dalam kondisi terawat dan baik seperti semula, mengambil infrastruktur sarana penunjang telekomunikasi, dan melepaskan daya listrik yang dipasang baru/mencabut ID listrik pelangan ke PLN.

#### Pembatasan

Para pihak tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

#### Hukum Yang Berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.



Penyelesaian Sengketa  
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

**5. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melalui Perusahaan Anak memiliki dan/atau menguasai aset tetap berupa tanah dan bangunan sebagai berikut :

• **Tanah**

Perseroan melalui Perusahaan Anak, yaitu TI, UT, TB, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, PMS, SMI, BT, dan TK memiliki dan/atau menguasai tanah yang diperuntukkan sebagai kantor dan lokasi pembangunan menara telekomunikasi, yaitu sebagai berikut :

No.	Perusahaan Anak	Aset Tanah yang Dimiliki	Aset Tanah yang Dikuasai
1.	TI	31 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kepulauan Riau dan Lampung.	6 (enam) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Jawa Barat dan Jawa Timur.
2.	UT	4 (empat) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Bali dan Banten.	3 (tiga) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Bali dan Banten.
3.	TB	150 bidang tanah yang di atasnya berdiri kantor dan/atau menara yang terletak di Jambi, Sumatera Selatan, Bali, Maluku, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Riau, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan.	16 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Bali, Banten, DI Yogyakarta, Lampung, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat.
4.	Mitrayasa	10 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Sulawesi Utara, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur.	3 (tiga) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Banten, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur.
5.	SKP	110 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Aceh, Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Jambi, Bali, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Banten, dan Kepulauan Bangka Belitung.	27 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di DI Yogyakarta, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
6.	Balikom	26 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan dan Jawa Timur.	3 (tiga) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Jawa Barat, Jawa Timur dan Kalimantan Selatan.
7.	Triaka	6 (enam) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Papua.	-
8.	PMS	3 (tiga) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Kalimantan Selatan dan Jawa Timur.	-
9.	SMI	5 (lima) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Lampung, Jawa Barat, Banten dan Bengkulu.	15 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan DI Yogyakarta.
10.	BT	1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di DKI Jakarta.	-
11.	TK	-	1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Jawa Barat.

Benda-benda tidak bergerak yang material yang akan digunakan oleh masing-masing Perusahaan Anak sebagaimana disebutkan di atas untuk menjalankan usahanya adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum Indonesia, kecuali bagi tanah-tanah yang dikuasai masing-masing Perusahaan Anak namun nama pihak-pihak perseorangan masih tercantum sebagai pemilik di dalam Sertifikat Hak Milik atau masih dalam bentuk akta jual beli atau surat pelepasan hak atas tanah, sehingga masih diperlukan proses balik nama menjadi atas nama masing-masing Perusahaan Anak ke dalam suatu Sertifikat Hak Guna Bangunan.



- **Bangunan**

Perseroan melalui Perusahaan Anak, yaitu TB, PMS, UT, SKP, dan Balikom memiliki dan/atau menguasai aset bangunan yang diperuntukkan sebagai kantor yaitu sebagai berikut :

No.	Perusahaan Anak	Lokasi	Luas (m <sup>2</sup> )
1.	TB	The Convergence Indonesia, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan	4.143,84
2.	PMS	The Convergence Indonesia, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan	279,65
3.	UT	The Convergence Indonesia, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan	46,23
4.	SKP	The Convergence Indonesia, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan	4,143,84
5.	Balikom	The Convergence Indonesia, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan	710,08

- **Sites telekomunikasi**

Perseroan melalui Perusahaan Anak yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI, JPI, GHON dan PKP secara konsolidasian memiliki 21.870 *sites* telekomunikasi, yang terdiri dari 21.758 *sites* menara telekomunikasi dan 112 jaringan IBS per 31 Desember 2022.

## 6. ASURANSI

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perusahaan Anak mempunyai asuransi dengan jenis pertanggungan *property all risk*, asuransi *public liability*, asuransi gempa bumi, serta asuransi kerugian untuk menutup kemungkinan terjadi kerusakan dari infrastruktur menara telekomunikasi. Penutupan asuransi tersebut dilakukan dengan PT Lippo General Insurance Tbk., PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika, PT Asuransi Artarindo, dan PT Avrist General Insurance dengan periode pertanggungan paling dekat akan berakhir pada tanggal 1 Juli 2023 dan paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Perseroan juga melakukan penutupan asuransi di luar menara telekomunikasi berupa asuransi kerugian dengan PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika yang akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023. Seluruh polis asuransi yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila asuransi-asuransi tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan dan Perusahaan Anak berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui asuransi tersebut.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki hubungan afiliasi dengan salah satu perusahaan asuransi tersebut di atas.

Manajemen Perseroan berpendapat bahwa nilai pertanggungan dari asuransi yang dimiliki cukup untuk menutupi potensi kerugian atas risiko yang dipertanggungjawabkan.

## 7. KETENTUAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, industri perusahaan menara telekomunikasi tidak termasuk dalam daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (“AMDAL”). Kemudian, pembangunan atau penyediaan menara telekomunikasi tidak termasuk ke dalam jenis usaha yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup, sehingga prosedur Audit Lingkungan Hidup bagi perusahaan penyedia menara telekomunikasi tidak diatur secara rinci oleh Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup. Namun, beberapa Perusahaan Anak Perseroan memiliki dokumen UKL-UPL yang diperoleh sebagai pemenuhan persyaratan dari pemerintah daerah dalam rangka perolehan IMB atau IMBM.



Salah satu tindakan pencegahan yang dilakukan Perusahaan Anak dalam mengelola dan memantau dampak lingkungan dari kegiatan menara telekomunikasi adalah melarang penyewa untuk memakai atau menyimpan bahan berbahaya di *sites* menara telekomunikasi Perusahaan Anak karena melanggar hukum lingkungan yang dituangkan dalam setiap perjanjian sewa. Selain itu, penyewa diwajibkan untuk memberi tahu bilamana ada dampak lingkungan tertentu yang disebabkan olehnya.

Potensi pengaruh dari emisi frekuensi radio dan pengaruh negatif terhadap kesehatan termasuk berbagai bentuk kanker, telah menjadi subyek yang dipelajari dan diperhatikan oleh kalangan ilmiah dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan Anak tertentu juga pernah menghadapi penolakan dari warga setempat yang tidak setuju dengan pembangunan menara dengan alasan tertentu, termasuk menyangkut risiko kesehatan. Sebagai akibat dari penolakan masyarakat, Perusahaan Anak dapat diwajibkan oleh otoritas setempat untuk membongkar atau merelokasi menara-menara tertentu.

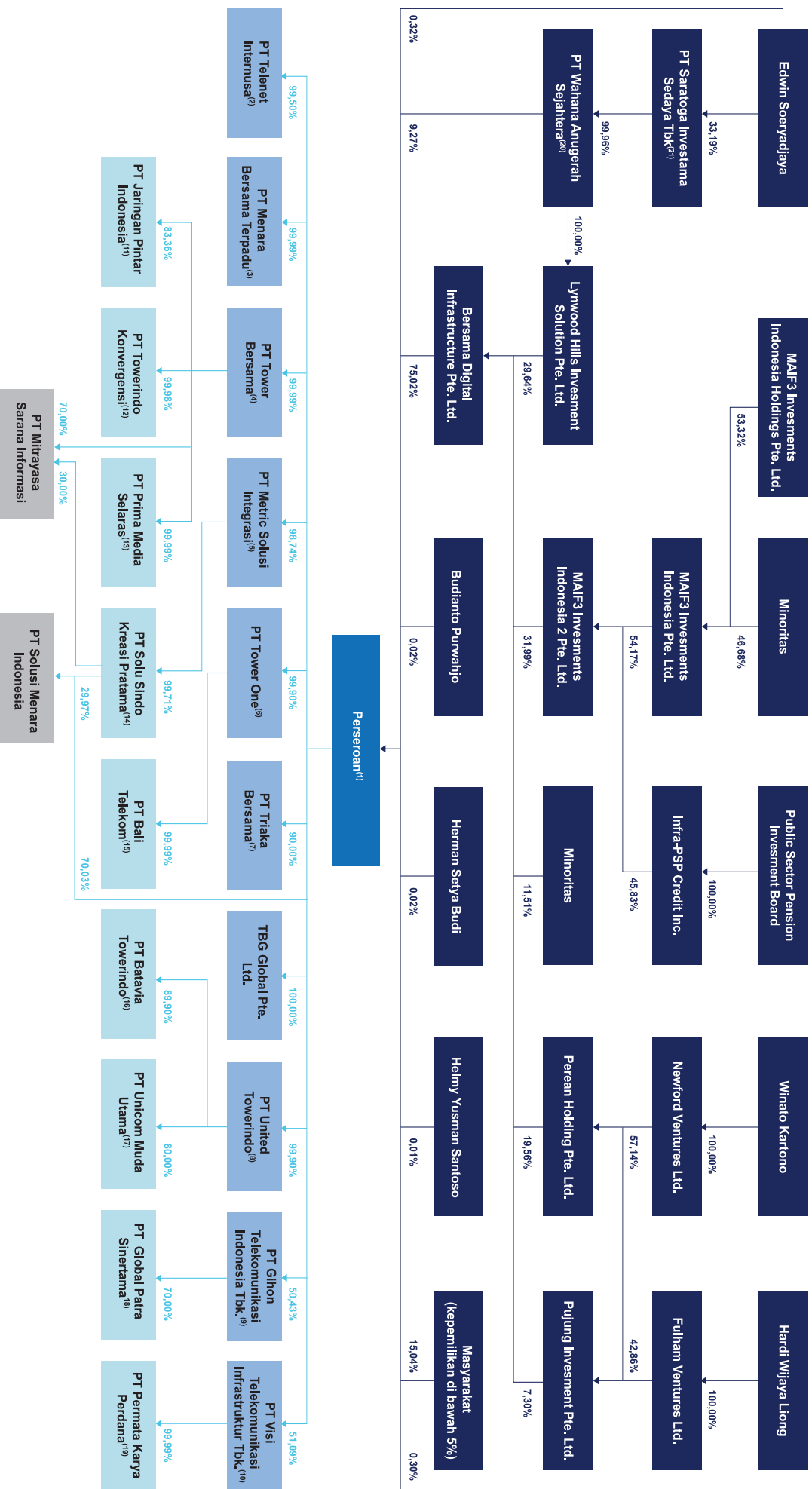
Perseroan mempunyai program kepatuhan dan proyek pemantauan untuk memastikan bahwa Perusahaan Anak mematuhi semua hukum lingkungan yang berlaku. Namun demikian, Perseroan tidak dapat menjamin bila biaya yang harus dibayar untuk mematuhi hukum-hukum yang berlaku atau yang akan berlaku di masa depan tidak akan mempunyai pengaruh yang material terhadap kegiatan usaha, hasil usaha, dan kondisi keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak.





8. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Hubungan kepemilikan Perseroan, pemegang saham, dan Perusahaan Anak pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:





Catatan :

- (1) DPS Perseroan per 31 Mei 2023. Perhitungan persentase berdasarkan hak suara;
- (2) sisa sebesar 0,50% dari TI dimiliki oleh WAS;
- (3) sisa sebesar 0,01% dari MBT dimiliki oleh TB;
- (4) sisa sebesar 0,01% dari TB dimiliki oleh TO;
- (5) sisa sebesar 1,26% dari MSI dimiliki oleh TB;
- (6) sisa sebesar 0,10% dari TO dimiliki oleh Provident Capital Indonesia;
- (7) sisa sebesar 10,00% dari Triaka dimiliki oleh TB;
- (8) sisa sebesar 0,10% dari UT dimiliki oleh TB;
- (9) DPS GHON per 31 Mei 2023; sisa sebesar 49,57% dari GHON dimiliki oleh Rudolf Parningotan Nainggolan, Felix Ariodamar, Yoyong, dan masyarakat;
- (10) DPS GOLD per 31 Mei 2023, sisa sebesar 48,91% dari GOLD dimiliki oleh PT Amanda Cipta Persada, PT Mulia Sukses Mandiri, Scavino Ventures Ltd., PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., dan masyarakat;
- (11) sisa sebesar 16,64% dari JPI dimiliki oleh Perseroan, Kristiono, Bagas Dwi Bawono dan Perseroan;
- (12) sisa sebesar 0,02% dari TK dimiliki oleh Perseroan;
- (13) sisa sebesar 0,01% dari PMS dimiliki oleh Perseroan;
- (14) sisa sebesar 0,29% dari SKP dimiliki oleh Sakti Wahyu Trenggono dan Abdul Satar;
- (15) sisa sebesar 0,01% dari Balikom dimiliki oleh Perseroan;
- (16) sisa sebesar 10,10% dari BT dimiliki oleh TB;
- (17) sisa sebesar 20,0% dari Unicom dimiliki oleh 13 pemegang saham individu;
- (18) sisa sebesar 30,0% dari GPS dimiliki oleh PT Gihon Nusantara Tujuh dan Roisatul Ummah;
- (19) sisa sebesar 0,01% dari PKP dimiliki oleh PT Sukses Prima Sakti;
- (20) sisa sebesar 0,04% dari WAS dimiliki oleh PT Surya Nuansa Ceria;
- (21) DPS PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. per 31 Mei 2023; sisa sebesar 66,81% dimiliki oleh Sandiaga Salahuddin Uno, PT Unitrans Pratama, masyarakat dan saham treasury.

Pengendali Perseroan adalah BDIA, di mana pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BDIA dikendalikan secara tidak langsung oleh Winato Kartono dan Edwin Soeryadjaya.

Perseroan telah melaporkan pemilik manfaat dari Perseroan, yaitu Edwin Soeryadjaya dan Winato Kartono, kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Perusahaan Anak dan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut :

Nama	Perseroan		BDIA		TI		UT		BT	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	PK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verena Lim	K	-	-	D	-	-	-	-	-	-
Ludovicus Sensi Wondabio	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heri Sunaryadi	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herman Setya Budi	-	PD	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	WD	-	-	K	-	-	-	-	-
Budianto Purwahjo	-	D	-	-	-	PD	K	-	K	-
Helmy Yusman Santoso	-	D	-	-	-	-	-	D	-	D

	TB		TK		PMS		Mitrayasa		MSI	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verena Lim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ludovicus Sensi Wondabio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heri Sunaryadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herman Setya Budi	K	-	-	-	-	D	-	PD	-	PD
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	PK	-	K	-
Budianto Purwahjo	-	D	-	-	-	-	K	-	-	-
Helmy Yusman Santoso	-	-	-	-	K	-	-	D	-	D



Nama	SKP		TO		Balikom		Triaka		SMI	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verena Lim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ludovicus Sensi Wondabio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heri Sunaryadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herman Setya Budi	-	PD	-	PD	K	-	K	-	-	PD
Hardi Wijaya Liong	PK	-	-	-	-	-	-	-	PK	-
Budianto Purwahjo	K	-	PK	-	-	D	-	D	K	-
Helmy Yusman Santoso	-	D	K	-	-	PD	-	-	-	D

Nama	TBGG		MBT		JPI		GHON		GOLD	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verena Lim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ludovicus Sensi Wondabio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heri Sunaryadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herman Setya Budi	-	-	-	PD	KU	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	D	K	-	-	-	-	-	-	-
Budianto Purwahjo	-	-	-	-	K	-	-	-	-	-
Helmy Yusman Santoso	-	-	-	D	-	DU	-	-	PK	-

	GPS		PKP		Unicom	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-
Verena Lim	-	-	-	-	-	-
Ludovicus Sensi Wondabio	-	-	-	-	-	-
Heri Sunaryadi	-	-	-	-	-	-
Herman Setya Budi	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-
Budianto Purwahjo	-	-	-	-	-	-
Helmy Yusman Santoso	-	-	-	-	-	-

Catatan :

PK	: Presiden Komisaris	PD	: Presiden Direktur
KU	: Komisaris Utama	DU	: Direktur Utama
K	: Komisaris	WD	: Wakil Presiden Direktur
KI	: Komisaris Independen	D	: Direktur

## 9. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBADAN HUKUM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pemegang saham utama berbadan hukum adalah BDIA dengan keterangan sebagai berikut :

### a. Riwayat Singkat

BDIA, berkedudukan di Singapura, didirikan pada tanggal 11 Februari 2022 sebagai Provident Digital Infrastructure Pte. Ltd. sebelum mengganti namanya menjadi Provident Consolidated Holdings Pte. Ltd. pada tanggal 4 Maret 2022. Provident Consolidated Holdings Pte. Ltd. kemudian mengganti namanya menjadi Bersama Digital Infrastructure Pte. Ltd. pada tanggal 27 April 2022.

### b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan *Business Profile* yang dikeluarkan oleh *Accounting and Corporate Regulatory Authority* ("ACRA") Singapura pada tanggal 10 Mei 2022, ruang lingkup kegiatan usaha utama BDIA adalah sebagai perusahaan *holding*.

BDIA berkantor pusat di 80 Raffles Place #54-01/02, UOB Plaza 1, Singapura.



**c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham**

Berdasarkan Surat Pernyataan BDIA tertanggal 12 April 2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BDIA adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (US\$)	%
Lynwood Hills Investment Solution Pte. Ltd.	1.111.612.489	1.109.294.306,07	29,6
Perean Holdings Pte. Ltd.	733.717.232	732.187.120,76	19,6
Pujung Investments Pte.Ltd.	273.777.689	273.206.746,54	7,3
Kosambi Holdings Pte. Ltd.	314.450.199	313.794.437,13	8,4
Sudirman Agung Pte. Ltd.	117.333.296	117.088.606,37	3,1
MAIF3 Investments Indonesia 2 Pte. Ltd.	1.200.000.000	1.197.497.491,67	32,0
<b>Jumlah</b>	<b>3.750.890.905</b>	<b>3.743.068.708,54</b>	<b>100,0</b>

**d. Manajemen dan Pengawasan**

Berdasarkan Surat Pernyataan BDIA tertanggal 12 April 2023, susunan anggota direksi BDIA adalah sebagai berikut :

Direktur	:	Gavin Arnold Caudle
Direktur	:	Winato Kartono
Direktur	:	Hari Gurung
Direktur	:	Michael William Soeryadjaya
Direktur	:	Verena Lim

**10. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN**

Berdasarkan Akta No. 116/2022, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0019739 tanggal 8 Juni 2022 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0106607.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris	:	Edwin Soeryadjaya
Komisaris	:	Verena Lim
Komisaris Independen	:	Ludovicus Sensi Wondabio
Komisaris Independen	:	Heri Sunaryadi

**Direksi**

Presiden Direktur	:	Herman Setya Budi
Wakil Presiden Direktur	:	Hardi Wijaya Liong
Direktur	:	Budianto Purwahjo
Direktur	:	Helmy Yusman Santoso

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal RUPS Tahunan yang mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan dan dapat diangkat kembali sesuai keputusan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Masa jabatan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris di atas berlaku sampai dengan ditutupkan RUPS Tahunan tahun 2025.



Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

#### DEWAN KOMISARIS



#### **Edwin Soeryadjaya, Presiden Komisaris**

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1949. Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak Maret 2010 hingga saat ini.

Beliau memulai karirnya pada tahun 1978 di PT Astra International (“**Astra**”), salah satu konglomerat diversifikasi terbesar di Indonesia yang didirikan oleh ayahnya. Dari tahun 1987 hingga 1990, beliau terlibat dalam restrukturisasi Astra dan pada tahun 1990, berhasil memimpin Penawaran Umum Perdana Saham Astra. Pada tahun 1993, beliau meninggalkan posisinya sebagai Wakil Presiden Direktur Astra. Saat ini beliau menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT Saratoga Investama Sedaya Tbk., (perusahaan investasi), PT Adaro Energy Tbk. (batubara dan energi), PT Merdeka Copper Gold Tbk. (tambang emas dan tembaga) dan PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. (konsumer otomotif). Beliau juga menjabat sebagai Ketua (*Non-Executive*) di Interra Resources Ltd. (minyak dan gas) sejak tahun 2005, Komisaris PT Satria Sukses Makmur sejak tahun 2005, dan Presiden Komisaris PT Unitrans Pratama sejak tahun 2011 dan PT Wahana Anugerah Sejahtera sejak tahun 2015. Beliau juga merupakan pendiri Yayasan William dan Lily dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Ora Et Labora sejak tahun 2011. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Komisaris PT Wana Bhakti Sukses Mineral (2015-2020), Komisaris PT Bumi Hijau Asri (2015-2020), Komisaris Utama PT Bumi Suksesindo (2013-2017), Komisaris PT Trimitra Karya Jaya (2012-2020), Komisaris PT Provident Investasi Bersama Tbk., (2012-2015), Presiden Komisaris PT Saratoga Sentra Business (2005-2020), PT Nugraha Eka Kencana (2003-2020), dan PT Sukses Indonesia (2003-2020).

Memperoleh gelar Bachelor of Business Administration dari University of Southern California pada tahun 1974.

Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya; dan (ii) anggota Direksi Perseroan, namun memiliki hubungan Afiliasi dengan pemegang saham utama Perseroan. Beliau merupakan Komisaris yang memiliki saham Perseroan.



#### **Verena Lim, Komisaris**

Warga Negara Australia, lahir pada tahun 1982. Ditunjuk sebagai Komisaris Perseroan pada bulan Mei 2022.

Memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di sektor keuangan. Beliau memulai karirnya di Macquarie Group pada tahun 2005, dan saat ini menduduki jabatan sebagai Chief Executive Officer Macquarie Group Asia dan Direktur Pelaksana Senior dan Direktur Eksekutif Macquarie Asset Management. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur BDIA. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Macquarie Asia Infrastructure Fund (MAIF), Komite Investasi Macquarie Asset Management (“**MAM**”) Asia-Pacific fund, Ketua Komite Macquarie Asia Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) anggota dari Macquarie Group Foundation Committee, dan Ketua Macquarie Group Foundation’s Social Impact Investment Advisory Committee.

Beliau memperoleh gelar Bachelor of Commerce and Law dari University of New South Wales, Australia pada tahun 2005.

Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya; dan (ii) anggota Direksi Perseroan, namun memiliki hubungan Afiliasi dengan pemegang saham utama Perseroan.



**Ludovicus Sensi Wondabio**  
**Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1964. Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak bulan Mei 2020 hingga saat ini.

Beliau adalah seorang dosen untuk program Sarjana dan Magister Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia dan Senior Audit Partner pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Mirawati Sensi Idris (MSId), anggota Moore Stephens International. Beliau dipercaya menduduki posisi sebagai tim Konsultan Ahli untuk Direktur Keuangan di PT Pertamina (Persero) sejak 2006 sampai dengan sekarang dan anggota Komita Audit di PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. sejak tahun 2019.

Beliau adalah seorang fasilitator dalam berbagai pelatihan dan program pendidikan berkelanjutan (PPL) untuk Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sejak tahun 2017. Pada tahun 2012, beliau menempati posisi sebagai Ahli Spesialis Akuntansi Asuransi di GIZ (Jerman) untuk membantu Pemerintah Indonesia dalam Program Asuransi Sosial (BPJS Kesehatan), Pakar Akuntansi Spesialis di Bank Dunia untuk membantu Pemerintah Indonesia dalam Program Asuransi Sosial BPJS sampai dengan tahun 2017 dan dipercaya sebagai Ketua Tim Akuntansi yang ditunjuk Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia untuk International Financial Reporting Standard (IFRS) 4 sampai dengan tahun 2017.

Memperoleh gelar Doktor (Dr) dalam Ilmu Akuntansi, Program Pasca Sarjana pada tahun 2010, gelar Magister Manajemen (MM) - Konsentrasi Manajemen Akuntansi pada tahun 1994, dan Sarjana Ekonomi (S.E, Ak) pada tahun 1987. Ketiga gelar tersebut diperoleh dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia.

Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya; (ii) anggota Direksi Perseroan; dan (iii) pemegang saham utama Perseroan.



**Heri Sunaryadi**  
**Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1965. Ditunjuk sebagai Komisaris Independen Perseroan pada bulan Mei 2022.

Memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di sektor keuangan. Beliau pernah berkarir di berbagai perusahaan, antara lain PT Bahana Sekuritas dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Utama (2007-2009), Presiden Direktur PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (2009-2013), Komisaris KSEI (2009-2012) dan (2015-2018), Presiden Direktur KSEI (2013-2014), Direktur Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (2014-2016), Komisaris Telkomsel (2015-2016), dan Komisaris PT Merdeka Copper Gold Tbk. (2018-2021). Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen BRI.

Beliau meraih gelar Sarjana di bidang teknik pertanian dari Fakultas Teknologi Pertanian, Insitut Pertanian Bogor pada tahun 1987.

Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya; (ii) anggota Direksi Perseroan; dan (iii) pemegang saham utama Perseroan.



## DIREKSI



**Herman Setya Budi**  
**Presiden Direktur dan Chief Operating Officer**

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1963. Menjabat sebagai Presiden Direktur sejak bulan Maret 2010 hingga saat ini, dan bertanggung jawab atas seluruh operasional Perseroan.

Bergabung dengan Grup Tower Bersama sejak tahun 2008 dan saat ini menduduki beberapa jabatan pada Perusahaan Anak. Beliau memulai karirnya pada PT Surya Fortuna dengan jabatan terakhir sebagai *Sales Manager* (1987-1991), kemudian melanjutkan karirnya di bidang asuransi di beberapa perusahaan asuransi yaitu PT Asuransi Jiwa Miralife dengan jabatan terakhir sebagai *Marketing Manager* (1991-1993), PT Astra CMG Life dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Wilayah (1994-1997), kemudian melanjutkan karirnya di bidang keuangan pada PT Finansia Pacific Raya dengan jabatan terakhir sebagai Direktur (1997-2008), PT Finansia Multi Finance dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Utama (1997-2008), Presiden Direktur dan Komisaris PT Mitra Investindo Tbk. (2008-2014) dan Direktur PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. (2010-2011).

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1988.

Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan (iii) pemegang saham utama Perseroan. Beliau merupakan Direktur yang memiliki saham Perseroan.



**Hardi Wijaya Liong**  
**Wakil Presiden Direktur dan Chief Executive Officer**

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1970. Menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur sejak bulan Juli 2010 hingga saat ini, dan bertanggung jawab atas strategi Perseroan.

Beliau merupakan salah satu pendiri Grup Tower Bersama dan saat ini menduduki beberapa jabatan pada Perusahaan Anak. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur PT Merdeka Copper Gold Tbk., sejak tahun 2014. Memulai karier di Kantor Akuntan Publik Prasetio-Utomo & Rekan dengan jabatan terakhir sebagai *Manager* (1993-1998), beliau kemudian melanjutkan karier di Citigroup selama 6 (enam) tahun dengan jabatan terakhir sebagai *Vice President Investment Banking Indonesia* dan Direktur PT Citigroup Securities Indonesia (1998-2004). Di Citigroup, beliau menyukseskan berbagai transaksi merger dan akuisisi di Indonesia meliputi seluruh wilayahnya, termasuk memberi nasihat PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. dalam sejumlah transaksi utama.

Memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Trisakti jurusan akuntansi pada tahun 1993.

Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan (iii) pemegang saham utama Perseroan. Beliau merupakan Direktur yang memiliki saham Perseroan.





**Budiando Purwahjo**  
**Direktur dan Chief of Business Development**

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1963. Menjabat sebagai Direktur sejak bulan Maret 2010 hingga saat ini, dan bertanggung jawab atas bidang pengembangan bisnis Perseroan.

Beliau bergabung dengan Grup Tower Bersama pada tahun 2004 sebagai *Chief of Business Development* dan saat ini menduduki beberapa jabatan pada Perusahaan Anak. Beliau memulai karier pada tahun 1986 di PT Astra Graphia, salah satu perusahaan anak Astra, salah satu konglomerat terbesar di Indonesia, dengan jabatan terakhir sebagai *Marketing Manager*. Beliau kemudian diangkat sebagai *Director of Business Development* di PT Ariawest International, perusahaan anak dari US West/Media One, pemegang izin pemerintah untuk pembangunan telekomunikasi di Jawa Barat. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur di PT Provident Investasi Bersama Tbk., sejak tahun 2012.

Memperoleh gelar Sarjana Teknik dengan spesialisasi dalam bidang Teknik Elektro dari Institut Sains & Teknologi Nasional pada tahun 1988.

Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan (iii) pemegang saham utama Perseroan. Beliau merupakan Direktur yang memiliki saham Perseroan.



**Helmy Yusman Santoso**  
**Direktur dan Chief Financial Officer**

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1976. Menjabat sebagai Direktur sejak bulan Maret 2010 hingga saat ini. Merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan dan bertanggung jawab atas bidang keuangan dan *treasury, controllership*, hukum dan hubungan investor.

Beliau bergabung dengan Grup Tower Bersama sejak tahun 2008 sebagai *Chief Financial Officer* dan saat ini menduduki beberapa jabatan pada Perusahaan Anak. Beliau memulai karirnya di Kantor Akuntan Publik Ernst & Young dengan jabatan terakhir sebagai Pengawas Audit (1998-2002), PT Astra Sedaya Finance dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Aset dan Keuangan (2002-2008), Asuransi Perusahaan Pembiayaan Indonesia dengan jabatan Komite Keuangan dan Perpajakan (2007-2008), dan kemudian di PT Astra Auto Finance dengan jabatan terakhir sebagai Presiden Direktur pada tahun 2008.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 1998 dan merupakan *Chartered Accountant* di Indonesia.

Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan (iii) pemegang saham utama Perseroan. Beliau merupakan Direktur yang memiliki saham Perseroan.

## 11. TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) ("Prinsip GCG") sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan peraturan-peraturan BEI. Prinsip GCG diterapkan pada seluruh organisasi melalui mekanisme dan alat-alat seperti Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Pedoman Kerja Direksi, Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi, dan Prosedur Standar Operasional yang terbaru.



Terkait dengan penerapan Prinsip GCG dalam kegiatan usaha Perseroan, Perseroan telah membentuk dan memiliki alat-alat kelengkapan sesuai dengan Peraturan Pencatatan Bursa dan peraturan-peraturan OJK terkait sebagai berikut :

### 11.1. RUPS

RUPS merupakan forum dimana pemegang saham berhak untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan jalannya Perseroan dan turut serta dalam pengambilan keputusan rapat sesuai dengan hak suaranya yang diatur berdasarkan undang-undang dan anggaran dasar Perseroan. RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan dilaksanakan setidaknya sekali dalam setahun sedangkan RUPS lainnya (Luar Biasa) dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pada tahun 2022, Perseroan menyelenggarakan RUPS Tahunan pada tanggal 23 Mei 2022.

### 11.2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berfungsi melakukan: (a) pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan; (b) memberikan nasihat kepada Direksi; serta (c) meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut. Fungsi pengawasan Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit yang diketuai oleh seorang anggota Dewan Komisaris. Fungsi nominasi dan remunerasi Perseroan pada tahun 2022 berada di Dewan Komisaris. Selama tahun 2022, Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan rekomendasi meliputi antara lain (i) melakukan penelaahan dan memberikan persetujuan dengan memperhatikan laporan tahunan dari Komite Audit, termasuk didalamnya laporan kegiatan dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021; (ii) melakukan pembahasan dan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang telah disusun oleh Direksi untuk tahun buku 2022; dan (iii) melakukan pembahasan dan persetujuan kepada Direksi atas perolehan dan penerimaan fasilitas-fasilitas pinjaman dari bank (*bilateral loan*).

Rapat Dewan Komisaris dilakukan secara berkala minimal setiap 2 (dua) bulan sekali. Selain itu Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi ("**Rapat Bersama**") dilakukan secara berkala paling kurang sekali dalam 4 (empat) bulan. Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris. Selama tahun 2022, Perseroan telah mengadakan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Bersama masing-masing sebanyak 5 (lima) kali dan 3 (tiga) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut :

Nama	Rapat Dewan Komisaris			Rapat Bersama		
	Jumlah Rapat	Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Kehadiran	%
Edwin Soeryadjaya	5	5	100%	3	3	100%
Verena Lim <sup>(1)</sup>	3	3	100%	2	2	100%
Ludovicus Sensi Wondabio	5	5	100%	3	3	100%
Heri Sunaryadi <sup>(1)</sup>	3	3	100%	2	2	100%

Catatan :

(1) Diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris Perseroan pada bulan Juni 2022.

Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang dibayarkan untuk Dewan Komisaris Perseroan pada tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp7,6 miliar dan Rp13,9 miliar.

### 11.3. Direksi

Direksi Perseroan bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan. Direksi berwenang mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna menunjang kegiatan usaha Perseroan. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.



Rapat Direksi dilakukan secara berkala minimal setiap 1 (satu) kali dalam setiap bulan serta setiap saat apabila dipandang perlu. Direksi wajib melakukan rapat bersama Dewan Komisaris ("**Rapat Bersama**") sedikitnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi. Selama tahun 2022, Perseroan telah mengadakan Rapat Direksi dan Rapat Bersama masing-masing sebanyak 44 kali dan 3 (tiga) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut :

Nama	Rapat Direksi			Rapat Bersama		
	Jumlah Rapat	Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Kehadiran	%
Herman Setya Budi	44	44	100%	3	3	100%
Hardi Wijaya Liong	44	44	100%	3	3	100%
Budianto Purwahjo	44	41	93%	3	3	100%
Helmy Yusman Santoso	44	43	98%	3	3	100%

Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Jumlah remunerasi yang dibayarkan untuk Direksi Perseroan pada tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp34,5 miliar dan Rp30,5 miliar.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya, anggota Direksi Perseroan rutin mengikuti pelatihan dan seminar yang diselenggarakan pihak eksternal yang diadakan oleh lembaga keuangan dan pakar industri telekomunikasi di Indonesia dan luar negeri. Pada tahun 2022, Direksi secara aktif mengikuti konferensi virtual dan fisik yang diadakan oleh lembaga keuangan dan pakar industri telekomunikasi di Indonesia dan luar negeri, di antaranya perkembangan standar akuntansi (PSAK) dan peraturan OJK.

#### 11.4. Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah menunjuk Helmy Yusman Santoso sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan berdasarkan Surat No. 157/TBG-TBI-001/FAL/01/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010 perihal Penunjukan Sekretaris Perusahaan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. Helmy Yusman Santoso merupakan anggota Direksi Perseroan dan uraian pengalaman kerja Helmy Yusman Santoso dapat dilihat pada Sub Bab Pengurusan dan Pengawasan dalam Bab ini.

Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi di alamat The Convergence Indonesia Lantai 11, Jl H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 dengan nomor telepon (62 21) 2924 8900, nomor faksimili (62 21) 2157 2015 dan email [corporate.secretary@tower-bersama.com](mailto:corporate.secretary@tower-bersama.com).

Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain :

- mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
- memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
  - (i) keterbukaan informasi kepada masyarakat termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
  - (ii) penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu; (iii) penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
  - (iv) penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan (v) pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Anggota Divisi Sekretaris Perusahaan secara rutin mengikuti berbagai pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh OJK, BEI dan *Indonesian Corporate Secretary Association* (ICSA) untuk meningkatkan pengetahuan tentang perkembangan peraturan terkini. Pada tahun 2022, anggota Divisi Sekretaris Perusahaan mengikuti pelatihan meliputi antara lain sosialisasi perubahan Peraturan No. I-A dan SE Notasi Khusus yang diadakan oleh BEI.



## 11.5. Komite di bawah Dewan Komisaris

### **Komite Audit**

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Edaran Dewan Komisaris tanggal 5 Juni 2020, dengan susunan anggota sebagai berikut :

Ketua Komite Audit : Ludovicus Sensi Wondabio (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan)

Anggota Komite Audit : Agung Nugroho Soedibyo

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1952. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak 2020. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang akuntansi pada tahun 1980 dan Magister Akuntansi pada tahun 2010, keduanya diperoleh dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia. Beliau saat ini menjabat sebagai *Senior Advisor* RSM Indonesia, *Senior Advisor* Arghajata Consulting dan anggota Komite Audit PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Beliau memulai karirnya di KPMG Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai *Senior Partner* (1974-2017) dan kemudian *Senior Partner* di RSM Indonesia (2017-2019).

Anggota Komite Audit : Agustino Sunarko

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1962. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung pada tahun 1986. Beliau memulai karirnya sebagai auditor di KAP Drs. Utomo & Co (1985-1989), dan kemudian bergabung dengan Grup Astra Credit Companies dengan jabatan terakhir sebagai *Head of Corporate Internal Audit Manager* di PT Astra Sedaya Finance (1989-2005). Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Dana Pensiun Astra Satu (2005-2012), dan Bendahara Koperasi Astra International (2012-2017).

Masa jabatan anggota Komite Audit sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun 2025 dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite Audit sebelum masa jabatannya berakhir. Komite Audit melaporkan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Mandat Komite Audit diatur dalam Piagam Komite Audit, yang secara periodik diperbaharui untuk memastikan bahwa tugas Komite Audit tetap relevan dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Berdasarkan Piagam Komite Audit, Komite Audit dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/ atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- melakukan tingkat ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan publik atas jasa yang diberikannya;
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan biaya;
- melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;



- melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
- menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan.

Sesuai Piagam Komite Audit, sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya, Komite Audit wajib mengadakan rapat paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun. Selama tahun 2022, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dengan tingkat kehadiran anggota Komite Audit rata-rata sekitar 94%.

Kegiatan utama yang dilakukan oleh Komite Audit selama tahun 2022 meliputi :

- memeriksa dan memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 yang tidak diaudit, laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun 2021 yang diaudit, dan Laporan Tahunan 2021 sebelum dirilis untuk memastikan laporan tersebut telah sesuai dengan standar, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- membahas dengan auditor eksternal tentang ruang lingkup audit, temuan audit yang signifikan untuk tahun 2022 dan memeriksa laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun 2022;
- mengkaji dan menyampaikan rekomendasi mengenai temuan-temuan auditor eksternal;
- melakukan kajian pada kebijakan dan strategi yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
- melakukan evaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit yang dilakukan oleh akuntan publik untuk tahun buku 2021;
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.

#### **Komite Nominasi dan Remunerasi**

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/2014**"), Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Edaran Dewan Komisaris tanggal 24 Maret 2023, dengan susunan anggota sebagai berikut :

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi : Heri Sunaryadi (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan).

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi : Lie Si An

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1969. Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 2023. Memperoleh gelar Sarjana jurusan Manajemen pada Universitas 17 Agustus 1945 pada tahun 1995. Beliau saat ini juga menjabat sebagai *Chief Business Support* dalam Grup Tower Bersama. Sebelumnya beliau menjabat sebagai *Chief of Operation & Maintenance* Grup Tower Bersama (2011-2016), *Regional Manager* pada PT Finansia Multi Finance (1995-2009), auditor pada PT Astra International Honda Sales Operation (1991-1995), dan auditor pada KAP Drs. Budiarmodjo & Associates (1989-1991).

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi : Tajudin

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1971. Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 2023. Memperoleh gelar Sarjana jurusan akuntansi dari STIE Tri Dharma Widya pada tahun 1997. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Kepala Departemen *Human Capital Services* pada SKP, Perusahaan Anak. Sebelumnya beliau menjabat sebagai *HR Manager* pada PT Luxasia Indonesia (2007-2011), *Personnel Head* pada PT Carrefour Indonesia (2004-2007), dan *HR Executive* pada PT Stretchline (2003-2004).



Berdasarkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

Terkait dengan fungsi nominasi :

- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai : (i) komposisi jabatan anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris; (ii) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan (iii) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Terkait dengan fungsi remunerasi :

- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai : (i) struktur remunerasi; (ii) kebijakan atas remunerasi; dan (iii) besaran remunerasi.
- membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

#### 11.6. Unit Audit Internal

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal tanggal 24 Juni 2020 dan telah mengangkat Supriatno Arham sebagai Kepala Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 954/TBG-SKP-00/HOS/03/XII/2014 tanggal 7 Mei 2014.

Supriatno Arham, lahir pada tahun 1975, Warga Negara Indonesia, dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya pada tahun 1996. Beliau memulai karir sebagai internal auditor di industri perbankan pada tahun 1996, dan selama 10 tahun menekuni bidang proses bisnis di perusahaan *multifinance*. Beliau bergabung di Perseroan sejak tahun 2008 sebagai *Head Of Business Compliance* dan diangkat sebagai Kepala Unit Audit Internal sejak 7 Mei 2014.

Sesuai dengan Piagam Audit Internal Perseroan, Unit Audit Internal Perseroan melaksanakan kegiatannya secara independen, obyektif, dan menghindari dari perbuatan yang dianggap sebagai benturan kepentingan. Unit Audit Internal melapor langsung kepada Presiden Direktur dan membantu Direksi dalam penerapan tata kelola perusahaan yang meliputi pengawasan, pemeriksaan, penilaian, penyajian, evaluasi, dan saran perbaikan serta melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja. Unit Audit Internal melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian intern yang ditugaskan oleh Direksi. Penilaian Audit Internal, rekomendasi dan saran perbaikan disampaikan kepada Direksi melalui Presiden Direktur.

Kegiatan Unit Audit Internal selama tahun 2022, meliputi :

- melaksanakan pengawasan terhadap aktivitas operasional, yaitu pemeriksaan terhadap pembangunan menara baru dan kolokasi, serta pemeriksaan terhadap proses pemeliharaan menara termasuk dalam hal pengelolaan aset dengan melakukan *sample kunjungan site*.
- mengevaluasi kepatuhan terhadap kebijakan Perseroan dan *Standard Operating Procedure (“SOP”)* yang berlaku, baik kepada unit kerja internal maupun kepada vendor rekanan Perseroan.
- melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas terhadap sistem dan proses pembayaran Perseroan, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan SOP yang ditetapkan Perseroan.
- melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan operasional Kantor Regional untuk memastikan telah dipatuhinya kebijakan dan SOP yang ditetapkan Perseroan.
- menghadiri pelatihan eksternal tentang kesadaran anti suap dan korupsi, dengan tujuan untuk meningkatkan sistem anti suap dan korupsi yang ada untuk lebih mengintegrasikan kesadaran anti suap dan korupsi dalam sistem manajemen risiko dan SOP lainnya.
- melakukan *monitoring* dan evaluasi atas hasil-hasil temuan audit serta menyampaikan saran perbaikan kepada Perseroan





## 11.7. Upaya Pengelolaan Risiko

Manajemen risiko merupakan pilar penting dalam strategi Tata Kelola Perusahaan, dan memainkan peran penting dalam pengelolaan bisnis. Grup Tower Bersama menggunakan pedoman manajemen risiko untuk membantu mengantisipasi potensi ketidakpastian dan merumuskan strategi mitigasi yang sesuai. Upaya-upaya pengelolaan risiko yang telah dilakukan oleh Grup Tower Bersama meliputi antara lain :

- Dalam memastikan kualitas kredit penyewa, Grup Tower Bersama menjadikan risiko kredit sebagai bahan pertimbangan ketika merancang kriteria investasi untuk membangun *sites build-to-suit* serta untuk melakukan akuisisi.
- Dalam mengantisipasi sejumlah besar pendapatan Grup Tower Bersama berasal hanya dari beberapa operator telekomunikasi dan tren konsolidasi di industri telekomunikasi, Grup Tower Bersama terus membina dan menjaga hubungan dengan operator telekomunikasi serta memastikan pembangunan menara yang tepat waktu dan menyediakan jasa perawatan dan pemeliharaan yang terbaik untuk pelanggan Grup Tower Bersama.
- Untuk bersaing secara efektif dengan penyedia menara lain, Grup Tower Bersama berfokus pada penyediaan *sites* dan memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan kualitas terbaik, memastikan lokasi *sites* yang menarik, mempertahankan hubungan yang kuat dengan operator telekomunikasi, dan memiliki kualitas menara yang kuat dan tinggi.
- Dalam mengelola strategi pertumbuhan, Grup Tower Bersama melakukan analisa untuk masing-masing strategi pertumbuhan, khususnya strategi akuisisi, secara mendalam. Grup Tower Bersama memiliki personil-personil yang memiliki pengalaman ekstensif di bidang keuangan dan industri telekomunikasi untuk memastikan kesuksesan akuisisi.
- Dalam mengelola beban keuangan yang timbul dari fasilitas pinjaman dan surat utang, Grup Tower Bersama menggunakan instrumen lindung nilai untuk melindungi terhadap setiap peningkatan suku bunga yang mungkin terjadi selama jangka waktu pinjaman, apabila memungkinkan. Grup Tower Bersama juga berusaha menyelaraskan risiko nilai tukar dengan menggunakan lindung nilai (*hedging*) yang sesuai. Lebih lanjut, Grup Tower Bersama berusaha untuk mendiversifikasi sumber pendanaan untuk mengurangi biaya pembiayaan, dan memperpanjang rata-rata jangka waktu dan profil jatuh tempo utang Grup Tower Bersama.
- Grup Tower Bersama memantau beban operasi secara berkala melalui rapat bulanan dan memiliki kebijakan internal untuk selalu menerapkan program-program efisiensi di dalam setiap proses operasional Grup Tower Bersama.
- Dalam mengelola risiko terkait izin, Grup Tower Bersama memiliki tim *project* dan tim aset yang bersama-sama memantau proses permohonan dan/atau pembaruan atas persetujuan dan izin-izin yang diperlukan dari setiap menara. Tim legal Grup Tower Bersama juga terus memantau perubahan peraturan dalam industri yang berdampak terhadap persetujuan dan izin-izin yang diperlukan dari setiap menara. Grup Tower Bersama memiliki komitmen untuk selalu mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku danubahannya.
- Dalam menghadapi penentangan dari masyarakat setempat di beberapa lokasi menara Grup Tower Bersama, Grup Tower Bersama selalu memastikan memperoleh izin warga sebelum membangun menara serta mengadakan sosialisasi kepada masyarakat setempat mengenai fungsi dan kegunaan dari menara telekomunikasi. Grup Tower Bersama memiliki komitmen yang kuat dalam mengembangkan dan menjalankan investasi sosial untuk memberikan manfaat kepada masyarakat.
- Dalam memastikan perpanjangan sewa lahan, Grup Tower Bersama menerapkan kebijakan negosiasi perpanjangan sewa lahan atau bangunan beberapa tahun lebih awal. Apabila Grup Tower Bersama tidak berhasil memperpanjang sewa tersebut, maka Grup Tower Bersama akan bekerja sama dengan pelanggan untuk melakukan relokasi atas *sites* menara telekomunikasi yang dimaksud.
- Dalam rangka mengelola fluktuasi nilai revaluasi atas aset tetap menara telekomunikasi, Grup Tower Bersama selalu berusaha mempertahankan dan secara konsisten meningkatkan jumlah menara, jumlah penyewaan, dan rasio kolokasi.
- Grup Tower Bersama selalu berusaha mempererat hubungan dengan operator telekomunikasi di Indonesia sehingga Grup Tower Bersama memiliki pemahaman terhadap kebutuhan operator telekomunikasi di Indonesia, termasuk kebutuhan teknologi baru.
- Dalam mengelola tindakan risiko-risiko terkait tindakan penyuapan dan penyalahgunaan lain yang dilakukan oleh karyawan Grup Tower Bersama, perwakilan, agen atau pihak ketiga lainnya, Grup Tower Bersama telah memiliki kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk mencegah, mendeteksi dan menanggapi perilaku tersebut dan memastikan kepatuhan secara keseluruhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Grup Tower Bersama juga melakukan reviu secara berkala dan terus memperkuat kebijakan dan prosedur internal Grup Tower Bersama, mewajibkan seluruh karyawan dan kontraktor Grup Tower Bersama untuk





menandatangani pakta integritas. Lebih lanjut, Grup Tower Bersama juga bekerja sama dengan anggota-anggota lain dalam asosiasi menara untuk menerapkan praktek-praktek terbaik dalam rangka mencegah perbuatan melawan hukum.

- Untuk meminimalkan dampak bencana alam dan kerusakan yang tidak terduga, Grup Tower Bersama telah memiliki proteksi asuransi terhadap *sites* menara telekomunikasinya untuk segala risiko termasuk pertanggung jawaban atas gangguan usaha (*business interruption*).
- Dalam mempertahankan personil penting Grup Tower Bersama, Grup Tower Bersama memiliki Unit Human Capital Management yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program retensi karyawan Grup Tower Bersama yang meliputi imbalan kerja, serta penghargaan dan pengelolaan karir.
- Dalam menjalankan rencana bisnis Grup Tower Bersama, Grup Tower Bersama bergantung pada kemampuan untuk mendapatkan pendanaan eksternal, termasuk pembiayaan utang dan ekuitas. Oleh karena itu, Grup Tower Bersama selalu memastikan adanya fleksibilitas dari sumber pendanaan yang dapat diakses oleh Grup Tower Bersama dengan tetap memperhatikan tingkat pembatasan finansial.
- Dalam mengelola persepsi publik mengenai kemungkinan risiko kesehatan yang ditimbulkan teknologi komunikasi nirkabel seluler dan teknologi komunikasi nirkabel lainnya, Grup Tower Bersama melakukan kegiatan edukasi dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar menara untuk meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan mereka.

#### 11.8. Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility* atau CSR)

Grup Tower Bersama memiliki komitmen yang kuat dalam membangun hubungan yang baik dan bertanggung jawab dengan para pemangku kepentingan yang terkait dengan aktivitas bisnisnya. Grup Tower Bersama memiliki 4 (empat) pilar untuk program CSR, yang terdiri dari Pilar Pendidikan (Bangun Cerdas Bersama), Pilar Kesehatan (Bangun Sehat Bersama), Pilar Budaya (Bangun Budaya Bersama), dan Pilar Lingkungan (Bangun Hijau Bersama). Kegiatan CSR Grup Tower Bersama mengacu pada kerangka kerja ISO 26000 yang menjadi panduan implementasi dan tata kelola seluruh inisiatif dan program tanggung jawab sosial Grup Tower Bersama. Untuk setiap pilar, Grup Tower Bersama bekerja sama dengan pihak eksternal yang memiliki kompetensi dan kredibilitas yang baik untuk memastikan program-program dilaksanakan secara berkualitas, dan akuntabel, sesuai dengan target yang direncanakan, serta melibatkan masyarakat sekitar untuk menciptakan program yang efektif dan berkelanjutan.

- **Pendidikan (Bangun Cerdas Bersama).** Grup Tower Bersama melanjutkan komitmen terhadap peningkatan kualitas akses masyarakat di bidang pendidikan. Pada tahun 2022, Grup Tower Bersama meluncurkan program *Learning Management System* (“LMS”) untuk membantu siswa Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK mempelajari beberapa kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. LMS merupakan platform belajar secara daring untuk memfasilitasi transfer pengetahuan dari *Subject Matter Expert* (“SME”) yang bersumber dari internal Grup Tower Bersama kepada siswa SMK yang ikut dalam Program Kurikulum Unggulan TBIG. Program Kurikulum Unggulan TBIG, yang diluncurkan pada tahun 2017, ditujukan untuk membantu Sekolah Menengah Kejuruan memperkecil kesenjangan antara kurikulum sekolah kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja. Sekolah-sekolah tersebut akan mendapatkan tambahan kurikulum khusus terkait pelajaran teknis di bidang infrastruktur telekomunikasi dan juga memberikan kesempatan bagi para lulusannya untuk ikut serta dalam program magang di Grup Tower Bersama. Pelajaran-pelajaran yang diberikan meliputi pelatihan teknis dan edukasi terkait *fiber optics* dan pemeliharaan *site*. Selama tahun 2022 tercatat 210 siswa secara aktif mengikuti proses belajar melalui Program Kurikulum Unggulan TBIG. Siswa-siswa ini berasal dari enam SMK yang tersebar di 4 (empat) Provinsi yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan. Komitmen lain TBIG di bidang pendidikan adalah program pemberian beasiswa kepada 82 anak karyawan yang terdaftar di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas.
- **Kesehatan (Bangun Sehat Bersama).** Grup Tower Bersama menilai kesehatan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional. Program CSR Grup Tower Bersama dalam bidang kesehatan meliputi pemberian akses pelayanan kesehatan gratis melalui Mobil Klinik (“Monik”) TBIG. Monik TBIG dilengkapi perlengkapan medis yang cukup memadai dan ditangani oleh dokter dan perawat. Pelayanan yang diberikan oleh Monik TBIG mencakup pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil (termasuk pelayanan *ultrasound scan/USG*), balita, dan lansia. Monik TBIG juga melayani penyuluhan perilaku hidup higienis dan sehat, edukasi pencegahan penyakit, pemberian obat, dan makanan tambahan bagi balita. Program ini dijalankan melalui kerja sama dengan pihak ketiga untuk menargetkan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan yang memadai.



Grup Tower Bersama saat ini mengoperasikan 6 (enam) unit Monik TBIG di wilayah-wilayah sebagai berikut: Sumatera (2 unit), Jawa (3 unit), dan Kalimantan (1 unit). Keenam unit Monik TBIG ini mampu menjangkau 23 propinsi di Indonesia seperti: Bali, Banten, D.I Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Lampung, Nanggroe Aceh Darussalam, Nusa Tenggara Timur, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.

Operasional Monik dibagi ke dalam dua jenis layanan yang berbeda, yaitu aksi layanan kesehatan dan aksi bantuan sosial kepada masyarakat di Indonesia. Selama tahun 2022, Perseoran telah melakukan 67 aksi layanan kesehatan dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 8.465 dengan menurunkan 804 tenaga kesehatan yang terlatih. Pada tahun 2022, telah dilakukan 248 aksi sosial kepada 29.810 penerima manfaat. Grup Tower Bersama juga membantu penanganan bencana alam di Indonesia. Selama tahun 2022, Grup Tower Bersama memberikan bantuan pemulihan bencana ke beberapa titik bencana. Di antaranya bantuan bencana gempa di Kabupaten Cianjur, bantuan bencana banjir di lima Kabupaten di Provinsi Bali, Provinsi Aceh, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Malang. Pada tahun 2022, terdapat total 7.560 penerima manfaat dengan detail bantuan sosial berupa minyak 7.028 liter, beras 19.975 kg, dan sarden sejumlah 6.894 kaleng.

- **Kebudayaan (Bangun Budaya Bersama).** Grup Tower Bersama berkomitmen untuk membangun program bagi pelaku usaha mikro di bidang ekonomi kreatif dan meningkatkan kekayaan budaya lokal. Program ini dilakukan melalui inisiatif strategis melalui kemitraan dengan koperasi binaan Grup Tower Bersama yang disebut Koperasi Bangun Bersama ("**KBB**"). Kemitraan strategis ini memungkinkan para pelaku usaha mikro di industri batik dan kuliner mendapatkan pelatihan di bidang teknis, keterampilan manajemen, bantuan permodalan, dan distribusi produk dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha. Fokus CSR Grup Tower Bersama pada pilar budaya diimplementasikan di dua kota yaitu Pekalongan untuk usaha mikro batik dan Semarang untuk usaha mikro kuliner. Pada tahun 2022, KBB telah memberikan akses permodalan kepada 1.056 UMKM dan Non UMKM. KBB Pekalongan telah memberikan, akses permodalan kepada 658 UMKM dan Non UMKM. Sementara, KBB cabang Semarang, berfokus pada pengembangan usaha kuliner pemberdayaan perempuan. Pada tahun 2022, KBB Semarang telah memberikan akses permodalan kepada 398 UMKM dan Non UMKM dan memberikan pelatihan kuliner kepada 125 perempuan anggota Koperasi Semarang.

Sementara itu, Grup Tower Bersama juga mengoperasikan program Rumah Batik TBIG di Wiradesa, Pekalongan, Jawa Tengah yang didirikan pada tahun 2014. Rumah Batik TBIG mengemban misi untuk membantu pelestarian batik nusantara serta meningkatkan taraf hidup para perajin batik di Pekalongan. Rumah Batik TBIG memberikan pelatihan membuat batik dan kewirausahaan kepada mereka yang belum menyelesaikan pendidikan formal. Di Rumah Batik TBIG ini, para siswa juga mendapatkan pelajaran membatik yang ramah lingkungan melalui aplikasi pewarna alami dan penggunaan fasilitas pengolahan limbah sederhana. Terdapat 13 jenis tanaman pewarna alami yang ditanam di Rumah Batik TBIG, di antaranya ialah tumbuhan mangga, rambutan, suji, indigo, jambu biji, nangka, kembang telang, kesumba, ketapang, kopi, manggis, mengkudu, pinang. Rumah Batik TBIG telah sukses melaksanakan program *Young Batik Entrepreneur* yang ditujukan kepada pemuda lokal Kabupaten Pekalongan. Sebagai bagian dari program ini, para pembatik muda dilatih selama 10 bulan untuk mengasah kemampuan membatik dan kewirausahaan di Rumah Batik TBIG. Peserta dibimbing oleh pembimbing profesional dari Rumah Batik TBIG, menggunakan kurikulum yang disesuaikan dengan praktik modern dengan tetap mempertahankan budaya batik tradisional. Kurikulum pembelajaran dibagi ke dalam 4 (empat) kompetensi dasar yaitu desain batik, pembatikan tulis, pembatikan cap dan teknik pewarnaan. Untuk memberikan akses pendidikan yang setara, Rumah Batik TBIG telah menyusun kurikulum pembelajaran khusus untuk siswa difabel, terutama tuna rungu. Di tahun 2022, Rumah Batik TBIG telah meluluskan 19 siswa dari program *Young Batik Entrepreneur*, dimana sembilan di antaranya merupakan siswa difabel. Setelah lulus dari program ini, alumni siswa Rumah Batik TBIG juga diberikan bantuan permodalan usaha tanpa bunga yang diberikan oleh KBB.

- **Lingkungan (Bangun Hijau Bersama).** Grup Tower Bersama terus mengembangkan program TBIG Heart, sebuah program pengurangan jejak emisi karyawan (*employee carbon footprint reduction program*). TBIG Heart melakukan penanaman pohon di kawasan-kawasan penyangga dan konservasi. Kawasan konservasi seluas +/- 20 hektar di Kabupaten Pekalongan melalui kerja sama dengan KPH Pekalongan Timur. Pada tahun 2022, Grup Tower Bersama melanjutkan kegiatan penanaman dan telah menanam sebanyak 1.561 pohon. Dari tahun 2018, secara akumulatif TBIG Heart Program telah menanam 4.000 dengan rincian antara

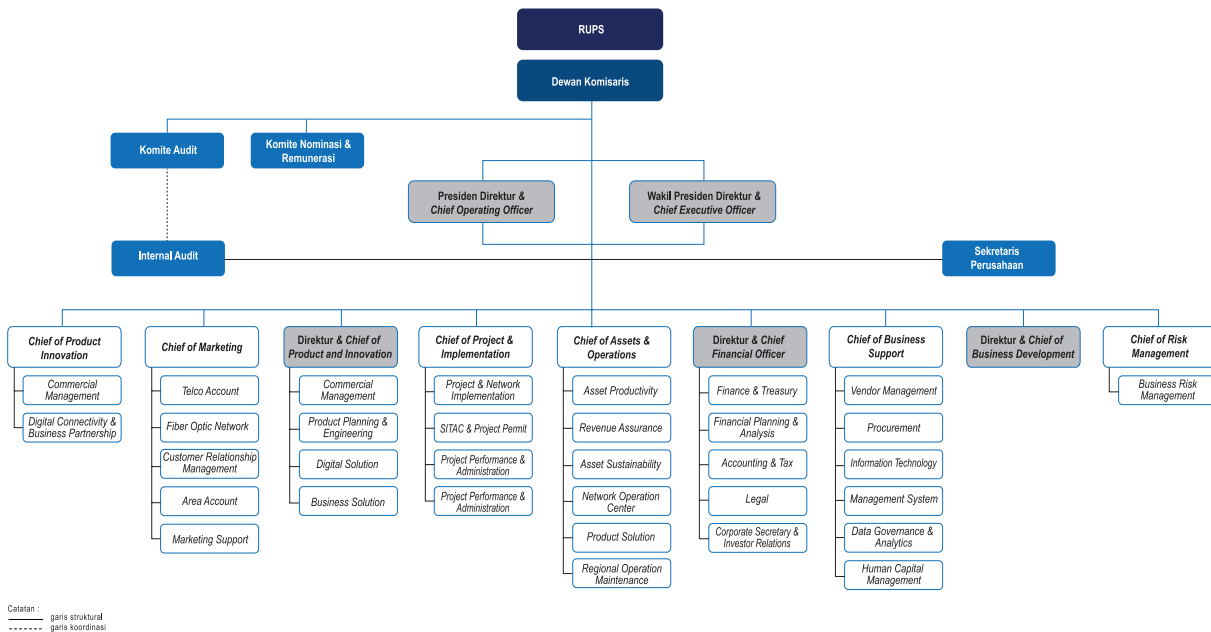


lain bambu duri 1.270 pohon, bambu hias 155 pohon, kina 481 pohon, damar 125 pohon, bambu petung 400 pohon, eukaliptus 130 pohon, pinus 84 pohon, alpukat 508 pohon, kelengkeng 500 pohon, jambu kristal 250 pohon, dan tanaman hias 97 pohon. Jenis pohon tersebut dipilih karena dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar agar menjadi produk/ barang bernilai ekonomis serta memiliki daya serap emisi karbon yang tinggi.

Di Rumah Batik TBIG, Grup Tower Bersama telah menerapkan pengolahan limbah sederhana untuk industri batik. Rumah Batik TBIG merupakan satu-satunya pusat pelatihan batik di Jawa Tengah yang memiliki instalasi pengolahan limbah. Proses dari pengolahan limbah tersebut dimulai dengan mengalirkan air limbah ke bak penyaringan lilin padat dan perangkat minyak agar sisa lilin dari proses pelepasan lilin dari kain batik tidak ikut ke dalam limbah buangan yang akan menyumbat saringan. Setelah limbah terpisah antara lilin dan air, kemudian air limbah masuk ke bak penampungan limbah cair. Selanjutnya air limbah akan di pompa ke atas untuk proses penyaringan partikel limbah cair melalui 4 (empat) proses penyaringan. Setelah penyaringan ini selesai, air tersebut akan dialirkan pada sumur resapan tanpa membawa kandungan berbahaya yang bisa merusak lingkungan. Pada tahun 2022, Perseroan menugaskan konsultan independen untuk menyusun Laporan Inventori Gas Rumah Kaca / GHG Inventory Report. Laporan ini disusun sesuai dengan ISO 14064-1, standar internasional untuk menghitung dan melaporkan emisi Gas Rumah Kaca ("GRK"). Tujuan dari pembuatan GHG Inventory report ini adalah untuk mengidentifikasi dan memastikan pengawasan terhadap data dan informasi mengenai tingkat, status dan tren perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi dan penyerapan termasuk simpanan karbon.

Biaya yang dikeluarkan oleh Grup Tower Bersama untuk kegiatan CSR selama tahun 2022 dan 2021 masing-masing tercatat sebesar Rp9,8 miliar dan Rp14,5 miliar.

### 11.9. Struktur Organisasi Perseroan



### 12. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan berkomitmen pada keunggulan operasional dan layanan pelanggan yang terbaik, dimana karyawan-karyawan dengan kualitas terbaik merupakan aset yang paling berharga. Perseroan menggunakan pendekatan strategis dalam manajemen sumber daya manusia, merancang program dan proses untuk memaksimalkan kinerja karyawan untuk mencapai tujuan bisnis dan operasional. Perseroan juga memberikan penghargaan kepada karyawan untuk meraih perkembangan diri dan standar kinerja terbaik.



## Komposisi Karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak

Per tanggal 31 Desember 2022, Perseroan dan Perusahaan Anak mempekerjakan 677 karyawan, yang seluruhnya merupakan karyawan tetap. TK, MSI, TO, TBGG, MBT, dan JPI merupakan Perusahaan Anak yang tidak memiliki karyawan dan seluruh kegiatan operasional dilaksanakan oleh karyawan yang diperbantukan dari Perusahaan Anak lainnya.

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan status, jenjang pendidikan, manajemen dan usia :

- Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan status

Keterangan	31 Desember	
	2022	2021
<b>Perseroan</b>		
Tetap	17	18
Kontrak	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
<b>Perusahaan Anak</b>		
Tetap	660	643
Kontrak	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>660</b>	<b>643</b>
<b>Jumlah total</b>	<b>677</b>	<b>661</b>

- Komposisi karyawan tetap Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jenjang pendidikan

Keterangan	31 Desember	
	2022	2021
<b>Perseroan</b>		
S1 atau lebih tinggi	17	18
D3	-	-
Non-Akademi	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
<b>Perusahaan Anak</b>		
S1 atau lebih tinggi	509	470
D3	87	113
Non-Akademi	64	60
<b>Jumlah</b>	<b>661</b>	<b>643</b>
<b>Jumlah total</b>	<b>677</b>	<b>661</b>

- Komposisi karyawan tetap Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jenjang manajemen

Keterangan	31 Desember	
	2022	2021
<b>Perseroan</b>		
Manajemen Senior	7	7
Manajer dan Supervisor	10	11
Staff dan Non Staff	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
<b>Perusahaan Anak</b>		
Manajemen Senior	33	30
Manajer dan Supervisor	330	335
Staff dan Non Staff	297	278
<b>Jumlah</b>	<b>661</b>	<b>643</b>
<b>Jumlah total</b>	<b>677</b>	<b>661</b>



- Komposisi karyawan tetap Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jenjang usia

Keterangan	31 Desember	
	2022	2021
<b>Perseroan</b>		
<30 tahun	7	9
31-40 tahun	1	2
41-50 tahun	3	-
>50 tahun	6	7
<b>Jumlah</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
<b>Perusahaan Anak</b>		
<30 tahun	120	117
31-40 tahun	275	289
41-50 tahun	209	193
>50 tahun	56	44
<b>Jumlah</b>	<b>660</b>	<b>643</b>
<b>Jumlah total</b>	<b>677</b>	<b>661</b>

- Komposisi karyawan tetap Perseroan dan Perusahaan Anak menurut direktorat

Keterangan	31 Desember	
	2022	2021
<b>Perseroan</b>		
Pemasaran	-	1
Produk dan inovasi	-	1
Proyek dan implementasi	2	1
Aset dan operasional	2	3
Keuangan	2	2
Penunjang bisnis	2	2
Manajemen risiko	2	1
Lain-lain	7	7
<b>Jumlah</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
<b>Perusahaan Anak</b>		
Pemasaran	42	36
Produk dan inovasi	21	36
Proyek dan implementasi	100	100
Aset dan operasional	238	230
Keuangan	90	80
Penunjang bisnis	101	94
Manajemen risiko	17	20
Lain-lain	51	47
<b>Jumlah</b>	<b>660</b>	<b>643</b>
<b>Jumlah total</b>	<b>677</b>	<b>661</b>

- Komposisi karyawan tetap Perseroan dan Perusahaan Anak menurut lokasi

Keterangan	31 Desember	
	2022	2021
<b>Perseroan</b>		
Jawa dan Bali	14	16
Sumatera	1	2
Kalimantan	-	-
Sulawesi	1	-
Lainnya	1	-
<b>Jumlah</b>	<b>17</b>	<b>18</b>



Keterangan	31 Desember	
	2022	2021
<b>Perusahaan Anak</b>		
Jawa dan Bali	551	542
Sumatera	46	48
Kalimantan	16	15
Sulawesi	22	24
Lainnya	25	14
<b>Jumlah</b>	<b>660</b>	<b>643</b>
<b>Jumlah total</b>	<b>677</b>	<b>661</b>

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melalui Perusahaan Anak, yaitu TI, mempekerjakan 1 (satu) tenaga kerja asing. Berikut ini adalah rincian mengenai tenaga kerja tersebut :

Nama	Jabatan	Warga Negara	Perizinan Ketenagakerjaan
Brendan Joseph Pound	Direktur TI	Australia	Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/26614/PK.04.00/VII/2022 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Direktur/Komisaris Pada Telenet Internusa PT tanggal 19 Juli 2022, yang berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2023.  Brendan Joseph Pound saat ini tidak sedang bekerja di wilayah Republik Indonesia sehingga tidak memerlukan pengurusan izin tinggal terbatas (ITAS).

Perseroan tidak membatasi tenaga kerja asing untuk menduduki posisi tertentu dalam Perseroan, dengan mengacu pada peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

### Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan

Perseroan bertekad untuk menjadi “perusahaan pilihan” di industri dengan memberikan paket remunerasi yang komprehensif kepada karyawan. Bentuk remunerasi serta fasilitas yang diberikan kepada karyawan senantiasa disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar dan ketentuan-ketentuan Pemerintah. Secara umum, paket remunerasi karyawan terdiri dari gaji dan tunjangan yang meliputi tunjangan hari raya, jaminan sosial tenaga kerja (kecelakaan kerja, pensiun, asuransi jiwa dan kesehatan) yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, serta asuransi kesehatan dan tunjangan untuk rawat jalan dan rawat inap. Perseroan melakukan peninjauan gaji minimal satu kali dalam setahun dan melakukan penyesuaian besaran gaji dan upah yang sejalan dengan laju inflasi dan di atas standar gaji minimum dan UMR (Upah Minimum Regional) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perseroan juga memiliki sistem pemberian insentif dan penghargaan berdasarkan kinerja.

Seluruh karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak saat ini ditutup oleh asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh PT FWD Insurance yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang mencakup program rawat inap termasuk pembedahan. Nilai pertanggunggunaan atas rawat inap per karyawan untuk per tahunnya disesuaikan dengan tingkat jabatan.

Di samping itu, Perseroan memberikan fasilitas-fasilitas untuk membantu karyawan untuk mengintegrasikan aktivitas bekerja dan kehidupan personal yang nyaman dan berimbang. Fasilitas-fasilitas tersebut meliputi antara lain koperasi, sarana ibadah, *Community of Practice*, yaitu komunitas yang berfungsi sebagai forum untuk karyawan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, dan *Community of Interest*, yaitu komunitas untuk menyalurkan minat dan bakat.

Tim *Human Capital Management* Perseroan melakukan survei kepuasan karyawan tahunan untuk mengevaluasi komitmen karyawan terhadap organisasi, tim mereka dan pekerjaan. Survei-survei tersebut juga mengukur kepuasan karyawan dengan fasilitas kerja, peluang pengembangan dan remunerasi.



## Pelatihan dan Pengembangan Karyawan

Untuk mempertahankan keunggulan kompetitif Grup Tower Bersama dalam industri ini, Perseroan secara berkala memberikan pelatihan keterampilan khusus kepada karyawannya serta informasi tentang topik umum untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang operasional dan industri terkait. Perseroan telah merancang program pengembangan individu untuk mendapat tambahan pengalaman kerja, pelatihan, dan pengembangan. Pelatihan tersebut dilakukan baik secara internal maupun jasa pihak eksternal. Karyawan dapat menggunakan platform pembelajaran online yang disediakan Perseroan yaitu *Learning Management System* untuk pengembangan dan pelatihan profesional.

Perseroan membagi program-program pelatihan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu pelatihan *differentiating competency* yang berfokus untuk meningkatkan proforma karyawan dan pelatihan *threshold competency* yang berfokus untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan kemampuan berdasarkan posisi dan fungsi karyawan Perseroan. Pada tahun 2022, Perseroan mengadakan berbagai program pelatihan untuk mencakup setiap kompetensi sebanyak 624 jam pelatihan atau setara dengan 23 jam pelatihan per karyawan yang berpartisipasi.

## Peraturan Perusahaan

Perseroan memiliki Peraturan Perusahaan yang disahkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2022 melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No. e-1862 Tahun 2022 tanggal 8 Desember 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan, yang berlaku hingga 7 Desember 2024.

### 13. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta tidak pernah dinyatakan pailit atau mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat memengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak serta rencana Penawaran Umum ini.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada somasi yang berdampak material yang berpotensi menjadi perkara baik yang dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak.

## B. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 21 Perusahaan Anak, sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha <sup>(1)</sup>	Domisili	Tahun Penyertaan Perseroan	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
							Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
1.	PT Telenet Internusa ("TI")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2004	1999	1999	99,50%	-
2.	PT United Towerindo ("UT")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2005	2004	2004	99,90%	0,10% melalui TB
3.	PT Batavia Towerindo ("BT")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2005	2005	2006	-	89,90% melalui UT dan 10,10% melalui TB





No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha <sup>(1)</sup>	Domisili	Tahun Penyertaan Perseroan	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
							Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
4.	PT Tower Bersama ("TB")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2006	2006	2006	99,99%	0,01% melalui TO
5.	PT Towerindo Konvergensi ("TK")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2009	2009	0,02%	99,98% melalui TB
6.	PT Prima Media Selaras ("PMS")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2003	2003	0,01%	99,99% melalui TB
7.	PT Mitrayasa Sarana Informasi ("Mitrayasa")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2004	2004	-	70,00% melalui TB dan 30,00% melalui SKP
8.	PT Metric Solusi Integrasi ("MSI")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2010	2010	2010	98,74%	1,26% melalui TB
9.	PT Solu Sindo Kreasi Pratama ("SKP")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta selatan	2010	1999	1999	-	99,71% melalui MSI
10.	PT Tower One ("TO")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2007	2006	2006	99,90%	-
11.	PT Bali Telekom ("Balikom")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2008	2003	2003	0,01%	99,99% melalui TO
12.	PT Triaka Bersama ("Triaka")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2009	2009	90,00%	10,00% melalui TB
13.	PT Solusi Menara Indonesia ("SMI")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2011	2012	70,03%	29,97% melalui SKP
14.	TBG Global Pte. Ltd. ("TBGG")	Perusahaan investasi	Singapura	2013	2013	2013	100,00%	-
15.	PT Menara Bersama Terpadu ("MBT")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2013	2013	belum beroperasi	99,99%	0,01% melalui TB
16.	PT Jaringan Pintar Indonesia ("JPI")	Jasa pemeliharaan peralatan telekomunikasi dan konsultasi bidang telekomunikasi	Jakarta Pusat	2016	2015	2016	0,08%	83,36% melalui TB
17.	PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk. ("GHON")	Jasa penunjang telekomunikasi	Jakarta Barat	2018	2001	2001	50,43%	-



No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha <sup>(1)</sup>	Domisili	Tahun Penyertaan Perseroan	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
							Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
18.	PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. ("GOLD")	Jasa penyediaan infrastruktur telekomunikasi, melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi, dan jasa penunjang telekomunikasi	Jakarta Selatan	2018	1995	1995	51,09%	-
19.	PT Permata Karya Perdana ("PKP")	Jasa penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2018	2013	2013	-	99,99% melalui GOLD
20.	PT Unicom Muda Utama ("Unicom")	Jasa penyewaan jaringan fiber optik	Jakarta Barat	2022	2020	2021	-	80,00% melalui UT
21.	PT Global Patra Sinertama ("GPS")	Jasa penyewaan jaringan fiber optik	Tangerang Selatan	2023	2018	2021	-	70,00% melalui GHON

Catatan :

(1) kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh masing-masing Perusahaan Anak.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak Perseroan yang mempunyai kontribusi 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset, total liabilitas, atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan :

## 1. PT TOWER BERSAMA ("TB")

### a. Riwayat singkat

TB berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 4 Juli 2006, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-20821 HT.01.01.TH.2006 tanggal 17 Juli 2006, didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat dengan No. 6357/BH.09.05/VIII/2006 tanggal 3 Agustus 2006, serta diumumkan dalam BNRI No. 104 tanggal 29 Desember 2006, Tambahan No. 13530.

Anggaran dasar TB selanjutnya telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 33 tanggal 13 Mei 2022, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0032793.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 13 Mei 2022 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0089928.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 13 Mei 2022 ("Akta No. 33/2022"). Berdasarkan Akta No. 33/2022, para pemegang saham TB menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.

### b. Kegiatan usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar TB, maksud dan tujuan TB adalah melakukan (i) konstruksi sentral telekomunikasi (KBLI No. 42206); (ii) perdagangan besar peralatan telekomunikasi (KBLI No. 46523); (iii) perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya (KBLI No. 46599); (iv) aktivitas telekomunikasi dengan kabel (KBLI No. 61100); (v) Internet Service Provider (KBLI No. 61921); dan (vi) jasa sistem komunikasi data (KBLI No. 61922). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, TB menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi.

TB berkantor pusat di The Convergence Indonesia, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 - Indonesia.



**c. Perizinan**

TB telah memiliki izin-izin penting antara lain NIB dan Sertifikat Standar yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan masih berlaku sepenuhnya. NIB TB dengan No. 8120003960254 tertanggal 5 September 2018 dan Sertifikat Standar TB dengan No. 81200039602541588 tertanggal 6 Juli 2022 berlaku selama TB menjalankan kegiatan usahanya. Sehubungan dengan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh TB, TB telah mendapatkan perizinan sehubungan dengan menara telekomunikasi tersebut, antara lain IMB/PBG dan IMBM yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang di setiap daerah. IMB/PBG dan/atau IMBM yang dimiliki oleh TB tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 27 Juni 2023 dan paling lama sampai dengan tanggal 20 Maret 2041. Apabila jangka waktunya berakhir, TB akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

**d. Permodalan dan susunan pemegang saham**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 70 tertanggal 25 Juni 2021 dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0401225 tanggal 25 Juni 2021 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0112936.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 25 Juni 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TB terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Perseroan	139.049	139.049.000.000	99,99
PT Tower One	1	1.000.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>139.050</b>	<b>139.050.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>160.950</b>	<b>160.950.000.000</b>	

Perseroan melakukan penyertaan di TB sejak tahun 2006.

**e. Manajemen dan pengawasan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 24 tanggal 13 Maret 2019, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0153306 tanggal 18 Maret 2019 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0044652.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 18 Maret 2019, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi TB terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

**Dewan Komisaris**

Komisaris : Herman Setya Budi

**Direksi**

Direktur : Budianto Purwahjo

**f. Data keuangan penting**

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting TB yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian TB pada tanggal 31 Desember 2022, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021; yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia :

**Laporan posisi keuangan konsolidasian**

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Jumlah aset	25.548.794	24.829.342
Jumlah liabilitas	18.210.901	18.036.070
Jumlah ekuitas	7.337.893	6.793.272



Jumlah aset TB pada 31 Desember 2022 meningkat sebesar 2,9% menjadi sebesar Rp25.548,8 miliar dibandingkan jumlah aset TB pada 31 Desember 2021 sebesar Rp24.829,3 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap dan persediaan sejalan dengan pertumbuhan menara telekomunikasi, yang sebagian di-offset dengan penurunan piutang dari pihak berelasi.

Jumlah liabilitas TB pada 31 Desember 2022 meningkat sebesar 1,0% menjadi sebesar Rp18.210,9 miliar dibandingkan jumlah liabilitas TB pada 31 Desember 2021 sebesar Rp18.036,1 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha dan provisi jangka panjang yang mulai diakui pada 31 Desember 2022.

Jumlah ekuitas TB pada 31 Desember 2022 meningkat sebesar 8,0% menjadi sebesar Rp7.337,9 miliar dibandingkan jumlah ekuitas ekuitas pada 31 Desember 2021 sebesar Rp6.793,3 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba pada tahun 2022 dan penghasilan komprehensif lain.

### **Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian**

(dalam jutaan Rupiah)

	<b>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember</b>	
	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Pendapatan	3.496.967	3.078.517
Beban usaha	197.362	191.214
Laba bersih tahun berjalan	740.634	979.715

Pendapatan TB meningkat sebesar 13,6% menjadi Rp3.497,0 miliar pada tahun 2022 dari sebelumnya Rp3.078,5 miliar pada tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah penyewaan, sejalan dengan keberhasilan TB bertumbuh secara organik.

Beban usaha TB meningkat sebesar 3,2% menjadi Rp197,4 miliar pada tahun 2022 dari sebelumnya Rp191,2 miliar pada tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban manfaat karyawan yang timbul dari penerapan awal UU Cipta Kerja.

Laba bersih tahun berjalan TB turun sebesar 24,4% menjadi Rp740,6 miliar pada tahun 2022 dari sebelumnya Rp979,7 miliar pada tahun 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan laba selisih kurs dan kenaikan beban pajak final.

Kontribusi pendapatan TB terhadap total pendapatan konsolidasian Perseroan pada tahun 2022 adalah 53,6%.

#### **g. Penyertaan pada perusahaan lain**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, TB memiliki penyertaan saham secara langsung pada beberapa perusahaan sebagai berikut :

<b>Nama perusahaan</b>	<b>% penyertaan</b>
PT Towerindo Konvergensi	99,98%
PT Prima Media Selaras	99,99%
PT Mitrayasa Sarana Informasi	70,00%
PT United Towerindo	0,10%
PT Metric Solusi Integrasi	1,26%
PT Triaka Bersama	10,00%
PT Batavia Towerindo	10,10%
PT Menara Bersama Terpadu	0,01%
PT Jaringan Pintar Indonesia	83,36%



## 2. PT SOLUSI MENARA INDONESIA (“SMI”)

### a. Riwayat singkat

SMI, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 77 tanggal 19 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-63259.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0105134.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011.

Anggaran dasar SMI selanjutnya telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 41 tanggal 13 Mei 2022, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0032834.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 13 Mei 2022 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0090029.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 13 Mei 2022 (“**Akta No. 41/2022**”). Berdasarkan Akta No. 41/2022, para pemegang saham SMI menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.

### b. Kegiatan usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar SMI, maksud dan tujuan SMI adalah melakukan (i) konstruksi sentral telekomunikasi (KBLI No. 42206); dan (ii) perdagangan besar peralatan telekomunikasi (KBLI No. 46523). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SMI menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi.

SMI berkantor pusat di The Convergence Indonesia, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 - Indonesia.

### c. Perizinan

SMI telah memiliki izin-izin penting antara lain NIB dan Sertifikat Standar yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan masih berlaku sepenuhnya. NIB SMI dengan No. 8120102942412 tertanggal 21 September 2018 dan Sertifikat Standar SMI dengan No. 8120102942412 tertanggal 8 Juni 2022 SMI tertanggal 31 Desember 2019 berlaku selama SMI menjalankan kegiatan usahanya. Sehubungan dengan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh SMI, SMI telah mendapatkan perizinan sehubungan dengan menara telekomunikasi tersebut, antara lain IMB/PBG dan IMBM yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang di setiap daerah. IMB/PBG dan/atau IMBM yang dimiliki oleh SMI tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 9 Juli 2023 dan paling lama sampai dengan tanggal 12 November 2038. Apabila jangka waktunya berakhir, SMI akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

### d. Permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 18 tanggal 8 Oktober 2014, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-09810.40.20.2014 tanggal 21 Oktober 2014, didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0108124-40.80.2014, tanggal 21 Oktober 2014, diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-07554.40.21.2014 tanggal 21 Oktober 2014 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0108124.40.80.2014 tanggal 21 Oktober 2014, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SMI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Perseroan	308.412	308.412.000.000	70,03
PT Solu Sindo Kreasi Pratama	131.988	131.988.000.000	29,97
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>440.400</b>	<b>440.400.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>559.600</b>	<b>559.600.000.000</b>	

Perseroan melakukan penyertaan di SMI sejak tahun 2011.



**e. Manajemen dan pengawasan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 102 tanggal 25 Februari 2022, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0131866 tanggal 1 Maret 2022 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0040644.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 1 Maret 2022, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SMI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Hardi Wijaya Liong  
Komisaris : Budianto Purwahjo

**Direksi**

Presiden Direktur : Herman Setya Budi  
Direktur : Helmy Yusman Santoso  
Direktur : Abdul Satar

**f. Data keuangan penting**

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting SMI yang bersumber dari laporan keuangan SMI pada tanggal 31 Desember 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia :

**Laporan posisi keuangan**

*(dalam jutaan Rupiah)*

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Jumlah aset	5.788.687	6.470.678
Jumlah liabilitas	2.050.842	2.439.725
Jumlah ekuitas	3.737.845	4.030.953

Jumlah aset SMI pada 31 Desember 2022 turun sebesar 10,5% menjadi sebesar Rp5.788,7 miliar dibandingkan jumlah aset SMI pada 31 Desember 2021 sebesar Rp6.470,7 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan aset tetap berdasarkan perhitungan nilai wajar yang telah dilakukan oleh konsultan independen sejalan dengan kenaikan tingkat bunga diskonto.

Jumlah liabilitas SMI pada 31 Desember 2022 turun sebesar 15,9% menjadi sebesar Rp2.050,8 miliar dibandingkan jumlah liabilitas SMI pada 31 Desember 2021 sebesar Rp2.439,7 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan yang diterima dimuka sebagai akibat proses perpanjangan sewa yang telah jatuh tempo yang belum selesai dan penurunan utang kepada pihak berelasi.

Jumlah ekuitas SMI pada 31 Desember 2022 turun sebesar 7,3% menjadi sebesar Rp3.737,8 miliar dibandingkan jumlah ekuitas SMI pada 31 Desember 2021 sebesar Rp4.030,9 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan penghasilan komprehensif lain sebagai akibat dari defisit revaluasi yang sebagian di *offset* dengan kenaikan saldo laba pada tahun 2022.

**Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain**

*(dalam jutaan Rupiah)*

	<u>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember</u>	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Pendapatan	1.155.767	1.293.181
Beban usaha	5.929	6.281
Laba bersih tahun berjalan	643.676	575.166

Pendapatan SMI turun sebesar 10,6% menjadi Rp1.155,7 miliar pada tahun 2022 dari sebelumnya Rp1.293,2 miliar pada tahun 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penyesuaian harga perpanjangan kontrak penyewaan menara telekomunikasi untuk operator IOH.



Beban usaha SMI turun sebesar 5,6% menjadi Rp5,9 miliar pada tahun 2022 dari sebelumnya Rp6,3 miliar pada tahun 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan biaya gaji dan tunjangan.

Laba bersih tahun berjalan SMI meningkat sebesar 11,9% menjadi Rp643,7 miliar pada tahun 2022 dari sebelumnya Rp575,2 miliar pada tahun 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban keuangan - bunga pinjaman sebagai akibat penyelesaian seluruh kontrak lindung nilai selama tahun 2022.

Kontribusi pendapatan SMI terhadap total pendapatan konsolidasian Perseroan pada tahun 2022 adalah sebesar 17,7%.

### 3. **PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA (“SKP”)**

#### a. **Riwayat singkat**

SKP, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 7 tanggal 29 Oktober 1999, dibuat dihadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-24903.HT.01.01.TH.2000 tanggal 4 Desember 2000, didaftarkan pada Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat dengan No. 054/BH.09.05/1/2001 tanggal 12 Januari 2001 dan diumumkan dalam BNRI No. 72 tanggal 6 September 2002, Tambahan No. 10331.

Anggaran dasar SKP selanjutnya telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 66 tanggal 21 Juli 2022, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.03.0268575 tanggal 21 Juli 2022 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0140915.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 21 Juli 2022 (“**Akta No. 66/2022**”). Berdasarkan Akta No. 66/2022, para pemegang saham SKP menyetujui perubahan ketentuan Pasal 11 tentang Direksi, Pasal 12 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 13 tentang Rapat Direksi, Pasal 14 tentang Dewan Komisaris dan Pasal 15 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris.

#### b. **Kegiatan usaha**

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar SKP, maksud dan tujuan SKP adalah melakukan: (i) konstruksi sentral telekomunikasi (KBLI No. 42206); dan (ii) perdagangan besar peralatan telekomunikasi (KBLI No. 46523). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SKP menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, dan pekerjaan telekomunikasi.

SKP berkantor pusat di The Convergence Indonesia, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 - Indonesia.

#### c. **Perizinan**

SKP telah memiliki izin-izin penting antara lain NIB dan Sertifikat Standar yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan masih berlaku sepenuhnya. NIB SKP dengan No. 8120101962042 tertanggal 24 September 2018 dan Sertifikat Standar SKP dengan No. 81201019620420109 tertanggal 27 Juni 2022, berlaku selama SKP menjalankan kegiatan usahanya. Sehubungan dengan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh SKP, SKP telah mendapatkan perizinan sehubungan dengan menara telekomunikasi tersebut, antara lain IMB/PBG dan IMBM yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang di setiap daerah. IMB/PBG dan/atau IMBM yang dimiliki oleh SKP tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 16 Juli 2023 dan paling lama sampai dengan tanggal 10 Juli 2039. Apabila jangka waktunya berakhir, SKP akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

#### d. **Permodalan dan susunan pemegang saham**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 24 tanggal 9 Agustus 2018, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-0021798.AH.01.02.TAHUN 2018





tanggal 14 Oktober 2018 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0137209.AH.01.11. TAHUN 2018 tanggal 14 Oktober 2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SKP terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 per Saham		%( <sup>1</sup> )
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>12.640.000</b>	<b>1.264.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Metric Solusi Integrasi	4.400.000	440.000.000.000	99,71
Sakti Wahyu Trenggono	10.630	1.063.000.000	0,24
Abdul Satar	2.025	202.500.000	0,05
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>4.412.655</b>	<b>441.265.500.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>8.227.345</b>	<b>822.734.500.000</b>	

Perseroan melakukan penyertaan melalui MSI di SKP sejak tahun 2010.

**e. Manajemen dan pengawasan**

Berdasarkan Akta No. 66/2022, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU.AH.01.09.0035632 tanggal 21 Juli 2022 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0140915.AH.01.11. TAHUN 2022 tanggal 21 Juli 2022, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SKP terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Hardi Wijaya Liong  
 Komisaris : Budianto Purwahjo

**Direksi**

Presiden Direktur : Herman Setya Budi  
 Direktur : Helmy Yusman Santoso  
 Direktur : Abdul Satar

**f. Data keuangan penting**

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting SKP yang bersumber dari laporan keuangan SKP pada tanggal 31 Desember 2022, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia :

**Laporan Posisi Keuangan**

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Jumlah aset	10.899.898	12.754.372
Jumlah liabilitas	8.808.617	9.484.222
Jumlah ekuitas	2.091.281	3.270.150

Jumlah aset SKP pada 31 Desember 2022 turun sebesar 13,7% menjadi sebesar Rp10.899,9 miliar dibandingkan jumlah aset SKP pada 31 Desember 2021 sebesar Rp12.754,4 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan aset tetap berdasarkan perhitungan nilai wajar yang telah dilakukan oleh konsultan independen sejalan dengan kenaikan tingkat bunga diskonto dan penurunan piutang dari pihak berelasi.

Jumlah liabilitas SKP pada 31 Desember 2022 turun sebesar 7,1% menjadi sebesar Rp8.808,6 miliar dibandingkan jumlah liabilitas SKP pada 31 Desember 2021 sebesar Rp9.484,2 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang kepada pihak berelasi, yang sebagian di-offset oleh kenaikan pinjaman jangka panjang dari pihak ketiga.



Jumlah ekuitas SKP pada 31 Desember 2022 turun sebesar 33,5% menjadi sebesar Rp2.091,3 miliar dibandingkan jumlah ekuitas SKP pada 31 Desember 2021 sebesar Rp3.270,2 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan penghasilan komprehensif lain sebagai akibat dari defisit revaluasi yang sebagian di *offset* dengan kenaikan saldo laba pada tahun 2022.

### **Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021
Pendapatan	1.475.681	1.462.299
Beban usaha	142.797	107.655
Laba bersih tahun berjalan	214.184	64.479

Pendapatan SKP meningkat sebesar 0,9% menjadi Rp1.475,7 miliar pada tahun 2022 dari sebelumnya Rp1.462,3 miliar pada tahun 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah penyewaan, sejalan dengan keberhasilan SKP bertumbuh secara organik.

Beban usaha SKP meningkat sebesar 32,7% menjadi Rp142,8 miliar pada tahun 2022 dari sebelumnya Rp107,7 miliar pada tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban gaji dan tunjangan, perjalanan dinas, dan beban manfaat karyawan.

Laba bersih tahun berjalan SKP meningkat sebesar 231,9% menjadi Rp214,2 miliar pada tahun 2022 dari sebelumnya Rp64,5 miliar pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh penurunan beban keuangan – bunga pinjaman sebagai akibat penyelesaian kontrak lindung nilai selama tahun 2022.

Kontribusi pendapatan SKP terhadap total pendapatan konsolidasian Perseroan pada tahun 2022 adalah 22,6%.

#### **g. Penyertaan pada perusahaan lain**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SKP memiliki penyertaan saham secara langsung pada 2 (dua) perusahaan sebagai berikut :

Nama Perusahaan	% penyertaan
PT Mitrayasa Sarana Informasi	30,00%
PT Solusi Menara Indonesia	29,97%

## **C. KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA**

### **1. UMUM**

Perseroan, didirikan pada tahun 2004, merupakan perusahaan *holding* yang melakukan investasi atau penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada perusahaan-perusahaan, yang bergerak di bidang penyediaan jasa telekomunikasi, menara, jaringan fiber optik, dan pekerjaan telekomunikasi dan investasi, dan saat ini merupakan salah satu perusahaan menara terbesar di Indonesia yang dikenal dengan Grup Tower Bersama. Kegiatan usaha utama Grup Tower Bersama adalah menyewakan ruangan pada *sites* sebagai tempat pemasangan perangkat telekomunikasi untuk transmisi sinyal berdasarkan skema perjanjian sewa jangka panjang dengan operator telekomunikasi. Grup Tower Bersama juga menyediakan akses untuk operator telekomunikasi ke jaringan IBS milik Grup Tower Bersama di gedung-gedung perkantoran dan pusat-pusat perbelanjaan yang terletak pada wilayah perkotaan. Per 31 Desember 2022, Grup Tower Bersama mengoperasikan sekitar 21.870 *sites* telekomunikasi, yang terdiri dari 21.758 *sites* menara telekomunikasi dan 112 jaringan IBS, dan Grup Tower Bersama memiliki 40.884 penyewaan pada *sites* telekomunikasi dengan 4 (empat) operator telekomunikasi berbeda. Sekitar 85,1% dan 72,9% dari pendapatan Grup Tower Bersama masing-masing pada tahun 2022 dan 2021 berasal dari Telkomsel, IOH dan XL Axiata. Grup Tower Bersama menyewakan *tower space* melalui perjanjian sewa jangka panjang umumnya sampai dengan jangka waktu 10 tahun dan menyewakan akses terhadap IBS milik Grup Tower



Bersama melalui perjanjian sewa jangka panjang umumnya dengan jangka waktu 5 (lima) sampai 8 (delapan) tahun. Per 31 Desember 2022, rata-rata sisa periode perjanjian sewa seluruh penyewaan Perseroan adalah sekitar 5,6 tahun dan Grup Tower Bersama memiliki pendapatan kontrak yang akan diterima dari penyewa untuk semua jenis penyewaan sebesar Rp31.222,5 miliar. Pendapatan Grup Tower Bersama dari penyewaan *tower space*, penyewaan IBS, dan fiber optik masing-masing memberikan kontribusi sebesar 98,5%, 0,6%, dan 0,8% dari pendapatan Grup Tower Bersama pada tahun 2022.

Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa industri penyewaan menara di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk terus bertumbuh baik melalui pembangunan menara baru maupun penambahan jumlah kolokasi dari menara telekomunikasi yang ada. Grup Tower Bersama hanya membangun *sites* telekomunikasi baru dan mengakuisisi portofolio menara telekomunikasi hanya apabila telah memenuhi kriteria investasi Grup Tower Bersama yang mencakup, antara lain, tingkat pengembalian investasi, potensi kolokasi masa yang akan datang, kemudahan untuk membeli atau menyewa lahan, kemudahan mendapatkan perizinan warga dari masyarakat sekitar dan kualitas kredit calon penyewa. Grup Tower Bersama memiliki suatu kebijakan hanya akan membangun *sites* telekomunikasi baru ketika Grup Tower Bersama telah mendapatkan komitmen penyewaan dari pelanggan. Meskipun Grup Tower Bersama telah membangun *site* menara di hampir seluruh provinsi di Indonesia, sebagian besar *site* menara Grup Tower Bersama berada di wilayah padat penduduk dengan 82,6% *site* menara di Jawa, Bali dan Sumatra dan 17,4% *site* di wilayah lain di Indonesia per 31 Desember 2022.

Grup Tower Bersama berupaya secara konsisten untuk terus meningkatkan jumlah kolokasi dari menara telekomunikasi yang ada untuk mendukung peningkatan arus kas dan margin laba operasi. Hal ini terjadi karena biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan kolokasi relatif rendah dibandingkan dengan tambahan pendapatan atas kolokasi tersebut. Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa operator telekomunikasi Indonesia telah dan akan terus mencari untuk memenuhi kebutuhan peningkatan cakupan dan kapasitas jaringan, sementara di saat yang sama mengendalikan belanja modal mereka dari kegiatan-kegiatan non-inti, seperti dengan pengalihan kegiatan pembangunan *sites* dan penyewaan *tower space* kepada perusahaan penyewaan menara independen. Per 31 Desember 2022, Grup Tower Bersama memiliki rasio kolokasi 1,87x.

Pendapatan Grup Tower Bersama pada tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp6.524,4 miliar dan Rp6.179,6 miliar. EBITDA dan margin EBITDA Grup Tower Bersama untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp5.661,9 miliar atau mencapai 86,8%, dan EBITDA dan margin EBITDA Grup Tower Bersama untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp5.428,8 miliar atau mencapai 87,9%.

Perseroan berkantor pusat di The Convergence Indonesia, lantai 11, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 - Indonesia dan mengoperasikan 18 (delapan belas) titik pelayanan regional yang terletak di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, Padang, Lampung, Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Manado, Makassar dan Papua, melalui Perusahaan Anak.

## 2. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Grup Tower Bersama memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif sebagaimana berikut ini :

*Hubungan yang erat dengan operator-operator telekomunikasi berkualitas baik di Indonesia*

Pelanggan terbesar Grup Tower Bersama merupakan perusahaan-perusahaan telekomunikasi berkualitas baik di Indonesia. Sekitar 85,1% dan 72,9% dari pendapatan Grup Tower Bersama masing-masing pada tahun 2022 dan 2021 berasal dari Telkomsel, IOH dan XL Axiata (yang masing-masing memiliki peringkat investasi dari setidaknya satu perusahaan peringkat kredit). Sementara untuk sisanya sekitar 15,0% dari pendapatan Grup Tower Bersama pada tahun 2022, sebesar 8,0% dikontribusikan oleh Smartfren, 6,0% dikontribusikan dari Smart, dan 1,0% lainnya yang terdiri dari serat optik, properti investasi, dan lainnya. Pada tahun 2013, hanya 62,8% dari pendapatan Grup Tower Bersama berasal dari Telkomsel, Indosat, dan XL Axiata (masing-masing sebesar 27,5%, 23,5% dan 11,8%), dan untuk sisanya sekitar 37,3% dari pendapatan Grup Tower Bersama, sebesar 12,1% dikontribusikan oleh Hutch. Hubungan yang telah dibina sejak lama dengan operator telekomunikasi besar di Indonesia mendukung upaya Grup Tower Bersama dalam mengidentifikasi peluang kolokasi dan menara *build-to-suit* untuk memenuhi kebutuhan operator telekomunikasi. Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa



pelanggan Grup Tower Bersama akan memprioritaskan pembayaran kepada pemasok utama seperti Grup Tower Bersama dalam rangka menjamin kelancaran layanannya. Grup Tower Bersama adalah penyedia jasa sewa menara independen yang tidak bersaing secara langsung dengan pelanggan Grup Tower Bersama, sehingga kegiatan usaha penyewaan menara Grup Tower Bersama menciptakan keunggulan kompetitif dibandingkan operator telekomunikasi yang menawarkan kolokasi kepada pesaing utama mereka.

*Kontrak jangka panjang Grup Tower Bersama dengan pelanggan memberikan kepastian atas jumlah pendapatan yang masih akan diterima di masa mendatang*

Pendapatan Grup Tower Bersama yang diperoleh dari perjanjian sewa jangka panjang yang berasal dari penyewaan *sites* Grup Tower Bersama memberikan kepastian yang tinggi akan arus pendapatan yang berulang (*recurring*). Jangka waktu perjanjian sewa *sites* menara umumnya adalah 10 tahun, dimana jangka waktu perjanjian penyediaan akses IBS umumnya adalah 5 (lima) sampai 8 (delapan) tahun. Per 31 Desember 2022, pinjaman bersih Grup Tower Bersama, di mana bagian pinjaman dalam Dolar AS yang telah dilindung nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, adalah Rp27.673,3 miliar sedangkan pendapatan kontrak yang masih akan diterima dari penyewa untuk semua jenis penyewaan adalah Rp31.222,5 miliar dan rata-rata sisa periode perjanjian penyewaan seluruh *sites* telekomunikasi adalah sekitar 5,6 tahun. Dengan mengasumsikan perjanjian penyewaan akan diperpanjang untuk 10 tahun berikutnya pada tingkat *renewal* 90%, total pendapatan dari kontrak yang diperpanjang diperkirakan mencapai Rp49,1 miliar. Perjanjian penyewaan Grup Tower Bersama pada umumnya mensyaratkan pendapatan sewa yang tetap dan pendapatan jasa pemeliharaan yang dapat disesuaikan (yang umumnya meningkat secara tahunan sejalan dengan tingkat inflasi). Biaya-biaya tersebut dibayarkan oleh operator telekomunikasi kepada Grup Tower Bersama secara bulanan, kuartalan atau tahunan. Besarnya biaya sewa dan pemeliharaan bervariasi bergantung pada lokasi dan ketinggian *sites* menara, ketinggian, ukuran dan posisi antena penyewa pada menara telekomunikasi, dan utilitas yang disediakan untuk penyewa. Dikarenakan sejumlah besar *sites* Grup Tower Bersama terletak pada wilayah padat penduduk, dimana penyewa telah memiliki lalu lintas data pelanggan yang tinggi sedangkan relokasi peralatan membutuhkan waktu dan melibatkan konfigurasi ulang oleh operator untuk jaringan mereka maka Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa penyewa akan lebih memilih untuk memperpanjang perjanjian penyewaan agar dapat mengurangi gangguan jangkauan di daerah tersebut, menghindari potensi kehilangan pendapatan dan mencegah timbulnya biaya-biaya terkait proses relokasi peralatan antena.

*Pengalaman yang ekstensif untuk melakukan build-to-suit dan menjalankan kegiatan operasional*

Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa pengalamannya yang ekstensif dalam pengembangan *sites* telekomunikasi *build-to-suit* untuk operator telekomunikasi besar Indonesia, khususnya pengalaman dalam proses *Site Acquisition* ("**SITAC**") dan pemenuhan perizinan, menjadikan Grup Tower Bersama memiliki keunggulan kompetitif dalam menyelesaikan pembangunan *sites build-to-suit* dengan cepat di berbagai area kepulauan Indonesia. Unit manajemen regional Grup Tower Bersama bertugas untuk mengawasi dan bekerja sama dengan sub-kontraktor dan agen Grup Tower Bersama serta menjalin hubungan yang baik dengan pemasok lokal dan pejabat pemerintahan. Hal ini memungkinkan Grup Tower Bersama bersama dengan penyewa mengidentifikasi lokasi di mana mereka bisa menempatkan BTS. Setelah lokasi menara telekomunikasi ditentukan, pekerjaan konstruksi menara telekomunikasi diperkirakan dapat diselesaikan dalam waktu 90-120 hari sejak diterbitkannya surat perintah kerja oleh penyewa.

*Kemampuan untuk melakukan akuisisi kemudian mengintegrasikan dengan portofolio yang telah ada*

Sejak memulai kegiatan usahanya pada tahun 2004, Grup Tower Bersama telah melakukan akuisisi beberapa perusahaan penyewaan menara dan portofolio *sites* telekomunikasi. Sebagai contoh, Grup Tower Bersama mengakuisisi 2.500 menara telekomunikasi dari Indosat pada tahun 2012 dan mengambil alih pengendalian atas 2 (dua) perusahaan penyewaan menara telekomunikasi independen yang telah tercatat pada BEI, yaitu GHON dan GOLD, yang memberikan tambahan 1.120 penyewaan dan 859 *sites* telekomunikasi ke dalam portofolio Grup Tower Bersama pada tahun 2018. Pada bulan April 2021, Grup Tower Bersama menyelesaikan akuisisi 3.000 menara dari IBST dengan nilai keseluruhan Rp3.975 miliar. Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa akuisisi-akuisisi yang telah diselesaikan tersebut menunjukkan kemampuan Grup Tower Bersama untuk berhasil memperoleh dan mengintegrasikan portofolio menara dalam jumlah besar dari operator-operator telekomunikasi terkemuka. Grup Tower Bersama khususnya berkeyakinan dapat dengan cepat menganalisis dan memasukkan data aset ke dalam sistem informasi Grup Tower Bersama untuk memastikan bahwa aset tersebut dapat dijaga



dengan layak dan juga *tower space* pada menara tersebut dapat ditawarkan kepada para pelanggan Grup Tower Bersama yang ada. Kemudian Grup Tower Bersama juga berhasil memperoleh pembiayaan akuisisi tersebut dengan biaya yang kompetitif. Grup Tower Bersama berharap bahwa akuisisi portofolio menara yang selektif baik berukuran besar ataupun kecil akan tetap menjadi bagian penting dari strategi pertumbuhan dan Grup Tower Bersama akan mendedikasikan sumber daya yang besar untuk memastikan bahwa Grup Tower Bersama dapat memperoleh peluang akuisisi dan secara cepat mengeksekusinya apabila peluang tersebut tersedia.

#### *Marjin keuntungan dan tingkat leverage operasional yang signifikan*

Bisnis Grup Tower Bersama memiliki marjin EBITDA yang tinggi sehingga mendukung arus kas yang kuat dan stabil untuk kegiatan operasional. Marjin EBITDA Grup Tower Bersama mencapai 86,8% dan 87,9% masing-masing pada tahun 2022 dan 2021. Kenaikan rasio kolokasi pada menara telekomunikasi yang ada meningkatkan marjin operasi Grup Tower Bersama dikarenakan mayoritas pendapatan tambahan dari peningkatan pendapatan kolokasi mengalir sebagai laba operasi Grup Tower Bersama. Tambahan kolokasi akan meningkatkan arus kas Grup Tower Bersama karena relatif rendahnya belanja modal dan biaya tambahan yang diperlukan untuk menambahkan satu penyewaan pada *sites* yang telah ada. Hal ini dikarenakan sebagian besar menara telekomunikasi Grup Tower Bersama telah memiliki kapasitas untuk tambahan kolokasi tanpa diperlukan perkuatan menara. Per 31 Desember 2022, 81% dari portofolio menara Grup Tower Bersama terdiri dari menara yang berada di atas tanah (*ground-based*) dengan ketinggian lebih dari 32 meter atau di atas atap bangunan (*rooftop*) yang dapat menampung tiga atau lebih penyewa tanpa memerlukan tambahan belanja modal. Apabila ada menara telekomunikasi yang telah mendekati kapasitas teknisnya, Grup Tower Bersama dapat meningkatkan kekuatan menara tersebut untuk memenuhi kebutuhan kapasitas penyewaan dengan biaya investasi yang relatif kecil.

Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa dengan masuknya Grup Tower Bersama lebih awal pada industri penyewaan menara di Indonesia, Grup Tower Bersama telah berhasil membangun portofolio *sites* telekomunikasi pada wilayah dengan lalu lintas pelanggan operator telekomunikasi yang tinggi sehingga terdapat permintaan yang tinggi untuk menempatkan peralatan BTS operator telekomunikasi. Per 31 Desember 2022, 82,6% dari *sites* telekomunikasi dan 84,7% dari penyewaan menara, terkonsentrasi pada daerah padat penduduk di propinsi-propinsi di Pulau Jawa, Bali dan Sumatera. Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa dengan menempatkan *sites* telekomunikasi pada wilayah yang diminati tersebut, Grup Tower Bersama dapat meningkatkan potensi tambahan kolokasi.

Rasio kolokasi Grup Tower Bersama per 31 Desember 2022 adalah 1,87x. Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa dengan portofolio *sites* telekomunikasinya yang berada di lokasi strategis, Grup Tower Bersama berada dalam posisi yang baik untuk memenuhi peningkatan permintaan dari penyewa, yang memungkinkan peningkatan rasio kolokasi lebih tinggi lagi. Lebih lanjut, meskipun rasio kolokasi dapat berubah sewaktu-waktu karena kegiatan akuisisi portofolio *sites* di masa mendatang atau pembangunan *build-to-suit* baru, Grup Tower Bersama berkeyakinan akan adanya potensi peningkatan rasio kolokasi di masa mendatang seiring dengan meningkatnya pengalihan pembangunan *sites* telekomunikasi dan penyewaan *tower space* kepada perusahaan menara independen dari operator telekomunikasi yang ada, maupun dari pemain baru yang diperkirakan akan menggelar teknologi baru (contohnya 4G dan 5G) yang membutuhkan *sites* telekomunikasi.

#### *Tim manajemen yang berpengalaman dan pemegang saham dengan reputasi baik*

Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa tim manajemen Perseroan memiliki keahlian dan pengalaman untuk terus berkembang dan menumbuhkan bisnis Grup Tower Bersama dalam pasar telekomunikasi Indonesia baik secara organik maupun melalui akuisisi pada masa mendatang. Grup Tower Bersama juga berkeyakinan bahwa Grup Tower Bersama memperoleh manfaat, pengalaman, dan keahlian dari reputasi bisnis pemegang saham pendiri, Grup Saratoga (melalui Wahana Anugerah Sejahtera) dan Provident Capital Indonesia. Pada tahun 2022, Grup Saratoga dan Provident Capital merestrukturisasi kepemilikan saham Perseroan menjadi perusahaan *holding* baru, BDIA. Selanjutnya, sebuah konsorsium yang dipimpin oleh MAM, melalui Macquarie Asia-Pacific Infrastructure Fund 3, telah mengakuisisi saham minoritas yang signifikan di BDIA.

Sejak pendirian Perseroan pada tahun 2004, tim manajemen Perseroan telah memanfaatkan kemampuan, keahlian, dan hubungan para pemegang saham ini untuk memperkuat proposisi nilai Grup Tower Bersama kepada pelanggan. Para pemegang saham pendiri telah berbagi keahlian mereka yang luas untuk mengembangkan tata kelola dan kontrol manajemen risiko yang tepat bagi Grup Tower Bersama, dan menerapkan opsi dan langkah-langkah pembiayaan yang hemat biaya untuk mendukung pertumbuhan dan visi jangka panjang Grup Tower Bersama.





### 3. STRATEGI BISNIS GRUP TOWER BERSAMA

Strategi utama bisnis Grup Tower Bersama adalah sebagai berikut :

*Memaksimalkan pertambahan penyewaan kolokasi pada portofolio menara telekomunikasi Grup Tower Bersama yang telah ada*

Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa Grup Tower Bersama dapat meningkatkan pendapatan dan meningkatkan margin melalui peningkatan rasio kolokasi pada portofolio *sites* telekomunikasi Grup Tower Bersama yang telah ada. Grup Tower Bersama berharap pendapatan dan laba operasional dari bisnis penyewaan menara telekomunikasi akan terus tumbuh dengan dukungan dari menara-menara telekomunikasi milik Grup Tower Bersama yang berada di lokasi-lokasi strategis serta kapasitas yang tersedia untuk tambahan kolokasi dapat dilakukan dengan peningkatan biaya yang relatif rendah. Sebagian besar biaya operasional menara telekomunikasi bersifat tetap sejak dan setelah tahap konstruksi. Peningkatan rasio kolokasi akan meningkatkan margin operasional Grup Tower Bersama secara signifikan karena rendahnya biaya yang dikeluarkan Grup Tower Bersama untuk menambahkan pelanggan baru pada menara telekomunikasi yang telah ada. Grup Tower Bersama akan tetap fokus pada aktivitas unit pemasaran dan manajemen proyek untuk meningkatkan rasio kolokasi dan pendapatan, serta peningkatan margin pada portofolio *site* yang telah ada. Grup Tower Bersama juga tetap berusaha untuk meningkatkan akses informasi mengenai *sites* telekomunikasi Grup Tower Bersama agar pelanggan dapat melakukan pemilihan *sites* secara lebih cepat dan mudah. Hal tersebut akan meningkatkan kemampuan Grup Tower Bersama untuk bersaing dan dalam menghasilkan pendapatan.

*Terus mempererat hubungan dengan operator telekomunikasi*

Grup Tower Bersama memiliki pemahaman terhadap kebutuhan perluasan jaringan operator telekomunikasi di Indonesia dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini merupakan komponen penting dalam usaha Grup Tower Bersama dalam meningkatkan jumlah penyewaan pada portofolio *sites* telekomunikasi Grup Tower Bersama. Grup Tower Bersama akan terus berfokus menjalin hubungan dengan penyewa menara Grup Tower Bersama khususnya untuk mengidentifikasi peluang-peluang yang dapat meningkatkan jumlah penyewaan menara Grup Tower Bersama melalui kolokasi serta mengidentifikasi proyek-proyek baru yang diminati, termasuk kesempatan untuk konstruksi *build-to-suit* ataupun akuisisi.

*Memperbesar portofolio Grup Tower Bersama melalui proses konstruksi build-to-suit dan akuisisi yang selektif*

Grup Tower Bersama berusaha untuk meningkatkan pendapatan dengan memperbesar ukuran portofolio *sites* Grup Tower Bersama melalui konstruksi *build-to-suit* dan akuisisi yang selektif atas portofolio *sites* atau perusahaan menara telekomunikasi. Jumlah portofolio *sites* menara telekomunikasi Grup Tower Bersama telah meningkat dari 4.868 *sites* menara telekomunikasi per 31 Desember 2011 menjadi 21.870 *sites* per 31 Desember 2022.

Grup Tower Bersama berkeyakinan telah mencapai skala yang penting, yang memungkinkan Grup Tower Bersama untuk terus membangun dan mengakuisisi tambahan *sites* di seluruh lokasi di Indonesia, dimana Grup Tower Bersama dapat memanfaatkan hubungan Grup Tower Bersama dengan penyewa yang telah ada untuk meningkatkan rasio kolokasi sehingga dapat mencapai tingkat imbal hasil investasi yang menarik. Grup Tower Bersama hanya membangun *sites* telekomunikasi baru dan mengakuisisi portofolio menara telekomunikasi hanya apabila telah memenuhi kriteria investasi Grup Tower Bersama yang mencakup, antara lain, tingkat pengembalian investasi, potensi kolokasi masa yang akan datang, kemudahan untuk membeli atau menyewa lahan, kemudahan mendapatkan perizinan warga dari masyarakat sekitar dan kualitas kredit calon penyewa. Grup Tower Bersama memiliki suatu kebijakan hanya akan membangun *sites* telekomunikasi baru ketika Grup Tower Bersama telah mendapatkan komitmen penyewaan dari pelanggan. Dari waktu ke waktu, Grup Tower Bersama mungkin terlibat dalam sejumlah pembicaraan sehubungan dengan akuisisi *sites* portofolio atau perusahaan penyewaan menara.

*Tetap fokus pada kecepatan dalam melakukan eksekusi dan terus meningkatkan kinerja operasional*

Kecepatan eksekusi (*speed to market*) dan kinerja jaringan yang handal merupakan indikator utama (*key performance indicator* atau KPI) yang sangat penting bagi pelanggan Grup Tower Bersama. Yang dimaksud dengan kecepatan eksekusi adalah periode waktu sejak diterimanya surat perintah kerja sampai dengan dimulainya pemasangan peralatan telekomunikasi penyewa pada *sites* menara. Kinerja operasional Grup Tower Bersama



merujuk pada kualitas dari layanan pemeliharaan berkala menara dan kecepatan dalam menanggapi keluhan penyewa. Grup Tower Bersama secara konsisten meningkatkan kemampuannya untuk memenuhi KPI penyewa dengan senantiasa melakukan usaha-usaha berikut :

- melakukan kontrak payung untuk SITAC, *Civil & Mechanical Electricity* ("CME") dan layanan pemeliharaan dengan sub-kontraktor yang telah diseleksi untuk penugasan di beberapa daerah tertentu;
- standarisasi desain, proses, prosedur dan kontrol dokumentasi, termasuk manajemen waktu dalam pelaksanaan;
- penerapan perangkat lunak berbasis web pada manajemen proyek untuk identifikasi dini terhadap potensi keterlambatan penyelesaian dan eksekusi penanggulangannya;
- koordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk mengefisienkan proses perolehan perizinan;
- pengawasan berkala terhadap kinerja pemasok persediaan bahan baku utama; dan
- pengoperasian layanan *call center* 24 jam setiap hari dan 7 hari seminggu.

*Terus terlibat dalam pemenuhan kebutuhan pelanggan atas kapitalisasi perkembangan teknologi yang memerlukan infrastruktur telekomunikasi*

Penyewa menara Grup Tower Bersama telah memperkenalkan dan menggelar teknologi nirkabel. Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa mereka akan terus konsisten dalam memperkenalkan dan menggelar teknologi nirkabel generasi-generasi selanjutnya. Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa teknologi baru seperti 4G dan 5G, yang telah diluncurkan oleh operator telekomunikasi, dan ekspansi operator dalam menawarkan layanan data nirkabel, telah dan akan terus meningkatkan jumlah penyewa dan rasio kolokasi menara Grup Tower Bersama. Grup Tower Bersama memperkirakan bahwa teknologi generasi terbaru, seperti 4G dan 5G, akan meningkatkan permintaan *tower space* pada *sites* telekomunikasi Grup Tower Bersama dan kabel serat optik.

*Mengoptimalkan struktur permodalan untuk mencapai fleksibilitas pendanaan dan meminimalkan biaya pinjaman*

Grup Tower Bersama telah menggunakan fasilitas dari pinjaman sindikasi dan pinjaman non-sindikasi serta penerbitan surat utang untuk mendanai akuisisi dan kegiatan operasi Grup Tower Bersama. Sampai dengan 31 Desember 2022, pinjaman dan surat utang Grup Tower Bersama tercatat sebesar Rp29.207,5 miliar dan pinjaman dan surat utang Grup Tower Bersama, di mana pinjaman dan surat utang dalam Dolar AS yang telah dilindungi nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, tercatat sebesar Rp27.656,0 miliar.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, beban keuangan Grup Tower Bersama (termasuk beban keuangan - bunga dan beban keuangan - lainnya) mencapai 28,0% dari pendapatan Grup Tower Bersama. Dengan kapitalisasi pasar Perseroan per 31 Desember 2022 adalah Rp52,1 triliun, maka rasio pinjaman bersih pada kurs lindung nilai terhadap kapitalisasi pasar Perseroan ditambah utang bersih pada kurs lindung nilai adalah 0,3x. Meski Perseroan berkeyakinan memiliki struktur permodalan yang kuat dengan cadangan ekuitas yang besar, Perseroan berniat untuk terus mengoptimalkan struktur permodalan untuk mencapai fleksibilitas pendanaan dan meminimalkan biaya pendanaan Grup Tower Bersama dengan bekerja sama dengan kreditur yang telah ada dan mengkaji kemungkinan untuk mengakses pembiayaan melalui instrumen ekuitas dan utang pada pasar modal.

#### 4. PORTOFOLIO *SITES* TELEKOMUNIKASI GRUP TOWER BERSAMA

Grup Tower Bersama telah menambah jumlah *sites* telekomunikasi dan jumlah penyewaan melalui kombinasi pembangunan menara *build-to-suit*, akuisisi perusahaan penyewaan menara independen dan portofolio *sites* milik operator telekomunikasi, dan meningkatkan rasio kolokasi. Per 31 Desember 2022, Grup Tower Bersama telah membangun suatu portofolio sebesar 21.870 *sites* telekomunikasi, yang terdiri dari 21.758 *sites* menara telekomunikasi dan 112 jaringan IBS, dan mencapai 40.884 kontrak penyewaan menara. Tabel di bawah ini menyajikan rincian dari *sites* telekomunikasi dan penyewaan untuk periode-periode sebagai berikut :

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<i>Sites</i> telekomunikasi	21.870	20.578
Menara telekomunikasi	21.758	20.466
IBS	112	112
Penyewaan	40.884	39.088



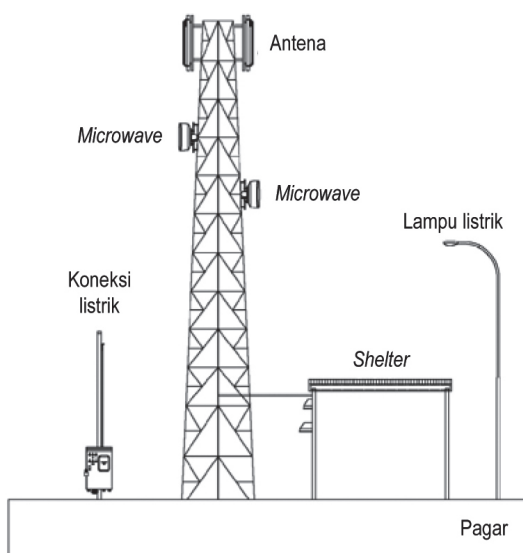


Per 31 Desember 2022, Grup Tower Bersama memiliki dan mengoperasikan *sites* telekomunikasi pada 34 propinsi di Indonesia, dengan 82,6% dari *sites* telekomunikasi dan 84,7% dari penyewaan menara Grup Tower Bersama terkonsentrasi pada propinsi-propinsi padat penduduk di pulau Jawa, Bali dan Sumatera. Per 31 Desember 2022, Grup Tower Bersama memiliki 19 kantor (termasuk kantor pusat) di berbagai wilayah Indonesia.

Tabel berikut menyajikan rincian *sites* telekomunikasi dan penyewaan berdasarkan penyebaran geografis dan persentasenya per 31 Desember 2022 :

Wilayah	Sites	%	Penyewaan	%
Jawa, Bali dan Sumatra	18.061	82,6	34.630	84,7
Lainnya	3.809	17,4	6.254	15,3
<b>Jumlah</b>	<b>21.870</b>	<b>100,0</b>	<b>40.844</b>	<b>100,0</b>

Sebagian besar portofolio *sites* menara Grup Tower Bersama merupakan menara berkaki empat *ground-based* (pada umumnya dengan ketinggian berkisar dari 30-72 meter), serta menara *rooftop* dan menara *monopole*. Diagram berikut mengilustrasikan fasilitas standar pada *sites* menara telekomunikasi Grup Tower Bersama :



Peralatan antena dan *microwave* pada diagram di atas, dan peralatan di *shelter* dimiliki dan dipelihara oleh penyewa, sedangkan Grup Tower Bersama memiliki dan memelihara infrastruktur pasif, meliputi menara telekomunikasi dan *shelter*.

Tabel berikut di bawah ini menyajikan jumlah dan persentase dari tiap tipe menara dalam portofolio Grup Tower Bersama per 31 Desember 2022 :

Type Menara	Ketinggian	Jumlah	Persentase (%)
<i>Ground-based</i>	lebih dari 65 meter	5.191	24
<i>Ground-based</i>	51-65 meter	5.619	26
<i>Ground-based</i>	32-50 meter	6.738	31
<i>Ground-based</i>	Kurang dari 32 meter	2.439	11
<i>Rooftop self-supporting tower</i>	32-50 meter	20	0
<i>Rooftop self-supporting tower</i>	Kurang dari 32 meter	388	2
<i>Rooftop pole / Monopole</i>	Kurang dari 32 meter	1.363	6
<b>Total</b>		<b>21.578</b>	<b>100</b>

Menara *ground-based* dengan ketinggian lebih dari 32 meter dan menara *rooftop self-supporting tower* dapat menampung lebih dari 3 (tiga) penyewa. Grup Tower Bersama sulit melakukan penambahan kolokasi pada *rooftop-monopole* dikarenakan kapasitas menanggung beban yang terbatas dan ketinggian yang rendah (sehingga *space* terbatas). Untuk menara *ground-based* dengan ketinggian kurang dari 32 meter, *tower space* yang tersedia pada ketinggian yang diminati terbatas sehingga lebih sulit untuk mendapatkan kolokasi.



## 5. MENARA TELEKOMUNIKASI *BUILD-TO-SUIT*

Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa kemampuan Grup Tower Bersama untuk melaksanakan pembangunan menara telekomunikasi *build-to-suit* secara tepat waktu, termasuk kemampuan SITAC, CME dan pemenuhan perizinan merupakan komponen penting dalam memperoleh dan menyelesaikan pekerjaan *build-to-suit*. Grup Tower Bersama pada umumnya berusaha untuk membangun menara *build-to-suit* dengan kapasitas kolokasi optimal sesuai dengan persetujuan warga dan pembuat peraturan. Untuk seluruh menara yang dibangun Grup Tower Bersama dengan skema *build-to-suit*, Grup Tower Bersama mempertahankan hak kepemilikan serta hak eksklusif untuk melakukan kolokasi dengan penyewa baru pada menara tersebut.

Seluruh proses sejak diterimanya surat perintah kerja sampai dengan penyelesaian konstruksi menara *build-to-suit* diperkirakan membutuhkan waktu 90 sampai 120 hari. Realisasi waktu yang dibutuhkan dan langkah-langkah yang harus diikuti dapat bervariasi bergantung pada penyewa, dan lokasi dari *sites* tersebut dan hal yang teridentifikasi pada saat proses SITAC.

Tabel di bawah ini menyajikan penambahan menara *build-to-suit* untuk periode-periode sebagai berikut :

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021
Jumlah penambahan menara <i>build-to-suit</i>	1.398	4.348

Proses *build-to-suit* umumnya meliputi langkah-langkah sebagai berikut :

- Penyewa menginformasikan unit pemasaran Grup Tower Bersama mengenai kebutuhan *sites* baru pada lokasi tertentu (pada umumnya lokasi dalam radius kurang lebih 100 meter dari koordinat tertentu).
- Unit manajemen regional Grup Tower Bersama menganalisis ketersediaan *sites*, dan kemudahan dalam mendapatkan perizinan warga pada area tersebut. Petugas SITAC pada unit regional akan membuat laporan *Engineering Survey Report* ("ESR") yang pada umumnya merekomendasikan 3 (tiga) calon lokasi yang potensial. Laporan ESR memuat koordinat dari calon lokasi, ketersediaan daya listrik, tinjauan terhadap akses jalan dan topografi, serta foto *panoramic*. Setelah laporan ESR diberikan kepada penyewa, penyewa kemudian menentukan lokasi.
- Setelah lokasi ditentukan dan surat perintah kerja diberikan oleh penyewa, petugas SITAC, di bawah arahan unit manajemen regional melakukan negosiasi sewa lahan dengan pemilik lokasi dan memproses persetujuan untuk pendirian menara telekomunikasi dari setiap rumah tangga yang bertempat tinggal di dalam radius sejauh tinggi menara dari rencana lokasi menara. Pada saat yang sama, Grup Tower Bersama juga mengusahakan persetujuan informal maupun formal dari pemerintah daerah untuk memulai proses konstruksi.
- Setelah mendapatkan persetujuan dari warga sekitar dan persetujuan pemerintah daerah secara informal atau formal, Grup Tower Bersama melengkapi proses SITAC dan memulai proses CME. Secara bersamaan, Grup Tower Bersama mengajukan kepada pemerintah daerah permohonan (i) IMB; atau (ii) IMBM, berdasarkan peraturan yang berlaku pada sebuah kabupaten tertentu.
- Setelah selesainya konstruksi menara, Grup Tower Bersama mengirimkan pemberitahuan RFI kepada penyewa. Setelah menara diterima oleh penyewa melalui Berita Acara Uji Kelayakan ("**BAUK**"), perjanjian sewa ditandatangani secara terpisah mengikuti persyaratan pada perjanjian sewa induk menara telekomunikasi. Perhitungan beban sewa dan pemeliharaan umumnya dimulai sejak penandatanganan BAUK. Pengiriman tagihan selanjutnya berdasarkan pada perjanjian penyewaan tertentu, umumnya berlangsung dalam 1-30 hari setelah ditandatanganinya BAUK.

## 6. AKUISISI PORTOFOLIO *SITES* TELEKOMUNIKASI

Kriteria utama Grup Tower Bersama dalam mengevaluasi potensi akuisisi adalah kelayakan nilai akuisisi, jangka waktu perjanjian sewa menara, kualitas kredit penyewa, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, potensi kolokasi tambahan dan kualitas fisik aset. Sejak dimulainya kegiatan usaha Grup Tower Bersama pada tahun 2004, Grup Tower Bersama telah mengakuisisi beberapa perusahaan penyewaan menara dan portofolio *sites*,



termasuk akuisisi 2.500 menara dari Indosat pada tahun 2012. Pada kuartal keempat tahun 2018, Grup Tower Bersama mengambil alih pengendalian atas 2 (dua) perusahaan penyewaan menara independen yang tercatat pada BEI, yaitu GHON dan GOLD, yang memberikan tambahan 1.120 penyewaan dan 859 *sites* telekomunikasi ke dalam portofolio Grup Tower Bersama. Pada bulan April 2021, Grup Tower Bersama menyelesaikan transaksi jual beli dan pengalihan atas 3.000 menara telekomunikasi dengan nilai keseluruhan Rp3.975 miliar. Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa akuisisi-akuisisi yang telah dilakukan tersebut menunjukkan kemampuan Grup Tower Bersama untuk berhasil memperoleh dan mengintegrasikan portofolio menara dalam jumlah besar dari operator-operator telekomunikasi terkemuka.

Beberapa akuisisi mengharuskan Grup Tower Bersama untuk melakukan penggabungan, pelatihan dan pengelolaan tambahan personal, serta penggabungan sistem informasi dan prosedur pelaporan dari perusahaan yang diakuisisi.

## 7. KOLOKASI

Unit pemasaran Grup Tower Bersama secara berkala melakukan diskusi dengan penyewa untuk mengidentifikasi potensi menara telekomunikasi Grup Tower Bersama dalam memenuhi kebutuhan pemasangan BTS baru. Seluruh proses sejak diterimanya surat perintah kerja sampai dengan penyelesaian pekerjaan kolokasi diperkirakan membutuhkan waktu 30 sampai 60 hari. Pekerjaan kolokasi diproses sesuai dengan ketentuan perjanjian sewa dengan penyewa yang telah ada.

Tabel di bawah ini menyajikan penambahan kolokasi untuk periode-periode sebagai berikut :

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021
Jumlah penambahan kolokasi	963	3.285

Proses kolokasi pada umumnya meliputi langkah-langkah sebagai berikut :

- Setelah menentukan menara untuk penyewaan kolokasi, penyewa mengirimkan surat perintah kerja untuk pemesanan terhadap *tower space* tertentu. Setelah surat perintah kerja diproses dan *tower space* telah siap untuk pemasangan, Grup Tower Bersama mengirimkan pemberitahuan.
- Setelah penyewa menerima BAUK, perjanjian terpisah ditandatangani untuk mempersiapkan kolokasi. Perjanjian ini memasukkan ketentuan dari *master lease agreement*. Pengakuan pendapatan sewa dan pendapatan pemeliharaan umumnya dimulai setelah ditandatanganinya BAUK.
- Pengiriman tagihan selanjutnya berdasarkan pada perjanjian penyewaan tertentu, umumnya berlangsung dalam 1-30 hari setelah ditandatanganinya BAUK.

Tabel berikut di bawah ini menyajikan rasio kolokasi pada tanggal-tanggal berikut :

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rasio kolokasi (x)	1,87	1,90

Rasio kolokasi turun dari 1,90x per 31 Desember 2021 menjadi 1,87x per 31 Desember 2022 dikarenakan jumlah penambahan menara *built-to-suit* yang lebih banyak daripada penambahan kolokasi.

## 8. KEGIATAN USAHA

### 8.1. Penyewaan *tower space* pada menara telekomunikasi / *tower space leasing*

Kegiatan usaha utama Grup Tower Bersama adalah penyewaan *tower space* pada menara telekomunikasi yang dimiliki oleh Grup Tower Bersama. Grup Tower Bersama menyewakan *tower space* kepada operator telekomunikasi untuk keperluan transmisi sinyal suara (*voice*) dan data nirkabel.



### Perjanjian sewa menara telekomunikasi

Pada 31 Desember 2022, Grup Tower Bersama telah menandatangani perjanjian sewa menara telekomunikasi induk (*master tower lease agreements*) dengan seluruh operator telekomunikasi selular di Indonesia dengan beberapa ketentuan (termasuk ketentuan harga sewa) yang mengatur sewa menyewa antara Grup Tower Bersama dengan penyewa menara Grup Tower Bersama.

### Pendapatan sewa menara

Pendapatan sewa dibayarkan dimuka secara bulanan, kuartalan atau tahunan oleh penyewa menara telekomunikasi Grup Tower Bersama. Pendapatan sewa rata-rata yang diterima dari penyewa baru pada umumnya bersifat tetap (*fixed*) sepanjang periode sewa awal dan jumlahnya dapat bervariasi berdasarkan faktor berikut ini :

- lokasi menara telekomunikasi (termasuk biaya sewa lahan);
- jumlah peralatan antena milik penyewa yang diletakkan pada menara;
- spesifikasi *shelter* dan *ground space* yang diperlukan untuk menempatkan peralatan elektronik dan lainnya untuk antena;
- ketentuan pembayaran;
- tipe dan ketinggian menara;
- penempatan antena pada menara telekomunikasi.

Pada beberapa kondisi perjanjian sewa Grup Tower Bersama, penyewa utama (*anchor tenants*) pada menara *build-to-suit* menerima potongan harga pada saat terjadi kolokasi pada menara tersebut.

### Pendapatan pemeliharaan menara

Grup Tower Bersama juga menerima pembayaran atas biaya pemeliharaan. Pendapatan pemeliharaan merupakan pendapatan tetap (*fixed*) atau disesuaikan secara tahunan sesuai tingkat inflasi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (meskipun beberapa perjanjian mengenakan pembatasan terhadap eskalasi inflasi), untuk biaya keamanan, perbaikan dan pemeliharaan *sites* menara serta listrik cadangan bersama. Pendapatan pemeliharaan juga diterima dimuka secara bulanan, kuartalan atau tahunan dari penyewa menara.

### Sewa lahan untuk *sites* menara telekomunikasi

Sebagian besar *sites* menara telekomunikasi berdiri di atas sebidang lahan yang disewa oleh Grup Tower Bersama melalui perjanjian sewa lahan atau perjanjian sewa gedung dengan pemilik properti. Grup Tower Bersama pada umumnya memiliki perjanjian sewa tanah dengan jangka waktu 10-12 tahun, sedangkan jangka waktu perjanjian antara Grup Tower Bersama dengan penyewa pada umumnya adalah 10 tahun. Grup Tower Bersama berusaha untuk menghindari perlunya melakukan perpanjangan perjanjian sewa tanah selama masa sewa *tower space* pada properti yang terkait. Biaya sewa lahan pada umumnya telah seluruhnya dibayar dimuka untuk jangka waktu perjanjian. Biaya sewa lahan kemudian diamortisasi sesuai dengan periode perjanjian sewa lahan. Dikarenakan pembayaran sewa lahan dimuka umumnya cukup signifikan dibandingkan dengan nilai properti, Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa sewa lahan akan mudah untuk dilakukan dan diperpanjang.

### Beban operasional

Beban operasional Grup Tower Bersama terutama terdiri dari biaya perbaikan dan pemeliharaan, kompensasi dan biaya manfaat karyawan dan utilitas, seperti biaya listrik untuk mengoperasikan peralatan antena pada *sites* menara Grup Tower Bersama, yang dibayarkan oleh sebagian besar penyewa Grup Tower Bersama.

Biaya operasional pada umumnya meningkat sejalan dengan tingkat inflasi, dan bertambah seiring dengan penambahan jumlah penyewaan. Dikarenakan biaya-biaya tersebut relatif tetap (*fixed*), biaya operasional tambahan untuk penambahan kolokasi relatif lebih kecil. Portofolio *sites* Grup Tower



Bersama memiliki kebutuhan belanja modal yang minimal, kecuali untuk perkuatan fisik menara pada menara tertentu yang telah mencapai kapasitas strukturnya.

Dengan pengecualian terhadap kelalaian tertentu, seperti pelanggaran (*breach*) dan kebangkrutan (*solvency*) (termasuk pada kasus tertentu, ketidakmampuan Grup Tower Bersama dalam memperoleh IMB atau IMBM), perjanjian sewa menara Grup Tower Bersama tidak dapat dibatalkan. Oleh karena itu, pendapatan dari sewa dan pemeliharaan menara Grup Tower Bersama memberikan kepastian yang tinggi akan arus pendapatan yang berulang (*recurring*). Per 31 Desember 2022, rata-rata sisa periode perjanjian sewa seluruh penyewaan adalah 5,6 tahun. Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa perjanjian penyewaan menara Grup Tower Bersama memiliki tingkat *renewal* yang tinggi dikarenakan: (i) lokasi dari sebagian besar menara telekomunikasi Grup Tower Bersama menjadi penting bagi efisiensi dan efektivitas biaya operasional jaringan telekomunikasi selular milik penyewa; (ii) biaya dan waktu yang dapat timbul sebagai akibat dari rekonfigurasi peralatan antena apabila penyewa ingin merelokasi suatu BTS; (iii) potensi kehilangan pendapatan yang tinggi sehubungan dengan relokasi BTS ke menara telekomunikasi lain; dan (iv) SITAC, masalah kepatuhan terhadap regulasi dan hambatan lain sehubungan dengan pembangunan menara telekomunikasi baru dan relokasi peralatan antena.

## 8.2. Penyewaan jaringan IBS

Grup Tower Bersama memiliki dan mengoperasikan IBS pada pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran. Dengan pengecualian terhadap pelanggaran (*breach*) dan kebangkrutan (*solvency*), perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan.

Grup Tower Bersama mendapatkan hak untuk memasang dan mengoperasikan IBS berdasarkan perjanjian dengan pemilik properti (untuk periode umumnya antara 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) tahun), dan Grup Tower Bersama memberikan hak kepada operator telekomunikasi untuk memasang peralatan milik mereka pada jaringan IBS milik Grup Tower Bersama dengan biaya tertentu berdasarkan suatu perjanjian yang memiliki jangka waktu antara 5 (lima) dan 8 (delapan) tahun.

## 9. PENGENDALIAN MUTU

Grup Tower Bersama berkomitmen terhadap prinsip sistem manajemen mutu, kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan. Hal ini dituangkan dalam berbagai kebijakan dan program perusahaan, diantaranya adalah implementasi serta pengembangan sistem dan prosedur yang terstandarisasi. Grup Tower Bersama mengembangkan dan memperkenalkan program-program pelatihan sumber daya manusia untuk mencapai kompetensi standar kualitas yang dipersyaratkan. Grup Tower Bersama menyediakan peralatan dan perlengkapan serta sumber daya yang memadai bagi lingkungan kerja yang sehat, aman, dan tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan.

Sistem manajemen terintegrasi Grup Tower Bersama memudahkan kontrol dan pengawasan terhadap kualitas proses bisnis yang diterapkan. Sistem manajemen terintegrasi ini meliputi ISO 9001:2015 *Quality Management System*, ISO 45001:2018 *Occupational Health and Safety Management System*, ISO 14001:2015 *Environmental Management System*, ISO 26000:2020 *Guidance on Social Responsibility*, dan ISO 27001:2013 *Information Security Management System*.

Grup Tower Bersama secara rutin merencanakan program-program yang ditujukan untuk membangun kesadaran serta memberikan pelatihan kepada karyawan terhadap penerapan sistem manajemen terintegrasi. Grup Tower Bersama melakukan audit secara internal dan eksternal bersama konsultan independen untuk meningkatkan aplikasi sistem manajemen Grup Tower Bersama. Sistem pengawasan *real-time* Grup Tower Bersama membantu mengidentifikasi masalah-masalah dan isu yang muncul secara cepat dan tepat.

Grup Tower Bersama berkomitmen dalam memberikan sumber daya yang memadai (dalam bentuk infrastruktur, sumber daya manusia, dan lingkungan kerja) untuk menyediakan produk-produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan Grup Tower Bersama. Grup Tower Bersama berkomitmen pada pencapaian standar-standar internasional di bidang pengendalian kualitas serta manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, dan lingkungan.



## 10. KEGIATAN PEMASARAN DAN PENJUALAN

Kegiatan pemasaran dan penjualan Grup Tower Bersama dijalankan oleh unit pemasaran kepada operator-operator telekomunikasi, yang seluruhnya terpusat di Jakarta. Unit pemasaran senantiasa berusaha untuk meningkatkan hubungan dengan operator telekomunikasi besar serta pengetahuan Grup Tower Bersama terhadap rencana dan kebutuhan operator telekomunikasi untuk melakukan perluasan cakupan jaringan dan peningkatan kapasitas di seluruh Indonesia. Tujuan dari unit pemasaran adalah untuk mengidentifikasi peluang bisnis dari kemampuan *build-to-suit* dan portofolio menara, dan IBS yang telah ada sehingga dapat meningkatkan jumlah *sites build-to-suit* dan kolokasi. Dengan demikian, penyebaran geografis portofolio *sites* telekomunikasi Grup Tower Bersama akan selalu mengikuti kebutuhan operator telekomunikasi di Indonesia.

Tabel berikut ini menunjukkan nilai pendapatan dan persentase kontribusi masing-masing jasa yang dihasilkan Grup Tower Bersama untuk periode-periode sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir 31 Desember			
	2022		2021	
	Rp	%	Rp	%
Pendapatan penyewaan menara	6.428.838	98,5	6.132.304	99,2
Pendapatan penyewaan <i>In building system/ repeater</i>	38.295	0,6	38.771	0,6
Pendapatan penyewaan gedung	8.389	0,1	8.509	0,1
Pendapatan serat optik	48.847	0,8	6.635	0,1
<b>Jumlah</b>	<b>6.524.369</b>	<b>100,0</b>	<b>6.179.584</b>	<b>100,0</b>

Tabel di bawah ini menyajikan rincian pendapatan Grup Tower Bersama berdasarkan penyebaran geografis dan persentasenya terhadap jumlah pendapatan untuk periode-periode sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2022		2021	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Jawa dan Bali	3.785.398	58,0	3.648.715	59,0
Sumatera	1.709.268	26,2	1.587.749	25,7
Kalimantan	447.941	6,9	412.089	6,7
Sulawesi	580.746	8,9	531.031	8,6
Maluku dan Papua	1.016	0,0 <sup>nm</sup>	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>6.524.369</b>	<b>100,0</b>	<b>6.179.584</b>	<b>100,0</b>

## 11. PENYEWA UTAMA SITES TELEKOMUNIKASI GRUP TOWER BERSAMA

Penyewa utama menara Grup Tower Bersama terdiri dari operator-operator telekomunikasi terbesar di Indonesia. Sekitar 85,1% dan 72,9% dari pendapatan Grup Tower Bersama masing-masing pada tahun 2022 dan 2021 berasal dari Telkomsel, IOH dan XL Axiata (yang masing-masing memiliki peringkat investasi dari setidaknya satu perusahaan pemeringkat kredit).

Tabel di bawah ini menyajikan rincian pendapatan Grup Tower Bersama berdasarkan pelanggan yang merupakan operator telekomunikasi dan persentasenya terhadap jumlah pendapatan untuk periode-periode sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2022		2021	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Telkomsel	2.283.511	35,0	2.201.074	35,6
IOH	2.197.771	33,7	1.327.481	21,5
XL Axiata	1.061.633	16,3	975.935	15,8
Smartfren	521.267	8,0	434.566	7,0





SMART	381.451	5,9	270.490	4,4
Hutch	7.525	0,1	914.788	14,8
Lainnya	13.974	0,1	40.106	0,7
<b>Jumlah</b>	<b>6.467.132</b>	<b>99,1</b>	<b>6.164.440</b>	<b>99,8</b>
Fiber optik	48.848	0,8	6.635	0,1
Properti investasi	8.389	0,1	8.509	0,1
<b>Jumlah</b>	<b>6.524.369</b>	<b>100,0</b>	<b>6.179.854</b>	<b>100,0</b>

Catatan :

(i) telah bergabung dengan IOH efektif pada bulan Februari 2022.

## 12. PERSAINGAN USAHA

Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa persaingan pada industri penyewaan menara telekomunikasi di Indonesia terutama bergantung pada lokasi menara dan hubungan dengan operator telekomunikasi, serta kualitas dan ketinggian menara. Disamping itu, persaingan usaha juga dipengaruhi oleh jumlah portofolio *sites*, harga, manajemen operasional dan jasa layanan tambahan yang dapat ditawarkan kepada penyewa.

Grup Tower Bersama utamanya bersaing dengan Protelindo dan Mitratel, suatu perusahaan penyewaan menara telekomunikasi yang memiliki skala yang sebanding, dan beberapa perusahaan penyewaan menara telekomunikasi yang lebih kecil. Berdasarkan data yang diperoleh dari situs web PT Sarana Menara Nusantara Tbk., dan Mitratel, Protelindo mengoperasikan sekitar 29.794 *sites* dengan jumlah penyewaan sebanyak 53.967 dan Mitratel mengoperasikan 35.418 *sites* dengan jumlah penyewaan sebanyak 54.824 sekitar per 31 Desember 2022. Persaingan tersebut khususnya dalam hal menjalin hubungan jangka panjang dengan operator telekomunikasi terbesar di Indonesia, rekam jejak layanan dan kepuasan penyewa terhadap Grup Tower Bersama. Dengan lokasi *sites* Grup Tower Bersama yang berada di wilayah padat penduduk dimana operator telekomunikasi memperoleh lalu lintas komunikasi pelanggan yang tinggi, Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa sebagian besar dari pelanggan Grup Tower Bersama akan memperpanjang perjanjian sewanya pada akhir masa perjanjian untuk mengurangi gangguan pada cakupan layanan di wilayah tersebut, menghindari potensi kehilangan pendapatan dan juga mencegah timbulnya biaya-biaya terkait proses relokasi peralatan antenna.

Grup Tower Bersama juga bersaing dengan operator telekomunikasi besar yang memperbolehkan kolokasi pada menara telekomunikasi mereka. Akan tetapi Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa sebagai pihak independen yang tidak bersaing dengan pelanggan Grup Tower Bersama secara langsung pada kegiatan usaha utamanya, kegiatan usaha penyewaan menara telekomunikasi Grup Tower Bersama memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan operator telekomunikasi yang menawarkan kolokasi pada *sites* menara mereka.

## 13. KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perseroan dan beberapa Perusahaan Anak yaitu TB dan GOLD memiliki aset berupa kekayaan intelektual yang didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa 62 sertifikat kekayaan intelektual, yang terdiri atas merek dagang, merek jasa, hak cipta, dan desain industri, dengan perincian sebagai berikut :

- **Merek Dagang**

No.	Merek Dagang	Kelas Barang/ Jasa	No. Permohonan	No. Pendaftaran	Tanggal Penerimaan	Masa Berlaku
1.	Logo Tower Bersama	9	D002009008003	IDM000273014	12 Maret 2019	12 Maret 2029
2.	Logo Tower Bersama	9	D002009008004	IDM000273015	12 Maret 2019	12 Maret 2029
3.	Logo Tower Bersama	12	D002009008007	IDM000273016	12 Maret 2019	12 Maret 2029
4.	Logo Tower Bersama	9	D002009008010	IDM000273017	12 Maret 2019	12 Maret 2029
5.	Logo Tower Bersama	12	D002009008023	IDM000273018	12 Maret 2019	12 Maret 2029
6.	Logo Tower Bersama	12	D002009008025	IDM000273019	12 Maret 2019	12 Maret 2029
7.	Logo Tower Bersama	11	D002009008005	IDM000278750	12 Maret 2019	12 Maret 2029
8.	Logo Tower Bersama	11	D002009008006	IDM000278751	12 Maret 2019	12 Maret 2029





No.	Merek Dagang	Kelas Barang/Jasa	No. Permohonan	No. Pendaftaran	Tanggal Penerimaan	Masa Berlaku
9.	Logo Tower Bersama	12	D002009008023	IDM000273018	12 Maret 2019	12 Maret 2029
10.	Tower Bersama Group dan Logo	12	D00.2009.008007	IDM000273016	12 Maret 2019	12 Maret 2029
11.	Tower Bersama Group dan Logo	11	D00.2009.008008	IDM000278752	12 Maret 2019	12 Maret 2029
12.	Tower Bersama Group dan Logo	9	D00.2009.008010	IDM00273017	12 Maret 2019	12 Maret 2029
13.	Tower Bersama Group dan Logo	12	D00.2009.008025	IDM00273019	12 Maret 2019	12 Maret 2029
14.	Tower Bersama Group dan Logo	11	D00.2009.008005	IDM0027850	12 Maret 2009	12 Maret 2029
15.	Tower Bersama Group dan Logo	9	D00.2009.008004	IDM00273015	12 Maret 2019	12 Maret 2029
16.	Tower Bersama Group	14	D00.2009.008013	IDM000294979	12 Maret 2019	12 Maret 2029
17.	Tower Bersama Group dan Logo	14	D00.2009.008015	IDM000294980	12 Maret 2019	12 Maret 2029
18.	Tower Bersama Group dan Logo	9	D00.2009.008010	IDM00273017	12 Maret 2019	12 Maret 2029
19.	Tower Bersama Group dan Logo	12	D00.2009.008025	IDM00273019	12 Maret 2019	12 Maret 2029
20.	Tower Bersama Group dan Logo	11	D00.2009.008005	IDM0027850	12 Maret 2009	12 Maret 2029
21.	Rumah Batik TBIG	25	D002016049891	IDM000686417	19 Oktober 2016	19 Oktober 2026
22.	Rumah Batik TBIG	24	D002016049893	IDM000686416	19 Oktober 2016	19 Oktober 2026
23.	Rumah Batik TBIG dan Logo	16	D002016049896	IDM000658862	19 Oktober 2016	19 Oktober 2026
24.	TBIG Mobile dan Logo	9	DID20222039968	IDM001062550	9 Juni 2022	9 Juni 2032
25.	TBIGSys dan Logo	9	DID2022039964	IDM001062550	9 Juni 2022	9 Juni 2032
26.	TBIGSys	9	DID2022039966	IDM001062552	9 Juni 2022	9 Juni 2032

- **Merek Jasa**

No.	Merek Jasa	Kelas Barang/Jasa	No. Permohonan	No.Pendaftaran	Tanggal Penerimaan	Masa Berlaku
1.	Logo Tower Bersama	38	J002009007997	IDM000281520	12 Maret 2019	12 Maret 2029
2.	Tower Bersama Group + Logo	39	J002009008000	IDM000281521	12 Maret 2019	12 Maret 2029
3.	Logo Tower Bersama	36	J002009008002	IDM000281522	12 Maret 2019	12 Maret 2029
4.	Tower Bersama Group	36	J002009008016	IDM000281523	12 Maret 2019	12 Maret 2029
5.	Tower Bersama Group + Logo	36	J002009008017	IDM000281524	12 Maret 2019	12 Maret 2029
6.	Tower Bersama Group + Logo	38	J002009008018	IDM000281525	12 Maret 2019	12 Maret 2029
7.	Tower Bersama Group	39	J002009008027	IDM000281526	12 Maret 2019	12 Maret 2029
8.	Tower Bersama Group	40	J002009008028	IDM000281527	12 Maret 2019	12 Maret 2029
9.	Tower Bersama Group + Logo	40	J002009008029	IDM000281528	12 Maret 2019	12 Maret 2029
10.	Logo Tower Bersama	40	J002009008031	IDM000281529	12 Maret 2019	12 Maret 2029
11.	Tower Bersama Group	42	J002009008032	IDM000281530	12 Maret 2019	12 Maret 2029
12.	Tower Bersama Group + Logo	42	J002009008034	IDM000281531	12 Maret 2019	12 Maret 2029
13.	Logo Tower Bersama	42	J002009008036	IDM000281532	12 Maret 2019	12 Maret 2029
14.	Tower Bersama Group	38	J002009008020	IDM000281536	12 Maret 2019	12 Maret 2029
15.	Logo Tower Bersama	39	J002009008026	IDM000281537	12 Maret 2019	12 Maret 2029
16.	Rumah Batik TBIG	41	J002016049897	IDM000799253	19 Oktober 2016	19 Oktober 2026
17.	Rumah Batik TBIG	35	J002016049899	IDM000799255	19 Oktober 2016	19 Oktober 2026
18.	Visi Telekomunikasi Infrastruktur dan Logo	38	JID2020071957	IDM000919830	20 November 2020	20 November 2030
19.	Logo Kooperatif	35	JID2019068408	IDM000871344	11 November 2019	11 November 2029
20.	Logo Kooperatif	36	JID2019068410	IDM000871345	11 November 2019	11 November 2029

Berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja, perlindungan hak merek diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.

Berdasarkan Surat Pernyataan Direktur TB tanggal 19 Januari 2018, TB tidak berkeberatan atas penggunaan merek Tower Bersama Group beserta logo untuk digunakan oleh perusahaan-perusahaan sebagaimana disebutkan, termasuk namun tidak terbatas pada Perseroan, TB, UT, BT, TI, Balikom, PMS, TO, Triaka, MSI, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, JPI dan TBGG. Tidak terdapat jangka waktu khusus atas penggunaan kekayaan intelektual tersebut, sehingga jangka waktu penggunaan kekayaan intelektual mengikuti jangka waktu keberlakuan kekayaan intelektual yang bersangkutan.



Dalam hal salah satu Perusahaan Anak sebagaimana disebutkan diatas bukan lagi merupakan Perusahaan Anak Perseroan baik langsung maupun tidak langsung, maka Perusahaan Anak yang bersangkutan tidak lagi berhak menggunakan kekayaan intelektual yang terdaftar atas nama TB.

Sehubungan dengan pemberian hak penggunaan tersebut, tidak terdapat hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh Perseroan dan Perusahaan Anak serta TB tidak akan meminta/memungut royalti atas penggunaan Hak Kekayaan Intelektual kepada Perseroan dan Perusahaan Anak.

Tidak ada perjanjian lain yang dibuat sehubungan dengan pemberian hak penggunaan atas kekayaan intelektual milik TB selain Surat Pernyataan tersebut di atas.

- **Hak Cipta**

No.	Judul Ciptaan	Jenis Ciptaan	No. Permohonan	No. Pencatatan	Tanggal Pertama Kali Diumumkan	Masa Berlaku
1.	Motif TBIG Puspa Semesta	Seni Batik	C00201603611	082509	22 Mei 2013	50 tahun sejak tanggal diumumkan
2.	Motif TBIG Puspa Semesta	Seni Batik	C00201603612	082510	22 Mei 2013	50 tahun sejak tanggal diumumkan
3.	Platform Transportasi Terintegrasi	Program Komputer	EC00201845143	000117073	6 Juli 2018	50 tahun sejak tanggal diumumkan
4.	Pricilia	Program Komputer	EC00201983136	000169881	10 Oktober 2019	50 tahun sejak tanggal diumumkan
5.	Ultron	Program Komputer	EC00201981340	000163868	10 Oktober 2019	50 tahun sejak tanggal diumumkan
6.	Qinder Joy	Program Komputer	EC00202055173	000223100	14 Oktober 2020	50 tahun sejak tanggal diumumkan
7.	Vaksin	Program Komputer	EC00202053257	000223099	14 Oktober 2020	50 tahun sejak tanggal diumumkan
8.	CERIA ( <i>Chat &amp; Expression Automatic Training</i> )	Program Komputer	EC00202306110	000439032	26 Juli 2022	50 tahun sejak tanggal diumumkan
9.	WEASLEY ( <i>Well And Simple Survey</i> )	Program Komputer	EC00202306011	000438933	13 Oktober 2022	50 tahun sejak tanggal diumumkan
10.	EZ-ONE (Elektronik Zonasi Easy And Fast Result For Check Zona)	Program Komputer	EC00202254345	000370078	13 Oktober 2021	50 tahun sejak tanggal diumumkan
11.	PROBIOTICS (PR-PO, BOQ ID, ITEM ID, FINAL COR &SOP)	Program Komputer	EC00202254346	000370079	13 Oktober 2021	50 tahun sejak tanggal diumumkan
12.	Sadako "Systematic Design And Knowledge Organizer"	Program Komputer	EC00202254348	000370081	13 Oktober 2021	50 tahun sejak tanggal diumumkan

- **Desain Industri**

No.	Judul Desain Industri	Perlindungan Untuk	No. Permohonan	No. Pendaftaran	Tanggal Penerimaan	Masa Berlaku
1.	Menara Telekomunikasi	Bentuk dan Konfigurasi	A00201603837	IDD000048459	29 Desember 2016	29 Desember 2026
2.	Flexible Stacking (Rak Susun BTS Fleksibel)	Bentuk dan Konfigurasi	A00201903716	IDD0000056508	12 November 2019	12 November 2029

#### 14. **KECENDERUNGAN USAHA**

Sejak tahun buku terakhir sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup Tower Bersama dan Perusahaan Anak tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Grup Tower Bersama. Selain itu, Grup Tower Bersama dan Perusahaan Anak juga tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan Grup Tower Bersama di masa datang.



## IX. PERATURAN INDUSTRI MENARA TELEKOMUNIKASI INDONESIA

### 1. UMUM

Industri sewa menyewa menara telekomunikasi di Indonesia diatur oleh peraturan pemerintah, baik pusat maupun daerah.

### 2. PERATURAN NASIONAL

#### *Undang-Undang Bangunan Gedung*

Sebelum diberlakukannya UU Cipta Kerja, konstruksi bangunan apapun, termasuk menara telekomunikasi, harus memiliki IMB sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Setelah berlakunya UU Cipta Kerja, IMB telah diganti dengan perizinan baru yaitu Persetujuan Bangunan Gedung (“PBG”) yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Ketentuan lebih lanjut mengenai PBG diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“PP No. 16/2021”). Berdasarkan PP No. 16/2021, untuk memperoleh PBG pemohon atau pemilik bangunan gedung menyampaikan informasi yang terdiri dari: (i) data pemohon atau pemilik; (ii) data bangunan gedung; dan (iii) dokumen rencana teknis, yang disampaikan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). Setelah keseluruhan informasi tersebut dinyatakan lengkap maka dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen rencana teknis oleh Tim Profesi Ahli (“TPA”) atau Tim Penilai Teknis (“TPT”) yang ditunjuk atau dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen rencana teknis telah memenuhi Standar Teknis, TPA akan memberikan rekomendasi penerbitan Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis, berdasarkan rekomendasi tersebut Dinas Teknis sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung akan menerbitkan Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis yang digunakan untuk memperoleh PBG.

Dalam hal bangunan gedung baru, pemilik bangunan gedung wajib memperoleh PBG sebelum dimulainya pelaksanaan konstruksi. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif antara lain berupa teguran tertulis, pembatasan atau penghentian pembangunan dan pemanfaatan hingga pembongkaran. Terkait dengan bangunan gedung yang sudah terbangun, PP No. 16/2021 juga mengatur bahwa permohonan PBG dapat diajukan untuk bangunan gedung yang sudah ada dan belum memiliki PBG. Proses penerbitan PBG untuk bangunan gedung yang sudah terbangun akan dilakukan bersamaan dengan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi. Mengacu pada ketentuan peralihan pada PP No. 16/2021, bangunan gedung yang telah memperoleh perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebelum berlakunya PP No. 16/2021 izinnya dinyatakan masih tetap berlaku.

Perlu diperhatikan apakah pengaturan dalam PP No. 16/2021 ini selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan suatu peraturan pelaksanaan baru yang akan mempengaruhi proses permohonan perizinan untuk pembangunan menara telekomunikasi kedepannya, termasuk sebagaimana yang telah diatur selama ini dalam ketentuan SKB (sebagaimana didefinisikan dan dijelaskan dibawah ini).

#### *Undang-Undang Telekomunikasi*

Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi telah diubah dengan UU Cipta Kerja (“UU Telekomunikasi”). Setelah diubah, UU Telekomunikasi mengatur beberapa ketentuan baru sehubungan dengan konstruksi dan penggunaan infrastruktur pasif seperti menara telekomunikasi. Dalam UU Telekomunikasi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan fasilitas dan/atau kemudahan untuk melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi untuk digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi secara bersama dengan biaya terjangkau.



UU Telekomunikasi juga mewajibkan perusahaan penyedia menara untuk membuka akses pemanfaatan menara yang dimilikinya kepada penyelenggara telekomunikasi secara adil, wajar, dan non-diskriminatif.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (“**PP No. 46/2021**”), fasilitas dan/atau kemudahan yang dapat diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi meliputi pemberian hak perlintasan (*right of way*), akses terhadap gedung dan kawasan, pungutan dan/atau retribusi berdasarkan biaya yang wajar dan menjamin kepastian berusaha, tarif sewa dan/atau penggunaan aset milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan standardisasi teknis dan teknologi telekomunikasi.

PP No. 46/2021 mengatur pemanfaatan menara oleh penyelenggara telekomunikasi dilakukan melalui kerja sama dengan perusahaan penyedia menara dengan harga pemanfaatan yang wajar dan berbasis biaya. Perusahaan penyedia menara dalam menetapkan tarif harga pemanfaatan menara mempertimbangkan efisiensi nasional, kondisi pasar, dampak positif perekonomian, dan kepentingan masyarakat. Dalam hal harga pemanfaatan menara tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (“**Menkominfo**”) dapat menetapkan tarif batas atas harga pemanfaatan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan penyedia menara.

Menkominfo kemudian menerbitkan Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (“**Perkominfo No. 5/2021**”) yang merupakan peraturan pelaksana dari PP No. 46/2021. Berdasarkan Perkominfo No. 5/2021 perusahaan penyedia menara wajib untuk membuka akses pemanfaatan menara kepada penyelenggara telekomunikasi dan menginformasikan ketersediaan kapasitas menara secara transparan dan non-diskriminatif. Perusahaan penyedia menara dapat menolak untuk membuka akses pemanfaatan menara kepada penyelenggara telekomunikasi dalam hal: (i) kapasitas tidak tersedia karena sudah terisi; (ii) dicadangkan (*reserved*) untuk layanan bagi kepentingan umum yang lebih besar; dan/atau (iii) pembukaan akses tidak layak secara teknis. Apabila perusahaan penyedia menara menolak untuk membuka akses pemanfaatan menara, perusahaan penyedia menara wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis kepada penyelenggara telekomunikasi.

Kerja sama pemanfaatan menara telekomunikasi wajib dilakukan dengan perjanjian tertulis dan paling sedikit mengatur tentang: (i) hak dan kewajiban penyelenggara telekomunikasi dan perusahaan penyedia menara; (ii) tarif pemanfaatan infrastruktur pasif; (iii) penggunaan kapasitas infrastruktur pasif; (iv) masa berlaku kerja sama; dan (v) penyelesaian perselisihan. Sehubungan dengan tarif pemanfaatan menara, Perkominfo No. 5/2021 mensyaratkan perusahaan penyedia menara untuk: (i) menetapkan harga yang wajar dan berbasis biaya, dengan mempertimbangkan biaya investasi, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan keuntungan yang wajar; (ii) mempublikasikan dan memberikan informasi tarif harga pemanfaatan menara secara transparan dan nondiskriminatif; (iii) menyediakan perhitungan harga pemanfaatan menara yang wajar dan berbasis biaya apabila diperlukan oleh penyelenggara telekomunikasi; serta (iv) mematuhi tarif batas atas pemanfaatan menara dalam hal Menkominfo menetapkan tarif batas atas pemanfaatan menara.

### **Surat Keputusan Bersama**

Pada tahun 2009, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengeluarkan Peraturan Bersama tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (“**SKB**”). SKB tersebut mengatur mengenai pembangunan dan pengoperasian kolokasi meskipun penerimaan dan pelaksanaannya berbeda di setiap wilayah Indonesia. Berdasarkan SKB ini, *sites* menara telekomunikasi selular dapat dibangun dan dioperasikan oleh penyelenggara telekomunikasi atau perusahaan menara.

SKB mewajibkan seluruh perusahaan penyedia menara telekomunikasi untuk melaksanakan ketentuan SKB dalam waktu 2 tahun sejak ditetapkan (30 Maret 2011). Meskipun SKB memberi sedikit tambahan persyaratan terhadap pembangunan menara, termasuk fasilitas pendukung bagi menara telekomunikasi sebagaimana dijelaskan di atas, SKB tersebut secara ketat mengharuskan kepatuhan terhadap rencana tata ruang daerah dan mengakui wewenang bagi pemerintah daerah dalam mengawasi pelaksanaannya. SKB mengatur persyaratan administrasi dan teknis yang harus dipenuhi perusahaan menara sebelum memperoleh IMBM. Selain dari hal-hal umum mengenai perusahaan, persyaratan administrasi termasuk, dan yang paling penting adalah (i) persetujuan dari masing-masing rumah tangga penduduk yang berada di lingkungan sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara; (ii) konfirmasi dari dinas tata ruang; (iii) rekomendasi dari pejabat yang berwenang untuk menara di wilayah tertentu. SKB juga mewajibkan bahwa seluruh menara harus memenuhi standar keamanan Indonesia atau internasional lainnya yang berlaku. Ketentuan standar tersebut diatur di dalam SKB.



Berdasarkan SKB, perusahaan penyedia menara telekomunikasi harus dimiliki seluruhnya oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, kecuali perusahaan penyedia menara telekomunikasi adalah perusahaan terbuka yang tercatat pada Bursa Efek dimana saham perusahaan penyedia menara telekomunikasi tersebut dapat dimiliki oleh warga negara maupun badan hukum Indonesia maupun asing. Perusahaan penyedia menara telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan ini dalam 2 (dua) tahun atau pada tanggal 30 Maret 2011. Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, Pemerintah saat ini telah membuka ruang investasi bagi penanaman modal asing khususnya dalam perusahaan penyedia menara telekomunikasi dimana tidak lagi terdapat pembatasan terhadap penanam modal asing untuk memiliki saham pada perusahaan tersebut.

Perlu diperhatikan perkembangan selanjutnya apakah ketentuan dalam SKB akan diubah mengikuti perubahan berdasarkan UU Cipta Kerja dan PP No. 16/2021 (terkait penggantian IMB menjadi PBG), khususnya terkait persyaratan untuk memperoleh IMBM.

### ***Perjanjian Penggunaan Menara Bersama***

Kolokasi yang disediakan oleh perusahaan penyedia menara telekomunikasi harus memberikan kesempatan yang sama, tidak mendiskriminasi penyedia jasa telekomunikasi untuk menggunakan menara tersebut sesuai dengan kapasitas teknis menara yang relevan. Perusahaan penyedia menara telekomunikasi harus secara transparan menginformasikan kepada calon peserta kolokasi mengenai kapasitas menara yang tersedia dan menerapkan mekanisme antrian, dimana mendahulukan pihak pertama yang datang terlebih dahulu.

Berdasarkan ketentuan yang diatur didalam Perkominfo No. 5/2021 sebagaimana diuraikan di atas, perusahaan penyedia menara telekomunikasi dapat membebankan biaya kepada penyedia jasa telekomunikasi untuk kolokasi yang diberikan dengan harga yang wajar berdasarkan referensi terhadap modal investasi, biaya operasi, biaya pemeliharaan dan imbal hasil investasi termasuk keuntungan.

### ***Pengelolaan Lingkungan Hidup***

Perlindungan lingkungan hidup di Indonesia diatur oleh undang-undang, peraturan dan keputusan yang berbeda, termasuk diantaranya :

- Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja ("**UU Lingkungan Hidup**"), yang menggantikan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menggantikan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("**Permen No. 4/2021**"), yang menggantikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; dan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 03 tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup ("**Permen No. 03/2013**").

UU Lingkungan Hidup meliputi beberapa ketentuan penting, termasuk :

- Dengan berlakunya UU Cipta Kerja, kewajiban untuk memperoleh Izin Lingkungan telah dihapus dan digantikan dengan Persetujuan Lingkungan. Persetujuan Lingkungan ini dapat berupa Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;



- Setiap usaha dan/atau kegiatan usaha yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL dan menyusun dokumen-dokumen yang dibutuhkan terkait analisis tersebut. Dokumen AMDAL dinilai dan disetujui oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Apabila pemerintah menyetujui dokumen AMDAL, maka pemerintah akan menerbitkan Persetujuan Lingkungan dalam bentuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup. Penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup wajib diumumkan kepada masyarakat. Daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL diatur dalam Permen No. 4/2021. Berdasarkan Permen No. 4/2021, perusahaan penyedia menara telekomunikasi tidak termasuk dalam daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL;
- Apabila usaha dan/atau kegiatan usaha yang dilakukan suatu perusahaan tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL, usaha dan/atau kegiatan usaha tersebut wajib memenuhi standar Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (“UKL-UPL”). Pemenuhan standar UKL-UPL dinyatakan dalam Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sekaligus berlaku sebagai Persetujuan Lingkungan, berdasarkan mana pemerintah pusat atau pemerintah daerah akan menerbitkan Perizinan Berusaha;
- Dalam hal usaha dan/atau kegiatan usaha tidak wajib dilengkapi UKL-UPL, suatu perusahaan wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup atau SPPL yang akan diintegrasikan dengan Nomor Induk Berusaha atau NIB;
- Usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup diwajibkan untuk melakukan audit lingkungan hidup;
- Pada tanggal 7 Maret 2013, Menteri Lingkungan Hidup menerbitkan Permen No. 03/2013 yang mengatur mengenai pelaksanaan audit lingkungan hidup yang bersifat sukarela dan diwajibkan. Setiap audit lingkungan hidup, baik sukarela maupun diwajibkan, dilakukan oleh tim audit lingkungan hidup yang tersertifikasi. Audit lingkungan hidup yang diwajibkan dapat diusulkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada usaha dan/atau kegiatan usaha yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, dengan biaya dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan usaha yang diaudit.

Laporan hasil audit lingkungan hidup yang diwajibkan paling sedikit berisi proses pelaksanaan audit dan akan dinilai oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selanjutnya akan menetapkan tindak lanjut terhadap hasil audit lingkungan hidup;

- Pemegang Persetujuan Lingkungan diwajibkan untuk menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup yang disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintah pusat;
- Setiap usaha yang membuang limbah diwajibkan untuk mendapat perizinan berusaha atau persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, dan kegiatan tersebut hanya dapat dilakukan di lokasi tertentu yang telah ditentukan;
- Kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan serta sanksi (seperti kewajiban untuk memulihkan wilayah tercemar, penerapan ketentuan pidana berupa penjara dan denda, dan pembatalan perizinan) dapat diterapkan untuk mencegah atau memulihkan pengaruh polusi yang disebabkan kegiatan komersial; dan
- Sanksi pidana penjara antara 1 (satu) sampai 15 tahun, dan/atau denda antara Rp500 juta sampai dengan Rp15 miliar, dapat dikenakan terhadap setiap orang yang menyebabkan polusi atau kerusakan lingkungan. Sanksi yang dijatuhkan (baik penjara atau denda) akan diperberat sepertiga bila tindak pidana tersebut dilakukan berdasarkan perintah dari suatu pihak untuk melakukan tindak pidana atau suatu pihak yang bertindak sebagai pemimpin tindak pidana.

Ketentuan di atas akan didukung oleh beberapa peraturan pelaksanaan, yang sebagian belum dikeluarkan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan. Seluruh peraturan pelaksanaan yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup terdahulu, termasuk Undang-Undang No. 32 tahun 2009, tetap





berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Lingkungan Hidup. Namun, apabila peraturan pelaksana baru diterbitkan, yang mengakibatkan pencabutan peraturan pelaksana terdahulu, Grup Tower Bersama wajib untuk mematuhi peraturan-peraturan tersebut.

### 3. PERATURAN DAERAH

#### ***Izin dan Lisensi Menara***

Berdasarkan SKB, setiap pembangunan menara *ground-based* dengan ketinggian lebih dari 6 (enam) meter wajib memiliki izin untuk membangun menara dalam bentuk IMB atau IMBM yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau daerah. SKB juga mengatur IMB (yang berdasarkan UU Cipta Kerja diubah menjadi persetujuan bangunan gedung) atau IMBM untuk menara *ground-based* tidak memiliki batas waktu berlaku sepanjang tidak ada perubahan dalam konstruksi menara, namun, perusahaan penyedia menara telekomunikasi harus memeriksa “kelayakan konstruksi” secara tahunan dan menyampaikan laporan tersebut kepada pejabat yang berwenang.

SKB memberikan kelonggaran persyaratan izin tertentu untuk menara yang diletakkan di atas gedung (selama ketinggiannya tidak melampaui batas maksimum tertentu) atau struktur lainnya. Namun, jika instalasi menara mengubah konstruksi gedung, permohonan perubahan terhadap izin yang ada menjadi wajib dilakukan.

Perlu diperhatikan apakah pergantian dari IMB ke persetujuan bangunan gedung sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja akan diikuti dengan perubahan ketentuan di dalam SKB.

Selain IMB dan IMBM, beberapa kotamadya dan kabupaten tertentu mewajibkan menara telekomunikasi untuk memiliki IOM. Peraturan daerah tersebut menetapkan berbagai sanksi untuk pemanfaatan menara tanpa IOM yang sebagian besar bersifat administratif, meskipun beberapa peraturan daerah yang diterbitkan oleh kotamadya dan kabupaten tertentu memberlakukan sanksi pembongkaran menara dan/atau sanksi pidana dalam hal terjadi pelanggaran. Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja, peraturan daerah dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perlu diperhatikan apakah persyaratan daerah untuk memperoleh IOM akan disesuaikan dengan persyaratan untuk memperoleh persetujuan bangunan gedung.

#### ***Lokasi Menara***

Penempatan menara harus sesuai dengan kebutuhan rencana tata ruang wilayah yang termasuk diantaranya adalah wilayah yang terlarang dan yang diizinkan untuk konstruksi menara dan pembatasan terhadap populasi dan kepadatan menara. Pembangunan di wilayah tertentu, seperti bandara udara/pelabuhan, hutan lindung atau wilayah yang dilindungi lainnya harus mematuhi peraturan yang berlaku untuk wilayah tersebut, misalnya “izin pinjam pakai” untuk menggunakan area hutan.

Pada bulan Juni 2010, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 tahun 2010 (“**Permendagri No. 32/2010**”) yang memberikan pedoman dalam penerbitan IMB. Meskipun Permendagri No. 32/2010 tidak secara khusus mengatur menara telekomunikasi, secara umum peraturan tersebut mengakui bahwa konstruksi menara merupakan suatu kegiatan yang memerlukan IMB. Berdasarkan Permendagri No. 32/2010 tersebut, penerbitan IMB dilakukan berdasarkan rencana tata ruang yang terperinci yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Bangunan yang berdiri sebelum adanya rencana tata ruang diperbolehkan untuk berdiri namun diharuskan memohon penerbitan IMB. Bangunan yang dibangun setelah adanya rencana tata ruang harus mematuhi rencana tata ruang dan mengharuskan IMB untuk disetujui dan diterbitkan oleh pemerintah daerah, dan tanpa hal tersebut bangunan harus dibongkar. Namun, dengan diubahnya IMB menjadi persetujuan bangunan gedung, perlu diperhatikan apakah ketentuan di dalam Permendagri No. 32/2010 akan disesuaikan dengan perubahan tersebut.

#### ***Jakarta***

Gubernur DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur No. 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi (“**Pergub No. 14/2014**”). Pergub No. 14/2014 mengatur, antara lain: (i) menara telekomunikasi eksisting; (ii) pembangunan menara telekomunikasi baru; (iii) penempatan perangkat, lokasi menara dan bentuk





menara; (iv) rekomendasi zona menara telekomunikasi; (v) izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi; (vi) Izin Penempatan Perangkat Telekomunikasi (“IPPT”); dan (vii) persyaratan teknis pembangunan menara telekomunikasi.

Pergub No. 14/2014 menentukan area yang diperbolehkan untuk pembangunan menara baru, meliputi zona-zona sebagai berikut: (i) zona menara baru; (ii) zona menara eksisting yang telah dipergunakan secara bersama-sama oleh paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi; atau (iii) zona menara eksisting jika menara eksisting secara teknis tidak memungkinkan memenuhi persyaratan berupa kecukupan ketinggian dan dukungan konstruksi yang dibutuhkan. Lebih lanjut, pembangunan menara telekomunikasi baru harus memenuhi persyaratan, antara lain (i) ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara; (ii) ketinggian menara disesuaikan dengan kebutuhan teknis yang diatur sesuai dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan; (iii) struktur menara mampu menampung paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung menara bersama; dan (iv) kajian teknis dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan (“**Dinas Kominfomas**”) berupa pengukuran titik koordinat, spektrum frekuensi dan radiasi.

Berdasarkan Pergub No. 14/2014, menara telekomunikasi eksisting harus memenuhi syarat: (i) memiliki IMB menara; (ii) memiliki IPPT; dan (iii) Surat Kelayakan Konstruksi Menara. Selain itu, lokasi menara telekomunikasi eksisting harus sesuai dengan zona menara. Pergub No. 14/2014 memberikan waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan ini diundangkan untuk: (i) memperoleh kajian teknis yang diberikan oleh Dinas Kominfomas untuk menara telekomunikasi eksisting yang berada dalam zona menara yang telah ditetapkan dan akan diubah menjadi menara telekomunikasi bersama; (ii) mengurus IMB menara untuk menara telekomunikasi eksisting yang berada dalam zona menara yang telah ditetapkan tetapi tidak memiliki izin; dan (iii) merelokasi menara telekomunikasi eksisting yang berada di luar zona menara yang telah ditetapkan. Sanksi untuk pelanggaran terhadap Pergub No. 14/2014 beragam mulai dari surat peringatan hingga perintah pembongkaran menara telekomunikasi yang tidak dibangun sesuai dengan peraturan.

Berdasarkan Surat No. 1195/-1.817 tertanggal 12 Juni 2006, Gubernur DKI Jakarta memberi penegasan bahwa Grup Tower Bersama, melalui salah satu Perusahaan Anak yaitu BT, ditunjuk sebagai salah satu mitra Propinsi DKI Jakarta dalam pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Jakarta.

### **Batam**

Pemerintah Daerah Kota Batam (“**Pemkot Batam**”) telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Batam No. 6 Tahun 2009 tentang Menara Telekomunikasi di Kota Batam (“**Perda Batam No. 6**”), di mana pengaturan dan penataan menara telekomunikasi di Batam harus sesuai dengan Peraturan Walikota yang ditetapkan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam. Perda Batam No. 6 mengatur bahwa sebaran menara telekomunikasi dibagi dalam beberapa zona, dengan memperhatikan kepadatan penduduk, kerapatan bangunan dan infrastruktur disekitar wilayah. Detail pembagian zona ditetapkan secara terpisah dengan peraturan walikota.

Perda Batam No. 6 mengklasifikasikan menara menjadi menara telekomunikasi tunggal dan menara telekomunikasi bersama apabila menara telekomunikasi dapat digunakan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) operator telekomunikasi. Perda Batam No. 6 tersebut mengarahkan pembangunan menara kepada pembangunan dan pengembangan menara telekomunikasi bersama dan permohonan pembangunan menara telekomunikasi baru harus memenuhi syarat untuk dijadikan menara telekomunikasi bersama. Lebih lanjut, peraturan tersebut mengharuskan bahwa menara telekomunikasi yang dibangun sebelum adanya Perda Batam No. 6, sepanjang spesifikasi teknik yang memungkinkan, harus digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama.

Perda Batam No. 6 mewajibkan setiap pembangunan menara untuk memperoleh rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi dan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi dari Walikota Batam atau pejabat yang ditunjuk. Perusahaan menara telekomunikasi juga wajib melaksanakan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Batam atau pejabat yang ditunjuk secara berkala satu kali setiap tahun. Selain itu perusahaan menara telekomunikasi juga wajib mengasuransikan setiap menara telekomunikasinya dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap kecelakaan yang timbul akibat dibangunnya menara telekomunikasi.



Perusahaan penyedia menara telekomunikasi diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk sumbangan pihak ketiga kepada Pemkot Batam dan/atau melalui program tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*). Besaran dan tata cara untuk kontribusi tersebut diatur dalam perjanjian tertulis antara perusahaan penyedia menara telekomunikasi dengan Pemkot Batam.

Kegagalan dalam mematuhi ketentuan Perda Batam No. 6, dapat mengakibatkan sanksi administratif dalam bentuk surat peringatan, pembekuan izin dan/atau pencabutan izin, hingga perintah pembongkaran. Pelanggaran dalam hal pemenuhan ketentuan teknis bangunan yang mengakibatkan menara telekomunikasi tidak dapat berfungsi dan membahayakan orang di sekitar dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama enam bulan dan denda paling banyak Rp50 juta.

Perusahaan penyedia menara telekomunikasi wajib menyesuaikan dengan ketentuan Perda Batam No. 6 tersebut dalam waktu 2 (dua) tahun atau wajib melakukan relokasi menara dengan biaya sendiri.

Berdasarkan Surat No. B/42/PDSI/X/2007 tertanggal 24 Oktober 2007, Otorita Batam memberikan konfirmasi bahwa Grup Tower Bersama, melalui salah satu Perusahaan Anak, TI, ditunjuk sebagai salah satu mitra Otorita Batam dalam pembangunan menara di wilayah Batam.



## X. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha; dan (ii) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final :

- a. Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (“**BUT**”); dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda (“**P3B**”) bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi;
- b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*);
- c. Atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) atau *non-interest bearing debt securities* sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi;
- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- a. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari OJK dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan UU Cipta Kerja; dan
- b. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

**CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI.**

### Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan secara umum memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.



## XI. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

### 1. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi secara kesanggupan penuh (*full commitment*). Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut :

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan			%
		Seri A	Seri B	Total	
1.	PT Indo Premier Sekuritas	294.000.000.000	137.000.000.000	431.000.000.000	28,74
2.	PT CIMB Niaga Sekuritas	271.000.000.000	86.000.000.000	357.000.000.000	23,80
3.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	119.000.000.000	66.000.000.000	185.000.000.000	12,33
4.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.	150.000.000.000	125.000.000.000	275.000.000.000	18,33
5.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	166.000.000.000	86.000.000.000	252.000.000.000	16,80
<b>Jumlah</b>		<b>1.000.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>	<b>100,00</b>

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

### 2. PENENTUAN JUMLAH POKOK OBLIGASI DAN TINGKAT SUKU BUNGA OBLIGASI

Harga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar untuk obligasi, benchmark terhadap obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing seri Obligasi), dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi).



## XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

### 1. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut :

#### **KONSULTAN HUKUM**

##### **Indrawan Darsyah Santoso**

Sona Topas Tower, lantai 15  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26  
Jakarta 12920

- STTD : No. STTD.KH-199/PM.2/2018 tanggal 23 Agustus 2018 atas nama Barli Darsyah, S.H., L.LM.
- Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“**HKHPM**”) No. 201523 atas nama Barli Darsyah, S.H., L.LM.
- Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. 03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021.

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak yang berbadan hukum di Indonesia dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini sesuai dengan kode etik, standar profesi, dan peraturan pasar modal yang berlaku.

#### **AKUNTAN PUBLIK**

##### **Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International)**

Prudential Tower, lantai 17  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79  
Jakarta 12910

- STTD : No. STTD.AP-206/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018 atas nama E. Wisnu Susilo Broto, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA.
- Keanggotaan Asosiasi : Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan No. 1603 atas nama E. Wisnu Susilo Broto, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA.
- Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan BDO Audit Manual.

Ruang lingkup tugas Akuntan Publik dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan auditan juga meliputi penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.



## **NOTARIS**

### **Kantor Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Jl. Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A  
Gandaria Selatan, Cilandak  
Jakarta 12420

- STTD : No. STTD.N-90/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 2 April 2023 atas nama Jose Dima Satria.
- Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 123/Pengda/Suket/XII/2012 atas nama Jose Dima Satria.
- Pedoman Kerja : Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("**UU Notaris**"), dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah membuat akta-akta perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi, sesuai dengan UU Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

## **WALI AMANAT**

### **PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.**

Menara Bank BTN, lantai 18  
Jl. Gajah Mada No. 1  
Jakarta 10130

- STTD : No. 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996.
- Pedoman Kerja : Perjanjian Perwaliamanatan dan UUPM serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

Ruang lingkup tugas Wali Amanat dalam Penawaran Umum ini adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Surat Pernyataan dari Bank BTN No. 213/FICD/FS/IV/2023 tanggal 11 April 2023, Wali Amanat menyatakan antara lain tidak memiliki hubungan kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah obligasi yang diwaliamanati sesuai dengan Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat ("**POJK No. 19/2020**") sejak penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan berakhirnya tugas Wali Amanat.



## **2. PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK**

### **PT Fitch Ratings Indonesia**

DBS Bank Tower, lantai 24 suite 2403  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5  
Jakarta 12940

Ruang lingkup tugas Fitch sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek adalah melakukan pemeringkatan atas Obligasi setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fitch juga wajib menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat memengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dan mengeluarkan peringkat baru apabila terjadi perubahan peringkat dari proses kaji ulang.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.





### XIII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

#### 1. INFORMASI TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Bank BTN bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM.

Bank BTN sebagai Wali Amanat telah terdaftar di OJK dengan No.10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini telah dibuat Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan Bank BTN.

Bank BTN sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan (*due diligence*) terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan No. 212/FICD/FS/IV/2023 tanggal 11 April 2023 sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020.

Bank BTN sebagai Wali Amanat dengan Surat Pernyataan No. 213/FICD/FS/IV/2023 tanggal 11 April 2023 menyatakan bahwa sejak penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan berakhirnya tugas Wali Amanat :

- tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
- tidak memiliki hubungan kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah obligasi yang diwaliamanati sesuai dengan POJK No. 19/2020;
- tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dan menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023 dan/atau kewajiban Perseroan sesuai POJK No. 19/2020;
- tidak menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi.

#### 2. UMUM

Bank BTN pertama kali didirikan dengan nama Postpaarbank sebagaimana diumumkan dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* No. 653 Tahun 1934 yang kemudian berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1950 *juncto* Undang-Undang No. 36 Tahun 1953. Bank Tabungan Pos kemudian menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 *juncto* Undang-Undang No.20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1972. Dengan disesuaikannya bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Tabungan Negara beralih kepada Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara.

Pendirian Perusahaan Persero BTN dilakukan dengan Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara "PT Bank Tabungan Negara (Persero)" No. 136 tanggal 31 Juli 1992, dibuat dihadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-6587.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, didaftarkan di dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Agustus 1992 di bawah No.603/A.P.T/Wapan/1992/PNJS, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.73 tanggal 11 September 1992, Tambahan No.6A ("**Akta Pendirian**").

Anggaran dasar Bank BTN yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk. atau disingkat PT Bank Tabungan Negara



(Persero) Tbk. No. 28 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Yumna Shabrina, S.H., M.Kn., sebagai notaris pengganti dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0023685.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 20 April 2023 serta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0057199 tanggal 18 April 2023.

### 3. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Surat Keterangan DPS Bank BTN No. DE/V/2023-3482 tanggal 3 Mei 2023 perihal Laporan Bulanan yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE, struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir Bank BTN per 30 April 2023 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
<b>Modal Dasar</b>			
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	
Saham Biasa atas nama Seri B	20.478.431.999	10.239.215.999.500	
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	<b>20.478.432.000</b>	<b>10.239.216.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
<b>Saham Seri A Dwiwarna</b>			
Pemerintah	1	500	0,00 <sup>nm</sup>
<b>Saham Seri B</b>			
Pemerintah	8.420.666.648	4.210.333.324.000	60,00
Masyarakat (<5%)	5.613.777.765	2.806.888.882.500	40,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>14.034.444.414</b>	<b>7.017.222.207.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>			
Saham Seri A Dwiwarna	-	-	
Saham Seri B	6.443.987.586	3.221.993.793.000	
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>6.443.987.586</b>	<b>3.221.993.793.000</b>	

nm: menjadi nol karena pembulatan.

### 4. SUSUNAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta No. 9 tanggal 18 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Yumna Shabrina, S.H., M.Kn., sebagai notaris pengganti dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0027754 tanggal 19 Januari 2023 dan Akta No.29 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0104989 tanggal 28 Maret 2023, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank BTN terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama / Independen	:	Chandra Hamzah
Wakil Komisaris Utama / Independen	:	Iqbal Latanro
Komisaris	:	Mohamad Yusuf Permana
Komisaris	:	Andin Hadiyanto
Komisaris	:	Herry Trisaputra Zuna
Komisaris	:	Himawan Arief Sugoto
Komisaris Independen	:	Armand Bachtiar Arief
Komisaris Independen	:	Ahdi Jumhari Luddin
Komisaris Independen	:	Sentot Achmad Sentausa



## Direksi

Direktur Utama	:	Nixon Lambok Pahotan Napitupulu
Wakil Direktur Utama	:	Oni Febriarto Rahardjo
Direktur <i>Consumer</i>	:	Hirwandi Gafar
Direktur <i>Finance</i>	:	Nofry Rony Poetra
Direktur <i>Human Capital, Compliance and Legal</i>	:	Eko Waluyo
Direktur <i>Asset Management</i>	:	Elisabeth Novie Riswanti
Direktur <i>Distribution and Funding</i>	:	Jasmin
Direktur <i>IT and Digital</i>	:	Andi Nirwoto
Direktur <i>Risk Management</i>	:	Setiyo Wibowo
Direktur <i>Institutional Banking</i>	;	Hakim Putratama <sup>(1)</sup>

Catatan :

(1) Berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan OJK berkenaan dengan *fit & proper test*.

## 5. KEGIATAN USAHA

Bank BTN selaku bank umum menjalankan usaha di bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi “Menjadi *The Best Mortgage Bank* di Asia Tenggara pada tahun 2025” dan misi antara lain secara aktif mendukung Pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kepemilikan rumah, mewujudkan kehidupan yang diimpikan jutaan rakyat Indonesia melalui penyediaan rumah yang layak, menjadi mitra keuangan bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem perumahan dengan menyediakan solusi menyeluruh dan layanan terbaik melalui inovasi digital.

Pada tahun 1974, Bank BTN ditunjuk Pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (“KPR”), sejalan dengan program Pemerintah yang menggalakkan program perumahan untuk rakyat. Bank BTN mencatatkan saham perdana pada 17 Desember 2009 di Bursa Efek Indonesia, dan menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan Sekuritisasi Aset KPR melalui pencatatan transaksi Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragang Aset (KIK-EBA).

Bank BTN mengemban amanat utama Program Sejuta Rumah Pemerintah dalam rangka membantu seluruh masyarakat mendapatkan rumah. Bank BTN telah menjadi kontributor utama pada peningkatan realisasi Program Sejuta Rumah Pemerintah, dengan konsisten berkontribusi lebih dari 60% per tahunnya.

Bank BTN menjalankan *one stop solutions* di sektor perumahan dengan tujuan memberikan hasil terbaik kepada pemangku kepentingan dan senantiasa konsisten dalam menjalankan fokusnya sebagai pemimpin pembiayaan perumahan. Sejalan dengan komitmen Bank BTN untuk memperkokoh dominasi bisnis di sektor perumahan, didukung organisasi yang solid dan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dan kompetensi tinggi, Bank BTN terus mengembangkan transformasi digital banking untuk mengembangkan potensi pasar yang ada serta mampu beradaptasi dengan cepat dalam menghadapi persaingan industri perbankan yang semakin dinamis.

Pada tahun 2022, dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas bisnis terutama dalam penyaluran kredit perumahan, Bank BTN telah melakukan aksi korporasi Penambahan Modal Dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *Right Issue*. Bank BTN terus meningkatkan layanan perbankan yang dimiliki, disrupsi pandemi COVID-19 memberikan kesempatan bagi Bank BTN untuk memacu performa layanan digital seperti *banking from home* dan aplikasi *mobile banking* Bank BTN baru serta membuat variasi produk KPR bersama produk *cash management* maupun produk tabungan untuk menarik nasabah agar lebih loyal terhadap Bank BTN seperti *launching* KPR BTN Gaess for Milenials, KPR BTN *Rent To Own*, Tabungan BTN Bisnis peluncuran Portal BTN Properti, BTN Solusi dan Program Batara Spekta. Diperkuat dengan mengusung budaya AKHLAK yang terdiri dari Amanah, Kompeten, Harmoni, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif, pandemi menjadi motivasi untuk memacu kinerja dalam memperbaiki dan meningkatkan *business process* serta mengembangkan sejumlah strategi meningkatkan pelayanan perbankan dan juga mendukung Pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi, sebagai mitra Pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial dan stimulus untuk menunjang perekonomian masyarakat.



Bank BTN melalui penerapan berbagai kebijakan strategis berhasil meraih The Best GRC For Corporate Governance & Compliance 2022 (Banking Service), Most Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI) pada ajang Indonesia Most Trusted Companies Award 2022, Top 3 of Indonesia PLCs dan ASEAN Asset Class - ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), dan The Best Performance of Mortgage pada ajang CSA Award (Perusahaan Publik Terbaik di bidang Perumahan). Bank BTN memperoleh sertifikat SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di bidang kredit komersial dan pengadaan. Selain itu, Bank BTN juga berhasil memperoleh penghargaan antara lain Millenials Popular Digital Brand, KPR Gaess Best Bank For Millenial Mortgage Program, 1<sup>st</sup> Rank KPR BTN 3 kategori Asset Class > IDR 200 Trillion dalam ajang 11<sup>th</sup> Digital Brand Awards 2022, The Best GRC For Corporate Governance & Compliance 2022 Category Banking Service dalam ajang GRC 2022 & Performance Excellence Award, dan Asia's Best Bank Transformation 2022.

Bank BTN telah mengembangkan berbagai produk dan layanan digital berbasis *digital banking* seperti yang telah lama berjalan *Cash Management* BTN dan pembukaan *Smart Branch* BTN yang dilengkapi beragam layanan untuk memfasilitasi kebutuhan nasabah yang berbasis digital. Bank BTN sebagai pemeran utama dalam program sejuta rumah konsisten melakukan pengembangan *Digital Housing Ecosystem*, layanan *Direct Digital* Bank dan memperkuat kapabilitas organisasi serta memperkokoh pilar-pilar *enabler* untuk pertumbuhan bisnis yang efisien. Melangkah ke depan Bank BTN menapaki fase transformasi *Global-Playership* yang mampu membawa produk dan layanan Bank BTN beroperasi sesuai standar layanan internasional dan kelas dunia. Tiga produk utama Bank BTN, yakni *consumer banking*, *commercial banking* dan perbankan Syariah. Untuk nasabah dari setiap jenis layanan perbankan ini, Bank BTN menyediakan pinjaman, pendanaan, dan layanan jasa yang ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai kelompok nasabah tersebut.

Layanan *consumer banking* Bank BTN ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat yaitu produk kredit perumahan (KPR), apartemen (KPA), dan kredit lainnya. *Consumer banking* juga menyalurkan layanan kredit dan perbankan jenis lainnya kepada nasabah seperti KPR BTN Gaess for Milenialls, KPR BTN *Rent To Own*, BTN *Property*, BTN *Smart Residence*, kredit multiguna dengan rumah sebagai jaminan dan kredit tanpa agunan. Bank BTN juga menawarkan produk pendanaan seperti Tabungan BTN Bisnis, BTN Solusi, giro, tabungan, dan deposito berjangka.

Layanan *commercial banking* Bank BTN termasuk kredit konstruksi, kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit komersial dan layanan perbankan lainnya, BTN *Property for Developer* serta kredit usaha kecil dan menengah (UKM). Bank BTN juga menawarkan produk pendanaan *commercial* seperti giro dan deposito berjangka. Bank BTN Syariah menawarkan produk jasa, pembiayaan dan pendanaan komersial maupun konsumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam seperti produk baru KPR BTN HITS (*Hijrah To Syariah*) for Milenialls.

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan di pasar modal, Bank BTN selama 3 (tiga) tahun terakhir berperan aktif antara lain sebagai Wali Amanat dalam penerbitan :

- Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap II Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung Tahap II Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VII Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020;



- Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap III Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2020;
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II BJB Tahap II Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021;
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap I Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap II Tahun 2022;
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap II Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan II Semen Indonesia Tahap I Tahun 2022;
- Obligasi I Pos Indonesia Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap I Tahun 2023;
- Obligasi VII Danareksa Tahun 2023; dan
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023.

## 6. KANTOR CABANG

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional Bank BTN terus meluas sebagai berikut :

- Jaringan perbankan konvensional :

Bank BTN telah memiliki 1 (satu) Kantor Pusat, 6 (enam) Kantor Wilayah, 80 Kantor Cabang, 537 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 3 (tiga) Kantor Fungsional, 2 (dua) Kantor Layanan Setara KCP, dan 51 Mobil Kas Keliling (MKK) didukung dengan 2.131 ATM & CRM di seluruh Indonesia, serta menyediakan akses jaringan lebih dari 80.000 jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Alto, ATM MEPS dan ATM Prima.

- Jaringan perbankan syariah :

Bank BTN Syariah memiliki 30 Kantor Cabang Syariah, 69 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 5 (lima) Kantor Kas Syariah dan 6 (enam) *Payment Point* Syariah.

## 7. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan POJK No. 19/2020, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah :

- i. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, POJK No.20/2020 dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ii. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan dan mulai berlaku efektif pada saat Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yaitu pada Tanggal Emisi;



- iii. melaksanakan ketentuan berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwalianamanatan;
- iv. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas perwalianamanatan kepada OJK.

#### **8. PENUNJUKAN, PENGGANTIAN, DAN BERAKHIRNYA TUGAS WALI AMANAT**

Sesuai dengan POJK No. 20/2020 dan Perjanjian Perwalianamanatan, penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat adalah sebagai berikut :

- i. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwalianamanatan;
- ii. Penggantian Wali Amanat dilakukan bilamana terjadi salah satu dari sebab-sebab sebagai berikut :
  - a. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Izin usaha bank umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut;
  - c. Pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat;
  - d. Wali Amanat dibubarkan oleh badan peradilan atau oleh badan resmi lainnya dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
  - e. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
  - f. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan;
  - g. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
  - h. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
  - i. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020;
  - j. Atas permintaan para Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020.
- iii. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat :
  - Obligasi telah dilunasi baik Pokok Obligasi, Bunga Obligasi termasuk Denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau Perseroan atau Perseroan jika Perseroan tidak menggunakan Agen Pembayaran;
  - Obligasi telah dikonversi seluruhnya menjadi saham;
  - tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwalianamanatan setelah tanggal jatuh tempo Pokok Obligasi;
  - setelah diangkatnya wali amanat baru.

#### **9. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING WALI AMANAT**

Informasi keuangan Bank BTN pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan pada tabel di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan laporan keuangan Bank BTN pada tanggal 31 Desember 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*member of Ernst & Young Global*) dengan opini tanpa modifikasi.





## Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2022	2021
<b>ASET</b>		
Kas dan setara kas	1.661.533	1.539.577
Giro pada Bank Indonesia	25.416.941	10.692.484
Giro pada bank lain - neto	1.470.510	1.095.100
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	12.975.955	27.901.048
Efek-efek - neto	1.720.769	2.230.905
Obligasi Pemerintah	51.964.973	46.080.298
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	1.598.325
Kredit yang diberikan - neto	252.552.651	234.119.536
Pembiayaan/piutang syariah - neto	30.054.130	26.279.995
Tagihan akseptasi	420.426	453.517
Aset pajak tangguhan - neto	2.915.428	2.430.660
Aset tetap - neto	6.353.803	5.736.791
Bunga yang masih akan diterima	10.750.302	9.173.536
Aset lain-lain	2.352.762	2.505.522
<b>TOTAL ASET</b>	<b>402.148.312</b>	<b>371.868.311</b>
<b>LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
Liabilitas segera	3.205.358	3.654.236
Simpanan dari nasabah	297.099.801	273.189.056
Simpanan dari bank Lain	136.408	66.007
Liabilitas akseptasi	420.562	454.140
Liabilitas derivatif	-	17.741
Surat-surat berharga yang diterbitkan - neto	8.652.260	12.371.708
Pinjaman yang diterima	24.821.005	22.062.291
Bunga yang masih harus dibayar	629.366	496.725
Liabilitas imbalan kerja dan lain-lain	7.248.985	6.618.300
Pinjaman subordinasi	9.158.219	8.759.744
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>351.376.683</b>	<b>327.693.592</b>
<b>DANA SYIRKAH TEMPORER</b>		
Simpanan nasabah	24.823.456	22.763.144
Simpanan dari bank Lain	38.819	4.928
<b>TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER</b>	<b>24.862.275</b>	<b>22.768.072</b>
<b>EKUITAS</b>		
Modal ditempatkan dan disetor penuh	5.295.000	5.295.000
Tambahan modal disetor	2.054.454	2.054.454
Opsi saham	2.756.575	-
Keuntungan (Kerugian) neto yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual, setelah pajak tangguhan	(1.193.252)	87.817
Pengukuran kembali Program Imbalan Pasti - setelah pajak tangguhan surplus revaluasi aset tetap	(409.657)	(458.153)
Arus kas	(49.301)	(19.983)
Pajak tangguhan surplus revaluasi aset tetap	3.508.565	3.307.991
Saldo laba telah ditentukan penggunaannya	10.745.157	8.606.555
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya	3.201.813	2.532.966
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>25.909.354</b>	<b>21.406.647</b>
<b>TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS</b>	<b>402.148.312</b>	<b>371.868.311</b>





## Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021
Pendapatan bunga dan bagi hasil	25.907.368	25.794.958
Beban bunga, bagi hasil, dan bonus	(10.910.084)	(12.803.655)
<b>Pendapatan bunga dan bagi hasil - neto</b>	<b>14.997.284</b>	<b>12.991.303</b>
Pendapatan operasional lainnya	2.274.852	2.516.683
Penyisihan kerugian penurunan nilai kerugian aset keuangan dan non-aset keuangan	(4.017.378)	(3.627.477)
<b>Beban operasional lainnya</b>	<b>(9.438.880)</b>	<b>(8.692.406)</b>
<b>Laba operasional</b>	<b>3.814.803</b>	<b>3.036.832</b>
Pendapatan (beban) bukan operasional - neto	60.887	(43.512)
Laba sebelum pajak	3.875.690	2.993.320
Beban pajak	(830.617)	(617.093)
<b>Laba tahun berjalan</b>	<b>3.045.073</b>	<b>2.376.227</b>
Pendapatan (beban) komprehensif lain	(1.368.780)	(1.204.839)
<b>Laba komprehensif selama tahun berjalan</b>	<b>1.983.756</b>	<b>1.418.802</b>
<b>Laba bersih per saham dasar (nilai penuh)</b>	<b>288</b>	<b>224</b>

### 10. ALAMAT WALI AMANAT

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :

**PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.**

Menara Bank BTN, lantai 18

Jl. Gajah Mada No. 1,

Jakarta Pusat 10130

Telepon : (62 21) 633 6789

Situs web : www.btn.co.id

**Untuk Perhatian : Wali Amanat - Financial Services Department  
Financial Institution & Capital Market Division (FICD)**



## **XIV. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

### **1. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF**

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkanya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-4) sampai dengan berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

### **2. PEMESAN YANG BERHAK**

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7.

### **3. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XVI dalam Prospektus ini, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui e-mail. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Setelah FPPO



diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, *scan* FPPO tersebut wajib disampaikan kembali baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui e-mail, kepada Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO tersebut.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPO wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila pemesanan pembelian Obligasi dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam FPPO.

#### **4. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN**

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

#### **5. MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI**

Masa Penawaran Umum Obligasi dilakukan pada tanggal **4 Juli 2023** dan **5 Juli 2023** sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB setiap harinya.

#### **6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XVI dalam Prospektus ini, pada tempat dimana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO.

#### **7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI**

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui e-mail, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

#### **8. PENJATAHAN OBLIGASI**

Penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjataan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjataan adalah tanggal **7 Juli 2023**.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjataan Manajer Penjataan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.



Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi.

#### **9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer, dengan ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal **10 Juli 2023** (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini :

##### **PT Indo Premier Sekuritas**

**Bank Permata**  
**Cabang Sudirman Jakarta**  
**No. Rekening : 0701392302**  
**A/n : PT Indo Premier Sekuritas**

##### **PT CIMB Niaga Sekuritas**

**Bank CIMB Niaga**  
**Cabang Graha CIMB Niaga**  
**No. Rekening : 800163442600**  
**A/n PT CIMB Niaga Sekuritas**

##### **PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia**

**Bank DBS Indonesia**  
**Cabang Jakarta Mega Kuningan**  
**No. Rekening : 3320132565**  
**A/n: PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia**

##### **PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.**

**Bank BRI**  
**Cabang Bursa Efek Indonesia**  
**No. Rekening : 067.101.000.645.304**  
**A/n : PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.**

##### **PT UOB Kay Hian Sekuritas**

**Bank UOB Indonesia**  
**Cabang UOB Plaza**  
**No. Rekening : 3273078256**  
**A/n : UOB Kay Hian Sekuritas,**  
**PT QQ Tower Bersama Infrastructure Tbk**

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selanjutnya wajib melakukan pembayaran kepada Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal **11 Juli 2023**.

#### **10. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK**

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal **11 Juli 2023**, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk



memindahbukukan Obligasi dari Rekening Obligasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

#### **11. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM OBLIGASI**

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan :

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu :
  - (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
  - (ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No.IX.A.2.
  
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - (i) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
  - (ii) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin (i);
  - (iii) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin (i) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
  - (iv) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
  
- c. Dalam hal Penawaran Umum Obligasi ditunda karena alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum Obligasi berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - (i) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (i) di atas, maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum Obligasi paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
  - (ii) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a poin (i) di atas, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi;
  - (iii) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Obligasi dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum diumulkannya lagi Masa Penawaran Umum Obligasi. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya;
  - (iv) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.



## **12. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN OBLIGASI**

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Obligasi. Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO. Dalam hal pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Obligasi.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Obligasi, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kepada para pemesan Obligasi untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Dalam hal pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dipenuhi kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau sejak tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum Obligasi, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.



## **XV. AGEN PEMBAYARAN**

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Jakarta Tower I, lantai 5  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

Ruang lingkup tugas KSEI sebagai Agen Pembayaran adalah melakukan pembayaran kembali Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.





## **XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Prospektus dan FPPPO dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yaitu pada tanggal 4 Juli 2023 dan 5 Juli 2023, dengan cara mengirimkan email kepada para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini :

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI**

#### **PT Indo Premier Sekuritas**

Pacific Century Place, lantai 16  
SCBD Lot 10  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Telp: (62 21) 5088 7168  
Faks: (62 21) 5088 7167  
E-mail: fixed.income@ipc.co.id  
www.indopremier.com

#### **PT CIMB Niaga Sekuritas**

Graha CIMB Niaga, lantai 25  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58  
Jakarta 12190  
Telp: (62 21) 5084 7848  
Faks: (62 21) 5084 7849  
E-mail : jk.dcmproject@cimbniaga-ibk.co.id  
www.cns.com

#### **PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia**

DBS Bank Tower, Ciputra World 1, lantai 32  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5  
Jakarta 12940  
Telp: (62 21) 3003 4945  
Faks: (62 21) 3003 4944  
E-mail: corporate.finance@dbs.com  
www.dbsvickers.com.id

#### **PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.**

Gedung Artha Graha, lantai 18 & 19  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 -53  
Jakarta 12190  
Telp: (62 21) 2924 9088  
Faks: (62 21) 2924 9150  
E-mail: FIT@trimegah.com  
www.trimegah.com

#### **PT UOB Kay Hian Sekuritas**

UOB Plaza Thamrin Nine, lantai 36  
JI M.H. Thamrin Kav. 8-10  
Jakarta 10230  
Tel : (62 21) 2993 3888  
Fax : (62 21) 3190 7608  
E-mail : uobkhindcf@uobkayhian.com  
www.uobkayhian.co.id



## **XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Indrawan Darsyah Santoso.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Jakarta, 26 Juni 2023  
No. ref.: 49/TBG-2303/VI-2023/BD

Kepada  
**Yth. PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.**  
Gedung The Convergence Indonesia, Lantai 11  
Kawasan Rasuna Epicentrum  
Jl. H.R. Rasuna Said  
Jakarta Selatan 12940 – Indonesia

**U.p.: Direksi**

**Perihal: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM  
BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN VI TOWER BERSAMA  
INFRASTRUCTURE TAHAP I TAHUN 2023**

Dengan hormat,

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan sehubungan dengan telah disampaikannya Pernyataan Pendaftaran PT Tower Bersama Infrastructure Tbk ("**Perseroan**") kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") pada tanggal 12 April 2023 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure dengan target dana yang akan dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp.20.000.000.000.000,00 ("**PUB VI**"), dan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023 ("**PUB VI Tahap I**") yang merupakan bagian dari PUB VI, dengan ini kami, kantor konsultan hukum Indrawan Darsyah Santoso dalam hal ini diwakili oleh Barli Darsyah, S.H., LL.M. yang telah (i) terdaftar sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-199/PM.2/2018 tanggal 23 Agustus 2018 dan (ii) terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dengan No. Anggota 201523, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat pengikatan No. ref.: 7/TBG-2303/III-2023/BD tertanggal 28 Maret 2023, untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum ("**Uji Tuntas**") dan membuat laporan hasil uji tuntas ("**LHUT**") serta memberikan pendapat dari segi hukum ("**Pendapat Hukum**") sehubungan dengan PUB VI Tahap I.

h.

Pendapat Hukum ini menggantikan pendapat dari segi hukum yang telah diberikan sebelumnya sebagaimana dimuat dalam surat kami No. ref.: 27/TBG-2303/IV-2023/BD tanggal 12 April 2023, No. ref.:40/TBG-2303/V-2023/BD tanggal 22 Mei 2023 dan No. ref.: 42/TBG-2303/VI-2023/BD tanggal 13 Juni 2023.

Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan informasi atas Perseroan dan Anak Perusahaan (sebagaimana didefinisikan dibawah ini) terhitung sejak dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum kami No. ref.: 14/TBG-2301/II-2023/BD tanggal 8 Februari 2023 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2023 ("**Pendapat Hukum PUB V Tahap VI**") (sebagaimana tercantum dalam Informasi Tambahan yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 14 Februari 2023 dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2023) sampai dengan tanggal 26 Juni 2023 ("**Tanggal Pendapat Hukum**").

#### A. URAIAN TRANSAKSI

Dalam rangka PUB VI Tahap I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan surat berharga bersifat utang dengan nama Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023 ("**Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I**") yang dibuktikan dengan sertifikat jumbo obligasi, dalam jumlah pokok sebesar Rp.1.500.000.000.000,00 yang akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") serta didaftarkan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"). Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I dalam 2 seri, dengan rincian sebagai berikut:

- Obligasi Seri A, dengan jumlah pokok sebesar Rp.1.000.000.000.000,00 dan tingkat bunga tetap 5,90% per tahun, dengan jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi; dan
- Obligasi Seri B, dengan jumlah pokok sebesar Rp.500.000.000.000,00 dan tingkat bunga tetap 6,25% per tahun, dengan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi.

Bunga Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I dibayarkan setiap triwulan, dimana bunga Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I pertama akan dibayarkan pada tanggal 11 Oktober 2023, sedangkan bunga Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I akan dibayarkan pada tanggal 21 Juli 2024 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 11 Juli 2026 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I tersebut pada tanggal jatuh tempo.

PUB VI Tahap I akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas,

h.

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan PT UOB Kay Hian Sekuritas yang bertindak selaku Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I, yang mana ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan lainnya terkait penjaminan emisi Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023 No. 54 tanggal 12 April 2023 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023 No. 103 tanggal 19 Mei 2023, yang seluruhnya dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan terakhir diubah dengan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023 No. 111 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I dan Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I (**"Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi"**).

Perseroan telah menunjuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (**"BTN"**) selaku Wali Amanat, yang mana ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan lainnya tentang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023 No. 53 tanggal 12 April 2023 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023 No. 102 tanggal 19 Mei 2023, yang seluruhnya dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan terakhir diubah dengan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023 No. 109 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan BTN (**"Perjanjian Perwaliamanatan"**).

Dalam rangka PUB VI Tahap I, Perseroan telah menandatangani:

1. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure No. 52 tanggal 12 April 2023 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure No. 101 tanggal 19 Mei 2023, yang seluruhnya dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan terakhir diubah dengan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure No. 108 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;

h.

2. Perjanjian Perwaliananatan;
3. Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi;
4. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 55 tanggal 12 April 2023, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan KSEI;
5. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di KSEI No. SP-059/OBL/KSEI/0323 tanggal 12 April 2023, antara Perseroan dan KSEI; dan
6. Akta Pengakuan Hutang No. 110 tanggal 26 Juni 2023, yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Sehubungan dengan pelaksanaan PUB VI Tahap I yang merupakan bagian dari PUB VI, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris yang terakhir ditanda-tangani tanggal 30 Maret 2023.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**") dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk ("**POJK No. 49/2020**"), dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Fitch Ratings Indonesia sesuai dengan Surat No. 109/DIR/RATLTR/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 perihal Peringkat Perseroan, dengan peringkat AA<sup>+</sup><sub>(idn)</sub> (*Double A Plus*).

Dana yang diperoleh dari hasil PUB VI Tahap I, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipinjamkan oleh Perseroan:

- (i) sebesar US\$99,8 juta atau setara dengan Rp1.488,5 miliar kepada PT Tower Bersama ("**TB**") untuk melakukan pembayaran seluruh pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan TB; dan
- (ii) sisanya sampai dengan sebesar-besarnya US\$0,7 juta atau setara dengan Rp10,0 miliar kepada PT Solu Sindo Kreasi Pratama ("**SKP**") untuk melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan SKP,

yang keduanya terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$325.000.000 Facility Agreement*, sebagaimana didefinisikan dalam Prospektus sehubungan dengan PUB VI Tahap I, yang akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Ltd sebagai agen.

h.



Fasilitas pinjaman revolving dalam *US\$325.000.000 Facility Agreement* dikenakan marjin bunga: (i) sebesar 1,25% per tahun di atas *Compounded Reference Rate* untuk kreditur luar negeri dan 1,33% per tahun di atas *Compounded Reference Rate* untuk kreditur dalam negeri apabila *senior leverage ratio* kurang dari 1,0:1; atau (ii) sebesar 1,40% per tahun di atas *Compounded Reference Rate* untuk kreditur luar negeri dan 1,48 % per tahun *Compounded Reference Rate* untuk kreditur dalam negeri apabila *senior leverage ratio* sama dengan atau lebih dari 1,0:1, dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Agustus 2026. Fasilitas ini digunakan oleh perusahaan anak untuk pendanaan yang bersifat umum, termasuk namun tidak terbatas pada pelunasan utang, belanja modal dan pembiayaan pengambilalihan yang diizinkan sesuai dengan perjanjian ini. Tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan para kreditur.

Per tanggal 23 Juni 2023, saldo kewajiban keuangan dalam fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$325.000.000 Facility Agreement* tercatat sebesar: (i) US\$110,3 juta atau setara Rp1.645,1 miliar untuk TB; dan (ii) US\$54,8 juta atau setara Rp817,5 miliar untuk SKP. Dengan telah dilakukan pembayaran fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$325.000.000 Facility Agreement* kepada para kreditur melalui agen, maka saldo kewajiban atas fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$325.000.000 Facility Agreement* akan menjadi sebesar: (i) US\$10,5 juta atau setara Rp156,6 miliar untuk TB; dan (ii) US\$54,1 juta atau setara Rp807,5 miliar untuk SKP. Tidak ada penalti yang dikenakan atas pembayaran ini. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 23 Juni 2023 sebesar Rp14.918/US\$1.

Mengingat kewajiban keuangan yang akan dibayarkan dalam mata uang Dolar AS, maka dana yang diperoleh dari hasil PUB VI Tahap I, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran. Dalam hal nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS mengalami penguatan sehingga terdapat sisa dana hasil PUB VI Tahap I setelah Perseroan melakukan pembayaran fasilitas pinjaman dalam *US\$325.000.000 Facility Agreement*, Perseroan akan meminjamkan dana tersebut kepada TB dan SKP, perusahaan anak, untuk digunakan sebagai modal kerja, antara lain untuk pembayaran beban keuangan.

Dana dari hasil PUB VI Tahap I akan disalurkan kepada masing-masing TB dan SKP dalam bentuk pinjaman yang akan jatuh tempo paling lambat 3 tahun pada tingkat suku bunga minimal sebesar tingkat bunga Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I, serta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum, yang akan ditentukan kemudian pada kondisi *arms' length*. Apabila dana yang dipinjamkan oleh Perseroan kepada masing-masing TB dan SKP telah dikembalikan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk pembayaran utang Perseroan dimasa mendatang.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil PUB VI Tahap I sebagaimana dimaksud diatas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih

h.

dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum rapat umum pemegang obligasi (“**RUPO**”) dan memperoleh persetujuan dari RUPO sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015, tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“**POJK No. 30/2015**”).

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 bulan kepada OJK dan Wali Amanat dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal laporan sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil PUB VI Tahap I wajib pula dipertanggungjawabkan pada rapat umum pemegang saham tahunan dan/atau disampaikan kepada OJK dan Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil PUB VI Tahap I telah direalisasikan.

Dalam hal terdapat dana hasil PUB VI Tahap I yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan sesuai dengan POJK No. 30/2015.

## **B. PENDAPAT HUKUM**

Setelah memeriksa dan meneliti LHUT, serta memperhatikan ruang lingkup dan pembatasan serta asumsi pada bagian C dan D dari Pendapat Hukum, kami memberikan Pendapat Hukum sebagai berikut:

1. Perseroan (dahulu bernama PT Banyan Mas), berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 14 tanggal 8 November 2004, yang dibuat dihadapan Dewi Himijati Tandika, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah sah menjadi badan hukum berdasarkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. C-28415 HT.01.01.TH.2004 tanggal 12 November 2004, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 2564/BH.09.03/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 18 Januari 2005, Tambahan No. 616.

Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir terhadap Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 116 tanggal 23 Mei 2022, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0038668.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022 dan didaftarkan pada Daftar

Perseroan dengan No. AHU-0106607.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022 ("**Akta No. 116/2022**"). Berdasarkan Akta No. 116/2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain, perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") Tahun 2020.

Perubahan-perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan, termasuk perubahan Anggaran Dasar terakhir Perseroan, sebagaimana dimaksud diatas telah sah dan berlaku berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam dan LK**") No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**"), Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020, tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**").

2. Anak Perusahaan adalah perseroan terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Terkait Anak Perusahaan yang telah melakukan perubahan Anggaran Dasar sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, perubahan terakhir terhadap Anggaran Dasar Anak Perusahaan tersebut telah sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan memiliki dua Anak Perusahaan yang telah memiliki status sebagai perusahaan terbuka, yaitu PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk ("**GHON**") dan PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk ("**GOLD**"). Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, GOLD dan GHON telah melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya sesuai Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 33/2014 serta POJK No. 15/2020.

3. Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utama yaitu aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

h.

Untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yaitu: konstruksi sentral telekomunikasi, instalasi telekomunikasi dan aktivitas telekomunikasi dengan kabel.

Pengungkapan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha utama serta kegiatan usaha penunjang Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.J.1 dan KBLI Tahun 2020 yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung oleh konfirmasi dari Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan sebagaimana telah diungkapkan dalam LHUT, kegiatan usaha utama yang secara aktif dijalankan saat ini oleh Perseroan adalah terkait dengan aktivitas perusahaan holding (Kode KBLI 64200) di mana Perseroan melakukan investasi atau penyertaan secara langsung maupun tidak langsung pada sejumlah 21 perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa telekomunikasi, menara, jaringan fiber optik dan pekerjaan telekomunikasi serta investasi.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dijalankan Anak Perusahaan telah sesuai dengan ruang lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar dari Anak Perusahaan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 166 tanggal 30 Oktober 2019, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0089482.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 31 Oktober 2019, didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0208896.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 31 Oktober 2019, diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0354029 tanggal 31 Oktober 2019 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0208896.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 31 Oktober 2019, struktur permodalan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar	:	Rp. 1.442.012.000.000,00
Modal ditempatkan	:	Rp. 453.139.988.900,00
Modal disetor	:	Rp. 453.139.988.900,00

Modal dasar Perseroan tersebut terbagi atas 72.100.600.000 saham, dengan nilai nominal Rp.20,00 per saham.

h.

Sebagaimana diungkapkan dalam daftar pemegang saham per tanggal 31 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		%( <sup>1</sup> )
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>72.100.600.000</b>	<b>1.442.012.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>22.656.999.445</b>	<b>453.139.988.900</b>	
Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd.	16.986.255.323	339.725.106.460	75,02%
PT Wahana Anugerah Sejahtera	2.098.321.840	41.966.436.800	9,27%
Edwin Soeryadjaya	71.481.830	1.429.636.600	0,32%
Hardi Wijaya Liong	68.359.905	1.367.198.100	0,30%
Budianto Purwahjo	5.025.000	100.500.000	0,02%
Herman Setya Budi	4.625.000	92.500.000	0,02%
Helmy Yusman Santoso	3.125.000	62.500.000	0,01%
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	3.405.427.847	68.108.556.940	15,04%
	<b>22.642.621.745</b>	452.852.434.900	100,00%
Saham yang dibeli kembali (saham treasury)	14.377.700	287.554.000	
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>22.656.999.445</b>	<b>453.139.988.900</b>	
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>49.443.600.555</b>	<b>988.872.011.100</b>	

Catatan:

(1) Perhitungan berdasarkan hak suara.

Dalam periode 2 tahun terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, tidak terdapat perubahan terhadap struktur permodalan Perseroan.

Perubahan susunan pemegang saham Perseroan dalam periode 2 tahun terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan berlaku sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan sebagaimana yang disampaikan kepada kami dalam Uji Tuntas dan telah diungkapkan dalam LHUT, pada Tanggal Pendapat Hukum, pengendali Perseroan adalah Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd. dimana Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd. dikendalikan secara tidak langsung oleh Winato Kartono dan Edwin Soeryadjaya.

Pada tanggal 1 Juni 2020, Perseroan telah melaporkan pemilik manfaat dari Perseroan, yaitu Edwin Soeryadjaya dan Winato Kartono, kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden No. h.

13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, pemilik manfaat dari Perseroan tersebut tidak mengalami perubahan. Penyampaian perubahan informasi pemilik manfaat wajib dilakukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia apabila terdapat perubahan informasi pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi.

Dalam periode 2 tahun terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, terdapat perubahan terhadap struktur permodalan dari beberapa Anak Perusahaan yaitu PT Unicom Muda Utama (“**Unicom**”) dan PT Global Patra Sinertama (“**GPS**”). Perubahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Anak Perusahaan yang bersangkutan dan berlaku sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana kami uraikan dalam LHUT.

Dalam periode 2 tahun terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, terdapat perubahan susunan pemegang saham pada beberapa Anak Perusahaan, yaitu GHON, TB, GOLD, GPS dan Unicom. Perubahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan tersebut dan berlaku sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana kami uraikan dalam LHUT.

5. Berdasarkan Akta No. 116/2022 yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0019739 tanggal 8 Juni 2022 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0106607.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

#### **Direksi**

Presiden Direktur : Herman Setya Budi  
Wakil Presiden Direktur : Hardi Wijaya Liong  
Direktur : Budianto Purwahjo  
Direktur : Helmy Yusman Santoso

#### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya  
Komisaris : Verena Lim  
Komisaris Independen : Ludovicus Sensi Wondabio  
Komisaris Independen : Heri Sunaryadi

h.

Pada Tanggal Pendapat Hukum, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi kriteria selaku anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/2014 serta sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Anak Perusahaan.

6. Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Edaran Dewan Komisaris tanggal 5 Juni 2020, dengan susunan anggota sebagai berikut:
- (i) Ludovicus Sensi Wondabio, Komisaris Independen Perseroan, sebagai Ketua Komite Audit;
  - (ii) Agustino Sunarko, sebagai anggota Komite Audit; dan
  - (iii) Agung Nugroho Soedibyo, sebagai anggota Komite Audit.

Pembentukan komite audit tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015, tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sebagaimana tercantum dalam Piagam Audit Internal Perseroan tertanggal 24 Juni 2020. Berdasarkan Surat Penugasan No. 954/TBG-SKP-00/HOS/03/XII/2014 tanggal 7 Mei 2014, yang ditanda-tangani oleh Presiden Direktur Perseroan, Supriatno Arham telah diangkat sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Pembentukan Unit Audit Internal dan penyusunan Piagam Audit Internal telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015, tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris perihal Pendirian Komite Nominasi dan Komite Remunerasi tanggal 24 Maret 2023, dengan susunan anggota sebagai berikut:

- (i) Heri Sunaryadi, Komisaris Independen, sebagai ketua merangkap anggota;
- (ii) Lie Si An, sebagai anggota; dan
- (iii) Tajudin, sebagai anggota.

Perseroan telah mengangkat Helmy Yusman Santoso sebagai Sekretaris Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Surat Penunjukan Sekretaris

h.



Perusahaan Perseroan No. 157/TBG-TBI-001/FAL/01/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010. Penunjukan Sekretaris Perusahaan tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.

7. Pada Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan memiliki penyertaan saham pada Anak Perusahaan sebagai berikut (tidak termasuk penyertaan langsung secara minoritas oleh Perseroan sebagaimana diuraikan dalam LHUT):
- (i) PT Telenet Internusa (“**TI**”), dimana Perseroan memiliki 3.582 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.17.910.000.000,00 yang mewakili 99,50% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TI;
  - (ii) PT United Towerindo (“**UT**”), dimana Perseroan memiliki 13.239 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.13.239.000.000,00 yang mewakili 99,90% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam UT. UT memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:
    - a. PT Batavia Towerindo (“**BT**”), dimana UT memiliki 899 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.899.000.000,00 yang mewakili 89,90% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam BT; dan
    - b. Unicom, dimana UT memiliki 1.256.000 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.125.600.000.000,00 yang mewakili 80,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Unicom,
  - (iii) TB, dimana Perseroan memiliki 139.049 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.139.049.000.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TB. TB memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:
    - a. PT Prima Media Selaras (“**PMS**”), dimana TB memiliki 14.999 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.1.499.900.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PMS;
    - b. PT Towerindo Konvergensi (“**TK**”), dimana TB memiliki 5.199 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.519.900.000,00 yang mewakili 99,98% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TK;
    - c. PT Mitrayasa Sarana Informasi (“**Mitrayasa**”), dimana TB memiliki 131.040 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.131.040.000.000,00 yang mewakili 70,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Mitrayasa; dan

h.

- d. PT Jaringan Pintar Indonesia ("**JPI**"), dimana TB memiliki 1.042 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.1.042.000.000,00 yang mewakili 83,36% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam JPI,
- (iv) PT Metric Solusi Integrasi ("**MSI**"), dimana Perseroan memiliki 803.769 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.803.769.000.000,00 yang mewakili 98,74% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam MSI. MSI memiliki penyertaan saham pada SKP, dimana MSI memiliki 4.400.000 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.440.000.000.000,00 yang mewakili 99,71% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam SKP;
- (v) PT Solusi Menara Indonesia ("**SMI**"), dimana Perseroan memiliki 308.412 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.308.412.000.000,00 yang mewakili 70,03% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam SMI;
- (vi) PT Tower One ("**TO**"), dimana Perseroan memiliki 113.386 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.113.386.000.000,00 yang mewakili 99,90% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TO. TO memiliki penyertaan saham pada PT Bali Telekom ("**Balikom**"), dimana TO memiliki 13.499 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.13.499.000.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Balikom;
- (vii) PT Triaka Bersama ("**Triaka**"), dimana Perseroan memiliki 459 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.459.000.000,00 yang mewakili 90,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Triaka;
- (viii) PT Menara Bersama Terpadu ("**MBT**"), dimana Perseroan memiliki 9.999 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.9.999.000.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam MBT;
- (ix) GHON, dimana Perseroan memiliki 277.337.700 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.27.733.770.000,00 yang mewakili 50,425% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam GHON. GHON memiliki penyertaan saham pada GPS, dimana GHON memiliki 118.615 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.29.653.750.000,00 yang mewakili 70,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam GPS; dan
- (x) GOLD, dimana Perseroan memiliki 652.576.009 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.65.257.600.900,00 yang mewakili 51,09% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam GOLD. GOLD memiliki penyertaan saham pada PT Permata Karya Perdana ("**PKP**"), dimana GOLD memiliki 275.821 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.275.821.000.000,00

yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PKP.

Penyertaan saham oleh Perseroan pada Anak Perusahaan tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta Anggaran Dasar Anak Perusahaan tersebut, dan berlaku sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan saham-saham tersebut tidak sedang dibebankan sebagai jaminan dan tidak sedang dalam sengketa yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material terhadap kedudukan, peranan dan/atau kelangsungan usaha dari Perseroan dan Anak Perusahaan. Pada Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan juga memiliki penyertaan saham pada anak perusahaan di luar negeri yaitu TBG Global Pte. Ltd. ("**TBG Global**"), suatu entitas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura, dimana Perseroan memiliki 13.300.000 saham dengan nilai nominal keseluruhan US\$13.300.000 yang mewakili 100% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TBG Global. TBG Global sebelumnya telah memiliki penyertaan saham pada Tower Bersama Singapore Pte. Ltd. ("**TBS**"), suatu entitas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura, yang mana saat ini TBS telah selesai menjalani proses pembubaran dan likuidasi sehingga TBS tidak lagi memiliki eksistensi sebagai badan hukum berdasarkan pendapat hukum dari konsultan hukum asing yang berkompentensi sebagaimana disampaikan dalam Uji Tuntas. Berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan sebagaimana yang disampaikan kepada kami dalam Uji Tuntas, Perseroan menyatakan bahwa pembubaran dan likuidasi TBS tersebut tidak berdampak secara material bagi kelangsungan usaha Perseroan.

8. Perseroan dan Anak Perusahaan telah memperoleh perizinan material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perizinan material tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, namun terdapat perizinan untuk sebagian menara telekomunikasi dari Anak Perusahaan yang saat ini belum lengkap dan masih diproses permohonannya pada lembaga terkait yang berwenang, termasuk Izin Mendirikan Bangunan ("**IMB**")/Persetujuan Bangunan Gedung ("**PBG**") atau Izin Mendirikan Bangunan Menara ("**IMBM**"). Jumlah menara telekomunikasi yang belum lengkap perizinan IMB/PBG atau IMBM tersebut hanya mewakili sebagian kecil dari keseluruhan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh Anak Perusahaan.

Berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan sebagaimana yang disampaikan kepada kami dalam Uji Tuntas dan telah diungkapkan dalam LHUT, Perseroan berkeyakinan bahwa belum selesainya proses permohonan IMB/PBG atau IMBM tersebut tidak memiliki dampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha maupun kondisi keuangan serta kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan yang bersangkutan.

h.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“**UU Cipta Kerja**”) yang antara lain telah merubah Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung serta telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“**PP No. 16/2021**”), IMB telah diganti dengan PBG yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Mengacu pada ketentuan peralihan dari PP No. 16/2021, bangunan gedung yang telah memperoleh perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum berlakunya PP No. 16/2021, izinnya dinyatakan masih tetap berlaku. Oleh karena itu, IMB yang telah diterbitkan sebelumnya oleh pemerintah daerah/kota kepada Anak Perusahaan terkait menara telekomunikasi mereka sebelum berlakunya PP No. 16/2021 masih tetap berlaku dan kewajiban untuk memperoleh PBG dimulai setelah IMB tersebut telah berakhir masa berlakunya.

Terhadap Anak Perusahaan yang melakukan pembangunan menara telekomunikasi tanpa memperoleh PBG, Anak Perusahaan bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif berupa, antara lain, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan bangunan, penghentian sementara atau tetap pada tahapan kegiatan pembangunan berdasarkan ketentuan PP No. 16/2021.

9. Kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan (kecuali MBT yang tidak memiliki harta kekayaan material) untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum dan harta kekayaan tersebut tidak sedang dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, dan tidak sedang dalam sengketa yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material terhadap kedudukan, peranan dan/atau kelangsungan usaha dari Perseroan dan Anak Perusahaan. Namun demikian, beberapa Anak Perusahaan telah memberikan jaminan perusahaan yaitu Triaka, MSI, UT, TI, TB, Balikom, TO, BT, PMS, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT dengan menandatangani Akta Perjanjian Penanggungungan Perusahaan dan Ganti Rugi No. 36 tanggal 16 Mei 2023, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dengan mana mereka bertindak sebagai para penanggung yang: secara bersama-sama dan masing-masing secara tidak bersyarat dan tidak dapat ditarik kembali, menanggung, sebagai kewajiban berkelanjutan, pembayaran pada saat jatuh tempo dan tepat waktu atas kewajiban yang dijamin yang atau setiap saat jatuh tempo, terutang atau ditimbulkan oleh masing-masing obligor terhadap pihak pembiayaan berdasarkan dokumen pembiayaan yang diatur dalam *US\$325.000.000 Facility Agreement*, dan secara tanggung renteng memberikan ganti rugi secara penuh kepada agen dan pihak

pembiayaan sebagai akibat dari apabila para obligor gagal untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan dokumen pembiayaan tersebut.

Berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan sebagaimana yang disampaikan kepada kami dalam Uji Tuntas dan telah diungkapkan dalam LHUT, Perseroan menyatakan bahwa dalam hal tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pembayaran dimaksud dan kemudian dilakukan eksekusi terhadap jaminan perusahaan tersebut, maka hal tersebut tidak akan berdampak secara material bagi kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan tersebut diatas.

10. Berdasarkan pemeriksaan kami, Perseroan dan beberapa Anak Perusahaan (yaitu PKP, GHON, TI, Triaka, UT, TB, Mitrayasa, BT, PMS, TK, SMI dan Balikom) telah menutup asuransi atas harta kekayaannya yang bernilai material dan jangka waktu asuransi tersebut masih berlaku, dan jumlah pertanggungannya memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan berdasarkan konfirmasi dalam Surat Pernyataan dari Perseroan dan Anak Perusahaan tersebut. Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, sebagian Anak Perusahaan lainnya yaitu SKP dan JPI sedang melakukan perpanjangan asuransi sedangkan MSI, TO, MBT, Unicom, GPS dan GOLD tidak melakukan penutupan asuransi.
11. Perseroan dan Anak Perusahaan (selain TO, TK, MSI, MBT dan JPI yang tidak memiliki tenaga kerja) telah mentaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang ketenagakerjaan kecuali Unicom dan GPS yang belum memiliki peraturan perusahaan yang telah disahkan sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja ("**UU Ketenagakerjaan**"). Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, perusahaan yang memiliki karyawan 10 orang atau lebih diwajibkan membuat peraturan perusahaan yang berlaku setelah mendapat pengesahan dari menteri ketenagakerjaan atau pejabat berwenang yang ditunjuk. Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000,00 dan paling banyak Rp.50.000.000,00. GPS juga belum menyampaikan pelaporan ketenagakerjaan tahunan sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, Kelalaian atas kewajiban tersebut dapat dikenakan pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000,00.

Pada Tanggal Pendapat Hukum, (i) TI memiliki satu tenaga kerja asing dan telah memiliki perizinan terkait penggunaan tenaga kerja asing tersebut; dan (ii) GOLD dan GPS memiliki karyawan kurang dari 10 orang sehingga tidak diwajibkan secara hukum untuk memiliki peraturan perusahaan.

h.

12. Perjanjian-perjanjian material dari Perseroan termasuk perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PUB VI Tahap I yang telah ditanda-tangani oleh Perseroan, sebagaimana kami uraikan dalam LHUT, berlaku dan mengikat terhadap Perseroan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian-perjanjian tersebut yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan para pemegang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I dan pemegang saham publik Perseroan, dan menghalangi rencana dan penggunaan dana dari PUB VI Tahap I.

Pada Tanggal Pendapat Hukum, perjanjian-perjanjian material yang telah ditanda-tangani oleh Anak Perusahaan sebagaimana kami uraikan dalam LHUT berlaku dan mengikat terhadap Anak Perusahaan tersebut berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian-perjanjian Anak Perusahaan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan para pemegang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I dan pemegang saham publik Perseroan, atau menghalangi rencana dan penggunaan dana dari PUB VI Tahap I.

13. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan BTN dan berdasarkan pemeriksaan kami, Perseroan tidak memiliki perjanjian kredit dengan BTN, yang akan bertindak selaku Wali Amanat dalam PUB VI Tahap I.
14. Perseroan telah memenuhi kriteria sebagai pihak yang dapat melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014. Selanjutnya, Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I yang akan diterbitkan oleh Perseroan telah memenuhi ketentuan persyaratan Efek dimana sesuai POJK No. 36/2014 dan POJK No. 49/2020 dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Fitch Ratings Indonesia sesuai dengan Surat No. 109/DIR/RATLTR/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 perihal Peringkat Perseroan, dengan peringkat AA<sub>(idn)</sub> (*Double A Plus*).
15. Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak pemegang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

h.

- Ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan telah memuat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan berdasarkan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020, tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
16. SKP merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan secara tidak langsung melalui MSI dengan penyertaan saham sebesar 99,71% pada SKP (dimana Perseroan merupakan pemegang 98,74% saham secara langsung dalam MSI serta TB juga merupakan pemegang 1,26% saham secara langsung dalam MSI), dan TB merupakan perusahaan yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan dengan penyertaan saham sebesar 99,99% pada TB, sehingga penyaluran dana hasil PUB VI Tahap I dari Perseroan kepada masing-masing TB dan SKP dalam bentuk pinjaman merupakan suatu transaksi afiliasi antara Perseroan dengan perusahaan terkendali yang tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana didefinisikan dan diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”) serta dikonfirmasi oleh Surat Pernyataan Perseroan. Perseroan tidak diwajibkan untuk melakukan keterbukaan informasi dengan tata cara yang diatur pada umumnya dalam ketentuan terkait transaksi afiliasi dalam POJK No. 42/2020. Namun demikian, Perseroan wajib melaporkan transaksi afiliasi tersebut kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja kedua setelah tanggal transaksi afiliasi berdasarkan POJK No. 42/2020.
  17. Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Uji Tuntas dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan dan Anak Perusahaan sebagaimana terlampir dalam LHUT, sampai dengan tanggal ditandatanganinya Surat Pernyataan tersebut, Perseroan dan Anak Perusahaan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material terhadap kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan.
  18. Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Uji Tuntas dan didukung oleh Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan dan Anak Perusahaan, sebagaimana terlampir dalam LHUT, sampai dengan tanggal ditandatanganinya Surat Pernyataan tersebut, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk



perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta tidak pernah dinyatakan pailit atau terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, dan tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material terhadap kedudukan, peranan dan/atau kelangsungan usaha dari Perseroan dan Anak Perusahaan.

### C. RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN PENDAPAT HUKUM

Pelaksanaan Uji Tuntas, serta penyusunan LHUT dan Pendapat Hukum dilakukan dengan ruang lingkup dan pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga Pendapat Hukum tidak berlaku atau tidak dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
2. Pendapat Hukum disusun khusus atas keadaan Perseroan dan perusahaan-perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang saham-sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dimana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut (i) lebih dari 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut atau (ii) 50% atau kurang dari seluruh saham yang telah ditempatkan akan tetapi Perseroan mengendalikan perusahaan-perusahaan tersebut, dan laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini meliputi ("**Anak Perusahaan**"):
  - (i) SKP;
  - (ii) PMS;
  - (iii) UT;
  - (iv) TO;
  - (v) Triaka;
  - (vi) TK;
  - (vii) TI;
  - (viii) Balikom;
  - (ix) Mitrayasa;
  - (x) MBT;
  - (xi) MSI;
  - (xii) BT;
  - (xiii) TB;
  - (xiv) SMI;
  - (xv) JPI;
  - (xvi) GHON;
  - (xvii) GOLD;

h.

- (xviii) PKP;
- (xix) GPS; dan
- (xx) Unicom.

Perseroan memiliki anak perusahaan yang didirikan diluar yurisdiksi Negara Republik Indonesia, dan informasi yang diperoleh dalam Uji Tuntas terkait anak perusahaan tersebut didasarkan kepada pendapat hukum yang dikeluarkan oleh konsultan hukum asing yang berkompotensi.

3. Kami melaksanakan Uji Tuntas terhadap Perseroan dan Anak Perusahaan selama periode terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum PUB V Tahap VI sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.
4. Pendapat Hukum disusun berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh dari Perseroan dan Anak Perusahaan serta pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau karyawan dari masing-masing Perseroan dan Anak Perusahaan yang hasilnya termuat dalam LHUT, yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum.
5. Penyusunan LHUT dan Pendapat Hukum dilakukan dengan memperhatikan Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021.
6. Pendapat Hukum ini diberikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Sebagaimana digunakan dalam Pendapat Hukum, istilah "hukum Indonesia" atau "peraturan perundang-undangan yang berlaku" berarti undang-undang, peraturan, keputusan atau perangkat hukum lainnya yang diterbitkan, diumumkan dan tersedia bagi publik pada Tanggal Pendapat Hukum.
7. Peraturan yang terkait dengan perizinan umumnya dan menara telekomunikasi khususnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan dan Anak Perusahaan mendirikan dan mengoperasikan menara telekomunikasi pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
8. Pendapat Hukum dibatasi sebagai kajian dari segi hukum, dan kami tidak melakukan penelaahan ataupun mengemukakan pendapat atau menganalisa atau memberikan penilaian atas masalah dari sudut non-hukum, termasuk dari segi penilaian bisnis, komersial, operasional, akuntansi, pajak dan lain sebagainya.
9. Seluruh ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana dimuat dalam LHUT menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ruang lingkup dan pembatasan dalam Pendapat Hukum.

h.

#### D. ASUMSI

Pendapat Hukum diberikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Semua tanda tangan adalah asli, semua dokumen yang diserahkan kepada kami sebagai asli adalah otentik, dan bahwa salinan, turunan atau fotokopi dari dokumen yang diberikan kepada kami adalah sama dengan dokumen aslinya dan asli dokumen-dokumen tersebut adalah otentik.
2. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan, menerima laporan, maupun persetujuan untuk kepentingan, Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah memeriksa kelengkapan perizinan, pendaftaran, pencatatan, dan persetujuan termasuk lampiran-lampiran yang diwajibkan.
3. Semua persetujuan, perizinan, dan pemberitahuan, serta penerimaan laporan dan pendaftaran yang diperoleh oleh Perseroan dan Anak Perusahaan telah diterbitkan secara sah oleh instansi Pemerintah yang berwenang.
4. Terkait setiap dokumen dimana Perseroan dan Anak Perusahaan menjadi pihak, yang diatur atau tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di luar yurisdiksi Republik Indonesia, maka dokumen dimaksud berlaku secara sah dan mengikat Perseroan dan Anak Perusahaan tersebut sesuai dengan hukum di luar yurisdiksi Republik Indonesia tersebut, serta dokumen tersebut masih tetap berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum dan dokumen tersebut tidak melanggar ketentuan yang relevan dari hukum di luar yurisdiksi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud.
5. Setiap pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewenangan, kemampuan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat berdasarkan Anggaran Dasar, hukum Negara Republik Indonesia dan/atau hukum negara lain yang mengatur pihak tersebut.
6. Seluruh dokumen, pernyataan, klarifikasi, dan keterangan baik lisan maupun tulisan dan penegasan yang diberikan oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris maupun karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas adalah benar, akurat, lengkap, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.
7. Penandatanganan perjanjian-perjanjian oleh pihak yang mewakili Perseroan dan Anak Perusahaan dengan pihak ketiga dilakukan berdasarkan itikad baik, tanpa paksaan, dan pertimbangan komersial yang wajar.

h.

8. Semua dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan adalah lengkap dan benar, dibuat secara sah, tidak pernah dibatalkan atau dinyatakan hapus dan atau batal demi hukum dan tidak mengalami perubahan, penambahan, penggantian atau pembaharuan.
9. Tidak ada dokumen yang bersifat material sehubungan dengan isi dari LHUT yang tidak diperlihatkan, diberikan atau disediakan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan untuk keperluan Uji Tuntas, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang apabila dokumen tersebut diperlihatkan, diberikan, ditemukan dan diperiksa sampai dengan batas terakhir pelaksanaan Uji Tuntas akan menyebabkan (i) isi LHUT dan Pendapat Hukum menjadi tidak akurat atau kurang lengkap, atau (ii) isi LHUT dan Pendapat Hukum harus disesuaikan.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

*[Bagian ini sengaja untuk dikosongkan]*

h.

Jakarta, 26 Juni 2023  
No. ref.: 49/TBG-2303/VI-2023/BD

Hormat kami,  
**INDRAWAN DARSYAH SANTOSO**



Barli Darsyah S.H., LL.M.  
STTD: No. STTD.KH-199/PM.2/2018

*Tembusan: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon*

Halaman ini sengaja dikosongkan



## **XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN**

Berikut ini adalah salinan Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak Perseroan.



Halaman ini sengaja dikosongkan

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER  
ABOUT RESPONSIBILITY TO  
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2022 AND 2021  
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND SUBSIDIARIES**

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

We, the undersigned :

1. Nama : Herman Setya Budi  
Alamat kantor : The Convergence Indonesia Lt. 11,  
Kawasan Rasuna Epicentrum,  
Jl. HR Rasuna Said,  
Jakarta Selatan 12940

1. Name : Herman Setya Budi  
Office address : The Convergence Indonesia Lt. 11,  
Kawasan Rasuna Epicentrum,  
Jl. HR Rasuna Said,  
Jakarta Selatan 12940

Alamat Domisili : Mega Kebon Jeruk F/26  
sesuai KTP atau RT. 005, RW. 001  
kartu identitas Joglo, Kembangan  
lain Jakarta Barat

Domicile as : Mega Kebon Jeruk F/26  
stated in ID RT. 005, RW. 001  
Card or other Joglo, Kembangan  
identity Jakarta Barat

Nomor Telepon : +62 21 2924 8900

Phone Number : +62 21 2924 8900

Jabatan : Presiden Direktur

Position : President Director

2. Nama : Helmy Yusman Santoso  
Alamat kantor : The Convergence Indonesia Lt. 11,  
Kawasan Rasuna Epicentrum,  
Jl. HR Rasuna Said,  
Jakarta Selatan 12940

2. Name : Helmy Yusman Santoso  
Office address : The Convergence Indonesia Lt. 11,  
Kawasan Rasuna Epicentrum,  
Jl. HR Rasuna Said,  
Jakarta Selatan 12940

Alamat Domisili : Jl. Gedong Sawah IV/2  
sesuai KTP atau RT. 002, RW. 001, Pabaton  
kartu identitas Bogor Tengah  
lain Bogor

Domicile as : Jl. Gedong Sawah IV/2  
stated in ID RT. 002, RW. 001, Pabaton  
Card or other Bogor Tengah  
identity Bogor

Nomor Telepon : +62 21 2924 8900

Phone Number : +62 21 2924 8900

Jabatan : Direktur

Position : Director

Menyatakan bahwa :

State that :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perusahaan.
2. Laporan Keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum/standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
3.
  - a. Semua informasi dalam laporan keuangan perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
  - b. Laporan keuangan perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.

1. We are responsible for the preparation and presentation of the Company's Financial Statements.
2. The Company's Consolidated Financial Statements have been prepared in accordance with accounting principles generally accepted in Indonesia.
3.
  - a. All information has been fully and correctly disclosed in the Company's Financial Statements.
  - b. The Company's Financial Statements do not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts, and
4. We are responsible for the Company's internal control systems.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been prepared base on the facts.

Jakarta, 7 Juni 2023

Jakarta, 7 June 2023

Presiden Direktur / President Director

Direktur / Director



(Herman Setya Budi)

(Helmy Yusman Santoso)

**PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk**

Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11

Kawasan Rasuna Epicentrum

Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940

Telp : +62 21 2924 8900

Fax : +62 21 2157 2015

*gll.*

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued  
in Indonesian Language

Ekshibit A

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Exhibit A

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION  
31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	2022	Catatan/ Notes	2021	
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
<b>ASET LANCAR</b>				<b>CURRENT ASSETS</b>
Kas dan setara kas	966.386	2h,4	629.125	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - pihak ketiga	270.041	2i,5	538.715	Trade receivables - third parties
Piutang lain-lain	38.993	2i,6	75.506	Other receivables
Pendapatan yang masih harus diterima	721.057	2f,7	500.283	Accrued revenue
Persediaan	621.652	2j,8	226.408	Inventories
Uang muka dan beban dibayar di muka	108.365	2k,9	81.336	Advance payments and prepaid expenses
Pajak dibayar di muka	839.310	2p,18a	969.880	Prepaid taxes
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>3.565.804</b>		<b>3.021.253</b>	<b>Total Current Assets</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				<b>NON-CURRENT ASSETS</b>
Aset tetap				Property and equipment
(setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 276.498 dan Rp 239.221 masing-masing pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021)	34.427.639	2l,10	33.637.904	(net of accumulated depreciation of Rp 276,498 and Rp 239,221 as of 31 December 2022 and 31 December 2021, respectively)
Properti investasi - nilai wajar	465.478	2m,11	447.045	Investment properties - fair value
Aset hak guna				Right of use assets
(setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 2.204.317 dan Rp 1.787.139 masing-masing pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021)	3.667.843	2o,12	3.463.007	(net of accumulated depreciation of Rp 2,204,317 and Rp 1,787,139 as of 31 December 2022 and 31 December 2021, respectively)
Uang jaminan	1.023	13	1.605	Refundable deposits
Aset keuangan derivatif	563.351	2f,14	900.363	Derivative financial assets
Goodwill	390.368	2n,35	381.189	Goodwill
Aset tidak lancar lainnya	58.462	2f,15	18.069	Other non-current assets
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>39.574.164</b>		<b>38.849.182</b>	<b>Total Non-Current Assets</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>43.139.968</b>		<b>41.870.435</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued  
in Indonesian Language

Ekshibit A/2

Exhibit A/2

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION  
31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	2022	Catatan/ Notes	2021	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>				<b>CURRENT LIABILITIES</b>
Utang usaha - pihak ketiga	255.607	2f,16	37.435	Trade payables - third parties
Utang lain-lain	23.442	2f,17	12.227	Other payables
Utang pajak	123.066	2p,18b	169.374	Taxes payable
Pendapatan yang diterima di muka	1.103.585	19	1.316.692	Unearned income
Beban masih harus dibayar	974.904	2f,20	1.107.497	Accrued expenses
Liabilitas sewa - bagian yang jatuh tempo				Lease liabilities -
dalam waktu satu tahun	126.567	2o,23	174.858	current portion
Surat utang bagian jangka pendek	5.914.573	2f,22	5.465.457	Notes - current portion
Pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh				Long-term loans -
tempo dalam waktu satu tahun				current portion
Pihak ketiga	206.438	2f,21	148.885	Third parties
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>8.728.182</b>		<b>8.432.425</b>	<b>Total Current Liabilities</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				<b>NON-CURRENT LIABILITIES</b>
Liabilitas sewa - setelah dikurangi bagian yang				Lease liabilities -
jatuh tempo dalam satu tahun	533.136	2o,23	503.822	non-current portion
Provisi jangka panjang	107.400	2l,24	-	Long-term provision
Surat utang - setelah dikurangi bagian yang				Notes -
jatuh tempo dalam satu tahun	18.678.155	2f,22	17.676.845	net of current portion
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi				Long-term loans -
bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun				net of current portion
Pihak ketiga	4.160.396	2f,21	5.455.157	Third parties
Cadangan imbalan pasca-kerja	12.316	2q,32	12.948	Provision for post-employment benefits
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>23.491.403</b>		<b>23.648.772</b>	<b>Total Non-Current Liabilities</b>
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>32.219.585</b>		<b>32.081.197</b>	<b>Total Liabilities</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued  
in Indonesian Language

Ekshibit A/3

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Exhibit A/3

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION  
31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	2022	Catatan/ Notes	2021	
<b>EKUITAS</b>				<b>EQUITY</b>
Modal saham				Share capital
Pada 31 Desember 2022 dan 2021				As of 31 December 2022 and 2021
nilai nominal masing-masing Rp 20 (nilai penuh) per saham.				par value Rp 20 (full amount) per share, respectively.
Modal dasar sebanyak 72.100.600.000 saham				Authorized capital of 72,100,600,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh:				Issued and fully paid-in capital:
Pada 31 Desember 2022 dan 2021				As of 31 December 2022 and 2021
masing-masing sebanyak				are 22,656,999,445
22.656.999.445 saham	453.140	2r, 25	453.140	shares, respectively
Saham treasuri	( 766.238)	2u, 26	( 1.028.268)	Treasury stock
Tambahan modal disetor - bersih	1.594.466	2t, 27	( 641.456)	Additional paid-in capital - net
Penghasilan komprehensif lain	4.465.195	28	7.062.417	Other comprehensive income
Saldo laba				Retained earnings
Cadangan wajib	63.100	34	62.600	Statutory reserves
Belum ditentukan penggunaannya	4.519.772	34	3.364.348	Unappropriated
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	10.329.435		9.272.781	Total equity attributable to equity holder of the parent company
Kepentingan non-pengendali	590.948	36	516.457	Non-controlling interest
Jumlah Ekuitas	10.920.383		9.789.238	Total Equity
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>43.139.968</b>		<b>41.870.435</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued  
in Indonesian Language

Ekshibit B

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN LABA RUGI DAN  
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Exhibit B

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND  
OTHER COMPREHENSIVE INCOME  
FOR THE YEAR ENDED  
31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	2022	Catatan/ Notes	2021	
PENDAPATAN	6.524.369	2w,29	6.179.584	REVENUE
BEBAN POKOK PENDAPATAN	1.783.325	30	1.472.780	COST OF REVENUE
LABA KOTOR	4.741.044		4.706.804	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	458.573	2w,31	400.889	OPERATING EXPENSES
LABA DARI OPERASI	4.282.471		4.305.915	INCOME FROM OPERATIONS
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN				OTHER INCOME (CHARGES)
Kenaikan nilai wajar atas properti investasi	15.656	2m,11	57.638	Increase of fair value of investment properties
Pendapatan bunga	13.785		12.156	Interest income
Laba selisih kurs - Bersih	1.779		1.382	Gain on foreign exchange - Net
Beban kerugian kredit ekspektasian - aset keuangan	( 24.997)	5,6,7	( 2.271)	Expected credit losses expense - financial assets
Beban keuangan - Pinjaman dan surat utang	( 1.699.072)		( 1.925.209)	Financial expenses - long-term loans and notes
Beban keuangan - Lainnya	( 129.780)	2f,33	( 210.836)	Financial expenses - Others
Lainnya - Bersih	( 54.643)		( 18.304)	Others - Net
Beban Lain-lain - Bersih	( 1.877.272)		( 2.085.444)	Other Charges - Net
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN	2.405.199		2.220.471	PROFIT BEFORE FINAL TAX AND INCOME TAX
Beban pajak final	( 493.433)	2p,18c	( 284.507)	Final tax expense
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1.911.766		1.935.964	PROFIT BEFORE INCOME TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN		2p,18c,d		INCOME TAX EXPENSES
Kini	( 222.325)		( 285.346)	Current
Tangguhan	-		( 49.265)	Deferred
Beban Pajak Penghasilan - Bersih	( 222.325)		( 334.611)	Income Tax Expenses - Net
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	1.689.441		1.601.353	NET PROFIT FOR THE CURRENT YEAR

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued  
in Indonesian Language

Ekshibit B/2

Exhibit B/2

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN LABA RUGI DAN  
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER  
COMPREHENSIVE INCOME  
FOR THE YEAR ENDED  
31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	2022	Catatan/ Notes	2021	
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	1.689.441		1.601.353	<b>NET PROFIT FOR THE CURRENT YEAR</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>				<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME</b>
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				<i>Items that will not be reclassified to profit or loss</i>
Defisit revaluasi	( 1.407.805)	2l,10	( 151.875)	<i>Revaluation deficit</i>
Kerugian aktuarial	( 722)	2q,32	( 19.662)	<i>Actuarial loss</i>
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				<i>Items that may be reclassified to profit or loss</i>
Selisih translasi				<i>Exchange differences on translation</i>
mata uang asing	72.043	2e,28	( 86)	<i>of foreign operations</i>
Perubahan lindung nilai arus kas	( 904.151)	28	( 67.365)	<i>Changes in value of cash flow hedges</i>
<b>JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	( 551.194)		1.362.365	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE CURRENT YEAR</b>
<b>Laba bersih yang diatribusikan kepada:</b>				<b>Net profit attributable to:</b>
Pemilik entitas induk	1.637.579		1.548.975	<i>Equity holder of the parent company</i>
Kepentingan non-pengendali	51.862	36	52.378	<i>Non-controlling interest</i>
<b>Jumlah</b>	1.689.441		1.601.353	<b>Total</b>
<b>Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:</b>				<b>Total comprehensive income (loss) attributable to:</b>
Pemilik entitas induk	( 625.646)		1.311.014	<i>Equity holder of the parent company</i>
Kepentingan non-pengendali	74.452	36	51.351	<i>Non-controlling interest</i>
<b>Jumlah</b>	( 551.194)		1.362.365	<b>Total</b>
<b>LABA BERSIH PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM BIASA ENTITAS INDUK (nilai penuh)</b>	73,44	25	74,25	<b>BASIC EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO THE EQUITY HOLDER OF PARENT COMPANY (full amount)</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole



These Consolidated Financial Statements are Originally Issued  
in Indonesian Language

Ekshibit C

Exhibit C

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income				Saldo laba/ Retained earnings		Keuntungan pengendali/ Non- controlling interest	Jumlah ekuitas konsolidasi/ Total consolidated equity			
	Tambahan modal disetor - Berily/ Additional paid-in capital - Net	Saham treasuri/ Treasury stock	Surplus revaluasi/ Revaluation surplus	Cadangan lindung nilai arus kas/ Cash flows hedging reserves	Selisih translasi atas mata uang asing/ Difference translation of foreign currency	Kerugian aktual/ Actual loss			Cadangan wajib/ Statutory reserves	Jumlah ekuitas konsolidasi/ Total consolidated equity	
Saldo per 1 Januari 2022	453.140	( 644.456)	7.318.223	( 179.584)	62.395	( 13.827)	62.600	9.272.781	516.457	9.789.238	Balance as of 1 January 2022
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	1.637.579	51.862	1.689.441	Net profit for the current year
Debitasi revaluasi (Catatan 10)	-	-	( 1.430.159)	-	-	-	-	( 1.430.159)	22.354	( 1.407.805)	Revaluation deficit (Note 10)
Selisih penyusutan nilai wajar dengan biaya perolehan	-	-	( 333.997)	-	-	-	-	333.997	-	-	Difference in fair value depreciation with acquisition cost
Cadangan lindung nilai arus kas (Catatan 28a)	-	-	-	( 904.433)	-	( 676)	-	( 904.433)	676	( 722)	Cash flows hedging reserves (Note 28a)
Kerugian aktuaria (Catatan 32)	-	-	-	-	-	-	-	-	282	( 904.151)	Actuarial loss (Note 32)
Selisih translasi atas mata uang asing (Catatan 28b)	-	-	-	-	-	-	-	( 676)	( 46)	( 722)	Exchange differences on translation of foreign operations (Note 28b)
Tambahan kepentingan non-pengendali dari akuisisi entitas anak	-	-	-	-	72.043	-	-	72.043	-	72.043	Additional on controlling interest from acquisition of subsidiary
Penjualan saham treasuri (Catatan 26)	-	-	-	-	-	-	-	-	27.401	27.401	Sale of treasury stock (Note 26)
Saham treasuri (Catatan 26)	-	2.235.826	-	-	-	-	-	2.235.826	-	2.235.826	Treasury stock (Note 26)
Cadangan wajib (Catatan 34)	-	-	-	-	-	-	500	500	-	262.030	Statutory reserves (Note 34)
Pembagian dividen tunai - entitas anak (Catatan 34)	-	-	-	-	-	-	-	-	27.266	( 27.266)	Cash dividends - subsidiaries (Note 34)
Pembagian dividen tunai (Catatan 34)	-	-	-	-	-	-	-	815.652	-	815.652	Cash dividends (Note 34)
Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali (Catatan 27)	-	96	-	-	-	-	-	96	-	-	Difference arising from transaction with non-controlling interest (Note 27)
Saldo per 31 Desember 2022	453.140	1.594.466	5.554.067	( 1.084.017)	9.648	( 14.503)	63.100	4.519.772	590.948	10.920.383	Balance as of 31 December 2022

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

EKshibit C/2

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued  
in Indonesian Language

EKshibit C/2

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income					Saldo laba/ Retained earnings		Jumlah ekuitas yang distribusikan kepada pemilik entitas induk/ Total equity attributable to equity holder of parent company			Kepentingan non- pengendali/ Non- controlling interest		Jumlah ekuitas konsolidasian/ Total consolidated equity	
	Tambahan modal disetor - Bersih/ Additional paid-in capital - Net	Saham treasury/ Treasury stock	Surplus revaluasi/ Revaluation surplus	Cadangan nilai ane kas/ Cash flows hedging reserves	Salah transaksi mata uang asing/ Difference transition of foreign currency	Keuntungan aktual/ Actual gain	Cadangan wajib/ Statutory reserves	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated	equity holder of parent company	Non- controlling interest	consolidated equity			
Saldo per 1 Januari 2021	453.340 (	520.500 (	1.028.288)	7.758.471 (	110.819 (	62.309)	5.845	62.100	2.140.322	8.709.682	594.156	9.303.838	Balance as of 1 January 2021	
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	1.548.975	1.548.975	52.378	1.601.353	Net profit for the current year	
Surplus revaluasi (Catatan 10)	-	-	(	150.479)	-	-	-	-	-	150.479 (	1.386)	151.879)	Revaluation surplus (Note 10)	
Selish penyusutan nilai wajar dengan biaya perolehan	-	-	-	365.749)	-	-	-	-	365.745	-	-	-	Difference in fair value depreciation with acquisition cost	
Cadangan lindung nilai arus kas (Catatan 28b)	-	-	-	-	(	67.751)	-	-	-	(	67.751)	(	Cash flows hedging reserves (Note 28b)	
Keuntungan aktual (Catatan 32)	-	-	-	-	-	(	19.645)	-	-	(	19.645)	(	Actual gain (Note 32)	
Selish transaksi atas mata uang asing (Catatan 28b)	-	-	-	-	-	86)	-	-	-	-	(	86)	Difference transition of foreign currency (Note 28b)	
Selish nilai transaksi restrukturisasi entitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Difference arising from restructuring transactions of entity under common control (Note 27)	
restrukturisasi entitas	-	-	-	66.276 (	1.014)	-	27)	-	-	-	114.800)	(	Common control (Note 27)	
perpendai (Catatan 27)	-	-	-	-	-	-	-	500 (	500)	-	-	-	Statutory reserves (Note 34)	
Cadangan wajib (Catatan 34)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.248)	(	Cash dividends - subsidiaries (Note 34)	
Pembagian dividen tunai - entitas anak (Catatan 34)	-	-	-	-	-	-	-	(	692.159)	(	692.159)	(	Cash dividends (Note 34)	
Saldo per 31 Desember 2021	453.340 (	641.456)	1.028.288)	7.318.223 (	179.589)	62.389)	13.827)	62.600	3.364.348	9.272.781	516.457	9.789.238	Balance as of 31 December 2021	

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued  
in Indonesian Language

Ekshibit D

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Exhibit D

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS  
FOR THE YEAR ENDED  
31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	2022	Catatan/ Notes	2021	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>				<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan kas dari pelanggan	6.364.547		6.554.602	Cash received from customers
Penerimaan jasa giro dan bunga deposito	13.785		12.156	Interest received from giro and deposits
Penerimaan lebih bayar pajak	559.217		-	Receipt of overpayment of income tax
Pembayaran kas ke karyawan	( 298.164)		( 280.723)	Cash paid to employees
Pembayaran pajak penghasilan	( 991.496)		( 925.252)	Payments of income tax
Pembayaran kas ke pemasok	( 838.550)		( 895.501)	Cash paid to supplier
<b>Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi</b>	<b>4.809.339</b>		<b>4.465.282</b>	<b>Net cash flows provided by operating activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>				<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
Pembelian saham	-		( 170.525)	Purchase of shares
Penambahan properti investasi	( 2.777)	11	( 4.683)	Acquisition of investment properties
Penambahan aset hak guna	( 562.796)	12	( 1.051.509)	Acquisition of right of use assets
Penambahan aset tetap	( 3.337.509)	10	( 5.949.527)	Acquisition of property and equipment
<b>Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi</b>	<b>( 3.903.082)</b>		<b>( 7.176.244)</b>	<b>Net cash flows used in investing activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>				<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Penerimaan pinjaman jangka panjang	10.829.630	21	19.368.698	Proceeds from long term loans
Penerbitan surat utang	5.400.000	22	16.432.400	Proceeds from issuing notes
Penjualan saham treasury	3.283.026	26	-	Proceeds from sale of treasury stock
Penerimaan derivatif	1.212.797	27	343.283	Proceeds from settlement of derivatives
Penerimaan dari pihak ketiga	6.000	6	237.141	Receipt from third party
Pembayaran liabilitas sewa - aset hak guna	( 132.802)	23	( 59.238)	Payments of lease liabilities - right of use assets
Pembayaran liabilitas sewa - kendaraan	( 10.811)	23	( 8.113)	Payments of lease liabilities - vehicles
Pembayaran biaya pembelian penjualan saham treasury	( 19.852)	26	-	Payment of costs of buying and selling treasury stock
Saham treasury	( 766.238)	26	-	Acquisition of treasury stock
Pembayaran dividen - entitas anak	( 27.266)	34	( 14.246)	Dividend payment - subsidiaries
Pembayaran dividen	( 815.652)	34	( 692.194)	Dividend payment
Pembayaran bunga dan biaya pinjaman jangka panjang dan surat utang	( 1.679.940)	21,22	( 2.170.670)	Payments interest and cost of borrowing for long-term loan and notes
Pembayaran pinjaman jangka panjang dan surat utang	( 17.871.446)	21,22	( 31.048.672)	Repayments of long term loans and notes
<b>Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan</b>	<b>( 592.554)</b>		<b>2.388.389</b>	<b>Net cash flows provided by (used in) financing activities</b>
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing pada kas dan setara kas	23.558		4.357	Effects of exchange rate changes on cash and cash equivalents
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>337.261</b>		<b>( 318.216)</b>	<b>NET INCREASE (DECREASE) ON CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN</b>	<b>629.125</b>		<b>947.341</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN</b>	<b>966.386</b>	<b>4</b>	<b>629.125</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

Ekshibit E

Exhibit E

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk ("Perusahaan"), berdomisili di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan akta Notaris No. 14 tanggal 8 November 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Dewi Himijati Tandika, S.H, Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-28415HT.01.01.TH.2004 tanggal 12 November 2004. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 116 tanggal 23 Mei 2022, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("Akta No. 116/2022"), yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham) berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0019739 tanggal 8 Juni 2022 dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0038668.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 8 Juni 2022.

Berdasarkan Pasal 3 dari anggaran dasar Perusahaan, kegiatan usaha utama Perusahaan, aktivitas Perusahaan dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Untuk menunjang kegiatan usaha utama, Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yaitu:

- a. konstruksi sentral komunikasi;
- b. instalasi telekomunikasi; dan
- c. aktivitas telekomunikasi dengan kabel

Perusahaan, melalui entitas anak, telah memulai kegiatan komersialnya pada tahun 2004. Pada saat ini, kegiatan utama Perusahaan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada entitas anak. Pada tahun laporan yang disajikan, Perusahaan tidak melakukan ekspansi atau perampingan usaha yang signifikan.

Entitas induk Perusahaan adalah Bersama Digital Infrastructure Asia Pte, Ltd (BDIA) dengan penerima manfaat akhir Perusahaan adalah Winato Kartono dan Edwin Soeryadjaya dan Perusahaan tidak memiliki entitas induk terakhir tertentu.

Perusahaan beralamat di Gedung The Convergence Indonesia lantai 11, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940.

1. GENERAL

a. The Company's Establishment

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (the "Company"), domiciled in South Jakarta, was established based on the Notarial deed No. 14 dated 8 November 2004 drawn up in the presence of Dewi Himijati Tandika, S.H, a Notary in Jakarta, and was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. C-28415.HT.01.01.TH.2004 dated 12 November 2004. The articles of association of the Company have been amended several times, most recently based on the deed of Statement of Meeting Resolutions No. 116 dated 23 May 2022, drawn up before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta ("Deed No. 116/2022"), which has been notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (Menkumham) based on Letter of Acceptance of Notification of Changes in Company Data No. AHU-AH.01.09-0019739 dated 8 June 2022 and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0038668.AH.01.02. 2022 dated 8 June 2022.

Based on Article 3 of the Company's articles of association, the Company's main business activities, Company activities and other management consulting activities. To support the main business activities, the Company can conduct supporting business activities, namely:

- a. central construction of communication;
- b. telecommunications installation; and
- c. telecommunications activities with cables

The Company, through its subsidiaries, commenced its commercial operations in 2004. Currently, the Company's main activity is investing in subsidiaries. In the reporting year, the Company did not conduct significant expansion or downsizing.

The parent entity of the Company is Bersama Digital Infrastructure Asia Pte, Ltd (BDIA) and the ultimate beneficial owners of the Company are Winato Kartono and Edwin Soeryadjaya and the Company has no specific ultimate parent entity.

The Company's address is at The Convergence Indonesia, 11<sup>th</sup> floor, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl HR Rasuna Said, South Jakarta 12940.

Ekshibit E/2

Exhibit E/2

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 116 tanggal 23 Mei 2022 (Catatan 1.a), susunan Direksi dan Komisaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2022/ 31 December 2022	
Presiden Komisaris	:	Edwin Soeryadjaya
Komisaris	:	Verena Lim
Komisaris Independen	:	Ludovicus Sensi Wondabio Heri Sunaryadi

Susunan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2022/ 31 December 2022	
Presiden Direktur & Chief Operating Officer	:	Herman Setya Budi
Wakil Presiden Direktur & Chief Executive Officer	:	Hardi Wijaya Liong
Direktur & Chief of Business Development	:	Budianto Purwahjo
Direktur & Chief Financial Officer	:	Helmy Yusman Santoso

Berdasarkan Akta No. 43 tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H, M.Kn, Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0233282 mengenai Perubahan Direksi dan Komisaris Perusahaan, susunan Direksi dan Komisaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Susunan Komisaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021/ 31 December 2021	
Presiden Komisaris	:	Edwin Soeryadjaya
Komisaris	:	Winato Kartono
Komisaris Independen	:	Ludovicus Sensi Wondabio Wahyuni Bahar

1. GENERAL (Continued)

b. Boards of Commissioners, Directors, Audit Committee and Employees

Based on the Deed of Statement of Meeting Resolutions of Articles of Association No. 116 dated 23 May 2022 (Note 1.a), the Director and the Commissioners of the Company as of 31 December 2022 as follows:

	31 Desember 2022/ 31 December 2022	
Presiden Komisaris	:	Edwin Soeryadjaya
Komisaris	:	Verena Lim
Komisaris Independen	:	Ludovicus Sensi Wondabio Heri Sunaryadi

The Directors of the Company as of 31 December 2022 are as follows:

	31 Desember 2022/ 31 December 2022	
Presiden Direktur & Chief Operating Officer	:	Herman Setya Budi
Vice President Director & Chief Executive Officer	:	Hardi Wijaya Liong
Director & Chief of Business Development	:	Budianto Purwahjo
Director & Chief Financial Officer	:	Helmy Yusman Santoso

In accordance with Deed No. 43 dated 18 May 2020 drawn up in the presence of Jose Dima Satria, S.H, M.Kn., a Notary in Jakarta, and has been approved by Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as stated in his Decision Letter No. AHUAH. 01.03-0233282 regarding Changes the Directors and the Commissioners of the Company, the Director and the Commissioners of the Company as of 31 December 2021 are as follows:

The Commissioners of the Company as of 31 December 2021 are as follows:

	31 Desember 2021/ 31 December 2021	
Presiden Komisaris	:	Edwin Soeryadjaya
Komisaris	:	Winato Kartono
Independent Commissioners	:	Ludovicus Sensi Wondabio Wahyuni Bahar

Ekshibit E/3

Exhibit E/3

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan (Lanjutan)

b. Boards of Commissioners, Directors, Audit Committee and Employees (Continued)

Susunan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

The Directors of the Company as of 31 December 2021 are as follows:

31 Desember 2021/ 31 December 2021	
Presiden Direktur & Chief Operating Officer :	Herman Setya Budi : President Director & Chief Operating Officer
Wakil Presiden Direktur & Chief Executive Officer :	Hardi Wijaya Liong : Vice President Director & Chief Executive Officer
Direktur & Chief of Business Development :	Budianto Purwahjo : Director & Chief of Business Development
Direktur & Chief Financial Officer :	Helmy Yusman Santoso : Director & Chief Financial Officer
Direktur Independen & Chief of Product & Innovation :	Gusandi Sjamsudin : Independent Director & Chief of Product & Innovation

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The Audit Committee of the Company as of 31 December 2022 and 2021 are as follows:

Ketua :	Ludovicus Sensi Wondabio : Chairman
Anggota :	Agustino Sunarko : Members
	Agung Nugroho Soedibyo

Cakupan manajemen kunci Perusahaan adalah para komisaris dan direksi.

The scope of the Company's key management is the commissioners and directors.

Pada tanggal 9 Juli 2010, Perusahaan menunjuk Bapak Helmy Yusman Santoso sebagai Sekretaris Perusahaan.

On 9 July 2010, the Company appointed Mr. Helmy Yusman Santoso as the Corporate Secretary.

Sesuai dengan Peraturan No. IX.I.7, Lampiran Keputusan No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal yang telah diubah dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perusahaan telah memiliki Piagam Audit Internal tanggal 10 Januari 2011. Perusahaan telah menunjuk Bapak Supriatno Arham sebagai kepala unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 954/TBG-SKP-00/HOS/03/XII/2014 tanggal 7 Mei 2014.

In accordance with Regulation No. IX.I.7, Decision No. Kep-496/BL/2008 dated 28 November 2008 on the Establishment and Development Guidelines for Internal Audit Charter, which has been changed with Otoritas Jasa Keuangan (OJK) rule No. 56/POJK.04/2015 on the Establishment and Development Guidelines for Internal Audit Charter the Company has Internal Audit Charter dated 10 January 2011. The Company appointed Mr. Supriatno Arham as the Head Of Internal Auditor based on the Directors' Decree No. 954/TBG-SKP-00/HOS/03/XII/ 2014 dated 7 May 2014.

Jumlah remunerasi yang dibayarkan untuk Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 7.597 dan Rp 13.852.

Total remuneration paid to the Board of Commissioners of the Company for the year ended 31 December 2022 and 2021 amounted to Rp 7,597 and Rp 13,852, respectively.

Jumlah remunerasi yang dibayarkan untuk Dewan Direksi Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 34.546 dan Rp 30.543.

Total remuneration paid to the Board of Directors of the Company for the year ended 31 December 2022 and 2021 amounted to Rp 34,546 and Rp 30,543, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan dan entitas anak masing-masing mempekerjakan 676 karyawan dan 661 karyawan (tidak diaudit).

As of 31 December 2022 and 2021, the Company and subsidiaries employed 676 staffs and 661 staffs (unaudited), respectively.

Ekshibit E/4

Exhibit E/4

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

c. Struktur Entitas Anak

c. Structure of Subsidiaries

Perusahaan secara langsung memiliki lebih dari 50% saham di entitas anak sebagai berikut:

The Company owns directly the shareholding greater than 50% in the following subsidiaries:

Entitas anak/ Subsidiaries	Dimulainya kegiatan operasi/ Commencement of operation	Persentase kepemilikan pada 31 Desember/ Percentage of ownership at 31 December 2022	Jumlah aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination	
			31 Desember/ 31 December 2022	31 Desember/ 31 December 2021
PT Tower Bersama dan entitas anak/ and subsidiaries	2006	100,00%	27.426.843	26.054.729
PT Metric Solusi Integrasi dan entitas anak/ and subsidiary	2010	100,00%	13.105.684	15.870.170
TBG Global Pte Ltd dan entitas anak/ and subsidiary	2013	100,00%	83.112	4.782.267
PT United Towerindo dan entitas anak/ and subsidiary	2004	100,00%	865.265	551.371
PT Triaka Bersama	2010	100,00%	125.708	91.511
PT Menara Bersama Terpadu	2013	100,00%	9.937	9.980
PT Solusi Menara Indonesia	2011	99,91%	5.788.687	6.484.543
PT Tower One dan entitas anak/ and subsidiary	2006	99,90%	473.426	459.357
PT Telenet Internusa	1999	99,50%	290.172	299.954
PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk dan entitas anak/ and subsidiary	1995	51,09%	292.724	360.871
PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk dan entitas anak/ and subsidiary	2001	50,43%	1.153.374	1.021.479

Semua entitas anak berdomisili di Jakarta dan memiliki alamat yang sama dengan Perusahaan, kecuali TBG Global Pte Ltd yang berdomisili di Singapura.

All subsidiaries are domiciled in Jakarta and their address is the same as the Company's address, except for TBG Global Pte Ltd which is domiciled in Singapore.

Perusahaan melalui entitas anak memiliki kepemilikan tidak langsung lebih dari 50% pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

The Company owns indirectly through subsidiaries the shareholdings greater than 50% in the following companies:

Entitas anak/ Subsidiaries	Kepemilikan melalui entitas anak/ Ownership of subsidiaries	Dimulainya kegiatan operasi/ Commencement of operation	Persentase kepemilikan pada 31 Desember/ Percentage of ownership at 31 December 2022	Jumlah aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination	
				31 Desember/ 31 December 2022	31 Desember/ 31 December 2021
Tower Bersama Singapore Pte Ltd *)	TBG Global Pte Ltd	2012	100,00%	-	4.716.654
PT Mitrayasa Sarana Informasi	PT Tower Bersama dan/ and PT Solu Sindo Kreasi Pratama	2004	100,00%	1.185.703	1.162.255
PT Towerindo Konvergensi	PT Tower Bersama	2009	100,00%	591.658	549.130
PT Bali Telekom	PT Tower One	2003	100,00%	282.801	286.957
PT Prima Media Selaras	PT Tower Bersama	2003	100,00%	236.467	237.053
PT Batavia Towerindo	PT United Towerindo dan/ and PT Tower Bersama	2006	100,00%	198.925	243.940
PT Permata Karya Perdana	PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk	2013	99,99%	383.731	360.871
PT Solu Sindo Kreasi Pratama	PT Metric Solusi Integrasi	1999	99,71%	10.899.897	12.621.573
PT Jaringan Pintar Indonesia	PT Tower Bersama	2015	83,44%	32.505	27.261
PT Unicom Muda Utama	PT United Towerindo	2021	80,00%	234.707	13.920

\*) Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian, dalam proses pembubaran dan likuidasi.

\*) On the consolidated financial statements date, in process of dissolution and liquidation.



Ekshibit E/5

Exhibit E/5

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

c. Struktur Entitas Anak (Lanjutan)

c. Structure of Subsidiaries (Continued)

Berikut adalah keterangan dari masing-masing entitas anak.

The followings are the information about the subsidiaries.

c.1 PT Tower Bersama dan entitas anak

c.1 PT Tower Bersama and subsidiaries

PT Tower Bersama ("TB") adalah suatu Perseroan Terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan akta pendirian No. 5 tanggal 4 Juli 2006, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta. Akta pendirian TB telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-20821.HT.01.01.TH.2006 tanggal 17 Juli 2006 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 104 tanggal 29 Desember 2006, Tambahan No.13530.

PT Tower Bersama ("TB") is a Limited Liability Company established in Indonesia based on the deed of establishment No. 5 dated 4 July 2006, drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, S.H, S.E, a Notary in Jakarta. TB's deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. C-20821.HT.01.01.TH.2006 dated 17 July 2006 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia in his Decree No. 104 dated 29 December 2006, Supplement No. 13530.

Anggaran dasar TB telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 33 tanggal 13 Mei 2022, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta, mengenai perubahan Pasal 3 maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0032793.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 13 Mei 2022.

TB's articles of association have been amended several times, the latest amendment was based on deed No. 33 dated 13 May 2022, drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, SH, SE, a Notary in Jakarta, regarding the amendment to Article 3 of the purposes and objectives as well as business activities. This amendment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0032793.AH.01.02.Tahun 2022 dated 13 May 2022.

Berdasarkan Pasal 3 dari anggaran dasar TB, ruang lingkup usaha entitas anak adalah konstruksi sentral komunikasi, perdagangan besar peralatan komunikasi, perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya, aktivitas telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider* dan jasa system komunikasi.

In accordance with Article 3 of TB's articles of association, the scope of its the central construction of communications, the wholesale trade of communications equipment, the wholesale trade of machinery, equipment and other equipment, telecommunications activities with cable, *internet service providers* and communication system services.

TB memiliki 4 (empat) entitas anak yaitu PT Prima Media Selaras, PT Mitrayasa Sarana Informasi, PT Towerindo Konvergensi dan PT Jaringan Pintar Indonesia dimiliki oleh PT Tower Bersama masing-masing sejak Juni 2008, 8 Agustus 2011, 7 Oktober 2011 dan 4 Oktober 2016.

TB has 4 (four) subsidiaries companies which are PT Prima Media Selaras, PT Mitrayasa Sarana Informasi, PT Towerindo Konvergensi and PT Jaringan Pintar Indonesia were acquired by PT Tower Bersama on June 2008, 8 August 2011, 7 October 2011 and 4 October 2016, respectively.

Ekshibit E/6

Exhibit E/6

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

c. Struktur Entitas Anak (Lanjutan)

c. Structure of Subsidiaries (Continued)

c.2 PT Metric Solusi Integrasi dan entitas anak

c.2 PT Metric Solusi Integrasi and subsidiary

PT Metric Solusi Integrasi ("MSI") adalah suatu Perseroan Terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan akta pendirian No. 20 tanggal 12 Maret 2010, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta.

*PT Metric Solusi Integrasi ("MSI") is a Limited Liability Company established in Indonesia based on the deed of establishment No. 20 dated 12 March 2010 drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, SH, SE, a Notary in Jakarta.*

Akta pendirian MSI telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-13915.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 18 Maret 2010. Anggaran dasar MSI telah mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir dengan akta No. 36 tanggal 13 Mei 2022, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta, mengenai perubahan Pasal 3 maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0032789.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 13 Mei 2022.

*MSI's deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-13915.AH.01.01.Tahun 2010 dated 18 March 2010. MSI's articles of association have been amended several times. The latest amendment was based on deed No. 36 dated 13 May 2022, drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, S.H, S.E, a Notary in Jakarta, regarding the purposes and objectives as well as business activities. This amendment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-0032789.AH.01.02 Tahun 2022 dated 13 May 2022.*

Berdasarkan Pasal 3 dari anggaran dasar MSI, ruang lingkup usaha MSI adalah aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

*In accordance with Article 3 of MSI's articles of association, the scope of its activities of holding companies and other management consulting activities.*

MSI memiliki entitas anak yaitu PT Solu Sindo Kreasi Pratama.

*MSI has a subsidiary company which is PT Solu Sindo Kreasi Pratama.*

c.3 TBG Global Pte Ltd. dan entitas anak

c.3 TBG Global Pte Ltd. dan entitas anak

TBG Global Pte Ltd. ("TBGG") adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura sesuai dengan nomor pendaftaran 201302879K di tahun 2013.

*TBG Global Pte Ltd. ("TBGG") is a Limited Liability Company incorporated under the law of Republic of Singapore based on registration number 201302879K in 2013.*

TBGG memiliki entitas anak yaitu Tower Bersama Singapore Pte Ltd.

*TBGG has a subsidiary company which is Tower Bersama Singapore Pte Ltd.*

Ekshibit E/7

Exhibit E/7

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

c. Struktur Entitas Anak (Lanjutan)

c. Structure of Subsidiaries (Continued)

c.4 PT United Towerindo dan entitas anak

c.4 PT United Towerindo and subsidiaries

PT United Towerindo ("UT") adalah suatu Perseroan Terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan akta pendirian No. 40 tanggal 30 Juni 2004, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta. Akta pendirian UT telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-18090.HT.01.01.TH.2004 tanggal 20 Juli 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 13 Agustus 2004, Tambahan No. 7930.

PT United Towerindo ("UT") is a Limited Liability Company established in Indonesia based on the deed of establishment No. 40 dated 30 June 2004, drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, S.H, S.E, a Notary in Jakarta. UT's deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. C-18090.HT.01.01. TH.2004 dated 20 July 2004 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 65 dated 13 August 2004, Supplement No. 7930.

Anggaran dasar UT telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 34 tanggal 13 Mei 2022, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta, mengenai perubahan Pasal 3 maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Perubahan anggaran tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0032788.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 13 Mei 2022.

UT's articles of association have been amended several times, the latest amendment was based on deed No. 34 dated 13 May 2022, drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, S.H, S.E, a Notary in Jakarta, regarding the amendment to Article 3 of the purposes and objectives as well as business activities. This amendment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-0032788.AH.01.02 Tahun 2022 dated 13 May 2022.

Berdasarkan Pasal 3 dari anggaran dasar UT, ruang lingkup usaha UT adalah konstruksi sentral komunikasi dan perdagangan besar peralatan komunikasi.

In accordance with Article 3 of UT's articles of association, the scope of UT's business is the central construction of communications and the trade in communication equipment.

UT memiliki entitas anak yaitu PT Batavia Towerindo dan PT Unicom Muda Utama.

UT has two subsidiaries company which are PT Batavia Towerindo and PT Unicom Muda Utama.

c.5 PT Triaka Bersama

c.5 PT Triaka Bersama

PT Triaka Bersama ("TRB") adalah suatu Perseroan Terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan akta pendirian No. 33 tanggal 15 Mei 2009, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta. Akta pendirian TRB telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-24774.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 5 Juni 2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 7 Agustus 2009, Tambahan No. 20847.

PT Triaka Bersama ("TRB") is a Limited Liability Company established in Indonesia based on the deed of establishment No. 33 dated 15 May 2009, drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, S.H, S.E, a Notary in Jakarta. TRB's Deed of Establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-24774.AH.01.01. Tahun 2009 dated 5 June 2009 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 63 dated 7 August 2009, Supplement No. 20847.

Ekshibit E/8

Exhibit E/8

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

c. Struktur Entitas Anak (Lanjutan)

c. Structure of Subsidiaries (Continued)

c.5 PT Triaka Bersama (Lanjutan)

c.5 PT Triaka Bersama (Continued)

Anggaran dasar TRB terakhir diubah dengan akta No. 39 tanggal 13 Mei 2022, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta, mengenai perubahan Pasal 3 maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.

TRB's articles of association were last amended by the deed No. 39 dated 13 May 2022, drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, S.H, S.E, a Notary in Jakarta, regarding the purposes and objectives as well as business activities.

Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0032803.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 13 Mei 2022.

This amendment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-0032803.AH.01.02.Tahun 2022 dated 13 May 2022.

Berdasarkan Pasal 3 dari anggaran dasar TRB, ruang lingkup usaha TRB adalah berusaha dalam jasa konstruksi sentral komunikasi dan perdagangan besar peralatan komunikasi.

In accordance with Article 3 of TRB's articles of association, the scope of its activities the central construction of communications and the trade in communication equipment.

c.6 PT Menara Bersama Terpadu

c.6 PT Menara Bersama Terpadu

PT Menara Bersama terpadu ("MBT") adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan akta pendirian No. 11 tanggal 8 Januari 2013, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta. Akta pendirian MBT telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-02685.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 25 Januari 2013.

PT Menara Bersama Terpadu ("MBT") is a Limited Liability Company Incorporated in Indonesia under deed of establishment No. 11 dated 8 January 2013, drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, S.H, S.E, a Notary in Jakarta. MBT's deed establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-02685.AH.01.01.Tahun 2013 dated 25 January 2013.

Anggaran dasar MBT terakhir diubah dengan akta No. 35 tanggal 13 Mei 2022, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta, mengenai perubahan Pasal 3 maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0032790.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 13 Mei 2022.

MBT's articles of association were last amended by deed No. 35 dated 13 May 2022, drawn up before Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notary in Jakarta, regarding amendments to Article 3 of the aims and objectives as well as business activities. The amendments to the articles of association have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0032790.AH.01.02.Tahun 2022 dated 13 May 2022.

Berdasarkan Pasal 3 dari anggaran dasar MBT, ruang lingkup usaha MBT adalah konstruksi sentral telekomunikasi dan perdagangan besar peralatan.

According to Article 3 of MBT's articles of association, the scope of its telecommunications central construction and the wholesale trade of equipment.

Ekshibit E/9

Exhibit E/9

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

c. Struktur Entitas Anak (Lanjutan)

c. Structure of Subsidiaries (Continued)

c.7 PT Solusi Menara Indonesia

c.7 PT Solusi Menara Indonesia

PT Solusi Menara Indonesia ("SMI") adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta pendirian No. 77 tanggal 19 Desember 2011, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta. Akta pendirian SMI telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-63259.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011.

*PT Solusi Menara Indonesia ("SMI") is a Limited Liability Company established in Indonesia under the deed of establishment No. 77 dated 19 December 2011, drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, S.H, S.E, a Notary in Jakarta. SMI's Deed of Establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-63259.AH.01.01. Tahun 2011 dated 22 December 2011.*

Anggaran dasar SMI terakhir diubah dengan akta No. 41 tanggal 13 Mei 2022, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta, mengenai perubahan Pasal 3 maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0032834.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 13 Mei 2022.

*SMI's articles of association have been amended based on the deed No. 41 dated 13 May 2022, drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, S.H, S.E, a Notary in Jakarta, regarding the purposes and objectives as well as business activities. This amendment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-0032834.AH.01.02.Tahun 2022 dated 13 May 2022.*

Berdasarkan Pasal 3 dari anggaran dasar SMI, ruang lingkup usaha SMI adalah konstruksi sentral telekomunikasi dan perdagangan besar peralatan.

*According to Article 3 of SMI's articles of association, the scope of its telecommunication central construction and the wholesale trade of equipment.*

c.8 PT Tower One dan entitas anak

c.8 PT Tower One and subsidiary

PT Tower One ("TO") adalah suatu Perseroan Terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan akta pendirian No. 6 tanggal 21 September 2006, dibuat dihadapan Angela Meilany Basiroen, S.H, Notaris di Jakarta.

*PT Tower One ("TO") is a Limited Liability Company established in Indonesia based on the Deed of Establishment No. 6 dated 21 September 2006, drawn up in the presence of Angela Meilany Basiroen, S.H, a Notary in Jakarta.*

Akta pendirian TO telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. W7-03499.HT.01.01-TH.2006 tanggal 8 Desember 2006 dan akta tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 7 Agustus 2009, Tambahan No. 21141.

*TO's deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. W7-03499.HT.01.01-TH.2006 dated 8 December 2006 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia in his Decree No. 63 dated 7 August 2009, Supplement No. 21141.*

Ekshibit E/10

Exhibit E/10

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

c. Struktur Entitas Anak (Lanjutan)

c. Structure of Subsidiaries (Continued)

c.8 PT Tower One dan entitas anak (Lanjutan)

c.8 PT Tower One and subsidiary (Continued)

Anggaran dasar TO telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 46 tanggal 13 Mei 2022, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta, mengenai perubahan Pasal 3 maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0032805.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 13 Mei 2022.

TO's articles of association have been amended several times, the latest amendment was based on Deed No. 46 dated 13 May 2022, drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, S.H, S.E, a Notary in Jakarta, regarding the purposes and objectives as well as business activities. This amendment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-0032805.AH.01.02.Tahun 2022 dated 13 May 2022.

Berdasarkan Pasal 3 dari anggaran dasar TO, ruang lingkup usaha TO adalah aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

In accordance with Article 3 of TO's articles of association, the scope of its activities of the holding company and other management consulting activities.

TO memiliki entitas anak yaitu PT Bali Telekom.

TO has a subsidiary company which is PT Bali Telekom.

c.9 PT Telenet Internusa

c.9 PT Telenet Internusa

PT Telenet Internusa ("TI") adalah suatu Perseroan Terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan akta pendirian No. 8 tanggal 6 September 1999, dibuat dihadapan Dr. Wiratni Ahmadi, S.H, Notaris di Bandung.

PT Telenet Internusa ("TI") is a Limited Liability Company established in Indonesia based on the deed of establishment No. 8 dated 6 September 1999, drawn up in the presence of Dr. Wiratni Ahmadi, S.H, a Notary in Bandung.

Akta Pendirian TI telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-18566.HT.01.01.TH. 2001 tanggal 6 November 2001 dan akta tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 21 Februari 2006, Tambahan No. 1896.

TI's deed of Establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights the Republic of Indonesia in his Decree No. C-18566.HT.01.01.TH. 2001 dated 6 November 2001 and was published in the State Gazette Republic Indonesia No. 15 dated 21 February 2006, Supplement No.1896.

Anggaran dasar TI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 49 tanggal 13 Mei 2022, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta, mengenai perubahan Pasal 3 maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0032824.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 13 Mei 2022.

TI's articles of association have been amended several times, the latest amendment was based on Deed No. 49 dated 13 May 2022, drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, S.H, S.E, a Notary in Jakarta, regarding the amendment to Article 3 of the purposes and objectives as well as business activities. This amendment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-0032824.AH.01.02 Tahun 2022 dated 13 May 2022.

Ekshibit E/11

Exhibit E/11

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

c. Struktur Entitas Anak (Lanjutan)

c. Structure of Subsidiaries (Continued)

c.9 PT Telenet Internusa (Lanjutan)

c.9 PT Telenet Internusa (Continued)

Berdasarkan Pasal 3 dari anggaran dasar TI, ruang lingkup usaha TI adalah konstruksi sentral telekomunikasi dan perdagangan besar peralatan komunikasi.

In accordance with Article 3 of TI articles of association, the scope of the TI business is the telecommunications central construction and the wholesale trade of communications equipment.

c.10 PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk dan entitas anak

c.10 PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk and subsidiary

PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk ("GOLD"), dahulu didirikan dengan nama PT Bima Nuansa Cempaka berdasarkan Akta Notaris Afdal Gazali, S.H., No. 136 tanggal 8 November 1995 dan telah mendapat pengesahaan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-17.467.HT.01.01 Tahun 1995 tanggal 29 Desember 1995 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36, Tambahan No. 4144 tanggal 3 Mei 1996. Berdasarkan Akta Notaris No. 120 tanggal 26 Mei 2016 dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, nama Entitas Induk diubah menjadi PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.

PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk ("GOLD") formerly was established by name PT Bima Nuansa Cempaka based on the Notarial deed Afdal Gazali, S.H., No. 136 dated 8 November 1995 and was approved by the Ministry of Justice based on its Decision Letter No. C2-17.467.HT.01.01 Year 1995 dated 29 December 1995 and was published in the Official Gazette of the Republic of Indonesia No. 36, Supplement No. 4144 dated 3 May 1996. Based on Notarial Deed No. 120 dated 26 May 2016 from Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, the name of the Parent Entity was changed to PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.

Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0011039.AH.01.02. Tahun 2016 tanggal 10 Juni 2016 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59, Tambahan No. 12851 tanggal 26 Juli 2016.

The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-0011039.AH.01.02. Tahun 2016 dated 10 June 2016 and has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 59, Supplement No. 12851 dated 26 July 2016.

Anggaran Dasar GOLD telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 22 tanggal 3 Juni 2022, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan Pasal 3 maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0045363.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 1 Juli 2022.

GOLD's Articles of Association have been amended several times, most recently based on Jose Dima Satria, S.H., S.E., Notarial Deed, No. 22 dated 3 June 2022, in connection with the Amendment to Article 3 of the aims and objectives as well as business activities. The amendment was approved by Minister of Law and Human Rights of Republic Indonesia on its Decision Letter No. AHU-0045363.AH.01.02. Tahun 2022 dated 1 July 2022.



Ekshibit E/12

Exhibit E/12

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

c. Struktur Entitas Anak (Lanjutan)

c. Structure of Subsidiaries (Continued)

c.10 PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk  
dan entitas anak (Lanjutan)

c.10 PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk  
and subsidiary (Continued)

Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar GOLD, ruang lingkup kegiatan GOLD adalah dalam bidang jasa penyediaan infrastruktur telekomunikasi, termasuk melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi.

Based on Article 3 of the GOLD's articles of association, the scope of GOLD activities is the field of providing telecommunications infrastructure services, including investing or participating in similar companies engaged in telecommunication support activities and business in the field of services, particularly telecommunications support services.

GOLD memiliki entitas anak yaitu PT Permata Karya Perdana.

GOLD has a subsidiary company which is PT Permata Karya Perdana.

c.11 PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk

c.11 PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk

PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk ("GHON"), bertempat kedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan akta Notaris Nurmiati, S.H., No. 58 tanggal 27 April 2001 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-00673.HT.01.01.TH.2001 tanggal 10 Mei 2001.

PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk ("GHON") was established in Jakarta, based on the Notarial deed Nurmiati, S.H., No. 58 dated 27 April 2001 and was approved by the Ministry of Law and Human Rights based on its Decision Letter No. C-00673.HT.01.01.TH.2001 dated 10 May 2001.

Anggaran dasar GHON telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir berdasarkan Akta Notaris Ashoya Ratam S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta, No. 34 tanggal 31 Mei 2022. Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiasebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan No. AHU-0040996.01.02.TAHUN 2022 tanggal 16 Juni 2022.

GHON's articles of association have been amended several times and most recently based on the Notary Deed of Ashoya Ratam S.H., M.Kn., Notary in the City of Jakarta, No. 34 dated 31 May 2022. The amendment to the articles of association has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as stated in Decree No. AHU-040996.01.02.TAHUN 2022 dated 16 June 2022.

Berdasarkan pasal 3 dari anggaran dasar GHON, kegiatan usaha GHON adalah menjalankan usaha dalam bidang jasa, khususnya penunjang telekomunikasi, meliputi penyewaan dan operational leasing mesin dan peralatan industri. Untuk menunjang kegiatan usaha utama, Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yaitu konstruksi sentral telekomunikasi, instalasi telekomunikasi, dan aktivitas telekomunikasi dengan kabel.

Based on Article 3 of GHONs articles of association, the main business activities of GHON is providing services, specifically supporting telecommunications including rental and operational lease for industrial machinery and equipment. To support the main business activities, the Company can conduct supporting business activities, namely central telecommunications constructions, telecommunication installation, and cable telecommunications activities.

Ekshibit E/13

Exhibit E/13

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

d. Penawaran Umum Saham

d. Share Public Offering

Pada tanggal 15 Oktober 2010, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dengan suratnya No. S-9402/BL/2010 untuk melakukan penawaran umum sebanyak 551.111.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia dengan harga penawaran perdana sebesar Rp 2.025 (nilai penuh) per saham. Pada tanggal 26 Oktober 2010, seluruh saham tersebut telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

On 15 October 2010, the Company received an effective statement from the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) in its Decision Letter No. S-9402/BL/2010 to offer 551,111,000 of its shares to the public with par value of Rp 100 (full amount) per share through the Indonesia Stock Exchange, at an initial offering price of Rp 2,025 (full amount) per share. On 26 October 2010, those shares were listed on the Indonesia Stock Exchange.

e. Penawaran Umum Obligasi

e. Bonds Offering

Pada tanggal 21 Oktober 2022, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Tahap V Tahun 2022 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan V Tahap V") sebesar 5,25% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan V Tahap V ini adalah sebesar Rp 1.000.000 (catatan 22). Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 Oktober 2022.

On 21 October 2022, The Company issued Continuous Bonds V Tower Bersama Infrastructure Phase V Year 2022 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds V Phase V") of 5.25% per annum. The Continuous Bonds V Phase V has a total principal of Rp 1,000,000 (Note 22). These bonds are listed on the Indonesia Stock Exchange on 24 October 2022.

Pada tanggal 11 Agustus 2022, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Tahap IV Tahun 2022 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV"). Nominal Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV ini adalah sebesar Rp 2.200.000 (Catatan 22i). Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Agustus 2022.

On 11 August 2022, The Company issued Continuous Bonds V Tower Bersama Infrastructure Phase IV Year 2022 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds V Phase IV"). The Continuous Bonds V Phase IV has a total principal of Rp 2,200,000 (Note 22i). These bonds are listed on the Indonesia Stock Exchange on 12 August 2022.

Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

These Continuous Bonds V Phase IV were issued in 2 (two) series consisting of:

1. Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp 1.478.610 dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,10% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
2. Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp 721.390 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,35% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

1. Series A Bonds with nominal value of Rp 1,478,610 at a fixed interest rate of 4.10% per year. The term of the Series A Bonds is 370 (three hundred and seventy) Calendar Days.
2. Series B Bonds with nominal value of Rp 721,390 at a fixed interest rate of 6.35% per year. The term of the Series B Bonds is 3 (three) years.

Pada tanggal 2 Maret 2022, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2022 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan V Tahap III"). Nominal Obligasi Berkelanjutan V Tahap III ini adalah sebesar Rp 2.200.000 (Catatan 22). Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Maret 2022.

On 2 March 2022, the Company issued Continuous Bonds V Tower Bersama infrastructure Phase III Year 2022 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds V Phase III"). The Continuous Bonds V Phase III has a total principal of Rp 2,200,000 (Note 22). These bonds are listed on the Indonesia Stock Exchange on 4 March 2022.

Ekshibit E/14

Exhibit E/14

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

e. Penawaran Umum Obligasi (Lanjutan)

e. Bonds Offering (Continued)

Obligasi Berkelanjutan V Tahap III ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

*These Continuous Bonds V Phase III were issued in 2 (two) series consisting of:*

1. Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp 1.700.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 3,75% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
2. Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp 500.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,90% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

1. *Series A Bonds with nominal value of Rp 1,700,000 at a fixed interest rate of 3.75% per year. The term of the Series A Bonds is 370 (three hundred and seventy) Calendar Days.*
2. *Series B Bonds with nominal value of Rp 500,000 at a fixed interest rate of 5.90% per year. The term of the Series B Bonds is 3 (three) years.*

Pada tanggal 10 Desember 2021, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2021 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan V Tahap II") sebesar 3,60% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan V Tahap II ini adalah sebesar Rp 1.455.000 (Catatan 22g). Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Desember 2021.

*On 10 December 2021, the Company issued Continuous Bonds V Tower Bersama infrastructure Phase II Year 2021 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds V Phase II") of 3.60% per annum. The Continuous Bonds V Phase II has a total principal of Rp 1,455,000 (Note 22g). These bonds are listed on the Indonesia Stock Exchange on 13 December 2021.*

Pada tanggal 19 Agustus 2021, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2021 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan V Tahap I") sebesar 4,25% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan V Tahap I ini adalah sebesar Rp 1.200.000 (Catatan 22f), yang dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 9 Agustus 2021 berdasarkan Surat Keputusan No. S-132/D.04/2021. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2021.

*On 19 August 2021, The Company issued Continuous Bonds V Tower Bersama infrastructure Phase I Year 2021 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds V Phase I") of 4.25% per annum. The Continuous Bonds V Phase I has a total principal of Rp 1,200,000 (Note 22f), which was approved to be effective by Otoritas Jasa Keuangan (OJK) on 9 August 2021 based on the Decision Letter No. S-132/D.04/2021. These bonds are listed on the Indonesia Stock Exchange on 20 August 2021.*

Pada tanggal 9 April 2021, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2021 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV") sebesar 5,5% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV ini adalah sebesar Rp 970.000 (Catatan 22e). Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 April 2021.

*On 9 April 2021, The Company issued Continuous Bonds IV Tower Bersama infrastructure Phase IV Year 2021 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds IV Phase IV") of 5.5% per annum. The Continuous Bonds IV Phase IV has a total principal of Rp 970,000 (Note 22e). These bonds are listed on the Indonesia Stock Exchange on 12 April 2021.*

Pada tanggal 17 Februari 2021, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III"). Nominal Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III ini adalah sebesar Rp 2.915.000 (Catatan 22d). Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Februari 2021.

*On 17 February 2021, the Company issued Continuous Bonds IV Tower Bersama infrastructure Phase III Year 2021 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds IV Phase III"). The Continuous Bonds IV Phase III has a total principal of Rp 2,915,000 (Note 22d). These bonds are listed on the Indonesia Stock Exchange on 18 February 2021.*

Ekshibit E/15

Exhibit E/15

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

e. Penawaran Umum Obligasi (Lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

1. Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp 1.898.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
2. Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp 1.017.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

Pada tanggal 2 Desember 2020, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2020 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II"). Nominal Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II ini adalah sebesar Rp 750.000 (Catatan 22c). Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 Desember 2020

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

1. Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp 295.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
2. Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp 455.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

Pada tanggal 8 September 2020, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2020 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I"). Nominal Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I ini adalah sebesar Rp 700.000 (Catatan 22b), yang dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 31 Agustus 2020 berdasarkan Surat Keputusan No. S-244/D.04/2020. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 September 2020.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

1. Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp 231.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,30% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
2. Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp 469.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

1. GENERAL (Continued)

e. Bonds Offering (Continued)

*These Continuous Bonds IV Phase III were issued in 2 (two) series consisting of:*

1. *Series A Bonds with nominal value of Rp 1,898,000 at a fixed interest rate of 5.50% per year. The term of the Series A Bonds is 370 (three hundred and seventy) Calendar Days.*
2. *Series B Bonds with nominal value of Rp 1,017,000 at a fixed interest rate of 6.75% per year. The term of the Series B Bonds is 3 (three) years.*

*On 2 December 2020, the Company issued Continuous Bonds IV Tower Bersama Infrastructure Phase II Year 2020 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds IV Phase II"). The Continuous Bonds IV Phase II has a total principal of Rp 750,000 (Note 22c). These bonds are listed on the Indonesia Stock Exchange on 3 December 2020.*

*These Continuous Bonds IV Phase II were issued in series consisting of:*

1. *Series A Bonds with nominal value of Rp 295,000 at a fixed interest rate of 5.75% per year. The term of the Series A Bonds is 370 (three hundred and seventy) Calendar Days.*
2. *Series B Bonds with nominal value of Rp 455,000 at a fixed interest rate of 7.25% per year. The term of the Series B Bonds is 3 (three) years.*

*On 8 September 2020, the Company issued Continuous Bonds IV Phase I Year 2020 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds IV Phase I"). The Continuous Bonds IV Phase I has a total principal of Rp 700,000 (Note 22b), which was approved to be effective by Otoritas Jasa Keuangan (OJK) on 31 August 2020 based on the Decision Letter No. S-244/D.04/2020. These bonds are listed on the Indonesia Stock Exchange on 9 September 2020.*

*These Continuous Bonds IV Phase I were issued in 2 (two) series consisting of:*

1. *Series A Bonds with nominal value of Rp 231,000 at a fixed interest rate of 6.30% per year. The term of the Series A Bonds is 370 (three hundred and seventy) Calendar Days.*
2. *Series B Bonds with nominal value of Rp 469,000 at a fixed interest rate of 8.00% per year. The term of the Series B Bonds is 3 (three) years.*

Ekshibit E/16

Exhibit E/16

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

e. Penawaran Umum Obligasi (Lanjutan)

Pada tanggal 24 Maret 2020, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2020 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV"). Nominal Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV ini adalah sebesar Rp 1.500.000 (Catatan 22a). Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26 Maret 2020.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

1. Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp 633.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
2. Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp 867.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

Pada tanggal 24 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2019 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan III Tahap III") sebesar 8,00% per tahun.

Nominal Obligasi Berkelanjutan III Tahap III ini adalah sebesar Rp 750.000. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Mei 2019.

Pada tanggal 18 Oktober 2018, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2018 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan III Tahap II") sebesar 8,5% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan III Tahap II ini adalah sebesar Rp 628.000. Obligasi ini dicatatkan pada bursa efek Indonesia pada tanggal 19 Oktober 2018.

Pada tanggal 5 Juli 2018, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2018 dengan tingkat bunga tetap ("Obligasi Berkelanjutan III Tahap I") sebesar 8,50% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan III Tahap I ini adalah sebesar Rp 608.000, yang dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 28 Juni 2018 berdasarkan Surat Keputusan No. S-84/D.04/2018. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Juli 2018.

1. GENERAL (Continued)

e. Bonds Offering (Continued)

On 24 March 2020, the Company issued Continuous Bonds III phase IV Year 2020 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds III Phase IV"). The Continuous Bonds III Phase IV has a total principal of Rp 1,500,000 (Note 22a). These bonds are listed on the Indonesia Stock Exchange on 26 March 2020.

These Continuous Bonds III Phase IV were issued in 2 (two) series consisting of:

1. Series A Bonds with nominal value of Rp 633,000 at a fixed interest rate of 6.25% per year. The term of the Series A Bonds is 370 (three hundred and seventy) Calendar Days.
2. Series B Bonds with nominal value of Rp 867,000 at a fixed interest rate of 7.75% per year. The term of the Series B Bonds is 3 (three) years.

On 24 May 2019, the Company issued Continuous Bonds III phase III Year 2019 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds III Phase III") of 8.00% per annum.

The Continuous Bonds III Phase III has a total principal of Rp 750,000. These bonds are listed on the Indonesia Stock Exchange on 27 May 2019.

On 18 October 2018, the Company issued Continuous Bonds III phase II Year 2018 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds III Phase II") of 8.5% per annum. The Continuous Bonds III Phase II has a total principal of Rp 628,000. These bonds are listed on the Indonesia Stock Exchange on 19 October 2018.

On 5 July 2018, the Company issued Continuous Bonds III Tower Bersama Infrastructure Phase I Year 2018 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds III Phase I") of 8.50% per annum. The Continuous Bonds III Phase I has a total principal of Rp 608,000, which was approved to be effective by Otoritas Jasa Keuangan (OJK) on 28 June 2018 based on the Decision Letter No. S-84/D.04/2018. These bonds were listed on the Indonesia Stock Exchange on 6 July 2018.

Ekshibit E/17

Exhibit E/17

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

e. Penawaran Umum Obligasi (Lanjutan)

Pada tanggal 19 September 2017, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2017 dengan tingkat bunga tetap ("Obligasi Berkelanjutan II Tahap III") sebesar 8,40% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini adalah sebesar Rp 700.000. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 September 2017.

Pada tanggal 21 April 2017, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2017 dengan tingkat bunga tetap ("Obligasi Berkelanjutan II Tahap II") sebesar 8,75% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini adalah sebesar Rp 700.000. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 25 April 2017.

Pada tanggal 1 Juli 2016, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan II Tahap I") sebesar 9,25% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini adalah sebesar Rp 230.000, yang dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 12 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan No. S-316/D.04/2016. Obligasi ini dicatatkan pada bursa efek Indonesia pada tanggal 1 Juli 2016.

Pada tanggal 12 Desember 2013, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan I Tahap I"). Nominal Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini adalah sebesar Rp 740.000, yang dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 5 Desember 2013 berdasarkan Surat Keputusan No. S-416/D.04/2013. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Desember 2013.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

1. Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp 550.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
2. Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp 190.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

1. GENERAL (Continued)

e. Bonds Offering (Continued)

On 19 September 2017, the Company issued Continuous Bonds II Tower Bersama Infrastructure Phase III Year 2017 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds II Phase III") of 8.50% per annum. The Continuous Bonds II Phase III has a total principal of Rp 700,000. These bonds were listed on the Indonesia Stock Exchange on 19 September 2017.

On 21 April 2017, the Company issued Continuous Bonds II Tower Bersama Infrastructure Phase II Year 2017 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds II Phase II") of 8.50% per annum. The Continuous Bonds II Phase III has a total principal of Rp 700,000. These bonds were listed on the Indonesia Stock Exchange on 25 April 2017.

On 1 July 2016, the Company issued Continuous Bonds II Phase I Year 2016 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds II Phase I") of 9.25% per annum. The Continuous Bonds II Phase I has a total principal of Rp 230,000, which was approved to be effective by Otoritas Jasa Keuangan (OJK) on 12 June 2016 based on the Decision Letter No. S-316/D.04/2016. These bonds are listed on the Indonesia Stock Exchange on 1 July 2016.

On 12 December 2013, the Company issued Continuous Bonds I phase I Year 2013 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds I Phase I"). The Continuous Bonds I Phase I has a total principal of Rp 740,000, which was approved to be effective by Otoritas Jasa Keuangan (OJK) on 5 December 2013 based on the Decision Letter No. S-416/D.04/2013. These bonds are listed on the Indonesia Stock Exchange on 13 December 2013.

These Continuous Bonds I Phase I were issued in 2 (two) series consisting of:

1. Series A Bonds with nominal value of Rp 550,000 at a fixed interest rate of 9.00% per year. The term of the Series A Bonds is 370 (three hundred and seventy) Calendar Days.
2. Series B Bonds with nominal value of Rp 190,000 at a fixed interest rate of 10.00% per year. The term of the Series B Bonds is 3 (three) years.

Ekshibit E/18

Exhibit E/18

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Dasar penyajian laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian ini telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta peraturan regulator pasar modal yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan basis akrual, dan dasar pengukuran dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam catatan yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak disajikan dalam Rupiah (IDR) yang merupakan mata uang fungsional, kecuali untuk entitas anak TBG Global Pte Ltd disajikan dalam Dolar Amerika Serikat (USD) yang merupakan mata uang fungsional. Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian dibulatkan menjadi jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian berdasarkan PSAK mensyaratkan penggunaan estimasi akuntansi kritisikal tertentu. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian juga mensyaratkan manajemen Perusahaan untuk menggunakan pertimbangan dalam menerapkan kebijakan akuntansi Perusahaan. Hal-hal di mana pertimbangan dan estimasi yang signifikan telah dibuat dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian beserta dampaknya diungkapkan dalam Catatan 3.

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun berdasarkan biaya historis, kecuali hal-hal dibawah ini (lihat kebijakan akuntansi terkait untuk lebih rinci):

- Instrumen keuangan - yang dinilai nilai wajar melalui laporan laba rugi
- Instrumen keuangan - yang dinilai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain
- Imbalan kontinjensi
- Properti Investasi
- Revaluasi aset tetap
- Liabilitas imbalan pasti bersih

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia comprising of the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and rule established by the capital market regulator No. VIII.G.7 regarding Presentation and Disclosure of Financial Statements of issuer of Public Company.

The consolidated financial statements have been prepared using the accrual basis, and the measurement basis used is historical cost concept, except for certain accounts which are measured on the bases described in the relevant notes herein.

The consolidated statement of cash flows, which has been prepared using direct method, present receipts and disbursements of cash and cash equivalent classified into operating, investing and financing activities.

The consolidated financial statements of the Company and subsidiaries are presented in Rupiah (IDR) which is the functional currency, except TBG Global Pte Ltd, the subsidiary of the Company, is presented in United States Dollar (USD), which is the functional currency. Amounts in the consolidated financial statements are rounded to and stated in millions of Rupiah, unless otherwise stated.

The preparation of consolidated financial statements in compliance with PSAK requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires the Company management to exercise judgment in applying the Company's accounting policies. The areas where significant judgments and estimates have been made in preparing the consolidated financial statements and their effects are disclosed in Note 3.

The consolidated financial statement have been prepared using historical cost, except for the following items (refer to related accounting policies for details):

- Financial instruments - fair value through profit or loss
- Financial instruments - fair value through other comprehensive income
- Contingency consideration
- Investment property
- Revalued property and equipment
- Net defined benefit liability



Ekshibit E/19

Exhibit E/19

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

b. Standar baru, amendemen dan penyesuaian  
Standar Akuntansi Keuangan efektif 1 Januari  
2022 (Lanjutan)

b. New Standards, amendments and improvements  
of Financial Accounting Standards effective from  
1 January 2022 (Continued)

Penerapan standar baru, amendemen dan penyesuaian yang telah diterbitkan, dan yang akan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 namun tidak berdampak secara substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan pengaruh material terhadap laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

*The adoption of new standards, amendments and improvements issued and effective for the financial year at or after 1 January 2022 which do not have substantial changes to the Group's accounting policies and had no material impact on the consolidated financial statements are as follows:*

- Amendemen PSAK 22 "Kombinasi Bisnis" tentang referensi ke kerangka konseptual

- Amendment PSAK 22 "Business Combination" about reference to the conceptual framework*

Amendemen tersebut memperbarui referensi dalam PSAK 22 ke kerangka konseptual untuk pelaporan keuangan tanpa mengubah persyaratan akuntansi untuk kombinasi bisnis.

*The amendment updates a reference in PSAK 22 to the conceptual framework for financial reporting without changing the accounting requirements for business combinations.*

Amendemen tersebut untuk memperbaharui referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan dan menambah pengecualian untuk pengakuan liabilitas dan liabilitas kontinjensi dalam ruang lingkup PSAK 57 "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset kontinjensi" dan interpretasi ISAK 30 "Pungutan".

*The amendments update a references to the Conceptual Framework for Financial Reporting and to add an exception for the recognition of liabilities and contingent liabilities within the scope of PSAK 57 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" and Interpretation ISAK 30 "Levies".*

Amendemen tersebut juga menegaskan bahwa aset kontinjensi tidak diakui pada saat tanggal akuisisi.

*The amendments also confirm that contingent assets should not be recognized at the acquisition date.*

- Amendemen PSAK 57 "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi" tentang kontrak memberatkan - biaya memenuhi kontrak

- Amendment PSAK 57 "Provision, Contingent liabilities, and Contingent Assets" about onerous contracts - cost of fulfilling contracts*

Amendemen ini mengklarifikasi biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan. Biaya untuk memenuhi kontrak sendiri terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak, yang lebih lanjut terdiri dari biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut dan alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak.

*This amendment clarifies the cost of fulfilling a contract to determine whether a contract is an onerous contract. The cost of fulfilling contracts itself consists of costs directly related to the contract, which further consists of the incremental costs to fulfill the contract and the allocation of other costs directly related to fulfilling the contract.*

- PSAK 71 (Penyesuaian 2020), "Instrumen Keuangan"

- PSAK 71 (Improvements 2020), "Financial Instruments"*

Penyesuaian ini mengklarifikasi tentang pengakuan atas fee (imbalan) yang diakui oleh peminjam atas penghentian pengakuan liabilitas keuangan.

*The improvements clarify about recognition of fee by borrower for derecognition of financial liabilities.*

Ekshibit E/20

Exhibit E/20

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

b. Standar baru, amendemen dan penyesuaian  
Standar Akuntansi Keuangan efektif  
1 Januari 2022 (Lanjutan)

b. New Standards, amendments and improvements  
of Financial Accounting Standards effective from  
1 January 2022 (Continued)

- PSAK 71 (Penyesuaian 2020), "Instrumen Keuangan" (Lanjutan)

- PSAK 71 (Improvements 2020), "Financial Instruments" (Continued)

Peminjam dalam menentukan fee (imbalan) yang dibayarkan setelah dikurangi fee (imbalan) yang diterima, peminjam hanya memasukkan fee (imbalan) yang dibayarkan atau diterima antara peminjam dan pemberi pinjaman, termasuk fee (imbalan) yang dibayar atau diterima baik peminjam atau pemberi pinjaman atas nama pihak lain.

*Borrower in determining those fees paid net off fees receive, a borrower include only fees paid or received between borrower and the lender, including fees paid or received by either the borrower or lender on the other's behalf.*

- PSAK 73 (Penyesuaian 2020), "Sewa"

- PSAK 73 (Improvements 2020), "Leases"

Penyesuaian ini menghapus ilustrasi pembayaran dari pesewa berkaitan dengan insentif sewa. Contoh yang ada saat ini memiliki potensi kekeliruan dalam mengidentifikasi insentif sewa dan terkait dengan perbaikan properti sewaan dalam menentukan perubahan masa sewa.

*The improvements remove the illustration of payments from the lessor relating to leasehold improvements. As currently drafted the example have potential confusion in indentifying the lease incentives and in a common leasehold improvement real estate property fact pattern relating with changes of lease term.*

Standar baru, interpretasi dan amendemen yang belum efektif

New standards, interpretations and amendments that are not yet effective

- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan"

- Amendments to PSAK 1 "Presentation of Financial Statements"

Amendemen PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan mengklarifikasi bahwa kewajiban diklasifikasikan sebagai lancar atau tidak lancar, berdasarkan pada hak yang ada pada akhir periode pelaporan. Klasifikasi tidak terpengaruh oleh ekspektasi entitas atau peristiwa setelah tanggal pelaporan (misalnya penerimaan *waiver* atau pelanggaran perjanjian). Amendemen tersebut juga mengklarifikasi apa yang dimaksud PSAK 1 perihal 'penyelesaian' liabilitas.

*The amendments PSAK 1 Presentation of Financial Statement clarify that liabilities are classified as either current or noncurrent, depending on the rights that exist at the end of the reporting period. Classification is unaffected by the expectations of the entity or events after the reporting date (eg the receipt of a waiver or a breach of covenant). The amendments also clarify what PSAK 1 means when it refers to the 'settlement' of a liability.*

Amendemen tersebut dapat memengaruhi klasifikasi liabilitas, terutama untuk entitas yang sebelumnya mempertimbangkan intensi manajemen untuk menentukan klasifikasi dan untuk beberapa liabilitas yang dapat dikonversi menjadi ekuitas.

*The amendments could affect the classification of liabilities, particularly for entities that previously considered management's intentions to determine classification and for some liabilities that can be converted into equity.*

Standar ini harus diterapkan secara retrospektif sesuai dengan persyaratan normal dalam PSAK 25 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan. Amendemen tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2023 dan penerapan lebih awal diizinkan.

*This standard must be applied retrospectively in accordance with the normal requirements in PSAK 25 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors. The amendments will become effective on 1 January 2023 and earlier application is permitted.*

Ekshibit E/21

Exhibit E/21

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

b. Standar baru, amendemen dan penyesuaian  
Standar Akuntansi Keuangan efektif 1 Januari  
2022 (Lanjutan)

b. New Standards, amendments and improvements  
of Financial Accounting Standards effective from  
1 January 2022 (Continued)

Standar baru, interpretasi dan amendemen yang  
belum efektif (Lanjutan)

New standards, interpretations and amendments  
that are not yet effective (Continued)

- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan  
Keuangan" - Pengungkapan Kebijakan  
Akuntansi

- Amendments to PSAK 1 "Presentation of  
Financial Statements" - Disclosure of  
Accounting Policies

Amendemen PSAK 1 mengharuskan  
Perusahaan untuk mengungkapkan kebijakan  
akuntansi yang material dibandingkan  
signifikan. Amendemen ini mendefinisikan  
apa itu "informasi kebijakan akuntansi  
material" dan menjelaskan bagaimana  
mengidentifikasi kapan kebijakan akuntansi  
itu material. Lebih lanjut, amendemen ini  
mengklarifikasi bahwa kebijakan akuntansi  
yang tidak material tidak perlu diungkapkan.  
Apabila diungkapkan, tidak mengaburkan  
informasi kebijakan akuntansi material.

The amendment PSAK 1 to require entities to  
disclose their material rather than their  
significant accounting policies. The  
amendments define what is 'material  
accounting policy information' and explain  
how to identify when accounting policy  
information is material. They further clarify  
that immaterial accounting policy  
information does not need to be disclosed. If  
it is disclosed, it should not obscure material  
accounting information.

- Amendemen PSAK 16 "Aset Tetap" tentang  
hasil sebelum penggunaan yang diintensikan

- Amendment PSAK 16 "Fixed Assets" about  
proceeds before intended use

Amendemen tersebut melarang entitas untuk  
mengurangi biaya perolehan aset tetap dari  
penerimaan penjualan yang dihasilkan oleh  
aset tetap sebelum penggunaan yang  
diintensikan. Penerimaan atas penjualan  
memenuhi definisi pendapatan dan oleh  
karena itu harus diakui dalam laporan laba  
rugi. Amendemen tersebut akan berlaku  
efektif pada 1 Januari 2023 dan penerapan  
lebih awal diizinkan.

The amendments prohibit an Entity from  
deducting from the cost of a fixed asset the  
proceeds received from selling items  
produced by the fixed asset before it is ready  
for its intended use. The sales proceeds  
would have met the revenue definition and  
therefore should be recognised in profit or  
loss. The amendments will become effective  
on 1 January 2023 and earlier application is  
permitted.

- Amendemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi,  
Perubahan Estimasi Akuntansi, dan  
Kesalahan" - Definisi estimasi akuntansi

- Amendment PSAK 25 "Accounting Policies,  
Changes Accounting Estimate and Errors"  
Definition of Accounting Estimates

Amendemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi,  
Perubahan Estimasi Akuntansi, dan  
Kesalahan" - Definisi estimasi akuntansi  
mengklarifikasi bagaimana Perusahaan  
membedakan perubahan kebijakan akuntansi  
dari perubahan estimasi akuntansi.  
Perbedaan ini penting, karena perubahan  
estimasi akuntansi diterapkan secara  
prospektif untuk transaksi masa depan dan  
peristiwa masa depan lainnya, sedangkan  
perubahan kebijakan akuntansi umumnya  
diterapkan secara retrospektif terhadap  
transaksi masa lalu dan peristiwa masa lalu  
lainnya serta periode berjalan.

The amendment PSAK 25 "Accounting  
Policies, Changes in Accounting Estimates  
and Errors" - definition of Accounting  
estimate clarifies how Companies should  
distinguish changes in accounting policies  
from changes in accounting estimates. The  
distinction is important, because changes in  
accounting estimates are applied  
prospectively to future transactions and  
other future events, whereas changes in  
accounting policies are generally applied  
retrospectively to past transactions and  
other past events as well as the current  
period.

Ekshibit E/22

Exhibit E/22

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

b. Standar baru, amendemen dan penyesuaian  
Standar Akuntansi Keuangan efektif  
1 Januari 2022 (Lanjutan)

b. New Standards, amendments and improvements  
of Financial Accounting Standards effective from  
1 January 2022 (Continued)

Standar baru, interpretasi dan amendemen yang  
belum efektif (Lanjutan)

New standards, interpretations and amendments  
that are not yet effectives (Continued)

- Amendemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan" -  
Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas  
yang timbul dari Transaksi Tunggal

- The amendment PSAK 46 "Income Taxes" -  
Deferred Tax related to Assets and Liabilities  
arising from a Single Transaction

Amendemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan" -  
Pajak Tangguhan terkait aset dan liabilitas  
yang timbul dari transaksi tunggal  
mensyaratkan entitas untuk mengakui pajak  
tangguhan atas transaksi dimana pada  
pengakuan awalnya, menimbulkan perbedaan  
temporer kena pajak yang dapat dikurangkan  
dalam jumlah yang sama. Amendemen ini  
akan berlaku untuk jenis transaksi seperti  
sewa menyewa dan kewajiban pembongkaran  
yang mensyaratkan pengakuan tambahan atas  
aset dan liabilitas pajak tangguhan.

The amendment PSAK 46 "Income Taxes" -  
Deferred Tax related to Assets and Liabilities  
arising from single transaction require  
companies to recognise deferred tax on  
transactions that on initial recognition, give  
rise to equal amounts the taxable of  
deductible temporary differences. The  
amendment will typically apply to  
transactions such as leases of lessees and  
decommissioning obligations, and will  
require the recognition of additional  
deferred tax assets and liabilities.

Efek kumulatif atas pengakuan penyesuaian  
ini diakui dalam saldo laba, atau komponen  
ekuitas lainnya, jika sesuai.

The cumulative effect of recognising these  
adjustments is recognised in retained  
earnings, or another component of equity, as  
appropriate.

Amendemen tersebut harus diterapkan pada  
transaksi yang terjadi pada atau setelah awal  
periode komparatif paling awal yang  
disajikan. Selain itu, entitas harus mengakui  
aset pajak tangguhan (sepanjang  
kemungkinan besar aset tersebut dapat  
digunakan) dan liabilitas pajak tangguhan  
termasuk seluruh perbedaan temporer yang  
dapat dikurangkan dan perbedaan temporer  
terkait lainnya, akan diakui pada awal  
periode komparatif paling awal.

The amendment should be applied to  
transactions that occur on or after the  
beginning of the earliest comparative period  
presented. In addition, entities should  
recognise deferred tax assets (to the extent  
that it is probable that they can be utilised)  
and deferred tax liabilities at the beginning  
of the earliest comparative period for all  
deductible and taxable temporary  
differences associated.

c. Prinsip-prinsip konsolidasian

c. Principles of consolidation

Perusahaan dan seluruh entitas anak seperti yang  
dijelaskan di Catatan 1c. Pengendalian didapat  
ketika Perusahaan dan entitas anak terekspos atau  
memiliki hak atas imbal hasil variabel dari  
keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki  
kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil  
tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*.  
Dengan demikian, Perusahaan dan entitas anak  
mengendalikan *investee* jika dan hanya jika  
Perusahaan dan entitas anak memiliki:

The consolidated financial statements include the  
accounts of the Parent Company and all the  
subsidiaries mentioned in Note 1c. Control is  
achieved when the Company and subsidiaries is  
exposed, or has rights, to variable returns from its  
involvement with the investee and has the ability to  
affect those returns through power over the  
investee. Specifically, the Company and subsidiaries  
controls an investee if and only if the Company and  
subsidiaries has:

Ekshibit E/23

Exhibit E/23

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (Lanjutan)

c. Principles of consolidation (Continued)

- kekuasaan atas *investee* (contoh hak saat ini yang memberikan kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan *investee*);
- eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan
- kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbalhasilnya.

- power over the *investee* (i.e. existing rights that give the current ability to direct the relevant activities of the *investee*);
- exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the *investee*; and
- the ability to use its power over the *investee* to affect its returns.

Ketika Perusahaan dan entitas anak mempunyai hak suara kurang dari mayoritas atau hak serupa terhadap *investee*, Perusahaan dan entitas anak mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan dalam menilai apakah terdapat kekuasaan atas sebuah *investee*, termasuk:

When the Company and subsidiaries has less than majority of the voting rights or similar rights to an *investee*, the Company and subsidiaries considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an *investee*, including:

- pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lain *investee*;
- hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan
- hak suara Perusahaan dan entitas anak dan hak suara potensial

- the contractual arrangement with the other vote holders of the *investee*;
- rights arising from other contractual arrangements; and
- voting rights of the Company and subsidiaries and potential voting rights.

Perusahaan dan entitas anak menilai kembali apakah terdapat atau tidak pengendalian terhadap *investee* jika fakta dan keadaan yang menunjukkan bahwa ada perubahan satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Entitas anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal pengendalian dialihkan ke Perusahaan dan entitas anak dan dihentikan untuk dikonsolidasi sejak tanggal pengendalian ditransfer keluar dari Perusahaan dan entitas anak. Aset, liabilitas, pendapatan dan beban dari entitas anak, yang diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan, termasuk dalam laporan laba rugi dari tanggal Perusahaan dan entitas anak mendapatkan pengendalian sampai dengan tanggal Perusahaan dan entitas anak berhenti untuk mengendalikan entitas anak.

The Company and subsidiaries re-assesses whether or not it controls an *investee* if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Subsidiaries are fully consolidated from the date control is transferred to the Company and subsidiaries and cease to be consolidated from the date control is transferred out of the Company and subsidiaries. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the statement of income from the date the Company and subsidiaries gains control until the date the Company and subsidiaries ceases to control the subsidiary.

Laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan ke pemilik entitas induk dari Perusahaan dan entitas anak dan kepentingan non-pengendali, meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non-pengendali memiliki saldo defisit. Ketika diperlukan, penyesuaian dibuat pada laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansinya seragam dengan kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak. Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban dan arus kas dalam intra Perusahaan dan entitas anak terkait dengan transaksi antar entitas dalam Perusahaan dan entitas anak dieliminasi seluruhnya dalam konsolidasi.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the equity holders of the parent of the Company and subsidiaries and to the non-controlling interests, even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies into line with accounting policies of the Company and subsidiaries. All intra-Company and subsidiaries assets and liabilities, equity, income expenses and cash flows relating to transactions between members of the Company and subsidiaries are eliminated in full on consolidation.

Ekshibit E/24

Exhibit E/24

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (Lanjutan)

c. Principles of consolidation (Continued)

Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Perusahaan dan entitas anak:

*In case of loss of control over a subsidiary, the Company and subsidiaries:*

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian; dan
- mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba.

- *derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary;*
- *derecognizes the carrying amount of any NCI;*
- *derecognizes the cumulative translation differences, recorded in equity, if any;*
- *recognizes the fair value of the consideration received;*
- *recognizes the fair value of any investment retained;*
- *recognizes the surplus or deficit in profit or loss in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income; and*
- *reclassifies the parent's share of components previously recognized in comprehensive income to consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income or retained earnings, as appropriate.*

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Ketika pengendalian atas entitas anak hilang, bagian kepemilikan yang tersisa di entitas tersebut diukur kembali pada nilai wajarnya dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

*Changes in the parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in the loss of control are accounted for as equity transactions. When control over a previous subsidiary is lost, any remaining interest in the entity is remeasured at fair value and the resulting gain or loss is recognised in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.*

Kepentingan Non-Pengendali ("KNP") mencerminkan bagian atas laba rugi dan aset bersih dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

*Non-Controlling Interest ("NCI") represents the portion of the profit or loss and net assets of the subsidiary attributable to equity interests that are not owned directly or indirectly by the Company, which is presented in the consolidated statement of comprehensive income and under the equity section of the consolidated statement of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the equity holders of the parent company.*

d. Kombinasi bisnis

d. Business combination

Ketika Perusahaan dan entitas anak melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Perusahaan dan entitas anak mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi. Hal ini termasuk pengelompokan derivatif melekat dalam kontrak utama oleh pihak yang diakuisisi.

*When the Company and subsidiaries acquires a business, it assesses the financial assets acquired and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as at the acquisition date. This includes the separation of embedded derivatives in host contracts by the acquiree.*

Ekshibit E/25

Exhibit E/25

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

d. Kombinasi bisnis (Lanjutan)

d. Business combination (Continued)

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi (*acquisition method*). Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi baik pada nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan KNP atas aset bersih yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi.

*Business combinations are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred, measured at acquisition date fair value and the amount of any NCI in the acquiree. For each business combination, the acquirer measures the NCI in the acquiree either at fair value or at the proportionate share of the acquiree's identifiable net assets.*

Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

*Transaction costs incurred are directly expensed in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.*

Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset bersih entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui sebagai keuntungan dari pembelian dengan diskon pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Sebelum mengakui keuntungan dari pembelian dengan diskon, Perusahaan menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil-alih serta mengakui setiap aset atau liabilitas tambahan yang dapat diidentifikasi dalam pengkajian kembali tersebut. Perusahaan selanjutnya mengkaji kembali prosedur yang digunakan untuk mengukur jumlah yang dipersyaratkan untuk diakui pada tanggal akuisisi untuk seluruh hal-hal berikut ini:

*If the consideration is less than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized as a gain from a bargain purchase in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. Prior to recognizing the gain from the bargain purchase, the Company reassesses whether it has correctly identified all of the assets acquired and liabilities taken over and recognizes any additional assets or liabilities that may be identified in the reassessment. The Company further reviews the procedures used to measure the amount required to be recognized at the acquisition date for all of the following:*

- a. aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil-alih;
- b. kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi, jika ada;
- c. untuk kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, kepentingan ekuitas pihak pengakuisisi yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi; dan
- d. imbalan yang dialihkan.

- a. *identifiable assets acquired and liabilities taken over;*
- b. *non-controlling interests of the acquired party, if any;*
- c. *for business combinations achieved in stages, the acquirer's previously held equity interests in the acquired party; and*
- d. *consideration transferred.*

Tujuan dari kajian kembali ini untuk meyakinkan bahwa pengukuran tersebut telah mencerminkan dengan tepat semua informasi yang tersedia pada tanggal akuisisi.

*The purpose of the review is to ensure that the remeasurement accurately reflects all the information available at the acquisition date.*



Ekshibit E/26

Exhibit E/26

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

d. Kombinasi bisnis (Lanjutan)

d. Business combination (Continued)

Imbalan kontinjensi yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi diakui pada nilai wajar tanggal akuisisi. Perubahan nilai wajar atas imbalan kontinjensi setelah tanggal akuisisi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas, akan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian atau penghasilan komprehensif lain sesuai dengan PSAK 55 (Revisi 2014). Jika diklasifikasikan sebagai ekuitas, imbalan kontinjensi tidak diukur kembali dan Penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

Any contingent consideration to be transferred by the acquirer will be recognized at fair value at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration which is deemed to be an asset or liability will be recognized in accordance with PSAK 55 (Revised 2014) either in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income or as other comprehensive income. If the contingent consideration is classified as equity, it should not be remeasured until it is finally settled within equity.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan melalui laporan laba atau rugi.

In a business combination achieved in stages, the acquisition date fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquire is remeasured to fair value at the acquisition date through profit or loss.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* awalnya diukur pada biaya perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap KNP atas selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset bersih entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui sebagai laba atau rugi.

At acquisition date, goodwill is initially measured at cost being the excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognized for NCI over the net identifiable assets acquired and liabilities assumed. If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan uji penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit-Penghasil Kas ("UPK") dari Perusahaan dan entitas anak yang diharapkan akan bermanfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditetapkan atas UPK tersebut.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is allocated from the acquisition date, to each Cash-Generating Units ("CGU") of the Company and subsidiaries that are expected to benefit from the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquirer are assigned to those CGUs.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu atas UPK tersebut dihentikan, maka *goodwill* yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari penjualan operasi. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi UPK yang ditahan.

Where goodwill forms part of a CGU and part of the operation within that CGU is disposed of, the goodwill associated with the operation disposed of is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal of the operation. Goodwill disposed of in this circumstance is measured based on the relative values of the operation disposed of and the portion of the CGU retained.

Ekshibit E/27

Exhibit E/27

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

e. Penjabaran mata uang asing

e. Foreign currency translations

Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan ke dalam Rupiah untuk mencerminkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal tersebut. Jika ada keuntungan atau kerugian akan dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun berjalan.

Transactions involving foreign currencies are recorded at the rates prevailing at the time the transactions are made. At the consolidated statement of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to Rupiah to reflect Bank Indonesia's middle rate on the said date. Any resulting gains or losses are credited or charged to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the current year.

Laba rugi kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan, kecuali rugi kurs yang dikapitalisasi.

Foreign exchange gains and losses are credited or charged to operations for the year, except for capitalized foreign exchange losses.

Pembukuan akun TBG Global Pte. Ltd., entitas anak (Catatan 1c), dilakukan di dalam mata uang selain Rupiah. Untuk tujuan penyajian Laporan keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas entitas anak pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs nilai tukar pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, sementara laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dijabarkan dengan menggunakan kurs nilai tukar tahun yang bersangkutan. Hasil penyesuaian penjabaran ditampilkan sebagai bagian ekuitas sebagai "Selisih Translasi atas Mata Uang Asing".

The accounting of TBG Global Pte. Ltd., a subsidiary (Note 1c), is maintained in currency other than Rupiah. For presentation purposes of the consolidated financial statements, assets and liabilities of the subsidiaries at consolidated statements of financial position date are translated into Rupiah using the exchange rates at consolidated financial position date, while consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income are translated at the average rates of exchange for the respective year. Resulting translation adjustments are shown as part of equity as "Difference from Translation of Foreign Currency".

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 kurs tengah yang digunakan untuk US\$ 1 masing-masing adalah Rp 15.731 dan Rp 14.269 (nilai penuh).

As of 31 Desember 2022 and 2021 the exchange rates per US\$ 1 equivalents to Rp 15,731 and Rp 14,269 (full amount), respectively.

f. Aset dan liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas

f. Financial assets and liabilities and equity instruments

Perusahaan dan entitas anak mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Perusahaan dan entitas anak menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontrak instrumen keuangan tersebut.

The Company and subsidiaries recognized financial assets or financial liabilities in consolidated statement of financial position, when and only when, the Company and subsidiaries become party to contractual provision of the financial instrument.

1. Aset keuangan

1. Financial assets

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laporan laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

Financial assets are classified as financial assets measures at amortized cost fair value through other comprehensive income or fair value through profit or loss, using two basis, are:

- a) Model bisnis entitas dalam mengelola aset keuangan dan
- b) Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

- a) The entity's business model in managing financial assets and
- b) Characteristics of contractual cash flows from financial assets.

Ekshibit E/28

Exhibit E/28

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

f. Aset dan liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas  
(Lanjutan)

f. Financial assets and liabilities and equity  
instruments (Continued)

1. Aset keuangan (Lanjutan)

1. Financial assets (Continued)

Perusahaan dan entitas anak menentukan klasifikasi aset keuangannya pada saat pengakuan awalnya, sepanjang diperbolehkan, mengevaluasi penentuan klasifikasi aset keuangan pada setiap akhir tahun.

The Company and subsidiaries determine the classification of its financial assets at initial recognition, and when allowed, reevaluates the classification of such financial assets at each year-end.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi

Financial assets measured at fair value through profit or loss

Kategori ini meliputi aset keuangan “yang dimiliki untuk diperdagangkan” dan aset keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada awal penentuan. Suatu aset keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual apabila secara prinsip diperoleh untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Aset keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada saat penetapan awal adalah aset keuangan yang dikelola, dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan suatu strategi investasi yang terdokumentasi. Derivatif juga dikategorikan sebagai investasi yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan, kecuali ditetapkan sebagai lindung nilai efektif. Aset keuangan, yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diukur pada nilai wajar, dan segala perubahan nilai wajar diakui pada laporan laba rugi.

This category includes financial assets “held for trading” and those designated at fair value through profit or loss at inception. A financial asset is classified as held for trading if acquired principally for the purpose of selling in the short term. Financial assets designated at fair value through profit or loss at inception are those that are managed, and their performance evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented investment strategy. Derivatives are also categorized as held for trading, unless they are designated as effective hedges. Financial assets, at fair value through profit or loss are measured at fair value, and any fair value changes are recognized in profit or loss.

Perusahaan dan entitas anak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi berupa aset keuangan derivatif.

Financial assets of the Company and subsidiaries measured at fair value through profit or loss include derivative financial assets.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Financial assets are measured at amortized costs

Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (*effective interest rate method*), dimana metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan yang diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau Perusahaan dan entitas anak aset keuangan atau liabilitas keuangan) dan alokasi pendapatan bunga atau biaya bunga melebihi tahun yang bersangkutan.

After initial recognition, such financial assets are recorded at amortized cost using the effective interest rate method, which is the method used for calculating the amortized cost of a financial asset or financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and for allocating interest income or expense interest in future years.

Ekshibit E/29

Exhibit E/29

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

f. Aset dan liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas  
(Lanjutan)

f. Financial assets and liabilities and equity  
instruments (Continued)

1. Aset keuangan (Lanjutan)

1. Financial assets (Continued)

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan  
diamortisasi (Lanjutan)

Financial assets are measured at amortized  
costs (Continued)

Keuntungan dan kerugian terkait diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, demikian juga melalui proses amortisasi.

Gains and losses are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

Perusahaan dan entitas anak memiliki aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi berupa kas dan setara kas, pendapatan yang masih harus diterima, piutang usaha, piutang lain-lain dan uang jaminan.

Financial assets are measured at amortized costs of the Company and subsidiaries include cash and cash equivalents, accrued revenue, trade receivables, other receivables and refundable deposits.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar  
melalui penghasilan komprehensif lain

Financial assets measured at fair value  
through other comprehensive income

Perusahaan dan entitas anak tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada tanggal 31 Desember 2022.

The Company and subsidiaries has no financial assets measured at fair value through other comprehensive income as of 31 December 2022.

2. Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas

2. Financial liabilities and equity instruments

Instrumen utang dan ekuitas dikelompokkan sebagai liabilitas keuangan atau sebagai ekuitas sesuai dengan substansi pengaturan kontraktual.

Debt and equity instruments are classified as financial liabilities or as equity in accordance with the substance of the contractual arrangement.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi dan liabilitas keuangan lainnya. Perusahaan dan entitas anak menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Financial liabilities are classified as financial liabilities measured at fair value through profit or loss and other financial liabilities. The Company and subsidiaries determines the classification of financial liabilities at initial recognition.

Instrumen ekuitas

Equity instruments

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dan entitas anak akan dicatat sebesar jumlah yang diperoleh, setelah dikurangi dengan biaya emisi langsung.

An equity instrument is any contract that gives the right to the residual assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity instruments issued by the Company and subsidiaries will be recorded at the amounts received, after deducting direct issuance costs.

Ekshibit E/30

Exhibit E/30

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

f. Aset dan liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas  
(Lanjutan)

f. Financial assets and liabilities and equity  
instruments (Continued)

2. Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas  
(Lanjutan)

2. Financial liabilities and equity instruments  
(Continued)

Instrumen ekuitas (Lanjutan)

Equity instruments (Continued)

Sebuah instrumen merupakan instrumen ekuitas jika, dan hanya jika, kedua kondisi di bawah ini terpenuhi:

An instrument is an equity instrument if, and only if, both following conditions below are met:

- (i) Instrumen tersebut tidak memiliki liabilitas kontraktual:
  - (a) Untuk memberikan kas atau aset keuangan lainnya kepada entitas lain; atau
  - (b) Untuk menukar aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dalam kondisi yang tidak menguntungkan bagi penerbit.
- (ii) Jika instrumen akan atau dapat diselesaikan oleh penerbit yang memiliki instrumen ekuitas, apabila instrumen itu:
  - (a) Non-derivatif yang tidak memiliki liabilitas kontraktual terhadap penerbit untuk memberikan sejumlah variabel terhadap instrumen ekuitas pemilik; atau
  - (b) Derivatif yang akan diselesaikan oleh penerbit hanya dengan menukarkan sejumlah uang tunai atau aset keuangan lainnya untuk sejumlah instrumen ekuitas pemilik. Untuk kepentingan ini, instrumen ekuitas milik penerbit tidak meliputi instrumen yang terikat kontrak untuk penerimaan di masa mendatang atau pengiriman instrumen ekuitas milik penerbit.

- (i) The instrument does not have a contractual liabilities:
  - (a) To deliver cash or another financial asset to another entity; or
  - (b) To exchange financial assets or financial liability with another entity under conditions that are not profitable for issuers.
- (ii) If the instrument will or may be settled by the issuer which has an equity instrument, an instrument that:
  - (a) Non-derivatives that have no contractual liabilities to the issuer to deliver a variable number of owner's equity instruments; or
  - (b) Derivatives that will be completed by the issuer only in exchange for some cash or another financial asset for a number of owner's equity instruments. For this purpose, the instrument does not include the issuer's equity instruments that are under contract for the future receipt or delivery of issuer's equity instruments.

Instrumen keuangan majemuk, seperti obligasi atau instrumen konversi sejenis yang diubah menjadi sejumlah saham biasa oleh pemegangnya, diklasifikasikan secara terpisah sebagai liabilitas keuangan dan ekuitas sesuai dengan materi dalam perjanjian kontraktual. Pada tanggal penerbitan instrumen keuangan majemuk, nilai wajar dari komponen liabilitas diestimasi menggunakan tingkat suku bunga pasar yang berlaku untuk instrumen non-konversi yang sejenis.

Compound financial instruments, such as convertible bonds or similar instruments convertible into a number of common shares by the holder, are classified separately as financial liabilities and equity in accordance with the substance of the contractual agreement. On the date of issuance of a compound financial instrument, the fair value of the liability component is estimated using market interest rates applicable to similar non-convertible instruments.

Ekshibit E/31

Exhibit E/31

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

f. Aset dan liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas  
(Lanjutan)

f. Financial assets and liabilities and equity  
instruments (Continued)

2. Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas  
(Lanjutan)

2. Financial liabilities and equity instruments  
(Continued)

Instrumen ekuitas (Lanjutan)

Equity instruments (Continued)

Jumlah ini dicatat sebagai liabilitas atas dasar biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif sampai dengan pelaksanaan konversi atau pada tanggal jatuh tempo instrumen. Komponen ekuitas ditentukan dengan mengurangi jumlah komponen liabilitas dari nilai wajar instrumen keuangan majemuk secara keseluruhan. Jumlah ini diakui dan dimasukkan ke dalam ekuitas, setelah dikurangi dengan efek pajak penghasilan, dan tidak diperhitungkan kembali.

This amount is recorded as a liability on the basis of amortized cost using the effective interest rate method until the conversion or execution on the maturity date of the instrument. The equity component is determined by deducting the liability component from the fair value of the compound financial instrument taken as a whole. This amount is recognized and included in equity, net of income tax effects, and not recomputed.

Instrumen ekuitas Perusahaan dan entitas anak meliputi modal saham.

Equity instruments of the Company and subsidiaries include share capital.

Liabilitas keuangan

Financial liabilities

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangannya ke dalam satu atau dua kategori, tergantung pada tujuan saat pengakuisisian liabilitas tersebut.

The Company classifies its financial liabilities into one of two categories, depending on the purpose for which the liability was acquired.

Selain daripada liabilitas keuangan untuk tujuan hubungan lindung nilai (lihat penjelasan di bawah ini), kebijakan akuntansi milik Perusahaan untuk setiap kategori dijelaskan sebagai berikut:

Other than financial liabilities in a qualifying hedging relationship (see below), the Company's accounting policy or each category is as follows:

(i) Liabilitas keuangan diukur melalui laporan laba atau rugi

(i) Financial liabilities measured at fair value through profit or loss

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi termasuk liabilitas keuangan untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi.

Financial liabilities measured at fair value through profit or loss include the financial liabilities held for trading and liabilities designated upon initial recognition at fair value through profit or loss.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat.

Financial liabilities are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of resale in the near future

Ekshibit E/32

Exhibit E/32

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

f. Aset dan liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas  
(Lanjutan)

f. Financial assets and liabilities and equity  
instruments (Continued)

2. Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas  
(Lanjutan)

2. Financial liabilities and equity instruments  
(Continued)

Liabilitas keuangan (Lanjutan)

Financial liabilities (Continued)

(i) Liabilitas keuangan diukur melalui  
laporan laba atau rugi (Lanjutan)

(i) Financial liabilities measured at fair  
value through profit or loss  
(Continued)

Liabilitas derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif. Aset dan liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi dicatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajar dengan pengakuan keuntungan atau kerugian pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Derivative liabilities are also classified as held for trading unless the derivatives are designated as effective hedging instruments. Financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss are recorded in the consolidated statement of financial position at fair value with gains or losses recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Perusahaan dan entitas anak tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

The Company and subsidiaries has no financial liabilities measured at fair value through profit or loss as of 31 December 2022 and 2021.

(ii) Liabilitas keuangan lainnya

(ii) Other financial liabilities

Kategori ini berhubungan dengan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau diukur pada nilai wajar melalui keuntungan atau kerugian pada saat pengakuan liabilitas awal. Termasuk dalam liabilitas yang berasal dari operasi atau pinjaman dan utang.

This category pertains to financial liabilities that are not held for trading or designated as fair value through profit or loss upon the inception of the liability. This includes liabilities arising from operations or loans and borrowings.

Liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, beban bunga masih harus dibayar dicatat secara terpisah dari pokok pinjaman terkait dalam bagian liabilitas lancar.

Other financial liabilities are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. On the consolidated statement of financial position date, accrued interest is recorded separately from the principal involved in the current liabilities.

Untuk tujuan setiap liabilitas keuangan, beban bunga yang termasuk dalam liabilitas keuangan mencakup biaya transaksi awal, premi, bunga atau kupon yang harus dibayar pada saat penebusan atau pada saat kewajiban tersebut belum diselesaikan.

For the purposes of each financial liability, interest expense includes initial transaction costs and any premium payable on redemption, as well as any interest or coupon payable while the liability is outstanding.



Ekshibit E/33

Exhibit E/33

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

f. Aset dan liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas  
(Lanjutan)

f. Financial assets and liabilities and equity  
instruments (Continued)

2. Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas  
(Lanjutan)

2. Financial liabilities and equity instruments  
(Continued)

Liabilitas keuangan (Lanjutan)

Financial liabilities (Continued)

(ii) Liabilitas keuangan lainnya (Lanjutan)

(ii) Other financial liabilities (Continued)

Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian ketika liabilitas dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Gains and losses are recognized in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income when the liability is derecognized, as well as through the amortization using the effective interest rate method.

Perusahaan dan entitas anak memiliki liabilitas keuangan lainnya berupa utang usaha, utang lain-lain, beban masih harus dibayar, pinjaman jangka panjang dan surat utang.

The Company and subsidiaries have other financial liabilities consisting of trade payables, other payables, certain accrued expenses, long-term loan and notes.

3. Pengakuan

3. Recognition

Pada pengakuan awal, aset atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar, kecuali untuk aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi, ditambah atau dikurangi dengan biaya transaksi yang secara langsung dapat dibagikan untuk perolehan dari aset atau liabilitas keuangan tersebut. Pengukuran dari aset dan liabilitas keuangan tersebut bergantung pada klasifikasi dari aset dan liabilitas keuangan.

At initial recognition, financial assets or liabilities are measured at fair value, except for financial assets and liabilities measured at fair value through profit or loss, plus or minus the transaction costs that are directly attributable to the acquisition of financial assets or issuance of financial liabilities. The subsequent measurement of financial assets and liabilities depends on the classification of financial assets and liabilities.

4. Nilai wajar

4. Fair value

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayarkan untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell or transfer the liability takes place either:

- di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- jika terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset dan liabilitas tersebut

- in the principal market for the asset or liability; or
- in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan harus dapat diakses oleh Perusahaan dan entitas anak.

The principal or the most advantageous market must be accessible by the Company and subsidiaries.

Ekshibit E/34

Exhibit E/34

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

f. Aset dan liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas  
(Lanjutan)

f. Financial assets and liabilities and equity  
instruments (Continued)

4. Nilai wajar (Lanjutan)

4. Fair value (Continued)

Nilai wajar suatu aset atau liabilitas menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomik terbaiknya.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

Pengukuran nilai wajar aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

Perusahaan dan entitas anak menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

The Company and subsidiaries uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

PSAK 68 mensyaratkan pengungkapan tertentu yang mensyaratkan klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan di dalam melakukan pengukuran nilai wajar. Hirarki nilai wajar memiliki tingkatan sebagai berikut:

PSAK 68 requires certain disclosures which require the classification of financial assets and financial liabilities measured at fair value using a fair value hierarchy that reflects the significance of the inputs used in measuring fair value. Fair value hierarchy has the following levels:

Tingkat 1: Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik

Level 1: Quoted (unadjusted) prices in active markets for identical assets or liabilities.

Tingkat 2: Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga)

Level 2: Inputs other than market quotations included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (eg, prices) or indirectly (for example, derivatives prices)

Tingkat 3: Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi)

Level 3: Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs)

Ekshibit E/35

Exhibit E/35

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

f. Aset dan liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas  
(Lanjutan)

f. Financial assets and liabilities and equity  
instruments (Continued)

4. Nilai wajar (Lanjutan)

4. Fair value (Continued)

Untuk aset dan kewajiban yang diakui dalam laporan keuangan secara berulang, Perusahaan dan entitas anak menentukan apakah transfer telah terjadi antara Tingkat dalam hirarki dengan menilai kembali kategorisasi (berdasarkan masukan tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada akhir setiap tahun pelaporan.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statement on a recurring basis, the Company and subsidiaries determines whether transfers have occurred between Levels in the hierarchy by reassessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting year.

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan dalam pasar aktif pada tanggal laporan didasarkan pada harga kuotasi atau kuotasi harga pedagang efek yang mengikat (harga penawaran untuk jangka panjang dan harga permintaan untuk jangka pendek), tanpa adanya pengurangan untuk biaya transaksi. Sekuritas didefinisikan dalam pencatatan ini sebagai "terdaftar" diperjualbelikan dalam pasar aktif.

The fair value for financial instruments traded in active markets at the reporting date is based on their quoted price or binding dealer price quotations (bid price for long positions and ask price for short positions), without any deduction for transaction costs. Securities defined in these accounts as "listed" are traded in an active market.

Dimana Perusahaan dan entitas anak memiliki aset dan liabilitas keuangan dengan posisi saling hapus dalam risiko pasar atau risiko kredit pihak ketiga, telah memilih untuk menggunakan pengukuran pengecualian untuk mengukur nilai wajar atas eksposur risiko bersihnya dengan menerapkan harga penawaran atau permintaan ke posisi pembukaan bersih yang sesuai. Untuk seluruh instrumen keuangan lain yang tidak diperdagangkan dalam pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik valuasi yang dianggap tepat dan sesuai kondisi.

Where the Company and subsidiaries has financial assets and financial liabilities with offsetting positions in market risks or counterparty credit risk, it has elected to use the measurement exception to measure the fair value of its net risk exposure by applying the bid or ask price to the net open position as appropriate. For all other financial instruments not traded in an active market, the fair value is determined by using valuation techniques deemed to be appropriate in the circumstances.

Teknik penilaian termasuk pendekatan pasar (misalnya menggunakan transaksi *arm's length* yang disesuaikan seperlunya dan mengacu pada nilai pasar instrumen lain yang sama secara substansial) dan pendekatan pendapatan (misalnya analisis arus kas diskonto dan opsi model penentuan harga membuat penggunaan data pasar yang tersedia dan mendukung yang memungkinkan).

Valuation techniques include the market approach (i.e., using recent *arm's length* market transactions adjusted as necessary and reference to the current market value of another instrument that is substantially the same) and the income approach (i.e., discounted cash flow analysis and option pricing models making as much use of available and supportable market data as possible).

Ekshibit E/36

Exhibit E/36

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

f. Aset dan liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas  
(Lanjutan)

f. Financial assets and liabilities and equity  
instruments (Continued)

4. Nilai wajar (Lanjutan)

4. Fair value (Continued)

Seluruh aset dan liabilitas yang nilai wajarnya dinilai dan diungkapkan dalam Laporan keuangan konsolidasian dikategorikan dalam hirarki nilai wajar.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements are categorized within the fair value hierarchy.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Perusahaan dan entitas anak menentukan kelas aset dan liabilitas yang sesuai dengan dasar sifat, karakteristik dan risiko aset atau liabilitas dan level hirarki nilai wajar seperti yang dijelaskan di atas.

For the purpose of the fair value disclosures, the Company and subsidiaries has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

5. Pengukuran biaya perolehan diamortisasi

5. Amortized cost measurement

Biaya perolehan diamortisasi dari aset dan liabilitas keuangan adalah jumlah aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai.

The amortized cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal payments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method, calculated from the difference between initial amount and maturity amount, minus any reduction for impairment.

6. Penurunan nilai dari aset keuangan

6. Impairment of financial assets

Dalam PSAK 71, provisi penurunan nilai atas aset keuangan diukur menggunakan model kerugian kredit ekspektasian dan berlaku untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

In PSAK 71, impairment loss provision of financial assets measured at expected credit losses model ("ECLs") and applied for financial assets which measured at amortised cost or fair value through other comprehensive income.

Terdapat 2 (dua) basis pengukuran atas kerugian kredit ekspektasian, yaitu kerugian kredit ekspektasian 12 bulan atau kerugian kredit sepanjang umurnya. Perusahaan dan entitas anak akan melakukan analisis pengakuan awal menggunakan kerugian kredit ekspektasian 12 bulan dan akan berpindah basis apabila terjadi peningkatan resiko kredit yang signifikan setelah pengakuan awal.

There are 2 (two) basis of the measurement of expected credit losses, 12 month expected credit losses or lifetime expected credit losses. The Group will analyse the initial recognition using the 12 month expected credit losses and will move to lifetime expected credit losses if there is significant increase in credit risk after initial recognition.

Ekshibit E/37

Exhibit E/37

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

f. Aset dan liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas  
(Lanjutan)

f. Financial assets and liabilities and equity  
instruments (Continued)

7. Penghentian pengakuan

7. Derecognition

Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluarsa atau Perusahaan dan entitas anak mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi di mana Perusahaan dan entitas anak secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau liabilitas atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Perusahaan dan entitas anak diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

The Company and subsidiaries derecognize financial assets when the contractual rights of the cash flows arising from the financial assets expire or the Company and subsidiaries transfers all rights to receive contractual cash flows of financial assets in a transaction where the Company and subsidiaries has transferred substantially all the risks and rewards of ownership of financial assets. Any rights or obligations on the transferred financial assets that arise or are still owned by the Company and subsidiaries are recognized as assets or liabilities separately.

Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan liabilitas keuangan pada saat liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

The Company and subsidiaries derecognize financial liabilities when the obligation specified in the contract is released, canceled or expired.

Dalam transaksi di mana Perusahaan dan entitas anak secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan aset tersebut jika Perusahaan dan entitas anak tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan liabilitas yang timbul atau yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas.

In transactions in which the Company and subsidiaries neither retains nor transfers substantially all the risks and rewards of ownership of financial assets, the Company and subsidiaries derecognizes the assets if they do not retain control over the assets. The rights and obligations retained in the transfer are recognized separately as assets and liabilities as appropriate.

Dalam transfer di mana pengendalian atas aset masih dimiliki, Perusahaan dan entitas anak tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan yang berkelanjutan, dimana tingkat keberlanjutan Perusahaan dan entitas anak dalam aset yang ditransfer adalah sebesar perubahan nilai aset yang ditransfer.

In transfers in which control over the asset is retained, the Company and subsidiaries continues to recognize the assets to the extent of their continuing involvement, determined by the extent to which they are exposed to changes in the value of the transferred assets.

Ekshibit E/38

Exhibit E/38

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

f. Aset dan liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas  
(Lanjutan)

f. Financial assets and liabilities and equity  
instruments (Continued)

8. Saling hapus

8. Offsetting

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan Perusahaan dan entitas anak berintensi untuk menyelesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hal ini tidak umum terjadi dengan perjanjian induk untuk menyelesaikan secara bersih, dan aset dan kewajiban terkait disajikan sebesar nilai bruto dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if and only if there is a currently legal right to offset the recognized amounts and the Company and subsidiaries intends to either settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously. This is not generally the case with master netting agreements, and the related assets and liabilities are presented at gross amounts in the consolidated statement of financial position.

9. Instrumen keuangan derivatif

9. Derivative financial instruments

Derivatif adalah suatu instrumen keuangan atau kontrak lain dengan tiga karakteristik berikut ini:

A derivative is a financial instrument or other contract with all three of the following characteristics:

- a) nilainya berubah sebagai akibat dari perubahan variabel yang telah ditentukan (sering disebut dengan variabel yang mendasari/*underlying*), antara lain: suku bunga, harga instrumen keuangan, harga komoditas, nilai tukar mata uang asing, indeks harga atau indeks suku bunga, peringkat kredit atau indeks kredit, atau variabel lainnya. Untuk variabel non-keuangan, variabel tersebut tidak berkaitan dengan pihak-pihak dalam kontrak
- b) tidak memerlukan investasi awal bersih atau memerlukan investasi awal bersih dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang diperlukan untuk kontrak serupa lainnya yang diharapkan akan menghasilkan dampak yang serupa sebagai akibat perubahan faktor pasar
- c) diselesaikan pada tanggal tertentu di masa mendatang.

- a) its value changes in response to the change in a specified interest rate, financial instrument price, commodity price, foreign exchange rate, index of prices or rates, credit rating or credit index, or other variable, provided in the case of a non-financial variable that the variable is not specific to a party to the contract (sometimes called the "underlying")
- b) it requires no initial net investment or an initial net investment that is smaller than would be required for other types of contracts that would be expected to have a similar response to changes in market factors
- c) it is settled at a future date

Ekshibit E/39

Exhibit E/39

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

f. Aset dan liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas  
(Lanjutan)

f. Financial assets and liabilities and equity  
instruments (Continued)

9. Instrumen keuangan derivatif (Lanjutan)

9. Derivative financial instruments (Continued)

Perusahaan dan entitas anak menggunakan instrumen keuangan derivatif, seperti kontrak *forward* mata uang, untuk melindungi nilai risiko mata uang asing yang berasal dari denominasi pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat. Instrumen keuangan derivatif tersebut diakui pada nilai wajar pada tanggal dimana kontrak derivatif dibuat dan selanjutnya dinilai pada nilai wajar. Derivatif dicatat sebagai aset keuangan saat nilai wajar positif dan sebagai liabilitas keuangan saat nilai wajar negatif.

The Company and subsidiaries uses derivative financial instruments, such as forward currency contracts, to hedge its foreign currency risks arising from US dollar (USD)-denominated loans. Such derivative financial instruments are initially recognized at fair value on the date on which a derivative contract is entered into and are subsequently remeasured at fair value. Derivatives are carried as financial assets when the fair value is positive and as financial liabilities when the fair value is negative.

Laba rugi yang berasal dari perubahan nilai wajar derivatif dicatat langsung ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, kecuali untuk porsi efektif lindung nilai arus kas, yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Any gains or losses arising from changes in the fair value of derivatives are taken directly to consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, except for the effective portion of cash flow hedges, which is recognized in other comprehensive income.

Instrumen derivatif diklasifikasikan sebagai lancar dan tidak lancar berdasarkan penilaian fakta dan keadaan tertentu (seperti dasar arus kas kontraktual). Ketika Perusahaan dan entitas anak mempunyai derivatif sebagai lindung nilai ekonomi dan tidak diterapkan sebagai lindung nilai akuntansi untuk tahun diatas 12 bulan setelah tanggal pelaporan, derivatif diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Derivative instruments are classified as current or non-current based on an assessment of the facts and circumstances (i.e., the underlying contracted cash flows). When the the Company and subsidiaries will hold a derivative as an economic hedge and does not apply hedge accounting for a year beyond 12 months after the reporting date, the derivative is classified as non-current.

g. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

g. Transactions with related parties

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Perusahaan dan entitas anak jika:

A party is considered to be related party to the Company and subsidiaries if:

- a) langsung atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama dengan Perusahaan dan entitas anak; (ii) memiliki kepentingan dalam Perusahaan dan entitas anak yang memberikan pengaruh signifikan atas Perusahaan dan entitas anak; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Perusahaan dan entitas anak;
- b) suatu pihak yang berelasi dengan Perusahaan dan entitas anak;
- c) suatu pihak adalah ventura bersama dimana Perusahaan dan entitas anak sebagai *venture*;

- a) directly or indirectly through one or more intermediaries, the party (i) controls, or is controlled by, or is under common control with the Company and subsidiaries; (ii) has an interest in the Company and subsidiaries that gives significant influence over the Company and subsidiaries; or (iii) has joint control over the Company and subsidiaries;
- b) the party is an associated of the Company and subsidiaries;
- c) the party is a joint venture in which the Company and subsidiaries is a venturer;

Ekshibit E/40

Exhibit E/40

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

g. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (Lanjutan)

g. Transactions with related parties (Continued)

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Perusahaan dan entitas anak jika: (Lanjutan)

A party is considered to be related party to the Company and subsidiaries if: (Continued)

- d) suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Perusahaan dan entitas anak atau induk;
- e) suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dengan individu yang diuraikan dalam butir (a) atau (d);
- f) suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau untuk dimana hak suara signifikan pada beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (d) atau (e); atau
- g) suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari Perusahaan dan entitas anak atau entitas lain yang terkait dengan Perusahaan dan entitas anak.

- d) the party is a member of the key management personnel of the Company and subsidiaries or its parent;
- e) the party is a close member of the family of any individual referred to (a) or (d);
- f) the party is an entity that is controlled, jointly controlled or significant influenced by or for which significant voting power in such entity resides with, directly or indirectly, any individual referred to (d) or (e); or
- g) the party is a post-employment benefits plan for the benefit or employees of the Company and subsidiaries, or any entity that is a related party of the Company and subsidiaries.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak tidak berelasi.

The transactions are made based on the terms agreed by the parties, such term may not be the same as those transactions with unrelated parties.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas Laporan keuangan konsolidasian.

All material transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the consolidated financial statements.

h. Kas dan setara kas

h. Cash and cash equivalents

Pada laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dan cerukan. Pada laporan posisi keuangan konsolidasian, cerukan disajikan bersama sebagai pinjaman dalam liabilitas jangka pendek.

In the consolidated statement of cash flows, cash and cash equivalents include cash in hand, deposits held at call with banks, other short-term highly liquid investments with original maturities of three months or less, and bank overdrafts. In the consolidated statement of financial position, bank overdrafts are shown within borrowings in current liabilities.

i. Piutang

i. Receivables

Piutang usaha dan piutang non-usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi provisi atas penurunan nilai.

Trade and non-trade receivables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less any provision for impairment.



Ekshibit E/41

Exhibit E/41

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

i. Piutang (Lanjutan)

i. Receivables (Continued)

Kolektibilitas piutang usaha dan piutang non-usaha ditinjau secara berkala. Piutang yang diketahui tidak tertagih, dihapuskan dengan secara langsung mengurangi nilai tercatatnya.

Collectibility of trade and non-trade receivables is reviewed on an ongoing basis. Receivables which are known to be uncollectible are written off by reducing the carrying amount directly.

Akun penyisihan digunakan ketika terdapat bukti yang objektif bahwa Perusahaan dan entitas anak tidak dapat menagih seluruh jumlah piutang sesuai dengan persyaratan awal piutang.

An allowance account is used when there is objective evidence that the Company and subsidiaries will not be able to collect all amounts due according to the original terms of the receivables.

Jumlah kerugian penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan disajikan dalam "Beban kerugian kredit ekspektasian".

The amount of the impairment loss is recognized in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income within "Expected credit losses expenses".

Kebijakan penghapusan Perusahaan berdasarkan formulir yang akan disetujui oleh Dewan Direksi.

The Company's write-off policy based on the form that will be approved by Board of Directors.

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan mengakui PKKE untuk setiap aset keuangan yang diukur dengan menggunakan metode *amortized-cost* dan *FVTOCI* dengan pendekatan sebagai berikut:

At each reporting date, the Company recognizes PKKE for each financial asset which is measured using the *amortized-cost* method and *FVTOCI* with the following approach:

1. Jika tidak ada peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal dari setiap aset keuangan, maka Perusahaan akan mengakui PKKE sebesar ekspektasi kerugian dalam 12 bulan ke depan sejak tanggal pelaporan (atau kurang dari 12 bulan jika aset keuangan akan jatuh tempo kurang 12 bulan). Manajemen menentukan nilai PKKE 12 bulan berdasarkan rata-rata inflasi selama 1 tahun.
2. Jika terdapat peningkatan risiko kredit secara signifikan, maka Perusahaan akan mengakui PKKE sebesar ekspektasi kerugian sepanjang umur dari aset keuangan, sejak pengakuan awal aset keuangan tersebut.

1. If there has not been a significant increase in credit risk since the initial recognition of any financial assets, the Company will recognize AECL in the amount of the expected loss within the next 12 months from the reporting date (or less than 12 months if the financial assets have less than 12 months maturity). Management determines the value of the 12-month AECL based on the average inflation rate for 1 year.
2. If there is a significant increase in credit risk, the Company will recognize AECL in the amount of the expected lifetime loss of the financial asset, since the initial recognition of the financial asset.

j. Persediaan

j. Inventories

Persediaan diakui sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih (*the lower of cost or net realizable value*). Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode *first-in, first-out (FIFO) method*. Perusahaan dan entitas anak menentukan penyisihan persediaan usang berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada akhir tahun.

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Cost is determined based on the *first-in, first-out (FIFO) method*. The Company and subsidiaries provide a provision for inventory obsolescence based on a review of the condition of inventories at the end of the year.

Ekshibit E/42

Exhibit E/42

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

k. Beban dibayar di muka

Beban dibayar di muka diamortisasi dan dibebankan pada operasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus.

l. Aset tetap

Aset tetap, selain tanah dan menara telekomunikasi, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Nilai kini dari biaya yang diharapkan untuk penghentian suatu aset setelah digunakan termasuk dalam biaya perolehan aset yang bersangkutan jika kriteria pengakuan untuk provisi terpenuhi.

Menara telekomunikasi dicatat dengan menggunakan model revaluasi, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi, jika ada.

Revaluasi pada nilai wajar dilakukan pada setiap tahun pelaporan. Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Akan tetapi, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laporan laba rugi.

Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Penurunan nilai tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain, untuk mengurangi jumlah akumulasi dari surplus revaluasi, sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi dari aset tersebut.

Surplus revaluasi aset tetap dapat dialihkan ke saldo laba ketika terjadi penghentian atau pelepasan aset tersebut. Sebagian surplus revaluasi juga dapat dialihkan sejalan dengan penggunaan aset.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

k. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortized and charged to operations over the periods benefited using the straight-line method.

l. Property and equipment

Property and equipment, except land and telecommunication towers, are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Such cost includes the cost of replacing part of the fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are satisfied. The present value of the expected cost for the decommissioning of an asset after its use is included in the cost of the respective asset if the recognition criteria for a provision are met.

Telecommunication towers are accounted for using the revaluation model, which is the fair value at the date of revaluation less any accumulated depreciation and accumulated impairment losses after the date of revaluation, if any.

A revaluation at fair value is made at each reporting year. If the carrying amount of the asset increases as a result of the revaluation, the increase is recognized in other comprehensive income and accumulates in equity in the revaluation surplus section. However, the increase is recognized in profit and loss up to the same amount of impairment loss due to revaluation previously recognized in profit or loss.

If the carrying amount of the asset decreases as a result of the revaluation, the decrease is recognized in profit or loss. The impairment is recognized in other comprehensive income, to reduce the accumulated amount of the revaluation surplus, as long as it does not exceed the revaluation surplus balance of the asset.

The revaluation surplus of property and equipment may be transferred to the retained earnings when there is a termination or disposal of the asset. Some revaluation surpluses may also be transferred in line with asset use.

Ekshibit E/43

Exhibit E/43

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

l. Aset tetap (Lanjutan)

l. Property and equipment (Continued)

Dalam hal tersebut, maka surplus revaluasi yang dialihkan ke saldo laba adalah sebesar perbedaan antara jumlah penyusutan berdasarkan nilai revaluasian dan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan awalnya. Pengalihan tersebut tidak dilakukan melalui laba rugi.

In that case, the revaluation surplus transferred to retained earnings is the difference between the amount of depreciation based on the revaluation amount and the amount of depreciation based on the initial cost. The transfer is not made through profit or loss.

Pada 1 Oktober 2022, berdasarkan suatu kajian teknis maka Manajemen melakukan penyesuaian estimasi masa manfaat menara telekomunikasi dari 30 tahun menjadi 40 tahun. Manajemen berpendapat bahwa masa manfaat ini merupakan masa manfaat yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan dan entitas anak menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset tersebut, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin akan disesuaikan kembali. Perubahan tersebut akan berdampak pada jumlah penyusutan tahunan dan nilai buku aset menara sebesar Rp 202.794.

At 1 October 2022, based on a technical review, Management have adjusted the estimated useful lives of telecommunication towers from 30 years to 40 years. Management believes that this useful life is generally expected in the industry in which the Company and subsidiaries operate their business. Changes in the level of usage and technological developments could affect the economic useful lives and residual values of the asset, and therefore future depreciation charges may be readjusted. The change will have an impact on the annual depreciation amount and the book value of the tower assets amounted to Rp 202,794.

Penyusutan terhadap aset tetap dihitung dengan metode garis lurus (*straight-line method*), berdasarkan taksiran manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

Depreciation of property and equipment has been computed on a straight-line method, based on the estimated useful lives of the related assets, as follows:

	2022		2021		
	Masa manfaat/ Useful lives Tahun/ Years	Tarif penyusutan/ Depreciation rate	Masa manfaat/ Useful lives Tahun/ Years	Tarif penyusutan/ Depreciation rate	
Menara telekomunikasi	40	2,50%	30	3,33%	Telecommunication towers
Bangunan	20	5%	20	5%	Buildings
Menara bergerak	10	10%	10	10%	Transportable towers
Peralatan, perlengkapan kantor dan perangkat elektronik	4	25%	4	25%	Tools, office equipment and electronic hardware
Kendaraan	4	25%	4	25%	Vehicles
Genset	4	25%	4	25%	Gensets

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Land is stated at cost and is not depreciated.

Beban penyusutan diperhitungkan di dalam laporan laba rugi selama tahun buku di mana beban tersebut terjadi. Akumulasi penyusutan untuk aset yang direvaluasi, dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasiannya.

Depreciation expenses are taken to profit or loss during the financial year in which they are incurred. The accumulated depreciation for the revalued asset is eliminated against the gross carrying amount and the net carrying amount after elimination is restated for the amount of revaluation.

Ekshibit E/44

Exhibit E/44

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

l. Aset tetap (Lanjutan)

l. Property and equipment (Continued)

Perbaikan dan perawatan diperhitungkan ke dalam laporan laba rugi selama tahun di mana perbaikan dan perawatan terjadi. Biaya renovasi dan restorasi utama digabungkan ke dalam nilai tercatat aset jika biaya tersebut memiliki kemungkinan untuk memberikan manfaat di masa depan yang jumlahnya melebihi standar kinerja pada penilaian awal aset yang ada yang akan mengalir ke dalam Perusahaan dan entitas anak, dan disusutkan sebesar sisa umur manfaat aset tersebut.

*Repair and maintenance expenses are taken to profit or loss during the financial year in which they are incurred. The cost of major renovations and restorations is included in the carrying amount of the asset when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the Company and subsidiaries, and depreciated over the remaining useful life of the asset.*

Nilai residu, masa manfaat, dan metode depresiasi, dikaji pada tiap akhir tahun pelaporan, dan disesuaikan secara prospektif, sesuai dengan keadaan.

*The residual value, useful life and depreciation method are reviewed at the end of each reporting year, and adjusted prospectively, if appropriate.*

Ketika terdapat indikasi penurunan nilai, nilai tercatat aset dinilai dan segera dicatat berdasarkan jumlah terpulihkan.

*Where an indication of impairment exists, the carrying amount of the asset is assessed and written down immediately to its recoverable amount.*

Keuntungan atau kerugian pelepasan aset tetap ditentukan dengan membandingkan penerimaan dengan nilai tercatat dan dicatat ke dalam laba rugi dari operasi.

*Gains or losses on disposal are determined by comparing proceeds with the carrying amount and are included in profit or loss from operations.*

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

*Assets in progress are stated at cost and presented as part of the property and equipment. The accumulated cost will be reclassified to the appropriate property and equipment account when the installation is substantially completed and the asset is ready for its intended use.*

Nilai menara termasuk estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan menara, dan untuk restorasi lokasi menara. Liabilitas tersebut dicatat sebagai estimasi biaya pembongkaran menara dalam akun provisi jangka panjang.

*The value of the tower includes the initial estimated cost for dismantling and relocating the tower and for restoration of the tower location. This obligation is recorded as estimated towers retirement cost under long-term provision account.*

m. Properti investasi

m. Investment properties

Properti investasi adalah tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh Perusahaan dan entitas anak untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak digunakan maupun dijual dalam kegiatan operasi.

*Investment property is land or buildings or part of a building or both which is controlled by the Company and subsidiaries to earn rental or for capital appreciation or both, rather than for use or sale in the ordinary course of business.*

Ekshibit E/45

Exhibit E/45

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

m. Properti investasi (Lanjutan)

m. *Investment properties (Continued)*

Properti investasi diukur pada nilai wajar. Nilai wajar properti investasi diakui berdasarkan penilaian dari penilai independen yang memenuhi kualifikasi dan telah diakui, serta didukung oleh bukti pasar. Perubahan nilai wajar properti investasi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

*Investment property shall be measured at fair value. The fair value of investment property is recognized based on an appraisal by a qualified and authorized independent appraiser and supported by the market evidence. Changes to investment property fair value shall be recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.*

Properti investasi dihentikan pengakuannya (dikeluarkan) dari laporan posisi keuangan konsolidasian pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian dalam tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

*The investment property shall be eliminated from the consolidated statements of financial position on disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected when withdrawn. Gains or losses from investment property withdrawals or disposals are recorded in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income when incurred.*

n. Penurunan nilai aset non-keuangan

n. *Impairment of non-financial assets*

Pada setiap akhir tahun pelaporan, Perusahaan dan entitas anak menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset (yaitu aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset tak berwujud yang belum dapat digunakan, atau *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka Perusahaan dan entitas anak membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

*At the end of each reporting year, the Company and subsidiaries assesses whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists or impairment testing for an asset (i.e., an intangible asset with an indefinite useful life, an intangible asset not yet available for use, or goodwill acquired in a business combination) is required, the Company and subsidiaries makes an estimate of the asset's recoverable amount.*

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau unit penghasil kas ("UPK") dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi.

*An individual asset's recoverable amount is determined by the higher between the fair value of asset or cash generating unit ("CGU") less costs to disposal and its value in use, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from assets or group of other assets. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written-down to its recoverable amount. Impairment losses are recognized immediately in profit or loss.*

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar terkini atas nilai waktu dari uang dan risiko spesifik dari aset. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perusahaan dan entitas anak menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikasi nilai wajar yang tersedia.

*In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. If no such transactions can be identified, the Company and subsidiaries use an appropriate valuation model to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by multiple valuation or other available fair value indicators.*

Ekshibit E/46

Exhibit E/46

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

n. Penurunan nilai aset non-keuangan (Lanjutan)

n. Impairment of non-financial assets (Continued)

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Kerugian penurunan nilai dari operasi yang dilanjutkan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sesuai dengan kategori beban yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

*In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.*

Penilaian dilakukan pada akhir setiap tahun pelaporan tahunan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya untuk aset selain *goodwill* mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

*An assessment is made at the end of each reporting year as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset other than goodwill may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the entity estimates the recoverable amount.*

Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, bersih setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di tahun mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

*A previously recognized impairment loss for an asset is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. Reversal of an impairment loss is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future years to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.*

Penurunan nilai atas *goodwill* dicatat pada kerugian atas penurunan nilai *goodwill* pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

*Impairment of goodwill is recorded in loss on impairment of goodwill in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.*

o. Sewa

o. Leases

Pada tanggal permulaan suatu kontrak, Perusahaan dan entitas anak menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

*At the inception of a contract, the Company and subsidiaries assesses whether the contract is, or contains a lease. A contract is, or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.*

Untuk menilai apakah suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan suatu aset identifikasian, Perusahaan dan entitas anak menilai apakah:

*To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company and subsidiaries assesses whether:*

Ekshibit E/47

Exhibit E/47

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

o. Sewa (Lanjutan)

o. Leases (Continued)

- Kontrak melibatkan penggunaan suatu aset identifikasian ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit dan secara fisik dapat dibedakan atau mewakili secara substansial seluruh kapasitas aset yang secara fisik dapat dibedakan. Jika pemasok memiliki hak substitusi substantif, maka aset tersebut tidak teridentifikasi;
- Perusahaan dan entitas anak memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian;
- Perusahaan dan entitas anak memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Perusahaan dan entitas anak memiliki hak ini ketika hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan. Dalam kondisi tertentu di mana semua keputusan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya, Perusahaan dan entitas anak memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset tersebut jika:
  - Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset; dan
  - Perusahaan telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal inisiasi atau pada saat penilaian kembali suatu kontrak yang mengandung suatu komponen sewa, Perusahaan dan entitas anak mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa.

Pada pengakuan awal, Perusahaan dan entitas anak mencatat aset hak-guna dan liabilitas sewa.

Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar sesuai kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

- *The contract involves the use of an identified asset - this may be specified explicitly or implicitly and should be physically distinct or represent substantially all of the capacity of a physically distinct asset. If the supplier has the substantive substitution right, then the asset is not identified;*

- *The Company and subsidiaries has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use;*

- *The Company and subsidiaries have the right to direct the use of the identified asset. The Company and subsidiaries have this right when it has the decisionmaking rights that are most relevant to changing how and for what purpose the asset is used. In certain circumstances where all the decisions about how and for what purpose the asset is used are predetermined, the Company and subsidiaries has the right to direct the use of the asset if either:*

- *The Company has the right to operate the asset; and*
- *The Company has designed the asset in a way that predetermined how and for what purpose it will be used.*

*At inception or on re-assessment of a contract that contains a lease component, the Company and subsidiaries allocates consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices.*

*At initial recognition, the Company and subsidiaries recorded the right-of-use asset and lease liability.*

*The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.*

Ekshibit E/48

Exhibit E/48

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

o. Sewa (Lanjutan)

o. Leases (Continued)

Aset hak-guna disusutkan dengan menggunakan metode garis-lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir masa manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

The right-of-use asset is depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini atas pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, digunakan suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan dan entitas anak.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not yet paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, the Company and subsidiaries's incremental borrowing rate.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi:

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- Pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara-substansi;
- Pembayaran sewa variabel yang bergantung pada suatu indeks atau suku bunga, yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- Jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan dalam jaminan nilai residual;
- Harga eksekusi opsi beli dimana Perusahaan dan entitas anak cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut, pembayaran sewa dalam periode perpanjangan opsional jika Perusahaan dan entitas anak cukup pasti untuk mengeksekusi opsi perpanjangan; dan
- Penalti untuk penghentian dini dari sewa kecuali jika Perusahaan dan entitas anak cukup pasti untuk tidak mengakhiri lebih dini.

- Fixed payments, including in-substance fixed payments;
- Variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;
- Amounts expected to be payable under a residual value guarantee;
- The exercise price under a purchase option that the Company and subsidiaries is reasonably certain to exercise, lease payments in an optional renewal period if the Company and subsidiaries is reasonably certain to exercise an extension option; and
- Penalties for early termination of a lease unless the Company and subsidiaries is reasonably certain not to terminate early.

Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi Perusahaan dan entitas anak atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau jika Perusahaan dan entitas anak mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian.

Lease liability remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in the Company and subsidiaries's estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee, or if the Company and subsidiaries changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension or termination option.

Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak-guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak-guna telah berkurang menjadi nol.

When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use assets, or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

Sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah

Short-term leases and leases of low-value assets

Perusahaan dan entitas anak memilih untuk tidak mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa maksimal 12 bulan dan sewa atas aset bernilai rendah. Perusahaan dan entitas anak mengakui pembayaran sewa terkait dengan sewa ini sebagai beban dengan dasar garis-lurus selama masa sewa.

The Company and subsidiaries have elected not to recognize right-of use assets and lease liabilities for short-term leases that have a maximum lease term of 12 months and leases of low-value assets. The Company and subsidiaries recognize the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.



Ekshibit E/49

Exhibit E/49

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

o. Sewa (Lanjutan)

Sewa aset tetap

Perusahaan dan entitas anak melakukan sewa atas aset tetap tertentu yang diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan.

Jumlah sewa pembiayaan yang awalnya diakui sebagai aset tetap, diukur mana yang lebih rendah antara nilai wajar aset dan nilai kini utang pembayaran sewa minimum selama masa sewa. Komitmen sewa disajikan sebagai liabilitas. Pembayaran sewa dianalisis antara modal dan bunga. Unsur bunga sewa diperhitungkan dan dibebankan di dalam laba rugi selama periode sewa sehingga mencerminkan proporsi tetap liabilitas sewa.

Aset sewa pembiayaan dalam aset tetap disusutkan atas dasar penggunaan selama taksiran umur operasi aset tetap tersebut.

Aset sewa pembiayaan disusutkan dengan metode yang sama dan berdasarkan masa manfaat sebagaimana diestimasikan untuk aset tetap perolehan langsung. Akan tetapi, jika tidak terdapat kepastian yang memadai bahwa Perusahaan dan entitas anak akan memperoleh kepemilikan pada akhir masa sewa, aset sewa pembiayaan disusutkan penuh selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dan umur manfaatnya.

Perjanjian sewa yang tidak memenuhi kriteria di atas, dicatat sebagai sewa operasi dimana pembayarannya diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

p. Perpajakan

Beban pajak penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika berkaitan dengan item yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung dalam ekuitas. Dalam kasus ini, pajak diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau langsung dalam ekuitas.

i. Pajak kini

Beban pajak penghasilan kini dihitung dengan dasar hukum pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan. Aset atau liabilitas pajak penghasilan kini terdiri dari kewajiban kepada atau klaim dari otoritas pajak yang berhubungan dengan tahun pelaporan kini atau sebelumnya, yang belum dibayar pada akhir tahun tanggal pelaporan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

o. Leases (Continued)

Leases of property and equipment

The Company and subsidiaries leases certain property and equipment that classified as finance lease.

The amount of finance lease that initially recognized as a property and equipment is the lower of the fair value of the leased asset and the present value of the minimum lease payments payable over the term of the lease. The corresponding lease commitment is shown as a liability. Lease payments are analyzed between capital and interest. The interest element is charged to profit or loss over the period of the lease and is calculated so that it represents a constant proportion of the lease liability.

Finance lease assets under property and equipment are depreciated using utilisation basis over their estimated operating life.

Leased assets are depreciated using the same method and based on the useful lives as estimated for directly acquired property and equipment. However, if there is no reasonable certainty that the Company and subsidiaries will obtain ownership by the end of the lease term, the leased assets are fully depreciated over the shorter of the lease terms and their economic useful lives.

Lease arrangements that do not meet the above criteria are accounted for as operating leases for which payments are charged as an expense on the straight-line basis over the lease year.

p. Taxation

Income tax expense

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognized in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognized in other comprehensive income or directly in equity.

i. Current tax

The current Income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the reporting date. Current income tax assets and/or liabilities comprise those obligations to, or claims from, tax authorities relating to the current or prior reporting year, that are unpaid at the end of each reporting year date.

Ekshibit E/50

Exhibit E/50

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

p. Perpajakan (Lanjutan)

p. Taxation (Continued)

Beban pajak penghasilan (Lanjutan)

Income tax expense (Continued)

i. Pajak kini (Lanjutan)

i. Current tax (Continued)

Pajak penghasilan diperhitungkan berdasarkan tarif pajak dan hukum pajak yang berlaku pada tahun fiskal tersebut.

They are calculated according to the tax rates and tax laws applicable to the fiscal years to which they relate, based on the taxable profit for the year.

ii. Pajak tangguhan

ii. Deferred tax

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui ketika jumlah tercatat dari aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berbeda dari dasar perpajakannya, kecuali jika perbedaan itu terjadi karena:

Deferred tax assets and liabilities are recognised where the carrying amount of an asset or liability in the consolidated statement of financial position differs from its tax base, except for differences arising on:

- Pengakuan awal *goodwill*
- Pengakuan awal aset atau liabilitas pada saat transaksi yang bukan merupakan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi terjadi tidak mempengaruhi akuntansi atau laba kena pajak, dan
- Investasi pada entitas anak dan pengendalian bersama entitas dimana Perusahaan dan entitas anak mampu mengendalikan waktu pembalikan perbedaan dan kemungkinan besar bahwa perbedaan tersebut tidak akan dibalik pada masa yang akan datang.

- The initial recognition of goodwill
- The initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting or taxable profit, and
- Investments in subsidiaries and jointly controlled entities where the Company and subsidiaries is able to control the timing of the reversal of the difference and it is probable that the difference will not reverse in the foreseeable future.

Pengakuan dari aset pajak tangguhan terbatas pada saat dimana terdapat kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia terhadap perbedaan yang dapat digunakan.

Recognition of deferred tax assets is restricted to those instances where it is probable that taxable profit will be available against which the difference can be utilised.

Jumlah aset atau liabilitas ditentukan dengan menggunakan tarif pajak pada saat tanggal pelaporan dan di harapkan akan digunakan ketika liabilitas pajak tangguhan/(aset) telah diselesaikan/(dipulihkan).

The amount of the asset or liability is determined using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the reporting date and are expected to apply when the deferred tax liabilities/(assets) are settled/(recovered).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan di saling hapus ketika Perusahaan dan entitas anak memiliki hak hukum untuk saling hapus aset dan liabilitas pajak kini yang berhubungan dengan pungutan oleh otoritas pajak yang sama atas:

Deferred tax assets and liabilities are offset when the Company and subsidiaries has a legally enforceable right to offset current tax assets and liabilities and the deferred tax assets and liabilities relate to taxes levied by the same tax authority on either:

- Perusahaan dan entitas anak yang dikenakan pajak adalah sama, atau

- The same taxable of the Company and subsidiaries, or

Ekshibit E/51

Exhibit E/51

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

p. Perpajakan (Lanjutan)

p. Taxation (Continued)

Beban pajak penghasilan (Lanjutan)

Income tax expense (Continued)

ii. Pajak tanggungan (Lanjutan)

ii. Deferred tax (Continued)

- Kelompok entitas yang berbeda yang bertujuan untuk menyelesaikan aset pajak kini secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas, pada tahun masa depan dimana jumlah aset atau liabilitas pajak tanggungan signifikan diharapkan untuk di selesaikan atau di pulihkan.

- Different Company and subsidiaries entities which intend either to settle current tax assets and liabilities on a net basis, or to realise the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future year in which significant amounts of deferred tax assets or liabilities are expected to be settled or recovered.

iii. Pajak penghasilan final

iii. Final tax income

Pada 6 September 2017, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 (PP34) tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan. Menurut PP34 ini, untuk sewa menara telekomunikasi yang tahun sewanya dimulai sejak berlakunya PP34 ini pada 2 Januari 2018, maka penghasilan atas menara telekomunikasi tersebut akan dikenakan pajak penghasilan dengan tarif final 10%. Sedangkan penghasilan atas sewa menara telekomunikasi yang tahun sewanya dimulai sebelum berlakunya PP34 tersebut.

On 6 September 2017, the Government of Indonesia issued the Government Regulation (GR) No. 34 (GR34) regarding Income Tax on Income from Land and/or Building Rental. According to the GR34, for lease of telecommunication towers wherein the lease term commenced from the inception of this PP34 on 2 January 2018, the telecommunication tower's income shall be subject to the final income tax at rate of 10%. While the rental telecommunication tower income, which is the rental year commencing prior to the enactment of GR34, remains subject to the non final income tax.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Value-Added Tax (VAT)

Pendapatan, beban dan aset diakui bersih dari jumlah PPN, kecuali apabila PPN timbul pada saat pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dipulihkan dari otoritas perpajakan, dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari pos biaya, sebagaimana yang berlaku.

Revenue, expenses and assets are recognized net of the amount of VAT, except where the VAT incurred on a purchase of assets or services are not recoverable from the taxation authority, in which case the VAT is recognized as part of the cost of acquisition of the asset or as part of the expense item as applicable.

Hal-hal perpajakan lainnya

Other taxation matters

Jika terdapat ketidakpastian mengenai posisi pengarsipan Grup terkait dasar pengenaan pajak atas aset atau liabilitas kena pajak atas transaksi tertentu atau asumsi terkait perpajakan lainnya, maka Grup:

When there is uncertainty concerning the Group's filing position regarding the tax bases of assets or liabilities, the taxability of certain transactions or other tax-related assumptions, then the Group:

- Mempertimbangkan apakah perlakuan pajak yang tidak pasti harus dipertimbangkan secara terpisah, atau bersama-sama sebagai suatu Grup, berdasarkan pendekatan mana yang memberikan prediksi dari resolusi yang terbaik;
- Menentukan apakah ada kemungkinan besar otoritas pajak akan menerima perlakuan pajak yang tidak pasti; dan

- Considers whether uncertain tax treatments should be considered separately, or together as a Group, based on which approach provides better predictions of the resolution;
- Determines if it is probable that the tax authorities will accept the uncertain tax treatment; and

Ekshibit E/52

Exhibit E/52

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

p. Perpajakan (Lanjutan)

p. Taxation (Continued)

Beban pajak penghasilan (Lanjutan)

Income tax expense (Continued)

Hal-hal perpajakan lainnya (Lanjutan)

Other taxation matters (Continued)

- Jika kemungkinan besar otoritas perpajakan tidak menerima perlakuan pajak tidak pasti, pengukuran ketidakpastian pajak bergantung pada metode mana yang lebih baik untuk memprediksi penyelesaian ketidakpastian. Pengukuran ini harus didasarkan pada asumsi bahwa masing-masing otoritas perpajakan akan memeriksa jumlah yang berhak untuk diperiksa dan otoritas tersebut memiliki pengetahuan penuh atas seluruh informasi terkait ketika melakukan pemeriksaan tersebut.

- If it is not probable that the uncertain tax treatment will be accepted, measure the uncertain tax based on the most likely amount or expected value, depending on whichever method better predicts the resolution of the uncertainty. This measurement is required to be based on the assumption that each of the tax authorities will examine amounts they have a right to examine and have full knowledge of all related information when making those examinations.

q. Cadangan imbalan pasca-kerja

q. Provision for post-employment benefits

Program manfaat pasti

Defined benefit plan

Perusahaan dan entitas anak mendanai program imbalan pasca-kerja sesuai dengan Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.

The Company and subsidiaries set up fund for post-employment benefit program in accordance with Labor Law No. 11/2020.

Liabilitas atau aset imbalan kerja bersih adalah agregat dari nilai kini liabilitas imbalan pasti pada akhir tahun pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program (jika ada), disesuaikan dengan dampak yang membatasi aset imbalan pasti bersih terhadap batas atas aset. Batas atas aset adalah nilai sekarang dari manfaat ekonomis yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana dari program atau pengurangan iuran masa mendatang tersebut.

The net pension liability or asset is the aggregate of the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting year reduced by the fair value of plan assets (if any), adjusted for any effect of limiting a net defined benefit asset to the asset ceiling. The asset ceiling is the present value of any economic benefits available in the form of refunds from the plan or reductions in future contributions to the plan.

Beban tersebut berdasarkan perhitungan aktuarial independen dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit".

The provision is estimated based on actuarial calculations prepared by an independent firm of actuaries using the "Projected Unit of Credit" method.

Biaya imbalan pasti terdiri dari:

Net pension cost comprises the following:

- Biaya jasa
- Bunga neto atas liabilitas atau aset imbalan pasti neto
- Pengukuran kembali liabilitas atau aset imbalan pasti neto

- Service cost
- Net interest on the net defined benefit liability or asset
- Remeasurements of net defined benefit liability or asset

Biaya jasa meliputi biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian dari dan pembayaran yang tidak rutin diakui sebagai beban dalam laba rugi. Biaya jasa lalu diakui pada tanggal yang lebih awal antara ketika amendemen atau kurtailmen program terjadi, dan ketika Perusahaan dan entitas anak mengakui biaya restrukturisasi terkait atau biaya pesangon. Aset program adalah aset yang dimiliki oleh program pensiun imbalan pasti. Aset ini diukur pada nilai wajar pada akhir periode pelaporan.

Service costs which include current service costs, past service costs and gains or losses on nonroutine settlements are recognized as expense in profit or loss. Past service costs are recognized at the earlier of the date when the plan amendment or curtailment occurs and when the Company and subsidiaries recognises related restructuring cost or termination benefits. Plan assets are assets that are held by defined benefit pension plans. These assets are measured at fair value at the end of the reporting period.

Ekshibit E/53

Exhibit E/53

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

q. Cadangan imbalan pasca-kerja (Lanjutan)

Program manfaat pasti (Lanjutan)

Bunga bersih atas liabilitas atau aset imbalan pasti adalah perubahan selama tahun berjalan pada bunga bersih atas liabilitas atau aset imbalan pasti yang muncul dari waktu ke waktu yang ditentukan dengan mengalikan tingkat diskonto berdasarkan obligasi pemerintah dengan liabilitas atau aset imbalan pasti bersih. Bunga bersih atas liabilitas atau aset imbalan pasti diakui sebagai beban atau pendapatan dalam laba rugi.

Pengukuran kembali terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas atau aset imbalan pasti.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada tahun terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada tahun berikutnya.

Imbalan jangka panjang lainnya

Perusahaan dan entitas anak juga memberikan manfaat penghargaan jangka panjang lainnya dalam bentuk cuti panjang dan tunjangan cuti panjang.

Beban tersebut berdasarkan perhitungan aktuarial independen dengan menggunakan metode "Projected-Unit-Credit". Beban jasa masa kini termasuk beban jasa lalu dan keuntungan atau kerugian aktuarial dibebankan langsung ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

r. Modal saham

Modal saham diukur pada nilai nominal untuk seluruh saham yang ditempatkan. Pada saat Perusahaan menempatkan lebih dari satu jenis saham, akun terpisah dikelola untuk tiap jenis saham dan jumlah saham yang ditempatkan.

s. Transaksi restrukturisasi entitas sepengendali

Transaksi restrukturisasi entitas sepengendali berupa pengalihan aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu Perusahaan dan entitas anak yang sama, bukan merupakan perubahan pemilikan dalam arti substansi ekonomi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

q. Provision for post-employment benefits  
(Continued)

Defined benefit plan (Continued)

Net interest on the net defined benefit liability or asset is the change during the year in the net defined benefit liability or asset that arises from the passage of time which is determined by applying the discount rate based on government bonds to the net defined benefit liability or asset. Net interest on the net defined benefit liability or asset is recognized as expense or income in profit or loss.

Remeasurement consists of actuarial gains and losses, returns on plan assets and any changes in the impact of asset ceilings, excluding amounts included in net interest on defined balance liabilities or assets.

Remeasurement of the net defined benefit liability (asset) is recognized in other comprehensive income in the year it is incurred. Remeasurements are not reclassified to profit or loss in subsequent years.

Other long-term benefits

The Company and subsidiaries also provide other long-term rewards in the form of long leave and long leave allowances.

The provision is estimated based on actuarial calculations prepared by an independent firm of actuaries using the "Projected Unit of Credit" method. Current service costs including past service cost and actuarial gain or loss are charged directly to statement of profit or loss and other comprehensive income of the current year.

r. Share capital

Share capital is measured at par value for all shares issued. When the Company issues more than one class of shares, a separate account is maintained for each class of shares and the number of shares issued.

s. Restructuring transactions of entities under common control

Restructuring transactions of entities under common control represent transfer of assets, liabilities, shares or other ownership instruments to reorganize entities within the same Company and subsidiaries, therefore resulting in no changes of ownership in terms of economic substance.

Ekshibit E/54

Exhibit E/54

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

s. Transaksi restrukturisasi entitas sepengendali  
(Lanjutan)

s. Restructuring transactions of entities under  
common control (Continued)

Sehingga transaksi demikian tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi seluruh kelompok perusahaan ataupun bagi entitas individual dalam kelompok perusahaan tersebut. Karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi pemilikan atas aset, liabilitas, saham, atau instrumen kepemilikan lainnya yang dipertukarkan, maka aset maupun liabilitas yang pemilikannya dialihkan (dalam bentuk hukumnya) harus dicatat sesuai dengan nilai tercatat seperti penggabungan usaha berdasarkan metode penyatuan kepemilikan (*pooling-of-interest*).

And should not result in any gains or losses for the whole Company and subsidiaries companies or for the individual entity in the Company and subsidiaries. Since restructuring transactions of entities under common control do not result in changes in economic substance of ownership in transferred assets, shares, liabilities or other ownership instruments, the transferred assets or liabilities (in legal form) should be recorded at book value in a manner similar to business combination transactions using the pooling-of-interest method.

Unsur-unsur laporan keuangan dari perusahaan yang direstrukturisasi untuk tahun terjadinya restrukturisasi tersebut dan untuk tahun perbandingan yang disajikan, harus disajikan sedemikian rupa seolah-olah Perusahaan tersebut telah bergabung sejak permulaan tahun yang disajikan tersebut.

The financial statements items of the restructured companies for the year in which the restructuring occurs and for any comparative years should be presented as if the Companies had been combined from the beginning of the earliest year presented.

Sebelum 1 Januari 2013, selisih antara harga pengalihan dengan nilai tercatat setiap transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali dibukukan dalam akun "Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali". Saldo akun tersebut selanjutnya disajikan sebagai unsur ekuitas.

Before 1 January 2013, the difference between transfer price and book value for each restructuring transaction of entities under common control is recorded in an account entitled "Differences arising from restructuring transactions of entities under common control". The account balance is presented as a component of the equity.

Efektif 1 Januari 2013, selisih antara harga pengalihan dengan nilai tercatat setiap transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali dibukukan dalam akun "Tambah modal disetor".

Effective 1 January 2013, the difference between transfer price and book value for each restructuring transaction of entities under common control is recorded in an account entitled "Additional paid-in capital".

t. Tambahan modal disetor - bersih

t. Additional paid-in capital - net

Tambahan modal disetor - bersih merupakan selisih antara harga penawaran dari hasil penawaran umum perdana saham Perusahaan dengan nilai nominal saham, setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penawaran umum perdana saham tersebut.

Additional paid-in capital - net represents the difference between the offering price of the shares of the Company at the initial public offering with the par value of such shares, net of shares issuance costs.

u. Saham treasuri

u. Treasury stocks

Ketika Perusahaan membeli modal saham ekuitas (saham treasuri), imbalan yang dibayar, termasuk biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan (dikurangi pajak penghasilan) dikurangkan dari ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik ekuitas sampai saham tersebut ditarik atau diterbitkan kembali. Apabila saham treasuri ditarik kembali, selisih antara harga perolehan dengan nilai nominal dialokasikan antara tambahan modal disetor dan saldo laba.

Where the Company purchases its share capital (treasury shares), the consideration paid, including any directly attributable incremental costs (net of income taxes) is deducted from equity attributable to the equity holders until the shares are retired or reissued. When the treasury stock is retired, the excess of acquisition cost over par value shall be allocated between the related additional paid-in capital and retained earnings.

Ekshibit E/55

Exhibit E/55

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

u. Saham treasury (Lanjutan)

Apabila saham treasury dijual, keuntungan atau kerugian yang timbul tidak diakui dalam laba rugi tetapi diakui pada tambahan modal disetor.

u. Treasury stocks (Continued)

When the treasury shares is sold, gain or loss is not recognized in profit or loss but is recognized in additional paid-in capital.

v. Dividen

Dividen diakui pada saat dividen secara legal menjadi terutang. Dalam dividen terhadap pemegang saham ekuitas, dividen menjadi terutang pada saat diumumkan oleh Direksi. Dalam dividen final, dividen menjadi terutang pada saat dividen diumumkan oleh para pemegang saham pada saat Rapat Umum Pemegang Saham.

v. Dividends

Dividends are recognised when they become legally payable. In the case of dividends to equity shareholders, this is when declared by the directors. In the case of final dividends, this is when approved by the shareholders at the General Meeting of Shareholders.

w. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Perusahaan bergerak dalam bisnis bidang telekomunikasi termasuk penyediaan sarana-prasarana jaringan telekomunikasi dan penyediaan jasa telekomunikasi.

Perusahaan mengadopsi PSAK 72 pada tanggal 1 Januari 2020 menggunakan metode retrospektif yang dimodifikasi dengan mengakui efek kumulatif pada awal penerapan PSAK 72 sebagai penyesuaian terhadap saldo awal ekuitas pada 1 Januari 2020.

PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" menetapkan kerangka kerja yang komprehensif untuk menentukan bagaimana, kapan, dan berapa banyak pendapatan yang harus diakui. Standar ini menyediakan model lima langkah (5-steps model) tunggal berbasis prinsip untuk penentuan dan pengakuan pendapatan untuk diterapkan pada semua kontrak dengan pelanggan, sebagai berikut:

- i. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
- ii. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
- iii. Menetapkan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan dan pajak pertambahan nilai, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
- iv. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.

w. Revenue and expenses recognition

Revenue from contract with customers

The Company is engaged in the telecommunications business including the provision of telecommunications network infrastructure and the provision of telecommunications services.

The Company adopted PSAK 72 dated 1 January 2020 using a retrospective method modified by recognizing the cumulative effect at the beginning of the application of PSAK 72 as an adjustment to the opening balance of equity on 1 January 2020.

PSAK 72 "Revenue from Contracts with Customers" provides a comprehensive framework for determining how, when and how much revenue should be recognized. This standard provides a principle-based, single 5-step model for revenue determination and recognition to be applied to all contracts with customers, as follows:

- i. Identify contracts with customers.
- ii. Identification of performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in the contract to deliver goods or services that have different characteristics to customers.
- iii. Determine the transaction price, after deducting discounts, returns, sales incentives and value added tax, which an entity is entitled to obtain as compensation for the delivery of goods or services promised in the contract.
- iv. The allocation of the transaction price to each performance obligation is based on the relative stand-alone selling price basis of each different goods or services promised in the contract. When this cannot be observed directly, the relative stand-alone selling price is estimated based on expected cost plus a margin.

Ekshibit E/56

Exhibit E/56

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

w. Pengakuan pendapatan dan beban (Lanjutan)

w. Revenue and expenses recognition (Continued)

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan  
(Lanjutan)

Revenue from contract with customers (Continued)

- v. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

- v. Recognition of revenue when performance obligations have been fulfilled by delivering the promised goods or services to the customer (when the customer has control over the goods or services).

Standar ini juga memberikan panduan spesifik yang mensyaratkan jenis biaya tertentu untuk memperoleh dan/atau memenuhi kontrak yang akan dikapitalisasi dan diamortisasi secara sistematis yang konsisten dengan pengalihan kepada pelanggan barang atau jasa yang terkait dengan biaya yang dikapitalisasi.

This standard also provides specific guidance requiring certain types of fees for obtain and/or fulfill contracts to be capitalized and amortized systematically consistent with the transfer to customers of goods or services related to the costs being capitalized.

Penghasilan dari kontrak dengan pelanggan diakui ketika pengendalian barang atau jasa dialihkan kepada pelanggan dengan jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan oleh Perusahaan untuk ditukar dengan barang atau layanan tersebut. Perusahaan pada umumnya menyimpulkan bahwa Perusahaan merupakan prinsipal dalam pengaturan pendapatannya, kecuali untuk layanan pengadaan di bawah ini, karena Perusahaan mengendalikan barang atau jasa sebelum mengalihkannya ke pelanggan.

Income from contracts with customers is recognized when control of the goods or services is transferred to the customer in an amount that reflects the consideration that the Company expects to exchange for the goods or services. The Company generally concludes that the Company is the principal in regulating its revenue, except for the procurement services below, because the Company controls the goods or services before transferring them to the customer.

Perusahaan juga telah memilih untuk menerapkan panduan praktis berikut pada tanggal transisi:

The Company has also chosen to apply the following practical guidance by the transition date:

- i. Kontrak yang diselesaikan - Perusahaan menerapkan PSAK 72 hanya untuk kontrak pelanggan yang belum selesai pada 1 Januari 2020; dan
- ii. Modifikasi kontrak - alih-alih menerapkan pendekatan retrospektif untuk mengukur efek kumulatif dari modifikasi kontrak sejak setiap modifikasi dilakukan; Perusahaan mengumpulkan efek dari semua modifikasi kontrak yang terjadi Berlaku sebelum 1 Januari 2020 untuk:
- mengidentifikasi kewajiban kinerja yang terpenuhi dan tidak terpenuhi;
  - menentukan harga transaksi dari kontrak modifikasi terbaru; dan
  - mengalokasikan harga transaksi untuk kewajiban kinerja yang terpenuhi dan tidak terpenuhi pada 1 Januari 2020.

- i. Settled contracts - The Company applies PSAK 72 only for customer contracts that have not been completed by 1 January 2020; and
- ii. Contract modification - instead of applying a retrospective approach to measuring the cumulative effect of contract modifications since each modification; The Company collects the effects of all contract modifications that occur before 1 January 2020 for:
- identify fulfilled and unfulfilled performance obligations;
  - determine the transaction price of the most recent modification contract; and
  - allocating transaction prices for fulfilled and unfulfilled performance obligations on January 1, 2020.



Ekshibit E/57

Exhibit E/57

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

w. Pengakuan pendapatan dan beban (Lanjutan)

w. Revenue and expenses recognition (Continued)

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan  
(Lanjutan)

Revenue from contract with customers (Continued)

Selain itu, dalam mengadopsi PSAK 72, Perusahaan juga memilih untuk menerapkan panduan praktis untuk tidak memperhitungkan dampak komponen pembiayaan ketika periode antara pembayaran untuk barang atau jasa yang dijanjikan dan pengalihan untuk barang atau layanan tersebut kepada pelanggan kurang dari satu tahun.

In addition, in adopting PSAK 72, the Company has also chosen to apply practical guidance not to take into account the impact of the financing component when the period between payment for the goods or services promised and the transfer for the goods or services to the customer is less than one year.

Di bawah ini adalah ringkasan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan Perusahaan untuk pendapatan jasa konstruksi, listrik dan perencanaan pendirian menara telekomunikasi dan Serat optik.

Below is a summary of the Company's revenue recognition accounting policies for revenue from construction services, electricity and planning for the construction of telecommunications towers and fiber optic.

Pendapatan dari pemberian jasa diakui pada saat terjadinya penyerahan jasa kepada pengguna. Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Perusahaan dan jumlahnya dapat diukur secara handal tanpa memperhitungkan kapan pembayaran dilakukan. Pendapatan jasa diakui pada saat jasa telah selesai dilakukan dan berita acara diterbitkan.

Revenue from service provision is recognized when the service is rendered to the user. Income is recognized when it is probable that economic benefits will be obtained by the Company and the amount can be measured reliably regardless of when the payment is made. Service revenues are recognized when the services are completed and the minutes are issued.

Perusahaan menilai pengaturan pendapatannya terhadap kriteria tertentu untuk menentukan apakah ia bertindak sebagai prinsipal atau agen. Perusahaan bertindak sebagai prinsipal jika menanggung dampak manfaat dan risiko signifikan terkait dengan penjualan barang dan jasa.

The Company assesses its revenue arrangements against certain criteria to determine whether it is acting as principal or agent. The Company acts as the principal if it bears the impact of significant benefits and risks associated with the sale of goods and services.

Fitur yang mengindikasikan bahwa Perusahaan bertindak sebagai prinsipal mencakup:

Features that indicate that the Company is acting as a principal include:

- a. Perusahaan mempunyai tanggung jawab utama menyediakan barang atau jasa untuk pelanggan, atau memenuhi pesanan, misalnya Perusahaan bertanggungjawab untuk penerimaan atas produk dan jasa yang dipesan atau dibeli oleh pelanggan;
- b. Perusahaan mempunyai risiko persediaan sebelum atau setelah pesanan pelanggan, selama pengiriman atau pengembalian;
- c. Perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan harga baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya menyediakan barang dan jasa tambahan; dan
- d. Perusahaan menanggung risiko kredit pelanggan atas jumlah yang dapat diterima dari pelanggan.

- a. The Company has the main responsibility of providing goods or services to customers, or fulfilling orders, for example, the Group is responsible for receiving products and services ordered or purchased by customers;
- b. The Company is subject to inventory risk before or after a customer order, during delivery or return;
- c. The Company has the freedom to determine prices either directly or indirectly, for example providing additional goods and services; and
- d. The Company bears the credit risk of the customers for the amounts it can receive from the customers.

Ekshibit E/58

Exhibit E/58

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

w. Pengakuan pendapatan dan beban (Lanjutan)

w. Revenue and expenses recognition (Continued)

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan  
(Lanjutan)

Revenue from contract with customers (Continued)

Pendapatan dalam hubungan keagenan dicatat sebesar jumlah tagihan bruto kepada pelanggan ketika Perusahaan bertindak sebagai prinsipal dalam penjualan barang dan jasa. Pendapatan dicatat sebesar jumlah bersih yang diperoleh (jumlah yang dibayarkan oleh pelanggan dikurangi jumlah yang dibayarkan kepada pemasok) ketika secara substansi, Perusahaan bertindak sebagai agen dan memperoleh komisi dari pemasok atas penjualan barang dan jasa.

Revenue from agency relationships is recorded at the gross amount due to customers when the Company acts as principal in the sale of goods and services. Revenue is recorded at the net amount earned (the amount paid by customers less the amount paid to suppliers) when in substance, the Company acts as an agent and receives commission from the supplier on the sale of goods and services.

Perusahaan telah melakukan analisa atas transaksi penjualan dan menyimpulkan bahwa Perusahaan bertindak sebagai prinsipal pada semua perjanjian pendapatan.

The Company has analyzed the sales transaction and concluded that the Company acts as the principal in all revenue agreements.

Pendapatan sewa menara diakui selama masa sewa. Pendapatan sewa menara diterima di muka disajikan sebagai akun "Pendapatan yang diterima di muka". Pendapatan sewa menara yang belum ditagih disajikan sebagai akun "Pendapatan yang masih harus diterima" di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Tower rental revenue is recognized over the lease year. Tower rental revenue received in advance is presented as "Unearned income". Tower rental revenue that has not been billed yet is presented as "Accrued revenue" in the consolidated statements of financial position.

Beban

Expense

Beban diakui berdasarkan metode akrual (*accrual method*).

Expenses are recognized based on accrual method.

x. Laba (rugi) per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk

x. Basic earnings (loss) per share attributable to the common equity holders of the parent company

Laba (rugi) per saham dasar dihitung dengan membagi laba (rugi) bersih pada periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa Perusahaan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham beredar dalam periode/tahun berjalan dan telah dikurangi dengan saham treasury.

Basic earnings (loss) per share are calculated by dividing net profit (loss) for the current period/year attributable to the common equity holders of the Company by the weighted average number of outstanding shares during the current period/year and has been reduced by treasury stock.

Jika jumlah saham biasa atau instrument berpotensi saham biasa yang beredar meningkat sebagai akibat dari kapitalisasi, penerbitan saham bonus atau pemecahan saham, atau menurun sebagai akibat dari penggabungan saham, maka penghitungan laba per saham dasar dan dilusian untuk seluruh periode yang disajikan disesuaikan secara restrospektif.

If the number of ordinary shares or potential ordinary shares outstanding increases as a result of capitalization, issuance of bonus shares or stock splits, or decreases as a result of a merger of shares, the calculation of basic and diluted earnings per share for all periods presented is adjusted retrospectively.

Ekshibit E/59

Exhibit E/59

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

y. Provisi dan kontinjensi

y. Provision and contingencies

Provisi diakui ketika Perusahaan dan entitas anak memiliki kewajiban (legal maupun konstruktif) sebagai hasil peristiwa lalu; yaitu kemungkinan besar arus keluar sumber daya ekonomi diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dan suatu estimasi terhadap jumlah dapat dilakukan. Apabila dampak nilai waktu uang adalah material, maka provisi didiskontokan dengan menggunakan tarif sebelum pajak, untuk mencerminkan risiko spesifik liabilitas. Ketika pendiskontoan digunakan, kenaikan provisi terkait dengan berlalunya waktu diakui sebagai beban keuangan.

Provisions are recognized when the Company and subsidiaries has a present obligation (legal or constructive) as a result of past event; it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. If the effect of the time value of money is material, provisions are determined by discounting the expected future cash flows at a pre-tax rate, that reflects current market assessment of the time value of money and where appropriate, the risks specific to the liability. Where discounting is used, the increased due to the passage of time is recognized as interest expense.

Kewajiban kontinjensi tidak diakui dalam Laporan keuangan konsolidasian. Kewajiban tersebut telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian kecuali kemungkinan arus keluar sumber daya ekonomi sangat kecil.

Contingent liabilities are not recognized in the consolidated financial statements. They are disclosed in the notes to consolidated financial statements unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote.

Aset kontinjensi tidak diakui dalam Laporan keuangan konsolidasian tetapi diungkapkan dalam catatan atas Laporan keuangan konsolidasian ketika arus masuk manfaat ekonomi cukup besar.

Contingent assets are not recognized in the consolidated financial statements but are disclosed in the notes to consolidated financial statements when an inflow of economic benefits is probable.

z. Peristiwa setelah periode pelaporan

z. Events after the reporting period

Peristiwa setelah periode pelaporan yang memberikan bukti kondisi yang ada pada akhir periode pelaporan (*adjusting events*) tercermin dalam Laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak berdampak pada laporan keuangan diungkapkan dalam catatan atas Laporan keuangan konsolidasian apabila jumlahnya material.

Events after the reporting period that provide evidence of conditions that existed at the end of the reporting period (*adjusting events*) are reflected in the consolidated financial statements. Events after the reporting period that are not adjusting events are disclosed in the notes to consolidated financial statements when material.

aa. Information segmen

aa. Segment information

Informasi segmen Grup disajikan menurut segmen operasi yang telah diidentifikasi. Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

Segment information of the group is presented based on the identified operating segments. An operating segment is a component of the entity:

- i. yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- ii. hasil operasinya direviu secara reguler oleh Pengambil Keputusan Operasional ("PKO") Grup, misalnya Dewan Direksi untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya;
- iii. tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

- i. is involved in business activities which generate income and incur expenses (including income and expenses related to transactions with other components of the same entity);
- ii. its operating results are regularly reviewed by the Group's Operational Decision Maker ("PKO"), for example the Board of Directors to make decisions about the resources allocated to the segment and assess its performance;
- iii. discrete financial information is available.

Ekshibit E/60

Exhibit E/60

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Penyusunan Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir tahun pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam tahun pelaporan berikutnya.

**Pertimbangan**

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Perusahaan merupakan mata uang dalam lingkungan ekonomi primer dimana Perusahaan beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang paling mempengaruhi pendapatan dan beban pokok pendapatan. Berdasarkan penilaian manajemen Perusahaan, mata uang fungsional Perusahaan adalah Rupiah.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Perusahaan dan entitas anak menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan bila definisi yang ditetapkan PSAK 71 terpenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak seperti yang dijelaskan pada Catatan 2f.

Menentukan Jangka Waktu Kontrak dengan Opsi Perpanjangan dan Pemutusan Kontrak - Perusahaan sebagai Lessee

Perusahaan menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang masa sewa jika dipastikan akan dilaksanakan, atau periode yang dicakup oleh opsi untuk mengakhiri sewa, jika cukup masuk akal untuk tidak dilakukan.

Perusahaan memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan pemutusan kontrak. Perusahaan menerapkan penilaian dalam mengevaluasi apakah dapat dipastikan Perusahaan akan menggunakan opsi untuk memperpanjang atau mengakhiri sewa. Artinya, Perusahaan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang menciptakan insentif ekonomi untuk melakukan perpanjangan atau pemutusan kontrak. Setelah tanggal mulai sewa, Perusahaan menilai Kembali masa sewa jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan dalam keadaan yang berada dalam kendali Perusahaan dan mempengaruhi kemampuannya untuk menggunakan atau tidak menggunakan opsi untuk memperpanjang atau mengakhiri kontrak sewa.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of consolidated financial statements of the Company and subsidiaries requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities at the end of the reporting year. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future years.

**Judgments**

Determination of Functional Currency

The functional currency of the Company is the currency in the primary economic environment in which the Company operates. The currency is the currency that most influences revenue and cost of revenue. Based on the assessment of the Company's management, the functional currency of the Company is Rupiah.

Classification of financial assets and financial liabilities

The Company and subsidiaries determine the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definitions set forth in PSAK 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company and subsidiaries accounting policies described in Note 2f.

Determine The Term of The Contract with The Option of Contract Extension and Termination - The Company as Lessee

The Company determines the lease term as the term of the lease that cannot be canceled, together with the period covered by the option to extend the lease if it is determined to be implemented, or the period covered by the option to terminate the lease, if it makes sense not to do so.

The Company has several lease contracts that include options for contract extension and termination. The Company applies its judgment in evaluating whether it is certain that the Company will exercise the option to extend or terminate the lease. This means that the Company considers all relevant factors that create economic incentives to extend or terminate contracts. After the start date of the lease, the Company reassesses the lease term if there are significant events or changes in circumstances that are within the control of the Company and affect its ability to exercise or not exercise the option to extend or terminate the lease contract.

Ekshibit E/61

Exhibit E/61

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI  
SIGNIFIKAN (Lanjutan)

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND  
ASSUMPTIONS (Continued)

Estimasi dan Asumsi

Estimates and Assumptions

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian

Allowance for expected credit losses

Perusahaan dan entitas anak mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya.

The Company and subsidiaries evaluate specific accounts where they have information that certain customers are unable to meet their financial obligations.

Dalam hal tersebut, Perusahaan dan entitas anak mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perusahaan dan entitas anak. Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan untuk piutang usaha.

In these cases, the Company and subsidiaries use judgment, based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of their relationship with the customer and the customer's current credit status based on third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce the receivable amounts that the Company and subsidiaries expect to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment of trade receivables.

Penyusutan aset tetap

Depreciation of property and equipment

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4-40 tahun (2021: 4-30 tahun). Manajemen berpendapat bahwa masa manfaat ini merupakan masa manfaat yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan dan entitas anak menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset tersebut, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin akan disesuaikan kembali.

The costs of property and equipment are depreciated on a straight-line method over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these property and equipment to be within 4-40 years (2021: 4-30 years). Management believes that this useful life is generally expected in the industry in which the Company and subsidiaries operate their business. Changes in the level of usage and technological developments could affect the economic useful lives and residual values of the asset, and therefore future depreciation charges may be readjusted.

Alokasi harga beli dan Penurunan nilai goodwill

Purchase Price Allocation and Impairment of goodwill

Akuntansi akuisisi mensyaratkan penggunaan estimasi akuntansi secara ekstensif dalam mengalokasikan harga beli berdasarkan nilai pasar wajar aset dan liabilitas yang diakuisisi, termasuk aset takberwujud. Akuisisi bisnis tertentu oleh Perusahaan menimbulkan goodwill. Sesuai PSAK 22 (Revisi 2010), "Kombinasi Bisnis", goodwill tidak diamortisasi dan diuji penurunan nilai setiap tahunnya.

Acquisition accounting requires extensive use of accounting estimates to allocate the purchase price to the fair market values of the assets and liabilities purchased, including intangible asset. Certain business acquisitions of the Company have resulted in goodwill. Under PSAK 22 (Revised 2010), "Business Combinations", such goodwill is not amortized and subject to an annual impairment testing.

Perusahaan dan entitas anak disyaratkan untuk melakukan pengujian, secara tahunan, apakah nilai goodwill telah mengalami penurunan nilai. Jumlah terpulihkan ditentukan berdasarkan pada perhitungan nilai yang dapat digunakan. Penggunaan metode ini mensyaratkan estimasi atas arus kas masa depan dan penentuan tingkat diskonto untuk menghitung nilai kini arus kas. Informasi lebih lanjut termasuk nilai tercatat terdapat dalam Catatan 35.

The Company and subsidiaries is required to test, on an annual basis, whether goodwill has suffered any impairment. The recoverable amount is determined based on value in use calculations. The use of this method requires the estimation of future cash flows and the determination of a discount rate in order to calculate the present value of the cash flows. More information including carrying values is included in Note 35.

Ekshibit E/62

Exhibit E/62

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI  
SIGNIFIKAN (Lanjutan)

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND  
ASSUMPTIONS (Continued)

Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

Estimates and Assumptions (Continued)

Imbalan pasca-kerja

Post-employment benefits

Biaya, aset dan liabilitas skema imbalan pasti yang dilakukan oleh Perusahaan dan entitas anak ditentukan dengan menggunakan metode yang bergantung pada estimasi dan asumsi aktuarial. Rincian dari asumsi utama terdapat dalam Catatan 32. Perusahaan dan entitas anak menjalankan masukan dari aktuaris independen terkait dengan kesesuaian asumsi. Perubahan pada asumsi yang digunakan mungkin memiliki efek yang signifikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan laporan posisi keuangan konsolidasian.

The costs, assets and liabilities of the defined benefit schemes by the Company and subsidiaries are determined using methods relying on actuarial estimates and assumptions. Details of the key assumptions are set out in Note 32. The Company and subsidiaries takes advice from independent actuaries relating to the appropriateness of the assumptions. Changes in the assumptions used may have a significant effect on the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and the consolidated statement of financial position.

Pajak penghasilan

Income taxes

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perusahaan dan entitas anak mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company and subsidiaries recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

Proses hukum

Legal proceeding

Perusahaan dan entitas anak meninjau perkembangan kasus hukum yang masih berjalan dalam proses hukum dan pada setiap tanggal pelaporan, guna untuk menilai kebutuhan provisi dan pengungkapan dalam laporan keuangannya. Di antara faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam membuat keputusan provisi litigasi adalah sifat litigasi, klaim atau penilaian, proses hukum dan tingkat potensi kerusakan dijurisdiksi di mana litigasi, klaim atau penilaian tersebut berada, perkembangan dari kasus (termasuk perkembangan setelah tanggal pelaporan keuangan namun sebelum laporan tersebut dikeluarkan), pendapat atau pandangan penasihat hukum, pengalaman dalam kasus serupa dan keputusan dari manajemen Perusahaan dan entitas anak tentang bagaimana Perusahaan dan entitas anak akan merespon terhadap litigasi, klaim atau penilaian.

The Company and subsidiaries reviews outstanding legal cases following developments in the legal proceedings and at each reporting date, in order to assess the need for provisions and disclosures in its financial statements. Among the factors considered in making decisions on provisions are the nature of litigation, claim or assessment, the legal process and potential level of damages in the jurisdiction in which the litigation, claim or assessment has been brought, the progress of the case (including the progress after the date of the financial statements but before those statements are issued), the opinions or views of legal advisers, experience on similar cases and any decision of the management of the Company and subsidiaries as to how it will respond to the litigation, claim or assessment.

Sewa - Memperkirakan Suku Bunga Pinjaman Tambahan

Leases - Estimating the Incremental Borrowing Rate

Perusahaan tidak dapat langsung menentukan tingkat bunga implisit dalam sewa, oleh karena itu, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman tambahan (IBR) untuk mengukur liabilitas sewa. IBR adalah tingkat bunga yang harus dibayar oleh Perusahaan untuk meminjam dengan syarat yang sama, dan dengan jaminan serupa, dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak-guna dalam lingkup ekonomi yang serupa.

The Company cannot readily determine the interest rate implicit in the lease, therefore, it uses its incremental borrowing rate (IBR) to measure lease liabilities. The IBR is the rate of interest that the Company would have to pay to borrow over a similar term, and with a similar security, the funds necessary to obtain an asset of a similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment.

Ekshibit E/63

Exhibit E/63

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (Continued)

Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

Estimates and Assumptions (Continued)

Sewa - Memperkirakan Suku Bunga Pinjaman Tambahan (Lanjutan)

Leases - Estimating the Incremental Borrowing Rate (Continued)

Oleh karena itu, IBR mencerminkan apa yang 'harus dibayar' oleh Perusahaan, yang memerlukan estimasi ketika tidak tersedianya tingkat suku bunga yang dapat diobservasi atau ketika perlu disesuaikan untuk mencerminkan syarat dan ketentuan dari sewa. Perusahaan mengestimasi IBR menggunakan input yang dapat diamati (seperti tingkat suku bunga pasar) jika tersedia dan diperlukan untuk membuat estimasi spesifik entitas tertentu.

The IBR therefore reflects what the Group 'would have to pay', which requires estimation when no observable rates are available or when they need to be adjusted to reflect the terms and conditions of the lease. The Company estimates the IBR using observable inputs (such as market interest rates) when available and is required to make certain entity-specific estimates.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa selama jangka waktu sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman incremental Perusahaan. Penentuan jangka waktu sewa dan suku bunga pinjaman inkremental tersebut seringkali melibatkan estimasi dan pertimbangan yang signifikan.

Lease liabilities were measured at the present value of the remaining lease payments during the lease term, discounted using the Company's incremental borrowing rate. Determination of the lease term and the incremental rates often involves significant estimates and judgements.

Pengukuran nilai wajar

Fair value measurement

Sehubungan dengan penerapan PSAK 16 (Revisi 2014) "Aset Tetap" dan PSAK 13 (Revisi 2014) "Properti Investasi", Perusahaan dan entitas anak telah memilih model revaluasi dan nilai wajar untuk pengukuran setelah pengakuan awal menara telekomunikasi, tanah dan bangunan. Hirarki nilai wajar aset tetap dan properti investasi pada akhir tahun pelaporan merupakan kategori dalam level 3 pengukuran berulang nilai wajar. Untuk menentukan nilai wajar, penilai independen menggunakan kombinasi dua pendekatan sebagai metode penilaian: pendekatan pendapatan, yang mendiskontokan arus kas masa depan, dan pendekatan biaya, yang didasarkan pada biaya penggantian saat ini. Untuk penjelasan lebih detail lihat Catatan 10 dan 11 atas laporan keuangan konsolidasian.

Regarding the implementation of PSAK No. 16 (Revised 2014) "Property and Equipment" and PSAK 13 (revised 2014) "Investment Property", the Company and subsidiaries has chosen the revaluation model for the measurement after initial recognition of telecommunication towers, land and building. The fair value hierarchy of property and equipment and investment property at the end of reporting year is categorised as a level 3 recurring fair value measurement. To determine the fair value, the independent appraiser utilizes a combination of two approaches as the appraisal method: the income approach, which discounts future cash flows, and the cost approach, which is based on current replacement cost. For more details, see Notes 10 and 11 to our consolidated financial statements.

Estimasi Biaya Pembongkaran Menara

Estimated Cost of Dismantling of Towers

Perusahaan dan entitas anak melakukan penelaahan atas estimasi biaya pembongkaran menara pada akhir periode laporan. Dalam menentukan jumlah estimasi biaya tersebut diperlukan estimasi dan asumsi yang signifikan karena terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi nilai liabilitas tersebut. Faktor-faktor tersebut mencakup estimasi untuk waktu dan jumlah biaya untuk aktivitas pembongkaran, perubahan teknologi, perubahan peraturan, peningkatan biaya karena tingkat inflasi dan perubahan tingkat bunga diskonto. Ketidakpastian tersebut dapat mengakibatkan jumlah pengeluaran aktual di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah yang dicadangkan saat ini. Jumlah estimasi biaya tersebut pada akhir periode pelaporan merupakan perkiraan terbaik dari manajemen atas nilai kini dari biaya pembongkaran yang diperlukan pada masa mendatang.

The Company and its subsidiaries assess their estimated cost of dismantling of towers at end of reporting period. Significant estimates and assumptions are made in determining the estimation cost as there are some factors that will affect the amount of liability. These factors include estimates of the extent and costs of dismantling activities, technological changes, regulatory changes, cost increases due to inflation rates and changes in discount rates. Those uncertainties may result in future actual expenditure differing from the amounts currently provided. The estimated cost at end of reporting periode represents management's best estimate of the present value of required dismantling costs in the future.

Ekshibit E/64

Exhibit E/64

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS	2022	2021	
Kas	663	656	Cash on hand
Bank			Cash in banks
Rupiah			Rupiah
PT Bank UOB Indonesia	544.422	264.933	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	10.163	272	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	2.673	786	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank QNB Indonesia Tbk	2.471	1.282	PT Bank QNB Indonesia Tbk
PT Bank Permata Tbk	2.166	940	PT Bank Permata Tbk
PT Bank DBS Indonesia	1.451	8.902	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	812	640	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	331	98	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	39	11	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank ANZ Indonesia	22	23	PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank BNP Paribas Indonesia	22	36	PT Bank BNP Paribas Indonesia
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd	8	3	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd
MUFG Bank Ltd	2	2	MUFG Bank Ltd
	564.582	277.928	
Dolar AS			US Dollar
PT Bank UOB Indonesia	348.786	221.696	PT Bank UOB Indonesia
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd	4.475	39	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	1.341	1.246	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	1.240	1.049	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.115	1.064	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Permata Tbk	1.094	995	PT Bank Permata Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	855	14	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	779	3.046	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank BNP Paribas Indonesia	765	724	PT Bank BNP Paribas Indonesia
PT Bank QNB Indonesia Tbk	635	604	PT Bank QNB Indonesia Tbk
PT Bank ANZ Indonesia	31	34	PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank DBS Indonesia	13	14	PT Bank DBS Indonesia
MUFG Bank Ltd	12	16	MUFG Bank Ltd
	361.141	230.541	
Sub-jumlah bank	925.723	508.469	Sub-total cash in banks
Deposito berjangka			Time deposit
Rupiah			Rupiah
PT Bank Neo Commerce Tbk	40.000	80.000	PT Bank Neo Commerce Tbk
PT Bank UOB Indonesia	-	40.000	PT Bank UOB Indonesia
Sub-jumlah Deposito berjangka	40.000	120.000	Sub-total time deposit
Jumlah	966.386	629.125	Total

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, bunga deposito yang diperoleh berkisar antara 4,25% sampai 5,75% (2021: 3,75% sampai 5,80%) per tahun.

Seluruh saldo kas dan setara kas adalah kepada pihak ketiga.

As of 31 December 2022 and 2021, time deposits earn an annual interest ranging from 4.25% to 5.75% (2021: 3.75% to 5.80%) per year.

All cash and cash equivalents are to third parties.



Ekshibit E/65

Exhibit E/65

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA

Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Pihak ketiga		
Rupiah	287.373	402.771
Dolar AS	-	149.958
<b>Jumlah</b>	<b>287.373</b>	<b>552.729</b>
Dikurangi:		
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	( 17.332)	( 14.014)
<b>Jumlah - bersih</b>	<b>270.041</b>	<b>538.715</b>

Rincian piutang usaha berdasarkan jenis pendapatan adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Sewa menara telekomunikasi		
PT Telekomunikasi Selular	69.770	145.612
PT Indosat Tbk	51.450	248.123
PT XL Axiata Tbk	49.013	42.005
PT Smartfren Telecom Tbk	45.489	74.880
PT Smart Telecom	37.076	3.506
PT Hutchison 3 Indonesia	-	11.670
Lainnya	34.574	10.095
	287.373	535.891
Sewa bangunan	-	16.838
<b>Jumlah</b>	<b>287.373</b>	<b>552.729</b>
Dikurangi:		
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	( 17.332)	( 14.014)
<b>Jumlah - bersih</b>	<b>270.041</b>	<b>538.715</b>

Perusahaan menerapkan PSAK 71 dengan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur penyisihan kerugian kredit ekspektasian (PKKE) menggunakan PKKE sepanjang umurnya untuk piutang usaha. Untuk mengukur PKKE secara kolektif, piutang usaha dikelompokkan berdasarkan risiko kredit dan umur yang sama.

Karena sifat jangka pendek dari piutang lancar, jumlah tercatatnya dianggap sama dengan nilai wajarnya.

5. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES

The details of trade receivables per currency are as follows:

	2022	2021	
			Third parties
			Rupiah
			US Dollar
<b>Total</b>			<b>Total</b>
			Less:
			Allowance for expected credit losses
<b>Total - net</b>			<b>Total - net</b>

The details of trade receivables based on type of revenues are as follows:

	2022	2021	
			Telecommunication towers rental
			PT Telekomunikasi Selular
			PT Indosat Tbk
			PT XL Axiata Tbk
			PT Smartfren Telecom Tbk
			PT Smart Telecom
			PT Hutchison 3 Indonesia
			Others
			Building rental
<b>Total</b>			<b>Total</b>
			Less :
			Allowance for expected credit losses
<b>Total - net</b>			<b>Total - net</b>

The Company applies the PSAK 71 simplified approach to measuring allowance for expected credit losses (AECL) using a lifetime AECL for trade receivables. To measure AECL on a collective basis, trade receivables are grouped based on similar credit risk and aging.

Due to the short-term nature of the current receivables, their carrying amount is considered to be the same as their fair value.

Ekshibit E/66

Exhibit E/66

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA (Lanjutan)

Berdasarkan basis tersebut, berikut ini penyisihan kerugian ditentukan untuk piutang usaha:

31 Desember 2022/ 31 December 2022	Belum jatuh tempo/ Current	Jatuh tempo/Overdue				Jumlah/ Total
		1-30 hari/ days	31-60 hari/ days	61-90 hari/ days	lebih dari/ Over 90 hari/ days	
Jumlah tercatat/ Carry amount	274.450	11.877	108	37	901	287.373
Kerugian kredit ekspektasian/ Expected credit loss	16.787	500	5	2	38	17.332

31 Desember 2021/ 31 December 2021	Belum jatuh tempo/ Current	Jatuh tempo/ Overdue				Jumlah/ Total
		1-30 hari/ days	31-60 hari/ days	61-90 hari/ days	lebih dari/ Over 90 hari/ days	
Jumlah tercatat/ Carry amount	488.140	33.473	8.260	1.410	21.446	552.729
Kerugian kredit ekspektasian/ Expected credit loss	7.615	522	303	893	4.681	14.014

Mutasi penyisihan kerugian kredit ekspektasian adalah sebagai berikut:

Changes in the allowance for expected credit losses are as follows:

	2022	2021	
Saldo Awal	14.014	4.230	Beginning balance
Penambahan penyisihan kerugian kredit ekspektasian	3.318	10.438	Additional allowance for expected credit losses
Penghapusan tahun berjalan	-	( 654)	Write-off during the year
Saldo Akhir	17.332	14.014	Ending balance

Umur piutang usaha sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:

Aging of trade receivables from the date of invoice is as follows:

	2022	2021	
Belum jatuh tempo	274.450	488.140	Current
Jatuh tempo			Overdue
1 - 30 hari	11.877	33.473	1 - 30 days
31 - 60 hari	108	8.260	31 - 60 days
61 - 90 hari	37	1.410	61 - 90 days
Lebih dari 90 hari	901	21.446	Over 90 days
	12.923	64.589	
Jumlah - bersih	287.373	552.729	Total - net
Dikurangi:			Less:
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	( 17.332)	( 14.014)	Allowance for expected credit losses
Jumlah - bersih	270.041	538.715	Total - net

Piutang usaha tidak dibuat jaminan, bebas bunga dan biasanya diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari.

Trade receivables are unsecured, interest free and normally settled on terms 30 days.

Berdasarkan penelaahan atas saldo piutang usaha pada akhir tahun, manajemen menentukan penyisihan kerugian kredit ekspektasian (PKKE) pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 17.332 dan Rp 14.014.

Based on the review of the trade receivable accounts at the end of the year, the management determine allowance for expected credit losses (AECL) as of 31 December 2022 and 2021 are amounting to Rp 17,332 and Rp 14,014, respectively.

Ekshibit E/67

Exhibit E/67

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG LAIN-LAIN	2022	2021	
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
Karyawan	14.073	20.183	Employees
Operator selular - Tagihan listrik	10.745	10.948	Cellular operator - Electricity bills
Bukti potong pajak penghasilan pasal 23 dan final	6.537	36.568	Withholding tax slip for income tax article 23 and final
Asuransi	1.379	1.628	Insurance
Penjualan menara telekomunikasi	-	4.860	Sale of telecommunication tower
Lainnya	7.971	2.402	Others
<b>Jumlah</b>	<b>40.705</b>	<b>76.589</b>	<b>Total</b>
Dikurangi:			Less:
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	( 1.712)	( 1.083)	Allowance for expected credit losses
<b>Jumlah - bersih</b>	<b>38.993</b>	<b>75.506</b>	<b>Total - net</b>

Pos lainnya terutama merupakan piutang penerimaan atas selisih antara suku bunga pinjaman yang dilindungi nilai dengan biaya lindung nilai.

Other items mainly represent receivables from the difference between the interest rate of the hedged loan and the cost of hedging.

Perusahaan menerapkan PSAK 71 dengan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur penyisihan kerugian kredit ekspektasian (PKKE) menggunakan PKKE sepanjang umurnya untuk piutang lain-lain. Untuk mengukur PKKE secara kolektif, piutang lain-lain dikelompokkan berdasarkan risiko kredit dan umur yang sama.

The Company applies the PSAK 71 simplified approach to measuring allowance for expected credit losses (AECL) using a lifetime AECL for other receivables. To measure AECL on a collective basis, other receivables are grouped based on similar credit risk and aging.

Berdasarkan basis tersebut, berikut ini penyisihan kerugian ditentukan untuk piutang lain-lain:

On that basis, the loss allowance was determined as follows for other receivables:

	Belum jatuh tempo/ current	Jatuh tempo/overdue				Jumlah/Total
		1-30 hari/days	31-60 hari/days	61-90 hari/days	lebih dari/over 90 hari/days	
<u>31 Desember 2022/31 December 2022</u>						
Jumlah tercatat/Carry amount	22.808	3.674	411	815	12.997	40.705
Kerugian kredit ekspektasian/Expected credit loss	959	155	17	34	547	1.712
<u>31 Desember 2021/31 December 2021</u>						
Jumlah tercatat/Carry amount	24.007	3.150	5.339	23.580	20.513	76.589
Kerugian kredit ekspektasian/Expected credit loss	375	49	83	73	503	1.083

Mutasi penyisihan kerugian kredit ekspektasian adalah sebagai berikut:

Changes in the allowance for expected credit losses are as follows:

	2022	2021	
Saldo Awal	1.083	17.111	Beginning balance
Penambahan (pemulihan) penyisihan kerugian kredit ekspektasian	629	( 16.028)	Allowance for (reversal of) expected credit losses
Saldo Akhir	1.712	1.083	Ending balance

Ekshibit E/68

Exhibit E/68

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG LAIN-LAIN (Lanjutan)

Umur piutang lain-lain sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Belum jatuh tempo	22.808	24.007
Jatuh tempo		
1 - 30 hari	3.674	3.150
31 - 60 hari	411	5.339
61 - 90 hari	815	23.580
Lebih dari 90 hari	12.997	20.513
<b>Jumlah</b>	<b>40.705</b>	<b>76.589</b>
Dikurangi:		
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	( 1.712)	( 1.083)
<b>Jumlah</b>	<b>38.993</b>	<b>75.506</b>

Berdasarkan penelaahan atas saldo piutang lain-lain pada akhir tahun, manajemen menentukan penyisihan kerugian kredit ekspektasian (PKKE) pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 1.712 dan Rp 1.083.

6. OTHER RECEIVABLES (Continued)

Aging of other receivables from the date of invoice is as follows:

	2022	2021	
Belum jatuh tempo	22.808	24.007	Current
Jatuh tempo			Overdue
1 - 30 hari	3.674	3.150	1 - 30 days
31 - 60 hari	411	5.339	31 - 60 days
61 - 90 hari	815	23.580	61 - 90 days
Lebih dari 90 hari	12.997	20.513	Over 90 days
<b>Jumlah</b>	<b>40.705</b>	<b>76.589</b>	<b>Total</b>
Dikurangi:			Less :
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	( 1.712)	( 1.083)	Allowance for expected credit losses
<b>Jumlah</b>	<b>38.993</b>	<b>75.506</b>	<b>Total</b>

Based on the review of the other receivable accounts at the end of the year, the management allowances for expected credit losses (AECL) as of 31 December 2022 and 2021 amounting to Rp 1,712 and Rp 1,083, respectively.

7. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

	2022	2021
<b>Pihak ketiga</b>		
PT Telekomunikasi Selular	356.195	425.507
PT Indosat Tbk	350.575	43.164
PT Smartfren Telecom Tbk	20.641	18.955
PT XL Axiata Tbk	22.073	9.702
PT Smart Telecom	748	6.659
PT Hutchison 3 Indonesia	-	2.588
Lainnya (masing-masing di bawah Rp 1 miliar)	2.483	4.038
<b>Jumlah</b>	<b>752.715</b>	<b>510.613</b>
Dikurangi:		
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	( 31.658)	( 10.330)
<b>Jumlah - bersih</b>	<b>721.057</b>	<b>500.283</b>

Akun ini merupakan pendapatan sewa menara telekomunikasi yang belum ditagih, karena proses pengujian fisik menara dan verifikasi dokumen yang belum selesai pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Aset kontrak adalah hak imbalan entitas dalam pertukaran barang atau jasa yang dialihkan entitas kepada pelanggan yang terdiri dari: menara telekomunikasi dan properti investasi.

7. ACCRUED REVENUES

	2022	2021	
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
PT Telekomunikasi Selular	356.195	425.507	PT Telekomunikasi Selular
PT Indosat Tbk	350.575	43.164	PT Indosat Tbk
PT Smartfren Telecom Tbk	20.641	18.955	PT Smartfren Telecom Tbk
PT XL Axiata Tbk	22.073	9.702	PT XL Axiata Tbk
PT Smart Telecom	748	6.659	PT Smart Telecom
PT Hutchison 3 Indonesia	-	2.588	PT Hutchison 3 Indonesia
Lainnya (masing-masing di bawah Rp 1 miliar)	2.483	4.038	Others (each below Rp 1 billion)
<b>Jumlah</b>	<b>752.715</b>	<b>510.613</b>	<b>Total</b>
Dikurangi:			Less:
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	( 31.658)	( 10.330)	Allowance for expected credit losses
<b>Jumlah - bersih</b>	<b>721.057</b>	<b>500.283</b>	<b>Total - net</b>

This account represents unbilled rental income of telecommunication towers due to the customer's site visit and verification of documents not being completed as of the consolidated statements of financial position date.

Contract assets are the Company's rights in exchange for goods or services transferred by the entity to customers, which consist of: telecommunications towers and investment properties.

Ekshibit E/69

Exhibit E/69

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

7. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA (Lanjutan)

Mutasi penyisihan kerugian kredit ekspektasian adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Saldo Awal	10.330	2.469
Penambahan penyisihan kerugian kredit ekspektasian	<u>21.328</u>	<u>7.861</u>
Saldo Akhir	<u><u>31.658</u></u>	<u><u>10.330</u></u>

Berdasarkan penelaahan atas saldo pendapatan yang masih harus diterima pada akhir tahun, manajemen menentukan penyisihan kerugian kredit ekspektasian (PKKE) pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 31.658 dan Rp 10.330.

7. ACCRUED REVENUES (Continued)

Changes in the allowance for expected credit losses are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Saldo Awal	10.330	2.469	Beginning balance
Penambahan penyisihan kerugian kredit ekspektasian	<u>21.328</u>	<u>7.861</u>	Additional allowance for expected credit losses
Saldo Akhir	<u><u>31.658</u></u>	<u><u>10.330</u></u>	Ending balance

Based on the review of the status of the accrued revenue accounts at the end of the year, the management determines the allowance for expected credit losses (AECL) for 31 December 2022 and 2021 are Rp 31,658 and Rp 10,330, respectively.

8. PERSEDIAAN

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Material menara dan serat optik	546.917	191.322
Suku cadang	<u>74.735</u>	<u>35.086</u>
Jumlah	<u><u>621.652</u></u>	<u><u>226.408</u></u>

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, tidak ada persediaan dan perlengkapan yang dijaminkan.

Berdasarkan hasil penelaahan pada setiap akhir tahun, manajemen berpendapat tidak perlu membentuk penyisihan penurunan nilai atas akun persediaan. Kecuali material menara, seluruh persediaan dan perlengkapan akan diakui sebagai beban pada saat penggunaan.

Perusahaan tidak mengasuransikan persediaan. Karena pembelian persediaan tidak bisa langsung digunakan pada site dan akan keluar dari persediaan ketika sudah bisa digunakan untuk site.

Persediaan yang diakui sebagai beban untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar nihil.

8. INVENTORIES

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Material menara dan serat optik	546.917	191.322	Tower material and fiber optic
Suku cadang	<u>74.735</u>	<u>35.086</u>	Spareparts
Jumlah	<u><u>621.652</u></u>	<u><u>226.408</u></u>	Total

As of 31 December 2022 and 2021, there are no inventories and supplies are pledged as collateral.

Based on a review at the end of the year, the management determines that no impairment provision is necessary. Except for tower material, all inventories and supplies will be recognized as expenses at the time of use.

The company does not insure inventories. Because inventory purchases cannot be used directly on the site and will come out of inventory when it can be used for the site.

Inventories which recognized as expenses for the years ended 31 December 2022 and 2021 amounted to nil.

Ekshibit E/70

Exhibit E/70

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

9. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA	2022	2021	
Perizinan	37.213	30.585	Licenses
Asuransi	24.228	18.516	Insurance
Operasional	20.684	9.310	Operational
Retribusi	17.933	13.980	Retribution
Sewa kantor	4.759	4.743	Office rental
Donasi dan tanggung jawab sosial	25	55	Donation and social responsibility
Lainnya	3.523	4.147	Others
<b>Jumlah</b>	<b>108.365</b>	<b>81.336</b>	<b>Total</b>

Pos lainnya terutama merupakan biaya iuran dan berlangganan yang telah dibayar namun pembebanannya baru akan dilakukan pada periode yang akan datang.

Other items mainly represent the cost of dues and subscription that have been paid but will be charged in the next period.

10. ASET TETAP	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pelepasan/ Disposal	Akuisisi/ Acquisition *)	Reklasifikasi/ Reclassification	Akumulasi penyusutan dan penyesuaian nilai wajar/ Accumulated depreciation and fair value adjustment	Reklasifikasi dari properti investasi/ Reclassified from investment property	Defisit revaluasi/ Revaluation deficit	Saldo akhir/ Ending balance	31 Desember 2022
<b>Model Revaluasi</b>										<b>Revaluation Model</b>
Menara telekomunikasi	32.713.041	-	-	-	3.004.111	( 840.418)	-	( 1.407.805)	33.468.929	Telecommunication towers
Akumulasi penyusutan Menara telekomunikasi	-	840.418	-	-	-	( 840.418)	-	-	-	Accumulated depreciation Telecommunication towers
<b>Model Biaya</b>										<b>Cost Model</b>
Aset tetap dalam penyelesaian	492.883	2.798.427	-	1.863	( 3.004.111)	-	-	-	289.062	Property and equipment in progress
<b>Biaya Perolehan Pemilikan Langsung</b>										<b>Cost Direct ownership</b>
Tanah	70.280	553	-	-	( 1.987)	-	-	-	68.846	Land
Bangunan	348.006	4.574	-	-	1.237	-	-	-	353.817	Building
Peralatan, perlengkapan kantor dan perangkat elektronik	52.759	88.081	( 1.540)	185.270	268	-	-	-	324.838	Tools, office equipment and electronic hardware
Kendaraan	32.394	10.545	( 8.231)	-	( 3.825)	-	-	-	30.883	Vehicles
Genset	121	-	-	-	-	-	-	-	121	Genset
Menara bergerak	167.641	-	-	-	-	-	-	-	167.641	Transportable towers
	671.201	103.753	( 9.771)	185.270	( 4.307)	-	-	-	946.146	
<b>Akumulasi Penyusutan Pemilikan Langsung</b>										<b>Accumulated Depreciation Direct Ownership</b>
Bangunan	100.338	18.149	-	-	-	-	-	-	118.487	Building
Peralatan, perlengkapan kantor dan perangkat elektronik	25.105	9.256	( 1.450)	46	-	-	-	-	32.957	Tools, office equipment and electronic hardware
Kendaraan	19.016	6.807	( 5.443)	-	( 3.712)	-	-	-	16.668	Vehicles
Genset	71	30	-	-	-	-	-	-	101	Genset
Menara bergerak	94.691	13.594	-	-	-	-	-	-	108.285	Transportable towers
	239.221	47.836	( 6.893)	46	( 3.712)	-	-	-	276.498	
<b>Nilai Tercatat</b>	<b>33.145.021</b>								<b>34.138.577</b>	<b>Carrying Value</b>
<b>Jumlah</b>	<b>33.637.904</b>								<b>34.427.639</b>	<b>Total</b>

Ekshibit E/71

Exhibit E/71

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET TETAP (Lanjutan)

10. PROPERTY AND EQUIPMENT (Continued)

31 Desember 2021	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pelepasan/ Disposal	Akuisisi/ Acquisition *)	Reklasifikasi/ Reclassification	Akumulasi penyusutan dan penyesuaian nilai wajar/ Accumulated depreciation and fair value adjustment	Reklasifikasi dari properti investasi/ Reclassified from investment property	Defisit revaluasi/ Revaluation deficit	Saldo akhir/ Ending balance	31 Desember 2021
<b>Model Revaluasi</b>										<b>Revaluation Model</b>
Menara telekomunikasi	27.660.399	-	-	3.588.649	2.243.974	( 628.174)	68	( 151.875)	32.713.041	Telecommunication towers
Akumulasi penyusutan Menara telekomunikasi	-	628.174	-	-	-	( 628.174)	-	-	-	Accumulated depreciation Telecommunication towers
<b>Model Biaya</b>										<b>Cost Model</b>
Aset tetap dalam penyelesaian	648.550	2.088.307	-	-	( 2.243.974)	-	-	-	492.883	Property and equipment in progress
<b>Biaya Perolehan</b>										<b>Cost</b>
<b>Pemilikan Langsung</b>										<b>Direct Ownership</b>
Tanah	45.507	21.251	-	-	3.522	-	-	-	70.280	Land
Bangunan	356.628	1.752	( 6.844)	-	( 5.856)	-	2.326	-	348.006	Building
Peralatan, perlengkapan kantor dan perangkat elektronik	36.667	14.493	( 755)	-	2.354	-	-	-	52.759	Tools, office equipment and electronic hardware
Perangkat lunak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Software
Kendaraan	35.237	4.010	( 14.803)	-	7.950	-	-	-	32.394	Vehicles
Genset	30.623	-	( 30.502)	-	-	-	-	-	121	Genset
Menara bergerak	166.262	1.379	-	-	-	-	-	-	167.641	Transportable towers
	670.924	42.885	( 52.904)	-	7.970	-	2.326	-	671.201	
<b>Akumulasi Penyusutan</b>										<b>Accumulated Depreciation</b>
<b>Pemilikan Langsung</b>										<b>Direct Ownership</b>
Bangunan	88.773	18.934	( 6.609)	-	-	( 760)	-	-	100.338	Building
Peralatan, perlengkapan kantor dan perangkat elektronik	19.670	6.076	( 737)	-	96	-	-	-	25.105	Tools, office equipment and electronic hardware
Kendaraan	21.002	7.592	( 14.771)	-	5.193	-	-	-	19.016	Vehicles
Genset	30.504	69	( 30.502)	-	-	-	-	-	71	Genset
Menara bergerak	81.562	13.129	-	-	-	-	-	-	94.691	Transportable towers
	241.511	45.800	( 52.619)	-	5.289	( 760)	-	-	239.221	
Nilai Tercatat	28.089.812	-	-	-	-	-	-	-	33.145.021	Carrying Value
Jumlah	28.738.362	-	-	-	-	-	-	-	33.637.904	Total

\*) Terutama merupakan pembelian menara telekomunikasi dari IBST (Catatan 38b). Selisih antara biaya perolehan dengan nilai menara telekomunikasi yang dicatat sebagai aset tetap, diakui sebagai aset hak guna (Catatan 12).

\*) Primarily is purchasing of telecommunication towers from IBST (Note 38b). The difference between cost of acquisition and the value of telecommunication towers which are recorded as property and equipment is recognized as right of use of assets (Note 12).

Aset tetap dalam penyelesaian merupakan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi, dengan rincian sebagai berikut:

Property and equipment in progress represent the telecommunications towers infrastructures development, detail as follows:

	2022	2021	
<u>Persentase penyelesaian &gt; 50%</u>			<u>Percentage of completion &gt; 50%</u>
Menara telekomunikasi	35.031	186.748	Telecommunications towers
In building system	3.474	5.616	In building system
Serat Optik	76.222	-	Fiber Optic
<u>Persentase penyelesaian &lt; 50%</u>			<u>Percentage of completion &lt; 50%</u>
Menara telekomunikasi	54.791	292.094	Telecommunications towers
In building system	5.211	8.425	In building system
Serat Optik	114.333	-	Fiber Optic
Jumlah	289.062	492.883	Total

Estimasi penyelesaian aset tetap dalam penyelesaian adalah sekitar 1 bulan sampai 1 tahun sejak tanggal pelaporan. Tidak terdapat hambatan untuk menyelesaikan aset tetap dalam penyelesaian.

The estimation date to complete the property and equipment in progress is between 1 month to 1 year since the reporting date. There are no obstacles to settling property and equipment in progress.

Tidak terdapat kapitalisasi biaya pinjaman untuk aset karena tidak memenuhi kriteria aset kualifikasian.

There is no capitalization of borrowing costs for assets because It does not meet the criteria for qualifying assets.

Ekshibit E/72

Exhibit E/72

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET TETAP (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021, beban penyusutan dialokasikan pada beban pokok pendapatan dan beban usaha masing-masing sebesar Rp 854.012 (2021: Rp 641.303) dan Rp 34.242 (2021: Rp 32.671) (Catatan 30 dan 31).

Kerugian pelepasan dan penghapusbukuan aset tetap untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Nilai perolehan	9.771	52.904
Akumulasi penyusutan	( 6.893)	( 52.619)
Nilai tercatat	2.878	285
Harga pelepasan dan penghapusbukuan	813	82
Kerugian pelepasan dan penghapusbukuan	( 2.065)	( 203)

Pada 31 Desember 2022 dan 2021, seluruh aset tetap (kecuali aset tetap dalam penyelesaian, tanah, peralatan, perlengkapan kantor, perangkat elektronik dan genset) telah diasuransikan kepada PT Lippo General Insurance Tbk, PT Asuransi Umum Mega, PT Asuransi Candi Utama dan PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika terhadap kebakaran, pencurian dan risiko kerugian lainnya kepada pihak ketiga berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 14.616.685 dan Rp 13.534.337. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko yang dipertanggungjawabkan.

Perusahaan dan entitas anak tidak memiliki aset yang tidak digunakan sementara, dan tidak ada aset yang dihentikan dari penggunaan aktif dan diklasifikasi sebagai tersedia untuk dijual.

Aset yang sudah habis disusutkan dan masih digunakan adalah kendaraan dengan nilai perolehan masing-masing sebesar Rp 2.984 pada 31 Desember 2022 dan 2021.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan atas keadaan yang menunjukkan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

10. PROPERTY AND EQUIPMENT (Continued)

For the year ended 31 December 2022 and 2021, depreciation charged to cost of revenue and operating expenses amounted to Rp 854,012 (2021: Rp 641,303) and Rp 34,242 (2021: Rp 32,671), respectively (Notes 30 and 31).

Loss on disposal and written-off of property and equipment for the year ended 31 December 2022 and 2021 are as follows:

	2022	2021	
Nilai perolehan	9.771	52.904	Cost
Akumulasi penyusutan	( 6.893)	( 52.619)	Accumulated depreciation
Nilai tercatat	2.878	285	Carrying value
Harga pelepasan dan penghapusbukuan	813	82	Selling price and written - off
Kerugian pelepasan dan penghapusbukuan	( 2.065)	( 203)	Loss on disposal and written - off

As of 31 December 2022 and 2021, all property and equipment (except, property and equipment in progress, land, tools, office equipment, electronic hardware and genset) have been insured PT Lippo General Insurance Tbk, PT Asuransi Umum Mega, PT Asuransi Candi Utama and PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika against fire, theft and other losses to third parties under a blanket policy with sum insured of Rp 14,616,685 and Rp 13,534,337, respectively. Management believes that the sum insured is adequate to cover possible losses from such risks.

The Company and subsidiaries has no assets not in use temporarily, and no assets are discontinued from active use and clasified as available for sale.

Depreciated and still used assets are vehicles at cost of Rp 2,984 as of 31 December 2022 and 2021, respectively.

Based on evaluation of Management, there were no events or changes in circumstances to indicate any impairment of property and equipment as of 31 December 2022 and 2021.



Ekshibit E/73

Exhibit E/73

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET TETAP (Lanjutan)

Pengukuran nilai wajar

Sehubungan dengan penerapan PSAK 16 "Aset Tetap", Perusahaan dan entitas anak telah memilih model revaluasi untuk pengukuran setelah pengakuan awal menara telekomunikasi. Nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2022 ditentukan berdasarkan penilaian dari penilai independen KJPP Martokoesoemo, Pakpahan & Rekan dalam laporannya pada tanggal 24 Maret 2023, dan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 28/POJK.04/2021 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal.

Hirarki nilai wajar aset tetap pada akhir tahun pelaporan merupakan kategori dalam level 3 pengukuran berulang nilai wajar. Tidak terdapat transfer antara level selama tahun berjalan.

Dalam menentukan nilai wajar, Penilai Independen menggunakan metode penilaian dengan mengkombinasikan dua pendekatan, yaitu pendekatan pendapatan yang mendiskontokan penerimaan kas dimasa depan, dan pendekatan biaya yang menggunakan biaya penggantian pada saat ini.

Pada 31 Desember 2022, asumsi utama yang digunakan oleh penilai independen adalah sebagai berikut:

- a. Inflasi per tahun sebesar 2,81%
- b. Tingkat bunga diskonto per tahun sebesar 12,38%

Pada 31 Desember 2021, asumsi utama yang digunakan oleh penilai independen adalah sebagai berikut:

- a. Inflasi per tahun sebesar 2,86%
- b. Tingkat bunga diskonto per tahun sebesar 11,93%

Hubungan antara input tidak dapat diobservasi untuk nilai wajar aset tetap adalah lebih tinggi tingkat diskonto digunakan, semakin rendah nilai wajar dan semakin tinggi tingkat pertumbuhan sewa aset tetap digunakan, semakin tinggi nilai wajar.

Tidak terdapat perubahan teknik penilaian pengukuran nilai wajar level 3 pada tahun ini. Pengukuran nilai wajar didasarkan pada item di atas yang tertinggi dan penggunaan terbaik, yang tidak berbeda dari penggunaan yang sebenarnya.

Jika menara telekomunikasi diukur menggunakan model biaya, maka nilai tercatat menara telekomunikasi pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 27.011.914 dan Rp 24.850.992.

10. PROPERTY AND EQUIPMENT (Continued)

Fair value measurement

Regarding the implementation of PSAK 16 "Property and Equipment", the Company and subsidiaries has chosen the revaluation model for the measurement after initial recognition of telecommunication towers. The fair value as of 31 December 2022 is determined based on the appraisal of KJPP Martokoesoemo, Pakpahan & Rekan in their report dated 24 March 2023, and incorporates with The Indonesian Financial Services Authority regulation No. 28/POJK.04/2021 regarding Appraisal and Presentation of Property Appraisal Reports in the Capital Market.

The fair value hierarchy of property and equipment at the end of reporting year is categorised as a level 3 recurring fair value measurement. There are no transfers between levels during the year.

To determine the fair value, the Independent Appraiser utilizes a combination of two approaches as the appraisal method: the income approach, which discounts future cash flows, and the cost approach, which is based on current replacement cost.

As of 31 December 2022, independent appraiser used the following key assumptions:

- a. Inflation per year of 2.81%
- b. Discount rate per year of 12.38%

As of 31 December 2021, independent appraiser used the following key assumptions:

- a. Inflation per year of 2.86%
- b. Discount rate per year of 11.93%

Relationship between unobservable inputs to fair value of property and equipment is the higher the discount rate used, the lower the fair value and the higher the rental income of property and equipment growth rate used, the higher the fair value.

There were no changes to the valuation techniques of level 3 fair value measurements in the year. The fair value measurement is based on the above items highest and best use, which does not differ from their actual use.

Had the Company's telecommunication tower been measured on a cost model basis as of 31 December 2022 and 2021 they amounted to Rp 27,011,914 and Rp 24,850,992, respectively.

Ekshibit E/74

Exhibit E/74

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

11. PROPERTI INVESTASI

Rincian properti investasi adalah sebagai berikut:

31 Desember 2022	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Reklasifikasi ke aset hak guna/ Reclassifications to right of use asset	Reklasifikasi ke aset tetap/ Reclassifications to property and equipment	Saldo akhir/ Ending balance	31 December 2022
Tanah	131.724	2.777	3.882	-	-	138.383	Land
Bangunan	172.612	-	( 3.882)	-	-	168.730	Building
	304.336	2.777	-	-	-	307.113	
Akumulasi kenaikan nilai wajar	142.709	15.656	-	-	-	158.365	Accumulated increase of fair value
Jumlah	447.045					465.478	Total

31 Desember 2021	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Reklasifikasi ke aset hak guna/ Reclassifications to right of use asset	Reklasifikasi ke aset tetap/ Reclassifications to property and equipment	Saldo akhir/ Ending balance	31 December 2021
Tanah	114.756	4.330	12.848	( 142)	( 68)	131.724	Land
Bangunan	188.193	353	( 12.848)	-	( 3.086)	172.612	Building
	302.949	4.683	-	( 142)	( 3.154)	304.336	
Akumulasi kenaikan nilai wajar	85.071	57.638	-	-	-	142.709	Accumulated increase of fair value
Jumlah	388.020					447.045	Total

11. INVESTMENT PROPERTIES

The details of investment properties are as follows:

Nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2022 ditentukan berdasarkan penilaian dari penilai independen KJPP Martokoesoemo, Pakpahan & Rekan dalam laporannya pada tanggal 24 Maret 2023, dan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 28/POJK.04/2021 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal.

Hirarki nilai wajar properti investasi pada akhir tahun pelaporan merupakan kategori dalam level 3 pengukuran berulang nilai wajar. Tidak terdapat transfer antara level selama tahun berjalan.

Dalam menentukan nilai wajar, Penilai Independen menggunakan Pendekatan Pasar yaitu pendekatan penilaian yang menggunakan data transaksi atau penawaran atas properti yang sebanding dan sejenis dengan obyek penilaian yang didasarkan pada suatu proses perbandingan dan penyesuaian.

Pendekatan ini digunakan apabila dipasaran umum secara fisik didapat data untuk properti yang hampir sama dan tipikal dengan properti yang dinilai.

**Pengukuran nilai wajar**

Tidak terdapat perubahan teknik penilaian pengukuran nilai wajar level 3 pada tahun ini. Pengukuran nilai wajar didasarkan pada item di atas yang tertinggi dan penggunaan terbaik, yang tidak berbeda dari penggunaan yang sebenarnya.

The fair value as of 31 December 2022 is determined based on the appraisal of KJPP Martokoesoemo, Pakpahan & Rekan in their report dated 24 March 2023, and incorporates with The Indonesian Financial Services Authority regulation No. 28/POJK.04/2021 regarding Appraisal and Presentation of Property Appraisal Reports in the Capital Market.

The fair value hierarchy of investment properties at the end of reporting year is categorised as a level 3 recurring fair value measurement. There are no transfers between levels during the year.

To determine the fair value, the Independent Appraiser utilizes a market approach valuation approach that uses transaction or offer data on comparable and similar property to valuation objects based on a process of comparison and adjustment.

This approach is used if the physical market generally gets data for properties that are almost identical and typical of the property being valued.

**Fair value measurement**

There were no changes to the valuation techniques of level 3 fair value measurements in the year. The fair value measurement is based on the above items highest and best use, which does not differ from their actual use.

Ekshibit E/75

Exhibit E/75

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

11. PROPERTI INVESTASI (Lanjutan)

Jumlah pendapatan sewa atas properti investasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 8.389 dan Rp 8.509, diakui sebagai bagian dari pendapatan lainnya (Catatan 29).

Tidak terdapat beban operasi langsung yang diakui dalam laporan keuangan. Penyewa membayar beban operasi langsung, seperti biaya listrik, pemeliharaan dan perawatan kepada pihak ketiga.

11. INVESTMENT PROPERTIES (Continued)

Total rent revenue earned from investment properties for the year ended 31 December 2022 and 2021 amounting to Rp 8,389 and Rp 8,509, respectively, recognized as part of other revenue (Note 29).

There are no direct operating expenses recognized in the financial statements. Tenants pay direct operating expenses, such as electricity, maintenance and maintenance costs to third parties.

12. ASET HAK GUNA

Akun ini diukur sesuai dengan PSAK 73 mengenai "Sewa". Akun ini merupakan sewa lahan untuk menara telekomunikasi, sewa kantor dan pembiayaan kendaraan mencakup biaya sewa dibayar dimuka untuk jangka waktu yang sesuai dengan masa kontrak sewa ditambah dengan estimasi liabilitas sewa untuk mencakup jangka waktu kolokasi, dengan rincian sebagai berikut:

12. RIGHT OF USE ASSETS

This account is measured based on PSAK 73 "Leases". This account represents land leases for telecommunication towers, office leases and financing for vehicles which include prepaid land lease with a period matching to the contract term plus the estimation of land lease extension to cover the collocation period, with details as follows:

31 Desember 2022	Saldo Awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Penyesuaian/ Adjustment	Penghapusbukuan/ Written-Off	Saldo akhir/ Ending Balance	31 December 2022	
<b>Biaya perolehan</b>						<b>Acquisition costs</b>	
Sewa lahan	5.219.140	622.644	( 508)	-	5.841.276	Land leases	
Sewa kantor	7.446	-	508	-	7.954	Office leases	
Sewa kendaraan	23.560	7.480	-	( 8.110)	22.930	Vehicles lease	
Jumlah biaya perolehan	5.250.146	630.124	-	( 8.110)	5.872.160	Total acquisition costs	
<b>Akumulasi penyusutan</b>						<b>Accumulated depreciation</b>	
Sewa lahan	1.773.477	418.829	-	-	2.192.306	Land leases	
Sewa kantor	1.767	884	-	-	2.651	Office leases	
Sewa kendaraan	11.895	4.506	-	( 7.041)	9.360	Vehicles leases	
Jumlah akumulasi penyusutan	1.787.139	424.219	-	( 7.041)	2.204.317	Total accumulated depreciation	
Nilai tercatat	3.463.007				3.667.843	Carrying amount	
				Reklasifikasi ke aset tetap/ Reclassifications to property and equipment			
31 Desember 2021	Saldo Awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Habis masa sewa/ Lease expired	Penyesuaian/ Adjustment	Penghapusbukuan/ Write-Off	Saldo akhir/ Ending balance	31 December 2021
<b>Biaya perolehan</b>							<b>Acquisition costs</b>
Sewa lahan	4.154.238	1.239.968	( 175.066)	-	-	5.219.140	Land leases
Sewa kantor	7.446	-	-	-	-	7.446	Office leases
Sewa kendaraan	34.192	9.035	( 9.344)	( 2.373)	( 7.950)	23.560	Vehicles lease
Jumlah biaya perolehan	4.195.876	1.249.003	( 184.410)	( 2.373)	( 7.950)	5.250.146	Total acquisition costs
<b>Akumulasi penyusutan</b>							<b>Accumulated depreciation</b>
Sewa lahan	1.559.094	389.449	( 175.066)	-	-	1.773.477	Land leases
Sewa kantor	827	940	-	-	-	1.767	Office leases
Sewa kendaraan	21.073	4.601	( 9.344)	758	( 5.193)	11.895	Vehicles leases
Jumlah akumulasi penyusutan	1.580.994	394.990	( 184.410)	758	( 5.193)	1.787.139	Total accumulated depreciation
Nilai tercatat	2.614.882					3.463.007	Carrying amount

Ekshibit E/76

Exhibit E/76

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET HAK GUNA (Lanjutan)

Apabila terdapat kontrak kolokasi dengan jangka waktu lebih panjang dari kontrak sewa lahan, maka estimasi nilai perpanjangan sewa lahan untuk mencakup jangka waktu kolokasi akan disajikan sebagai liabilitas sewa (Catatan 23).

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021, beban penyusutan yang dialokasikan pada beban pokok pendapatan dan beban usaha masing-masing adalah sebesar Rp 418.829 (2021: Rp 389.449) dan Rp 5.390 (2021: Rp 5.541) (Catatan 30 dan 31).

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, aset tetap - sewa pembiayaan berupa kendaraan telah dijadikan jaminan atas liabilitas sewa (Catatan 23b).

12. RIGHT OF USE ASSETS (Continued)

If collocation period is longer than the existing land lease contract, the estimation of land lease extension to cover the collocation period will be presented as lease liabilities (Note 23).

For the year ended 31 December 2022 and 2021, depreciation charged to cost of revenue and operating expenses are amounted to Rp 418,829 (2021: Rp 389,449) and Rp 5,390 (2021: Rp 5,541), respectively (Notes 30 and 31).

As of 31 December 2022 and 2021, leased vehicles are collateralized for lease liabilities (Note 23b).

13. UANG JAMINAN

	2022	2021	
Sewa	310	268	Rental
Lainnya	713	1.337	Others
<b>Jumlah</b>	<b>1.023</b>	<b>1.605</b>	<b>Total</b>

13. REFUNDABLE DEPOSITS

	2022	2021	
Sewa	310	268	Rental
Lainnya	713	1.337	Others
<b>Jumlah</b>	<b>1.023</b>	<b>1.605</b>	<b>Total</b>

14. ASET KEUANGAN DERIVATIF

	2022	2021	
Aset keuangan derivatif			Derivative financial assets
Derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai			Derivatives designated as hedging instruments
Swap valuta asing - lindung nilai arus kas	563.351	900.363	Foreign currency hedge - cash flow hedges

Arus kas swap valuta asing

Risiko nilai tukar valuta asing muncul ketika operasi individu Perusahaan dan entitas anak memasuki transaksi yang terbagi dalam mata uang selain mata uang fungsionalnya. Ketika risiko terhadap Perusahaan dan entitas anak di pertimbangkan menjadi signifikan, treasury Perusahaan dan entitas anak akan mencocokkan kontrak berjangka valuta asing dengan bank yang mempunyai nama baik.

Jumlah pokok nosional dari sisa kontrak berjalan berjangka valuta asing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar US\$ 1.495.948.000 dan US\$ 1.637.000.000. Nilai wajar pada masing-masing tanggal diatas adalah sebesar Rp 563.351 dan Rp 900.363.

Nilai wajar penuh dari derivatif lindung nilai diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas tidak lancar ketika sisa jatuh tempo item yang dilindungi nilai lebih dari 12 bulan. Ini diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas lancar ketika sisa jatuh tempo item lindung nilai kurang dari 12 bulan.

14. DERIVATIVE FINANCIAL ASSETS

	2022	2021	
Aset keuangan derivatif			Derivative financial assets
Derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai			Derivatives designated as hedging instruments
Swap valuta asing - lindung nilai arus kas	563.351	900.363	Foreign currency hedge - cash flow hedges

Cash flow currency swaps

Foreign exchange risk arises when individual operations of the Company and subsidiaries enter into transactions denominated in a currency other than their functional currency. Where the risk to the Company and subsidiaries is considered to be significant, treasury of the Company and subsidiaries will enter into a matching forward foreign exchange contract with a reputable bank.

The notional principal amounts of outstanding forward foreign exchange contracts at 31 December 2022 and 2021 were US\$ 1,495,948,000 and US\$ 1,637,000,000, respectively. Their fair value at these respective dates are Rp 563,351 and Rp 900,363, respectively.

The full fair value of hedging derivatives is classified as a non-current asset or liability when the remaining maturity of the hedged item is more than 12 months. It is classified as a current asset or liability when the remaining maturity of the hedged item is less than 12 months.

Ekshibit E/77

Exhibit E/77

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

14. ASET KEUANGAN DERIVATIF (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, premi lindung nilai sehubungan dengan swap valuta asing masing-masing berkisar antara 2,38% sampai dengan 4,30%.

14. DERIVATIVE FINANCIAL ASSETS (Continued)

As of 31 December 2022 and 2021, hedge premiums related to foreign currency swaps ranged from 2.38% to 4.30%, respectively.

Periode atau Tahun/ Period or Year	Jumlah kontrak lindung nilai/ Number of hedging contracts	Jumlah Nosional/ Notional amount (US\$ nilai penuh/ US\$ full amount)	Jatuh tempo/ Due date	Beban lindung nilai/ hedging cost (dalam jutaan Rupiah/ in million Rupiah)	Pihak yang memiliki nilai kontrak lindung nilai lebih dari 10%/ Parties who earn contracts more than 10%	
					Pihak dalam kontrak / Counterparties	%
31 Desember / 31 December 2022	106	1.495.948.000	5 Januari 2023 sampai dengan 29 Juni 2026/ 5 January 2023 to 29 June 2026	538.173	Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, PT Bank UOB Indonesia, PT DBS Indonesia	45,94%
31 Desember / 31 December 2021	102	1.637.000.000	26 Januari 2022 sampai dengan 29 September 2026/ 26 January 2022 to 29 September 2026	835.252	BNP Paribas Singapore Branch, Credit Agricole Corporate And Investment Bank, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited	53,50%

15. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Pada 31 Desember 2022 dan 2021, akun ini terdiri dari:

	2022	2021
Perangkat lunak	31.317	18.069
Estimasi klaim untuk pengembalian pajak	21.445	-
Lisensi	5.700	-
<b>Jumlah</b>	<b>58.462</b>	<b>18.069</b>

Pada tanggal 30 November 2022, Kantor Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk Perusahaan atas kurang bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp 21.445. Atas SKPKB tersebut, Perusahaan telah menyampaikan Surat Keberatan (Keberatan) pada tanggal 28 Februari 2023. Perusahaan berkeyakinan Keberatan tersebut akan dapat diterima dan memperoleh seluruh pengembalian pajak yang diajukan dalam Keberatan tersebut.

15. OTHER NON-CURRENT ASSETS

As of 31 December 2022 and 2021, this account represents:

Software and license	18.069
Estimated claim for tax refund	-
License	-
<b>Total</b>	<b>18.069</b>

On 30 November 2022, the Tax Office issued an Notice of Tax Underpayment Assessment (SKPKB) for the Company for underpayment of Income Tax Article 26 amounting to Rp 21,445. Regarding the SKPKB, the Company has submitted an Objection Letter (Objection) on 28 February 2023. The Company believes that the Objection will be accepted and obtains all tax refunds submitted in the Objection.

Ekshibit E/78

Exhibit E/78

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

16. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA

16. TRADE PAYABLES - THIRD PARTIES

	2022	2021	
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
PT ZTT Cable Indonesia	47.985	-	PT ZTT Cable Indonesia
PT Sanggar Jaya Abadi	39.277	-	PT Sanggar Jaya Abadi
PT Wahana Infrastruktur Nusantara	18.627	22.207	PT Wahana Infrastruktur Nusantara
PT Tunas Cahaya Mandiri Widyatama	7.190	-	PT Tunas Cahaya Mandiri Widyatama
PT Tritama Aji Laksana	6.462	-	PT Tritama Aji Laksana
PT Danusari Mitra Sejahtera	6.347	-	PT Danusari Mitra Sejahtera
PT Berkat Bersama Teknik	6.297	-	PT Berkat Bersama Teknik
PT Furukawa Optical Solution Indonesia	6.083	-	PT Furukawa Optical Solution Indonesia
PT Mandira Infra Tripakarti	5.576	-	PT Mandira Infra Tripakarti
PT Jaya Engineering Technology	5.364	-	PT Jaya Engineering Technology
PT Nayaka Pratama	4.721	-	PT Nayaka Pratama
PT Ciptadana Sekuritas Asia	4.643	-	PT Ciptadana Sekuritas Asia
PT Sinarmonas Industries	3.421	-	PT Sinarmonas Industries
PT. YOFC Internasional Indonesia	3.330	-	PT. YOFC Internasional Indonesia
PT Kokoh Semesta	917	4.117	PT Kokoh Semesta
PT Bukaka Teknik Utama	-	2.757	PT Bukaka Teknik Utama
Lainnya			Others
(masing-masing di bawah Rp 3 miliar)	<u>89.367</u>	<u>8.354</u>	(each below Rp 3 billion)
<b>Jumlah</b>	<u>255.607</u>	<u>37.435</u>	<b>Total</b>

Semua utang usaha-pihak ketiga disajikan dalam rupiah.

All trade payables-third parties presented in rupiah.

Nilai tercatat utang usaha yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi mendekati nilai wajarnya.

The carrying value of trade payables classified as financial liabilities measured at amortised cost approximates fair value.

17. UTANG LAIN-LAIN

17. OTHER PAYABLES

Pada 31 Desember 2022 dan 2021, akun ini terdiri dari:

As of 31 December 2022 and 2021, this account represents:

	2022	2021	
Asuransi	474	778	Insurance
Lainnya	<u>22.968</u>	<u>11.449</u>	Others
<b>Jumlah</b>	<u>23.442</u>	<u>12.227</u>	<b>Total</b>

Pos lainnya terutama merupakan penerimaan dari pihak ketiga yang belum terkonfirmasi dan utang kepada pihak lainnya.

Other items mainly represent unconfirmed receipts from third parties and account payables to other third parties.

Nilai tercatat utang lain-lain yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi mendekati nilai wajarnya.

The carrying value of other payables classified as financial liabilities measured at amortised cost approximates fair value.

Ekshibit E/79

Exhibit E/79

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

18. PERPAJAKAN			18. TAXATION
a. Pajak Dibayar di Muka	2022	2021	a. Prepaid Taxes
	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	309	-	Income Tax Article 4 (2)
Pajak Penghasilan Pasal 23	72	-	Income Tax Article 23
Pajak Penghasilan Pasal 28	218.489	558.550	Income Tax Article 28
Pajak Pertambahan Nilai - Masukan	<u>620.440</u>	<u>411.330</u>	Value-Added Tax - Input
<b>Jumlah</b>	<u><u>839.310</u></u>	<u><u>969.880</u></u>	<b>Total</b>
b. Utang Pajak	2022	2021	b. Taxes Payable
	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	7.512	9.924	Income Tax Article 4 (2)
Pajak Penghasilan Pasal 21	3.072	3.091	Income Tax Article 21
Pajak Penghasilan Pasal 23	17.343	30.751	Income Tax Article 23
Pajak Penghasilan Pasal 25	7.833	6.425	Income Tax Article 25
Pajak Penghasilan Pasal 26	22.846	799	Income Tax Article 26
Pajak Penghasilan Pasal 29	25.580	117.532	Income Tax Article 29
Pajak Pertambahan Nilai - Keluaran	<u>38.880</u>	<u>852</u>	Value-Added Tax - Output
<b>Jumlah</b>	<u><u>123.066</u></u>	<u><u>169.374</u></u>	<b>Total</b>
c. Perhitungan Pajak Penghasilan			c. Income Tax Calculation
Penghasilan kena pajak yang dihitung Perusahaan menjadi dasar Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan kepada otoritas perpajakan pada setiap tahun.			Taxable income which calculated by the Company uses as basis for Surat Pemberitahuan (SPT) that reported to Director General of Taxes yearly.
Dalam laporan keuangan konsolidasian ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan pada perhitungan sementara, karena Perusahaan belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badannya.			In these consolidated financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Company has not yet submitted its corporate income tax returns.
Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran laba kena pajak untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021, adalah sebagai berikut:			A reconciliation between profit before income tax as shown in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income with estimated taxable profit for the year ended 31 December 2022 and 2021, are as follows:

Ekshibit E/80

Exhibit E/80

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

18. PERPAJAKAN (Lanjutan)

18. TAXATION (Continued)

c. Perhitungan Pajak Penghasilan (Lanjutan)

c. Income Tax Calculation (Continued)

	2022	2021	
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final	4.934.333	2.845.067	Revenue subject to final income tax
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan yang tidak bersifat final	1.590.036	3.334.517	Revenue subject to non final income tax
Pendapatan konsolidasian	6.524.369	6.179.584	Consolidated income
<b><u>Pajak Penghasilan</u></b>			<b><u>Income Tax</u></b>
Pajak penghasilan yang bersifat final	493.433	284.507	Subject to final income tax
Pajak penghasilan yang tidak bersifat final	222.325	285.346	Subject to non final income tax
Beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain - taksiran	715.758	569.853	Income tax expense as per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income - estimated
<b><u>Pajak Non Final</u></b>			<b><u>Non Final Tax</u></b>
Laba sebelum pajak penghasilan, menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	1.911.766	1.935.964	Profit before income tax, as per consolidated statements of profit or loss and other of comprehensive income
Bagian laba entitas anak sebelum pajak penghasilan	( 221.874)	( 314.644)	Profit of subsidiaries before income tax
Laba Perusahaan sebelum pajak penghasilan	1.689.892	1.621.320	The Company's profit before income tax
<b>Koreksi fiskal:</b>			<b>Fiscal corrections:</b>
<b>Beda temporer</b>	( 277)	394	<b>Temporary differences</b>
<b>Beda tetap:</b>			<b>Permanent differences:</b>
Beban yang terkait dengan pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final	10.586	13.120	Expenses related to revenue subject to final income tax
Bagian laba dari entitas anak	( 1.489.846)	( 1.522.713)	Share profit from subsidiaries
Lainnya - Bersih	27.428	12.029	Others - Net
Jumlah koreksi fiskal	( 1.452.109)	( 1.497.170)	Total fiscal correction
Taksiran laba kena pajak - Perusahaan	237.783	124.150	Estimated tax income - the Company

Taksiran beban pajak penghasilan dan utang pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Estimated income tax expenses and income tax payable for the year ended 31 December 2022 and 2021, are as follows:



Ekshibit E/81

Exhibit E/81

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

18. PERPAJAKAN (Lanjutan)

18. TAXATION (Continued)

c. Perhitungan Pajak Penghasilan (Lanjutan)

c. Income Tax Calculation (Continued)

	2022	2021	
Taksiran laba kena pajak (rugi fiskal)			<i>Estimated taxable income (tax loss)</i>
Perusahaan	237.783	124.150	<i>The Company</i>
Entitas anak - Bersih	777.286	1.135.994	<i>Subsidiaries - Net</i>
Taksiran beban pajak penghasilan			<i>Estimated income tax expenses</i>
Perusahaan	52.312	27.313	<i>The Company</i>
Entitas anak	170.013	258.033	<i>Subsidiaries</i>
Taksiran beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	222.325	285.346	<i>Estimated income tax expenses as per consolidated statements of profit or loss and other of comprehensive income</i>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Pajak Penghasilan Pasal 23	( 292.053)	( 553.868)	<i>Income Tax Article 23</i>
Pajak Penghasilan Pasal 25	( 123.182)	( 77.508)	<i>Income Tax Article 25</i>
Jumlah	( 415.235)	( 631.376)	<i>Total</i>
Taksiran lebih bayar pajak penghasilan tahun berjalan	( 218.489)	( 464.185)	<i>Estimated claims for income tax refund - current</i>
Taksiran lebih pajak penghasilan tahun lalu	-	( 94.365)	<i>Estimated claims for income tax refund - last year</i>
Taksiran Pajak Penghasilan Pasal 28	( 218.489)	( 558.550)	<i>Estimated Income Tax Article 28</i>
Taksiran utang Pajak Penghasilan Pasal 29	25.580	117.532	<i>Estimated Income Tax Payable Article 29</i>

d. Pajak tangguhan

d. Deferred tax

Aset pajak tangguhan

Deferred tax assets

Aset (liabilitas) pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer antara pendapatan dan beban, yang diakui secara komersial dan perpajakan, adalah sebagai berikut:

Deferred tax assets (liabilities) occurring from temporary differences of revenues and expenses recognition between the commercial and tax base are as follows:

	Saldo awal/ Beginning balance	Dibebankan ke laba rugi/ Charged to profit or loss	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ Charged to other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance	
31 Desember 2021					31 December 2021
Rugi fiskal	44.995	( 44.995)	-	-	<i>Tax loss</i>
Cadangan imbalan pasca-kerja	11.914	( 11.864)	( 50)	-	<i>Provision for post-employment benefits</i>
Penyusutan aset tetap	3.817	( 3.817)	-	-	<i>Depreciation of Property and equipment</i>
Jumlah - bersih	60.726	( 60.676)	( 50)	-	<i>Total - net</i>

Ekshibit E/82

Exhibit E/82

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

18. PERPAJAKAN (Lanjutan)

18. TAXATION (Continued)

d. Pajak tangguhan (Lanjutan)

d. Deferred tax (Continued)

Liabilitas pajak tangguhan

Deferred tax liabilities

	Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan ke laba rugi/ Credited to profit or loss	Saldo akhir/ Ending balance	
31 Desember 2021				31 December 2021
Pajak atas pendapatan bunga	( 11.411)	11.411	-	Interest income withholding tax

e. Taksiran klaim pajak penghasilan

e. Estimated claims for income tax refund

Akun ini merupakan taksiran jumlah lebih bayar pajak penghasilan. Jumlah tersebut mungkin berbeda dari jumlah lebih bayar pajak penghasilan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Pada tanggal 30 November 2022, Perusahaan mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 masa pajak Februari 2021 sebesar Rp 21.445.

This account represents estimated claims for income tax refund. Such amounts might be different with the amounts reported in the Annual Income Tax Return. On 30 November 2022, the Company filed an objection to the Underpaid Tax Assessment Letter (SKPKB) of Income Tax Article 26 for the February 2021 tax period amounting to Rp 21,445.

19. PENDAPATAN YANG DITERIMA DI MUKA

19. UNEARNED INCOME

	2022	2021	
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
PT XL Axiata Tbk	541.132	512.584	PT XL Axiata Tbk
PT Indosat Tbk	417.551	185.815	PT Indosat Tbk
PT Telekomunikasi Selular	136.937	185.035	PT Telekomunikasi Selular
PT Smartfren Telecom Tbk	965	910	PT Smartfren Telecom Tbk
PT Smart Telecom	20	410	PT Smart Telecom
PT Hutchison 3 Indonesia	-	397.799	PT Hutchison 3 Indonesia
PT Sampoerna Telecom	-	1.945	PT Sampoerna Telecom
Lainnya	6.980	32.194	Others
<b>Jumlah</b>	<b>1.103.585</b>	<b>1.316.692</b>	<b>Total</b>

Ekshibit E/83

Exhibit E/83

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

19. PENDAPATAN YANG DITERIMA DI MUKA (Lanjutan)

Sesuai perjanjian sewa, entitas anak telah menerima pembayaran di muka dari pelanggan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) tahun.

liabilitas kontrak adalah kewajiban entitas untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan yang untuknya entitas telah menerima imbalan (atau jumlah yang jatuh tempo) dari pelanggan.

19. UNEARNED INCOME (Continued)

Based on the rental agreements, the subsidiaries have received payments in advance for year of 1 (one) month, 3 (three) months and 1 (one) year.

contract liability is an entity's obligation to transfer goods or services to a customer for which the entity has received consideration (or the amount is due) from the customer.

20. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

20. ACCRUED EXPENSES

	2022	2021	
Beban bunga			Interest expenses
Surat utang (Catatan 22)	382.834	353.106	Notes (Note 22)
Pinjaman jangka panjang (Catatan 21)	14.286	17.903	Long-term loans (Note 21)
Estimasi biaya pembangunan menara telekomunikasi	343.011	433.805	Estimated construction cost of telecommunication towers
Karyawan	114.112	114.718	Employees
Perbaikan dan pemeliharaan menara	54.473	75.043	Towers repair and maintenance
Asuransi	25.267	18.022	Insurance
Jasa konsultan	7.831	9.161	Consultant fees
Retensi pembelian gedung	6.500	6.500	Retention purchase of buildings
Beban kantor	3.708	7.051	Office expenses
Listrik	3.620	5.432	Electricity
Keamanan	3.124	6.939	Security
Retensi pembelian menara	-	54.444	Retention purchase of towers
Lainnya	16.138	5.373	Others
<b>Jumlah</b>	<b>974.904</b>	<b>1.107.497</b>	<b>Total</b>

Pos lainnya terutama merupakan utang beban bagi hasil pendapatan dan pembelian aset tetap.

Other items mainly represent accrued revenue sharing and purchases of fixed assets.

Estimasi biaya pembangunan menara telekomunikasi merupakan estimasi beban masih harus dikeluarkan atas menara telekomunikasi yang telah selesai pembangunannya namun belum ditagihkan seluruh biayanya oleh kontraktor.

Estimated construction cost of telecommunication towers represents the estimated costs to be incurred by the Company in relation to work performed on the telecommunication towers which have been completed but not yet invoiced by contractors.

Retensi pembelian menara adalah sebagian pembayaran yang ditunda oleh Perusahaan hingga kondisi tertentu yang dituangkan di Perjanjian Jual Beli Aset Bersyarat terpenuhi (Catatan 38b).

Tower purchase retention is part of payments that are postponed by the Company until certain conditions stipulated in the Conditional Asset Sale and Purchase Agreement are fulfilled (Note 38b).

Ekshibit E/84

Exhibit E/84

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

21. PINJAMAN JANGKA PANJANG - PIHAK KETIGA

21. LONG-TERM LOANS - THIRD PARTIES

Akun ini merupakan pinjaman dari pihak ketiga sebagai berikut:

This account represents loans from third parties as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
<b>Pinjaman sindikasi</b>			<b>Syndicated loans</b>
a. Fasilitas US\$ 375 juta (saldo pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar US\$ 95 juta dan US\$ 113 juta)	1.494.445	1.612.397	a. US\$ 375 million facility (balance as of 31 December 2022 and 2021 amounted to US\$ 95 million and US\$ 113 million, respectively)
b. Fasilitas US\$ 275 juta (saldo pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar US\$ 173,6 juta dan US\$ 275 juta)	2.730.902	3.923.975	b. US\$ 275 million facility (balance as of 31 December 2022 and 2021 amounted to US\$ 173.6 million and US\$ 275 million, respectively)
<b>Pinjaman non-sindikasi</b>			<b>Non-syndicated loans</b>
PT Bank UOB Indonesia	183.900	139.200	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank QNB Indonesia Tbk	72.708	40.000	PT Bank QNB Indonesia Tbk
<b>Jumlah</b>	4.481.955	5.715.572	<b>Total</b>
Dikurangi: Biaya pinjaman	( 115.121)	( 111.530)	Less : Unamortized borrowing cost
<b>Jumlah - bersih</b>	4.366.834	5.604.042	<b>Total - net</b>
Saldo yang jatuh tempo dalam satu tahun	( 206.438)	( 148.885)	Balance due less than one year
Saldo yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	4.160.396	5.455.157	Balance due more than one year

Pinjaman Sindikasi

Syndication Loans

a. Fasilitas Pinjaman *Revolving* sebesar US\$ 375 juta

a. US\$ 375 million *Revolving Loan Facility*

Pada tanggal 28 Juni 2019, entitas anak tertentu telah menandatangani perjanjian Fasilitas Pinjaman *Revolving* ("Perjanjian RLF") sebesar US\$ 375.000.000 untuk melunasi Fasilitas A.

On 28 June 2019, certain subsidiaries have entered into a US\$ 375,000,000 *Revolving Loan Facility* agreement (the "RLF Agreement") to repay Facility A.

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan, dan entitas anak yang menjadi peserta RLF ini memberikan jaminan bersama (*cross guarantee*) atas Perjanjian RLF.

These loans are unsecured, and the subsidiaries who participated in the RLF provide a *cross guarantee* to the Lenders under the RLF Agreement.

Dalam Perjanjian Fasilitas Pinjaman tersebut, entitas anak diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi, diantaranya:

Under the RLF Agreement, the subsidiaries are required to adhere to the following covenants, among others, as follows:

- a. *Net senior debt* dari entitas anak/ EBITDA yang disesuaikan dan dianualisasi maksimum sebesar 5 kali;
- b. *Top tier revenue ratio* minimum sebesar 50,00%.

- a. *Net senior debt* of subsidiaries/ *annualized adjusted EBITDA* ratio shall not exceed 5 times;
- b. *Minimum top tier revenue ratio* of 50.00%.

Ekshibit E/85

Exhibit E/85

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

21. PINJAMAN JANGKA PANJANG - PIHAK KETIGA (Lanjutan)

21. LONG-TERM LOANS - THIRD PARTIES (Continued)

Pinjaman Sindikasi (Lanjutan)

Syndication Loans (Continued)

a. Fasilitas Pinjaman *Revolving* sebesar US\$ 375 juta  
(Lanjutan)

a. US\$ 375 million *Revolving Loan Facility*  
(Continued)

Kreditor yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah:

The lenders who participated in this facility are:

- Australia and New Zealand Banking Group Limited
- CIMB Bank Berhad
- Credit Agricole Corporate and Investment Bank
- DBS Bank, Ltd
- Mizuho Bank, Ltd
- Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
- PT Bank BNP Paribas Indonesia
- PT Bank CIMB Niaga Tbk
- PT Bank DBS Indonesia
- PT Bank HSBC Indonesia
- PT Bank OCBC NISP Tbk
- The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
- United Overseas Bank Limited

- Australia and New Zealand Banking Group Limited
- CIMB Bank Berhad
- Credit Agricole Corporate and Investment Bank
- DBS Bank, Ltd
- Mizuho Bank, Ltd
- Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
- PT Bank BNP Paribas Indonesia
- PT Bank CIMB Niaga Tbk
- PT Bank DBS Indonesia
- PT Bank HSBC Indonesia
- PT Bank OCBC NISP Tbk
- The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
- United Overseas Bank Limited

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021, fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 1,85% per tahun di atas LIBOR untuk kreditor dalam negeri, dan 1,75% per tahun untuk kreditor luar negeri.

For the year ended 31 December 2022 and 2021, this facility bears interest margin of 1,85% above LIBOR per annum for onshore lenders, and 1,75% per annum for offshore lenders.

Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Januari 2025.

This facility will mature in January 2025.

Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh kreditor atas seluruh fasilitas pinjaman *revolving* yang diberikan.

The Company has complied with the requirements assigned by the creditors on all of the revolving loan facility given.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing US\$ 95 juta dan US\$ 113 juta.

The outstanding balance as of 31 December 2022 and 2021 amounted US\$ 95 million and US\$ 113 million.

b. Fasilitas Pinjaman *Revolving* sebesar US\$ 275 juta

b. US\$ 275 million *Revolving Loan Facility*

Pada tanggal 20 Januari 2021, entitas anak tertentu telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman *Revolving* ("Perjanjian RLF") sebesar US\$ 275.000.000 untuk menyediakan tambahan dana untuk modal kerja.

On 20 January 2021, certain subsidiaries entered into a Revolving Loan Facility Agreement ("RLF Agreement") amounting to US\$ 275,000,000 to provide additional funds for working capital.

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan, dan entitas anak yang menjadi peserta RLF ini memberikan jaminan bersama (*cross guarantee*) atas Perjanjian RLF.

This loan has no collateral, and the subsidiary that is a participant of the RLF provides a cross guarantee for the RLF Agreement.

Dalam Perjanjian Fasilitas Pinjaman tersebut, entitas anak diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi, diantaranya:

In the Loan Facility Agreement, the subsidiary is required to comply with several conditions, including:

- a. *Net senior debt* dari entitas anak/ EBITDA yang disesuaikan dan dianualisasi maksimum sebesar 5 kali;

- a. *Net senior debt of subsidiaries/ annualized adjusted EBITDA ratio shall not exceed 5 times;*

Ekshibit E/86

Exhibit E/86

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

21. PINJAMAN JANGKA PANJANG - PIHAK KETIGA (Lanjutan)

21. LONG-TERM LOANS - THIRD PARTIES (Continued)

Pinjaman Sindikasi (Lanjutan)

Syndication Loans (Continued)

b. Fasilitas Pinjaman *Revolving* sebesar US\$ 275 juta (Lanjutan)

b. US\$ 275 million *Revolving Loan Facility* (Continued)

b. *Top tier revenue ratio* minimum sebesar 50,00%.

b. Minimum *top tier revenue ratio* of 50.00%.

Kreditor yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah:

Creditors who participate in this facility are:

- Credit Agricole Corporate and Investment Bank
- DBS Bank Ltd
- Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch
- United Overseas Bank Limited
- PT Bank BNP Paribas Indonesia
- PT Bank CIMB Niaga Tbk
- PT Bank HSBC Indonesia
- PT Bank Mizuho Indonesia
- PT Bank OCBC NISP Tbk

- Credit Agricole Corporate and Investment Bank
- DBS Bank Ltd
- Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch
- United Overseas Bank Limited
- PT Bank BNP Paribas Indonesia
- PT Bank CIMB Niaga Tbk
- PT Bank HSBC Indonesia
- PT Bank Mizuho Indonesia
- PT Bank OCBC NISP Tbk

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021, fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 1,85% per tahun di atas LIBOR untuk kreditor dalam negeri, dan 1,75% per tahun untuk kreditor luar negeri.

For the year ended 31 December 2022 and 2021, this facility bears interest margin of 1,85% above LIBOR per annum for onshore lenders, and 1,75% per annum for offshore lenders.

Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Juni 2026.

This facility will mature in June 2026.

Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh kreditor atas seluruh fasilitas pinjaman *revolving* yang diberikan.

The Company has complied with the requirements assigned by the creditors on all of the revolving loan facility given.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar US\$ 173,6 juta dan US\$ 275 juta.

The outstanding balance as of 31 December 2022 and 2021 amounted US\$ 173.6 million and US\$ 275 million, respectively.

Pinjaman Non-Sindikasi

Non-Syndication Loans

PT Bank DBS Indonesia

PT Bank DBS Indonesia

Fasilitas Pinjaman *Revolving*

Revolving Loan Facility

Pada tanggal 29 Desember 2022, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 398/PFP-DBSI/XII/1-2/2022 (Perjanjian Fasilitas Pinjaman *Revolving*) yang bersifat tidak terikat (*uncommitted*) hingga jumlah pokok sebesar Rp 500.000 atau setaranya dalam mata uang Dolar Amerika Serikat untuk kebutuhan pendanaan umum grup termasuk namun tidak terbatas pada pelunasan hutang yang ada, yaitu: (i) Pinjaman Jangka Panjang; dan (ii) Surat Utang.

On 29 December 2022, the Company entered into an uncommitted *Revolving Credit Facility Agreement* No. 398/PFP-DBSI/XII/1-2/2022 ("*Revolving Credit Facility Agreement*") amounting to Rp 500,000 or the equivalent in United States Dollars for the general funding of the group including but not limited to repayment of existing debts: (i) Senior *Revolving Loan*; and (ii) Notes.

Tingkat suku bunga sebagaimana dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh DBSI dengan maksimum periode bunga 6 (enam) bulan dan wajib dibayarkan pada setiap akhir jangka waktu bunga yang bersangkutan yang akan diberitahukan oleh DBSI kepada Perusahaan sebelum Perusahaan menggunakan Fasilitas Pinjaman *Revolving*.

The interest rate as from time to time will be determined by the DBSI with a maximum interest period of 6 (six) months and shall be paid at the end of each relevant interest period which will be notified by the DBSI to the Company prior the Company utilizes the *Revolving Credit Facility*.

Ekshibit E/87

Exhibit E/87

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

21. PINJAMAN JANGKA PANJANG - PIHAK KETIGA (Lanjutan)

21. LONG-TERM LOANS - THIRD PARTIES (Continued)

Pinjaman Non-Sindikasi (Lanjutan)

Non-Syndication Loans (Continued)

PT Bank DBS Indonesia (Lanjutan)

PT Bank DBS Indonesia (Continued)

Fasilitas Pinjaman *Revolving* (Lanjutan)

Revolving Loan Facility (Continued)

Sesuai pembatasan-pembatasan yang mengatur tentang Fasilitas Pinjaman *Revolving* DBSI ini, Perusahaan memiliki keterbatasan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain, sebagai berikut:

*Under the covenants governing the DBSI Revolving Credit Facility, the Company is restricted from performing certain actions such as:*

- a. Menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aset Perusahaan termasuk hak atas pendapatan Perusahaan, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh dimasa yang akan datang, kecuali antara lain penjaminan atau pembebanan untuk menjamin pembayaran hutang serta penjaminan atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan sebagian atau seluruh porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang baik dalam satu transaksi maupun secara bertahap di masa yang akan datang yang dijamin dengan jenis aset yang sama.
- b. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali antara lain pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah ada sebelum ditandatanganinya perjanjian ini dan pinjaman atau penjaminan kepada atau untuk kepentingan anak perusahaan atau uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan sehari-hari.
- c. Mengubah jenis usaha Perusahaan.
- d. Memindahtangankan sebagian besar aset (major asset) dalam bentuk atau dengan nama apapun juga dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga.
- e. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan pembayaran utang.

- a. *Pledge and/or encumber in any way the Company's assets including rights to the Company's income, either existing or to be obtained in the future, except, among others, pledge or encumbrance to guarantee debt payments and pledge or encumbrance in connection with new loan facilities that replace part or all of the loan portion from existing creditors either in one transaction or in stages in the future which are secured by the same type of assets.*

- b. *Provide loans or corporate guarantees to third parties, except, among others, loans or corporate guarantees that have existed prior to the signing of this agreement and loans or guarantees to or for the benefit of subsidiaries or advances, loans or guarantees that are ordinary trade payables and are provided in connection with the Company's daily business activities.*

- c. *Change the Company's business activities.*
- d. *Transferring major assets in any form or by any name whatsoever and for any purpose whatsoever to a third party.*

- e. *Apply for bankruptcy or postponement of debt payments.*

Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 29 Desember 2023.

*This facility will mature in 29 December 2023.*

Tidak ada penarikan pada tahun 2022 sehingga saldo pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar nihil.

*There was no drawdown in 2022 hence the outstanding balance as of 31 December 2022 and 2021 amounted to nil, respectively.*

PT Bank UOB Indonesia

PT Bank UOB Indonesia

Fasilitas Pinjaman *Revolving*

Revolving Loan Facility

Pada tanggal 13 Juli 2022, PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, entitas anak, telah menandatangani perubahan perjanjian kredit fasilitas *revolving* sehingga fasilitas pinjaman menjadi:

*On 9 March 2021, PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, the subsidiary, has signed the change of agreement to the revolving facility agreement so that the loan facility becomes:*

- a. Menaikkan fasilitas pinjaman *revolving* seri I dari Rp 100.000 menjadi Rp 300.000;

- a. *Increased series I revolving loan facility from Rp 100,000 to Rp 300,000;*

Ekshibit E/88

Exhibit E/88

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

21. PINJAMAN JANGKA PANJANG - PIHAK KETIGA (Lanjutan)

21. LONG-TERM LOANS - THIRD PARTIES (Continued)

Pinjaman Non-Sindikasi (Lanjutan)

Non-Syndication Loans (Continued)

PT Bank UOB Indonesia (Lanjutan)

PT Bank UOB Indonesia (Continued)

Fasilitas Pinjaman *Revolving* (Lanjutan)

Revolving Loan Facility (Continued)

- b. Menghapus atau membatalkan fasilitas *revolving* seri II;

- b. Removing or canceling revolving loan facility II;

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan tetapi PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, entitas anak harus menyerahkan perjanjian pemegang saham yang ditandatangani oleh perusahaan dan pemegang saham lainnya.

The loan is unsecured but PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, the subsidiary had to submit shareholders agreement signed by the company and other shareholders.

Dalam fasilitas pinjaman ini, PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, entitas anak diharuskan memenuhi beberapa kondisi, diantaranya:

Under the credit facility agreement, PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, the subsidiary are required to adhere to the following conditions, among others, as follows:

- a) *Debt to EBITDA* rasio maksimal 3 kali.  
b) Rasio *top tier revenue* minimal 50%

- a) *Debt to EBITDA* ratio maximum 3 times.  
b) *Top tier revenue* ratio minimal 50%.

Fasilitas pinjaman ini terdiri dari 2 fasilitas yaitu:

There are 2 facilities under this credit facilities:

- a) Fasilitas *Revolving* Seri I sebesar Rp 300.000 (Rp 100.000 pada 31 Desember 2021).

- a) Facility I of Rp 300,000 Revolving Loan Facility (Rp 100,000 as of 31 December 2021).

Fasilitas ini bersifat *Uncommitted*, dan dikenakan marjin bunga sebesar 1,20% di atas JIBOR untuk rasio Utang/EBITDA kurang dari 3 dan 1,70% di atas JIBOR untuk rasio Utang/EBITDA lebih atau sama dengan 3.

The *Uncommitted* facility bears interest margin of 1.20% above JIBOR for a Debt/EBITDA ratio of less than 3 and 1.70% above JIBOR for a Debt/EBITDA ratio of more or equal to 3.

Pada 31 Desember 2022 dan 2021, saldo Fasilitas *Revolving* I masing-masing sebesar Rp 183.900 dan Rp 99.900.

As of 31 December 2022 and 2021, the balance of Revolving Loan Facility I are amounted to Rp 183,900 and Rp 99,900.

Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Maret 2023.

This facility will mature in March 2023.

- b) Fasilitas *Revolving* Seri II sebesar nihil (Rp 50.000 pada 31 Desember 2021).

- b) Facility II of nil Revolving Loan Facility (Rp 50.000 as of 31 December 2021).

Fasilitas ini bersifat *Committed*, dan dikenakan marjin bunga sebesar 2,50% di atas JIBOR untuk rasio Debt/EBITDA kurang dari 3 dan 3% di atas JIBOR untuk rasio Debt/EBITDA lebih dari 3 kali.

The *Committed* facility bears interest margin of 2.50% above JIBOR for Debt/EBITDA ratio less than 3 and 3% above JIBOR for Debt/EBITDA ratio more than 3 times.

Pada 31 Desember 2022 dan 2021, saldo Fasilitas Pinjaman *Revolving* II masing-masing sebesar nihil dan Rp 39.300.

As of 31 December 2022 and 2021, the balance of Revolving Loan Facility II are amounted to nil and Rp 39,300, respectively.

PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, entitas anak, telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh kreditor atas seluruh fasilitas pinjaman *revolving* yang diberikan.

PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, the subsidiary, has complied with all the requirements assigned by the creditors on all the revolving loan given.



Ekshibit E/89

Exhibit E/89

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

21. PINJAMAN JANGKA PANJANG - PIHAK KETIGA (Lanjutan)

Pinjaman Non-Sindikasi (Lanjutan)

PT Bank UOB Indonesia (Lanjutan)

Fasilitas Pinjaman *Revolving* (Lanjutan)

Pada tanggal 9 November 2020, PT Permata Karya Perdana, entitas anak, telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman ("Perjanjian Fasilitas Pinjaman *Revolving*"). Perjanjian ini telah mengalami 2 (dua) kali perubahan sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan II Terhadap Perjanjian Kredit tanggal 17 November 2022 yang bersifat *uncommitted*, sebesar Rp 100.000 untuk menyediakan tambahan dana modal kerja.

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan tetapi PT Permata Karya Perdana, entitas anak, harus menyerahkan perjanjian pemegang saham yang di tandatangi oleh perusahaan dan pemegang saham lainnya dan laporan keuangan Perusahaan.

Dalam fasilitas pinjaman ini, PT Permata Karya Perdana, entitas anak diharuskan memenuhi beberapa kondisi, diantaranya:

- a) *Debt to EBITDA* yang disesuaikan dan di analisis maksimum sebesar 3,75 kali.
- b) *Top tier revenue* minimum 50,00%.

Fasilitas ini bersifat *Uncommitted* dan dikenakan marjin bunga sebesar 2% per tahun diatas JIBOR.

Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2023.

Tidak ada penarikan pada tahun 2022 sehingga saldo pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar nihil.

PT Bank QNB Indonesia Tbk

Fasilitas Pinjaman *Term Loan*

Fasilitas pinjaman ini terdiri dari 2 fasilitas yaitu:

- a. Fasilitas *Term Loan* Seri I sebesar Rp 50.000.

Pada tanggal 22 Desember 2020, PT Gihon Telekomunikasi Indonesia, Tbk, entitas anak telah menandatangani perjanjian fasilitas *term loan* seri I sebesar Rp 50.000.

Fasilitas ini jatuh tempo pada Desember 2025. Fasilitas ini bersifat *Committed*, dan dikenakan marjin bunga sebesar 2,75% di atas JIBOR untuk rasio *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* minimal 2 kali dan *Debt/Equity* maksimal 2 kali.

Pada 31 Desember 2022 dan 2021, saldo Fasilitas *term loan* I masing-masing sebesar Rp 30.000 dan Rp 40.000. Pinjaman ini tidak memiliki jaminan.

21. LONG-TERM LOANS - THIRD PARTIES (Continued)

Non-Syndication Loans (Continued)

PT Bank UOB Indonesia (Continued)

*Revolving Loan Facility* (Continued)

On 9 November 2020, PT Permata Karya Perdana, the subsidiary, has entered into credit facility agreement ("The *Revolving Loan Facilities Agreement*") to provide additional funding for working capital. This agreement have been amended 2 (two) times, recently base on amendment II of the uncommitted revolving loan facilities agreement dated 17 November 2022, amounting to Rp 100,000.

This loan is unsecured but PT Permata Karya Perdana, the subsidiary had to submit shareholders agreement signed by the Company and other shareholders and financial statements of the Company.

Under the credit facility agreement, PT Permata Karya Perdana, the subsidiary are required to adhere to the following conditions, among others, as follows:

- a) *Debt to EBITDA* adjusted and annualized a maximum of 3.75 times.
- b) Minimum top tier revenue ratio of 50,00%.

The *Uncommitted* facility bears interest margin of 2% per annum above JIBOR.

This loan facility will mature in 30 April 2023.

There was no drawdown in 2022 hence the outstanding balance as of 31 December 2022 and 2021 amounted to nil, respectively.

PT Bank QNB Indonesia Tbk

*Term Loan Facility*

There are 2 facilities under this credit facilities:

- a. *Term Loan Facility I* of Rp 50,000 *Term Loan Facility*.

On 22 December 2020, PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, the subsidiary entered into facility I of Rp 50,000 term loan facility.

This term loan Facility will mature in December 2025. The *Committed* facility bears interest margin of 2.75% above JIBOR for *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* minimal 2 times and *Debt/Equity* maximal 2 times.

As of 31 December 2022 and 2021, the balance of *Term Loan Facility I* are amounted to Rp 30,000 and Rp 40,000. The loan is unsecured.

Ekshibit E/90

Exhibit E/90

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

21. PINJAMAN JANGKA PANJANG - PIHAK KETIGA (Lanjutan)

Pinjaman Non-Sindikasi (Lanjutan)

PT Bank QNB Indonesia Tbk (Lanjutan)

Fasilitas Pinjaman *Term Loan* (Lanjutan)

Fasilitas pinjaman ini terdiri dari 2 fasilitas yaitu:  
(Lanjutan)

b. Fasilitas *Term Loan* Seri II sebesar Rp 50.000.

Pada tanggal 13 Mei 2022, PT Gihon Telekomunikasi Indonesia, Tbk, entitas anak telah menandatangani perjanjian fasilitas *term loan* seri II sebesar Rp 50.000.

Fasilitas ini jatuh tempo pada Mei 2026. Fasilitas ini bersifat *Committed*, dan dikenakan margin bunga sebesar 1,20% di atas JIBOR untuk rasio *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* minimal 2 kali dan *Debt/Ekuitas* maksimal 2 kali. Pinjaman ini tidak memiliki jaminan.

Pada 31 Desember 2022 dan 2021, saldo Fasilitas *term loan* II masing-masing sebesar Rp 42.708 dan nihil.

PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, entitas anak telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh kreditor atas seluruh fasilitas pinjaman *term loan* yang diberikan.

Rincian fasilitas pinjaman jangka panjang - pihak ketiga yang belum dicairkan pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022			2021			
	Jumlah Fasilitas/ <u>Total facility</u>	Fasilitas yang telah dicairkan/ <u>Drawn facility</u>	Fasilitas yang belum dicairkan/ <u>Undrawn facility</u>	Jumlah Fasilitas/ <u>Total facility</u>	Fasilitas yang telah dicairkan/ <u>Drawn facility</u>	Fasilitas yang belum dicairkan/ <u>Undrawn facility</u>	
<b>Dolar AS - nilai penuh</b>							<b>US Dollar - full amount</b>
<b>Pinjaman sindikasi</b>							<b>Syndication loans</b>
Fasilitas US\$ 375 juta	375.000.000	95.000.000	280.000.000	375.000.000	113.000.000	262.000.000	US\$ 375 million facility
Fasilitas US\$ 275 juta	275.000.000	173.600.000	101.400.000	275.000.000	275.000.000	-	US\$ 275 million facility
<b>Jumlah</b>	<b>650.000.000</b>	<b>268.600.000</b>	<b>381.400.000</b>	<b>650.000.000</b>	<b>388.000.000</b>	<b>262.000.000</b>	<b>Total</b>
<b>Rupiah</b>							<b>Rupiah</b>
<b>Pinjaman non-sindikasi</b>							<b>Non-syndication loans</b>
<b>PT Bank UOB Indonesia</b>							<b>PT Bank UOB Indonesia</b>
<i>Uncommitted</i>	400.000	183.900	216.100	200.000	99.900	100.100	<i>Uncommitted</i>
<i>Committed</i>	-	-	-	50.000	39.300	10.700	<i>Committed</i>
<b>PT Bank QNB Indonesia Tbk</b>							<b>PT Bank QNB Indonesia Tbk</b>
<i>Committed</i>	100.000	100.000	-	50.000	50.000	-	<i>Committed</i>
<b>PT Bank DBS Indonesia</b>							<b>PT Bank DBS Indonesia</b>
<i>Uncommitted</i>	500.000	-	500.000	-	-	-	<i>Uncommitted</i>
<b>Jumlah</b>	<b>1.000.000</b>	<b>283.900</b>	<b>716.100</b>	<b>300.000</b>	<b>189.200</b>	<b>110.800</b>	<b>Total</b>

Jika bagian pinjaman dalam valuta asing yang telah dilindungi nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, maka saldo pinjaman jangka panjang pada 31 Desember 2022 dan 2021 setelah dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi adalah sebagai berikut:

21. LONG-TERM LOANS - THIRD PARTIES (Continued)

Non-Syndication Loans (Continued)

PT Bank QNB Indonesia Tbk (Continued)

Term Loan Facility (Continued)

There are 2 facilities under this credit facilities:  
(Continued)

b. Term Loan Facility II of Rp 50,000 Term Loan Facility.

On 13 May 2022, PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, the subsidiary entered into facility II of Rp 50,000 term loan facility.

This term loan facility will mature in May 2026. The Committed facility bears interest margin of 1.20% above JIBOR for Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimal 2 times and Debt/Equity maximal 2 times. The loan is unsecured.

As of 31 December 2022 and 2021, the balance of Term Loan Facility II are amounted to Rp 42,708 and nihil.

PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, the subsidiary has complied with all the requirements assigned by the creditors on all the term loan given.

Undrawn facility long term loans - third parties as of 31 December 2022 dan 2021 is as follows:

If the hedged portion of foreign currency loans are valued using their hedged rate, the outstanding balance of long-term loans as of 31 December 2022 and 2021 net of unamortized borrowing cost are as follows:

Ekshibit E/91

Exhibit E/91

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

21. PINJAMAN JANGKA PANJANG - PIHAK KETIGA (Lanjutan)

21. LONG-TERM LOANS - THIRD PARTIES (Continued)

	2022		2021		
	Saldo pinjaman / The balance of loans		Saldo pinjaman / The balance of loans		
	Kurs laporan posisi keuangan / Rate of consolidated statements of financial position date	Kurs lindung nilai / Hedging rate	Kurs laporan posisi keuangan / Rate of consolidated statements of financial position date	Kurs lindung nilai / Hedging rate	
Pinjaman sindikasi	4.225.347	4.148.059	5.536.372	5.206.744	Syndication loans
Pinjaman non-sindikasi	256.608	256.608	179.200	179.200	Non-syndication loans
<b>Dikurangi:</b>					<b>Less:</b>
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	( 115.121)	( 115.121)	( 111.530)	( 111.530)	Unamortized borrowing costs
<b>Jumlah - Bersih</b>	<b>4.366.834</b>	<b>4.289.546</b>	<b>5.604.042</b>	<b>5.274.414</b>	<b>Total - Net</b>

22. SURAT UTANG

22. NOTES

	2022	2021		
<b>Surat utang terdiri dari:</b>				<b>Notes consist of:</b>
<b>US Dolar</b>				<b>US Dollar</b>
a. 4,25% Senior Unsecured Note (saldo pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar US\$ 350 juta)	5.505.850	4.994.150	a.	4,25% Senior Unsecured Note (balance as of 31 December 2022 and 31 December 2021 amounted to US\$ 350 million, respectively)
b. 2,75% Senior Unsecured Note (saldo pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar US\$ 300 juta)	4.719.300	4.280.700	b.	2,75% Senior Unsecured Note (balance as of 31 December 2022 and 31 December 2021 amounted to US\$ 300 million, respectively)
c. 2,80% Senior Unsecured Note (saldo pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar US\$ 400 juta)	6.292.400	5.707.600	c.	2,80% Senior Unsecured Note (balance as of 31 December 2022 and 31 December 2021 amounted to US\$ 400 million, respectively)
<b>Jumlah US Dolar</b>	<b>16.517.550</b>	<b>14.982.450</b>		<b>Total US Dollar</b>
<b>Rupiah</b>				<b>Rupiah</b>
a. Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV	867.000	867.000	a.	Continuous Bonds III Phase IV
b. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I	469.000	469.000	b.	Continuous Bonds IV Phase I
c. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II	455.000	455.000	c.	Continuous Bonds IV Phase II
d. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III	1.017.000	2.915.000	d.	Continuous Bonds IV Phase III
e. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV	-	970.000	e.	Continuous Bonds IV Phase IV
f. Obligasi Berkelanjutan V Tahap I	-	1.200.000	f.	Continuous Bonds V Phase I
g. Obligasi Berkelanjutan V Tahap II	-	1.455.000	g.	Continuous Bonds V Phase II
h. Obligasi Berkelanjutan V Tahap III	2.200.000	-	h.	Continuous Bonds V Phase III
i. Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV	2.200.000	-	i.	Continuous Bonds V Phase IV
j. Obligasi Berkelanjutan V Tahap V	1.000.000	-	j.	Continuous Bonds V Phase V
<b>Jumlah Rupiah</b>	<b>8.208.000</b>	<b>8.331.000</b>		<b>Total Rupiah</b>
<b>Jumlah US Dolar dan Rupiah</b>	<b>24.725.550</b>	<b>23.313.450</b>		<b>Total US Dollar and Rupiah</b>
<b>Dikurangi:</b>				<b>Less:</b>
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	( 132.822)	( 171.148)		Unamortized borrowing cost
Saldo yang jatuh tempo dalam satu tahun	( 5.914.573)	( 5.465.457)		Balance due less than one year
Saldo yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	18.678.155	17.676.845		Balance due more than one year

Ekshibit E/92

Exhibit E/92

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

22. SURAT UTANG (Lanjutan)

a. 4,25% Senior Unsecured Note sebesar US\$ 350 juta

Pada tanggal 21 Januari 2020, Perusahaan, menerbitkan 4,25% Senior Unsecured Notes ("Surat Utang") dengan nilai agregat sebesar US\$ 350.000.000. Surat Utang ini dikenakan bunga sebesar 4,25% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 21 Januari dan 21 Juli setiap tahun, dimulai pada tanggal 21 Juli 2020. Surat Utang ini akan jatuh tempo pada tanggal 21 Januari 2025. Surat Utang ini tidak dapat dibeli kembali sebelum 3 (tiga) tahun.

Dana dari penerbitan Surat Utang tersebut digunakan untuk membiayai kembali seluruh saldo pinjaman Perjanjian Fasilitas Pinjaman Revolving seri B dan sebagian Pinjaman Revolving US\$ 200 juta.

Sesuai pembatasan-pembatasan yang mengatur tentang Surat Utang, Perusahaan dan entitas anak yang dibatasi, memiliki keterbatasan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain, sebagai berikut:

1. Menambah pinjaman baru dan menerbitkan saham preferen, kecuali:  
Rasio Utang/Arus Kas Teranualisasi tidak lebih dari 6,25 kali.
2. Melakukan pembayaran yang dibatasi, seperti:
  - a) menyatakan atau membayar dividen atau melakukan suatu pembayaran atau pembagian untuk kepentingan penerbit atau setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas Entitas Anak Yang Dibatasi atau kepada para pemilik langsung atau tidak langsung dari penerbit atau setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas dari Entitas Anak Yang Dibatasi;
  - b) membeli, menebus atau dengan cara lain mendapatkan atau membebaskan untuk nilai setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas dari penerbit atau setiap induk langsung atau tidak langsung dari penerbit;

22. NOTES (Continued)

a. 4.25% Senior Unsecured Notes amounted to US\$ 350 million

On 21 January 2020, the Company, issued 4.25% Senior Unsecured Notes ("Notes") with an aggregate value of US\$ 350,000,000. These notes bear interest at 4.25% per annum and pay interest on 21 January and 21 July each year, commencing on 21 July 2020. The Notes will mature on 21 January 2025. These Notes have 3 (three) years non call provision.

The proceeds from the issuance of the Notes were used to refinance all outstanding loan of Facility B of the Revolving Loan Facility and part of outstanding loan facility US\$ 200 million of Revolving loan facility.

Under the covenants governing the Notes, the Company and its restricted subsidiaries are restricted from performing certain actions such as:

1. Incurrence of indebtedness and issuance of preferred stock, unless:  
Debt to Annualized Cash Flow Ratio would have been no greater than 6.25 times.
2. Making restricted payments, such as:
  - a) declare and pay dividend or make any other payment or distribution on account of issuer or any of its Restricted Subsidiaries Equity Interests or to the direct or indirect holders of issuer or any of its Restricted Subsidiaries Equity Interests;
  - b) purchase, redeem or otherwise acquire or retire for value any Equity Interest of issuer or any direct or indirect parent of issuer;

Ekshibit E/93

Exhibit E/93

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

22. SURAT UTANG (Lanjutan)

a. 4,25% Senior Unsecured Note sebesar US\$ 350 juta  
(Lanjutan)

2. Melakukan pembayaran yang dibatasi, seperti: (Lanjutan)

- c) melakukan pembayaran atas atau sehubungan dengan, melakukan penebusan dengan tidak dapat dicabut kembali, atau membeli, menebus, melakukan penjaminan efek atau dengan cara lain mendapatkan atau membebaskan untuk nilai dari setiap utang dari penerbit atau setiap anak perusahaan yang secara kontraktual disubordinasikan kepada anak perusahaan atau setiap Jaminan Surat Utang (tidak termasuk pinjaman antar Perusahaan dan utang antar Perusahaan), kecuali suatu pembayaran bunga atau pokok pada tanggal jatuh tempo; dan
- d) membuat setiap investasi yang dibatasi.

Perusahaan dapat melakukan Pembayaran Yang Dibatasi tersebut di atas, jika:

1. Tidak ada wanprestasi atau peristiwa wanprestasi telah terjadi dan berlanjut atau akan terjadi; dan
2. Rasio Arus Kas Terannualisasi tidak lebih dari 6,25 kali.

Transaksi ini telah memenuhi peraturan No. IX.E.2 tentang transaksi material, dan Perusahaan telah melaporkan penerbitan Surat Utang tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 23 Januari 2020. Surat Utang ini didaftarkan pada Bursa Efek Singapura.

b. 2,75% Senior Unsecured Note sebesar US\$ 300 juta

Pada tanggal 20 Januari 2021, Perusahaan menerbitkan 2,75% Senior Unsecured Notes ("Surat Utang") dengan nilai agregat sebesar US\$ 300.000.000. Surat Utang ini dikenakan bunga sebesar 2,75% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 20 Januari dan 20 Juli setiap tahun, dimulai pada tanggal 20 Juli 2021. Surat Utang ini akan jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2026.

22. NOTES (Continued)

a. 4.25% Senior Unsecured Notes amounted to US\$ 350 million (Continued)

2. Making restricted payments, such as: (Continued)

- c) make any payment on or with respect to, irrevocably call for redemption, or purchase, redeem, defease or otherwise acquire or retire for value any indebtedness of the Issuer or any subsidiaries that is contractually subordinated to the Notes or to any subsidiaries (excluding intercompany loans and Indebtedness), except for payment of interest and principal at maturity; and

d) make any restricted investment.

The company can make Restricted Payments described above, if:

1. No default or event of default has occurred and is continuing or would occur; and
2. Debt to Annualized Cash Flow Ratio would have been no greater than 6.25 times.

This transaction has fulfilled the regulation No. IX.E.2 regarding material transactions, and the Company has reported the issuance of the Notes to the Indonesia Financial Service Authority (OJK) on 23 January 2020. The Notes are listed on the Singapore Stock Exchange.

b. 2.75% Senior Unsecured Notes amounted to US\$ 300 million

On 20 January 2021, the Company issued 2.75% Senior Unsecured Notes ("Notes") with an aggregate value of US\$ 300,000,000. These notes bear interest at 2.75% per annum and pay interest on 20 January and 20 July each year, commencing on 20 July 2021. The Notes will mature on 20 January 2026.

Ekshibit E/94

Exhibit E/94

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

22. SURAT UTANG (Lanjutan)

b. 2,75% Senior Unsecured Note sebesar US\$ 300 juta  
(Lanjutan)

Dana dari penerbitan surat utang ini digunakan untuk membiayai kembali sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B sebesar US\$ 100 juta dalam US\$ 1.000.000.000 *Facility Agreement*, sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam US\$ 200 juta *Facility Agreement* dan sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam US\$ 375 juta *Facility Agreement*.

Transaksi ini telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, dan Perusahaan telah melaporkan penerbitan Surat Utang tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 22 Januari 2021. Surat Utang ini didaftarkan pada Bursa Efek Singapura.

c. 2,80% Senior Unsecured Note sebesar US\$ 400 juta

Pada tanggal 2 November 2021, Perusahaan menerbitkan 2,80% *Senior Unsecured Notes* ("Surat Utang") dengan nilai agregat sebesar US\$ 400.000.000. Surat Utang ini dikenakan bunga sebesar 2,80% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 2 Mei dan 2 November setiap tahun, dimulai pada tanggal 2 Mei 2022. Surat Utang ini akan jatuh tempo pada tanggal 2 Mei 2027.

Dana dari penerbitan surat utang ini digunakan untuk membiayai kembali sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam US\$ 1.000.000.000 *Facility Agreement*, sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam US\$ 200.000.000 *Revolving loan facility* dan sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam US\$ 375.000.000 *Revolving loan facility*.

Transaksi ini telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, dan Perusahaan telah melaporkan penerbitan Surat Utang tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 12 November 2021. Surat Utang ini didaftarkan pada Bursa Efek Singapura.

22. NOTES (Continued)

b. 2.75% Senior Unsecured Notes amounted to US\$ 300 million (Continued)

The proceeds from the issuance of the Notes were used to refinance part of outstanding revolving B of US\$ 100 million under US\$ 1,000,000,000 Credit Facilities, part of outstanding revolving loan facility under US\$ 200 million Revolving Loan Facility, and part of outstanding Revolving Loan Facility under US\$ 375 million Revolving Loan Facility.

This transaction has fulfilled the Financial Service Authority (OJK) Regulation No. 17/POJK.04/2020 regarding Material Transactions and Change of Business Activities, and the Company has reported the issuance of the Notes to OJK on 22 January 2021. The Notes are listed on the Singapore Stock Exchange.

c. 2.80% Senior Unsecured Notes amounted to US\$ 400 million

On 2 November 2021, the Company issued 2.80% *Senior Unsecured Notes* ("Notes") with an aggregate value of US\$ 400,000,000. These notes bear interest at 2.80% per annum and pay interest on 2 May and 2 November each year, commencing on 2 May 2022. The Notes will mature on 2 May 2027.

The proceeds from the issuance of the Notes were used to refinance part of outstanding revolving B under US\$ 1,000,000,000 Credit Facilities, part of outstanding revolving loan facility under US\$ 200,000,000 Revolving loan Facility, and part of outstanding Revolving Loan Facility under US\$ 375,000,000 Revolving Loan Facility.

This transaction has fulfilled the Financial Service Authority (OJK) Regulation No. 17/POJK.04/2020 regarding Material Transactions and Change of Business Activities, and the Company has reported the issuance of the Notes to OJK on 12 November 2021. The Notes are listed on the Singapore Stock Exchange.

Ekshibit E/95

Exhibit E/95

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

22. SURAT UTANG (Lanjutan)

22. NOTES (Continued)

Jika bagian utang yang telah dilindung nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, maka saldo surat utang jangka panjang pada 31 Desember 2022 dan 2021 setelah dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi adalah sebagai berikut:

If the hedged portion of the long-term notes are valued using their hedge rate, the outstanding balance of the long-term notes as of 31 December 2022 and 2021 net of unamortized borrowing costs are as follow:

	2022		2021		
	Saldo pinjaman / The balance of loans		Saldo pinjaman / The balance of loans		
	Kurs		Kurs		
	laporan posisi keuangan / Rate of consolidated statements of financial position date		laporan posisi keuangan / Rate of consolidated statements of financial position date		
		Kurs lindung nilai / Hedging rate		Kurs lindung nilai / Hedging rate	
Surat utang	24.725.550	23.251.298	23.313.450	22.563.227	Notes
<b>Dikurangi:</b>					<b>Less:</b>
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	( 132.822)	( 132.822)	( 171.148)	( 171.148)	Unamortized borrowing costs
<b>Jumlah - Bersih</b>	<b>24.592.728</b>	<b>23.118.476</b>	<b>23.142.302</b>	<b>22.392.079</b>	<b>Total - Net</b>

a. Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV

a. Continuous Bonds III Phase IV

Pada tanggal 24 Maret 2020, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Tahap IV Tahun 2020 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV"). Nominal Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV ini adalah sebesar Rp 1.500.000. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26 Maret 2020.

On 24 March 2020, the Company issued Continuous Bonds III phase IV Year 2020 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds III Phase IV"). The Continuous Bonds III Phase IV has a total principal of Rp 1,500,000. These bonds are listed on the Indonesia stock exchange on 26 March 2020.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan entitas anak.

The net proceeds obtained from the issuance of Continuous Bonds III Phase IV have been used entirely for the payment of financial liabilities of subsidiaries.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

These Continuous Bonds III Phase IV were issued in series consisting of:

- Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp 633.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
- Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp 867.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

- Series A Bonds with nominal value of Rp 633,000 at a fixed interest rate of 6.25% per year. The term of the Series A Bonds is 370 (three hundred and seventy) Calendar Days.
- Series B Bonds with nominal value of Rp 867,000 at a fixed interest rate of 7.75% per year. The term of the Series B Bonds is 3 (three) years.

Ekshibit E/96

Exhibit E/96

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

22. SURAT UTANG (Lanjutan)

22. NOTES (Continued)

a. Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV (Lanjutan)

a. Continuous Bonds III Phase IV (Continued)

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 24 Juni 2020, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 4 April 2021 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 24 Maret 2023 untuk Obligasi Seri B.

*Interest for Continuous Bonds III Phase IV will be paid on a quarterly basis on the interest payment date. The first payment of interest is on 24 June 2020. The date of the last interest payment, which is also the due date of the Continuous Bond III Phase IV, is on 4 April 2021 for Series A and 24 March 2023 for Series B.*

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2020 No. 9 tanggal 5 Maret 2020, yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2020 No. 71 tanggal 12 Juli 2022, yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Pada tanggal 12 Juli 2022, Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") telah menyetujui dan memutuskan penggantian wali amanat bagi Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV dari semula PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

*The issuance of Continuous Bonds III Phase IV was covered in the Deed of Trusteeship Agreement of Continuous Bonds III Tower Bersama Infrastructure Phase IV Year 2020 No. 9 dated 5 March 2020, of a Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, amended by Addendum and Restatement I Deed of Trustee Agreement for Continuous Bonds III Tower Bersama Infrastructure Phase IV Year 2020 No. 71 dated 12 July 2022, drawn up in the presence of Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., as a substitute for Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta. On July 12, 2022, the Bondholders Meeting approved the change of trustee for the Continuous Bond III Phase IV from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk to PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.*

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV ini, maka Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada entitas anak Perusahaan, di luar kegiatan usaha Perusahaan dan entitas anak.

*Under the covenants governing the Continuous Bonds III Phase IV, the Company, without the written consent of the Trustee, shall not, among others: merge or acquire, change the scope of main activities, reduce the authorized and paid up capital, sale, transfer or dispose all or part of asset by the Company's subsidiaries, sale, transfer, or giving options, warrants, and grant loans to third parties, except to the Company's subsidiaries, outside the Company's and Subsidiaries business activities.*

Perusahaan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara jumlah pinjaman konsolidasian proforma dengan EBITDA proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25 kali.

*In addition, the Company is required to maintain the comparative of total proforma consolidation loans with proforma EBITDA from last quarter multiplied by 4 (four) of no more than 6.25 times.*

Pada 31 Desember 2022, Perusahaan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliananatan tersebut.

*As of 31 December 2022, the Company has complied with the restrictions set out in these trusteeship agreements.*



Ekshibit E/97

Exhibit E/97

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

22. SURAT UTANG (Lanjutan)

a. Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV (Lanjutan)

Pada 7 November 2022, Fitch Indonesia, lembaga pemeringkat efek independen, telah memberikan peringkat "AA+" (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV ini.

Obligasi berkelanjutan III Tahap IV seri A ini telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 4 April 2021.

b. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I

Pada tanggal 8 September 2020, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2020 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I"). Nominal Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I ini adalah sebesar Rp 700.000. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 September 2020.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I telah digunakan seluruhnya untuk melunasi sebagian utang pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

1. Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp 231.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,30% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
2. Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp 469.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Desember 2020, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 18 September 2021 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 8 September 2023 untuk Obligasi seri B.

22. NOTES (Continued)

a. Continuous Bonds III Phase IV (Continued)

On 7 November 2022, Fitch Indonesia, an independent credit rating agency, rated the Continuous Bonds III Phase IV "AA+" (*Double A Plus*).

This Continuous Bonds III Phase IV series A has been fully paid on 4 April 2021.

b. Continuous Bonds IV Phase I

On 8 September 2020, the Company issued Continuous Bonds IV phase I Year 2020 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds IV Phase I"). The Continuous Bonds IV Phase I has a total principal of Rp 700,000. These bonds are listed on the Indonesia stock exchange on 9 September 2020.

The net proceeds from the issuance of the Continuous Bonds IV Phase I were used entirely for payments of the Continuous Bonds II Phase III.

These Continuous Bonds IV Phase I were issued in 2 (two) series consisting of:

1. Series A Bonds with nominal value of Rp 231,000 at a fixed interest rate of 6.30% per year. The term of the Series A Bonds is 370 (three hundred and seventy) Calendar Days.
2. Series B Bonds with nominal value of Rp 469,000 at a fixed interest rate of 8.00% per year. The term of the Series B Bonds is 3 (three) years.

Interest for Continuous Bonds IV Phase I will be paid on a quarterly basis on the interest payment date. The first payment of interest is on 8 December 2020. The date of the last interest payment, which is also the due date of Continuous Bond IV phase I, is on 18 September 2021 for series A and 8 September 2023 for series B.

Ekshibit E/98

Exhibit E/98

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

22. SURAT UTANG (Lanjutan)

22. NOTES (Continued)

b. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I (Lanjutan)

b. Continuous Bonds IV Phase I (Continued)

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2020 No. 15 tanggal 5 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2020 No. 129 tanggal 27 Agustus 2020, yang keduanya dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2020 No. 73 tanggal 12 Juli 2022, yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Pada tanggal 12 Juli 2022, RUPO telah menyetujui dan memutuskan penggantian wali amanat bagi Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I dari semula PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

The issuance of Continuous Bonds IV Phase I was covered in the Deed of Trusteeship Agreement of Continuous Bonds IV Tower Bersama Infrastructure Phase I Year 2020 No. 15 dated 5 June 2020 amended by Addendum and Restatement I Deed of Trustee Agreement for Continuous Bonds IV Tower Bersama Infrastructure Phase I Year 2020 No. 129 dated 27 August 2020, of a Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., amended by Deed Addendum and Restatement II Deed of Trustee Agreement for Continuous Bonds IV Tower Bersama Infrastructure Phase I Year 2020 No. 73 dated 12 July 2022, drawn up in the presence of Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., as a substitute for Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta. On 12 July 2022, the Bondholders Meeting approved and decided to replace the trustee for the Continuous Bond IV Phase I from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk to PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I ini, maka Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada entitas anak Perusahaan, di luar kegiatan usaha Perusahaan dan entitas anak.

Under the covenants governing the Continuous Bonds IV Phase I, the Company, without the written consent of the Trustee, shall not, among others: merge or acquire, change the scope of main activities, reduce the authorized and paid up capital, sale, transfer or dispose all or part of asset by the Company's subsidiaries, sale, transfer, or giving options, warrants, and grant loans to third parties, except to the Company's subsidiaries, outside the Company's and Subsidiaries business activities.

Perusahaan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara jumlah pinjaman konsolidasian proforma dengan EBITDA proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25 kali.

In addition, the Company is required to maintain the comparative of total proforma consolidation loans with proforma EBITDA from last quarter multiplied by 4 (four) of no more than 6.25 times.

Pada 31 Desember 2022, Perusahaan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

As of 31 December 2022, the Company has complied with the restrictions set out in these trusteeship agreements.

Pada 7 November 2022, Fitch Indonesia, lembaga pemeringkat efek independen, telah memberikan peringkat "AA+" (Double A Plus) untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I ini.

On 7 November 2022, Fitch Indonesia, an independent credit rating agency, rated the Continuous Bonds IV Phase I "AA+" (Double A Plus).

Obligasi berkelanjutan IV Tahap I seri A ini telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 18 September 2021.

This Continuous Bonds IV Phase I series A has been fully paid on 18 September 2021.

Ekshibit E/99

Exhibit E/99

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

22. SURAT UTANG (Lanjutan)

22. NOTES (Continued)

c. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II

Pada tanggal 2 Desember 2020, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2020 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II"). Nominal Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II ini adalah sebesar Rp 750.000. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 Desember 2020.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan entitas anak.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

1. Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp 295.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
2. Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp 455.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 2 Maret 2021, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 12 Desember 2021 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 2 Desember 2023 untuk Obligasi seri B.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2020 No. 76 tanggal 13 November 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2020 No. 115 tanggal 24 November 2020, keduanya dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2020 No. 75 tanggal 12 Juli 2022, yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Pada tanggal 12 Juli 2022, RUPO telah menyetujui dan memutuskan penggantian wali amanat bagi Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II dari semula PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

c. Continuous Bonds IV Phase II

On 2 December 2020, the Company issued Continuous Bonds IV phase II Year 2020 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds IV Phase II"). The Continuous Bonds IV Phase II has a total principal of Rp 750,000. These bonds are listed on the Indonesia stock exchange on 3 December 2020.

The net proceeds from the issuance of the Continuous Bonds IV Phase II were used entirely for payments of financial liabilities of subsidiaries.

These Continuous Bonds IV Phase II were issued in 2 (two) series consisting of:

1. Series A Bonds with nominal value of Rp 295,000 at a fixed interest rate of 5.75% per year. The term of the Series A Bonds is 370 (three hundred and seventy) Calendar Days.
2. Series B Bonds with nominal value of Rp 455,000 at a fixed interest rate of 7.25% per year. The term of the Series B Bonds is 3 (three) years.

Interest for Continuous Bonds IV Phase II will be paid on a quarterly basis on the interest payment date. The first payment of interest is on 2 March 2021. The date of the last interest payment, which is also the due date of Continuous Bond IV phase II, is on 12 December 2021 for series A and 2 December 2023 for series B.

The issuance of Continuous Bonds IV Phase II was covered in the Deed of Trusteeship Agreement of Continuous Bonds IV Tower Bersama Infrastructure Phase II Year 2020 No. 76 dated 13 November 2020 amended by Addendum and Restatement I Deed of Trustee Agreement for Continuous Bonds IV Tower Bersama Infrastructure Phase II Year 2020 No. 115 dated 24 November 2020, of a Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., amended by Deed Addendum and Restatement II Deed of Trustee Agreement for Continuous Bonds IV Tower Bersama Infrastructure Phase II Year 2020 No. 75 dated 12 July 2022, drawn up in the presence of Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., as a substitute for Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta. On 12 July 2022, the Bondholders Meeting approved and decided to replace the trustee for the Continuous Bond IV Phase II from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk to PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Ekshibit E/100

Exhibit E/100

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

22. SURAT UTANG (Lanjutan)

22. NOTES (Continued)

c. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II (Lanjutan)

c. Continuous Bonds IV Phase II (Continued)

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II ini, maka Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada entitas anak Perusahaan, di luar kegiatan usaha Perusahaan dan entitas anak.

*Under the covenants governing the Continuous Bonds IV Phase II, the Company, without the written consent of the Trustee, shall not, among others: merge or acquire, change the scope of main activities, reduce the authorized and paid up capital, sale, transfer or dispose all or part of asset by the Company's subsidiaries, sale, transfer, or giving options, warrants, and grant loans to third parties, except to the Company's subsidiaries, outside the Company's and subsidiaries business activities.*

Perusahaan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara jumlah pinjaman konsolidasian proforma dengan EBITDA proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25 kali.

*In addition, the Company is required to maintain the comparative of total proforma consolidation loans with proforma EBITDA from last quarter multiplied by 4 (four) of no more than 6.25 times.*

Pada 31 Desember 2022, Perusahaan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwalianan tersebut.

*As of 31 December 2022, the Company has complied with the restrictions set out in these trusteeship agreements.*

Pada 7 November 2022, Fitch Indonesia, lembaga pemeringkat efek independen, telah memberikan peringkat "AA+" (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II ini.

*On 7 November 2022, Fitch Indonesia, an independent credit rating agency, rated the Continuous Bonds IV Phase II "AA+" (Double A Plus).*

Obligasi berkelanjutan IV Tahap II seri A ini telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 12 Desember 2021.

*This Continuous Bonds IV Phase II series A has been fully paid on 12 December 2021.*

d. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III

d. Continuous Bonds IV Phase III

Pada tanggal 17 Februari 2021, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III"). Nominal Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III ini adalah sebesar Rp 2.915.000. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Februari 2021.

*On 17 February 2021, The Company issued Continuous Bonds IV Tower Bersama Infrastructure phase III Year 2021 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds IV Phase III"). The Continuous Bonds IV Phase III has a total principal of Rp 2,915,000. These bonds are listed on the Indonesia stock exchange on 18 February 2021.*

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan entitas anak.

*The net proceeds obtained from the issuance of Continuous Bonds IV Phase III were used entirely for the payment of financial liabilities of subsidiaries.*

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

*These Continuous Bonds IV Phase III were issued in 2 (two) series consisting of:*

1. Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp 1.898.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.

1. *Series A Bonds with nominal value of Rp 1,898,000 at a fixed interest rate of 5.50% per year. The term of the Series A Bonds is 370 (three hundred and seventy) Calendar Days.*

Ekshibit E/101

Exhibit E/101

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

22. SURAT UTANG (Lanjutan)

22. NOTES (Continued)

d. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III (Lanjutan)

d. Continuous Bonds IV Phase III (Continued)

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri sebagai berikut: (Lanjutan)

*These Continuous Bonds IV Phase III were issued in 2 (two) series consisting of: (Continued)*

- Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp 1.017.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

- Series B Bonds with nominal value of Rp 1,017,000 at a fixed interest rate of 6.75% per year. The term of the Series B Bonds is 3 (three) years.*

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 17 Mei 2021, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 27 Februari 2022 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 17 Februari 2024 untuk Obligasi seri B.

*Interest for Continuous Bonds IV Phase III will be paid on a quarterly basis on the interest payment date. The first payment of interest is on 17 May 2021. The date of the last interest payment, which is also the due date of Continuous Bond IV phase III, is on 27 February 2022 for series A and 17 February 2024 for series B.*

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021 No. 114 tanggal 28 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021 No. 77 tanggal 12 Juli 2022, yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Pada tanggal 12 Juli 2022, RUPO telah menyetujui dan memutuskan penggantian wali amanat bagi Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III dari semula PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

*The issuance of Continuous Bonds IV Phase III was covered in the Deed of Trusteeship Agreement of Continuous Bonds IV Tower Bersama Infrastructure Phase III Year 2021 No. 114 dated 28 January 2021, of a Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, amended by Deed Addendum and Restatement I Deed of Trustee Agreement for Continuous Bonds IV Tower Bersama Infrastructure Phase III Year 2021 No. 77 dated 12 July 2022, drawn up in the presence of Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., as a substitute for Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta. On 12 July 2022, the the Bondholders Meeting approved and decided to replace the trustee for the Continuous Bond IV Phase III from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk to PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.*

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III ini, maka Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada entitas anak Perusahaan, di luar kegiatan usaha Perusahaan dan entitas anak.

*Under the covenants governing the Continuous Bonds IV Phase III, the Company, without the written consent of the Trustee, shall not, among others: merge or acquire, change the scope of main activities, reduce the authorized and paid up capital, sale, transfer or dispose all or part of asset by the Company's subsidiaries, sale, transfer, or giving options, warrants, and grant loans to third parties, except to the Company's subsidiaries, outside the Company's and Subsidiaries business activities.*

Perusahaan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara jumlah pinjaman konsolidasian proforma dengan EBITDA proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25 kali.

*In addition, the Company is required to maintain the comparative of total proforma consolidation loans with proforma EBITDA from last quarter multiplied by 4 (four) of no more than 6.25 times.*

Ekshibit E/102

Exhibit E/102

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

22. SURAT UTANG (Lanjutan)

d. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III (Lanjutan)

Pada 31 Desember 2022, Perusahaan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Pada 7 November 2022, Fitch Indonesia, lembaga pemeringkat efek independen, telah memberikan peringkat "AA+" (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III ini.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Seri A ini telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 27 Februari 2022.

e. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV

Pada tanggal 9 April 2021, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2021 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV") sebesar 5,50% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV ini adalah sebesar Rp 970.000. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 April 2021.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan entitas anak.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 9 Juli 2021, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 19 April 2022.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2021 No. 102 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H. M.Kn. Bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Wali Amanat").

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV ini, maka Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada entitas anak Perusahaan, di luar kegiatan usaha Perusahaan dan entitas anak.

22. NOTES (Continued)

d. Continuous Bonds IV Phase III (Continued)

As of 31 December 2022, the Company has complied with the restrictions set out in these trusteeship agreements.

On 7 November 2022, Fitch Indonesia, an independent credit rating agency, rated the Continuous Bonds IV Phase III "AA+" (*Double A Plus*).

The Continuous Bonds IV Phase III Series A has been fully paid on 27 February 2022.

e. Continuous Bonds IV Phase IV

On 9 April 2021, The Company issued Continuous Bonds IV Tower Bersama infrastructure Phase IV Year 2021 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds IV Phase IV") of 5.50% per annum. The Continuous Bonds IV Phase IV has a total principal of Rp 970,000. These bonds are listed on the Indonesia stock exchange on 12 April 2021.

The net proceeds obtained from the issuance of Continuous Bonds IV Phase IV were used entirely for the payment of financial liabilities of subsidiaries.

Interest for Continuous Bonds IV Phase IV will be paid on a quarterly basis on the interest payment date. The first payment of interest is on 9 July 2021. The date of the last interest payment, which is also the due date of Continuous Bond IV phase IV, is on 19 April 2022.

The issuance of Continuous Bonds IV Phase IV was covered in the Deed of Trusteeship Agreement of Continuous Bonds IV Tower Bersama Infrastructure Phase IV Year 2021 No. 102 dated 22 March 2021, of a Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. The bond trustee is PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (the "Trustee").

Under the covenants governing the Continuous Bonds IV Phase IV, the Company, without the written consent of the Trustee, shall not, among others: merge or acquire, change the scope of main activities, reduce the authorized and paid up capital, sale, transfer or dispose all or part of asset by the Company's subsidiaries, sale, transfer, or giving options, warrants, and grant loans to third parties, except to the Company's subsidiaries, outside the Company's and Subsidiaries business activities.

Ekshibit E/103

Exhibit E/103

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

22. SURAT UTANG (Lanjutan)

e. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV (Lanjutan)

Perusahaan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara jumlah pinjaman konsolidasian proforma dengan EBITDA proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25 kali.

Pada 12 November 2021, Fitch Indonesia, Lembaga pemeringkat efek independen, telah memberikan peringkat "AA+" (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV ini.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV ini telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 19 April 2022.

f. Obligasi Berkelanjutan V Tahap I

Pada tanggal 19 Agustus 2021, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2021 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan V Tahap I") sebesar 4,25% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan V Tahap I ini adalah sebesar Rp 1.200.000. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2021.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan entitas anak.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 19 November 2021, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 29 Agustus 2022.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2021 No. 136 tanggal 27 Mei 2021 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2021 No. 12 tanggal 3 Agustus 2021, yang keduanya dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2021 No. 88 tanggal 13 Juli 2022, yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Pada tanggal 13 Juli 2022, RUPO telah menyetujui dan memutuskan penggantian wali amanat bagi Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dari semula PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

22. NOTES (Continued)

e. Continuous Bonds IV Phase IV (Continued)

In addition, the Company is required to maintain the comparative of total proforma consolidation loans with proforma EBITDA from last quarter multiplied by 4 (four) of no more than 6.25 times.

On 12 November 2021, Fitch Indonesia, an independent credit rating agency, rated the Continuous Bonds IV Phase IV "AA+" (*Double A Plus*).

The Continuous Bonds IV Phase IV has been fully paid on 19 April 2022.

f. Continuous Bonds V Phase I

On 19 August 2021, The Company issued Continuous Bonds V Tower Bersama infrastructure Phase I Year 2021 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds V Phase I") of 4.25% per annum. The Continuous Bonds V Phase I has a total principal of Rp 1,200,000. These bonds are listed on the Indonesia stock exchange on 20 August 2021.

The net proceeds obtained from the issuance of Continuous Bonds V Phase I were used entirely for the payment of financial liabilities of subsidiaries.

Interest for Continuous Bonds V Phase I will be paid on a quarterly basis on the interest payment date. The first payment of interest is on 19 November 2021. The date of the last interest payment, which is also the due date of Continuous Bond V phase I, is on 29 August 2022.

The issuance of Continuous Bonds V Phase I was covered in the Deed of Trusteeship Agreement of Continuous Bonds V Tower Bersama Infrastructure Phase I Year 2021 No. 136 dated 27 May 2021 amended by Addendum and Restatement I Deed of Trustee Agreement for Continuous Bonds V Tower Bersama Infrastructure Phase I Year 2021 No. 12 dated 3 August 2021, of a Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., amended by Deed Addendum and Restatement II Deed of Trustee Agreement for Continuous Bonds V Tower Bersama Infrastructure Phase I Year 2020 No. 88 dated 13 July 2022, drawn up in the presence of Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., as a substitute for Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta. On 13 July 2022, the Bondholders Meeting approved and decided to replace the trustee for the Continuous Bond V Phase I from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk to PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Ekshibit E/104

Exhibit E/104

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

22. SURAT UTANG (Lanjutan)

22. NOTES (Continued)

f. Obligasi Berkelanjutan V Tahap I (Lanjutan)

f. Continuous Bonds V Phase I (Continued)

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I ini, maka Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada entitas anak Perusahaan, di luar kegiatan usaha Perusahaan dan entitas anak.

*Under the covenants governing the Continuous Bonds V Phase I, the Company, without the written consent of the Trustee, shall not, among others: merge or acquire, change the scope of main activities, reduce the authorized and paid up capital, sale, transfer or dispose all or part of asset by the Company's subsidiaries, sale, transfer, or giving options, warrants, and grant loans to third parties, except to the Company's subsidiaries, outside the Company's and subsidiaries business activities.*

Pada 31 Desember 2022, Perusahaan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

*As of 31 December 2022, the Company has complied with the restrictions set out in these trusteeship agreements.*

Pada 12 November 2021, Fitch Indonesia, Lembaga pemeringkat efek independen, telah memberikan peringkat "AA+" (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan V Tahap I ini.

*On 12 November 2021, Fitch Indonesia, an independent credit rating agency, rated the Continuous Bonds V Phase I "AA+" (Double A Plus).*

Obligasi Berkelanjutan V Tahap I ini telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 29 Agustus 2022.

*The Continuous Bonds V Phase I has been fully paid on 29 August 2022.*

g. Obligasi Berkelanjutan V Tahap II

g. Continuous Bonds V Phase II

Pada tanggal 10 Desember 2021, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2021 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan V Tahap II") sebesar 3,60% pertahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan V Tahap II ini adalah sebesar Rp 1.455.000. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Desember 2021.

*On 10 December 2021, The Company issued Continuous Bonds V Tower Bersama infrastructure Phase II Year 2021 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds V Phase II") of 3.60% per annum. The Continuous Bonds V Phase II has a total principal of Rp 1,455,000. These bonds are listed on the Indonesia stock exchange on 13 December 2021.*

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan entitas anak.

*The net proceeds obtained from the issuance of Continuous Bonds V Phase II were used entirely for the payment of financial liabilities of subsidiaries.*

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 10 Maret 2022, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 20 Desember 2022.

*Interest for Continuous Bonds V Phase II will be paid on a quarterly basis on the interest payment date. The first payment of interest is on 10 March 2022. The date of the last interest payment, which is also the due date of Continuous Bond V phase II, is on 20 December 2022.*



Ekshibit E/105

Exhibit E/105

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

22. SURAT UTANG (Lanjutan)

22. NOTES (Continued)

g. Obligasi Berkelanjutan V Tahap II (Lanjutan)

g. Continuous Bonds V Phase II (Continued)

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2021 No. 192 tanggal 23 November 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2021 No. 90 tanggal 13 Juli 2022, yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Pada tanggal 13 Juli 2022, RUPO telah menyetujui dan memutuskan penggantian wali amanat bagi Obligasi Berkelanjutan V Tahap II dari semula PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

The issuance of Continuous Bonds V Phase II was covered in the Deed of Trusteeship Agreement of Continuous Bonds V Tower Bersama Infrastructure Phase II Year 2021 No. 192 dated 23 November 2021, amended by Deed Addendum and Restatement I Deed of Trustee Agreement for Continuous Bonds V Tower Bersama Infrastructure Phase II Year 2021 No. 90 dated 13 July 2022, drawn up in the presence of Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., as a substitute for Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta. On 13 July 2022, the the Bondholders Meeting approved and decided to replace the trustee for the Continuous Bond V Phase II from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk to PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II ini, maka Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada entitas anak Perusahaan, di luar kegiatan usaha Perusahaan dan entitas anak.

Under the covenants governing the Continuous Bonds V Phase II, the Company, without the written consent of the Trustee, shall not, among others: merge or acquire, change the scope of main activities, reduce the authorized and paid-up capital, sale, transfer or dispose all or part of asset by the Company's subsidiaries, sale, transfer, or giving options, warrants, and grant loans to third parties, except to the Company's subsidiaries, outside the Company's and subsidiaries business activities.

Pada 31 Desember 2022, Perusahaan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

As of 31 December 2022, the Company has complied with the restrictions set out in these trusteeship agreements.

Pada 23 November 2021, Fitch Indonesia, Lembaga pemeringkat efek independen, telah memberikan peringkat "AA+" (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan V Tahap II ini.

On 23 November 2021, Fitch Indonesia, an independent credit rating agency, rated the Continuous Bonds V Phase II "AA+" (*Double A Plus*).

Obligasi Berkelanjutan V Tahap II ini telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 20 Desember 2022.

The Continuous Bonds V Phase II has been fully paid on 20 December 2022.

h. Obligasi Berkelanjutan V Tahap III

h. Continuous Bonds V Phase III

Pada tanggal 2 Maret 2022, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Tahap III Tahun 2022 dengan tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan V Tahap III"). Nominal Obligasi Berkelanjutan V Tahap III ini adalah sebesar Rp 2.200.000. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Maret 2022.

On 2 March 2022, the Company issued Continuous Bonds V Phase III Year 2022 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds V Phase III"). The Continuous Bonds V Phase III has a total principal of Rp 2,200,000. These bonds are listed on the Indonesia stock exchange on 4 March 2022.

Ekshibit E/106

Exhibit E/106

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

22. SURAT UTANG (Lanjutan)

22. NOTES (Continued)

h. Obligasi Berkelanjutan V Tahap III (Lanjutan)

h. Continuous Bonds V Phase III (Continued)

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III digunakan seluruhnya untuk melunasi sebagian kewajiban keuangan entitas anak, terkait dengan fasilitas pinjaman revolving sebesar US\$ 275 juta.

The net proceeds obtained from the issuance of Continuous Bonds V Phase III have been used entirely for partially repaid the financial liabilities of subsidiary, part of outstanding US\$ 275 million revolving loan facility.

Obligasi Berkelanjutan V Tahap III ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

These Continuous Bonds IV Phase III were issued in 2 (two) series consisting of:

1. Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp 1.700.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 3,75% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
2. Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp 500.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,90% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

1. Series A Bonds with nominal value of Rp 1,700,000 at a fixed interest rate of 5.75% per year. The term of the Series A Bonds is 370 (three hundred and seventy) Calendar Days.
2. Series B Bonds with nominal value of Rp 500,000 at a fixed interest rate of 5.90% per year. The term of the Series B Bonds is 3 (three) years.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 2 Juni 2022, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 12 Maret 2023 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 2 Maret 2025 untuk Obligasi Seri B.

Interest for Continuous Bonds V Phase III will be paid on a quarterly basis on the interest payment date. The first payment of interest is on 2 June 2022. The date of the last interest payment, which is also the due date of Continuous Bond V Phase III, is on 12 March 2023 for series A and 2 March 2025 for series B.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2022 No. 71 tanggal 14 Februari 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2022 No. 92 tanggal 13 Juli 2022, yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Pada tanggal 13 Juli 2022, RUPO telah menyetujui dan memutuskan penggantian wali amanat bagi Obligasi Berkelanjutan V Tahap III dari semula PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

The issuance of Continuous Bonds V Phase III was covered in the Deed of Trusteeship Agreement of Continuous Bonds V Tower Bersama Infrastructure Phase III Year 2022 No. 71 dated 14 February 2022, amended by Deed Addendum and Restatement I Deed of Trustee Agreement for Continuous Bonds V Tower Bersama Infrastructure Phase III Year 2022 No. 92 dated 13 July 2022, drawn up in the presence of Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., as a substitute for Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta. On 13 July 2022, the the Bondholders Meeting approved and decided to replace the trustee for the Continuous Bond V Phase III from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk to PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Ekshibit E/107

Exhibit E/107

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

22. SURAT UTANG (Lanjutan)

22. NOTES (Continued)

h. Obligasi Berkelanjutan V Tahap III (Lanjutan)

h. Continuous Bonds V Phase III (Continued)

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III ini, maka Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada entitas anak Perusahaan, di luar kegiatan usaha Perusahaan dan entitas anak.

*Under the covenants governing the Continuous Bonds V Phase III, the Company, without the written consent of the Trustee, shall not, among others: merge or acquire, change the scope of main activities, reduce the authorized and paid-up capital, sale, transfer or dispose all or part of asset by the Company's subsidiaries, sale, transfer, or giving options, warrants, and grant loans to third parties, except to the Company's subsidiaries, outside the Company's and subsidiaries business activities.*

Pada 31 Desember 2022, Perusahaan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliananatan tersebut.

*As of 31 December 2022, the Company has complied with the restrictions set out in these trusteeship agreements.*

Pada 7 November 2022, Fitch Indonesia, Lembaga pemeringkat efek independen, telah memberikan peringkat "AA+" (Double A Plus) untuk Obligasi Berkelanjutan V Tahap III ini.

*On 7 November 2022, Fitch Indonesia, an independent credit rating agency, rated the Continuous Bonds V Phase III "AA+" (Double A Plus).*

i. Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV

i. Continuous Bonds V Phase IV

Pada tanggal 11 Agustus 2022, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Tahap IV Tahun 2022 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV"). Nominal Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV ini adalah sebesar Rp 2.200.000. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Agustus 2022.

*On 11 August 2022, The Company issued Continuous Bonds V Tower Bersama Infrastructure phase IV Year 2022 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds V Phase IV"). The Continuous Bonds V Phase IV has a total principal of Rp 2,200,000. These bonds are listed on the Indonesia stock exchange on 12 August 2022.*

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan entitas anak.

*The net proceeds obtained from the issuance of Continuous Bonds V Phase IV have been used entirely for the payment of financial liabilities of subsidiaries.*

Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

*These Continuous Bonds V Phase IV were issued in 2 (two) series consisting of:*

1. Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp 1.478.610 dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,10% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
2. Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp 721.390 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,35% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

1. *Series A Bonds with nominal value of Rp 1,478,610 at a fixed interest rate of 4.10% per year. The term of the Series A Bonds is 370 (three hundred and seventy) Calendar Days.*
2. *Series B Bonds with nominal value of Rp 721,390 at a fixed interest rate of 6.35% per year. The term of the Series B Bonds is 3 (three) years.*

Ekshibit E/108

Exhibit E/108

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

22. SURAT UTANG (Lanjutan)

22. NOTES (Continued)

i. Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV (Lanjutan)

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 11 November 2022, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 21 Agustus 2023 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 11 Agustus 2025 untuk Obligasi Seri B.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2022 No. 137 tanggal 22 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV ini, maka Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada entitas anak Perusahaan, di luar kegiatan usaha Perusahaan dan entitas anak.

Pada 31 Desember 2022, Perusahaan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Pada 7 November 2022, Fitch Indonesia, Lembaga pemeringkat efek independen, telah memberikan peringkat "AA+" (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV ini.

j. Obligasi Berkelanjutan V Tahap V

Pada tanggal 21 Oktober 2022, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Tahap V Tahun 2022 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan V Tahap V") sebesar 5,25% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan V Tahap V ini adalah sebesar Rp 1.000.000. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 Oktober 2022.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap V telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan entitas anak.

i. Continuous Bonds V Phase IV (Continued)

*Interest for Continuous Bonds V Phase IV will be paid on a quarterly basis on the interest payment date. The first payment of interest is on 11 November 2022. The date of the last interest payment, which is also the due date of the Continuous Bond V Phase IV, is on 21 August 2023 for Series A and 11 August 2025 for Series B.*

*The issuance of Continuous Bonds V Phase IV was covered in the Deed of Trusteeship Agreement of Continuous Bonds V Tower Bersama Infrastructure Phase IV Year 2022 No. 137 dated 22 July 2022, drawn up in the presence of Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., as a substitute for Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta. The bond trustee is PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.*

*Under the covenants governing the Continuous Bonds V Phase IV, the Company, without the written consent of the Trustee, shall not, among others: merge or acquire, change the scope of main activities, reduce the authorized and paid-up capital, sale, transfer or dispose all or part of asset by the Company's subsidiaries, sale, transfer, or giving options, warrants, and grant loans to third parties, except to the Company's subsidiaries, outside the Company's and subsidiaries business activities.*

*As of 31 December 2022, the Company has complied with the restrictions set out in these trusteeship agreements.*

*On 7 November 2022, Fitch Indonesia, an independent credit rating agency, rated the Continuous Bonds V Phase IV "AA+" (Double A Plus).*

j. Continuous Bonds V Phase V

*On 21 October 2022, The Company issued Continuous Bonds V Tower Bersama Infrastructure phase V Year 2022 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds V Phase V") of 5.25% per annum. The Continuous Bonds V Phase V has a total principal of Rp 1,000,000. These bonds are listed on the Indonesia stock exchange on 24 October 2022.*

*The net proceeds obtained from the issuance of Continuous Bonds V Phase V have been used entirely for the payment of financial liabilities of subsidiaries.*

Ekshibit E/109

Exhibit E/109

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

22. SURAT UTANG (Lanjutan)

22. NOTES (Continued)

j. Obligasi Berkelanjutan V Tahap V (Lanjutan)

j. Continuous Bonds V Phase V (Continued)

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 21 Januari 2023, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 31 Oktober 2023.

*Interest for Continuous Bonds V Phase V will be paid on a quarterly basis on the interest payment date. The first payment of interest is on 21 January 2023. The date of the last interest payment, which is also the due date of the Continuous Bond V Phase V, is on 31 October 2023.*

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap V ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian perwaliamentan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2022 No. 23 tanggal 5 Oktober 2022 yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

*The issuance of Continuous Bonds V Phase V was covered in the Deed of Trusteeship Agreement of Continuous Bonds V Tower Bersama Infrastructure Phase V Year 2022 No. 23 dated 5 October 2022, drawn up in the presence of Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., as a substitute for Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta. The bond trustee is PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.*

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap V ini, maka Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada entitas anak Perusahaan, di luar kegiatan usaha Perusahaan dan entitas anak.

*Under the covenants governing the Continuous Bonds V Phase V, the Company, without the written consent of the Trustee, shall not, among others: merge or acquire, change the scope of main activities, reduce the authorized and paid-up capital, sale, transfer or dispose all or part of asset by the Company's subsidiaries, sale, transfer, or giving options, warrants, and grant loans to third parties, except to the Company's subsidiaries, outside the Company's and Subsidiaries business activities.*

Pada 5 Oktober 2022, Fitch Indonesia, Lembaga pemeringkat efek independen, telah memberikan peringkat "AA+" (Double A Plus) untuk Obligasi Berkelanjutan V Tahap V ini.

*On 5 October 2022, Fitch Indonesia, an independent credit rating agency, rated the Continuous Bonds V Phase V "AA+" (Double A Plus).*

Pada 31 Desember 2022 dan 2021, beban bunga masih harus dibayar untuk Surat Utang adalah sebesar Rp 382.834 dan Rp 353.106 dan disajikan sebagai bagian dari akun "Beban Masih Harus Dibayar" pada laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 20). Beban bunga disajikan sebagai bagian dari akun "Beban Keuangan" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

*As of 31 December 2022 and 2021, the accrued interest for Notes amounts to Rp 382,834 and Rp 353,106 and is presented as part of "Accrued Expenses" in the consolidated statement of financial position (Note 20). The related interest expense is presented as part of "Financial Expenses" in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.*

Ekshibit E/110

Exhibit E/110

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

23. LIABILITAS SEWA			23. LEASE LIABILITIES
Akun ini terdiri dari:			This account consists of:
	2022	2021	
a. Lahan	642.393	660.412	a. Land
b. Kendaraan	17.310	18.268	b. Vehicles
<b>Jumlah</b>	<b>659.703</b>	<b>678.680</b>	<b>Total</b>
<b>Bagian jangka pendek</b>	<b>126.567</b>	<b>174.858</b>	<b>Current portion</b>
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>533.136</b>	<b>503.822</b>	<b>Non-current portion</b>
a. Lahan			a. Land
Sesuai dengan penerapan PSAK 73 "Sewa", Perusahaan dan entitas anak mulai melakukan penerapan awal dan mengakui liabilitas sewa aset hak guna dari estimasi nilai perpanjangan sewa lahan untuk mencakup jangka waktu kolokasi, dengan rincian sebagai berikut:			Based on PSAK 73 "Leases", the Company and subsidiaries start to apply initial application and recognized the estimation of land lease extension to cover the collocation period as right of use assets lease liabilities, with details as follows:
	2022	2021	
Saldo awal	660.412	450.430	Beginning balance
Ditambah:			Add:
Penambahan sewa lahan	90.400	217.535	Additional landlease
Beban keuangan	24.383	51.685	Financial expenses
Dikurangi:			Less:
Pembayaran sewa lahan	( 132.802)	( 59.238)	Payment of landlease
<b>Jumlah</b>	<b>642.393</b>	<b>660.412</b>	<b>Total</b>
<b>Bagian jangka pendek</b>	<b>120.389</b>	<b>169.099</b>	<b>Current portion</b>
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>522.004</b>	<b>491.313</b>	<b>Non-current portion</b>
b. Kendaraan			b. Vehicles
	2022	2021	
PT Mitra Pinasthika Mustika Finance	9.029	14.992	PT Mitra Pinasthika Mustika Finance
PT Toyota Astra Financial Services	-	343	PT Toyota Astra Financial Services
PT BCA Finance	8.281	2.933	PT BCA Finance
<b>Jumlah</b>	<b>17.310</b>	<b>18.268</b>	<b>Total</b>
<b>Bagian jangka pendek</b>	<b>6.178</b>	<b>5.759</b>	<b>Current portion</b>
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>11.132</b>	<b>12.509</b>	<b>Non-current portion</b>

Ekshibit E/111

Exhibit E/111

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

23. LIABILITAS SEWA (Lanjutan)

23. LEASE LIABILITIES (Continued)

b. Kendaraan (Lanjutan)

b. Vehicles (Continued)

Pembayaran sewa minimum di masa mendatang, serta nilai kini atas pembayaran sewa minimum pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Future minimum lease payments together with the present value of the minimum lease payments as at 31 December 2022 and 2021 were as follows:

	2022	2021	
Bagian jangka pendek	7.783	7.914	Current portion
Bagian jangka panjang	12.289	14.745	Non-current portion
	<u>20.072</u>	<u>22.659</u>	
Dikurangi:			Less:
Beban bunga yang belum jatuh tempo	( 2.762)	( 4.391)	Future financing charges
Nilai kini pembayaran minimum utang sewa pembiayaan	<u>17.310</u>	<u>18.268</u>	Present value of minimum lease payable
Bagian jangka pendek	6.178	5.759	Current portion
Bagian jangka panjang	11.132	12.509	Non-current portion
Nilai kini pembayaran minimum utang sewa pembiayaan	<u>17.310</u>	<u>18.268</u>	Present value of minimum lease payable

Pada tanggal 31 Desember 2022, sewa pembiayaan ini dikenakan bunga berkisar antara 3,75% sampai dengan 15,22% per tahun dan akan jatuh tempo antara tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

As of 31 December 2022, this finance lease bears interest ranging from 3.75% to 15.22% per annum and will be due between 2023 to 2026.

Sewa pembiayaan ini dijamin dengan aset kendaraan yang menjadi obyek pembiayaan (Catatan 12).

The finance lease is secured by the respective vehicle assets (Note 12).

24. PROVISI JANGKA PANJANG

24. LONG-TERM PROVISION

Akun ini merupakan biaya pembongkaran, pemindahan dan restorasi lokasi atas menara pada saat menara tersebut tidak dioperasikan lagi karena faktor-faktor tertentu seperti sewa lahan yang tidak diperpanjang, penyesuaian peraturan atau keadaan memaksa lainnya.

This account represents costs of dismantling, moving and site restoration of towers when the towers are no longer in operation due to certain factors such as unextended land leases, regulatory adjustments or other compelling circumstances.

Asumsi signifikan pada tanggal 31 Desember 2022, terdiri dari tingkat diskonto dan sisa periode sebelum pembongkaran dilakukan, yaitu masing-masing adalah 7,42% - 7,44% dan 19 - 40 tahun.

The significant assumptions as of 31 December 2022 consist of the discount rate and the remaining period before demolition, which are 7.42% - 7.44% and 19 - 40 years, respectively.

Provisi jangka panjang akan direalisasi ketika pembongkaran menara.

The long term provision will be realized when the tower is dismantled.

Ekshibit E/112

Exhibit E/112

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

25. MODAL SAHAM

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, susunan pemegang saham dan kepemilikannya adalah sebagai berikut:

25. SHARE CAPITAL

As of 31 December 2022 and 2021, the structure of shareholders and their respective shareholdings are as follows:

31 Desember 2022/ 31 December 2022				
Pemegang saham	% Hak suara/ % Voting rights	Lembar saham (nilai penuh)/ No. of shares (full amount)	Jumlah/ Total (Rp)	Shareholders
Bersama Digital Infrastructure				Bersama Digital Infrastructure
Asia Pte, Ltd.	74,38	16.617.514.923	332.350	Asia Pte, Ltd.
Edwin Soeryadjaya	0,32	71.481.830	1.430	Edwin Soeryadjaya
Hardi Wijaya Liong	0,31	68.359.905	1.367	Hardi Wijaya Liong
Budianto Purwahjo	0,02	5.025.000	101	Budianto Purwahjo
Herman Setya Budi	0,02	4.625.000	93	Herman Setya Budi
Helmy Yusman Santoso	0,01	3.125.000	63	Helmy Yusman Santoso
Masyarakat	24,94	5.572.144.287	111.442	Public
	100,00	22.342.275.945	446.846	
Saham treasuri (Catatan 26)		314.723.500	6.294	Treasury stock (Note 26)
<b>Jumlah</b>		<b>22.656.999.445</b>	<b>453.140</b>	<b>Total</b>

31 Desember 2021/ 31 December 2021				
Pemegang saham	% Hak suara/ % Voting rights	Lembar saham (nilai penuh)/ No. of shares (full amount)	Jumlah/ Total (Rp)	Shareholders
PT Wahana Anugerah Sejahtera	35,85	7.755.471.093	155.109	PT Wahana Anugerah Sejahtera
PT Provident Capital Indonesia	23,28	5.036.352.510	100.727	PT Provident Capital Indonesia
Winato Kartono	2,28	490.159.500	9.803	Winato Kartono
Hardi Wijaya Liong	1,33	287.803.863	5.756	Hardi Wijaya Liong
Edwin Soeryadjaya	0,33	71.481.830	1.430	Edwin Soeryadjaya
Budianto Purwahjo	0,02	5.025.000	101	Budianto Purwahjo
Herman Setya Budi	0,02	4.625.000	93	Herman Setya Budi
Helmy Yusman Santoso	0,01	3.125.000	63	Helmy Yusman Santoso
Masyarakat	36,88	7.977.010.149	159.539	Public
	100,00	21.631.053.945	432.621	
Saham treasuri (Catatan 26)		1.025.945.500	20.519	Treasury stock (Note 26)
<b>Jumlah</b>		<b>22.656.999.445</b>	<b>453.140</b>	<b>Total</b>

Pada 31 Desember 2022 dan 2021, Komisaris dan Direksi Perusahaan yang memiliki langsung saham Perusahaan masing-masing adalah sebanyak 152.616.735 saham dan 862.220.193 saham, jumlah tersebut masing-masing mencerminkan hak suara sebesar 0,68% dan 3,99% dari jumlah saham beredar.

As of 31 December 2022 and 2021, there are Commissioners and Directors who directly owned 152.616.735 shares and 862,220,193 shares of the Company, respectively. Those shares represent 0.68% and 3.99% voting rights of total outstanding shares, respectively.

Pada berbagai tanggal di bulan April 2022, PT Wahana Anugerah Sejahtera dan PT Provident Capital Indonesia dan beberapa pemegang saham Perusahaan lainnya telah mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada Bersama Digital Infrastructure Asia Pte Ltd (BDIA, dahulu bernama Provident Consolidated Holdings Pte Ltd).

On various dates in April 2022, PT Wahana Anugerah Sejahtera and PT Provident Capital Indonesia and several other shareholders of the Company have transferred their shareholdings to Bersama Digital Infrastructure Asia Pte Ltd (BDIA, formerly Provident Consolidated Holdings Pte Ltd).



Ekshibit E/113

Exhibit E/113

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

25. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Setelah pengalihan saham dan pembelian saham treasury (Catatan 26) tersebut, kepemilikan BDIA pada Perusahaan menjadi sebanyak 16.617.514.923 saham atau mencerminkan hak suara 74,38% dari seluruh saham beredar Perusahaan.

Pengalihan saham ini merupakan restrukturisasi kepemilikan saham pada Perusahaan, dan tidak merubah pihak pengendali akhir dan pihak penerima manfaat akhir dari Perusahaan.

25. SHARE CAPITAL (Continued)

After the transfer of shares and the purchase of treasury shares (Note 26), BDIA's ownership in the Company became 16,617,514,923 shares which represented 74.38% voting rights of the Company's total outstanding shares.

This share transfer is a restructuring of share ownership in the Company, and it did not change the ultimate controlling shareholders and the ultimate beneficial owners of the Company.

26. SAHAM TREASURI

Pembelian kembali saham

- a. Pada tanggal 22 Juli 2022, Perseroan menerbitkan Keterbukaan Informasi terkait dengan rencana pembelian kembali saham Perseroan. Perseroan merencanakan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan ("POJK No. 2/POJK.04/2013") jo. Surat Edaran OJK No. 3/SEOJK.04/2020 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik ("SEOJK No. 3/SEOJK.04/2020").

Pembelian kembali saham Perseroan akan dilakukan untuk membeli sebanyak-banyaknya 679.709.900 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus) saham atau 3 % (tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yang akan dilakukan secara bertahap selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan 24 Oktober 2022. Pelaksanaan Transaksi pembelian saham akan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dari Direksi Perseroan melalui Bursa Efek Indonesia ("BEI").

Sesuai Keterbukaan Informasi yang disampaikan oleh Perusahaan pada tanggal 12 Oktober 2022, Perusahaan menyampaikan rencana perpanjangan pertama periode Pembelian Kembali Saham Perseroan ("Perpanjangan") untuk 3 (tiga) bulan sehingga periode perpanjangan ini berlaku dari tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan

12 Januari 2023. Jumlah saham yang dapat dibeli kembali dalam periode Perpanjangan ini sebesar 632.568.500 (enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus) saham dari rencana pembelian sebanyak-banyaknya 679.709.900 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus) saham.

26. TREASURY STOCK

Buyback shares

- a. On 22 July 2022, The Company issued Information Disclosure on Shares Buyback Plan. The Company plans to conduct buyback of the Company's shares that have been issued and listed on the Indonesia Stock Exchange ("Shares Buyback") in accordance with the Financial Services Authority ("OJK") Rule No. 2/POJK.04/2013 on Buyback of Shares Issued by the Publicly Listed Company or Public Company in Significantly Fluctuating Market Conditions ("OJK Rule No. 2/POJK.04/2013") and OJK Circular Letter No. 3/SEOJK.04/2020 on Other Conditions Constituting significantly Fluctuating Market Conditions Allowing for Buyback of Shares ("SEOJK No. 3/SEOJK.04/2020").

The Shares Buyback will be for up to 679,709,900 (six hundred seventy-nine million seven hundred and nine thousand and nine hundred) shares or 3% (three percent) of the issued and fully paid-in capital of the Company. The Shares Buyback will be conducted gradually within three months from 25 July 2022 until 24 October 2022. The Shares Buyback transactions will be executed by the approval of the Company's Board of Directors and through the Indonesian Stock Exchange ("IDX").

According to the Company's Information Disclosure on 12 October 2022, the Company announced the plan to extend its Share Buyback ("Extension") for up to 3 (three) months. Therefore the extension period is from 13 October 2022 to 12 January 2023. Number of shares available to be bought back for this Extension are 632,568,500 (six hundred thirty two million five hundred sixty eight thousand and five hundred) shares out of maximum 679,709,900 (six hundred seventy nine million seven hundred and nine thousand nine hundred) shares planned to be bought back by the Company.

Ekshibit E/114

Exhibit E/114

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

26. SAHAM TREASURI (Lanjutan)

26. TREASURY STOCK (Continued)

Pembelian kembali saham (Lanjutan)

Buyback shares (Continued)

Dari tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, Perusahaan telah membeli kembali saham beredarnya dari bursa saham sebanyak 314.723.500 saham dengan biaya perolehan sebesar Rp 761.596. Jumlah saham tersebut mencerminkan 1,39% dari seluruh saham beredar Perusahaan.

From 25 July 2022 to 31 December 2022, the Company had repurchased its 314,723,500 outstanding shares from the stock exchange at cost of Rp 761,596. Those number of shares represents 1.39% of the Company's outstanding shares.

Pada tanggal 30 Desember 2022, Perusahaan telah membeli kembali saham beredarnya dari bursa saham sebanyak 2.000.000 saham dengan biaya perolehan sebesar Rp 4.642. Jumlah saham tersebut mencerminkan 0,01% dari seluruh saham beredar Perusahaan. Saham tersebut akan di catat dalam bursa saham pada tanggal 2 Januari 2023.

On 30 December 2022, the Company had repurchased its 2.000,000 outstanding shares from the stock exchange at cost of Rp 4,462. Those number of shares represents 0,01% of the Company's outstanding shares. The shares will be recorded as treasury stock on 2 January 2023.

- b. Pada tanggal 27 April 2018, Perusahaan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). RUPST ini memberikan persetujuan kepada Perusahaan untuk membeli kembali sebesar maksimum 4,5% saham beredarnya atau sebanyak 204.000.000 saham melalui Bursa Efek Indonesia.

- b. On 27 April 2018, the Company held the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS). The AGMS approved plans to buyback a maximum of 4.5% of the issued shares or 204,000,000 shares of the Company on the Indonesia Stock Exchange.

Sesuai peraturan OJK, pembelian kembali saham tersebut harus dilakukan melalui bursa saham dan persetujuan tersebut berlaku selama 18 (delapan belas) bulan. Maksimum dana yang akan digunakan untuk membeli kembali saham tersebut adalah sebesar Rp 1,2 trilyun (nilai penuh) termasuk biaya transaksi, perantara pedagang efek dan biaya terkait lainnya.

According to the OJK's regulation, these shares will be boughtback through the stock exchange and the approval is valid for 18 (eighteen) months. The maximum fund to be used for the share buyback is amounting to Rp 1.2 trillion (full amount), including transaction, brokerage and other costs to be incurred.

Sesuai surat Perusahaan No. 534/TBG-TBI-001/FIN/05/IX/2019 tanggal 4 September 2019, Perusahaan telah menyampaikan kepada OJK bahwa Perusahaan menghentikan pelaksanaan pembelian kembali saham.

According to the Company's letter No. 534/TBG-TBI-001/FIN/05/IX/2019 dated 4 September 2019, the Company has informed OJK that the Company has stopped the buyback of its outstanding shares.

Dengan demikian, pelaksanaan pembelian kembali saham tersebut dinyatakan telah selesai dilaksanakan seluruhnya dan selanjutnya pengalihan saham hasil pembelian kembali tersebut akan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka.

Accordingly, the shares repurchase has been completed, and those shares will be transferred in accordance with the applicable regulations, particularly to OJK's regulation No. 30/POJK.04/2017 concerning Buyback of Shares Issued by a Public Company.

Sejak tanggal RUPST sampai dengan 4 September 2019, Perusahaan telah membeli kembali saham beredarnya dari bursa saham sebanyak 110.944.200 saham dengan biaya perolehan sebesar Rp 513.160. Setelah stock split di bulan November 2019, jumlah saham tersebut menjadi 554.721.000 saham, yang mencerminkan 2,45% dari seluruh saham beredar Perusahaan.

From the AGMS until 4 September 2019, the Company has bought back 110,944,200 of its outstanding shares from the stock exchange as a cost of Rp 513,160. Post the stock-split in November 2019, the number of shares is now 554,721,000 shares, representing 2.45% of the Company's outstanding shares.

Ekshibit E/115

Exhibit E/115

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

26. SAHAM TREASURI (Lanjutan)

26. TREASURY STOCK (Continued)

Pembelian kembali saham (Lanjutan)

Buyback shares (Continued)

- c. Pada tanggal 24 Oktober 2016, Perusahaan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). RUPSLB ini memberikan persetujuan kepada Perusahaan untuk membeli kembali sebesar maksimum 5% saham beredarnya atau sebanyak 236.000.000 saham melalui Bursa Efek Indonesia.

- c. On 24 October 2016, the Company held the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS). The EGMS approved plans to buyback a maximum of 5% of the issued shares or 236,000,000 shares of the Company on the Indonesia Stock Exchange.

Sesuai peraturan OJK, pembelian kembali saham tersebut harus dilakukan melalui bursa saham dan persetujuan tersebut berlaku selama 18 (delapan belas) bulan. Maksimum dana yang akan digunakan untuk membeli kembali saham tersebut adalah sebesar Rp 1,5 triliun (nilai penuh) termasuk biaya transaksi, perantara pedagang efek dan biaya terkait lainnya.

According to the OJK's regulation, these shares will be boughtback through the stock exchange and the approval is valid for 18 (eighteen) months. The maximum fund to be used for the share buyback is amounting to Rp 1.5 trillion (full amount), including transaction, brokerage and other costs to be incurred.

Sejak tanggal RUPSLB sampai dengan 25 April 2018, Perusahaan telah membeli kembali saham beredarnya dari bursa saham sebanyak 85.810.400 saham dengan biaya perolehan sebesar Rp 463.847. Setelah stock split di bulan November 2019, jumlah saham tersebut menjadi 429.052.000 saham, yang mencerminkan 1,89% dari seluruh saham beredar Perusahaan.

Since the EGMS up to 25 April 2018, the Company had boughtback 85,810,400 of its outstanding shares from the stock exchange at a cost of Rp 463,847. Post the stock-split in November 2019, the number of shares is now 429,052,000 shares, representing 1.89% of the Company's outstanding shares.

- d. Pada tanggal 27 Mei 2015, Perusahaan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). RUPST ini memberikan persetujuan kepada Perusahaan untuk membeli kembali sebesar maksimum 5% saham beredarnya atau sebanyak 236.000.000 saham melalui Bursa Efek Indonesia.

- d. On 27 May 2015, the Company held the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS). The AGMS approved plans to buyback a maximum of 5% of the issued shares or 236,000,000 shares of the Company on the Indonesia Stock Exchange.

Sesuai peraturan OJK, pembelian kembali saham tersebut harus dilakukan melalui bursa saham dan persetujuan tersebut berlaku selama 18 (delapan belas) bulan. Maksimum dana yang akan digunakan untuk membeli kembali saham tersebut adalah sebesar Rp 2,2 triliun (nilai penuh) termasuk biaya transaksi, perantara pedagang efek dan biaya terkait lainnya.

According to the OJK's regulation, these shares will be boughtback through the stock exchange and the approval is valid for 18 (eighteen) months. The maximum fund to be used for the share buyback is amounting to Rp 2.2 trillion (full amount), including transaction, brokerage and other costs to be incurred.

Sejak tanggal RUPST sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016, Perusahaan telah membeli kembali saham beredarnya dari bursa saham sebanyak 194.855.500 saham dengan biaya perolehan sebesar Rp 1.195.828. 186.421.000 dari jumlah 194.855.500 saham treasury ini telah ditarik kembali pada saat pengurangan modal pada 28 Desember 2016. Setelah stock split di bulan November 2019, jumlah saham tersebut menjadi 42.172.500 saham, yang mencerminkan 0,04% dari seluruh saham beredar Perusahaan.

Since the AGMS up to 24 October 2016, the Company has bought back circulated shares from the stock exchange totaling 194,855,500 shares with a acquisition cost of Rp 1,195,828. 186,421,000 of the total 194,855,500 treasury shares were withdrawn at the time of capital reduction on 28 December 2016. After the stock split in November 2019, the number of shares became 42,172,500 shares, representing 0.04% of all outstanding shares the Company.

- e. Pada tanggal 24 Juli 2013, Perusahaan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). RUPSLB ini memberikan persetujuan kepada Perusahaan untuk membeli kembali sebesar maksimum 5% saham beredarnya atau sebanyak 239.800.000 saham melalui Bursa Efek Indonesia.

- e. On 24 July 2013, the Company held the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS). The EGMS approved plans to repurchase a maximum of 5% of the issued shares or 239,800,000 shares of the Company on the Indonesia Stock Exchange.

Ekshibit E/116

Exhibit E/116

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

26. SAHAM TREASURI (Lanjutan)

26. TREASURY STOCK (Continued)

Pembelian kembali saham (Lanjutan)

Buyback shares (Continued)

Sesuai peraturan OJK, pembelian kembali saham tersebut harus dilakukan melalui bursa saham dan persetujuan tersebut berlaku selama 18 (delapan belas) bulan. Maksimum dana yang akan digunakan untuk membeli kembali saham tersebut adalah sebesar Rp 1,44 triliun (nilai penuh) termasuk biaya transaksi, perantara pedagang efek dan biaya terkait lainnya.

According to the OJK's regulation, these shares will be repurchased through the stock exchange and the approval is valid for 18 (eighteen) months. The maximum fund to be used for the shares repurchase is amounting to Rp 1.44 trillion (full amount), including transaction, brokerage and other costs to be incurred.

Sejak tanggal RUPSLB sampai dengan bulan Maret 2014, Perusahaan telah membeli kembali saham beredarnya dari bursa saham sebanyak 78.705.310 saham dengan biaya perolehan sebesar Rp 459.254. Jumlah saham tersebut mencerminkan 1,64% dari seluruh saham beredar Perusahaan. Saham treasury ini termasuk dalam saham treasury yang ditarik kembali melalui pengurangan modal pada tanggal 28 Desember 2016.

Since the EGMS up to March 2014, the Company had repurchased its 78,705,310 outstanding shares from the stock exchange at cost of Rp 459,254. Those number of shares represents 1.64% of the Company's outstanding shares. These shares were included in the Company's treasury shares and have subsequently been cancelled on 28 December 2016.

Sesuai surat Perusahaan No. 0478/TBG-TBI-001/FAL/05/IV/2014 tanggal 28 April 2014, Perusahaan telah menyampaikan kepada OJK untuk menghentikan pelaksanaan pembelian kembali saham.

According to the Company's letter No. 0478/TBG-TBI-001/FAL/05/IV/2014 dated 28 April 2014, the Company has advised to OJK to suspend the execution of repurchase of its outstanding shares.

Dengan demikian, pelaksanaan pembelian kembali saham tersebut dinyatakan telah selesai dan selanjutnya pengalihan saham hasil pembelian kembali tersebut akan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku, khususnya peraturan OJK No. XI.B2 lampiran keputusan No. Kep-105/BL/2010 tanggal 13 April 2010.

Accordingly, the shares repurchase has been completed, and those shares will be transferred in accordance with the applicable regulations, particularly to OJK's regulation No. XI.B2 attachment to the decision No. Kep-105/BL/2010 dated 13 April 2010.

Berdasarkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. AHU-0022051.AH.01.02. Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, Perusahaan memutuskan untuk melakukan pengurangan modal dengan cara menghentikan peredaran 265.126.310 saham treasury dan merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perusahaan terkait dengan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi sebanyak 4.531.399.889 saham dengan nilai nominal saham Rp 100 (nilai penuh) per saham. Setelah perubahan modal tersebut, maka jumlah modal disetor Perusahaan menjadi sebesar Rp 453.140.

Based on approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-0022051.AH.01.02. Tahun 2016 dated 22 November 2016 regarding Approval of Changing in the Company's Article of Association, the Company has decided to reduce its capital by retiring the circulation of 265,126,310 treasury stocks, and to amend Article 4 of the Company's Articles of Association related to the issued and paid for becoming of 4,531,399,889 shares at a nominal value of Rp 100 (full amount) per share. Subsequently, the Company's fully paid in capital is now becoming to Rp 453,140.

Dengan demikian, jumlah saham beredar yang telah dibeli kembali oleh Perusahaan pada 31 Desember 2021 menjadi sebanyak 1.025.945.500 saham atau 4,53% dari seluruh jumlah saham beredar dengan biaya perolehan masing-masing sebesar Rp 1.028.268.

Accordingly, the numbers of outstanding shares that have been boughtback by the Company as of 31 December 2021 amounted to 1,025,945,500 shares, respectively or 4.53% of the total number of shares outstanding at a cost of Rp 1,028,268, respectively.

Ekshibit E/117

Exhibit E/117

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

26. SAHAM TREASURI (Lanjutan)

Penjualan saham treasuri

Pada tanggal 25 April 2022, Perusahaan telah menjual seluruh saham treasuri sebanyak 1.025.945.500 saham kepada Provident Consolidated Holdings Pte Ltd (sekarang dikenal sebagai Bersama Digital Infrastructure Asia Pte Ltd) pada harga Rp 3.200 (nilai penuh) per saham.

Keuntungan dari penjualan saham treasuri sebesar Rp 2.235.440 dicatat sebagai bagian agio saham pada akun Tambahan Modal Disetor (Catatan 27).

26. TREASURY STOCK (Continued)

Sale of treasury shares

On 25 April 2022, the Company sold all treasury shares totaling 1,025,945,500 shares to Provident Consolidated Holdings Pte Ltd (renamed to Bersama Digital Infrastructure Asia Pte Ltd) at a price of Rp 3,200 (full amount) per share.

Gain from the sale of treasury shares of Rp 2,235,440 was recorded as part of share premium in the Additional Paid-in Capital (Note 27).

27. TAMBAHAN MODAL DISETOR - BERSIH

Akun ini terdiri dari:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Agio saham:</b>		
Penawaran Umum Perdana	1.060.888	1.060.888
PT Indosat Tbk	733.101	733.101
PT Saratoga Infrastruktur Bersama Digital Infrastructure Asia Pte, Ltd. (Catatan 26)	185.244	185.244
	2.235.438	-
<b>Biaya emisi efek ekuitas:</b>		
Penawaran Umum Perdana	( 62.275)	( 62.275)
<b>Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali</b>	( 1.870.188)	( 1.870.286)
<b>Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali (Catatan 2s)</b>	( 261.190)	( 261.576)
<b>Penarikan kembali saham dari saham treasuri (Catatan 26)</b>	( 426.552)	( 426.552)
<b>Jumlah - Bersih</b>	<u>1.594.466</u>	<u>( 641.456)</u>

Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali

Akun ini terdiri dari beberapa transaksi pembelian kembali saham sebagai berikut:

<u>Perusahaan</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>the Company</u>
a. PT Solu Sindo Kreasi Pratama	( 1.851.029)	( 1.850.931)	a. PT Solu Sindo Kreasi Pratama
b. PT Jaringan Pintar Indonesia	98	( 98)	b. PT Jaringan Pintar Indonesia
c. PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk	( 1.091)	( 1.091)	c. PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk
d. PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk	( 18.166)	( 18.166)	d. PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk
<b>Jumlah</b>	<u>( 1.870.188)</u>	<u>( 1.870.286)</u>	<b>Total</b>

27. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL - NET

This account consists of:

<u>2022</u>	<u>2021</u>
	<b>Premium of paid-in capital:</b>
	Initial Public Offering
	PT Indosat Tbk
	PT Saratoga Infrastruktur
	Bersama Digital Infrastructure
	Asia Pte, Ltd. (Catatan 26)
	<b>Share issuance costs:</b>
	Initial Public Offering
	<b>Difference arising from transaction with non-controlling interest</b>
	<b>Difference arising from restructuring transaction of entities under common control (Note 2s)</b>
	<b>Shares retired from treasury stock (Note 26)</b>
	<b>Total - Net</b>

Difference in arising from transactions with non-controlling parties

This account consists of several share buyback transactions as follows:

Ekshibit E/118

Exhibit E/118

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

27. TAMBAHAN MODAL DISETOR - BERSIH (Lanjutan)

27. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL - NET (Continued)

Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali (Lanjutan)

Difference in arising from transactions with non-controlling parties (Continued)

- a. Pada berbagai tanggal selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 (terakhir dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2018), berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual beli Kembali Saham SKP, pemegang saham non-pengendali SKP menyetujui untuk mengalihkan 587.345 saham miliknya kepada SKP dengan harga sebesar Rp 2.113.880.

- a. On a number of dates in and between 2014 and 2018 (the last on 9 August 2018), based on the SKP Shares Purchase Agreement, the non-controlling shareholders of SKP agreed to transfer their 587,345 shares to SKP at a price of Rp 2,113,880.

Jumlah saham tersebut merepresentasikan 32,66% dari seluruh saham beredar SKP. Dengan demikian, SKP menjadi memiliki sahamnya sendiri sebanyak 587.345 saham atau 32,66% dari seluruh saham yang beredar. Setelah transaksi pembelian saham tersebut, selanjutnya SKP menghentikan peredaran saham yang dibelinya kembali tersebut.

The number of shares represents 32.66% of total shares outstanding of SKP. Accordingly, SKP now has as many as 587.345 shares of its own or 32.66% of the total shares outstanding. After the transaction of share repurchase, SKP terminated all the shares purchased as the outstanding shares.

Selanjutnya, SKP telah melaporkan penghentian peredaran saham tersebut dan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-21014.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 19 April 2013, No. AHU-57070.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 8 November 2013, No. AHU-05606.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 10 Februari 2014, No. AHU-04548.40.20.2014 tanggal 16 Mei 2014, No. AHU-0000371.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 12 Januari 2015, No. AHU-0938197.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 26 Juni 2015, No. AHU-0949402.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 15 Februari 2016 dan No. AHU-0021798.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 14 Oktober 2018.

Subsequently, SKP has reported the terminated all the shares purchased and changes in shareholding structure to the Ministry of Law and Human Rights. The changes of articles of association have been approved by the Minister of Law and Human Rights through its Decree Letter No. AHU-21014.AH.01.02.Tahun 2013 dated 19 April 2013, No. AHU-57070.AH.01.02.Tahun 2013 dated 8 November 2013, No. AHU-05606.AH.01.02.Tahun 2014 dated 10 February 2014, No. AHU-04548.40.20.2014 dated 16 May 2014, No. AHU-0000371.AH.01.02.Tahun 2015 dated 12 January 2015, No. AHU-0938197.AH.01.02.Tahun 2015 dated 26 June 2015, No. AHU-0949402.AH.01.02.Tahun 2015 dated 15 February 2016, and No. AHU-0021798.AH.01.02.Tahun 2018 dated 14 October 2018.

Setelah pelaksanaan pembelian kembali saham, kepemilikan efektif MSI atas SKP pada 31 Desember 2022 dan 2021 berubah menjadi 99,71%.

Subsequent to the execution of the share repurchase execution, the effective ownership of MSI over SKP as of 31 December 2022 and 2021 has changed to 99.71%, respectively.

Rincian dari perhitungan akun tersebut adalah sebagai berikut:

Details of the calculation of these accounts are as follows:

	2022	2021	
Nilai tercatat investasi MSI pada SKP pada saat pelaksanaan pembelian kembali saham	2.563.512	2.563.512	MSI investment at SKP on the date of treasury stock executed
Nilai tercatat investasi MSI pada SKP setelah pelaksanaan pembelian kembali saham dengan kepemilikan efektif 99,71% masing-masing pada 31 Desember 2022 dan 2021	712.483	712.581	MSI investment at SKP after the date treasury stock executed with ownership effective 99.71% as of 31 December 2022 and 2021, respectively
Penurunan bagian investasi yang dicatat MSI sebagai selisih perubahan ekuitas entitas anak	( 1.851.029)	( 1.850.833)	Decrease of investment obtained by MSI and recorded as the change of the shareholders' equity in subsidiary
Kepemilikan Perusahaan di MSI	100,00%	100,00%	The ownership of the Company in MSI
Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali yang dicatat Perusahaan	( 1.851.029)	( 1.850.833)	Difference arising from transactions with non-controlling parties as recorded by the Company

Ekshibit E/119

Exhibit E/119

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

27. TAMBAHAN MODAL DISETOR - BERSIH (Lanjutan)

27. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL - NET (Continued)

Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali (Lanjutan)

Difference in arising from transactions with non-controlling parties (Continued)

- b. Pada bulan September 2018, PT Tower Bersama (TB) entitas anak, melakukan pembelian saham PT Jaringan Pintar Indonesia (JPI) sebanyak 374 saham dari PT Moga Capital, pihak berelasi. Setelah pelaksanaan pembelian kembali saham, kepemilikan efektif TB atas JPI pada 30 September 2018 berubah menjadi 100%.

- b. In September 2018, PT Tower Bersama (TB), a subsidiary, purchased 374 shares of PT Jaringan Pintar Indonesia (JPI) from PT Moga Capital, a related party. After the stock repurchase, effective ownership of TB on JPI at 30 September 2018 changed to 100%.

Pada bulan November 2018, PT Tower Bersama (TB) entitas anak, mengalihkan saham PT Jaringan Pintar Indonesia (JPI) sebanyak 207 saham kepada pihak non-pengendali. Setelah pengalihan kembali saham, kepemilikan efektif TB atas JPI pada 30 November 2018 berubah menjadi 83,44 %. Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali yang dicatat Perusahaan adalah sebesar Rp 98.

In November 2018, PT Tower Bersama (TB), a subsidiary, transfer 207 shares of PT Jaringan Pintar Indonesia (JPI) to non-controlling shareholders. After the execution of the transfer of shares, the effective ownership of TB to JPI on 30 November 2018 has changed to 83.44%. Difference arising from the transaction with non-controlling parties as recorded by the Company is Rp 98.

- c. Pada tanggal 25 Januari 2019, Perusahaan melakukan pembelian saham PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk ("GHON") sebanyak 1.695.700 saham dari pemegang saham GHON lainnya. Setelah pembelian saham tersebut kepemilikan efektif Perusahaan atas GHON pada 31 Januari 2019 berubah menjadi 50,43%. Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali yang dicatat Perusahaan adalah sebesar Rp 1.091.

- c. On 25 January 2019, the Company acquired 1,695,700 shares from other GHON shareholder of PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk ("GHON"). After the execution of the acquisition of shares, the effective ownership at 31 January 2019 has changed to 50.43%. Difference arising from the transaction with non-controlling parties as recorded by the Company is Rp 1,091.

- d. Pada tanggal 14 Maret 2019, Perusahaan melakukan pembelian saham PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk ("GOLD") sebanyak 15.798.850 saham dari pemegang saham GOLD lainnya. Setelah pembelian saham tersebut kepemilikan efektif Perusahaan atas GOLD pada 30 Juni 2019 berubah menjadi 56,02%. Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali yang dicatat Perusahaan adalah sebesar Rp 4.062.

- d. On 14 March 2019, the Company acquired 15,798,850 shares from other GOLD shareholder of PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk ("GOLD"). After the execution of the acquisition of shares, the effective ownership at 30 June 2019 has changed to 56.02%. Difference arising from the transaction with non-controlling parties as recorded by the Company is Rp 4,062.

Pada tanggal 10 Juli 2019, Perusahaan melakukan pembelian saham PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk ("GOLD") sebanyak 476.330.959 saham untuk tujuan Pelaksanaan HMETD milik Perusahaan terkait dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD ("Right Issue") GOLD. Setelah pembelian saham tersebut kepemilikan efektif Perusahaan atas GOLD pada 31 Juli 2019 berubah menjadi 51,09%. Selisih transaksi dengan pihak non pengendali yang dicatat Perusahaan adalah sebesar Rp 14.104.

On 10 July 2019, the Company acquired 476,330,959 shares from other GOLD shareholder of PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk ("GOLD") for the purpose of exercising the Company's rights related to the rights issue of GOLD. After the execution of the acquisition of shares, the effective ownership of 31 July 2019 has changed to 51.09%. Difference arising from the transaction with non-controlling parties as recorded by the Company is Rp 14,104.

Tidak terdapat selisih transaksi dengan pihak non-pengendali yang direalisasi ke laba rugi atas pelepasan investasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021.

There are no differences arising from the transactions with non-controlling parties derived from disposal of investment which has been recognized to profit or loss for the years ended 31 December 2022 and 2021.

Ekshibit E/120

Exhibit E/120

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

27. TAMBAHAN MODAL DISETOR - BERSIH (Lanjutan)

27. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL - NET (Continued)

Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

Difference Arising From Restructuring Transactions of  
Entities Under Common Control

- Pada tanggal 7 Januari 2009, PT Tower Bersama (TB), entitas anak, melakukan pembelian saham PT Prima Media Selaras sebanyak 15.000 saham dari PT Prime Asia Capital, pihak berelasi. Selisih antara nilai perolehan dan nilai wajar aset bersih yang diperoleh sebesar Rp 2.008 disajikan sebagai "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" sebagai bagian dari ekuitas (catatan 2s).
- Pada bulan Januari 2013, TBG Global Pte Ltd (TBGG), entitas anak, memperoleh 100% kepemilikan saham Tower Bersama Singapore Pte Ltd, dari Perusahaan. Selisih antara nilai perolehan dan nilai wajar aset bersih yang diperoleh sebesar Rp 386 disajikan sebagai "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" sebagai bagian dari ekuitas (Catatan 2s).
- Pada tanggal 21 Desember 2018, Perusahaan melakukan pembelian saham PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk ("GHON") sebanyak 166.760.000 saham dari pemegang saham GHON lainnya. Selisih antara nilai perolehan dan nilai wajar aset bersih yang diperoleh sebesar Rp 138.226 disajikan sebagai "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" sebagai bagian dari ekuitas.
- Pada tanggal 25 Juni 2021, Perusahaan melakukan pembelian saham PT Tower Bersama sebanyak 2.780 saham dari PT Provident Capital Indonesia, pihak berelasi. Selisih antara nilai perolehan dan nilai wajar aset bersih yang diperoleh sebesar Rp 120.956 disajikan sebagai "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" sebagai bagian dari ekuitas (Catatan 2s).

- On 7 January 2009, PT Tower Bersama (TB), a subsidiary, purchased 15,000 shares of PT Prima Media Selaras from PT Prime Asia Capital, a related party. The difference between the acquisition value and the fair value of the net assets acquired amounting to Rp 2,008 is presented as "Difference Arising from Restructuring Transactions of Entities Under Common Control" as part of equity (note 2s).
- On January 2013, TBG Global Pte Ltd (TBGG), a subsidiary, acquired 100% ownership Tower Bersama Singapore Pte Ltd., from the Company. The difference between the acquisition cost and the fair value of net assets acquired amounted to Rp 386 is presented as the "Difference Arising from Restructuring Transactions of Entities Under Common Control" as part of the equity (Note 2s).
- On 21 December 2018, the Company acquired 166,760,000 shares from other GHON shareholder of PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk ("GHON"). The difference between the cost and the fair value of net assets acquired amounting to Rp 138,226 is presented as "Difference Arising from Restructuring Transactions of Entities Under Common Control" as part of equity.
- On 25 June 2021, The Company, purchased 2,781 shares of PT Tower Bersama from PT Provident Capital Indonesia, a related party. The difference between the acquisition value and the fair value of the net assets acquired amounting to Rp 120,956 is presented as "Difference Arising from Restructuring Transactions of Entities Under Common Control" as part of equity (Note 2s).

28. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

28. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Akun ini merupakan selisih transaksi perubahan ekuitas entitas anak dan penghasilan komprehensif lain dengan rincian sebagai berikut:

This account represents differences arising from change in subsidiaries equity and other comprehensive income with details as follows:

	2022	2021	
Surplus revaluasi	5.554.067	7.318.223	Revaluation surplus
Kerugian aktuarial yang diakui dalam			Actuarial loss recognized in
Selisih translasi atas mata uang asing	9.648	( 62.395)	Difference translation of foreign currency
penghasilan komprehensif lain	( 14.503)	( 13.827)	other comprehensive income
Cadangan lindung nilai arus kas	( 1.084.017)	( 179.584)	Cash flows hedging reserves
<b>Jumlah</b>	<b>4.465.195</b>	<b>7.062.417</b>	<b>Total</b>



Ekshibit E/121

Exhibit E/121

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

28. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (Lanjutan)

28. OTHER COMPREHENSIVE INCOME (Continued)

a. Cadangan lindung nilai arus kas

a. Cash flows hedging reserves

Perusahaan dan entitas anak melakukan kontrak lindung nilai dalam rangka mengantisipasi risiko fluktuasi tingkat bunga dan nilai tukar mata uang asing atas pinjaman bank dalam mata uang asing. Nilai wajar aset keuangan derivatif pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 563.351 dan Rp 900.363.

The Company and subsidiaries entered into hedging contracts in order to mitigate the fluctuations in interest rates and exchange rates from bank loans in foreign currency. Fair value of derivative financial assets as of 31 December 2022 and 2021 amounted to Rp 563,351 and Rp 900,363, respectively.

Instrumen derivatif ini telah memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai berdasarkan PSAK 55 (Revisi 2014). Oleh karena itu, nilai wajar bersih dari aset keuangan derivatif pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sesudah memperhitungkan perubahan kurs pinjaman yang dilindung nilai sebesar Rp (1.083.639) dan Rp (179.489) diakui sebagai bagian efektif atas laba (rugi) instrumen lindung nilai pada entitas anak dan dicatat pada akun "Cadangan Lindung Nilai Arus Kas" dan "Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Entitas Anak" pada Ekuitas Perusahaan masing-masing sebesar Rp (1.084.017) dan Rp (179.584).

These derivative instruments qualified the criteria of hedge accounting based on PSAK 55 (Revised 2014). Therefore, the net fair value of derivative financial assets as of 31 December 2022 and 2021 after considering the foreign exchange translation of related hedged loans of Rp (1,083,639) and Rp (179,489), are recognized as effective portion of gains (losses) on hedging instruments at the subsidiaries level and presented as "Cash Flows Hedging Reserves" and "Difference Arising from Changes in Subsidiaries Equity" in the Company shareholders' equity section of Rp (1,084,017) and Rp (179,584), respectively.

Rincian dari masing-masing komponen tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Details of each component above are as follows:

31 Desember 2022/ 31 December 2022	Cadangan lindung nilai arus kas/ Cash flows hedging reserves	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Cadangan lindung nilai arus kas dicatat Perusahaan/ Cash flows hedging reserves recorded by the Company
Perusahaan/ The Company	( 1.274.568)		( 1.274.568)
Entitas anak/ Subsidiary:			
PT Tower Bersama	59.172	100,00%	59.172
Entitas yang berada dibawah pengendalian bersama antara Perusahaan dan entitas anak sebagai berikut/ Entity controlled directly or indirectly between the Company and the following subsidiaries :			
PT Metric Solusi Integrasi	131.379	100,00%	131.379
<b>Jumlah/ Total</b>	<b>( 1.084.017)</b>		<b>( 1.084.017)</b>

Ekshibit E/122

Exhibit E/122

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

28. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (Lanjutan)

28. OTHER COMPREHENSIVE INCOME (Continued)

a. Cadangan lindung nilai arus kas (Lanjutan)

a. Cash flows hedging reserves (Continued)

	Cadangan lindung nilai arus kas/ Cash flows hedging reserves	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Cadangan lindung nilai arus kas dicatat Perusahaan/ Cash flows hedging reserves recorded by the Company
<b>31 Desember 2021/ 31 December 2021</b>			
Perusahaan/ The Company	( 174.239)		( 174.239)
Entitas anak/ Subsidiaries:			
PT Tower Bersama	( 30.474)	100,00%	( 30.474)
PT Solusi Menara Indonesia	( 18.599)	70,03%	( 13.024)
Entitas yang berada dibawah pengendalian bersama antara Perusahaan dan entitas anak sebagai berikut/ Entity controlled directly or indirectly between the Company and the following subsidiaries:			
PT Metric Solusi Integrasi	33.279	100,00%	33.279
PT Tower Bersama	4.874	100,00%	4.874
<b>Jumlah/ Total</b>	<b>( 185.159)</b>		<b>( 179.584)</b>

b. Selisih translasi atas mata uang asing

b. Exchange differences on translation of foreign operations

Transaksi ini merupakan selisih translasi atas mata uang asing TBG Global Pte Ltd., entitas anak (Catatan 1c dan 2e).

This transaction represents difference translation of foreign currency of TBG Global Pte Ltd., a subsidiary (Notes 1c and 2e).

29. PENDAPATAN

29. REVENUE

Rincian pendapatan dari pihak ketiga untuk tahun berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Details of revenues from third-parties for the years ended 31 December 2022 and 2021 are as follows:

	Pendapatan/ Revenue		Persentase dari pendapatan/ Percentage of total revenue		
	2022	2021	2022	2021	
<b>Menara telekomunikasi</b>					<b>Telecommunication towers</b>
PT Telekomunikasi Selular	2.283.511	2.201.074	35,00%	35,62%	PT Telekomunikasi Selular
PT Indosat Tbk	2.197.771	1.327.481	33,69%	21,48%	PT Indosat Tbk
PT XL Axiata Tbk	1.061.633	975.935	16,27%	15,79%	PT XL Axiata Tbk
PT Smartfren Telecom Tbk	521.267	434.566	7,99%	7,04%	PT Smartfren Telecom Tbk
PT Smart Telecom	381.451	270.490	5,85%	4,38%	PT Smart Telecom
PT Hutchison 3 Indonesia	7.525	914.788	0,12%	14,80%	PT Hutchison 3 Indonesia
Lainnya	13.974	40.106	0,21%	0,65%	Others
	<b>6.467.132</b>	<b>6.164.440</b>	<b>99,12%</b>	<b>99,76%</b>	
<b>Serat optik</b>	48.848	6.635	0,75%	0,10%	<b>Fiber optic</b>
<b>Properti investasi</b>	8.389	8.509	0,13%	0,14%	<b>Investment properties</b>
<b>Jumlah</b>	<b>6.524.369</b>	<b>6.179.584</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Total</b>

Ekshibit E/123

Exhibit E/123

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

29. PENDAPATAN (Lanjutan)

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah memberikan persetujuan atas merger dan akuisisi penyelenggaraan telekomunikasi PT Indosat Tbk dan PT Hutchison 3 Indonesia. Persetujuan itu termuat dalam Keputusan Menteri Kominfo Nomor 7 Tahun 2022 (Kepmenkominfo No. 7) tanggal 4 Januari 2022.

Berdasarkan Kepmenkominfo No. 7 tersebut, seluruh hak dan kewajiban PT Hutchison 3 Indonesia yang terkait dengan penyelenggaraan telekomunikasi, beralih menjadi hak dan kewajiban PT Indosat Tbk, termasuk dan tidak terbatas pada hak penggunaan penomoran telekomunikasi, kewajiban pembangunan jaringan dan jasa telekomunikasi, kewajiban menjamin keberlangsungan layanan kepada pelanggan, kerjasama dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya, dan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi, biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio, serta kontribusi kewajiban pelayanan universal atau *Universal Service Obligation* (USO). Selain itu, izin penyelenggaraan jasa sistem komunikasi data PT Hutchison 3 Indonesia juga akan dialihkan menjadi izin penyelenggaraan jasa sistem komunikasi data PT Indosat Tbk.

29. REVENUE (Continued)

The Minister of Communication and Informatics of Republic of Indonesia has given approval for the merger and acquisition of telecommunications operations between PT Indosat Tbk and PT Hutchison 3 Indonesia. The approval for the merger between PT Indosat Tbk and PT Hutchison 3 Indonesia was legally formalized by the Decree of the Minister of Communication and Informatics No. 7 Year 2022 (Kepmenkominfo No. 7) dated 4 January 2022.

Based on the Kepmenkominfo No. 7, all rights and obligations previously belonging to PT Hutchison 3 Indonesia will now be the rights and obligations of PT Indosat Tbk, including but not limited to the rights and obligations of rights for telecommunication numbering; the obligations for network and service developments; the obligations to provide network services to customers; the obligations to pay non-tax fiscal income in the form of telecom service rights fees, and radio frequency rights fees; and USO (universal service obligation) fulfillments. In addition, PT Hutchison 3 Indonesia's data communication system service license will also be transferred to PT Indosat Tbk's data communication system service license.

30. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Rincian beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Penyusutan menara (Catatan 10)	840.418	628.174
Penyusutan aset hak guna (Catatan 12)	418.829	389.449
Perbaikan dan pemeliharaan	296.954	259.153
Amortisasi perizinan	66.971	53.934
Keamanan	53.244	50.768
Asuransi	34.958	30.534
Listrik	28.410	27.557
Penyusutan menara bergerak (Catatan 10)	13.594	13.129
Lainnya	29.947	20.082
<b>Jumlah</b>	<b>1.783.325</b>	<b>1.472.780</b>

Pos lainnya terutama merupakan biaya perjalanan dinas, pajak bumi dan bangunan serta iuran dan donasi.

Tidak terdapat pihak penjual/ pemasok yang memiliki nilai transaksi atau nilai pembelian yang melebihi 10% dari pendapatan.

30. COST OF REVENUE

Details of cost of revenue for the years ended 31 December 2022 and 2021 are as follows:

Depreciation of tower (Note 10)
Depreciation of right of use assets (Note 12)
Repairs and maintenance
Amortization of licences
Security
Insurance
Electricity
Depreciation of transportable towers (Note 10)
Others
<b>Total</b>

Other items mainly represent travel duty, taxes of land and building, dues and donations.

There is no subcontractor/ supplier that has a transaction value exceeding 10% of the revenue.

Ekshibit E/124

Exhibit E/124

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

31. BEBAN USAHA

Rincian beban usaha untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Gaji dan tunjangan	290.198	264.281
Penyusutan (Catatan 10)	34.242	32.671
Beban kantor	26.531	22.924
Jasa profesional	23.066	16.537
Sponsor dan representasi	15.782	13.477
Beban manfaat karyawan (Catatan 32)	12.070	-
Sewa kantor	11.403	13.198
Donasi dan tanggung jawab sosial	10.224	11.498
Perjalanan dinas	6.554	2.809
Transportasi	5.850	5.514
Penyusutan aset hak guna (Catatan 12)	5.390	5.541
Telekomunikasi	491	478
Lainnya	16.772	11.961
<b>Jumlah</b>	<b>458.573</b>	<b>400.889</b>

Pos lainnya terutama merupakan biaya kegiatan kantor serta biaya pendidikan dan pelatihan bagi karyawan.

Donasi dan tanggung jawab sosial merupakan kontribusi Perusahaan untuk membantu masyarakat dan Pemerintah dalam menghadapi kondisi pandemi virus Covid-19, penanggulangan bencana, serta meningkatkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah operasional Perusahaan.

32. CADANGAN IMBALAN PASCA-KERJA

Perusahaan dan entitas anak menyiapkan pencadangan imbalan untuk karyawannya sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perusahaan dan entitas anak melakukan pendanaan untuk program ini.

Perhitungan cadangan imbalan pasca-kerja pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Riana & Rekan dan Kantor Konsultan Aktuaria Riana & Rekan dan Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto, aktuaris independen, sesuai laporannya tanggal 18 Januari 2023 dan 11 Februari dan 2 Februari 2022.

31. OPERATING EXPENSES

Details of operating expenses for the year ended 31 December 2022 and 2021 are as follows:

	2022	2021
		Salaries, wages and allowance
		Depreciation (Note 10)
		Office expenses
		Professional fees
		Sponsorship and representation
		Employee benefits expense (Note 32)
		Office rent
		Donation and social responsibility
		Travel duty
		Transportation
		Depreciation of right of use assets (Note 12)
		Telecommunication
		Others
<b>Total</b>	<b>458.573</b>	<b>400.889</b>

Other items mainly represent costs for office activities and education and training costs for employees.

Donations and social responsibility are the Company's contributions to support the community and the Government in dealing with the conditions of the Covid-19 virus pandemic, disaster management, and increasing social and economic activities for the community in the Company's operational areas.

32. PROVISION FOR POST-EMPLOYMENT BENEFITS

The Company and subsidiaries provide benefits for its employees in accordance with Labor Law No. 11/2020. The Company and subsidiaries sets up fund for this program.

The calculation of provision for post-employment benefits as of 31 December 2022 and 2021 are based on calculations performed independent actuary, Actuarial Consultant Office Riana & Rekan and Actuarial Consultant Office Riana & Rekan and Actuarial Consultant Office Agus Susanto according to its report dated 18 January 2023 and 11 February and 2 February 2022.

Ekshibit E/125

Exhibit E/125

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

32. CADANGAN IMBALAN PASCA-KERJA (Lanjutan)

32. PROVISION FOR POST-EMPLOYMENT BENEFITS  
(Continued)

Asumsi signifikan yang digunakan:

Major assumptions are used as follows:

Tingkat diskonto per tahun	:	7,20% (2021: 7,06%)	:	Discount rate per annum
Tingkat kenaikan gaji per tahun	:	9,07% (2021: 8,85%)	:	Wages and salaries increase per annum
Tingkat kematian	:	100% TMI4	:	Mortality rate
Tingkat cacat	:	5% TMI4	:	Disability rate
Tingkat pengunduran diri	:	8,00% per tahun sampai dengan usia 30 tahun, kemudian menurun secara linear hingga 0% pada usia pension normal/ 8% p.a. until age 30, then decrease linearly into 0% at normal retirement age	:	Resignation rate
Usia pensiun normal	:	60 tahun untuk/ for Grade VII 55 tahun untuk/ for Grade I-VI	:	Normal retirement age
Metode	:	Projected Unit Credit	:	Method

Rekonsiliasi untuk mutasi cadangan imbalan pasca-kerja  
adalah sebagai berikut:

Reconciliation of mutation of provision for post-  
employment benefits are as follows:

	2022	2021	
Saldo awal	12.948	24.850	Beginning balance
Biaya jasa kini	16.034	15.056	Current service cost
Biaya jasa lalu	1.747 (	22.841)	Past service cost
Beban bunga bersih	3.669 (	1.166)	Net interest cost
Penyesuaian metode atribusi	( 7.816)	-	Attribution method adjustment
Pengukuran kembali atas imbalan pasti	( 1.564)	( 990)	Remeasurement on the net defined benefit
Diakui pada laba rugi (Catatan 31)	12.070 (	9.941)	Charged to profit or loss (Note 31)
Pengukuran kembali atas imbal hasil atas aset program	5.393		Remeasurements on return on plan asset
Perubahan dampak batas aset	( 2.313)		Change in the effect of the asset ceiling
Keuntungan (kerugian) aktuarial	( 3.728)	19.662	Actuarial gain (loss)
Diakui pada penghasilan komprehensif lain	( 648)	19.662	Charged to other comprehensive income
luran perusahaan ke aset program	( 8.836)	( 17.854)	Employer contribution to plan assets
Pembayaran imbalan (di luar aset program)	( 4.008)	( 2.428)	Benefits paid (not plan assets)
Penyesuaian	790 (	1.341)	adjustment
Saldo akhir	12.316	12.948	Ending balance

Program imbalan pasca-kerja

Post-employment benefit program

Perusahaan dan entitas anak tertentu juga melakukan  
pendanaan untuk program ini. Dana tersebut dikelola dalam  
kontrak asuransi dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia.

The Company and certain subsidiaries set-up fund for this  
program. The fund is managed in insurance contract with  
PT Asuransi Allianz Life Indonesia.

Ekshibit E/126

Exhibit E/126

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

32. CADANGAN IMBALAN PASCA-KERJA (Lanjutan)

32. PROVISION FOR POST-EMPLOYMENT BENEFITS  
(Continued)

Program imbalan pasca-kerja (Lanjutan)

Post-employment benefit program (Continued)

Pembayaran berikut merupakan kontribusi yang diharapkan atas nilai kini dari kewajiban imbalan di tahun-tahun mendatang:

The following payments are expected contributions to present value of benefit obligation in future years:

	2022	2021	
Kurang dari 1 tahun	17.139	2.930	Less than 1 year
Antara tahun ke-1 sampai tahun ke-2	3.940	18.057	Between Year 1 - Year 2
Antara tahun ke-2 sampai tahun ke-5	32.977	27.812	Between Year 2 - Year 5
Antara tahun ke-5 sampai tahun ke-10	96.809	119.394	Between Year 5 - Year 10
Setelah tahun ke-10	418.159	434.876	Over Year 10

Analisis sensitivitas pada asumsi-asumsi aktuarial utama

Sensitivity analysis on significant actuarial assumptions

Asumsi aktuarial/ Actuarial assumption	Perubahan/ Change	Saldo akhir PVDBO/ PVDBO ending	
		Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease
<b>31 Desember/ December 2022</b>			
Tingkat diskonto/ Discount rate	(+/- 1%)	130.835	133.733
Tingkat kenaikan gaji/ Salary increase rate	(+/- 1%)	133.921	116.947

Asumsi aktuarial/ Actuarial assumption	Perubahan/ Change	Saldo akhir PVDBO/ PVDBO ending	
		Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease
<b>31 Desember/ December 2021</b>			
Tingkat diskonto/ Discount rate	(+/- 1%)	113.676	132.789
Tingkat kenaikan gaji/ Salary increase rate	(+/- 1%)	132.928	113.379

Program imbalan jangka panjang lainnya

Other long-term employee benefit program

Perusahaan dan entitas anak tertentu memberikan imbalan jangka panjang lainnya dalam bentuk cuti besar selama 22 hari kerja dan tunjangan cuti besar sejumlah satu bulan gaji pokok kepada karyawan staf permanen yang mempunyai masa kerja 5 tahun dan kelipatannya.

The Company and certain subsidiaries provide other long-term employee benefit in form of long leave amounting to 22 workdays and long leaves allowance amounting to one month basic salary for permanent staff employee with 5 years of service and its multiplication.

33. BEBAN KEUANGAN - LAINNYA

33. FINANCIAL EXPENSES - OTHERS

Rincian beban keuangan - lainnya untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Details of financial expenses - others for the year ended 31 December 2022 and 2021 are as follows:

	2022	2021	
Amortisasi biaya surat utang (Catatan 22)	67.102	60.314	Amortization of cost of notes (Note 22)
Amortisasi biaya pinjaman jangka panjang - pihak ketiga (Catatan 21)	38.295	98.837	Amortization of cost of long term loan - third parties (Note 21)
Beban bunga liabilitas sewa aset hak guna (Catatan 23)	24.383	51.685	Interest expenses on right of use assets lease liabilities (Note 23)
<b>Jumlah</b>	<b>129.780</b>	<b>210.836</b>	<b>Total</b>

Ekshibit E/127

Exhibit E/127

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

34. DISTRIBUSI SALDO LABA

Tahun buku 2021

Pada tanggal 23 Mei 2022, Perusahaan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang hasilnya antara lain menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2021 dengan pencapaian laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk sebesar Rp 1.548.975.

Dari laba bersih tersebut, sebesar Rp 815.652 atau 52,7% dari laba bersih tahun 2021 ditetapkan sebagai dividen tunai tahun buku 2021, setara dengan Rp 36 (tiga puluh enam Rupiah) per saham. Perusahaan telah membayar dividen tersebut pada tanggal 22 Juni 2022.

Kemudian sebesar Rp 500 dari laba bersih tahun 2021 dijadikan sebagai cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Peseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.

Tahun buku 2020

Pada tanggal 28 Mei 2021, Perusahaan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang hasilnya antara lain menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2020 dengan pencapaian laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk (laba bersih) sebesar Rp 1.536.586.

Dari laba bersih tersebut, sebesar Rp 500 dari laba bersih tahun 2020 dijadikan sebagai cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Peseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.

35. GOODWILL

Sehubungan dengan penerapan PSAK 48 (Revisi 2009) "Penurunan Nilai Aset", Perusahaan dan entitas anak melakukan uji penurunan nilai wajar atas goodwill.

Nilai wajar goodwill pada 31 Desember 2022 ditentukan berdasarkan penilaian dari penilai independen KJPP Yufrizal, Deny Kamal dan Rekan dalam laporannya pada tanggal 27 Maret 2023, dan telah sesuai dengan peraturan No. VIII.C.5 mengenai pedoman penilaian dan penyajian laporan penilaian aset tak berwujud.

Melakukan kajian/ analisis atas nilai terpulihkan dengan tanggal kajian/ analisis 31 Desember 2022 dengan terminologi *fair value - value in use* dan *fair value - fair value less costs of disposal* yang mengacu pada PSAK 48 atas penyertaan (investasi).

Asumsi utama yang digunakan oleh Penilai Independen adalah sebagai berikut:

- Sewa menara yang akan jatuh tempo akan diperpanjang kembali selama tahun sewa yang sama;
- Kenaikan harga sewa menara pada saat jatuh tempo adalah sebesar 5,00%;

34. DISTRIBUTION OF RETAINED EARNINGS

Year 2021

On 23 May 2022, the Company held the Annual General Shareholders Meeting (AGMS). The result of the AGMS, among others, was to approve and endorse the financial statements for the year 2021 with achievement of net income attributable to common shareholders of the Parent Company amounting to Rp 1,548,975.

Rp 815,652 or 52.7% of the net income in 2021 is determined as cash dividend for the financial year 2021, which is equivalent to Rp 36 (thirty six Rupiah) per share. The company has paid the dividend on 22 June 2022.

In addition, Rp 500 of net income of year 2021 was provided for statutory reserves to fulfill the article 70 of the Limited Liability Company Law No. 40 of 2007.

Year 2020

On 28 May 2021, the Company held the Annual General Shareholders Meeting (AGMS). The result of the AGMS, among others, was to approve and endorse the financial statements for the year 2020 with achievement of net income attributable to common shareholders of the Parent Company (net income) amounting to Rp 1,536,586.

From the net income, amounting to Rp 500 of net income of year 2020 was provided for statutory reserves to fulfill the article 70 of the Limited Liability Company Law No. 40 of 2007.

35. GOODWILL

Regarding the implementation of PSAK 48 (Revised 2009) "Impairment of Assets", the Company and subsidiaries have done an impairment test of goodwill.

The fair value of goodwill as of 31 December 2022 was determined based on a valuation from KJPP Yufrizal, Deny Kamal and Partners in their report dated 27 March 2023, respectively, and was in accordance with No. VIII.C.5 guidelines regarding assessment and presentation of intangible asset valuation.

Conducted a review/analysis of the recoverable amount using a review/analysis dated 31 December 2022 using the terminology of *fair value - value in use* and *fair value - fair value less costs to sell* referring to PSAK 48 on investments.

The Independent Appraiser uses the following key assumptions:

- Rent of towers will be renewed for the same rental year;
- Price of renewed rent of towers increases by 5.00%;

Ekshibit E/128

Exhibit E/128

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

35. **GOODWILL** (Lanjutan)

- c) Tingkat inflasi sebesar 3,00% per tahun;  
d) Tingkat diskonto sebesar 9,83%.

Hal ini telah sesuai dengan peraturan No. VIII.C.5 mengenai pedoman penilaian dan penyajian laporan penilaian aset tak berwujud di pasar modal.

Efektif tanggal 8 Desember 2022, PT United Towerindo memperoleh 80% kepemilikan saham di PT Unicom Muda Utama. *Goodwill* yang timbul atas transaksi ini adalah sebesar Rp 9.179. Nilai tercatat *goodwill* pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 9.179 dan nihil.

Pada bulan September 2018, Perusahaan memperoleh 19,80% kepemilikan saham di PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk (GHON). *Goodwill* yang timbul atas transaksi ini adalah sebesar Rp 31.444. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 berdasarkan perhitungan penilai independen, tidak terdapat penurunan nilai *goodwill*. Nilai tercatat *goodwill* pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 31.444.

Pada bulan Oktober 2016, PT Tower Bersama memperoleh 70% kepemilikan saham di PT Jaringan Pintar Indonesia. *Goodwill* yang timbul atas transaksi ini adalah sebesar Rp 607. Nilai tercatat *goodwill* pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar nihil.

Pada bulan Agustus 2011, Perusahaan melalui entitas anak memperoleh 100% kepemilikan saham di PT Mitrayasa Sarana Informasi.

35. **GOODWILL** (Continued)

- c) Inflation is 3.00% per year;  
d) Discount rate is amounted to 9.83%.

It incorporates the regulation of No. VIII.C.5 regarding the guidelines of appraisal and presentation of intangible assets valuation report to capitals market.

Effective on 8 December 2022, PT United Towerindo acquired 80% shares ownership in PT Unicom Muda Utama. *Goodwill* arising from this transaction was Rp 9,179. The carrying value of goodwill as of 31 December 2022 and 2021 amounted to Rp 9,179 and nil.

In September 2018, The Company acquired 19.80% shares ownership in PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk (GHON). *Goodwill* arising from the transaction was Rp 31,444. For the year ended 31 December 2022, based on the independent appraiser's calculation, there was no impairment of goodwill. The carrying amount of goodwill as of 31 December 2022 and 2021 was Rp 31,444, respectively.

In October 2016, PT Tower Bersama acquired 70% shares ownership in PT Jaringan Pintar Indonesia. *Goodwill* arising from this transaction was Rp 607. The carrying value of goodwill as of 31 December 2022 and 2021 amounted to nil, respectively.

In August 2011, the Company through its subsidiaries acquired 100% shares ownership in PT Mitrayasa Sarana Informasi.

Posisi Keuangan	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying value	Financial Position
ASET LANCAR	351.152	351.152	CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR	353.940	353.940	NON-CURRENT ASSETS
JUMLAH ASET	705.092	705.092	TOTAL ASSETS
LIABILITAS JANGKA PENDEK	395.712	395.712	CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG	333.474	333.474	NON-CURRENT LIABILITIES
JUMLAH LIABILITAS	729.186	729.186	TOTAL LIABILITIES
NILAI WAJAR DARI ASET BERSIH YANG DAPAT DIIDENTIFIKASI	24.094	24.094	FAIR VALUE OF IDENTIFIABLE NET ASSETS
HARGA PEMBELIAN SAHAM		200.000	SHARE PURCHASE PRICE
JUMLAH		224.094	TOTAL
ASET TIDAK BERWUJUD YANG DICATAT SEBAGAI ASET LAINNYA		5.474	INTANGIBLE ASSET THAT RECORDED AS OTHER ASSETS
<b>GOODWILL</b>		<b>218.620</b>	<b>GOODWILL</b>



Ekshibit E/129

Exhibit E/129

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

35. **GOODWILL** (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, berdasarkan perhitungan penilai independen, tidak terdapat penurunan nilai *goodwill*. Nilai tercatat *goodwill* pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 173.613.

Pada bulan April 2010, PT Metric Solusi Integrasi memperoleh 70% kepemilikan saham di PT Solu Sindo Kreasi Pratama. *Goodwill* yang timbul atas transaksi ini adalah sebesar Rp 133.840. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, berdasarkan perhitungan penilai independen, tidak terdapat penurunan nilai *goodwill*. Nilai tercatat *goodwill* pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 126.347.

Pada bulan Juni 2008, PT Prima Media Selaras (PMS) menerbitkan hak memesan efek terlebih dahulu (*subscription rights* (SR)) kepada pemegang saham pendiri. SR tersebut memberikan hak kepada pemiliknya untuk dapat memesan terlebih dahulu saham-saham baru yang akan diterbitkan PMS sebanyak 60.000 (nilai penuh) saham.

Jika SR tersebut dilaksanakan, maka kepemilikan PT Tower Bersama (TB) pada PMS akan terdilusi hingga hanya menjadi sebesar 20%. Untuk mempertahankan kepemilikannya tersebut pada bulan Agustus 2009, TB telah membeli SR tersebut dari HKDN Investment Ltd. sebagai pemilik akhir, sebesar US\$ 25.900.000. Nilai akuisisi dari pembelian SR tersebut serta biaya transaksi lainnya adalah sebesar Rp 255.391 dicatat sebagai *goodwill*.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, berdasarkan perhitungan penilai independen, tidak terdapat penurunan nilai *goodwill*. Nilai tercatat *goodwill* pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 49.785.

35. **GOODWILL** (Continued)

For the year ended 31 December 2022, based on independent appraisal calculations, there was no impairment of *goodwill*. The carrying amount of *goodwill* as of 31 December 2022 and 2021 was Rp 173,613, respectively.

In April 2010, PT Metric Solusi Integrasi acquired a 70% ownership in PT Solu Sindo Kreasi Pratama. *Goodwill* arising from this transaction amounted to Rp 133,840. For the year ended 31 December 2022, based on independent appraisal calculations, there was no impairment in *goodwill*. The carrying amount of *goodwill* as of 31 December 2022 and 2021 amounted to Rp 126,347, respectively.

In June 2008, PT Prima Media Selaras (PMS) issued *subscription rights* (SR) to its former shareholders, providing rights to subscribe 60,000 (full amount) new PMS shares.

If SR is implemented, then the ownership PT Tower Bersama (TB) in the PMS will be diluted to only 20%. To maintain the ownership in August 2009, TB has purchased the SR of HKDN Investment Ltd. as the final owner, for US\$ 25,900,000. Acquisition value of the SR purchase and other transaction costs are Rp 255,391 was recorded as *goodwill*.

For the year ended 31 December 2022, based on the calculation of independent appraisal, there was no impairment of *goodwill*. The carrying amount of *goodwill* as of 31 December 2022 and 2021 was Rp 49,785, respectively.

31 Desember 2022	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additional	Saldo akhir/ Ending balance	31 December 2022
PT Metric Solusi Integrasi	178.430	-	178.430	PT Metric Solusi Integrasi
PT Tower Bersama	171.315	-	171.315	PT Tower Bersama
PT Tower Bersama				PT Tower Bersama
Infrastructure Tbk	31.444	-	31.444	Infrastructure Tbk
PT United Towerindo	-	9.179	9.179	PT United Towerindo
<b>Jumlah</b>	<b>381.189</b>	<b>9.179</b>	<b>390.368</b>	<b>Total</b>

Ekshibit E/130

Exhibit E/130

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

35. GOODWILL (Lanjutan)

35. GOODWILL (Continued)

31 Desember 2021	Saldo awal/ Beginning balance	Penurunan/ Impairment	Saldo akhir/ Ending balance	31 December 2021
PT Metric Solusi Integrasi	178.430	-	178.430	PT Metric Solusi Integrasi
PT Tower Bersama	171.315	-	171.315	PT Tower Bersama
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	31.444	-	31.444	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
<b>Jumlah</b>	<b>381.189</b>	<b>-</b>	<b>381.189</b>	<b>Total</b>

36. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

36. NON-CONTROLLING INTEREST

31 Desember 2022/ 31 December 2022

Entitas anak/ Subsidiaries	Saldo awal/ Beginning balance	Porsi non-pengendali atas laba entitas anak/ Non-controlling portion on net profit of subsidiaries		Surplus revaluasi/ Revaluation Surplus	Porsi non-pengendali dari instrumen derivatif/ Non-controlling portion from derivative instrument	Porsi non-pengendali dari selisih transaksi dengan pihak non-pengendali/ Non-controlling portion from difference arising from transaction with non-controlling interest	Porsi non-pengendali dari akuisisi entitas anak/ Non-controlling portion from acquisition of subsidiary	Porsi non-pengendali dari pembagian deviden tunai entitas anak/ Non-controlling portion from cash dividends subsidiaries	Porsi non-pengendali dari keuntungan aktuarial/ Non-controlling portion from actuarial gain	Saldo akhir/ Ending balance
		Non-controlling portion on net profit of subsidiaries	Surplus revaluasi/ Revaluation Surplus							
PT United Towerindo	28.098	820	(380)	-	-	-	27.401	-	1	55.940
PT Tower Bersama	31.539	(2.519)	916	-	(96)	-	-	-	-	29.840
PT Tower One	(97)	15	-	-	-	-	-	-	(82)	(82)
PT Metric Solusi Integrasi	(139.153)	60	(3.450)	266	-	-	-	(3)	(142.280)	
PT Telenet Internusa	1.197	127	32	-	-	-	-	-	-	1.356
PT Triaka Bersama	1.334	-	-	-	-	-	-	-	-	1.334
PT Solusi Menara Indonesia	106.392	553	(449)	16	-	-	-	-	-	106.512
PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk	193.489	7.825	12.724	-	-	-	-	(11)	-	214.027
PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk	293.658	44.981	12.961	-	-	-	(27.266)	(33)	-	324.301
<b>Jumlah/ Total</b>	<b>516.457</b>	<b>51.862</b>	<b>22.354</b>	<b>282</b>	<b>(96)</b>	<b>27.401</b>	<b>(27.266)</b>	<b>(46)</b>	<b>590.948</b>	

31 Desember 2021/ 31 December 2021

Entitas anak/ Subsidiaries	Saldo awal/ Beginning balance	Porsi non-pengendali atas laba entitas anak/ Non-controlling portion on net profit of subsidiaries		Surplus revaluasi/ Revaluation Surplus	Porsi non-pengendali dari instrumen derivatif/ Non-controlling portion from derivative instrument	Porsi non-pengendali dari aset pengampunan pajak/ Non-controlling portion from tax amnesty assets	Porsi non-pengendali dari pembagian deviden tunai entitas anak/ Non-controlling portion from cash dividends subsidiaries	Porsi non-pengendali dari keuntungan aktuarial/ Non-controlling portion from actuarial gain	Saldo akhir/ Ending balance
		Non-controlling portion on net profit of subsidiaries	Surplus revaluasi/ Revaluation Surplus						
PT United Towerindo	25.494	1.036	1.652	-	-	-	-	(84)	28.098
PT Tower Bersama	146.805	(669)	207	-	(114.804)	-	-	-	31.539
PT Tower One	(111)	14	-	-	-	-	-	(97)	(97)
PT Metric Solusi Integrasi	(142.208)	-	3.302	366	-	(613)	-	(139.153)	
PT Telenet Internusa	1.030	131	39	-	-	-	-	(3)	1.197
PT Triaka Bersama	1.334	-	-	-	-	-	-	-	1.334
PT Solusi Menara Indonesia	107.216	172	(1.016)	20	-	-	-	-	106.392
PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk	185.322	7.143	1.047	-	-	-	(23)	-	193.489
PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk	269.274	44.551	(6.627)	-	-	(13.633)	93	-	293.658
<b>Jumlah/ Total</b>	<b>594.156</b>	<b>52.378</b>	<b>(1.396)</b>	<b>386</b>	<b>(114.804)</b>	<b>(14.246)</b>	<b>(17)</b>	<b>516.457</b>	

Ekshibit E/131

Exhibit E/131

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

37. LABA BERSIH PER SAHAM DASAR YANG DAPAT  
DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM BIASA  
ENTITAS INDUK

Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk yang digunakan untuk perhitungan laba per saham dasar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah Rp 1.637.579 dan Rp 1.548.975. Jumlah rata-rata tertimbang saham (dalam nilai penuh) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021, masing-masing sebanyak 22.298.275.783 saham dan 20.860.674.895 saham setelah dikurangi dengan saham treasury (Catatan 25).

37. BASIC EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO COMMON  
SHAREHOLDERS OF THE PARENT COMPANY

Net income attributable to common shareholders of Parent Company which are used to calculate the basic earnings per share for the years ended 31 December 2022 and 2021 were Rp 1,637,579 and Rp 1,548,975, respectively. Total weighted average shares issued for the years ended 31 December 2022 and 2021 are 22,298,275,783 shares and 20,860,674,895 share, respectively after deducting the treasury stock (Note 25).

38. PERJANJIAN PENTING

a. PERJANJIAN SEWA MENARA BASE TRANSCEIVER  
STATION (BTS) DAN SISTEM TELEKOMUNIKASI  
DALAM GEDUNG

Entitas anak (PT Tower Bersama, PT Telenet Internusa, PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Permata Karya Perdana, PT United Towerindo, PT Batavia Towerindo, PT Bali Telekom, PT Prima Media Selaras, PT Solusi Menara Indonesia, PT Solu Sindo Kreasi Pratama, PT Mitrayasa Sarana Informasi, PT Towerindo Konvergensi, dan PT Triaka Bersama) memiliki perjanjian sewa dengan para operator sebagai berikut:

1. PT Hutchison 3 Indonesia

Pada berbagai tanggal antara tahun 2007 sampai dengan 31 Desember 2022, entitas anak dan Hutchison menandatangani Perjanjian Sewa Induk ("MLA"), mengenai sewa pemanfaatan lokasi yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan komunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 12 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 tahun.

2. PT XL Axiata Tbk (XL)

Pada berbagai tanggal antara tahun 2007 sampai dengan 31 Desember 2022, entitas anak dan XL menandatangani Perjanjian Sewa Induk ("MLA"), sebagaimana telah diubah beberapa kali dalam bentuk amendemen, mengenai sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun, dan dapat diperpanjang dengan menginformasikan secara tertulis kepada entitas anak. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal sertifikat siap instalasi ("RFI") di masing-masing lokasi.

38. SIGNIFICANT AGREEMENTS

a. RENTAL AGREEMENT TOWER BASE TRANSCEIVER  
STATION (BTS) AND TELECOMMUNICATIONS  
SYSTEMS IN BUILDINGS

Subsidiaries (PT Tower Bersama, PT Telenet Internusa, PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Permata Karya Perdana, PT United Towerindo, PT Batavia Towerindo, PT Bali Telekom, PT Prima Media Selaras, PT Solusi Menara Indonesia, PT Solu Sindo Kreasi Pratama, PT Mitrayasa Sarana Informasi, PT Towerindo Konvergensi, and PT Triaka Bersama) have lease agreements with operators as follows:

1. PT Hutchison 3 Indonesia

On a number of dates in and between 2007 to 31 Desember 2022, the subsidiaries and Hutchison signed Master Lease Agreements ("MLA") to lease telecommunication infrastructure space for installation of telecommunication equipment. The agreements are for lease term of 12 years and can be extended for 6 years.

2. PT XL Axiata Tbk (XL)

On a number of dates in and between 2007 to 31 Desember 2022, the subsidiaries and XL signed the Master Lease Agreement ("MLA"), as amended several times, regarding lease of telecommunication infrastructure space for installation of telecommunication equipment. The lease year is for 10 years and can be extended by agreement. The lease term start from the date of installation ("RFI") on each location.

Ekshibit E/132

Exhibit E/132

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

38. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

a. PERJANJIAN SEWA MENARA BASE TRANSCEIVER  
STATION (BTS) DAN SISTEM TELEKOMUNIKASI  
DALAM GEDUNG (Lanjutan)

3. PT Indosat Tbk (Indosat)

Pada berbagai tanggal antara tahun 2008 sampai dengan 31 Desember 2022, entitas anak dan Indosat telah menandatangani beberapa Perjanjian Sewa Induk ("MLA"), mengenai sewa pemanfaatan lokasi yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 10 tahun, kecuali apabila Indosat tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada entitas anak. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal sertifikat siap instalasi ("RFI") di masing-masing lokasi.

4. PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)

Pada berbagai tanggal di tahun 2004 sampai dengan 31 Desember 2022, entitas anak telah menandatangani sejumlah Perjanjian Sewa Induk ("MLA") dengan Telkomsel mengenai pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian adalah 10 tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Penggunaan Site (BAPS) untuk masing-masing lokasi menara.

5. PT Smartfren Telecom Tbk (Smartfren)

Pada berbagai tanggal di tahun 2005 sampai dengan 31 Desember 2022, entitas anak dan Smartfren, telah menandatangani beberapa Perjanjian Sewa Induk ("MLA"), sebagaimana telah beberapa kali diubah dalam bentuk amendemen, mengenai pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu awal sewa adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dari masing-masing pihak.

Jumlah estimasi pembayaran sewa minimum di masa depan untuk perjanjian-perjanjian sewa induk di atas adalah sebagai berikut:

38. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

a. RENTAL AGREEMENT TOWER BASE TRANSCEIVER  
STATION (BTS) AND TELECOMMUNICATIONS  
SYSTEMS IN BUILDINGS (Continued)

3. PT Indosat Tbk (Indosat)

On a number of dates in and between 2008 to 31 December 2022, the subsidiaries and Indosat signed a number of Master Lease Agreements ("MLA") regarding lease of telecommunication infrastructure space for installation of telecommunication equipment. The lease term is for 10 years and can be extended for another 10 years, unless Indosat does not intend to extend by informing the subsidiaries in writing. The lease year starts from the date of installation ("RFI") on each location.

4. PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)

On a number of dates in and between 2004 to 31 December 2022, the subsidiaries and Telkomsel signed a number of Master Lease Agreement ("MLA") regarding lease telecommunication infrastructure space for installation of telecommunication equipment. The lease term is for 10 years, starting from when the Minutes of Site Utilisation (BAPS) has been signed.

5. PT Smartfren Telecom Tbk (Smartfren)

On a number of dates in and between 2005 to 31 December 2022, the subsidiaries and Smartfren signed a number of Master Lease Agreements ("MLA"), as amended several times, regarding lease of telecommunication infrastructure space for installation of telecommunication equipment. The lease term is for 10 years and can be extended by agreement.

Total estimated future minimum lease payments for the above master lease agreements are as follows:

Ekshibit E/133

Exhibit E/133

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

38. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

a. PERJANJIAN SEWA MENARA BASE TRANSCEIVER  
STATION (BTS) DAN SISTEM TELEKOMUNIKASI  
DALAM GEDUNG (Lanjutan)

	2022	2021
Kurang dari satu tahun	5.575.230	5.706.252
Dari satu tahun sampai dengan lima tahun	16.394.733	15.352.438
Lebih dari lima tahun	9.252.573	8.473.659
<b>Jumlah</b>	<b>31.222.536</b>	<b>29.532.349</b>

b. Pembelian 3.000 menara telekomunikasi dari PT  
Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST)

Pada tanggal 21 Desember 2020, PT Tower Bersama (TB), entitas anak, dan IBST telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Aset Bersyarat untuk pembelian sebanyak-banyaknya 3.000 menara milik IBST, dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 3.975.000. Transaksi ini telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 30 Mei 2021. Pada tanggal 7 April 2021, transaksi penjualan 3.000 menara telekomunikasi milik IBST tersebut telah diselesaikan melalui penandatanganan Akta Pengalihan dan Akta Perjanjian Pengalihan dan Pengambilalihan.

38. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

a. RENTAL AGREEMENT TOWER BASE TRANSCEIVER  
STATION (BTS) AND TELECOMMUNICATIONS  
SYSTEMS IN BUILDINGS (Continued)

Less than one year  
From one year to five years  
More than five years

Total

b. Purchase of 3,000 telecommunication towers from  
PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST)

On 21 December 2020, PT Tower Bersama, a subsidiary, and IBST have entered into a Conditional Asset Sale and Purchase Agreement for the purchase of up to 3,000 towers owned by IBST, for a consideration price of Rp 3,975,000. The transaction has obtained an approval from the shareholders as confirmed in the result of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated 30 May 2021. On 7 April 2021, the purchase of IBST's 3,000 telecommunication towers has been completed through the signing of Deed of Transfer and Deed of Assignment and Assumption.

39. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan dan entitas anak memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

39. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN  
FOREIGN CURRENCIES

As of 31 December 2022 and 2021, the Company and subsidiaries have assets and liabilities dominated in foreign currency as follows:

	2022		2021		
	US\$ (nilai penuh/ full amount)	Ekuivalen rupiah/ Rupiah equivalent	US\$ (nilai penuh/ full amount)	Ekuivalen rupiah/ Rupiah equivalent	
<b>Aset</b>					<b>Assets</b>
Kas dan setara kas	22.957.282	361.141	16.156.773	230.541	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	-	-	10.509.356	149.958	Account receivables
Aset keuangan derivatif	35.811.519	563.351	63.099.236	900.363	Derivative financial assets
<b>Jumlah aset</b>	<b>58.768.801</b>	<b>924.492</b>	<b>89.765.365</b>	<b>1.280.862</b>	<b>Total assets</b>
<b>Liabilitas</b>					<b>Liabilities</b>
Pinjaman sindikasi	363.331.765	5.715.572	388.000.000	5.536.372	Syndication loan
Surat utang	1.050.000.000	16.517.550	1.050.000.000	14.982.450	Notes
Utang bunga:					Interest payables:
Surat utang	21.385.672	336.418	8.021.318	114.456	Notes
Pinjaman sindikasi	871.909	13.716	2.652.628	37.850	Syndication loan
<b>Jumlah liabilitas</b>	<b>1.435.589.346</b>	<b>22.583.256</b>	<b>1.448.673.946</b>	<b>20.671.128</b>	<b>Total liabilities</b>
<b>Liabilitas - Bersih</b>	<b>1.376.820.545</b>	<b>21.658.764</b>	<b>1.358.908.581</b>	<b>19.390.266</b>	<b>Liabilities - Net</b>

Ekshibit E/134

Exhibit E/134

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

39. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING  
(Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan dan entitas anak telah melakukan lindung nilai untuk pinjaman jangka panjang dan surat utang atas risiko perubahan nilai mata uang asing dan suku bunga pinjaman masing-masing sebesar US\$ 1.495.948.000 dan US\$ 1.637.000.000.

39. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN  
FOREIGN CURRENCIES (Continued)

As of 31 December 2022 and 2021, the Company and subsidiaries have hedged their loan facility and notes of US\$ 1,495,948,000 and US\$ 1,637,000,000, respectively, over the risks from the volatility of foreign exchange and interest rate.

40. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aktivitas Perusahaan dan entitas anak mengandung berbagai macam risiko-risiko keuangan: risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko operasional. Secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan Perusahaan dan entitas anak terfokus untuk menghadapi ketidakpastian pasar uang dan meminimalisasi potensi kerugian yang berdampak pada kinerja keuangan Perusahaan dan entitas anak.

a. Risiko pasar

Perusahaan dan entitas anak menyadari adanya risiko pasar yang terjadi akibat fluktuasi mata uang Rupiah terhadap US Dolar, serta fluktuasi suku bunga pinjaman, sehingga entitas anak melakukan kontrak lindung nilai dengan tujuan melakukan aktivitas lindung nilai atas ketidakpastian fluktuasi suku bunga dan fluktuasi mata uang asing yang timbul dari arus kas pokok dan bunga pinjaman dari entitas anak.

Risiko nilai tukar mata uang asing

Perubahan nilai tukar telah, dan diperkirakan akan terus, memberikan pengaruh terhadap hasil usaha dan arus kas Perusahaan dan entitas anak. Beberapa pinjaman dan belanja modal Perusahaan adalah, dan diperkirakan akan terus, didenominasi dengan mata uang US Dolar. Sebagian besar pendapatan Perusahaan dan entitas anak adalah dalam mata uang Rupiah.

Pada saat ini, Perusahaan dan entitas anak melakukan aktivitas lindung nilai terhadap sebagian besar dari eksposur atas mata uang asing dikarenakan penerimaan dari pendapatan usaha tahunan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pembayaran belanja modal, pinjaman dan bunga dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

Sebagai bagian dari usaha Perusahaan dan entitas anak untuk mengelola eksposur atas mata uang asing, Perusahaan melakukan kontrak berjangka dan kontrak swap valuta asing dengan lembaga-lembaga keuangan internasional.

40. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Company and subsidiaries activities are exposed to few financial risks: market risk, credit risk, liquidity risk and operational risk. The Company and subsidiaries' overall risk management program focuses to mitigate the volatility of financial markets and to minimize potential adverse effects on the Company and subsidiaries' financial performance.

a. Market risk

The Company and subsidiaries are aware of market risk due to foreign exchange fluctuation of Rupiah against US Dollar and interest rate fluctuation, hence, the subsidiaries have entered into hedging contracts to hedge the uncertainty of interest rate foreign exchange fluctuations arising from the loan principal and interest payments from each subsidiaries.

Foreign exchange rate

Changes in exchange rates have affected and may continue to affect the Company's and subsidiaries results of operations and cash flows. Some of the Company's debts and capital expenditures are, and expected will continue to be, denominated in US Dollars. Most of the Company's and subsidiaries revenues are denominated in Rupiah.

Currently, the Company and subsidiaries hedges a large portion of its foreign currency exposure principally because the receipts of annual USD-denominated operating revenue are less than the sum of payments of USD-denominated capital expenditures.

In an effort to manage foreign currency exposure, the Company and subsidiaries enters into forward foreign currency contracts with international financial institutions.

Ekshibit E/135

Exhibit E/135

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

40. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

a. Risiko pasar (Lanjutan)

Risiko nilai tukar mata uang asing (Lanjutan)

Untuk kontrak berjangka, pada umumnya Perusahaan dan entitas anak membayar sejumlah premi dengan jumlah yang tetap.

Sebagai hasil dari kontrak tersebut, Perusahaan dan entitas anak yakin bahwa Perusahaan dan entitas anak telah mengurangi beberapa risiko nilai tukar mata uang asing, meskipun aktivitas lindung nilai yang dilakukan oleh Perusahaan dan entitas anak tidak mencakup seluruh eksposur mata uang asing dan terdapat kemungkinan bahwa perjanjian pengganti atas aktivitas lindung nilai tersebut tidak tersedia pada saat kontrak lindung nilai tersebut telah selesai.

Pada tanggal 31 Desember 2022, jika Rupiah menguat 1% terhadap Dolar Amerika Serikat namun seluruh variabel lainnya tetap, maka laba tahun berjalan lebih rendah (tinggi) sebesar (Rp 18.253) (31 Desember 2021: Rp 2.144) terutama yang timbul sebagai akibat keuntungan selisih kurs atas penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

Jika bagian utang berbunga dalam valuta asing (Catatan 21, 22 dan 23b) yang telah dilindung nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, maka saldo utang berbunga pada 31 Desember 2022 dan 2021 setelah dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi masing-masing adalah sebagai berikut:

40. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Market risk (Continued)

Foreign exchange rate (Continued)

For the forward foreign currency contracts, the Company and subsidiaries typically pays a fixed rate premium.

As a result of these contracts, the Company and subsidiaries believe that the Company and subsidiaries have reduced some of the risk of foreign currency exchange rates, although hedging activity undertaken by the Company and subsidiaries do not include all foreign currency exposure and there is the possibility that a replacement agreement over the hedges are not available at the time of the hedge contract has been completed.

On 31 December 2022, if the Rupiah had strengthened by 1% against the US Dollar with all other variables held constant, profit for the current year would have been (Rp 18,253) (31 December 2021: Rp 2,144) lower (higher), mainly as a result of foreign exchange gains on translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currency.

If the hedged portion of foreign-currency interest-bearing-debt (Notes 21, 22 and 23b) is valued using it's hedge rate, the balance of interest-bearing debt on 31 December 2022 and 2021, net of unamortized borrowing costs are as follow:

	2022		2021		
	Saldo pinjaman/ The balance of loans		Saldo pinjaman/ The balance of loans		
	Kurs		Kurs		
	laporan posisi		laporan posisi		
	keuangan/ Rate of		keuangan/ Rate of		
	consolidated	Kurs	consolidated	Kurs	
	statements of	lindung	statements of	lindung	
	financial	nilai/ Hedging	financial	nilai/ Hedging	
	position date	rate	position date	rate	
Pinjaman sindikasi	4.225.347	4.148.059	5.536.372	5.206.744	Syndication loans
Pinjaman non-sindikasi	256.608	256.608	179.200	179.200	Non-syndication loans
Surat utang	24.725.550	23.251.298	23.313.450	22.563.227	Notes
Liabilitas sewa - kendaraan (Catatan 23b)	17.310	17.310	18.268	18.268	Lease liabilities - vehicle (Note 23b)
Dikurangi :					Less:
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	( 247.943)	( 247.943)	( 282.678)	( 282.678)	Unamortized borrowing costs
<b>Jumlah - Bersih</b>	<b>28.976.872</b>	<b>27.425.332</b>	<b>28.764.612</b>	<b>27.684.761</b>	<b>Total - Net</b>

Ekshibit E/136

Exhibit E/136

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

40. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

a. Risiko pasar (Lanjutan)

**Risiko tingkat suku bunga**

Perusahaan dan entitas anak menghadapi risiko tingkat suku bunga yang disebabkan oleh perubahan tingkat suku bunga pinjaman yang dikenakan bunga. Suku bunga atas pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dapat berfluktuasi sepanjang tahun pinjaman. Kebijakan keuangan memberikan panduan bahwa eksposur tingkat bunga harus diidentifikasi dan diminimalisasi/ dinetralisasi secara tepat waktu.

Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga, Perusahaan dan entitas anak melakukan analisa marjin dan pergerakan suku bunga, dan melakukan transaksi kontrak swap tingkat bunga untuk melindungi suku bunga pinjaman dalam mata uang asing terhadap risiko ketidakpastian tingkat suku bunga.

Profil liabilitas jangka panjang Perusahaan dan entitas anak adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun Pihak ketiga	<u>4.160.396</u>	<u>5.455.157</u>

b. Risiko kredit

Perusahaan memiliki risiko kredit yang terutama berasal dari kas di bank, piutang usaha, piutang lain-lain, piutang derivatif, uang jaminan dan pendapatan yang masih harus diterima.

Entitas anak menghadapi risiko kredit, yaitu ketidakmampuan pelanggan untuk membayar sewa dari menara ataupun pemancar milik entitas anak.

**Kualitas kredit aset keuangan**

Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko kredit yang terkait dengan simpanan di bank dan piutang derivatif dengan memonitor reputasi, peringkat kredit, dan membatasi risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak.

40. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Market risk (Continued)

**Interest rate risk**

The Company and subsidiaries are exposed to interest rate risk through the impact of rate changes on interest-bearing liabilities. Interest rate for short and long-term borrowing can fluctuate over the borrowing year. The treasury policy sets the guideline that the interest rate exposure shall be identified and minimised/ neutralised promptly.

To measure market risk of interest rate fluctuation, the Company and subsidiaries primarily uses interest margin and spread analysis, and enters into interest rate swap contracts to hedge the foreign currency interest loans from interest rate uncertainty.

The Company and subsidiaries long-term liabilities profile are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Long-term loans - net of current portion Third parties	<u>4.160.396</u>	<u>5.455.157</u>

b. Credit risk

The Company is exposed to credit risk primarily from cash in banks, trade receivables, other receivables, derivatives receivables, refundable deposits and accrued revenue.

The subsidiaries are exposed to credit risk from the customer's inability to pay the tower or in building system rental fees owed to the Company's subsidiaries.

**Credit quality of financial assets**

The Company and subsidiaries manages credit risk exposed from its deposits with banks and derivatives receivables by monitoring reputation, credit ratings and limiting the aggregate risk to any individual counterparty.



Ekshibit E/137

Exhibit E/137

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

40. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

40. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Risiko kredit (Lanjutan)

b. Credit risk (Continued)

Kualitas kredit aset keuangan (Lanjutan)

Credit quality of financial assets (Continued)

Terkait dengan kredit yang diberikan kepada pelanggan, Perusahaan dan entitas anak menetapkan syarat dan ketentuan fasilitas kredit kepada pelanggan selular dan pelanggan lainnya, seperti dealer, distributor, operator lainnya terkait interkoneksi dan jelajah internasional. Jaminan tambahan juga disyaratkan dalam kondisi tertentu. Umumnya jaminan yang digunakan adalah bank garansi.

In respect of credit exposures given to customers, the Company and subsidiaries established general terms and conditions of credit facility to subscribers and non-subscribers such as dealers, distributors, interconnection and roaming partners. On a case by case basis, additional security is required. Common type used is bank guarantee.

Penyewaan jasa menara telekomunikasi kepada operator selular dilakukan secara tunai. Kelayakan kredit dan prosedur penagihan ditelaah secara baik dan tepat waktu. Tidak terdapat konsentrasi risiko kredit yang signifikan terkait dengan piutang usaha, hal ini disebabkan keragaman pelanggan.

Rental of telecommunication tower to the operators is required to be settled in cash. Credit worthiness and collection procedures are reviewed properly and promptly. There are no significant concentrations of credit risk with respect to trade receivables due to its diverse customer base.

Manajemen yakin terhadap kemampuan untuk mengendalikan dan menjaga eksposur risiko kredit pada tingkat yang minimal. Eksposur maksimum risiko kredit pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Management is confident in its ability to control and sustain minimal exposure of credit risk. The maximum credit risk exposure at the reporting date is as follows:

	2022	2021	
Kas dan setara kas	966.386	629.125	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - pihak ketiga	270.041	538.715	Trade receivables - third parties
Piutang lain-lain	38.993	75.506	Other receivables
Pendapatan yang masih harus diterima	721.057	500.283	Accrued revenue
Uang jaminan	1.023	1.605	Refundable deposits
<b>Jumlah</b>	<b>1.997.500</b>	<b>1.745.234</b>	<b>Total</b>

c. Risiko likuiditas

c. Liquidity risk

Risiko likuiditas timbul apabila Perusahaan dan entitas anak mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan untuk membiayai modal kerja dan belanja modal. Risiko likuiditas juga dapat timbul akibat ketidaksesuaian atas sumber dana yang dimiliki dengan pembayaran liabilitas yang telah jatuh tempo.

Liquidity risk arises in situations where the Company and subsidiaries have difficulties in obtaining funding sources to fund their working capital and capital expenditure. Liquidity risk also arises in situations where there is a mismatch between the funding sources and any obligations that have matured.

Perusahaan dan entitas anak melakukan mitigasi risiko likuiditas dengan cara menganalisa ketersediaan arus kas dan struktur pendanaan sesuai dengan Pedoman Pengendalian Intern Perusahaan.

The Company and subsidiaries mitigate liquidity risk by analyzing the cashflow availability as well as their funding structure in accordance with the Company's Internal Control Manual.

Ekshibit E/138

Exhibit E/138

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

40. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

40. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

c. Risiko likuiditas (Lanjutan)

c. Liquidity risk (Continued)

Risiko likuiditas timbul dalam keadaan di mana Perusahaan dan entitas anak mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan. Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas dan setara kas. Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko likuiditas dengan mengawasi arus kas aktual dan proyeksi secara terus menerus dan mengawasi profil tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Liquidity risk arises in situations where the Company and subsidiaries has difficulties in obtaining funding. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents. The Company and subsidiaries manages liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows and monitor the maturity profiles of financial assets and liabilities.

Perusahaan dan entitas anak memonitor proyeksi persyaratan likuiditas untuk memastikan bahwa Perusahaan dan entitas anak memiliki saldo kecukupan kas untuk memenuhi keperluan operasi serta menjaga kecukupan dalam fasilitas pinjaman yang belum ditarik sepanjang waktu sehingga Perusahaan dan entitas anak memenuhi semua batas atau persyaratan fasilitas pinjaman.

The Company and subsidiaries monitors forecasts of the liquidity requirements to ensure that it has sufficient cash to meet operational needs while maintaining sufficient headroom on its undrawn committed borrowing facilities at all times so that the Company and subsidiaries does not breach the borrowing limits or covenants on any of its borrowing facilities.

Proyeksi tersebut mempertimbangkan rencana pembiayaan utang Perusahaan dan kepatuhan persyaratan pinjaman. Manajemen percaya bahwa strategi melakukan *cash sweeping* dan *pooling of funds* dari sejumlah rekening bank ke dalam rekening bank operasional utama dapat memastikan pendanaan yang terkonsentrasi dan optimalisasi likuiditas yang lebih baik.

Such forecasting takes into consideration the Company's debt financing plans and covenant compliance. Management believes that the strategy to manage cash sweeping and pooling of funds across accounts in main operating banks can ensure the better concentration of funds and optimisation of liquidity.

Tabel berikut ini menunjukkan analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anak dalam rentang waktu yang menunjukkan jatuh tempo kontraktual untuk semua liabilitas keuangan non-derivatif dan derivatif di mana jatuh tempo kontraktual sangat penting untuk pemahaman terhadap arus kas. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto (termasuk pembayaran pokok dan bunga).

The following table analyse the Company and subsidiaries financial liabilities into relevant maturity groupings based on their contractual maturities for all non-derivative financial liabilities and derivative financial instruments for which the contractual maturities are essential for an understanding of the timing of the cash flows. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows (including principal and interest payment).

	2022					
	Jumlah tercatat/ <i>Carrying amount</i>	Arus kas kontraktual/ <i>Contractual cash flow</i>	Kurang dari setahun/ <i>Less than one year</i>	Antara satu dan tiga tahun/ <i>Between one and three years</i>	Lebih dari tiga tahun/ <i>More than three years</i>	
Utang usaha - pihak ketiga dan utang lain-lain	269.019	269.019	269.019	-	-	Trade payables - third parties and other payable
Beban masih harus dibayar	974.904	974.904	974.904	-	-	Accrued expenses
Liabilitas sewa	659.703	659.702	136.726	186.623	336.353	Lease liabilities
Pinjaman jangka panjang	4.366.834	4.481.955	206.400	1.544.653	2.730.902	Long-term loans
Surat utang	24.592.728	24.725.550	5.969.610	7.744.240	11.011.700	Notes payable
<b>Jumlah</b>	<b>30.863.188</b>	<b>31.111.130</b>	<b>7.556.659</b>	<b>9.475.516</b>	<b>14.078.955</b>	<b>Total</b>

Ekshibit E/139

Exhibit E/139

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

40. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

40. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

c. Risiko likuiditas (Lanjutan)

c. Liquidity risk (Continued)

	2021					
	Jumlah tercatat/ Carrying amount	Arus kas kontraktual/ Contractual cash flow	Kurang dari setahun/Less than one year	Antara satu dan tiga tahun/ Between one and three years	Lebih dari tiga tahun/More than three years	
Utang usaha - pihak ketiga dan utang lain-lain	49.662	49.662	49.662	-	-	Trade payables - third parties and other payable
Beban masih harus dibayar	1.107.497	1.107.497	1.107.497	-	-	Accrued expenses
Liabilitas sewa	678.680	539.563	127.672	106.093	305.798	Lease liabilities
Pinjaman jangka panjang	5.604.042	5.715.572	149.200	-	5.566.372	Long-term loans
Surat utang	23.142.302	23.313.450	5.523.000	2.808.000	14.982.450	Notes payable
<b>Jumlah</b>	<b>30.582.183</b>	<b>30.725.744</b>	<b>6.957.031</b>	<b>2.914.093</b>	<b>20.854.620</b>	<b>Total</b>

Berikut rincian pinjaman jangka panjang dan surat utang jangka panjang sesuai dengan jadwal jatuh tempo:

Details of the long-term loans and long-term notes according to the maturity schedule are as follow:

	2022		2021		
	Jumlah tercatat/ Carrying amount	Arus kas kontraktual/ Contractual cash flows	Jumlah tercatat/ Carrying amount	Arus kas kontraktual/ Contractual cash flows	
Kurang dari setahun	6.120.853	6.176.010	5.614.342	5.672.200	Less than one year
Antara satu dan tiga tahun	9.199.253	9.288.893	2.802.111	2.808.000	Between one and three years
Lebih dari tiga tahun	13.639.456	13.742.602	20.329.891	20.548.822	More than three years
<b>Jumlah</b>	<b>28.959.562</b>	<b>29.207.505</b>	<b>28.746.344</b>	<b>29.029.022</b>	<b>Total</b>

d. Estimasi nilai wajar

d. Fair value estimation

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan di estimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

PSAK 68 "Pengukuran Nilai Wajar" mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

PSAK 68 "Fair Value Measurements" requires disclosure of fair value measurements by level of the following fair value measurement hierarchy:

- harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (tingkat 1);
- input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (tingkat 2); dan
- input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (tingkat 3).

- quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (level 1);
- inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as prices) or indirectly (derived from prices) (level 2); and
- inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs) (level 3).

Ekshibit E/140

Exhibit E/140

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

40. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

40. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

d. Estimasi nilai wajar (Lanjutan)

d. Fair value estimation (Continued)

Aset dan liabilitas keuangan Perusahaan yang diukur dan diakui pada nilai wajar (tingkat 2) adalah piutang dan utang derivatif.

The Company's financial assets and liabilities that are measured and recognized at fair value (level 2) are derivative receivables and payables.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia, dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined using valuation techniques. These valuation techniques maximise the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on estimates. If all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in level 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3.

If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in level 3.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

Specific valuation techniques used to value financial instruments include:

- penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis dan;
- teknik lain seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan lainnya.

- the use of quoted market prices or dealer quotes for similar instruments and;
- other techniques, such as discounted cash flows analysis, are used to determine fair value for the remaining financial instruments.

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan:

The following table shows the fair values of financial assets and liabilities, together with the carrying amounts, are as follow:

	2022		2021		
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair Value	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair Value	
<b>Aset keuangan</b>					<b>Financial assets</b>
Kas dan setara kas	966.386	966.386	629.125	629.125	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - pihak ketiga	270.041	270.041	538.715	538.715	Trade receivables - third parties
Piutang lain-lain	38.993	38.993	75.506	75.506	Other receivables
Pendapatan yang masih harus diterima	721.057	721.057	500.283	500.283	Accrued revenue
Uang jaminan	1.023	1.023	1.605	1.605	Refundable deposits
<b>Jumlah</b>	<b>1.997.500</b>	<b>1.997.500</b>	<b>1.745.234</b>	<b>1.745.234</b>	<b>Total</b>

Ekshibit E/141

Exhibit E/141

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

40. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

40. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

d. Estimasi nilai wajar (Lanjutan)

d. Fair value estimation (Continued)

	2022		2021		
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair Value	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair Value	
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Utang usaha - pihak ketiga	255.607	255.607	37.435	37.435	Trade payables - third parties
Utang lain-lain	23.442	23.442	12.227	12.227	Other payables
Beban masih harus dibayar	974.904	974.904	1.107.497	1.107.497	Accrued expenses
Liabilitas sewa	659.703	659.703	678.680	678.680	Lease liabilities
Pinjaman jangka panjang - pihak ketiga	4.366.834	4.366.834	5.604.042	5.604.042	Long-term loan - third parties
Surat utang	24.592.728	24.592.728	23.142.302	23.142.302	Notes
Jumlah	<u>30.873.218</u>	<u>30.873.218</u>	<u>30.582.183</u>	<u>30.582.183</u>	Total

Nilai wajar atas sebagian besar aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai tercatat karena dampak pendiskontoan yang tidak signifikan.

The fair value of most of the financial assets and liabilities approximates their carrying amount, as the impact of discounting is not significant.

Nilai wajar dari pinjaman jangka panjang dinilai menggunakan *discounted cash flows* berdasarkan tingkat suku bunga efektif terakhir yang berlaku untuk masing-masing pinjaman yang diutilisasi.

The fair value of long-term loans are estimated by using *discounted cash flows* applying the effective interest rate charged by the lenders for the last utilisation in each currency borrowings.

e. Risiko operasional

e. Operational risk

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh kurang memadainya atau kegagalan dari proses internal, faktor manusia dan sistem atau dari kejadian-kejadian eksternal. Risiko ini melekat dalam semua proses bisnis, kegiatan operasional, sistem dan layanan Perusahaan dan entitas anak.

Operational risk is the risk of losses resulting from inadequate internal processes or a failure of such processes, human factors and systems or from external events. This risk is inherent in all business processes, operations and services of the Company and subsidiaries.

f. Manajemen risiko permodalan

f. Capital risk management

Tujuan Perusahaan dan entitas anak dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Perusahaan dan entitas anak dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga entitas dapat tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan untuk mengelola struktur modal yang optimal untuk meminimalisasi biaya modal yang efektif. Dalam rangka mengelola struktur modal, Perusahaan dan entitas anak mungkin menyesuaikan jumlah dividen, menerbitkan saham baru atau menambah/mengurangi jumlah utang.

The objectives of the Company and subsidiaries when managing capital are to safeguard the ability of the Company and subsidiaries to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to minimize the effective cost of capital. In order to maintain the capital structure, the Company and subsidiaries may from time to time adjust the amount of dividends, issue new shares or increase/reduce debt levels.

Strategi Perusahaan selama 31 Desember 2022 dan 2021 adalah mempertahankan rasio utang senior bersih terhadap EBITDA yang disesuaikan dan disetahunkan kurang dari 5 kali (Catatan 21).

The Company's strategy for 31 December 2022 and 2021 was to maintain the ratio of net senior debt to annualized adjusted EBITDA to be less than 5 times (Note 21).

Ekshibit E/142

Exhibit E/142

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

41. TRANSAKSI NON-KAS

Transaksi non-kas Perusahaan dan entitas anaknya adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Surat utang	1.535.100	97.650
Pinjaman jangka panjang		
pihak ketiga	285.199	117.181
Liabilitas sewa	100.253	227.834
Kapitalisasi kenaikan nilai revaluasi		
properti investasi	15.656	57.638
Surplus revaluasi	( 1.407.805)	( 151.875)
<b>Jumlah</b>	<b>528.403</b>	<b>348.428</b>

Tabel berikut menjelaskan perubahan pada liabilitas Perusahaan dan entitas anak yang timbul dari aktivitas pendanaan, yang meliputi perubahan terkait kas dan non kas:

	1 Januari 2022/ 1 January 2022	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Perubahan non kas/ Non-cash changes		31 Desember 2022/ 31 December 2022	
				Pergerakan kurs/ Exchange rate movements	Perubahan lainnya/ Other changes		
Surat utang	23.313.450	5.400.000	( 5.523.000)	1.535.100	-	24.725.550	Notes payable
Pinjaman jangka panjang							Long-term loans
Pihak ketiga	5.715.572	10.829.630	( 12.348.446)	285.199	-	4.481.955	Third parties
Liabilitas sewa							Lease liabilities -
Aset hak guna	660.412	90.400	( 132.802)	-	24.383	642.393	Right of use assets
Kendaraan (Catatan 23b)	18.268	9.853	( 10.811)	-	-	17.310	Vehicle (Note 23b)
<b>Jumlah</b>	<b>29.707.702</b>	<b>16.329.883</b>	<b>( 18.015.059)</b>	<b>1.820.299</b>	<b>24.383</b>	<b>29.867.208</b>	<b>Total</b>

	1 Januari 2021/ 1 January 2021	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Perubahan non kas/ Non-cash changes		31 Desember 2021/ 31 Desember 2021	
				Pergerakan kurs/ Exchange rate movements	Perubahan lainnya/ Other changes		
Surat utang	13.661.500	16.432.400	( 6.878.100)	97.650	-	23.313.450	Notes payable
Pinjaman jangka panjang							Long-term loans
Pihak ketiga	10.400.265	19.368.698	( 24.170.572)	117.181	-	5.715.572	Third parties
Liabilitas sewa							Lease liabilities -
Aset hak guna	450.430	217.535	( 59.238)	-	51.685	660.412	Right of use assets
Kendaraan (Catatan 23b)	16.082	-	( 8.113)	3.383	6.916	18.268	Vehicle (Note 23b)
<b>Jumlah</b>	<b>24.528.277</b>	<b>36.018.633</b>	<b>( 31.116.023)</b>	<b>218.214</b>	<b>58.601</b>	<b>29.707.702</b>	<b>Total</b>

Ekshibit E/143

Exhibit E/143

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

42. SEGMENT OPERASI

42. OPERATING SEGMENT

a. Segmen Primer

a. Primary Segment

2022	Menara/ Tower	Repeater/ Repeater	Gedung/ Building	Serat optik/ Fiber Optic	Konsolidasian/ Consolidation	2022
PENDAPATAN	6.428.838	38.295	8.389	48.847	6.524.369	REVENUE
BEBAN POKOK PENDAPATAN	1.751.061	20.184	-	12.080	1.783.325	COST OF REVENUE
LABA KOTOR					4.741.044	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA					458.573	OPERATING EXPENSES
LABA DARI OPERASI					4.282.471	INCOME FROM OPERATIONS
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>						<b>OTHER INCOME (CHARGES)</b>
Kenaikan nilai wajar atas properti investasi					15.656	Increase of fair value of investment properties
Pendapatan bunga					13.785	Interest income
Laba selisih kurs - bersih					1.779	Gain on foreign exchange - net
Beban kerugian kredit ekspektasian - aset keuangan					( 24.997)	Expected credit losses expense - financial assets
Beban keuangan - lainnya					( 129.780)	Financial expenses - others
Beban keuangan - pinjaman dan surat utang					( 1.699.072)	Financial expenses - long-term loans and notes
Lainnya - bersih					( 54.643)	Others - net
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN					2.405.199	INCOME BEFORE FINAL TAX AND INCOME TAX
Beban pajak final					( 493.433)	Final tax expense
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN					1.911.766	PROFIT BEFORE INCOME TAX
Beban Pajak Penghasilan						Income Tax Expenses
Kini					( 222.325)	Current
Tangguhan					-	Deferred
Beban Pajak Penghasilan - Bersih					( 222.325)	Income Tax Expenses - Net
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN					1.689.441	NET PROFIT FOR THE CURRENT PERIOD
Aset segmen	28.599.138	198.590	-	1.289.193	30.086.921	Segment assets
Aset tidak dapat dialokasi					13.053.047	Unallocated assets
Jumlah aset					43.139.968	Total assets
Liabilitas segmen					-	Segment liabilities
Liabilitas tidak dapat dialokasi					32.219.585	Unallocated liabilities
Jumlah liabilitas					32.219.585	Total liabilities

Ekshibit E/144

Exhibit E/144

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

42. SEGMENT OPERASI (Lanjutan)

42. OPERATING SEGMENT (Continued)

a. Segmen Primer (Lanjutan)

a. Primary Segment (Continued)

2021	Menara/ Tower	Repeater/ Repeater	Gedung/ Building	Serat optik/ Fiber Optic	Konsolidasian/ Consolidation	2021
PENDAPATAN	6.125.669	38.771	8.509	6.635	6.179.584	REVENUE
BEBAN POKOK PENDAPATAN	1.458.763	10.896	1.455	1.667	1.472.780	COST OF REVENUE
LABA KOTOR					4.706.804	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA					400.889	OPERATING EXPENSES
LABA DARI OPERASI					4.305.915	INCOME FROM OPERATIONS
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>						<b>OTHER INCOME (CHARGES)</b>
Kenaikan nilai wajar atas properti investasi					57.638	Increase of fair value of investment properties
Pendapatan bunga					12.156	Interest income
Laba selisih kurs - Bersih					1.382	Gain on foreign exchange - net
Beban kerugian kredit ekspektasian - aset keuangan					( 2.271)	Expected credit losses expense - financial assets
Penurunan nilai wajar atas menara telekomunikasi					( 3.572)	Decrease of fair value of telecommunication towers
Beban keuangan - Lainnya					( 1.925.209)	Financial expenses - Others
Beban keuangan - pinjaman dan surat utang					( 210.836)	Financial expenses - long-term loans and notes
Lainnya - bersih					( 14.732)	Others - net
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN					2.220.471	INCOME BEFORE FINAL TAX AND INCOME TAX
Beban pajak final					( 284.507)	Final tax expense
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN					1.935.964	PROFIT BEFORE INCOME TAX
Beban Pajak Penghasilan						Income Tax Expenses
Kini					( 285.346)	Current
Tanggungan					( 49.265)	Deferred
Beban Pajak Penghasilan - Bersih					( 334.611)	Income Tax Expenses - Net
Laba Bersih					1.601.353	Net Profit
Aset segmen	33.128.991	381.108	-	127.805	33.637.904	Segment assets
Aset tidak dapat dialokasi					8.232.531	Unallocated assets
Jumlah aset					41.870.435	Total assets
Liabilitas segmen					-	Segment liabilities
Liabilitas tidak dapat dialokasi					32.081.197	Unallocated liabilities
Jumlah liabilitas					32.081.197	Total liabilities



Ekshibit E/145

Exhibit E/145

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

42. SEGMENT OPERASI (Lanjutan)

42. OPERATING SEGMENT (Continued)

b. Segmen Sekunder

b. Sekunder Segment

2022	Jawa dan Bali/ Java and Bali	Sumatera/ Sumatra	Kalimantan/ Borneo	Sulawesi/ Sulawesi	Maluku dan Papua/ Maluku and Papua	Konsolidasian/ Consolidation	2022
Pendapatan	3.785.398	1.709.268	447.941	580.746	1.016	6.524.369	Revenue
Beban	1.044.455	299.370	269.206	125.611	44.683	1.783.325	Expense
Aset segmen yang dapat dialokasikan	17.235.154	7.883.036	2.037.241	2.310.052	621.438	30.086.921	Segment assets which can be allocated
Aset segmen yang tidak dapat dialokasikan						13.053.047	Segment assets which can not be allocated
Jumlah aset						43.139.968	Total assets
Liabilitas segmen yang dapat dialokasikan						-	Segment liabilities which can be allocated
Liabilitas segmen yang tidak dapat dialokasikan						32.219.585	Segment liabilities which can not be allocated
Jumlah liabilitas						32.219.585	Total liabilities
2021	Jawa dan Bali/ Java and Bali	Sumatera/ Sumatra	Kalimantan/ Borneo	Sulawesi/ Sulawesi	Maluku dan Papua/ Maluku and Papua	Konsolidasian/ Consolidation	2021
Pendapatan	3.648.715	1.587.749	412.089	531.031	-	6.179.584	Revenue
Beban	876.674	374.754	95.327	126.025	-	1.472.780	Expense
Aset segmen yang dapat dialokasikan	20.785.656	8.423.589	2.073.681	2.354.978	-	33.637.904	Segment assets which can be allocated
Aset segmen yang tidak dapat dialokasikan						8.232.531	Segment assets which can not be allocated
Jumlah aset						41.870.435	Total assets
Liabilitas segmen yang dapat dialokasikan						-	Segment liabilities which can be allocated
Liabilitas segmen yang tidak dapat dialokasikan						32.081.197	Segment liabilities which can not be allocated
Jumlah liabilitas						32.081.197	Total liabilities

Ekshibit E/146

Exhibit E/146

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

43. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

43. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

a. Pencairan pinjaman

Fasilitas Pinjaman Revolving PT Bank UOB Indonesia ("UOB")

Pada berbagai tanggal dibulan Januari sampai dengan 5 Juni 2023, GHON, entitas anak, telah menarik sebagian Fasilitas Pinjaman Revolving dari UOB sebesar Rp 727.600 (Catatan 21).

Fasilitas Pinjaman Revolving sebesar US\$ 375 juta

Pada tanggal 17 Januari 2023, entitas anak, telah menarik sebagian Fasilitas Pinjaman Revolving sebesar US\$ 375 juta dalam US\$ 375.000.000 Facility Agreement sebesar US\$ 48.500.000 (Catatan 21a).

Fasilitas Pinjaman Revolving sebesar US\$ 275 juta

Pada tanggal 5 Januari, 6 Maret dan 15 Maret 2023, entitas anak, telah menarik sebagian Fasilitas Pinjaman Revolving sebesar US\$ 275 juta dalam US\$ 275.000.000 Facility Agreement sebesar US\$ 15.000.000, US\$ 107.800.000 dan US\$ 63.800.000 (Catatan 21b).

Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI

Pada tanggal 17 Februari 2023, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Tahap VI Tahun 2023 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI") sebesar 6,125% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI ini adalah sebesar Rp 2.486.000. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 Februari 2023.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan entitas anak.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 17 Mei 2023, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 27 Februari 2024.

Fasilitas Pinjaman Revolving PT Bank DBS Indonesia ("DBSI")

Pada tanggal 19 Januari, 24 Januari, 21 Maret, 18 April dan 27 April 2023, Perusahaan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari DBSI masing-masing sebesar Rp 200.000 setara dengan US\$ 13.241.526, Rp 250.000 setara dengan US\$ 16.750.419, Rp 250.000, Rp 200.000 dan Rp 300.000 (Catatan 21).

a. Loan withdrawal

PT Bank UOB Indonesia Revolving Credit Facility ("UOB")

On several dates in January to 5 June 2023, GHON, the subsidiary, has partially withdrawn a revolving loan facility from UOB amounting to Rp 727,600 (Note 21).

US\$ 375 million Revolving Loan Facility

On 17 January 2023, the subsidiary, has partially withdrawn the US\$ 375 million Revolving Loan Facility under US\$ 375,000,000 Revolving Loan Facility amounting to US\$ 48,500,000 (Note 21a).

US\$ 275 million Revolving Loan Facility

On 5 January, 6 March and 15 March 2023, the subsidiary, has partially withdrawn the US\$ 275 million Revolving Loan Facility under US\$ 275,000,000 Revolving Loan Facility amounting to US\$ 15,000,000, US\$ 107,800,000 and US\$ 63,800,000 (Note 21b).

Continuous Bonds V Phase VI

On 17 February 2023, The Company issued Continuous Bonds V Tower Bersama Infrastructure phase VI Year 2023 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds V Phase VI") of 6.125% per annum. The Continuous Bonds V Phase VI has a total principal of Rp 2,486,000. These bonds are listed on the Indonesia stock exchange on 20 February 2023.

The net proceeds obtained from the issuance of Continuous Bonds V Phase VI have been used entirely for the payment of financial liabilities of subsidiaries.

Interest for Continuous Bonds V Phase VI will be paid on a quarterly basis on the interest payment date. The first payment of interest is on 17 May 2023. The date of the last interest payment, which is also the due date of the Continuous Bond V Phase VI, is on 27 February 2024.

PT Bank DBS Indonesia Revolving Credit Facility ("DBSI")

On 19 January, 24 January, 21 March, 18 April and 27 April 2023, the Company, has partially withdrawn the uncommitted revolving credit facility from DBSI amounting to Rp 200,000 ekuivalent US\$ 13,241,526, Rp 250,000 ekuivalent US\$ 16,750,419, Rp 250,000, Rp 200,000 and Rp 300,000. (Note 21).

Ekshibit E/147

Exhibit E/147

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

43. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)

43. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (Continued)

a. Pencairan pinjaman (Lanjutan)

a. Loan withdrawal (Continued)

Fasilitas Pinjaman Revolving sebesar US\$ 325 juta

US\$ 325 million Revolving Loan Facility

Pada tanggal 3 Mei 2023, entitas anak, telah menarik sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* sebesar US\$ 325 juta dalam US\$ 325.000.000 *Facility Agreement* sebesar US\$ 165.077.500.

On 3 May 2023, the subsidiary, has partially withdrawn the US\$ 325 million Revolving Loan Facility under US\$ 325,000,000 Revolving Loan Facility amounting to US\$ 165,077,500.

Fasilitas Pinjaman Revolving PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")

PT Bank Negara Indonesia Revolving Credit Facility ("BNI")

Pada tanggal 26 Mei 2023, Perusahaan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *Uncommitted Revolving* dari BNI sebesar Rp 200.000.

On 26 May 2023, The Company, has partially withdrawn the *Uncommitted Revolving Credit Facility* from BNI amounting to Rp 200.000.

b. Pembayaran pinjaman

b. Loan repayment

Fasilitas Pinjaman Revolving PT Bank UOB Indonesia

PT Bank UOB Indonesia Revolving Credit Facility

Pada berbagai tanggal dibulan Januari sampai dengan 5 Juni 2023, GHON, entitas anak, telah melunasi sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* dari UOB sebesar Rp 736.700 (Catatan 21).

On several dates in January to 5 June 2023, GHON, the subsidiary, has partially repaid a revolving loan facility from UOB amounting to Rp 736,700 (Note 21).

Fasilitas Pinjaman PT Bank QNB Indonesia Tbk

PT Bank QNB Indonesia Tbk Credit Facility

Pada tanggal 18 Januari, 27 Januari, 18 Februari, 28 Februari, 17 Maret, 28 Maret, 18 April, 28 April, 17 Mei dan 26 Mei 2023, GHON, entitas anak, telah melunasi sebagian Fasilitas Pinjaman dari QNB sebesar Rp 9.375 (Catatan 21).

On 18 January, 27 January, 18 February, 28 February, 17 March, 28 March, 18 April, 28 April, 17 May and 26 May 2023, GHON, the subsidiary, has partially repaid a loan facility from QNB amounting to Rp 9,375 (Note 21).

Fasilitas Pinjaman Revolving sebesar US\$ 375 juta

US\$ 375 million Revolving Loan Facility

Pada tanggal 28 Februari dan 7 Maret 2023, entitas anak, telah melunasi seluruh Fasilitas Pinjaman *Revolving* sebesar US\$ 375 juta dalam US\$ 375.000.000 *Facility Agreement* sebesar US\$128.000.000 dan US\$ 15.500.000 (Catatan 21a).

On 28 February and 7 March 2023, the subsidiary, has fully repaid the US\$ 375 million Revolving Loan Facility under US\$ 375,000,000 Revolving Loan Facility amounting to US\$ 128,000,000 and US\$ 15,500,000 (Note 21a).

Fasilitas Pinjaman Revolving sebesar US\$ 275 juta

US\$ 275 million Revolving Loan Facility

Pada tanggal 30 Januari, 6 Februari, 28 Februari, 7 Maret, 27 Maret, dan 3 Mei 2023, entitas anak, telah melunasi seluruh Fasilitas Pinjaman *Revolving* sebesar US\$ 275 juta dalam US\$ 275.000.000 *Facility Agreement* sebesar US\$ 40.000.000, US\$ 16.700.000, US\$ 88.000.000, US\$ 43.900.000, US\$ 9.000.000, dan US\$ 162.600.000 (Catatan 21b).

On 30 January, 6 February, 28 February, 7 March, 27 March, and 3 May 2023, the subsidiary, has fully repaid the US\$ 275 million Revolving Loan Facility under US\$ 275,000,000 Revolving Loan Facility amounting to US\$ 40,000,000, US\$ 16,700,000, US\$ 88,000,000, US\$ 43,900,000, US\$ 9,000,000, and US\$ 162,600,000 (Note 21b).

Obligasi Berkelanjutan V Tahap III

Continuous Bonds V Phase III

Pada tanggal 12 Maret 2023, Perusahaan, telah melunasi Obligasi Berkelanjutan V Tahap III seri A sebesar Rp 1.700.000 (Catatan 22h).

On 12 March 2023, The Company, has repaid the Continuous Bonds V Phase III seri A amounting to Rp 1,700,000 (Note 22h).

Ekshibit E/148

Exhibit E/148

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

43. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)

43. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (Continued)

b. Pembayaran pinjaman (Lanjutan)

b. Loan repayment (Continued)

Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV

Continuous Bonds III Phase IV

Pada tanggal 24 Maret 2023, Perusahaan, telah melunasi Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV seri B sebesar Rp 867.000 (Catatan 22a).

On 24 March 2023, The Company, has repaid the Continuous Bonds III Phase IV seri B amounting to Rp 867,000 (Note 22a).

Fasilitas Pinjaman Revolving PT Bank DBS Indonesia ("DBSI")

PT Bank DBS Indonesia Revolving Credit Facility ("DBSI")

Pada tanggal 18 April, 27 April dan 29 Mei 2023, Perusahaan, telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari DBSI masing-masing sebesar sebesar Rp 200.000 setara dengan US\$ 13.241.526, Rp 250.000 setara dengan US\$ 16.750.419 dan Rp 200.000 (Catatan 21).

On 18 April, 27 April and 29 May 2023, the Company, has partially repaid the uncommitted revolving credit facility from DBSI amounting to Rp 200,000 ekuivalent US\$ 13,241,526, Rp 250,000 ekuivalent US\$ 16,750,419 and Rp 200,000 (Note 21).

c. Pembelian kembali saham

c. Buyback shares

Pada berbagai tanggal dibulan Januari sampai dengan 12 Januari 2023, Perusahaan telah membeli kembali saham beredarnya dari bursa saham sebanyak 52.016.900 saham dengan biaya perolehan sebesar Rp 243.481. Jumlah saham tersebut mencerminkan 0,23% dari seluruh saham beredar Perusahaan.

On various date in January to 12 January 2023, the Company had repurchased its 52,016,900 outstanding shares from the stock exchange at cost Rp 243,481. Those number shares represents 0.23% of the Company's outstanding shares.

d. Penjualan saham treasury

d. Sale of treasury shares

Merujuk kepada Keterbukaan Informasi Perusahaan pada tanggal 2 Maret 2023 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material mengenai Penjualan Saham Treasury ("Keterbukaan"). Perusahaan telah menjual seluruh Saham Hasil Pembelian Kembali Saham ("Saham Treasury") sebanyak 368.740.400 saham kepada Bersama Digital Infrastructure Asia Pte Ltd (BDIA) pada tanggal 1 Maret 2023 ("Penjualan Saham Treasury").

In accordance with the Company's Information Disclosure dated 2 March 2023 related to the Information or Material Fact Reporting on the Sale of Treasury Shares (the "Disclosure"). The Company has sold all of its Buyback Shares (the "Treasury Shares") amounting to 368,740,400 shares to Bersama Digital Infrastructure Asia Pte Ltd (BDIA) on 1 March 2023 (the "Sale of Treasury Shares").

Harga dari Penjualan Saham Treasury tersebut sebesar Rp 2.425 per saham. Oleh karenanya harga dari Penjualan Saham Treasury telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan sebagaimana disebutkan dalam Keterbukaan dimaksud.

The price of the Sale of Treasury Shares is in the amount of Rp 2,425 per share. Therefore, the price of the Sale of Treasury Shares has complied with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 2/POJK.04/2013 on Buyback Issued by Issuers or Public Companies in Significantly Fluctuating Market as previously mentioned in the Disclosure.

Jumlah dana yang diterima dari pengalihan ini adalah sebesar Rp 894.195 sebelum dikurangi biaya transaksi.

The amount of funds received from this sale of Treasury Shares is Rp 894,195 before deducting any transaction fees.

Setelah pembelian saham treasury tersebut, kepemilikan BDIA pada Perusahaan menjadi sebanyak 16.986.225.323 saham atau mencerminkan hak suara 74,97% dari seluruh saham beredar Perusahaan.

After the purchase of treasury shares, BDIA's ownership in the Company became 16,986,225,323 shares or represented 74.97% voting rights of the Company's total outstanding shares.

Ekshibit E/149

Exhibit E/149

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

43. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)

- e. Perubahan pertama Fasilitas Pinjaman *Revolving* PT Bank DBS Indonesia (“DBSI”)

Pada tanggal 2 Maret 2023, Perusahaan, telah menandatangani perubahan pertama Fasilitas Pinjaman *Revolving* dengan DBSI sehingga fasilitas pinjaman menjadi:

- a. Menaikkan fasilitas pinjaman *revolving* DBSI dari Rp 500.000 menjadi Rp 750.000 atau ekuivalennya dalam mata uang USD dengan jangka waktu pembayaran kembali untuk setiap penarikan fasilitas maksimum 1 (satu) tahun sejak tanggal perjanjian;
- b. Jangka waktu fasilitas pinjaman *revolving* DBSI adalah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023 (“tanggal jatuh tempo”) dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh tempo dengan pemberitahuan kepada nasabah kecuali jika Fasilitas Pinjaman *Revolving* DBSI ini diakhiri oleh Bank.

- f. Penandatanganan Fasilitas Pinjaman *Revolving* sebesar US\$ 325.000.000

Pada tanggal 18 April 2023, entitas anak tertentu telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman *Revolving* (“Perjanjian RLF”) sebesar US\$ 325.000.000 untuk penunjang kebutuhan pendanaan Perusahaan dan Kelompok Entitas Anak Perusahaan yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung yang secara bersama-sama menerima pinjaman dari konsorsium bank-bank, yang akan digunakan untuk persyaratan pendanaan umum dari Perusahaan dan Kelompok Entitas Anak Perusahaan termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran kembali utang yang ada, pengeluaran modal dan pendanaan akuisisi apa pun yang diizinkan oleh Dokumen-Dokumen Pembiayaan.

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan, dan entitas anak yang menjadi peserta RLF ini memberikan jaminan bersama (*cross guarantee*) atas Perjanjian RLF.

43. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (Continued)

- e. First Amendment of PT Bank DBS Indonesia (“DBSI”) *Revolving Credit Facility*

On 2 March 2023, The Company, has signed the change of agreement to the DBSI revolving credit facility so that the DBSI revolving credit facility becomes:

- a. Increased DBSI revolving credit facility from Rp 500,000 to Rp 750,000 or the equivalent in United States Dollars with a maximum repayment period 1 (one) year from the date of the agreement for each facility withdrawal;
- b. The term of the DBSI revolving credit facility is 12 (twelve) months from 29 December 2022 to 29 December 2023 (“maturity date”) and will be extended automatically for a period of 3 (three) months from the maturity date with notice to the customer unless the DBSI revolving credit facility is terminated by the Bank.

- f. Signing US\$ 325,000,000 *Revolving Loan Facility*

On 18 April 2023, certain subsidiaries have entered into a US\$ 325,000,000 *Revolving Loan Facility* agreement (the “RLF Agreement”) to general funding requirements of the Company and subsidiaries which are owned directly or indirectly which jointly receive loans from Consortium banks which will be used for the general funding requirements of the Company and its subsidiaries including but not limited to repayment of existing debt, capital expenditure and financing any acquisitions which are permitted by the Finance Documents.

This loan has no collateral, and the subsidiary that is a participant of the RLF provides a cross guarantee for the RLF Agreement.

Ekshibit E/150

Exhibit E/150

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

43. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)

- f. Penandatanganan Fasilitas Pinjaman *Revolving* sebesar US\$ 325.000.000 (Lanjutan)

Sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman *Revolving* US\$ 325.000.000, pembatasan-pembatasan yang berlaku sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Fasilitas termasuk, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak akan menciptakan atau memperbolehkan adanya Jaminan (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Fasilitas) atas asetnya yang mana pun selain dari Jaminan Yang Diizinkan (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Fasilitas);
- b. Tidak akan menjual, menyewa, memindahkan atau melepaskan aset Perusahaan selain dari Pelepasan Yang Diizinkan (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Fasilitas);

Kreditor yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah BNP Paribas, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, DBS Bank Limited, United Overseas Bank Limited, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank Mizuho Indonesia, dan PT Bank OCBC NISP Tbk.

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar *Compounded Reference Rate* + 1,25% per tahun untuk kreditor luar negeri, dan *Compounded Reference Rate* + 1,33% per tahun untuk kreditor dalam negeri apabila rasio *senior leverage* kurang dari 1.0:1 atau *Compounded Reference Rate* + 1,40% per tahun untuk kreditor luar negeri dan *Compounded Reference Rate* + 1,48% per tahun untuk kreditor dalam negeri apabila rasio *senior leverage* sama dengan atau lebih dari 1.0:1

Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 17 Juli 2026.

- g. Pembatalan Fasilitas Pinjaman *Revolving* sebesar US\$ 375.000.000

Pada tanggal 26 April 2023, Perusahaan mengajukan pembatalan total nilai fasilitas pinjaman *revolving* sebesar US\$ 375.000.000 secara penuh dan berlaku efektif pada 3 Mei 2023 (Catatan 21a).

- h. Pembatalan Fasilitas Pinjaman *Revolving* sebesar US\$ 275.000.000

Pada tanggal 26 April 2023, Perusahaan mengajukan pembatalan total nilai fasilitas pinjaman *revolving* sebesar US\$ 275.000.000 secara penuh dan berlaku efektif pada 3 Mei 2023 (Catatan 21b).

43. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (Continued)

- f. Signing US\$ 325,000,000 Revolving Loan Facility (Continued)

Reference to the US\$ 325,000,000 Revolving Loan Facility, the applicable restrictions as stated in the Facility Agreement include, but are not limited to the following:

- a. Will not create security (as defined in the Facility Agreement) over any of its assets other than the Permitted Securities (as defined in the Facility Agreement);
- b. Will not sell, rent, transfer or dispose of the Company's assets other than the Permitted Release (as defined in the Facility Agreement);

The lenders who participated in this facility are BNP Paribas, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, DBS Bank Limited, United Overseas Bank Limited, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank Mizuho Indonesia, dan PT Bank OCBC NISP Tbk.

This facility bears interest margin of *Compounded Reference Rate* + 1,25% per annum for offshore lenders, and *Compounded Reference Rate* + 1,33% per annum for onshore lenders if ratio *senior leverage* under 1.0:1 or *Compounded Reference Rate* + 1,40% per annum for offshore lenders, and *Compounded Reference Rate* + 1,33% per annum for onshore lenders if ratio *senior leverage* over 1.0:1

This facility will mature in 17 July 2026.

- g. Cancellation US\$ 375,000,000 Revolving Loan Facility

On 26 April 2023, The Company submitted a request to cancel the total value of the revolving loan facility amounting to US\$ 375,000,000 in full and start to be effective on 3 May 2023 (Note 21a).

- Cancellation US\$ 275,000,000 Revolving Loan Facility

On 26 April 2023, The Company submitted a request to cancel the total value of the revolving loan facility amounting to US\$ 275,000,000 in full and start to be effective on 3 May 2023 (Note 21b).

Ekshibit E/151

Exhibit E/151

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

43. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)

- i. Penandatanganan Perubahan Perjanjian Fasilitas Pinjaman dengan PT Bank UOB Indonesia Tbk

Pada tanggal 17 April 2023, PKP, entitas anak, telah mendatangi Perubahan Perjanjian Fasilitas Pinjaman dengan PT Bank UOB Indonesia Tbk dengan surat No. 441/04/2023. Perubahan perjanjian tersebut antara lain merubah:

1. Jangka waktu fasilitas kredit diperpanjang sampai dengan tanggal 30 April 2024.
2. *Debt to EBITDA* yang disesuaikan dan di anualisasi maksimum sebesar 3,75 kali.
3. *Top tier revenue* minimum 50,00%.

- j. Penandatanganan Fasilitas Pinjaman *Revolving* PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC")

Pada tanggal 11 Mei 2023, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Fasilitas dengan PT Bank HSBC Indonesia ("Perjanjian Fasilitas Pinjaman *Revolving*") yang bersifat tidak terikat (*uncommitted*) hingga jumlah pokok sebesar Rp 500.000 atau setaranya dalam mata uang Dolar Amerika Serikat untuk kebutuhan pendanaan umum group termasuk namun tidak terbatas pada pelunasan utang yang ada, yaitu: (i) Pinjaman Jangka Panjang; dan (ii) Surat Utang.

Peminjam tidak mengusahakan Jaminan atas aset-asetnya, selain dari Jaminan Yang Diizinkan.

Suku bunga atas masing-masing Pinjaman untuk masing-masing Periode Bunga adalah:

- a. sehubungan dengan Pinjaman dalam Rupiah, suku bunga tetap selama jangka waktu pinjaman sebesar 7.23% per tahun di bawah dari *IDR term lending rate* (bunga pinjaman berjangka dalam mata uang Rupiah) Kreditur (saat ini sebesar 15.6483% per tahun, dan akan berfluktuasi dari waktu ke waktu menurut kondisi pasar yang berlaku), yang dihitung setiap harinya sesuai dengan jumlah hari yang telah lewat terhadap 360 hari per tahun (atau perhitungan hari (*day-count*) lain yang digunakan oleh Kreditur menurut kebijaksanaannya yang wajar); dan
- b. sehubungan dengan Pinjaman dalam Dollar AS, suku bunga tetap selama jangka waktu pinjaman sebesar 8.89% per tahun di bawah dari *USD term lending rate* (bunga pinjaman berjangka dalam mata uang Dollar AS) Kreditur (saat ini sebesar 16.1435% per tahun, dan akan berfluktuasi dari waktu ke waktu menurut kondisi pasar yang berlaku), yang dihitung setiap harinya sesuai dengan jumlah hari yang telah lewat terhadap 360 hari per tahun (atau perhitungan hari (*day-count*) lain yang digunakan oleh Kreditur menurut kebijaksanaannya yang wajar).

43. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (Continued)

- i. *Signing of the Amendment to the Loan Facility Agreement with PT Bank UOB Indonesia Tbk*

*On 17 April 2023, PKP, the subsidiary, has signed the Amendment of the Loan Facility Agreement with PT Bank UOB Indonesia Tbk with letter No. 441/04/2023. Changes in the agreement include changing:*

1. *The term of the credit facility has been extended to date 30 April 2024.*
2. *Debt to EBITDA adjusted and annualized a maximum of 3.75 times.*
3. *Minimum top tier revenue ratio of 50,00%*

- j. *Signing PT Bank HSBC Indonesia Revolving Credit Facility ("HSBC")*

*On 11 May 2023, The Company entered into an uncommitted Revolving Credit Facility Agreement with PT Bank HSBC Indonesia ("Revolving Credit Facility Agreement") amounting to Rp 500,000 or the equivalent in United States Dollars for the general funding of the group including but not limited to repayment of existing debts: (i) Senior Revolving Loan; and (ii) Notes.*

*The Borrower has not created any Security over any of its assets, other than Permitted Security.*

*The rate of interest on each Loan for each Interest Period is:*

- a. *in relation to a Loan in IDR, fixed rate during loan tenor of 7.23% per annum below the Lender's IDR term lending rate (currently is at 15.6483% per annum, subject to fluctuation from time to time in accordance with relevant market conditions), calculated on a daily basis on the actual number of days elapsed against a year of 360 days (or such other day-count applied by the Lender in its reasonable discretion); and*
- b. *in relation to a Loan in USD, fixed rate during loan tenor of 8.89% per annum below the Lender's USD term lending rate (currently is at 16.1435% per annum, subject to fluctuation from time to time in accordance with relevant market conditions), calculated on a daily basis on the actual number of days elapsed against a year of 360 days (or such other day-count applied by the Lender in its reasonable discretion).*

Ekshibit E/152

Exhibit E/152

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

43. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)

j. Penandatanganan Fasilitas Pinjaman *Revolving*  
PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC") (Lanjutan)

Peminjam yang telah menerima Pinjaman harus membayar bunga terkumpul atas Pinjaman itu pada hari terakhir dari masing-masing Periode Bunga (dan, jika periode Bunga lebih lama dari 6 (enam) Bulan, pada tanggal-tanggal yang jatuh saat interval 6 (enam) bulanan setelah hari pertama Periode Bunga).

Sesuai pembatasan-pembatasan yang mengatur tentang Fasilitas Pinjaman *Revolving* HSBC ini, Perusahaan memiliki keterbatasan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain, sebagai berikut:

- a. Peminjam tidak akan menciptakan atau memperbolehkan adanya Jaminan atas asetnya yang manapun, tidak berlaku terhadap Jaminan yang Diizinkan.
- b. Peminjam tidak diperbolehkan untuk menandatangani suatu transaksi tunggal atau transaksi berkelanjutan (baik terkait ataupun tidak) dan baik secara sukarela ataupun tidak sukarela untuk menjual, menyewa, memindahkan atau cara lain melepaskan apa pun dari aset selain dari Pelepasan yang Diizinkan.
- c. Peminjam tidak diperbolehkan untuk melakukan suatu amalgamasi, demerger, merger atau rekonstruksi korporasi selain dari Transaksi yang Diizinkan.
- d. Peminjam tidak diperbolehkan, tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Kreditur: (i) melakukan perubahan substansial apa pun terhadap sifat umum usahanya; (ii) melakukan perubahan substansial apa pun terhadap struktur absahnya atau status korporasinya dari apa yang dilakukan pada tanggal Perjanjian Fasilitas yang dapat secara wajar diperkirakan akan mengakibatkan Dampak Merugikan Material.
- e. Peminjam tidak diperbolehkan melakukan akuisisi perusahaan, bisnis, aset-aset atau membuat investasi selain dari Akuisisi yang Diizinkan.
- f. Peminjam tidak akan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, memberikan jaminan atau ganti rugi (kecuali sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan Dokumen Pembiayaan atau diberikan dalam kegiatan perdagangan sehari-hari dengan persyaratan komersial normal) kepada atau untuk manfaat seseorang atau dengan cara lain secara sukarela menanggung kewajiban, baik aktual atau kontinjen, sehubungan dengan kewajiban seseorang kecuali terkait dengan Utang yang Diizinkan atau Pelepasan yang Diizinkan.

43. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (Continued)

j. Signing PT Bank HSBC Indonesia *Revolving Credit Facility* ("HSBC") (Continued)

*The Borrower to which a Loan has been made shall pay accrued interest on that Loan on the last day of each InterestPeriod (and, if the Interest Period is longer than 6 (six) Months, on the dates falling at 6 (six) monthly intervals after the first day of the Interest Period).*

*Under the covenants governing the HSBC *Revolving Credit Facility*, the Company is restricted from performing certain actions such as:*

- a. *The Borrower shall not create or permit to subsist any Security over any of its assets, do not apply to any Permitted Security.*
- b. *The Borrower shall not enter into a single transaction or a series of transactions (whether related or not) and whether voluntary or voluntary to sell, lease, transfer or otherwise dispose of any asset other than Permitted Disposals.*
- c. *The Borrower shall not enter into any amalgamation, demerger, merger or corporate reconstruction other than a Permitted Transaction*
- d. *The Borrower shall not, without the prior written consent of the Lender: (i) make any substantial change to the general nature of its business; (ii) make any substantial change to its legal structure or corporate status from that carried on at the date of the Facility Agreement which might reasonably be expected to have a Material Adverse Effect.*
- e. *The Borrower shall not acquire any company, business, assets or make any investment other than Permitted Acquisitions.*
- f. *The Borrower shall not, without the prior written consent of the Lender, give any guarantee or indemnity (except as required under any Finance Document or given in the ordinary course of trading on normal commercial terms) to or for the benefit of any person or otherwise voluntarily assume any liability, whether actual or contingent, in respect of any obligation of any person except in relation to a Permitted debttedness or a Permitted Disposal."*



Ekshibit E/153

Exhibit E/153

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

43. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)

43. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (Continued)

j. Penandatanganan Fasilitas Pinjaman *Revolving* PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC") (Lanjutan)

j. Signing PT Bank HSBC Indonesia *Revolving Credit Facility* ("HSBC") (Continued)

g. Peminjam tidak diperbolehkan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditor, secara langsung atau tidak langsung, menimbulkan, menanggung, menanggung atau menjadi atau tetap berkewajiban secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan Utang Keuangan apa pun kecuali Utang yang Diizinkan.

g. The Borrower shall not, without the prior written consent of the Lender, directly or indirectly create, incur, assume or otherwise become or remain directly or indirectly liable with respect to any Financial Indebtedness except Permitted Indebtedness.

Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 11 Mei 2024

This facility will mature in 11 May 2024

k. Penandatanganan Fasilitas Pinjaman *Revolving* PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")

k. Signing PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk *Revolving Credit Facility* ("BNI")

Pada tanggal 15 Mei 2023, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Fasilitas dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Perjanjian Fasilitas Pinjaman *Revolving*") yang bersifat tidak terikat (*uncommitted*) hingga jumlah pokok sebesar Rp 1.000.000 untuk persyaratan pendanaan umum termasuk tetapi tidak terbatas pada belanja modal, modal kerja dan pembiayaan untuk pengembangan usaha serta pembayaran kembali utang yang ada sesuai rencana bisnis Peminjam.

On 15 May 2023, The Company entered into an uncommitted *Revolving Credit Facility Agreement* with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("*Revolving Credit Facility Agreement*") amounting to Rp 1.000,000 towards general funding requirements of the Group including but not limited to capital expenditure, working capital and financing for business development and and repayment of existing debt according to the Borrower's business plan.

Peminjam tidak mengusahakan Jaminan atas aset-asetnya, selain dari Jaminan Yang Diizinkan.

The Borrower has not created any Security over any of its assets, other than Permitted Security.

Dalam Perjanjian Fasilitas Pinjaman tersebut, Perusahaan wajib memenuhi janji keuangan yakni Debt to EBITDA kuartal terakhir dikalikan 4 (LQA) maksimal 6,25 kali.

In the Loan Facility Agreement, the Company are required to fulfill the financial covenant as the last quarter's debt to EBITDA multiplied by 4 (LQA) a maximum of 6.25 times.

Suku bunga atas masing-masing Pinjaman untuk masing-masing Periode Bunga adalah suku persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari:

The rate of interest on each Loan for each Interest Period is the percentage rate per annum which is the aggregate of:

a. margin yang dapat diterapkan; dan

a. the applicable margin; and

b. JIBOR; atau

b. JIBOR; or

c. Suku bunga yang disepakati antara Peminjam dan Kreditor yang akan diberitahukan melalui surat pemberitahuan suku bunga.

c. The interest rate agreed between the Borrower and the Lender will be notified through a rate of interest notification letter.

Peminjam yang telah menerima Pinjaman harus membayar bunga terkumpul atas Pinjaman itu pada hari terakhir dari masing-masing Periode Bunga (dan, jika periode Bunga lebih lama dari 6 (enam) Bulan, pada tanggal-tanggal yang jatuh saat interval 6 (enam) bulanan setelah hari pertama Periode Bunga).

The Borrower to which a Loan has been made shall pay accrued interest on that Loan on the last day of each Interest Period (and, if the Interest Period is longer than 6 (six) Months, on the dates falling at 6 (six) monthly intervals after the first day of the Interest Period).

Dalam Perjanjian Fasilitas Pinjaman tersebut, Perusahaan wajib memenuhi janji keuangan yakni Debt to EBITDA kuartal terakhir dikalikan 4 (LQA) maksimal 6,25 kali.

In the Loan Facility Agreement, the Company are required to fulfill the financial covenant as the last quarter's debt to EBITDA multiplied by 4 (LQA) a maximum of 6.25 times.

Ekshibit E/154

Exhibit E/154

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

43. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)

- k. Penandatanganan Fasilitas Pinjaman *Revolving* PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") (Lanjutan)

Sesuai pembatasan-pembatasan yang mengatur tentang Fasilitas Pinjaman *Revolving* BNI ini, Perusahaan memiliki keterbatasan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain, sebagai berikut:

- a. Peminjam tidak akan menciptakan atau memperbolehkan adanya Jaminan atas asetnya yang manapun, tidak berlaku terhadap Jaminan yang Diizinkan.
- b. Peminjam tidak diperbolehkan untuk menandatangani suatu transaksi tunggal atau transaksi berkelanjutan (baik terkait ataupun tidak) dan baik secara sukarela ataupun tidak sukarela untuk menjual, menyewa, memindahkan atau cara lain melepaskan apa pun dari aset selain dari Pelepasan yang Diizinkan.
- c. Peminjam tidak diperbolehkan untuk melakukan suatu amalgamasi, demerger, merger atau rekonstruksi korporasi selain dari Transaksi yang Diizinkan.
- d. Peminjam tidak diperbolehkan, tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Kreditor: (i) melakukan perubahan substansial apa pun terhadap sifat umum usahanya; (ii) melakukan perubahan substansial apa pun terhadap struktur absahnya atau status korporasinya dari apa yang dilakukan pada tanggal Perjanjian Fasilitas yang dapat secara wajar diperkirakan akan mengakibatkan Dampak Merugikan Material.
- e. Peminjam tidak diperbolehkan melakukan akuisisi perusahaan, bisnis, aset-aset atau membuat investasi selain dari Akuisisi yang Diizinkan.
- f. Peminjam tidak akan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditor, memberikan jaminan atau ganti rugi (kecuali sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan Dokumen Pembiayaan atau diberikan dalam kegiatan perdagangan sehari-hari dengan persyaratan komersial normal) kepada atau untuk manfaat seseorang atau dengan cara lain secara sukarela menanggung kewajiban, baik aktual atau kontinjen, sehubungan dengan kewajiban seseorang kecuali terkait dengan Utang yang Diizinkan atau Pelepasan yang Diizinkan.
- g. Peminjam tidak diperbolehkan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditor, secara langsung atau tidak langsung, menimbulkan, menanggung, menanggung atau menjadi atau tetap berkewajiban secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan Utang Keuangan apa pun kecuali Utang yang Diizinkan.

Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 15 Mei 2024

43. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (Continued)

- k. Signing PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk *Revolving Credit Facility* ("BNI") (Continued)

*Under the covenants governing the BNI Revolving Credit Facility, the Company is restricted from performing certain actions such as:*

- i. *The Borrower shall not create or permit to subsist any Security over any of its assets, do not apply to any Permitted Security.*
- i. *The Borrower shall not enter into a single transaction or a series of transactions (whether related or not) and whether voluntary or voluntary to sell, lease, transfer or otherwise dispose of any asset other than Permitted Disposals.*
- i. *The Borrower shall not enter into any amalgamation, demerger, merger or corporate reconstruction other than a Permitted Transaction*
- i. *The Borrower shall not, without the prior written consent of the Lender: (i) make any substantial change to the general nature of its business; (ii) make any substantial change to its legal structure or corporate status from that carried on at the date of the Facility Agreement which might reasonably be expected to have a Material Adverse Effect.*
- i. *The Borrower shall not acquire any company, business, assets or make any investment other than Permitted Acquisitions.*
- i. *The Borrower shall not, without the prior written consent of the Lender, give any guarantee or indemnity (except as required under any Finance Document or given in the ordinary course of trading on normal commercial terms) to or for the benefit of any person or otherwise voluntarily assume any liability, whether actual or contingent, in respect of any obligation of any person except in relation to a Permitted debttedness or a Permitted Disposal.*
- i. *The Borrower shall not, without the prior written consent of the Lender, directly or indirectly create, incur, assume or otherwise become or remain directly or indirectly liable with respect to any Financial Indebtedness except Permitted Indebtedness.*

*This facility will mature in 15 May 2024*

Ekshibit E/155

Exhibit E/155

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

43. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)

- l. Perubahan dan penegasan kembali Fasilitas Pinjaman *Revolving* PT Bank DBS Indonesia ("DBSI")

Pada tanggal 22 Mei 2023, Perusahaan dan PT Unicom Muda Utama (UMU) (entitas anak), telah menandatangani perubahan dan penegasan Fasilitas Pinjaman *Revolving* yang bersifat *Uncommitted* dengan DBSI sehingga fasilitas pinjaman menjadi:

- a. Menambah pihak dalam perjanjian Fasilitas Pinjaman *Revolving* yang bersifat *Uncommitted* dengan DBSI yaitu PT Unicom Muda Utama;
- b. Menaikkan Fasilitas Pinjaman *Uncommitted Revolving* DBSI dari Rp 750.000 menjadi Rp 1.050.000 atau ekuivalennya dalam mata uang USD dengan jangka waktu pembayaran kembali untuk setiap penarikan fasilitas maksimum 1 (satu) tahun sejak tanggal perjanjian, dengan rincian sebagai berikut:
  - i. Perusahaan maksimum hingga sebesar Rp 1.050.000;
  - ii. UMU maksimum hingga sebesar Rp 800.000.

- m. Penandatanganan Fasilitas Pinjaman *Revolving* PT Bank BNP Paribas Indonesia ("BNPP")

Pada tanggal 23 Mei 2023, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Fasilitas dengan PT Bank BNP Paribas Indonesia ("Perjanjian Fasilitas Pinjaman *Revolving*") yang bersifat tidak terikat (*uncommitted*) hingga jumlah pokok sebesar Rp 500.000 untuk persyaratan pendanaan umum termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran kembali utang yang ada.

Peminjam tidak mengusahakan Jaminan atas aset-asetnya, selain dari Jaminan Yang Diizinkan.

Suku bunga atas masing-masing Pinjaman untuk masing-masing Periode Bunga adalah suku persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari:

- a. Margin yang berlaku; ditambah
- b. JIBOR; atau

Peminjam yang telah menerima Pinjaman harus membayar bunga terkumpul atas Pinjaman itu pada hari terakhir dari masing-masing Periode Bunga (dan, jika periode Bunga lebih lama dari 6 (enam) Bulan, pada tanggal-tanggal yang jatuh saat interval 6 (enam) bulanan setelah hari pertama Periode Bunga).

43. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (Continued)

- l. Amendment and reaffirmation PT Bank DBS Indonesia ("DBSI") *Revolving Credit Facility* ("DBSI")

On 22 May 2023, The Company and PT Unicom Muda Utama (UMU) (the subsidiary), has signed the amendment and reaffirmation of agreement to the DBSI *Uncommitted Revolving Credit Facility* so that the DBSI *Uncommitted Revolving Credit Facility* becomes:

- a. Adding parties to the DBSI *Uncommitted Credit Facility* agreement, namely PT Unicom Muda Utama;
- b. Increased DBSI *Uncommitted Revolving Credit Facility* from Rp 750,000 to Rp 1,050,000 or the equivalent in United States Dollars with a maximum repayment period 1 (one) year from the date of the agreement for each facility withdrawal, the details are follows:
  - i. The Company maximum amounting to Rp 1,050,000;
  - ii. UMU maximum amounting to Rp 800,000.

- m. Signing PT Bank BNP Paribas Indonesia *Revolving Credit Facility* ("BNPP")

On 23 May 2023, The Company entered into an *uncommitted Revolving Credit Facility Agreement* with PT Bank BNP Paribas Indonesia ("*Revolving Credit Facility Agreement*") amounting to Rp 500,000 towards general funding requirements of the Group including but not limited to repayment of existing debt.

The Borrower has not created any Security over any of its assets, other than Permitted Security.

The rate of interest on each Loan for each Interest Period is the percentage rate per annum which is the aggregate of:

- a. The applicable margin; and
- b. JIBOR; or

The Borrower to which a Loan has been made shall pay accrued interest on that Loan on the last day of each Interest Period (and, if the Interest Period is longer than 6 (six) Months, on the dates falling at 6 (six) monthly intervals after the first day of the Interest Period).

Ekshibit E/156

Exhibit E/156

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

43. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)

- m. Penandatanganan Fasilitas Pinjaman *Revolving* PT Bank BNP Paribas Indonesia ("BNPP") (Lanjutan)

Sesuai pembatasan-pembatasan yang mengatur tentang Fasilitas Pinjaman *Revolving* BNPP ini, Perusahaan memiliki keterbatasan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain, sebagai berikut:

- a. Peminjam tidak akan menciptakan atau memperbolehkan adanya Jaminan atas asetnya yang manapun, tidak berlaku terhadap Jaminan yang Diizinkan.
- b. Peminjam tidak diperbolehkan untuk menandatangani suatu transaksi tunggal atau transaksi berkelanjutan (baik terkait ataupun tidak) dan baik secara sukarela ataupun tidak sukarela untuk menjual, menyewa, memindahkan atau cara lain melepaskan apa pun dari aset selain dari Pelepasan yang Diizinkan.
- c. Peminjam tidak diperbolehkan untuk melakukan suatu amalgamasi, demerger, merger atau rekonstruksi korporasi selain dari Transaksi yang Diizinkan.
- d. Peminjam tidak diperbolehkan, tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Kreditor: (i) melakukan perubahan substansial apa pun terhadap sifat umum usahanya; (ii) melakukan perubahan substansial apa pun terhadap struktur absahnya atau status korporasinya dari apa yang dilakukan pada tanggal Perjanjian Fasilitas yang dapat secara wajar diperkirakan akan mengakibatkan Dampak Merugikan Material.
- e. Peminjam tidak diperbolehkan melakukan akuisisi perusahaan, bisnis, aset-aset atau membuat investasi selain dari Akuisisi yang Diizinkan.
- f. Peminjam tidak akan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditor, memberikan jaminan atau ganti rugi (kecuali sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan Dokumen Pembiayaan atau diberikan dalam kegiatan perdagangan sehari-hari dengan persyaratan komersial normal) kepada atau untuk manfaat seseorang atau dengan cara lain secara sukarela menanggung kewajiban, baik aktual atau kontinjen, sehubungan dengan kewajiban seseorang kecuali terkait dengan Utang yang Diizinkan atau Pelepasan yang Diizinkan.
- g. Peminjam tidak diperbolehkan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditor, secara langsung atau tidak langsung, menimbulkan, menanggung atau menjadi atau tetap berkewajiban secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan Utang Keuangan apa pun kecuali Utang yang Diizinkan.

Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 23 Mei 2024.

43. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (Continued)

- m. Signing PT Bank BNP Paribas Indonesia *Revolving Credit Facility* ("BNPP") (Continued)

*Under the covenants governing the BNPP Revolving Credit Facility, the Company is restricted from performing certain actions such as:*

- a. *The Borrower shall not create or permit to subsist any Security over any of its assets, do not apply to any Permitted Security.*
- b. *The Borrower shall not enter into a single transaction or a series of transactions (whether related or not) and whether voluntary or voluntary to sell, lease, transfer or otherwise dispose of any asset other than Permitted Disposals.*
- c. *The Borrower shall not enter into any amalgamation, demerger, merger or corporate reconstruction other than a Permitted Transaction*
- d. *The Borrower shall not, without the prior written consent of the Lender: (i) make any substantial change to the general nature of its business; (ii) make any substantial change to its legal structure or corporate status from that carried on at the date of the Facility Agreement which might reasonably be expected to have a Material Adverse Effect.*
- e. *The Borrower shall not acquire any company, business, assets or make any investment other than Permitted Acquisitions.*
- f. *The Borrower shall not, without the prior written consent of the Lender, give any guarantee or indemnity (except as required under any Finance Document or given in the ordinary course of trading on normal commercial terms) to or for the benefit of any person or otherwise voluntarily assume any liability, whether actual or contingent, in respect of any obligation of any person except in relation to a Permitted debttedness or a Permitted Disposal.*
- g. *The Borrower shall not, without the prior written consent of the Lender, directly or indirectly create, incur, assume or otherwise become or remain directly or indirectly liable with respect to any Financial Indebtedness except Permitted Indebtedness.*

*This facility will mature in 23 May 2024.*

Ekshibit E/157

Exhibit E/157

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

43. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)

- n. Penandatanganan Fasilitas Pinjaman *Revolving* PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Maybank")

Pada tanggal 24 Mei 2023, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Fasilitas dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Perjanjian Fasilitas Pinjaman *Revolving*") yang bersifat tidak terikat (*uncommitted*) hingga jumlah pokok sebesar Rp 500.000 untuk persyaratan pendanaan umum.

Peminjam tidak mengusahakan Jaminan atas aset-asetnya, selain dari Jaminan Yang Diizinkan.

Peminjam harus memastikan bahwa pada setiap saat rasio Utang Konsolidasi terhadap EBITDA untuk Periode Terkait tidak melebihi dari 6,25 : 1.

Suku bunga atas masing-masing Pinjaman untuk masing-masing Periode Bunga adalah 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun di atas *cost of fund* yang akan dikutip pada Tanggal Penggunaan.

Peminjam yang telah menerima Pinjaman harus membayar bunga terkumpul atas Pinjaman itu pada hari terakhir dari masing-masing Periode Bunga (dan, jika Periode Bunga lebih lama dari 3 (tiga) Bulan, pada tanggal-tanggal yang jatuh saat interval 3 (tiga) bulanan setelah hari pertama Periode Bunga)

Sesuai pembatasan-pembatasan yang mengatur tentang Fasilitas Pinjaman *Revolving* Maybank ini, Perusahaan memiliki keterbatasan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain, sebagai berikut:

- a. Peminjam tidak akan menciptakan atau memperbolehkan adanya Jaminan atas asetnya yang manapun, tidak berlaku terhadap Jaminan yang Diizinkan.
- b. Peminjam tidak diperbolehkan untuk menandatangani suatu transaksi tunggal atau transaksi berkelanjutan (baik terkait ataupun tidak) dan baik secara sukarela ataupun tidak sukarela untuk menjual, menyewa, memindahkan atau cara lain melepaskan apa pun dari aset selain dari Pelepasan yang Diizinkan.
- c. Peminjam tidak diperbolehkan untuk melakukan suatu amalgamasi, demerger, merger atau rekonstruksi korporasi selain dari Transaksi yang Diizinkan.
- d. Peminjam tidak diperbolehkan, tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Kreditur: (i) melakukan perubahan substansial apa pun terhadap sifat umum usahanya; (ii) melakukan perubahan substansial apa pun terhadap struktur absahnya atau status korporasinya dari apa yang dilakukan pada tanggal Perjanjian Fasilitas yang dapat secara wajar diperkirakan akan mengakibatkan Dampak Merugikan Material.

43. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (Continued)

- n. Signing PT Bank Maybank Indonesia Tbk *Revolving Credit Facility* ("Maybank")

On 23 May 2023, The Company entered into an uncommitted *Revolving Credit Facility Agreement* with PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("*Revolving Credit Facility Agreement*") amounting to Rp 500,000 towards general funding requirements.

The Borrower has not created any Security over any of its assets, other than Permitted Security.

The Borrower shall ensure that all the time the Consolidated Debt to EBITDA ratio for the Relevant Period shall not exceed 6.25 : 1.

The rate of interest on each Loan for each Interest Period is 0.25% (zero point two five percent) per annum above *cost of fund* which shall be quoted on the Utilisation Date.

The Borrower to which a Loan has been made shall pay accrued interest on that Loan on the last day of each Interest Period (and, if the Interest Period is longer than 3 (three) Months, on the dates falling at 3 (three) monthly intervals after the first day of the Interest Period).

Under the covenants governing the Maybank *Revolving Credit Facility*, the Company is restricted from performing certain actions such as:

- a. The Borrower shall not create or permit to subsist any Security over any of its assets, do not apply to any Permitted Security.
- b. The Borrower shall not enter into a single transaction or a series of transactions (whether related or not) and whether voluntary or otherwise dispose of any asset other than Permitted Disposals.
- c. The Borrower shall not enter into any amalgamation, demerger, merger or corporate reconstruction other than a Permitted Transaction
- d. The Borrower shall not, without the prior written consent of the Lender: (i) make any substantial change to the general nature of its business; (ii) make any substantial change to its legal structure or corporate status from that carried on at the date of the Facility Agreement which might reasonably be expected to have a Material Adverse Effect.

Ekshibit E/158

Exhibit E/158

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

43. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)

n. Penandatanganan Fasilitas Pinjaman *Revolving* PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Maybank") (Lanjutan)

e. Peminjam tidak diperbolehkan melakukan akuisisi perusahaan, bisnis, aset-aset atau membuat investasi selain dari Akuisisi yang Diizinkan.

f. Peminjam tidak akan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditor, memberikan jaminan atau ganti rugi (kecuali sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan Dokumen Pembiayaan atau diberikan dalam kegiatan perdagangan sehari-hari dengan persyaratan komersial normal) kepada atau untuk manfaat seseorang atau dengan cara lain secara sukarela menanggung kewajiban, baik aktual atau kontinjen, sehubungan dengan kewajiban seseorang kecuali terkait dengan Utang yang Diizinkan atau Pelepasan yang Diizinkan.

g. Peminjam tidak diperbolehkan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditor, secara langsung atau tidak langsung, menimbulkan, menanggung atau menjadi atau tetap berkewajiban secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan Utang Keuangan apa pun kecuali Utang yang Diizinkan.

Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 24 Mei 2024.

o. Penandatanganan Fasilitas Pinjaman *Revolving* PT Bank UOB Indonesia ("UOBI")

Pada tanggal 29 Mei 2023, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Fasilitas dengan PT Bank UOB Indonesia Tbk ("Perjanjian Fasilitas Pinjaman *Revolving*") yang bersifat tidak terikat (*uncommitted*) hingga jumlah pokok sebesar Rp 1.000.000 atau USD 65.000.000, yang mana yang lebih rendah, dengan ketentuan keseluruhan Jumlah Terutang Fasilitas, Fasilitas Fasilitas LC/BG dan Fasilitas ARP secara bersama-sama dari waktu ke waktu tidak boleh melebihi USD 80.000.000, sebagaimana ditentukan oleh Kreditor. untuk persyaratan pendanaan umum dari Grup termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran kembali utang yang ada.

Peminjam tidak mengusahakan Jaminan atas aset-asetnya, selain dari Jaminan Yang Diizinkan.

43. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (Continued)

n. Signing PT Bank Maybank Indonesia Tbk *Revolving* Credit Facility ("Maybank") (Continued)

e. The Borrower shall not acquire any company, business, assets or make any investment other than Permitted Acquisitions.

f. The Borrower shall not, without the prior written consent of the Lender, give any guarantee or indemnity (except as required under any Finance Document or given in the ordinary course of trading on normal commercial terms) to or for the benefit of any person or otherwise voluntarily assume any liability, whether actual or contingent, in respect of any obligation of any person except in relation to a Permitted debtedness or a Permitted Disposal.

g. The Borrower shall not, without the prior written consent of the Lender, directly or indirectly create, incur, assume or otherwise become or remain directly or indirectly liable with respect to any Financial Indebtedness except Permitted Indebtedness.

This facility will mature in 24 May 2024.

o. Signing PT Bank UOB Indonesia *Revolving* Credit Facility ("UOBI")

On 29 May 2023, The Company entered into an *uncommitted* *Revolving* Credit Facility Agreement with PT Bank UOB Indonesia Tbk ("*Revolving* Credit Facility Agreement") amounting to Rp 1,000,000 or USD 65,000,000, whichever is lower, provided that the total outstanding amount of the Facility, LC/BG Facilities and ARP Facility at any time shall not exceed USD 80,000,000, as determined by the Lender towards general funding requirements of the Group including but not limited to repayment of existing debt.

The Borrower has not created any Security over any of its assets, other than Permitted Security.

Ekshibit E/159

Exhibit E/159

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

43. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)

- o. Penandatanganan Fasilitas Pinjaman *Revolving* PT Bank UOB Indonesia ("UOBI") (Lanjutan)

Suku bunga atas masing-masing Pinjaman untuk masing-masing Periode Bunga adalah persentase per tahun yang akan disepakati oleh Kreditur dan Peminjam- dan yang di kutip pada Tanggal Penggunaan Pinjaman tersebut.

Peminjam yang telah menerima Pinjaman harus membayar bunga terkumpul atas Pinjaman itu pada hari terakhir dari masing-masing Periode Bunga (dan, jika Periode Bunga lebih lama dari 6 (enam) Bulan, pada tanggal-tanggal yang jatuh saat interval 6 (enam) bulanan setelah hari pertama Periode Bunga)

Sesuai pembatasan-pembatasan yang mengatur tentang Fasilitas Pinjaman *Revolving* UOBI ini, Perusahaan memiliki keterbatasan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain, sebagai berikut:

- a. Peminjam tidak akan menciptakan atau memperbolehkan adanya Jaminan atas asetnya yang manapun, tidak berlaku terhadap Jaminan yang Diizinkan.
- b. Peminjam tidak diperbolehkan untuk menandatangani suatu transaksi tunggal atau transaksi berkelanjutan (baik terkait ataupun tidak) dan baik secara sukarela ataupun tidak sukarela untuk menjual, menyewa, memindahkan atau cara lain melepaskan apa pun dari aset selain dari Pelepasan yang Diizinkan.
- c. Peminjam tidak diperbolehkan untuk melakukan suatu amalgamasi, demerger, merger atau rekonstruksi korporasi selain dari Transaksi yang Diizinkan.
- d. Peminjam tidak diperbolehkan, tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Kreditur: (i) melakukan perubahan substansial apa pun terhadap sifat umum usahanya; (ii) melakukan perubahan substansial apa pun terhadap struktur absahnya atau status korporasinya dari apa yang dilakukan pada tanggal Perjanjian Fasilitas yang dapat secara wajar diperkirakan akan mengakibatkan Dampak Merugikan Material.
- e. Peminjam tidak diperbolehkan melakukan akuisisi perusahaan, bisnis, aset-aset atau membuat investasi selain dari Akuisisi yang Diizinkan.

43. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (Continued)

- o. Signing PT Bank UOB Indonesia *Revolving Credit Facility* ("UOBI") (Continued)

*The rate of interest on each Loan for each Interest Period is the percentage rate per annum that will be agreed between the Lender and the Borrower and to be quoted on the Utilisation Date of that Loan.*

*The Borrower to which a Loan has been made shall pay accrued interest on that Loan on the last day of each Interest Period (and, if the Interest Period is longer than 6 (six) Months, on the dates falling at 6 (six) monthly intervals after the first day of the Interest Period).*

*Under the covenants governing the UOBI *Revolving Credit Facility*, the Company is restricted from performing certain actions such as:*

- a. *The Borrower shall not create or permit to subsist any Security over any of its assets, do not apply to any Permitted Security.*
- b. *The Borrower shall not enter into a single transaction or a series of transactions (whether related or not) and whether voluntary or involuntary to sell, lease, transfer or otherwise dispose of any asset other than Permitted Disposals.*
- c. *The Borrower shall not enter into any amalgamation, demerger, merger or corporate reconstruction other than a Permitted Transaction*
- d. *The Borrower shall not, without the prior written consent of the Lender: (i) make any substantial change to the general nature of its business; (ii) make any substantial change to its legal structure or corporate status from that carried on at the date of the Facility Agreement which might reasonably be expected to have a Material Adverse Effect.*
- e. *The Borrower shall not acquire any company, business, assets or make any investment other than Permitted Acquisitions.*

Ekshibit E/160

Exhibit E/160

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

43. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)

- o. Penandatanganan Fasilitas Pinjaman *Revolving* PT Bank UOB Indonesia ("UOBI") (Lanjutan)
- f. Peminjam tidak akan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditor, memberikan jaminan atau ganti rugi (kecuali sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan Dokumen Pembiayaan atau diberikan dalam kegiatan perdagangan sehari-hari dengan persyaratan komersial normal) kepada atau untuk manfaat seseorang atau dengan cara lain secara sukarela menanggung kewajiban, baik aktual atau kontinjen, sehubungan dengan kewajiban seseorang kecuali terkait dengan Utang yang Diizinkan atau Pelepasan yang Diizinkan.
- g. Peminjam tidak diperbolehkan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditor, secara langsung atau tidak langsung, menimbulkan, menanggung atau menjadi atau tetap berkewajiban secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan Utang Keuangan apa pun kecuali Utang yang Diizinkan.

Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 29 Mei 2024.

- p. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

Pada tanggal 31 Mei 2023, Perusahaan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

RUPST memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2022. (i) Sebesar Rp 500 ditetapkan untuk menambah cadangan umum guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan digunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan. (ii) Sebesar Rp 800.000 atau sekitar 48,9% dari laba bersih Perseroan tahun 2022, ditetapkan sebagai Dividen Tunai yang akan dibagikan kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham pada tanggal 14 Juni 2023, dengan memperhitungkan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan pada tanggal tersebut, dan pembayaran akan dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2023. (iii) Sisanya akan digunakan untuk menambah saldo laba (*Retained Earnings*) untuk mendukung pengembangan usaha Perusahaan.

43. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (Continued)

- o. Signing PT Bank UOB Indonesia *Revolving Credit Facility* ("UOBI") (Continued)
- f. *The Borrower shall not, without the prior written consent of the Lender, give any guarantee or indemnity (except as required under any Finance Document or given in the ordinary course of trading on normal commercial terms) to or for the benefit of any person or otherwise voluntarily assume any liability, whether actual or contingent, in respect of any obligation of any person except in relation to a Permitted indebtedness or a Permitted Disposal.*
- g. *The Borrower shall not, without the prior written consent of the Lender, directly or indirectly create, incur, assume or otherwise become or remain directly or indirectly liable with respect to any Financial Indebtedness except Permitted Indebtedness.*

*This facility will mature in 29 May 2024.*

- p. Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)

*On 31 May 2023, the Company held the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS).*

1. *Approval of the Company's Annual Report for the financial year 2022 and Ratify the Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2022.*
2. *Determine the Allocation of Net Profits for Financial Year 2022. (i) An amount of Rp 500 is stipulated to increase general reserves to meet the provisions of Article 70 of the Limited Law No. 40 of 2007 as lastly amended by Law No. 6 Year 2023 on Stipulation of Government Regulation in lieu of Law No. 2 Year 2022 on Job Creation as Law ("Company Law") and used in accordance with the provisions of 25 of the Company's Articles of Association. (ii) Rp 800,000 or 48.9% of the net income in 2022 is determined as cash dividend for the financial year 2022, which will be distributed to Shareholders whose names are recorded in the register of shareholders on 14 June 2023, by calculating treasury shares on the date of announcement, and payment will be made on 5 July 2023. (iii) The remainder will be used to increase Retained Earnings to support the Company's business development.*



Ekshibit E/161

Exhibit E/161

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

43. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)

p. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)  
(Lanjutan)

3. Melimpahkan kewenangan dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.
4. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023.
5. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil: (i) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2022, (ii) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2022; dan (iii) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2023.

q. Keterbukaan Informasi Terkait dengan Rencana Pembelian Kembali Saham Perusahaan dan Pembelian Kembali Saham

Pada tanggal 3 Mei 2023, Perusahaan menerbitkan Keterbukaan Informasi Terkait dengan Rencana Pembelian Kembali Saham Perusahaan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan ("POJK No. 2/POJK.04/2013") jo. Surat Edaran OJK No. 3/SEOJK.04/2020 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik ("SEOJK No. 3/SEOJK.04/2020").

43. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (Continued)

p. Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)  
(Continued)

3. Delegate the authority with the right of substitution to the Board of Commissioners taking into account the considerations of the Audit Committee to appoint a Public Accountant registered with the Financial Services Authority ("OJK") to conduct an audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending 31 December 2023 and to appoint an Accountant Substitute Public if the Public Accountant who has been appointed for any reason is unable to carry out his duties.
4. Delegate the authority to the Board of Commissioners to determine the salaries, honorarium, and other benefits for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for financial year 2023.
5. Use of proceeds report of (i) Continuous Bonds V Tower Bersama Infrastructure phase IV Year 2022; (ii) Continuous Bonds V Tower Bersama Infrastructure phase V Year 2022; and (iii) Continuous Bonds V Tower Bersama Infrastructure phase VI Year 2023.

q. Information Disclosure on Shares Buyback Plan and Buyback Shares

On 3 May 2023, The Company issued Information Disclosure on Shares Buyback Plan to conduct buyback of the Company's shares that have been issued and listed on the Indonesia Stock Exchange ("Shares Buyback") in accordance with the Financial Services Authority ("OJK") Rule No. 2/POJK.04/2013 on Buyback of Shares Issued by the Publicly Listed Company or Public Company in Significantly Fluctuating Market Conditions ("OJK Rule No. 2/POJK.04/2013") and OJK Circular Letter No. 3/SEOJK.04/2020 on Other Conditions Constituting Significantly Fluctuating Market Conditions Allowing for Buyback of Shares ("SEOJK No. 3/SEOJK.04/2020").

Ekshibit E/162

Exhibit E/162

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

43. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)

- q. Keterbukaan Informasi Terkait dengan Rencana Pembelian Kembali Saham Perusahaan dan Pembelian Kembali Saham (Lanjutan)

Pembelian kembali saham Perusahaan akan dilakukan untuk membeli sebanyak-banyaknya 1.132.849.900 (satu miliar seratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus) saham atau 5 % (lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan, yang akan dilakukan secara bertahap untuk periode 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal keterbukaan informasi ini yakni periode tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan 3 Agustus 2023 Pelaksanaan Transaksi pembelian saham akan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dari Direksi Perusahaan melalui Bursa Efek Indonesia ("BEI").

Sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan 6 Juni 2023, Perusahaan telah membeli kembali saham beredarnya dari bursa saham sebanyak 22.265.600 saham dengan biaya perolehan sebesar Rp 45.863. Jumlah saham tersebut mencerminkan 0,10% dari seluruh saham beredar Perusahaan.

43. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (Continued)

- q. Information Disclosure on Shares Buyback Plan and Buyback Shares (Continued)

The Shares Buyback will be for up to 1,132,849,900 (one billion one hundred thirty-two million eight hundred forty-nine thousand nine hundred) shares or 5% (five percent) of the issued and fully paid-in capital of the Company. The Shares Buyback will be conducted gradually over three months from 4 May 2023 until 3 August 2023. The Shares Buyback transactions will be executed by the approval of the Company's Board of Directors and through the Indonesian Stock Exchange ("IDX").

From 22 May 2023 to 6 June 2023, the Company had repurchased its 22,265,600 outstanding shares from the stock exchange at cost of Rp 45,863. Those number of shares represents 0.10% of the Company's outstanding shares.

44. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I Tahun 2023, Perusahaan telah menerbitkan Kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 dengan beberapa perubahan penyajian dan pengungkapan pada Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian, Catatan 1.a, 1.e, 2.a, 6, 9, 10, 11, 15, 17, 20, 21, 30, 31 dan 43 atas laporan keuangan konsolidasian.

44. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

For the Continuous Public Offering of Continuous Bonds VI Phase I, The Company has reissued the consolidated financial statements for the years ended 31 December 2022 and 2021 with several changes in the presentation and disclosure in Consolidated Statement of Financial Position, Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income, Notes 1.a, 1.e, 2.a, 6, 9, 10, 11, 15, 17, 20, 21, 30, 31 and 43 of the consolidated financial statements.

45. KONTINJENSI

Saat ini, salah satu entitas anak sedang menghadapi beberapa gugatan perkara hukum terkait pemilikan lahan, sewa lahan dan izin warga di beberapa lokasi menara telekomunikasi milik entitas anak tersebut.

45. CONTINGENCIES

Currently, The Company and a subsidiary is facing several legal cases regarding the land ownership dispute, lease of land and local permit at several location of the telecommunication tower owned by the subsidiary.

Ekshibit E/163

Exhibit E/163

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

45. KONTINJENSI (Lanjutan)

Setelah berkonsultasi dengan penasihat hukum yang menjadi kuasa hukum entitas anak dalam menangani perkara-perkara tersebut, manajemen berkeyakinan akan dapat memenangkan seluruh perkara tersebut. Namun demikian, jika entitas anak tidak memenangkan perkara tersebut, kompensasi tersebut akan dibayarkan oleh entitas anak, kompensansi yang harus dibayarkan seharusnya tidak melebihi Rp 80. Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, perkara-perkara tersebut masih dalam proses persidangan tingkat pertama dan tingkat banding. Manajemen berpendapat, perkara hukum tersebut tidak berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian dan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kedudukan, peranan dan kelangsungan usaha Perusahaan dan entitas anak, sehingga manajemen berpendapat tidak perlu membentuk provisi atas perkara-perkara tersebut.

45. CONTINGENCIES (Continued)

*After consulting with the attorney who appointed as the legal representative of the subsidiary in handling the cases, the management believes that the subsidiary will be able to win the cases. In the event if the subsidiary did not win the case, the compensation shall be borne by the subsidiary, the compensation is unlikely to exceed Rp 80. At the completion date of consolidated financial statement, the legal cases currently are still in process at the he first degree court and at the appeal. In management's opinion, the legal cases have no material impact to the consolidated financial statements, and do not have a significant impact on the position, role and the going concern of the Company and subsidiary, accordingly the management determines not to provide a provision.*

---

46. OTORISASI LAPORAN KEUANGAN

Dewan Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian yang diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 7 Juni 2023.

---

46. AUTHORIZATION OF FINANCIAL STATEMENTS

*The Board of Directors is responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements that were completed and approved for publication on 7 June 2023.*

*This report is originally issued in Indonesian language*

No. : 00531/2.1068/AU.1/06/0117-1/1/VI/2023

No. : 00531/2.1068/AU.1/06/0117-1/1/VI/2023

### Laporan Auditor Independen

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi  
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk  
dan entitas anak  
J a k a r t a**

#### Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Tower Bersama Infrastructure Tbk dan entitas anak ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

#### Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

#### Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

### Independent Auditors' Report

**The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors  
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk  
and subsidiaries  
J a k a r t a**

#### Opinion

*We have audited the consolidated financial statements of PT Tower Bersama Infrastructure Tbk and subsidiaries ("the Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2022, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies.*

*In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at 31 December 2022, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

#### Basis for Opinion

*We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.*

#### Key Audit Matter

*Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, we do not provide a separate opinion on these matters.*

**Hal Audit Utama (Lanjutan)**

Revaluasi aset tetap

Mengacu pada Note 2l dan 10 atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan. Grup telah memilih model revaluasi atas aset tetap tertentu berupa menara telekomunikasi. Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, frekuensi revaluasi bergantung pada perubahan nilai wajar dari aset tetap yang direvaluasi. Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya, maka revaluasi lanjutan disyaratkan.

Kami memfokuskan area ini sebagai hal audit utama karena nilainya sangat material dimana pada tanggal 31 Desember 2022, aset tetap Grup yang mencakup menara telekomunikasi sebesar Rp 33,5 triliun atau 77,6% dari jumlah aset konsolidasian. Selain itu, proses penilaian manajemen sangat memerlukan pertimbangan dan kompleks, serta didasarkan pada asumsi mengenai tingkat diskonto, tingkat inflasi dan umur manfaat aset tetap.

**Bagaimana audit menangani Hal Audit Utama**

- Kami melakukan observasi fisik atas aset tetap tersebut;
- Kami mengevaluasi penilaian manajemen atas nilai tercatat aset tetap revaluasi pada akhir periode pelaporan;
- Kami mereview dan menguji metodologi pengukuran, keakuratan dan keandalan data serta asumsi-asumsi utama yang digunakan oleh penilai independen manajemen dalam menentukan nilai wajar aset tetap;
- Kami mengevaluasi kecukupan pengungkapan Grup dalam laporan keuangan konsolidasian terkait revaluasi aset tetap.

**Hal Lain**

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00259/2.1068/AU.1/06/0117-1/1/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 atas laporan keuangan konsolidasian PT Tower Bersama Infrastructure Tbk dan entitas anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dengan opini tanpa modifikasi. Sehubungan dengan rencana penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan VI Tahap I PT Tower Bersama Infrastructure Tbk dan entitas anak seperti diungkapkan pada Catatan 44 atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas dengan disertai perubahan dan penambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan VI Tahap I PT Tower Bersama Infrastructure Tbk dan entitas anak di Bursa Efek Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam Catatan 44 atas laporan keuangan konsolidasian, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

**Key Audit Matters (Continued)**

Revaluation of property and equipment

*Refer to Notes 2l and 10 in the Company's consolidated financial statements. The Group has chosen the revaluation model for certain property and equipment which is telecommunication towers. In accordance with Indonesian Financial Accounting Standard, the frequency of revaluations depends upon the changes in fair values of the property and equipment being revalued. When the fair value of a revalued asset differs materially from its carrying amount, a further revaluation is required.*

*We focus on this area as a key audit matter due to significant amount involved where the carrying value of these property and equipment as of 31 December 2022 amounted to Rp 33,5 Trillion or 77.6% from the consolidated total assets. In addition, management's assessment process is highly judgmental and complex, and is based on assumptions, specifically discount rate, inflation rate and useful lives of the property and equipment.*

**How our audit addressed the Key Audit Matter**

- *We performed physical observation on these property and equipment;*
- *We evaluate the management's assessment on the revaluation of property and equipment at the end of reporting period;*
- *We review and tested the methodology of measurement, the accuracy and relevance of data as well as the key assumptions used by management's independent appraiser to determine the fair value of the property and equipment;*
- *We evaluated the adequacy of the Group's disclosures on the consolidated financial statements about revaluation of the property and equipment.*

**Other Matter**

*Prior to this report, we have issued an independent auditors' report No. 00259/2.1068/AU.1/06/0117-1/1/III/2023 dated 31 March 2023 on the consolidated financial statement of PT Tower Bersama Infrastructure Tbk and subsidiaries for the year ended 31 December 2022 and expressed an unmodified opinion. In connection with the continuous public offering of continuous Bonds VI Phase I PT Tower Bersama Infrastructure Tbk and subsidiaries as described in Note 44 to the consolidated financial statements, the Company has reissued the consolidated financial statements mentioned above with several changes and additional disclosures on notes to consolidated financial statements.*

*This report is issued in order to be included in the prospectus in connection with the continuous public offering of continuous Bonds VI Phase I PT Tower Bersama Infrastructure Tbk and subsidiaries on the Indonesian Stock Exchange, as described in Note 44 to the consolidated financial statements, and it is not intended and not allowed to be used for other purposes.*

**Informasi Lain**

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor independen ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir tidak mencakup Laporan Tahunan, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas Laporan Tahunan tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, tanggung jawab kami adalah untuk membaca Laporan Tahunan ketika tersedia dan, dalam pelaksanaannya, mempertimbangkan apakah Laporan Tahunan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengkomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat sesuai dengan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

**Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada.

**Other Information**

*Management is responsible for the other information. Other information comprises the information included in the Annual Report, but does not include the consolidated financial statements and our auditor's report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.*

*Our opinion on the accompanying consolidated financial statement does not cover the Annual Report, and accordingly, we do not express any form of assurance on the Annual Report.*

*In connection with our audit of the accompanying consolidated financial statements, our responsibility is to read the Annual Report when it becomes available and, in doing so, consider whether the Annual Report is materially inconsistent with the accompanying consolidated financial statement of our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.*

*When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountant.*

**Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements**

*The Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as the Management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

*In preparing the financial statements, the Management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.*

*Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.*

**Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements**

*Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants will always detect a material misstatement when it exists.*

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian (Lanjutan)**

Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan Audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

**Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (Continued)**

*Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.*

*As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:*

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Management.*
- *Conclude on the appropriateness of Management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian (Lanjutan)**

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengkomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengkomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

**Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (Continued)**

*We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.*

*We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.*

*From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.*

Kantor Akuntan Publik  
TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & Rekan



00531

E. Wisnu Susilo Broto, SE, Ak., M.Ak., CPA, CA  
NIAP AP. 0117/  
License No. AP. 0117

7 Juni 2023/ 7 June 2023



*This report is originally issued in Indonesian language*

No. : 00532/2.1068/AU.1/06/0007-3/1/VI/2023

No. : 00532/2.1068/AU.1/06/0007-3/1/VI/2023

### Laporan Auditor Independen

### Independent Auditors' Report

**Direksi**  
**PT Tower Bersama Infrastructure Tbk**  
**dan entitas anak**  
**Jakarta**

**The Directors**  
**PT Tower Bersama Infrastructure Tbk**  
**and subsidiaries**  
**Jakarta**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Tower Bersama Infrastructure Tbk dan entitas anak, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

*We have audited the consolidated financial statements of PT Tower Bersama Infrastructure Tbk and subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of 31 December 2021, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.*

#### Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

#### Management's responsibility for the consolidated financial statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

*Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

#### Tanggung jawab auditor

#### Auditors' responsibility

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

*Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.*

**Tanggung jawab auditor (Lanjutan)**

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Tower Bersama Infrastructure Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Hal Lain**

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00191/2.1068/AU.1/06/0007-3/1/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 atas laporan keuangan konsolidasian PT Tower Bersama Infrastructure Tbk dan entitas anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dengan opini tanpa modifikasi. Sehubungan dengan rencana penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan VI Tahap I, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut.

**Auditors' responsibility (Continued)**

*An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.*

*We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.*

**Opinion**

*In our opinion, the consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Tower Bersama Infrastructure Tbk and subsidiaries as of 31 December 2021, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

**Other Matter**

*Prior to this report, we have issued an independent auditors' report No. 00191/2.1068/AU.1/06/0007-3/1/III/2022 dated 18 March 2022 on the consolidated financial statement of PT Tower Bersama Infrastructure Tbk and subsidiaries for the year ended 31 December 2021 and expressed an unmodified opinion. In connection with the continuous public offering of continuous Bonds VI Phase I, the Company has reissued the consolidated financial statements.*

**Hal Lain (Lanjutan)**

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan VI Tahap I PT Tower Bersama Infrastructure Tbk dan entitas anak di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

**Other Matter (Continued)**

*This report is issued in order to be included in the prospectus in connection with the continuous public offering of continuous Bonds VI Phase I PT Tower Bersama Infrastructure Tbk and subsidiaries on the Indonesian Stock Exchange, and it is not intended and not allowed to be used for other purposes.*

*Kantor Akuntan Publik  
TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & Rekan*



Sutomo, SE, Ak, MM, CPA, CA, SAS  
NIAP AP.0007/  
License No. AP.0007

7 Juni 2023/ 7 June 2023